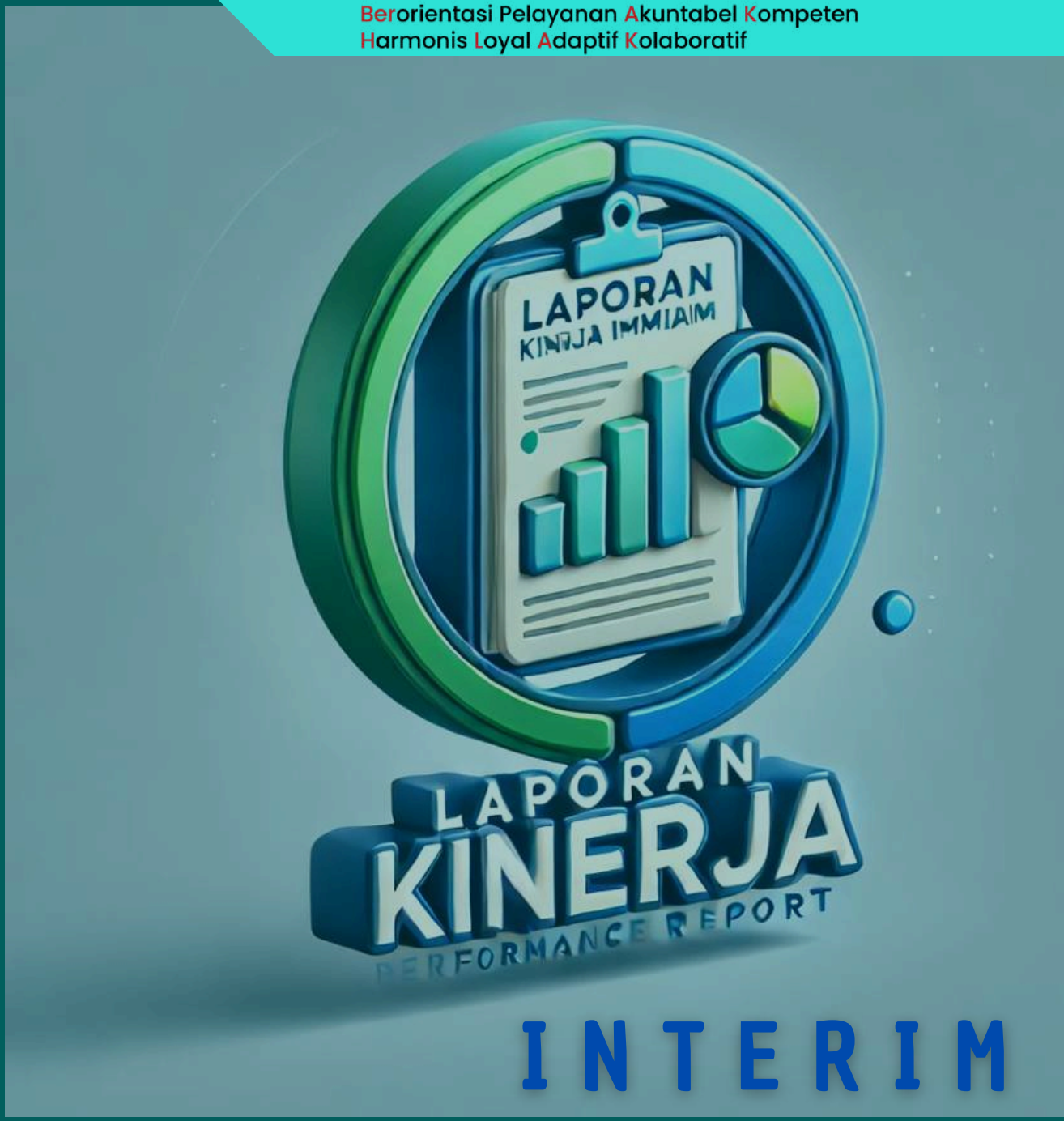
BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

BADAN POM



INTERIM

TW III 2025

BALAI BESAR POM DI SEMARANG



RINGKASAN EKSEKUTIF

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Balai Besar POM di Semarang dapat melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan dengan baik hingga Triwulan III Tahun 2025. Laporan Kinerja Interim ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan program, kegiatan, serta capaian indikator kinerja utama (IKU) yang mendukung sasaran strategis organisasi sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Secara umum, capaian kinerja menunjukkan hasil yang **sangat baik**, dengan **Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 104,83** dan kategori **Istimewa**. Hasil ini menunjukkan bahwa BBPOM di Semarang mampu melampaui target yang telah ditetapkan melalui peningkatan efektivitas pengawasan, penguatan sistem tata kelola, serta sinergi lintas bidang dan lintas sektor dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pelayanan publik. Capaian tersebut selanjutnya dijabarkan secara lebih rinci pada masing-masing Sasaran Kegiatan berikut ini.

Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja BBPOM di Semarang

Capaian NPSK: 105,10 | Kategori: Sangat Baik (Biru)
Capaian kinerja pada sasaran ini menunjukkan hasil yang sangat baik dengan rata-rata capaian indikator sebesar 105,10 persen. Sebagian besar indikator melampaui target yang telah ditetapkan, antara lain tindak lanjut hasil pengawasan oleh stakeholder sebesar 118,09 persen, pengawasan iklan produk 106,47 persen, serta pemeriksaan sarana produksi pangan olahan sebesar 107,11 persen. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas pengawasan lintas sektor serta meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan keamanan, mutu, dan manfaat produk. Beberapa indikator bersifat tahunan seperti pelaporan KTD/ESO, pengendalian AMR, dan pendampingan kabupaten/kota pangan aman sehingga belum dapat disimpulkan capaian kinerjanya. Secara umum, sasaran ini berkontribusi signifikan terhadap peningkatan perlindungan masyarakat dari risiko peredaran produk yang tidak memenuhi standar mutu dan keamanan.

Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

Capaian NPSK: 107,30 | Kategori: Sangat Baik (Biru)
Pelaksanaan pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi menunjukkan capaian yang sangat baik dengan persentase 107,30 persen. Hal ini menunjukkan pelaksanaan pemeriksaan dan pembinaan sarana produksi berjalan efektif serta konsisten sesuai ketentuan. Kinerja ini turut mendukung upaya peningkatan ketersediaan pangan bergizi yang aman bagi masyarakat.

Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya Efektivitas KIE di Masing-Masing Wilayah Kerja BBPOM di Semarang

Capaian NPSK: 105,46 | Kategori: Sangat Baik (Biru)
Capaian sasaran ini mencapai 105,46 persen dengan seluruh indikator utama melebihi target. Efektivitas kegiatan KIE mencapai 101,84 persen, sedangkan jumlah sekolah, desa, dan pasar pangan aman menunjukkan capaian di atas 100 persen. Hasil ini menggambarkan keberhasilan strategi komunikasi dan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran terhadap keamanan pangan dan obat, serta penguatan kolaborasi lintas sektor di daerah.

Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya Pendampingan UMKM dalam Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu

Capaian NPSK: 104,92 | Kategori: Sangat Baik (Biru)
Sasaran ini menunjukkan capaian 104,92 persen dengan indikator utama yaitu persentase UMKM yang memperoleh rekomendasi sertifikat Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) melampaui target. Hasil ini mencerminkan efektivitas kegiatan pendampingan dan bimbingan teknis dalam meningkatkan kepatuhan pelaku UMKM terhadap standar keamanan dan mutu produk.

Sasaran Kegiatan 5: Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja BBPOM di Semarang

Capaian NPSK: 101,43 | Kategori: Sangat Baik (Biru)
Capaian kinerja penyidikan terhadap pelanggaran di bidang obat dan makanan mencapai 101,43 persen. Hasil ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan penyidikan sesuai ketentuan serta peningkatan koordinasi dengan aparat penegak hukum. Upaya penindakan yang cepat dan tepat turut memperkuat fungsi pengawasan dalam menekan peredaran produk ilegal.

Sasaran Kegiatan 6: Terlaksananya Kegiatan Pemantauan Siber dan Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif

Capaian NPSK: 100,00 | Kategori: Sangat Baik (Biru)
Pemantauan siber terlaksana secara optimal dengan capaian 100 persen. Seluruh laporan analisis kejahatan terselesaikan sesuai standar dan tepat waktu. Hal ini menunjukkan kesiapan serta keandalan sistem deteksi dini dalam mengidentifikasi potensi pelanggaran di ranah digital.

Sasaran Kegiatan 7: Layanan Publik BBPOM di Semarang yang Prima

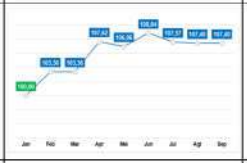
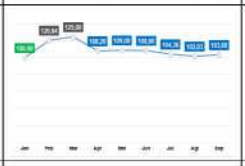
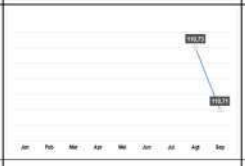
Capaian NPSK: - | Kategori: Tidak Dapat Disimpulkan (Abu-abu)
Indeks Pelayanan Publik bersifat tahunan sehingga belum dapat diukur pada Triwulan III. Meskipun demikian, kegiatan pelayanan publik tetap berjalan baik dengan penerapan digitalisasi layanan, sistem antrean online, serta peningkatan mekanisme pengaduan masyarakat sebagai bagian dari komitmen BBPOM di Semarang terhadap pelayanan prima.

Sasaran Kegiatan 8: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Unit Organisasi yang Optimal

Capaian NPSK: - | Kategori: Tidak Dapat Disimpulkan (Abu-abu)
Beberapa indikator seperti Nilai Pembangunan Zona Integritas, Nilai AKIP, Nilai Kinerja Anggaran, dan Indeks Manajemen Risiko belum terealisasi karena merupakan target tahunan. Namun demikian, kegiatan penguatan tata kelola, monitoring kinerja, dan penyusunan laporan telah dilaksanakan sesuai jadwal, termasuk pelaksanaan Desk SAKIP dan evaluasi pelaporan internal.

Secara keseluruhan, pelaksanaan kinerja BBPOM di Semarang sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 menunjukkan hasil yang **sangat baik** dengan **Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 104,83** dan kategori **Istimewa**. Seluruh sasaran kegiatan operasional utama berhasil melampaui target, menunjukkan efektivitas pengawasan, pembinaan, dan pelayanan publik. Meskipun beberapa indikator tahunan belum dapat disimpulkan, capaian hingga TW III menegaskan konsistensi dan komitmen BBPOM di Semarang dalam mewujudkan sistem pengawasan obat dan makanan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi hasil.

NO	IKU	Ketercapaian Target 2025	NO	IKU	Ketercapaian Target 2025
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Target Tahunan
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Target Tahunan	16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	

NO	IKU	Ketercapaian Target 2025	NO	IKU	Ketercapaian Target 2025
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar		18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		19	Jumlah desa pangan aman	
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder		20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Semarang	
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		24	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Semarang	Target Tahunan
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan		25	Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Semarang	Target Tahunan
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar		26	Nilai AKIP BBPOM di Semarang	Target Tahunan
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Target Tahunan	27	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang	Target Tahunan
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		28	Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Semarang	Target Tahunan

Berdasarkan hasil pemantauan hingga Triwulan III Tahun 2025, sebagian besar indikator kinerja menunjukkan capaian yang on the track, dengan nilai realisasi mendekati atau bahkan melampaui target tahunan. Kinerja bidang pengawasan tercatat sangat baik, di mana sebagian besar indikator melampaui 100% dari target, mencerminkan efektivitas pelaksanaan pengawasan dan meningkatnya kepatuhan pelaku usaha. Indikator seperti tindak lanjut sampel berisiko, keputusan hasil pengawasan, serta pemeriksaan sarana produksi dan distribusi menunjukkan capaian konsisten di atas target. Selain itu, indikator bidang KIE dan pendampingan UMKM juga menunjukkan tren positif, menandakan meningkatnya sinergi lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat.

Pada bidang penindakan dan deteksi kejahatan, Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Persentase Laporan Analisis Kejahatan diproyeksikan tercapai sesuai target, dengan capaian stabil satu laporan per bulan dan estimasi 14 laporan hingga akhir tahun. Sementara itu, terdapat delapan indikator kinerja utama (IKU) yang belum dapat diketahui proyeksinya karena bersifat tahunan, sehingga realisasi kinerjanya baru dapat dievaluasi secara komprehensif pada akhir tahun 2025.

Selama periode Triwulan III, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), yang disebabkan oleh adanya Efisiensi Anggaran dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Revisi tersebut sebagai berikut

1. Revisi 01 DIPA pada Sekretaris Utama Badan POM, tanggal 10 Februari 2025, berupa Pemblokiran Mandiri Dalam Rangka Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA 2025.
2. Revisi 02 DIPA pada Sekretaris Utama Badan POM, tanggal 10 Februari 2025, tanggal 19 Februari 2025, berupa Penyesuaian Besaran Anggaran Hasil Rekonstruksi Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA.2025.
3. Revisi 03 DIPA pada Sekretaris Utama Badan POM, tanggal 21 Maret 2025, berupa Revisi Optimalisasi Anggaran Belanja Modal untuk Pemenuhan Honorarium PPNPN TA.2025.
4. Revisi 04 DIPA pada Sekretaris Utama Badan POM, tanggal 09 April 2025, berupa Revisi Relaksasi Pemanfaatan Blokir Anggaran TA.2025.
5. Revisi 05 DIPA tgl 14 April 2025 berupa Pemutakhiran data hasil revisi POK
6. Revisi 06 DIPA tgl 21 April 2025 berupa Pemutakhiran data hasil revisi POK dan Revisi Halaman III DIPA.
7. Revisi 07 DIPA tgl 15 Mei 2025 berupa Pemutakhiran data hasil revisi POK
8. Revisi 08 DIPA tgl 30 Juni 2025

Setelah mengalami revisi tersebut di atas, pada akhir triwulan III tahun 2025, DIPA BBPOM di Semarang masih sebesar Rp. 31.429.448.000,- (Pagu awal 53.693.128.000 – Blokir 22.263.680.000,-)

Realisasi s.d 30 September 2025 yaitu sebesar Rp. 22.684.504.875,- (Dua puluh dua miliar enam ratus delapan puluh empat juta lima ratus empat ribu delapan ratus tujuh puluh lima.) sebesar 72,18% dari Pagu – Blokir atau 42.25% dari Pagu awal. Penyerapan anggaran masih berada dalam batas toleransi yang ditetapkan, menandakan pengelolaan anggaran yang efisien dan seimbang antara output dan penggunaan dana.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang Triwulan III Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan tepat waktu.

Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja serta pencapaian visi dan misi Balai Besar POM di Semarang selama Triwulan III Tahun 2025. Penyusunan laporan ini mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang *Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)* serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang *Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja*.

Laporan ini bertujuan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja, sehingga dapat menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Balai Besar POM di Semarang. Di dalamnya disajikan capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan, serta perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan selama Triwulan III Tahun 2025. Hasil laporan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi yang konstruktif dalam upaya peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Pada periode pelaporan ini, Balai Besar POM di Semarang juga menampilkan inovasi unggulan, yaitu *PIJAR MENTARI* dan *GUMREGAH PLUS*. PIJAR MENTARI (Pendampingan Izin Edar Menuju UMKM Pintar dan Mandiri) merupakan program pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memperoleh izin edar produk secara lebih mudah, cepat, dan terstruktur. GUMREGAH PLUS merupakan pengembangan dari program sebelumnya yang berfokus pada pembinaan UMKM agar senantiasa menggunakan bahan pangan yang aman serta bebas dari bahan berbahaya seperti formalin, rhodamin B, dan *methanyl yellow.*

Melalui Laporan Kinerja Interim Triwulan III Tahun 2025 ini, diharapkan dapat tersaji informasi yang bermanfaat mengenai hasil kerja yang telah dicapai, serta menjadi dasar dalam penyusunan strategi perbaikan dan peningkatan kinerja pada triwulan selanjutnya. Semoga laporan ini dapat menjadi langkah nyata dalam mewujudkan peran Balai Besar POM di Semarang sebagai institusi pengawas obat dan makanan yang profesional, berintegritas, dan terpercaya di wilayah kerja Jawa Tengah.

Semarang, 20 Oktober 2025
Kepala BBPOM di Semarang



Dra. Rustyawati, Apt, M.Kes.(Epid)

DAFTAR ISI

Contents

RINGKASAN EKSEKUTIF i
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Gambaran Umum Organisasi 1
1.3 Struktur Organisasi 3
1.4 Isu Strategis BBPOM di Semarang Tahun 2025 5
1.1.1. Analisis Lingkungan Strategis 6
1.1.1.1. Internal 6
1.1.1.2. Eksternal 9
1.1.1.2.1. Isu Strategis 9
Bab II PERENCANAAN KINERJA 18
2.1 Rancangan Rencana Strategis 2025-2029 18
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2025 18
2.3 Perjanjian Kinerja 2025 19
2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) 22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 36
3.1 CAPAIAN KINERJA TRIWULAN (TW) III 36
SK 1. Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang 39
SK 2. Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi 89
SK 3. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Semarang 92
SK 4. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu 106
SK 5. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Semarang 109
SK 6. Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif 113
SK 7. Layanan Publik BBPOM di Semarang yang Prima 116

SK 8. Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal..... 121
3.2 TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI LAKIP 2024..... 140
3.3 REALISASI ANGGARAN 140
3.4 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN..... 142
BAB IV Penutup..... 148
4.1 KESIMPULAN..... 148
4.2 SARAN..... 152
LAMPIRAN 153

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tahun 2025 menjadi awal pelaksanaan *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional* (RPJMN) 2025–2029 yang merupakan tahap penting menuju terwujudnya visi *Indonesia Emas 2045*. RPJMN ini menekankan pentingnya transformasi di berbagai sektor pembangunan, antara lain penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pembangunan kesehatan masyarakat sebagai fondasi utama pembangunan nasional. Salah satu prioritas nasional yang diamanatkan adalah peningkatan kualitas kesehatan dan perlindungan masyarakat melalui penguatan sistem pengawasan obat dan makanan.

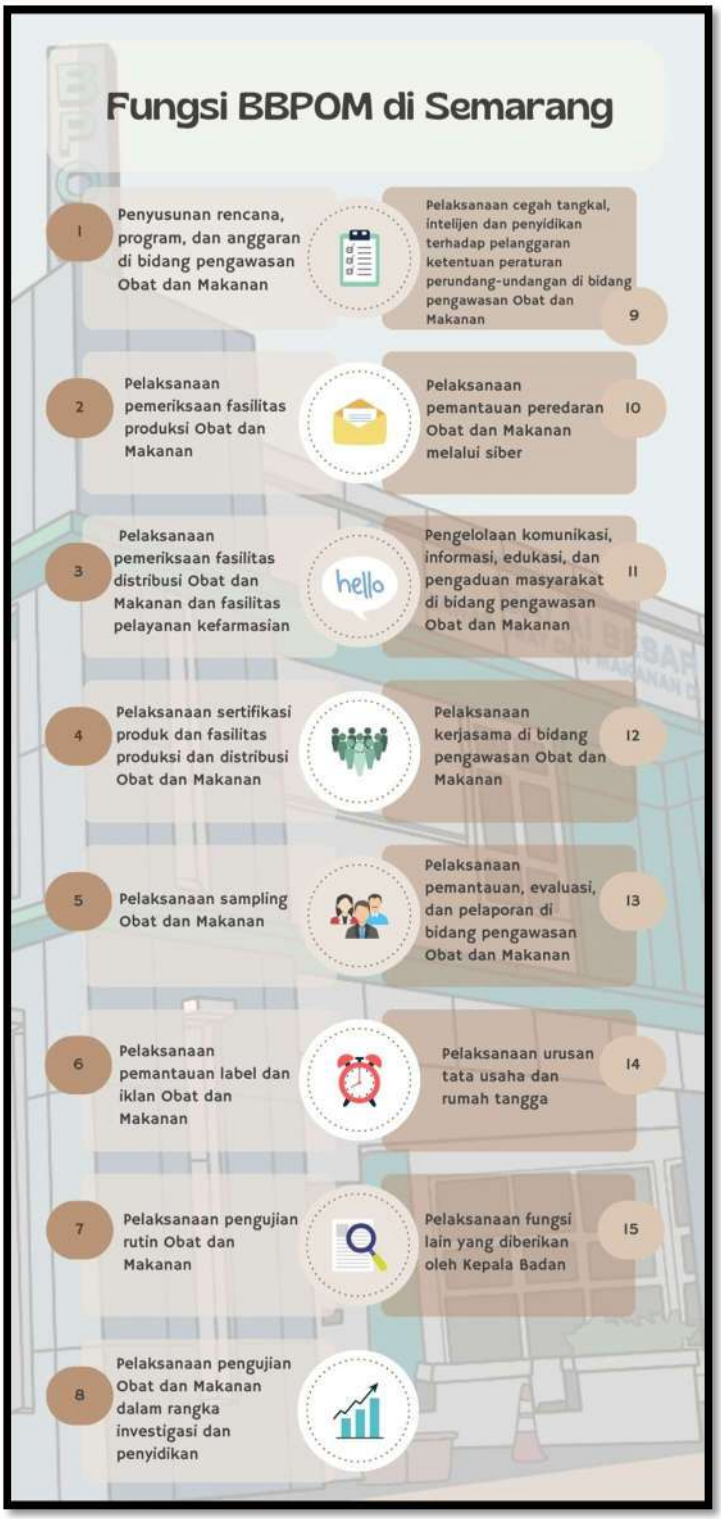
Dalam konteks tersebut, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memegang peran strategis sebagai lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab menyelenggarakan pengawasan terhadap obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. BPOM memiliki mandat untuk memastikan seluruh produk yang beredar di Indonesia memenuhi standar keamanan, mutu, dan manfaat, serta melindungi masyarakat dari potensi risiko kesehatan akibat produk yang tidak sesuai ketentuan.

Sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam RPJMN 2025–2029, pada tahun 2025 BPOM memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsinya melalui berbagai langkah strategis, antara lain penyusunan dan implementasi kebijakan pengawasan obat dan makanan, penetapan norma serta standar pengawasan, pelaksanaan pengawasan pra dan pasca peredaran produk, hingga penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang pengawasan obat dan makanan. Selain itu, BPOM juga berupaya meningkatkan efektivitas pengelolaan dana operasional pengawasan melalui penerapan regulasi baru yang menekankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program prioritas.

Dengan demikian, pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Semarang pada Triwulan I Tahun 2025 tidak hanya menjadi bagian dari upaya perlindungan kesehatan masyarakat, tetapi juga merupakan kontribusi nyata dalam mendukung pencapaian sasaran strategis RPJMN 2025–2029, khususnya dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kriteria Klarifikasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. BBPOM di Semarang merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri dalam melaksanakan tugas teknis operasional



tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan, berkedudukan di Jalan Sukun Raya No. 41 A Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah, Telp : (024) 7613761, 7613768, 7612328, 7612324 (ULPK), Fax (024) 7613633, Email likpomsm@yahoo.com, website www.pom.go.id

BBPOM di Semarang dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan POM, yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

Dalam menjalankan fungsinya, BBPOM di Semarang mengacu pada Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dimana fungsi yang dijalankan meliputi:

Sesuai dengan Peraturan Badan POM Nomor 19 tahun 2023 tentang Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan, terdapat 3 Unit Pelaksana Teknis (UPT) di wilayah Provinsi Jawa Tengah, yaitu

1. Balai Besar POM di Semarang dengan cakupan Kota Semarang, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Demak, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Klaten, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kendal, Kabupaten Magelang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Batang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Kudus, Kabupaten Blora, Kota Magelang, Kota Pekalongan, Kota Salatiga, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang
2. Balai POM di Surakarta dengan cakupan Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri
3. Balai POM di Banyumas dengan cakupan Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga

Dalam melaksanakan tugasnya, BBPOM di Semarang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik internal maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

1.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi dan Tata Kerja BBPOM di Semarang disusun berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (BBPOM di Semarang) di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Struktur organisasi BBPOM di Semarang per Januari 2024 Struktur organisasi BBPOM di Semarang terdiri atas:

a. Kepala;
b. Bagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.



Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai Struktur Organisasi BBPOM di Semarang adalah sebagai berikut:

1. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas antara lain:

melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
c. Pengelolaan persuratan dan kearsipan;
d. Pengelolaan tata laksana dan administrasi penjaminan mutu;
e. Pelaksanaan urusan pengelolaan kepegawaian;
f. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
g. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

Susunan organisasi Bagian Tata Usaha terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri

2. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas, kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi. Tim kerja terdiri atas:

a. ketua tim; dan
b. anggota tim.

Ketua tim berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas. Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.4 Isu Strategis BBPOM di Semarang Tahun 2025

BBPOM di Semarang memberikan dukungan terhadap kinerja Badan POM dan pembangunan di Jawa Tengah, serta mendukung tugas dan fungsi instansi terkait dalam upaya perlindungan masyarakat. Dalam menjaga masyarakat dari risiko obat dan makanan yang membahayakan kesehatan, BBPOM di Semarang melaksanakan sistem pengawasan yang komprehensif mulai dari sebelum produk masuk pasar hingga kontrol pasca-pasar, yang dilengkapi dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Jawa Tengah.

Kapasitas BBPOM di Semarang sebagai unit kerja pengawas Obat dan Makanan masih perlu terus dilakukan penataan dan penguatan, baik secara kelembagaan maupun dukungan regulasi yang dibutuhkan, terutama peraturan perundang-undangan yang menyangkut peran dan tugas agar pencapaian kinerja di masa datang semakin optimal dan dapat memastikan berjalannya proses pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif dan efisien dalam mengontrol keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

Terdapat 3 (tiga) strategi BBPOM di Semarang dalam melaksanakan peran dan kewenangannya, yaitu:

a. Penguatan sistem dalam pengawasan Obat dan Makanan
b. Peningkatan pembinaan dan bimbingan dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha Obat dan Makanan, serta peningkatan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat
c. Penguatan kapasitas kelembagaan BBPOM di Semarang

Strategi BBPOM di Semarang, antara lain:

1. Penguatan pengawasan Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko
2. Penguatan pengelolaan SDM BBPOM di Semarangberbasis sistem merit.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalampengawasan Obat dan Makanan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.
6. Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.
7. Penguatan pengujian, dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BBPOM di Semarang termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publikberbasis elektronik.

9. Penguatan pengelolaan sarana prasarana/infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

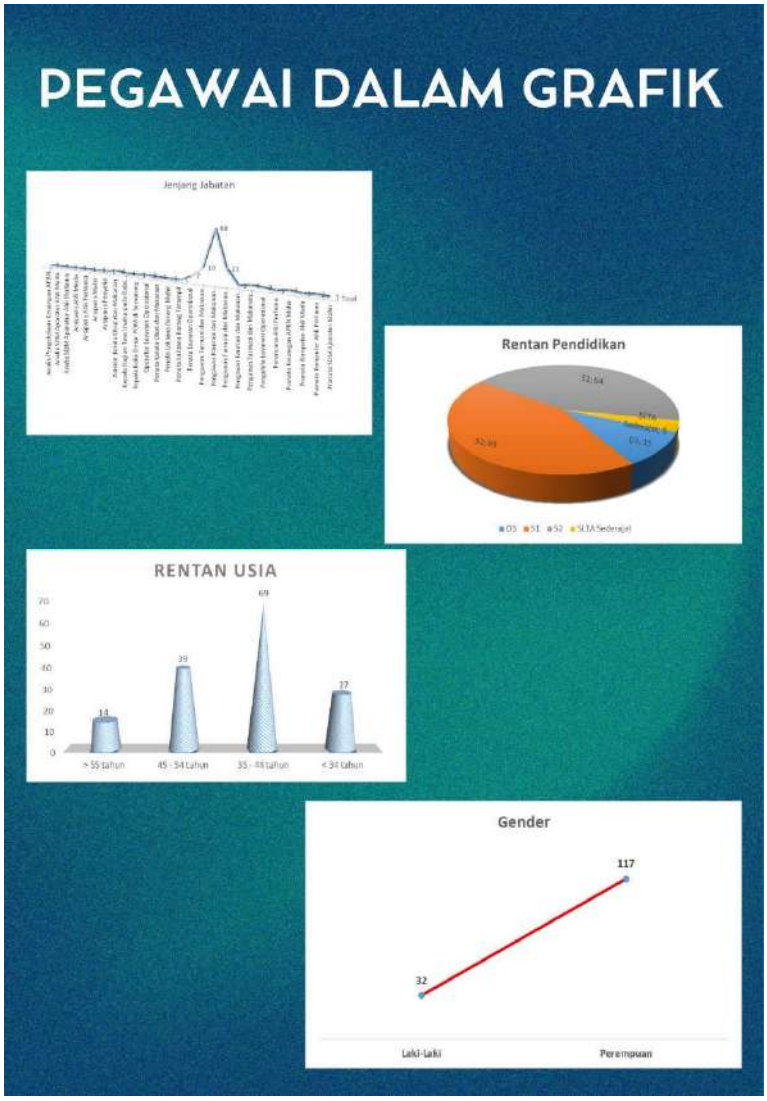
Pelaksanaan tugas dan fungsi BBPOM di Semarang dalam upaya penguatan pelaksanaan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan perlu didukung lintas sektor terkait meliputi peningkatan kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi.

1.1.1. Analisis Lingkungan Strategis

1.1.1.1. Internal

BBPOM di Semarang dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan di wilayah Provinsi Jawa Tengah didukung oleh:

a. Sumber Daya Manusia (SDM)



Pada Rancangan Renstra BBPOM di Semarang 2025-2029, BBPOM di Semarang telah memetakan kebutuhan SDM berdasarkan ABK dimana untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan secara memadai dibutuhkan pegawai sebanyak 201 orang. Seiring dengan perubahan Organisasi dan Tata Kerja mengacu Peraturan BPOM nomor 22 tahun 2020 serta berbagai perubahan lingkungan strategis yang terjadi BBPOM di Semarang memandang perlu menambah jumlah SDM dengan jenis kepegawaian PPPK sehingga dapat memberikan ruang bagi SDM professional untuk menjadi bagian dalam pengawasan obat dan makanan yang lebih baik. Pada tahun 2023 BBPOM di Semarang telah mengajukan usulan kebutuhan PPPK Tahun 2024 sejumlah 10 formasi dengan sebaran jabatan antara lain Pengawas Farmasi dan Makanan, Arsiparis, Pranata Komputer, Penata Layanan Operasional dan Pengelola Layanan Operasional. Untuk saat ini jumlah SDM BBPOM di Semarang per 28 September 2025 adalah 149 orang dengan persentase 22% laki-laki serta 78% perempuan. Terkait kendala yang dihadapi dalam pengelolaan SDM BBPOM di Semarang, salah satu yang menjadi isu utama adalah upaya meningkatkan Indeks Profesonalitas ASN yang pada tahun 2024 memperoleh angka 87,79. Penurunan nilai IP ASN BBPOM di Semarang dibandingkan tahun 2023 disebabkan terdapat perubahan cara perhitungan, utamanya pada dimensi kualifikasi yang memperhitungkan persyaratan jabatan dan dimensi kompetensi yang berdasarkan predikat kinerja dan riwayat pengembangan kompetensi. Terkait hal tersebut, BBPOM di Semarang berupaya melakukan pemetaan pegawai yang masih memiliki potensi untuk dilakukan peningkatan nilai dimensi kualifikasi melalui peningkatan Pendidikan. Saat ini BBPOM di

Semarang masih memiliki 20 orang pegawai dengan Pendidikan di bawah S1, atau secara persentase 13.42 % dari keseluruhan pegawai. Disamping itu juga peningkatan nilai dimensi kompetensi dengan memberikan penugasan kepada jabatan struktural/fungsional/ pelaksana untuk mengikuti diklat kepemimpinan/diklat fungsional, diklat teknis 20 JP dan mengikuti seminar/workshop/sejenisnya.

No	Jabatan	Jumlah SDM berdasar				Gap	
		ABK		**ABK Bezzeting**			
1	Kepala BBPOM di Semarang	1	Orang	1	Orang	0	Orang
2	Kepala Bagian Tata Usaha pada BBPOM di Semarang	1	Orang	1	Orang	0	Orang
3	Pengawas Farmasi dan Makanan	161	Orang	116	Orang	45	Orang
4	Arsiparis	7	Orang	3	Orang	4	Orang
5	Pranata Komputer	6	Orang	2	Orang	4	Orang
6	Analis Pengelolaan Keuangan APBN	3	Orang	1	Orang	2	Orang
7	Analis Anggaran	1	Orang	0	Orang	1	Orang
8	Penata Laksana Barang	4	Orang	1	Orang	3	Orang
9	Perencana	6	Orang	1	Orang	5	Orang
10	Analis SDM Aparatur	2	Orang	1	Orang	1	Orang
11	Pranata SDM Aparatur	2	Orang	1	Orang	1	Orang
12	Pranata Keuangan APBN	7	Orang	3	Orang	4	Orang
Total		**201**	**Orang**	**129**	**Orang**	**72**	**Orang**

b. Anggaran

Sumber anggaran pelaksanaan program/kegiatan BBPOM di Semarang keseluruhan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 53.902.531.000

Total pagu Anggaran Tahun 2025 : Rp. 53.902.531.000,-

Realisasi anggaran s.d 30 September 2025: Rp. 22.686.053.214,-

Persentase realisasi anggaran sebesar 42.09% dari alokasi anggaran Tahun 2025 dan sebesar 77,80% dari total pagu – blokir.

Peranan BBPOM di Semarang sebagai institusi yang memberikan jasa layanan kepada masyarakat, maka sesuai Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2010, BBPOM di Semarang mendapatkan PAGU Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2025 sebesar : Rp. 959.000.000,-.

Penerimaan PNBP berasal dari pelayanan BBPOM di Semarang kepada pihak ketiga atas permintaan untuk pengujian laboratorium, penerbitan Surat Keterangan Impor (SKI), dan Surat Keterangan Ekspor (SKE).

1.1.1.2. Eksternal

Wilayah kerja BBPOM di Semarang, meliputi:



1.1.1.2.1. Isu Strategis

Seiring perkembangan yang terjadi di Indonesia khususnya di wilayah Jawa Tengah pada tahun 2025, beberapa isu strategis yang dapat berpengaruh pada kinerja Balai Besar POM di Semarang, antara lain:

1. **Sumber Daya Manusia yang dimiliki**

   Pengisian kekosongan atau *gap* sumber daya manusia (SDM) di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Semarang dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, antara lain melalui rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), mutasi, promosi jabatan, serta perpanjangan batas usia pensiun (BUP). Upaya tersebut bertujuan untuk memastikan ketersediaan SDM yang memadai, baik dari segi jumlah maupun kompetensi, sehingga pelaksanaan tugas pengawasan obat dan makanan dapat berjalan secara optimal.

   Dengan tantangan pengawasan yang semakin kompleks dan dinamika lingkungan strategis yang terus berkembang, BBPOM di Semarang

dituntut untuk senantiasa meningkatkan kompetensi SDM serta melakukan perencanaan kebutuhan SDM secara berkelanjutan. Peningkatan kapasitas ini menjadi langkah penting dalam memperkuat sistem pengawasan, khususnya dalam menghadapi berbagai modus pelanggaran di bidang obat dan makanan yang semakin beragam dan canggih.

Oleh karena itu, BBPOM di Semarang perlu melakukan penambahan jumlah SDM sesuai kebutuhan, disertai dengan penerapan strategi pengembangan pegawai yang tepat agar tidak terjadi kekosongan pada posisi-posisi strategis. Selain penguatan kompetensi teknis, peningkatan *soft competency* juga menjadi hal yang krusial untuk membentuk pegawai dan pemimpin yang adaptif, profesional, serta matang dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan di bidang pengawasan obat dan makanan.

BPOM telah mengembangkan aplikasi IDEAS (Integrated Development and Training Information System) yang merupakan platform pengembangan kompetensi digital yang terintegrasi dengan https://siasn.pom.go.id yang memfasilitasi pegawai untuk mengikuti pembelajaran secara online kapanpun dan dimanapun, serta aplikasi SIMPHONI yang merupakan platform knowledge management di lingkungan BPOM. Kedua aplikasi ini dikembangkan untuk meningkatkan kompetensi pegawai secara mandiri.

Kekuatan SDM BBPOM di Semarang per 30 September 2025 adalah 149 orang, diantaranya masih terdapat 13.42% pegawai dengan jenjang pendidikan non sarjana. Berdasarkan pemetaan kebutuhan SDM berdasarkan ABK BBPOM di Semarang Tahun 2025-2029 dibutuhkan pegawai sebanyak 201 orang.

2. **Regionalisasi Laboratorium**

Konsep regionalisasi laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) telah diterapkan sejak tahun 2022 dan terus mengalami penyempurnaan secara berkelanjutan. Upaya penyempurnaan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas laboratorium sesuai dengan tugas serta ruang lingkup pengawasan yang diemban. Peningkatan tersebut diukur melalui pemenuhan *Standar Kemampuan Laboratorium* Badan POM sebagai indikator mutu dan kinerja laboratorium. Sistem regionalisasi tidak hanya berfokus pada pemenuhan standar yang berlaku saat ini, tetapi juga dirancang untuk menghadapi tantangan pengawasan di masa depan melalui pemanfaatan teknologi modern guna mendukung proses pengujian yang lebih cepat, akurat, dan efisien.

Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 100 Tahun 2025, Balai Besar POM di Semarang ditetapkan sebagai Laboratorium Regional

untuk wilayah Regional Semarang. Wilayah ini mencakup sembilan Balai Besar dan Balai POM, yaitu Balai Besar POM di Jakarta, Balai Besar POM di Serang, Balai Besar POM di Bandung, dan Balai Besar POM di Yogyakarta, serta Balai POM di Tangerang, Balai POM di Bogor, Balai POM di Tasikmalaya, Balai POM di Surakarta, dan Balai POM di Banyumas. Sebagai Laboratorium Regional, BBPOM di Semarang memiliki sumber daya manusia penguji yang kompeten serta kapasitas pengujian yang unggul, didukung oleh peralatan laboratorium berteknologi tinggi seperti LCMS/MS, Ion Chromatography, Spectrofluorometer, DUSA, serta fasilitas pengujian unggulan untuk obat antineoplastik, uji sterilitas, dan analisis DNA.

Penguatan sistem regionalisasi laboratorium terus dilakukan melalui digitalisasi sistem informasi, perluasan ruang lingkup pengujian berbasis risiko, serta pembinaan dan pendampingan terhadap laboratorium lain dalam satu wilayah regional. Langkah ini diharapkan mampu menjadikan laboratorium Badan POM sebagai pusat pengujian yang andal, memenuhi standar internasional, serta menjadi fondasi utama bagi penyelenggaraan pengawasan obat dan makanan yang lebih efektif, responsif, dan merata di seluruh Indonesia.

3. **Percepatan Penurunan Stunting di Jawa Tengah**

   Pada tahun 2025, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan penurunan angka stunting menjadi 18,8%, setelah sebelumnya angka stunting berada pada kisaran 20,8% pada tahun 2022, 20,7% pada tahun 2023, dan 20% pada tahun 2024. Target tersebut ditetapkan agar penurunan prevalensi stunting di Jawa Tengah dapat tercapai lebih cepat dari target nasional tahun 2025. Untuk mewujudkan hal ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama BKKBN dan berbagai pemangku kepentingan telah melaksanakan berbagai intervensi, antara lain perbaikan gizi, peningkatan sanitasi, serta penguatan koordinasi lintas sektor.

   Program percepatan penurunan stunting di Jawa Tengah tahun 2025 difokuskan pada 20 kabupaten/kota prioritas, dengan strategi utama berupa penguatan koordinasi lintas sektor, intervensi terarah, dan pelibatan aktif masyarakat. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Dinas Kesehatan melakukan evaluasi dan penguatan program gizi ibu dan anak, serta mendorong sinkronisasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kader Posyandu. Intervensi juga dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai mitra, seperti Tanoto Foundation dan UNICEF, melalui program *Rumah Anak SIGAP* serta kampanye perubahan perilaku.

   Saat ini, tercatat sekitar 485 ribu anak di Jawa Tengah mengalami stunting. Untuk mempercepat penurunan angka tersebut, Pemerintah

Provinsi Jawa Tengah dan BKKBN membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang tersebar di 35 kabupaten/kota, 576 kecamatan, dan 8.562 desa/kelurahan.

Dalam mendukung upaya tersebut, Balai Besar POM di Semarang berperan aktif melalui berbagai program strategis yang berfokus pada peningkatan keamanan dan mutu pangan, sebagai salah satu faktor penting dalam pencegahan stunting. Salah satu bentuk kontribusinya adalah melalui kerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Semarang dan Tim Penggerak PKK, dengan melakukan edukasi kepada pedagang tentang pentingnya keamanan pangan serta uji cepat terhadap produk yang diduga mengandung bahan berbahaya seperti formalin. Program ini juga melibatkan kader keamanan pangan di tingkat RT/RW untuk memastikan pangan yang beredar di masyarakat aman dan bergizi.

Selain itu, BBPOM di Semarang melaksanakan pengawasan produk pangan melalui uji cepat (*rapid test kit*) terhadap bahan berbahaya pada produk pangan, seperti formalin pada mie basah, serta melakukan edukasi dan pendampingan kepada pedagang terkait penerapan prinsip higienis dan sanitasi yang baik. Upaya ini diperkuat melalui kegiatan edukasi publik, baik dalam bentuk Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) maupun pelatihan bagi kader keamanan pangan, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pangan aman, sehat, dan bergizi dalam mencegah stunting.

Meskipun BPOM tidak menyelenggarakan Program Makanan Bergizi Seimbang (MBG) secara langsung, lembaga ini berperan penting dalam mendukung keberhasilan program tersebut melalui pengawasan keamanan dan mutu pangan, edukasi masyarakat, serta pembinaan pelaku usaha pangan lokal. Dengan demikian, pelaksanaan Program MBG dapat berjalan tidak hanya murah dan merata, tetapi juga aman dan bergizi.

Selain itu, program fortifikasi pangan juga menjadi salah satu strategi pemerintah dalam meningkatkan akses terhadap pangan bergizi. Hingga saat ini, pemerintah telah menetapkan tiga jenis pangan wajib fortifikasi, yaitu garam konsumsi, tepung terigu, dan minyak goreng sawit. Pengawasan terhadap pangan wajib fortifikasi dilakukan melalui dua mekanisme, yakni pre-market control dan post-market control. *Pre-market control* menekankan pemenuhan *Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)* di tingkat produksi, serta pemantauan terhadap jenis dan kadar fortifikan yang ditambahkan saat proses registrasi izin edar. Sementara *post-market control* dilakukan melalui kegiatan sampling dan pengujian produk yang beredar di pasaran.

Penurunan prevalensi stunting pada balita masih menjadi agenda prioritas nasional yang merupakan *major project* pemerintah.

Mengingat sifatnya yang multi-dimensional, penanganan stunting memerlukan langkah-langkah yang strategis, efektif, dan efisien, dengan dukungan lintas sektor yang konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas. Sejalan dengan hal tersebut, Presiden telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, yang mengamanatkan pelaksanaan dua jenis intervensi, yaitu intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Intervensi spesifik diarahkan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya stunting, sedangkan intervensi sensitif ditujukan untuk menangani penyebab tidak langsung, antara lain melalui peningkatan akses terhadap pangan yang aman, sehat, dan bergizi.

4. **Dukungan UMKM**

   Pendampingan yang dilakukan Balai Besar POM di Semarang untuk UMKM Pangan Olahan sangat menbantu dan mendukung untuk UMKM menaikkan grading yang lebih tinggi, dengan tujuan memperluas distribusi produk. Pendampingan Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik dilakukan secara konsisten oleh Pelaku usaha UMKM. Menigkatkan pemahaman terkait proses Izin Penerapan CPPOB, Label Pangan Olahan sesuai ketentuan dan pendampingan proses daftar produk, yang sering dikeluh kesahkan terutama Pelaku Usaha UMKM. Selain sebagai pencapaian kinerja Balai Besar POM di Semarang, kegiatan ini diharapkan menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya para pelaku UMKM pangan dan dapat memberikan bukti nyata dukungan bagi UMKM sehingga secara tidak langsung juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di era pemulihan ekonomi sekarang ini. Diharapkan pada tahun 2025, Balai Besar POM di Semarang dapat melakukan lebih banyak pendampingan terhadap produk-produk UMKM di provinsi Jawa Tengah

5. **Penegakan hukum tindak pidana Obat dan Makanan Ilegal di Jawa Tengah**

   Dengan adanya perdagangan bebas, masalah kejahatan obat dan makanan semakin kompleks. Untuk merespons dan mengantisipasi modus kejahatan yang semakin berkembang, terutama dengan meningkatnya pelanggaran di bidang obat dan makanan secara online, BBPOM Semarang harus bekerja sama dengan lintas sektor terkait. Tidak mungkin untuk menerapkan hukum kejahatan obat dan makanan yang ideal secara mandiri. Oleh karena itu, upaya kolaboratif dengan pendekatan penyesuaian bersama antara BPOM dan sistem hukum kejahatan (CJS) harus diperkuat untuk mengantisipasi dan merespons modus kejahatan obat dan makanan yang berkembang.Dalam beberapa

kasus, Balai Besar POM di Semarang dan Kepolisian Daerah Jawa Tengah bekerja sama dengan Direskrimsus dan Diresnarkoba untuk memberikan keterangan ahli, membantu pemeriksaan laboratorium, melakukan pengawasan, dan menjaga keamanan obat dan makanan.

Dalam penegakan hukum tindak pidana terkait Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Pangan, Perlindungan Konsumen, Psikotropika, dan Narkotika, ada beberapa bentuk sinergi antara Balai Besar POM di Semarang dan Kepolisian Daerah Jawa Tengah, di mana Direskrimsus dan Diresnarkoba membantu POLRI dalam memberikan keterangan ahli, bantuan pemeriksaan laboratorium, pengawasan, dan penertiban obat dan makanan.

6. **Meningkatnya Peredaran Terkait Penjualan Obat dan Makanan yang Berisiko terhadap Kesehatan Secara Online**

   Meskipun "UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan" dan "Peraturan BPOM No. 4 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian" telah menetapkan dasar hukum untuk peredaran obat dan makanan, peredaran obat dan makanan secara online masih tumbuh dengan cepat, menurut survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Selain itu, ini membuka peluang untuk penjualan barang ilegal seperti obat, suplemen makanan, obat tradisional, kosmetik, dan makanan. Dengan demikian, salah satu fokus pengawasan BPOM adalah pengendalian penjualan produk ilegal yang dijual secara online. BBPOM Semarang telah melakukan lebih dari 120 subsite, atau website, dan marketplace yang dihapus dalam satu tahun. Selain itu, ini membuka peluang untuk penjualan barang ilegal seperti obat, suplemen makanan, obat tradisional, kosmetik, dan makanan. Dengan demikian, salah satu fokus pengawasan BPOM adalah mengontrol penjualan barang ilegal yang dijual secara online. Dengan lebih dari 120 subsite, atau website, dan marketplace yang dihapus dalam satu tahun, BBPOM Semarang terus berkomitmen untuk memerangi peredaran obat dan makanan ilegal, terutama di wilayah jawa tengah.

   BPOM sangat mendukung bisnis obat dan makanan di Indonesia dan berkomitmen untuk melakukan pengawasan berimbang dengan mendorong bisnis untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan melalui pendampingan, pembinaan, dan kemudahan berusaha. Di sisi lain, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tidak segan bertindak tegas untuk menegakkan hukum dan aturan terhadap bisnis yang sengaja melanggar peraturan dan melakukan kejahatan obat dan makanan.

7. **GERMAS SAPA di Provinsi Jawa Tengah**

Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman (GERMAS SAPA) merupakan aksi nasional berbasis komunitas melalui strategi intervensi dari sisi supply maupun demand yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman.

Program GERMAS SAPA di Jawa Tengah ini merupakan Program yang komprehensif dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat dan merupakan gabungan dari Gerakan Keamanan Pangan Desa/kelurahan, Pengawasan Pangan Jajanan Anak Sekolah dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas. Masing-masing program memiliki segmen target komunitas yang spesifik, tetapi secara keseluruhan ketiganya bermuara pada terwujudnya peningkatan pola hidup sehat masyarakat Jawa Tengah dalam memproduksi, menyediakan dan mengonsumsi pangan yang aman.

Badan POM telah menginisiasi program ini sebagai dukungan terhadap Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) sejak tahun 2017. Diharapkan dengan intervensi keamanan pangan kepada masyarakat luas dapat menapis permasalahan klasik di bidang Keamanan Pangan seperti :

a. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran pelaku usaha terutama Industri
   Rumah Tangga Pangan tentang Aspek Higiene dan Sanitasi dalam proses
   produksi.
b. Penggunaan Bahan Tambahan Pangan melebihi batas
c. Penyalahgunaan Bahan Berbahaya dalam pangan
d. Masalah pencemaran lingkungan termasuk cemaran air

8. Penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG) menuju keadilan dan kesetaraan

Definisi gender berbeda dengan jenis kelamin, karena gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang dibentuk atau dikonstruksikan (rekayasa) sosial dan budaya, dan dapat berubah dari waktu ke waktu. Beragam stereotype terhadap perempuan dan laki-laki yang berkembang di masyarakat seperti laki-laki dikenal lebih rasional, kuat, agresif dan tegas sedangkan wanita bersifat emosional, ragu-ragu, pasif, lemah.

Isu gender merupakan permasalahan yang diakibatkan karena adanya kesenjangan atau ketimpangan gender yang berimplikasi adanya diskriminasi terhadap salah satu pihak (perempuan dan laki-laki). Dengan adanya diskriminasi terhadap perempuan atau laki-laki dalam hal akses dan kontrol atas sumber daya, kesempatan, status, hak, peran dan penghargaan, akan tercipta kondisi yang tidak adil gender.

Isu gender juga merupakan salah satu isu utama dalam pembangunan, khususnya pembangunan sumber daya manusia. Walaupun sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan penguatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG), namun data menunjukkan masih adanya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat, serta penguasaan terhadap sumber daya, seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, dan bidang strategis lainnya. Adanya ketertinggalan salah satu kelompok masyarakat dalam pembangunan, khususnya perempuan disebabkan oleh berbagai permasalahan di masyarakat yang saling berkaitan satu sama lainnya. Permasalahan paling mendasar dalam upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak adalah pendekatan pembangunan yang belum mengakomodir tentang pentingnya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki dalam mendapatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan.

Dalam rangka mendorong, mengefektifkan serta mengoptimalkan upaya PUG secara terpadu dan terkoordinasi, di dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang mengamanatkan bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional. PUG menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan fungsional utama semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah.

Upaya mencapai kehidupan yang lebih baik dilakukan secara terus menerus oleh Pemerintah dengan pembangunan kualitas hidup masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin tertentu. Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat tergantung pada peran serta seluruh penduduk, baik laki-laki maupun perempuan sebagai pelaku, dan sekaligus sebagai penerima manfaat hasil pembangunan.

9. **Peningkatan Efektivitas Pengawasan Melalui Sinergisme Pengawasan di Tingkat Pusat dan Daerah**

   Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2017 terbit atas dasar maraknya peredaran obat ilegal dan penyalahgunaan obat serta belum optimalnya pengawasan obat dan makanan di Indonesia yang dikarenakan kurangnya koordinasi antar instasi pemerintah. Pada Inpres tersebut, Presiden RI memberikan instruksi kepada 12 K/L/D untuk bersinergi

satu sama lain dan berkontribusi dalam peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan sesuai dengan tupoksi masing-masing dimana Badan POM sebagai koordinator teknis pelaksanaan pengawasan.

Dilatarbelakangi Inpres 3 Tahun 2017, Presiden juga menginstruksikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota terkait peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan, sehingga Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Permendagri No. 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah dengan mengangkat substansi di dalam Inpres 3 Tahun 2017 ke dalam bentuk produk hukum berupa Peraturan Menteri.

Terkait dengan pengawalan Inpres No. 3 tahun 2017, Badan POM perlu melakukan pengawalan implementasi dimana salah satunya adalah adanya penguatan peran pemerintah daerah. Sebagaimana amanah UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dimana beberapa peran yang mendukung efektivitas pengawasan fungsi terletak di pemerintah daerah. Dalam upaya pengawasalan fungsi tersebut, Badan POM telah mengusulkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik untuk pengawasan di Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bab II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rancangan Rencana Strategis 2025-2029

Perencanaan kinerja satuan kerja terdapat dalam Dokumen Rancangan Rencana Strategis. Renstra tersebut memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, strategi, arah kebijakan serta program dan kegiatan satuan kerja. Untuk periode tahun 2025-2029, dokumen Rancangan Renstra Badan POM sudah dapat dijadikan acuan dalam penyusunan Renstra BBPOM di Semarang tahun 2025-2029.

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2025
a	b	c	d
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	100
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100
4	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
5	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah Kerja BBPOM di Semarang	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	79,7
6	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Semarang	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	95,6
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	20
		Jumlah desa pangan aman	6
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2025
a	b	c	d
7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanandan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	82
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Semarang	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	80
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	14
10	Layanan Publik BBPOM di Semarang yang Prima	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Semarang	4,7
11	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Semarang	92,5
		Nilai AKIP BBPOM di Semarang	82,49
		Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang	90
		Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Semarang	3,7

2.3 Perjanjian Kinerja 2025

Setelah DIPA BBPOM di Semarang Tahun 2025 disahkan, BBPOM di Semarang menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Dasar untuk penyusunan Perjanjian Kinerja 2025 adalah dengan mengacu pada Renja Badan POM Tahun 2025 sesuai aplikasi KRISNA dengan target dan anggaran yang telah disesuaikan berdasarkan DIPA 2025 yang telah disahkan.

Adanya rekomendasi akip BPOM dari Kemenpan RB yaitu Penetapan Target Kinerja pada beberapa Unit Kerja perlu mempertimbangkan realisasi kinerja tahun sebelumnya, meskipun telah ada ketentian penetapan target harus mempertimbangkan capaian triwulan III tahun berjalan. Dan berdasarkan Surat dari Sekretaris utama nomer B-PR.07.01.2.21.12.23.920 tanggal 5 Desember 2023 tentang Permintaan Penyusunan Dokumen PK dan RAPK Unit Kerja di Lingkungan BPOM Tahun 2024. Bahwa terdapat permintaan untuk menambahkan Indikator direktif penugasan menjadi Indikator kinerja utama.

Secara rinci, perubahan target Perjanjian Kinerja Balai Besar POM Tahun 2025 tersaji dalam tabel berikut :

No	Sasaran Kegiatan	IKU		Target 2025
a	b	c	d	e
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	IK 1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87,00
2		IK 2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26
3		IK 3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
4		IK 4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
5		IK 5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80
6	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	IK 6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	86

No	Sasaran Kegiatan	IKU		Target 2025
a	b	c	d	e
7	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	IK 7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89,5
8		IK 8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
9		IK 9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	72,25
10		IK 10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80
11		IK 11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85,87
12	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	IK 12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	54
13	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah Kerja BBPOM di Semarang	IK 13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	79,7
14	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Semarang	IK 14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,42
15		IK 15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	20
16		IK 16	Jumlah desa pangan aman	6
17		IK 17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
18	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanandan mutu	IK 18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	83,7
19	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Semarang	IK 19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	85
20	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	IK 20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90
21	Layanan Publik BBPOM di Semarang yang Prima	IK 21	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Semarang	4,7
22	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	IK 22	Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Semarang	92,43
23		IK 23	Nilai AKIP BBPOM di Semarang	82
24		IK 24	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang	91,02
25		IK 25	Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Semarang	3,6

Dasar perubahan Perjanjian Kinerja (PK) BBPOM di Semarang Tahun 2025 berawal dari pelaksanaan Desk Kesepakatan Target IKU UPT ke-1 yang diselenggarakan pada tanggal 22–24 Januari 2025, melibatkan Unit Pelaksana Teknis (UPT), Unit Kerja Pengampu, dan Biro Perencanaan dan Keuangan. Hasil kesepakatan tersebut mengacu pada Rancangan Renstra BPOM 2025–2029 dan menjadi acuan dalam penyusunan serta penetapan Perjanjian Kinerja (PK)/Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2025 pada tanggal 12 Februari 2025.

Seiring implementasinya dan berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kinerja Triwulan I Tahun 2025, terdapat beberapa UPT yang mengusulkan perubahan target baik pada level bulanan maupun tahunan, sehingga dilakukan reviu terhadap target IKU UPT untuk menyesuaikan dengan kondisi riil dan kebijakan terkini. Selain itu, terdapat penambahan tiga IKU baru yang mengikuti logframe dari pusat, yaitu: (1) Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar, (2)

Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT, dan (3) Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman. Lebih detail dapat dilihat pada table berikut:

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Target 2025
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	IK1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,5
		IK2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26
		IK3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91
		IK4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100
		IK5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92
		IK6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	86
		IK7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,75
		IK8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		IK9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,75
		IK10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80
		IK11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91
		IK12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91
		IK13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100
		IK14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	83,2
		IK15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	3,85
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	IK16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	54
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	IK17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,42
		IK18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	20
		IK19	Jumlah desa pangan aman	6

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Target 2025
		IK20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	IK21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	18,44
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	IK22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	85
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	IK23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90
7	Layanan Publik UPT yang prima	IK24	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	IK25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	92,43
		IK26	Nilai AKIP UPT BPOM	82
		IK27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5
		IK28	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3,6

2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

BBPOM di Semarang juga menyusun Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2025 memuat 11 sasaran kegiatan dengan 25 indikator kinerja kegiatan dengan target kinerja tahunan dan triwulanan beserta anggaran setiap indikator kinerja kegiatan. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BBPOM di Semarang tahun 2025 yang sudah disahkan dapat dilihat pada Lampiran 3 pada Laporan Kinerja Interim ini.

Tabel 1 RAPK BBPOM di Semarang 2025

Sasaran Strategis		Indikator		Target Bulanan 2025												Anggaran
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87,00	1.185.442.000
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												26	80.300.000
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	208.979.667
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	208.979.667
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	208.979.666
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	50	53	56	59	63	66	69	73	76	79	83	86	65.855.250
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	65.855.250
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	65.855.250
		9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,75	96,75	96,75	96,75	96,75	96,75	96,75	96,75	96,75	96,75	96,75	96,75	650.500.000
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	650.500.000
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85,87	85,87	85,87	85,87	85,87	85,87	85,87	85,87	85,87	85,87	85,87	85,87	65.855.250
4	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		5,61	16,82	28,04	39,25	50,47	54	54	54	54	54	54	88.195.000
5	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			70,31	70,31	70,31	72,87	72,87	72,87	76,12	76,12	76,12	79,7	9.630.584.000
6	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Semarang	14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			86,42	86,42	86,42	86,42	86,42	86,42	86,42	86,42	86,42	86,42	17.055.022.000
		15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	5%	20%	20%	60%	60%	60%	65%	70%	75%	85%	95%	20	653.579.000
		16	Jumlah desa pangan aman	5%	25%	28%	46%	54%	62%	71%	73%	77%	88%	100%	6	1.308.912.000
		17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	5%	20%	20%	40%	65%	65%	95%	100%	100%	100%	100%	1	130.777.000
7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik da0tau IP CPPOB pangan olahan	6,67	16	24,17	48,5	56,67	69,33	82,5	84,33	88,33	91	96,67	91	97.721.000
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Semarang	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	10	25	35	37,5	40	45	55	60	65	75	80	85	813.876.000
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	122.167.000

Sasaran Strategis		Indikator		Target Bulanan 2025												Anggaran
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q
10	Layanan Publik BBPOM di Semarang yang Prima	21	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Semarang												4,70	688.354.000
11	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	22	Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Semarang												92,43	240.000.000
		23	Nilai AKIP BBPOM di Semarang												82	240.000.000
		24	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang												91,02	19.136.242.000
		25	Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Semarang												3,6	240.000.000
Total Anggaran																53.902.531.000

Melalui Surat Nomor: B-PR.07.9A.05.25.1130 Tanggal 27 Mei 2025 tentang Permohonan Revisi ke 1 Target RAPK April – Desember 2025 dan PK 2025-2029 berupa perubahan target IKU:

1 Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
2 Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan
3 Jumlah desa pangan aman
4 Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Dan telah ditanggapi oleh Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan melalui Surat No. PR.07.21.06.25.188 tanggal 11 Juni 2025 tentang Tanggapan atas Usulan Perubahan Target Bulanan RAPK Balai Besar POM di Semarang Tahun 2025. Adapun hasil reviu Rorenkeu adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Hasil Reviu Rorenkeu Revisi ke-1 RAPK 2025

Nb	Indikator	Justifikasi Unit Kerja	Hasil Reviu
1	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Pelaksanaan kegiatan sampling dan pengujian sampel PIRT perlu disesuaikan dengan kebijakan pemerintah terkait efisiensi belanja perjalanan dinas TA 2025, sesuai Surat Sekretaris Utama Nomor : B PR.05.02.2.12.24.925 Tanggal 9 Desember 2024 perihal Penyampaian Data Pemblokiran Dalam Rangka Efisiensi Perjalanan Dinas dan Non Quick Win Tahun 2025, 50% anggaran perjalanan dinas tahun 2025 telah dilakukan pemblokiran anggaran secara sistem pada aplikasi SAKTI oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu. Terkait dengan hal tersebut Badan POM melakukan perubahan tahapan pelaksanaan program sehingga terjadi kendala capaian terhadap target awal yang telah ditetapkan sebelum kebijakan pemerintah tersebut diterbitkan.	Mengacu surat Sekretaris Utama no B-PR.07.2.05.25.251 tanggal 14 Mei 2025 perihal Mekanisme dan Jadwal Revisi Rencana Aksi PK 2025 poin 4b dimana "Revisi target hanya dapat dilakukan pada indikator yang bersifat kumulatif (nonflat)" maka permohonan perubahan target untuk **tidak dapat disetujui.** Perubahan target tahunan dapat dilakukan pada penyusunan Renstra 2025-2029 untuk selanjutnya dilakukan revisi PK dan RAPK mengacu Renstra yang telah ditetapkan. Perubahan target tersebut harus mempertimbangkan realisasi hingga bulan terakhir serta berkoordinasi dengan unit teknis pengampu indikator
2	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	*) Pelaksanaan Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Kemanan Pangan tahun 2025 perlu disesuaikan dengan kebijakan pemerintah terbaru terkait Program Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting. *) Pelaksanaan kegiatan Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan perlu disesuaikan dengan kebijakan pemerintah terkait efisiensi belanja perjalanan dinas TA 2025, sesuai Surat Sekretaris Utama Nomor : B PR.05.02.2.12.24.925 Tanggal 9 Desember 2024 perihal Penyampaian Data Pemblokiran Dalam Rangka Efisiensi Perjalanan Dinas dan Non Quick Win Tahun 2025, 50% anggaran perjalanan dinas tahun 2025 telah dilakukan pemblokiran anggaran secara sistem pada aplikasi SAKTI oleh Direktorat Jenderal	Usulan **dapat disepakati** karena telah memenuhi ketentuan perubahan target RAPK berdasarkan surat Sekretaris Utama no B-PR.07.2.05.25.251 tanggal 14 Mei 2025 perihal Mekanisme dan Jadwal Revisi Rencana Aksi PK 2025

		Anggaran Kemenkeu. Terkait dengan hal tersebut Badan POM melakukan perubahan tahapan pelaksanaan program sehingga terjadi kendala capaian terhadap target awal yang telah ditetapkan sebelum kebijakan pemerintah tersebut diterbitkan.	
3	Jumlah desa pangan aman	*) Pelaksanaan Desa Pangan Aman tahun 2025 perlu disesuaikan dengan kebijakan pemerintah terbaru terkait Program Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting. *) Pelaksanaan kegiatan Desa Pangan Aman perlu disesuaikan dengan kebijakan pemerintah terkait efisiensi belanja perjalanan dinas TA 2025, sesuai Surat Sekretaris Utama Nomor : B PR.05.02.2.12.24.925 Tanggal 9 Desember 2024 perihal Penyampaian Data Pemblokiran Dalam Rangka Efisiensi Perjalanan Dinas dan Non Quick Win Tahun 2025, 50% anggaran perjalanan dinas tahun 2025 telah dilakukan pemblokiran anggaran secara sistem pada aplikasi SAKTI oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu. Terkait dengan hal tersebut Badan POM melakukan perubahan tahapan pelaksanaan program sehingga terjadi kendala capaian terhadap target awal yang telah ditetapkan sebelum kebijakan pemerintah tersebut diterbitkan.	Mengacu realisasi pada B4 yakni sebesar 38, maka usulan **target di B4 minimal sama dengan realisasi**, terkait usulan target pada B5-B11 **dapat dispekati.**
4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	*) Pelaksanaan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas tahun 2025 perlu disesuaikan dengan kebijakan pemerintah terbaru terkait Program Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting. *) Pelaksanaan kegiatan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas perlu disesuaikan dengan kebijakan pemerintah terkait efisiensi belanja perjalanan dinas TA 2025, sesuai Surat Sekretaris Utama Nomor : B PR.05.02.2.12.24.925 Tanggal 9 Desember 2024 perihal Penyampaian Data Pemblokiran Dalam Rangka Efisiensi Perjalanan Dinas dan Non Quick Win Tahun 2025, 50% anggaran perjalanan dinas tahun 2025 telah dilakukan pemblokiran anggaran secara sistem pada aplikasi SAKTI oleh Direktorat	Usulan **dapat disepakati** karena telah memenuhi ketentuan perubahan target RAPK berdasarkan surat Sekretaris Utama no B-PR.07.2.05.25.251 tanggal 14 Mei 2025 perihal Mekanisme dan Jadwal Revisi Rencana Aksi PK 2025
		Jenderal Anggaran Kemenkeu. Terkait dengan hal tersebut Badan POM melakukan perubahan tahapan pelaksanaan program sehingga terjadi kendala capaian terhadap target awal yang telah ditetapkan sebelum kebijakan pemerintah tersebut diterbitkan.	

berdasarkan hasil reviu tersebut, maka RAPK menjadi :

Tabel 3 RAPK BBPOM di Semarang 2025 (Revisi I)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulanan 2025												Anggaran
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	1.185.442.000

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulanan 2025												Anggaran
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	Olahan di wilayah kerja UPT	02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												26	80.300.000
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	208.979.667
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	208.979.666
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	208.979.666
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	50	53	56	59	63	66	69	73	76	79	83	86	65.855.250
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	65.855.250
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	65.855.250
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.75	96.75	96.75	96.75	96.75	96.75	96.75	96.75	96.75	96.75	96.75	96.75	650.500.000
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	650.500.000
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85.87	85.87	85.87	85.87	85.87	85.87	85.87	85.87	85.87	85.87	85.87	85.87	65.855.250
2.	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		5.61	16.82	28.04	39.25	50.47	54	54	54	54	54	54	88.195.000
3.	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			70.31	70.31	70.31	72.87	72.87	72.87	76.12	76.12	76.12	79.7	9.630.584.000
4.	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			86.42	86.42	86.42	86.42	86.42	86.42	86.42	86.42	86.42	86.42	17.055.022.000
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	5	20	20	52.5	55.7	62.65	69.6	72.8	86	86.7	100	20	653.579.000

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulanan 2025												Anggaran
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		03 - Jumlah desa pangan aman	5	25	28	38	47.5	54.2	57.5	67.5	67.5	67.5	100	6	1.308.912.000
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	5	20	20	55	80	100	100	100	100	100	100	1	130.777.000
5.	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	6.67	16	24.17	48.5	56.67	69.33	82.5	84.33	88.33	91	96.67	91	97.721.000
6.	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	10	25	35	37.5	40	45	55	60	65	75	80	85	813.876.000
7.	Terlaksanaya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	122.167.000
8.	Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4.7	688.354.000
9.	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												92.43	240.000.000
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM												82	240.000.000
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												91.02	19.136.242.000
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												3.6	240.000.000
Total															**53.902.531.000**

Perubahan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) ke-2 Tahun 2025 dilakukan sebagai tindak lanjut dari penyesuaian terhadap Perjanjian Kinerja (PK) terbaru, serta hasil reviu kinerja yang dilakukan dalam proses Monitoring dan Evaluasi Triwulan I Tahun 2025. Reviu ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara target dan capaian kinerja dengan kondisi pelaksanaan di lapangan, serta menjaga akurasi pengukuran kinerja terhadap indikator yang relevan.

Secara umum, indikator yang dilakukan reviu pada RAPK ke-2 memiliki beberapa kriteria, yaitu:

(1) indikator yang banyak mendapat usulan revisi target yang berdampak terhadap target B12 atau perubahan target tahunan (khususnya indikator yang berkaitan dengan penentuan standar);

(2) indikator dengan target bulanan yang bukan bersifat progresif;

(3) indikator dengan target tahunan yang tidak menggunakan satuan jumlah;

(4) indikator yang targetnya bukan merupakan nilai maksimal (100%); serta

(5) indikator yang telah dilaksanakan sejak Bulan I (B1) dan telah melalui proses Monev Triwulan I.

Melalui revisi RAPK ke-2 ini, diharapkan penyusunan dan pemantauan kinerja BBPOM di Semarang dapat lebih selaras dengan arah kebijakan terbaru, penambahan indikator baru dalam PK, serta kondisi operasional aktual di lapangan. Adapun rincian indikator dan penyesuaian target yang mengalami reviu sebagaimana dimaksud, tercantum dalam detail RAPK revisi berikut.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target												Anggaran
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		87	87	87	87	87	87	91,5	91,5	91,5	91,5	91,50	592.721.000
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												26	80.300.000
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	91	91	91	91	91	209.021.463
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	4.760.000
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		80	80	80	80	80	80	92	92	92	92	92	208.958.769
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	50	53	56	59	63	66	69	73	76	79	83	86	4.130.000
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	90	90	90	90	90	90	90,75	90,75	90,75	90,75	90,75	131.710.500

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target												Anggaran
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	131.710.500
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.75	96.75	96.75	96.75	96.75	96.75	96.75	96.75	96.75	96.75	96.75	96,75	616.270.000
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	616.270.000
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85.87	85.87	85.87	85.87	85.87	85.87	85.87	91	91	91	91	91	54.810.000
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar								91	91	91	91	91	592.721.000
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT												100	4.760.000
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			70.31	70.31	70.31	72.87	72.87	78,8	82,8	82,8	82,8	83,20	7.213.784.000
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman												3,85	208.958.769

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target												Anggaran
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		5.61	16.82	28.04	39.25	50.47	54	54	54	54	54	54	88.195.000
4.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			86.42	86.42	86.42	86.42	86.42	86.42	86.42	86.42	86.42	86,42	17.055.022.000
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	5	20	20	52.5	55.7	62.65	69.6	72.8	86	86.7	100	20	653.579.000
		03 - Jumlah desa pangan aman	5	25	28	38	47.5	54.2	57.5	67.5	67.5	67.5	100	6	1.308.912.000
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	5	20	20	55	80	100	100	100	100	100	100	1	130.777.000
5.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	6.67	16	24.17	48.5	56.67	69.33	82.5	84.33	88.33	91,00	96.67	18,44	97.721.000
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	10	25	35	37.5	40	45	55	65	75	80	82,5	85	813.876.000

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target												Anggaran
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	122.167.000
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4,7	688.354.000
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												92,43	2.340.000.000
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM												82	240.000.000
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	19.243.639.000
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												3,6	240.000.000
														Total	**53.693.128.000**

Keberhasilan suatu sasaran strategis diukur melalui capaian indikator kinerja yang telah dituangkan pada Perjanjian Kinerja. Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>110%	
Sangat Baik	100% < x ≤ 110%	
Baik	90% < x ≤ 100%	
Cukup	60% ≤ x ≤ 90%	
Kurang	<60%	

Penetapan ini bertujuan untuk:

1. Sebagai reviu dan evaluasi untuk penetapan target kinerja tahunan.
2. Pemanfaatan *monitoring* kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Nilai Sasaran Strategis (NSS) adalah nilai rata-rata seluruh capaian indikator kinerja dalam suatu Sasaran Strategis (SS). Nilai Perspektif (NP) merupakan nilai yang menunjukkan konsolidasi dari seluruh NSS dalam 1 (satu) perspektif. Perhitungan NP dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata NSS dalam perspektif yang sama dengan rumus:

$$NP = \Sigma NSS / \Sigma SS$$

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) merupakan nilai kinerja organisasi yang menunjukkan hasil konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi indikator kinerja dalam satu Peta Strategi. NKO digunakan untuk menilai kinerja unit/satuan kerja yang memiliki peta strategi. Formula menghitung NKO :

$$NKO = \Sigma NP / \Sigma P$$

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) baik periodik maupun tahunan mengacu pada kriteria berikut:

Predikat NKO	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Notifikasi Warna
Istimewa	>110%	
Baik	80% < x ≤ 100%	
Butuh Perbaikan	60% < x ≤ 80%	
Kurang	20% < x ≤ 60%	
Sangat Kurang	0% ≤ x ≤ 20%	

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2023. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai. Capaian kinerja hasil perbandingan ini dinyatakan dalam kategori berikut:

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar ≥ 100%.	▲
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar 70% - <100% (70 ≤ x < 100).	▲
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar <70% (x < 70).	▼

Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan di BBPOM di Semarang adalah sebagai berikut:

1. Adanya penunjukan 1 (satu) orang petugas penanggungjawab data di BBPOM di Semarang yang disahkan dalam SK Kepala BPOM
2. Kepala BBPOM di Semarang menunjuk perwakilan penanggungjawab data di setiap bidang dengan menerbitkan SK Kepala BBPOM di Semarang
3. Penanggung jawab data di setiap bidang meng-*input* data kinerja pada data base *online* secara rutin setiap bulan dan diverifikasi oleh penanggungjawab data Balai
4. Data kinerja yang telah terverifikasi digunakan sebagai bahan untuk meng-*input* data setiap bulan pada aplikasi SAKTI, monev Bappenas dan pada aplikasi *e-performace*.
5. Pengelolaan data kinerja sebagai bahan informasi yang terintegrasi secara elektronik melalui sistem informasi melalui pemanfaatan aplikasi *e-performance* yang telah dikembangkan dengan menggunakan *Balance Score Card* (BSC). Pengukuran ini pun diintegrasikan dengan aplikasi Simakin pada aplikasi SIASN yang merupakan pengukuran

kinerja hingga level pimpinan eselon 2 hingga level individu secara periodik triwulanan dimana penilaian pengukuran kinerja ini menjadi tolak ukur dalam pemberian *reward* dan *punishment* atas prestasi kerja pegawai dalam penetapan persentase pemberian tunjangan kinerja pada triwulan berikutnya.

Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara rutin untuk memonitor pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka upaya pencapaian target akhir tahun.

Selain dilakukan pengukuran indikator kinerja, juga dilakukan pengukuran efisiensi kinerja. Pengukuran efisiensi dari kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input.

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input (realisasi anggaran), sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\%\ CapaianOutput}{\%\ RencanaCapaianInput} \qquad IE = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila IE ≥ SE maka kegiatan dianggap efisien, apabila: IE ≤ SE maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut :

Tabel 4 Range Tingkat Efisiensi

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)

3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA TRIWULAN (TW) III

Capaian Kinerja merupakan proses pengukuran kinerja yang dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran keberhasilan pencapaian sasaran strategis, efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Capaian Kinerja BBPOM di Semarang TW III Tahun 2025 diukur dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja sesuai dengan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan Tahun 2025.

Tabel 4 Perbandingan Realiasasi TW iII Dengan Target Tahun 2025

NO	SK	IKU	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,50	100,00	109.29	Tercapai/ Melampaui
2		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26,00	Tahunan	Tahunan	Tahunan
3		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	94,44	103.78	Tercapai/ Melampaui
4		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00	100,00	100.00	Tercapai/ Melampaui
5		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92	95,61	103.92	Tercapai/ Melampaui
6		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	86,00	89,75	104.36	Tercapai/ Melampaui
7		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,75	94,44	104.07	Tercapai/ Melampaui
8		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	91,04	107.11	Tercapai/ Melampaui
9		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,75	99,89	103.25	Tercapai/ Melampaui
10		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,00	80,38	100.48	Tercapai/ Melampaui

NO	SK	IKU	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi
11		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91,00	96,89	106.47	Tercapai/ Melampaui
12		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91,00	100,00	109.89	Tercapai/ Melampaui
13		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100,00	Tahunan	Tahunan	Tahunan
14		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	83,20	85,20	102.40	Tercapai/ Melampaui
15		Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	3,85	Tahunan	Tahunan	Tahunan
16	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	54,00	57,94	107.30	Tercapai/ Melampaui
17	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Semarang	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	86,42	88,01	101.84	Tercapai/ Melampaui
18		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	20,00	94,60	94.60	Akan Tercapai
19		Jumlah desa pangan aman	6,00	90,00	90.00	Akan Tercapai
20		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1,00	100,00	100.00	Tercapai/ Melampaui
21	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB	18,44	92,68	92.68	Akan Tercapai
22	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Semarang	85,00	76,07	89.49	Akan Tercapai
23	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90,00	50,00	55.56	Perlu Upaya Keras
24	Layanan Publik BBPOM di Semarang yang Prima	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Semarang	4,70	Tahunan	Tahunan	Tahunan
25	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Semarang	92,43	Tahunan	Tahunan	Tahunan
26		Nilai AKIP BBPOM di Semarang	82,00	Tahunan	Tahunan	Tahunan
27		Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di	5,00	Tahunan	Tahunan	Tahunan
28		Indeks Manajemen Risiko BBPOM di	3,60	Tahunan	Tahunan	Tahunan

Melihat perbandingan Realiasasi TW III dengan target tahun 2025 terdapat 15 (Lima belas) indikator yang sudah tercapai/ melampaui, 4 (empat) Indikator akan tercapai targetnya dan 1 (Satu) masih perlu kerja keras, serta 8 indikator belum dapat ditentukan karena target di B12.

Tabel 5 Data Capaian Nilai Kinerja TW II BBPOM di Semarang

No	Sasaran Kegiatan	No	Nama Indikator	Target 2025	TW III			
					Target	Realisasi	Capaian	Capaian di Normalisasi
a	b		c	d	e	f	g	h
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,5	91,5	100	109,29	109,29
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26				
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	91	94,44	103,78	103,78
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92	92	95,61	103,92	103,92
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	86	76	89,75	118,09	110
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,75	90,75	94,44	104,07	104,07
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	91,04	107,11	107,11
		9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,75	96,75	99,89	103,25	103,25
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80,38	100,48	100,48
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91	91	96,89	106,47	106,47
		12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91	91	100	109,89	109,89
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100				
		14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	83,2	82,8	85,2	102,9	102,9
		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	3,85				
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	54	54	57,94	107,3	107,3
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Semarang	17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,42	86,42	88,01	101,84	101,84
		18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	20	86	94,6	110	110
		19	Jumlah desa pangan aman	6	67,5	90	133,33	110
		20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	100	100	100	100
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik da0tau IP	18,44	88,33	92,68	104,92	104,92

No	Sasaran Kegiatan	No	Nama Indikator	Target 2025	TW III			
					Target	Realisasi	Capaian	Capaian di Normalisasi
a	b		c	d	e	f	g	h
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di	22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	85	75	76,07	101,43	101,43
6	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan	23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	50	50	100	100
7	Layanan Publik BBPOM di Semarang yang Prima	24	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Semarang	4,7				
8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	25	Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Semarang	92,43				
		26	Nilai AKIP BBPOM di Semarang	82				
		27	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang	91,02				
		28	Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Semarang	3,6				
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)								**104,83**
								Istimewa

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian Nilai Kinerja BBPOM di Semarang TW III tahun 2025 sebesar **104,83 (Istimewa).**

Selama TW III ini BBPOM di Semarang telah berupaya keras untuk mencapai kinerja meski dalam kondisi efisiensi anggaran. Untuk lebih mendetail akan dijelaskan pada subbab berikut.

SK 1. Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang

Tabel …. Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan Ke 1

NO	SK	IKU	Target TW III	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,50	100,00	109,29
2		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO			
3		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	94,44	103,78
4		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00	100,00	100,00
5		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92,00	95,61	103,92
6		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	76,00	89,75	118,09
7		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,75	94,44	104,07
8		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	91,04	107,11
9		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,75	99,89	103,25
10		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,00	80,38	100,48
11		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91,00	96,89	106,47
12		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91,00	100,00	109,89
13		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT			
14		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	82,80	85,20	102,90
15		Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman			
Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan					105,77

SK 1: Meningkatnya efektivitas pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM Semarang diukur melalui 15 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tercantum pada tabel terkait. Nilai pencapaian Sasaran Kegiatan 1 mencapai 105,77, namun nilai ini belum dapat disimpulkan secara langsung. Dari 15 IKU yang diukur, terdapat 12 indikator yang berhasil dicapai dengan sangat baik, sementara 1 indikator lainnya belum dapat disimpulkan hasilnya. Selain itu, 2 IKU baru akan diukur pada akhir tahun. Hal ini menunjukkan komitmen BBPOM Semarang untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh indikator yang relevan, sehingga hasil pengawasan menjadi lebih komprehensif dan akurat. Berdasarkan pencapaian tersebut, dapat disimpulkan bahwa BBPOM Semarang telah menunjukkan efektivitas yang baik dalam pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerjanya. Hal ini mencerminkan

pengawasan yang optimal serta pengelolaan yang sesuai standar untuk menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat.

IKU 1. Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang dipilih menggunakan metode targeted atau *purposive* sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian. Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil. Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga diwajibkan melaporkan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku.
Sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait.

Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan rata-rata dari persentase obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dihitung dari :

a. Kesesuaian Perencanaan Sampling yang mencakup kesesuaian dengan target sampel, renlak kategori sampel dan renlak kelas terapi
b. Kesesuaian Pelaksanaan Sampling yang mencakup kesesuaian dengan renlak periode/waktu sampling, ketentuan Evaluasi Penandaan, diuji dengan parameter sesuai ketentuan, termasuk uji secara *rapid*.
c. Kesesuaian Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian yang mencakup kesesuaian pengambilan kesimpulan akhir (kesesuaian antara kesimpulan penandaan dan kesimpulan pengujian) dan waktu pelaporan sesuai pedoman sampling
d. Kesesuaian Pelaporan Montoring Penarikan Obat

Persentase Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dihitung dari :

a. Pemenuhan target pengawasan OBA
b. Kesesuaian pengambilan sampel dengan kategori yang telah ditetapkan dalam pedoman sampling
c. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan)
d. Kesesuaian parameter uji
e. Akurasi dalam penentuan kesimpulan
f. Tanggapan atas surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

Persentase Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dihitung dari :

a. Pemenuhan target pengawasan SK
b. Kesesuaian pengambilan sampel dengan kategori yang telah ditetapkan dalam pedoman sampling
c. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan)
d. Kesesuaian parameter uji
e. Akurasi dalam penentuan kesimpulan
f. Tanggapan atas surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dihitung dari :

a. Pemenuhan target pengawasan
b. Kesesuaian pengambilan sampel dengan kategori yang telah ditetapkan dalam pedoman sampling
c. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan, mencakup kelengkapan laporan dan ketepatan waktu SLA Sampling, SLA Pengujian dan SLA Pelaporan
d. Ketepatan dalam penentuan Kesimpulan, mencakup penentuan Kesimpulan Penandaan, Pengujian, Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)
e. Tanggapan atas surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik atau Direktur Pengawasan Kosmetik, mencakup surat Edaran pembersihan pasar dan Edaran pemeriksaan sarana kosmetik

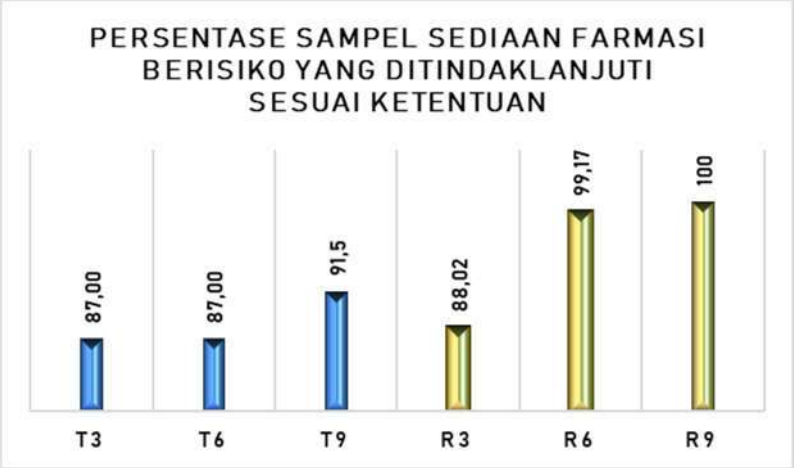
Kegiatan sampling, pemeriksaan penandaan, pengujian dan monitoring produk recall dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dalam rangka menjamin produk/sediaan farmasi yang beredar aman, berkhasiat dan bermutu.

- **Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW III Tahun 2025**

NO	IKU	Target TW III	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,5	100	109,29 Sangat Baik

Pada Triwulan III Tahun 2025, target kinerja ditetapkan sebesar **91,50%**, sedangkan realisasi capaian mencapai **109,29% dari target triwulan**. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut terhadap sediaan farmasi berisiko telah melampaui target yang ditetapkan. Secara keseluruhan, sampai dengan bulan September 2025 telah dilakukan **sampling sebanyak 1.238 sampel**, meliputi **obat (374 sampel), obat tradisional (267 sampel), suplemen kesehatan (71 sampel), dan kosmetik (526 sampel)**.

- **Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW Sebelumnya Tahun 2025**



Dibandingkan dengan Realisasi pada **Triwulan II sebesar 99,17%**, realisasi kinerja pada **Triwulan III meningkat menjadi 100%**. Kenaikan ini menunjukkan adanya peningkatan efektivitas pelaksanaan sampling dan pengujian di lapangan, meskipun terdapat tambahan beban kerja akibat peningkatan jumlah surat recall dari Deputi II. Konsistensi pelaksanaan kegiatan sampling dan pengujian menunjukkan bahwa pengawasan produk sediaan farmasi telah berjalan stabil dan berkelanjutan sepanjang tahun 2025.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan Target Tahun 2025**

NO	IKU	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,50	100,00	109.29	Tercapai/ Melampaui

Jika dibandingkan dengan **Target Kinerja Tahun 2025 sebesar 91,50%**, capaian sampai dengan TW III telah melampaui target tahunan dengan **persentase capaian sebesar 109,29%**. Realisasi jumlah sampling juga telah mencapai **82,97% dari total target 1.492 sampel**, menunjukkan kemajuan signifikan dalam pelaksanaan pengawasan hingga akhir Triwulan III. Dengan tren capaian yang terus meningkat sejak awal tahun, target tahunan diperkirakan dapat tercapai bahkan terlampaui pada akhir tahun 2025.

- **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja**

Peningkatan capaian kinerja pada Triwulan III dipengaruhi oleh beberapa faktor keberhasilan, antara lain:

- Pelaksanaan sampling rutin dan targeted sampling terhadap produk berisiko tinggi berjalan sesuai jadwal dan sasaran.
- Koordinasi lintas bidang (Pengawasan, Laboratorium, dan Penindakan) yang semakin kuat, sehingga tindak lanjut hasil pengujian dapat dilakukan secara cepat dan tepat.
- Peningkatan kapasitas laboratorium dan efisiensi waktu pengujian, yang berpengaruh terhadap percepatan tindak lanjut hasil pengawasan.

Namun demikian, terdapat beberapa kendala, terutama peningkatan jumlah Surat Recall dari Deputi II (9 surat recall kosmetik dan 23 surat recall OT/SK) yang menyebabkan perlunya pembersihan pasar tambahan di luar kegiatan rutin. Kondisi ini menambah beban kerja namun berhasil dikelola dengan baik sehingga tidak menurunkan capaian indikator.

- **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Untuk mempertahankan capaian yang sudah melampaui target sekaligus menghadapi dinamika di lapangan, beberapa langkah perbaikan yang direkomendasikan antara lain:

1. Penyesuaian perencanaan sampling berbasis risiko, agar tetap dapat mengakomodasi surat recall dari pusat tanpa mengganggu kegiatan rutin.
2. Penguatan koordinasi antar bidang teknis, khususnya antara pengawasan dan laboratorium, untuk mempercepat proses uji dan tindak lanjut hasil sampling.
3. Pemanfaatan sistem informasi pengawasan secara digital untuk mempercepat pelaporan, analisis, dan pemantauan capaian kinerja.
4. Peningkatan kapasitas SDM pengawasan agar mampu menyesuaikan dengan beban tambahan akibat adanya recall produk dari pusat.

- **Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja**

Indikator	Pagu Anggaran(Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian IKU (%)	Tingkat Efisiensi
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	592,721,000	474,067,548	79.98	109.29	Efisien

Capaian kinerja sebesar **109,29%** berhasil dicapai dengan **realisasi anggaran 79,98%** dan **tingkat efisiensi yaitu efisien**. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya telah berjalan secara optimal dan terkendali. Efisiensi ini tercermin dari kemampuan mencapai hasil di atas target dengan proporsi anggaran yang masih di bawah 80%, menandakan pengelolaan sumber daya manusia, sarana pengujian, dan logistik lapangan telah dilakukan secara efektif.

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Beberapa kegiatan yang berkontribusi terhadap keberhasilan kinerja antara lain:

- Kegiatan sampling rutin dan targeted sampling terhadap produk farmasi berisiko tinggi.
- Pengujian laboratorium terhadap seluruh kategori produk (obat, OTSK, kosmetik, dan rokok) secara tepat waktu.

- Kegiatan tindak lanjut hasil pengawasan, seperti klarifikasi pelaku usaha dan pelaksanaan recall produk bermasalah.

  Faktor yang berpotensi menghambat adalah meningkatnya surat recall dari Deputi II, yang memerlukan tambahan kegiatan lapangan dan waktu untuk penyesuaian jadwal.

- **Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

Laporan kinerja Triwulan III Tahun 2025 ini dimanfaatkan sebagai dasar evaluasi efektivitas pelaksanaan pengawasan sediaan farmasi berisiko serta bahan penyusunan strategi pengawasan TW IV dan rencana kegiatan Tahun 2026. Selain itu, laporan ini menjadi dokumen pendukung dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan evaluasi internal kinerja bidang pengawasan di BBPOM di Semarang.

IKU 2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO

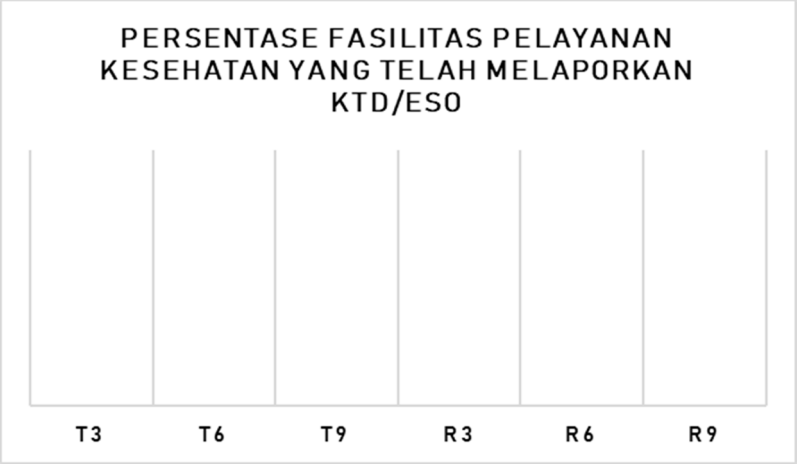
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO dihitung berdasarkan jumlah sarana fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh BBPOM di Semarang pada tahun 2025.
Tujuan intervensi berupa KIE Farmakovigilans kepada tenaga kesehatan/ tenaga medis di fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan pemahaman pentingnya pemantauan dan pelaporan KTD/ ESO.
Tahapan pelaksanaan KIE Farmakovigilans berdasarkan petunjuk pelaksanaan KIE Farmakovigilans Kepada Tenaga Kesehatan/ Tenaga Medis di Fasyankes oleh UPT Pelaksana Teknis BPOM.
Intervensi utama dilakukan melalui KIE Farmakovigilans kepada tenaga kesehatan/tenaga medis di fasyankes oleh BBPOM di Semarang. Fasyankes mencakup rumah sakit, puskesmas dan klinik sesuai wilayah kerja UPT BPOM yang belum melaporkan KTD/ESO ke BPOM dan Tenaga kesehatan/tenaga medis mencakup dokter, dokter gigi, apoteker, perawat, bidan dan tenaga kesehatan/tenaga medis lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
KIE dilakukan kepada sarana pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kompetensi, pemahaman, pengetahuan dan awareness tenaga kesehatan/tenaga medis terkait farmakovigilans dan menyamakan persepsi mengenai pentingnya pelaporan efek samping obat yang berkualitas dalam rangka pengawalan keamanan obat untuk menjamin keselamatan pasien; meningkatkan jumlah dan kualitas laporan KTD/ESO di Indonesia untuk mendukung tercapainya profil keamanan obat beredar yang mencakup populasi di Indonesia dan meningkatkan keamanan penggunaan obat untuk mendukung keselamatan pasien dan kesehatan masyarakat secara luas.

- **Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW III Tahun 2025**

No	IKU	Target TW. III	Realisasi	Capaian (%)
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	26	28.89%

Pada Triwulan III Tahun 2025, target pelaporan KTD/ESO merupakan target tahunan, yaitu sebesar 26% fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO dari 90 fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang telah diberikan KIE Farmakovigilans. N Hingga akhir September 2025, belum terdapat tambahan fasyankes baru yang melaporkan KTD/ESO melalui sistem e-meso. Jumlah pelapor tetap sebanyak 26 fasyankes (28,89%), terdiri atas 23 rumah sakit, 2 puskesmas, dan 1 klinik.
Dengan demikian, capaian indikator pada Triwulan III tidak mengalami peningkatan dibandingkan capaian pada Triwulan II, dan progres realisasi masih berada pada posisi yang sama.

- **Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW Sebelumnya Tahun 2025**



Jika dibandingkan dengan Triwulan II, capaian kinerja pada Triwulan III tidak menunjukkan perubahan (tetap 26 fasyankes). Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak ada tambahan pelaporan baru, baik dari fasilitas yang telah dibina sebelumnya maupun dari peserta baru hasil kegiatan Bimtek PV. Walaupun demikian, seluruh 26 fasyankes masih aktif mempertahankan pelaporan rutin melalui sistem e-meso, sehingga tidak terjadi penurunan partisipasi.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan Target Tahun 2025**

NO	IKU	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26,00	Tahunan	Tahunan	Tahunan

Hingga akhir Triwulan III, realisasi kinerja mencapai 28,89% dari target tahunan atau setara 26 dari 90 fasyankes yang ditetapkan sebagai target pelaporan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pembinaan dan monitoring pada periode ini belum menghasilkan penambahan fasyankes pelapor baru, namun demikian capaian TW. III sudah melebihi target tahunan sebesar 26%.

- **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja**

Stagnannya capaian kinerja pada Triwulan III disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- Masih dilaksanakan kegiatan pembinaan atau monitoring lanjutan setelah kegiatan Sharasehan PV pada April 2025 dengan cara pemberian informasi melalui group whats app.
- Pembinaan farmakovigilans tetap menjadi prioritas walaupun capaian TW. III sudah tercapai melebihi target tahunan.
-

Meskipun demikian, keberhasilan tetap terlihat pada aspek konsistensi pelaporan dari 26 fasyankes aktif, yang tetap menjaga keberlanjutan pemantauan KTD/ESO tanpa terjadi penurunan jumlah pelapor.

- **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Untuk mendorong peningkatan capaian indikator pada Triwulan IV dan mencapai target tahunan, diperlukan langkah-langkah perbaikan berikut:

1. Menjadwalkan kegiatan pembinaan dan monitoring tambahan pada fasyankes yang belum aktif melapor.
2. Memperluas komunikasi dan pendampingan teknis melalui koordinasi daring dengan rumah sakit, puskesmas, dan klinik yang telah mengikuti Bimtek PV.
3. Mengintegrasikan kegiatan farmakovigilans dengan kegiatan pengawasan obat dan vaksin, agar efisiensi kunjungan lapangan meningkat.
4. Meningkatkan dukungan koordinasi lintas sektor, seperti Dinas Kesehatan dan organisasi profesi kefarmasian, untuk mendorong kepatuhan pelaporan KTD/ESO.

- **Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja**

Indikator	Pagu Anggaran(Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian IKU (%)	Tingkat Efisiensi
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	80,300,000	10,264,700	12.78		

Walaupun belum ada peningkatan capaian, penggunaan sumber daya selama

Triwulan III tetap efisien karena tidak terdapat kegiatan lapangan besar yang memerlukan tambahan anggaran. Sumber daya difokuskan pada pemeliharaan pelaporan daring dan komunikasi koordinatif antar fasyankes, sehingga beban biaya relatif rendah. Namun, efisiensi ini belum sebanding dengan hasil kinerja, karena output pelaporan belum bertambah.

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Program yang menunjang capaian kinerja hingga TW III tetap berasal dari **Bimtek PV (4 Februari 2025)** dan **Sharasehan PV (25 April 2025)**. Kedua kegiatan tersebut menghasilkan 26 fasyankes pelapor aktif, **tidak ada kegiatan lanjutan pada TW III** yang dapat memperluas jumlah pelapor, namun demikian masih tetap dilakukan komunikasi untuk pemberian informasi melalui whatsapp.

- **Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

Laporan kinerja Triwulan III Tahun 2025 ini dimanfaatkan untuk mengevaluasi stagnasi capaian indikator serta menjadi dasar penyusunan rencana akselerasi pembinaan fasyankes pelapor pada Triwulan IV. Informasi ini juga digunakan dalam penyusunan laporan kinerja tahunan dan perencanaan kegiatan PV tahun 2026, khususnya untuk penguatan sistem pelaporan KTD/ESO dan peningkatan peran aktif fasyankes.

IKU 3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Pangan Olahan yang dimaksud adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga.
Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling.
Diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling adalah pengambilan sampel dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling yang meliputi kesesuaian target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan pengambilan Kesimpulan, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan sampling dan pengujian
Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya, antara lain : Tindak Lanjut terhadap produk TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa, Pembinaan terhadap Sarana Distribusi dan/atau Sarana Produksi, Pemeriksaan Sarana Produksi dan/atau Sarana Distribusi terhadap implementasi CPPOB/ CPerPOB terkait dengan hasil sampling dan pengujian produk TMS, Koordinasi pusat dan lintas UPT terkait penyampaian hasil uji produk TMS.
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dihitung dari Kesesuaian Target Sampel, Kesesuaian Parameter Uji, Ketepatan Pengambilan Kesimpulan, Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel, Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian, serta Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya

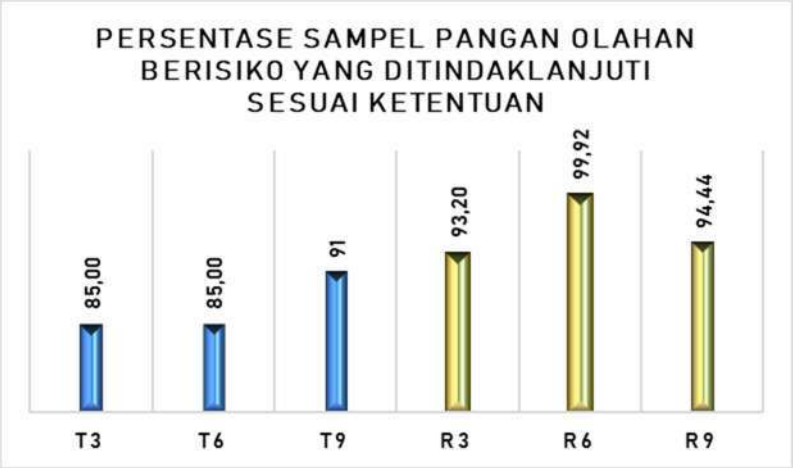
Kegiatan sampling pangan olahan, pemeriksaan penandaan, pengujian dan tindak lanjut produk TMS dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pangan olahan dalam rangka menjamin produk pangan olahan yang beredar aman dan bermutu.

- **Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Kinerja TW III Tahun 2025**

NO	IKU	Target TW III	Realisasi	Capaian (%)
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	94.44	103.78 Sangat Baik

Realisasi kinerja TW III tahun 2025 sebesar **94,44%**, melampaui target TW III sebesar **91%**. Dengan capaian sangat baik di angka 103,78%.

- **Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW Sebelumnya Tahun 2025**



Jika dibandingkan dengan realisasi kinerja TW II sebesar **99,92%**, maka kinerja TW III mengalami sedikit peningkatan menjadi **94,44%**. Hal ini menunjukkan konsistensi pelaksanaan sampling dan pengujian serta tindak lanjut hasil sampling dan pengujian yang relatif stabil dari triwulan sebelumnya.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan Target Tahun 2025**

NO	IKU	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	94,44	103.78	Tercapai/ Melampaui

Secara kumulatif hingga TW III, realisasi kinerja mencapai **94,44%** dari target tahunan **91%**. Hal ini menandakan bahwa pelaksanaan pengawasan sampel pangan olahan berisiko telah berjalan sangat baik dan melebihi target tahunan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

- **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja**

  Keberhasilan capaian kinerja disebabkan oleh peningkatan intensitas kegiatan sampling pangan olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang. Pada TW III, jumlah sampel yang telah dilakukan pengujian mencapai **550 sampel dari target 643 sampel** atau sebesar **85,54%**. Selain itu, koordinasi yang baik antara PIC Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan (Diswasdar), Pusat Data Dan Informasi (Pusdatin) serta tim sampling dan pengujian BBPOM di Semarang mendukung pelaksanaan sampling dan pengujian yang efektif. Namun, masih terdapat kendala berupa beberapa sampel yang tidak sesuai pedoman sampling dan keterlambatan input data ke dalam sistem SIPT karena belum tersedia parameter uji yang sesuai.

- **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

  Untuk menjaga konsistensi capaian kinerja dan memperbaiki kendala yang ada, dilakukan koordinasi lanjutan dengan PIC Diswasdar Pangan Olahan dan Pusdatin guna memastikan kelengkapan dan kesesuaian data hasil sampling di SIPT serta evaluasi terhadap pedoman sampling agar lebih adaptif dengan kondisi di lapangan.

- **Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja**

Indikator	Pagu Anggaran(Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian IKU (%)	Tingkat Efisiensi
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	209,021,463	169,306,488	81.00	103.78	Efisien

Realisasi anggaran hingga TW III mencapai **81%** dengan kriteria **efisien.** Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya telah dilakukan secara efektif dan sesuai kebutuhan operasional, dengan hasil kinerja yang optimal dibandingkan alokasi anggaran yang digunakan.

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Peningkatan capaian kinerja pada Triwulan III dipengaruhi oleh beberapa faktor keberhasilan, antara lain:

- **Pelaksanaan sampling (targeted sampling)** terhadap produk pangan berisiko tinggi berjalan sesuai dengan renlak dan time lain yang ditentukan.
- **Peningkatan kapasitas laboratorium dan efisiensi waktu pengujian**, yang berpengaruh terhadap kesesuaian parameter pengujian dan percepatan timeline/waktu pengujian serta pelaporan pengujian.

- **Koordinasi bidang Pengawasan dan Laboratorium** yang semakin kuat, sehingga pelaksanaan sampling dan pengujian serta tindak lanjut produk pangan olahan yang tidak memenuhi syarat mutu dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman Sampling dan Pengujian.

- **Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

  Laporan kinerja ini dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi efektivitas pelaksanaan pengawasan sampel pangan olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang, serta sebagai dasar perbaikan strategi sampling dan tindak lanjut hasil pengawasan untuk periode berikutnya.

IKU 4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar

---

Sampel KLB keracunan pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan yang berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengkonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/ atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L).

Sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB keracunan pangan berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk Pangan Olahan Dalam Kemasan (PODK) juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM.

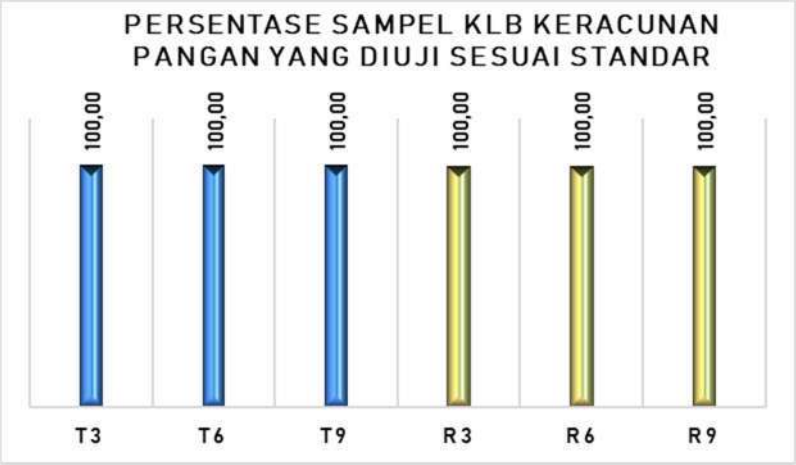
KLB keracunan pangan bersifat insidental dan tidak terprediksi sehingga diperlukan koordinasi yang baik dan intensif antar lintas sektor termasuk dalam penentuan parameter pengujian dan proses pengujian sehingga sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

- **Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Kinerja TW III Tahun 2025**

NO	IKU	Target TW III	Realisasi	Capaian (%)
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00	100,00	100,00 Baik

Realisasi kinerja TW III tahun 2025 mencapai 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh sampel KLB keracunan pangan yang diterima telah diuji sesuai dengan standar yang berlaku, tanpa adanya penurunan kualitas maupun ketertinggalan jadwal pemeriksaan.

- **Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW Sebelumnya Tahun 2025**



Dibandingkan dengan realisasi TW II yang juga sebesar 100%, capaian kinerja TW III menunjukkan konsistensi dalam pelaksanaan kegiatan uji sampel KLB. Meskipun jumlah kasus bervariasi antar bulan, kualitas dan standar pengujian tetap terjaga dengan baik.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan Target Tahun 2025**

NO	IKU	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00	100,00	100,00	Tercapai/ Melampaui

Secara kumulatif hingga TW III, capaian kinerja mencapai 100% dari target tahunan 100%, menandakan bahwa seluruh kegiatan pemeriksaan sampel KLB telah dilakukan sesuai dengan protokol uji yang berlaku. Tidak terdapat deviasi dari target tahunan, yang berarti kegiatan berjalan sesuai perencanaan.

- **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja**

Keberhasilan capaian kinerja dipengaruhi oleh kesiapsiagaan petugas dalam merespons laporan KLB pangan yang diteruskan oleh Dinas Kesehatan dan instansi terkait. Pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh sampel yang masuk dan memenuhi kriteria, seperti pada kasus Ikky Jeli, Seblak dan mie kuning, Susu KUN/minuman mengandung susu, dan

Boromon cookies.
Kendala utama yang dihadapi adalah tidak selalu adanya kasus KLB setiap bulan, sehingga volume pemeriksaan tidak konstan. Namun, hal ini tidak memengaruhi tingkat pencapaian indikator karena setiap kasus yang muncul tetap tertangani sesuai standar.

- **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**
  Upaya perbaikan diarahkan pada peningkatan koordinasi dengan DKK, Labkesda, dan Pusdatin agar setiap potensi kasus KLB dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti dengan pengujian sampel. Selain itu, perlu penguatan komunikasi antarinstansi untuk memastikan kejelasan klasifikasi kasus (apakah termasuk KLB atau MBG) serta mekanisme rujukan laboratorium agar tidak terjadi keterlambatan pemeriksaan.
- **Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja**

Indikator	Pagu Anggaran(Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian IKU (%)	Tingkat Efisiensi
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	4,760,000	3,514,610	73.84	100.00	Efisien

Realisasi anggaran hingga TW III tercatat 73,84% dengan tingkat efisiensi 95% (efisien). Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya telah optimal untuk mendukung kegiatan pemeriksaan sampel KLB yang jumlahnya fluktuatif, tanpa pemborosan anggaran.

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**
  Kegiatan yang paling berperan dalam keberhasilan indikator ini adalah pengawasan dan pengujian cepat terhadap sampel KLB pangan yang diterima dari Dinas Kesehatan serta laboratorium daerah. Prosedur pengujian dilakukan sesuai standar metode dan parameter yang ditetapkan, termasuk uji kimia, mikrobiologi, dan logam berat.
- **Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**
  Laporan kinerja ini dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi kesiapsiagaan pengawasan pangan terhadap kasus KLB serta dasar penyusunan langkah peningkatan koordinasi antarinstansi dalam pengendalian risiko keamanan pangan di wilayah kerja BBPOM di Semarang.

IKU 5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Kategori pangan PIRT yang disampling mengacu pada peraturan BPOM Nomor 4 tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga yang terdiri dari 11 kategori pangan. Penetapan proporsi per kategori target pangan PIRT yang disampling ditentukan dengan *risk based* berdasarkan beberapa aspek seperti PIRT yang beredar, potensi risiko untuk produk asal hewan dan ikan, Riwayat temuan produk tidak memenuhi syarat, produk yang berpotensi dengan BTP maksimal

level, potensi penggunaan bahan berbahaya/ bahan tidak diizinkan pada pangan, dan potensi terhadap target konsumen tertentu. Selanjutnya jumlah dan kategori sampel pangan PIRT yang disampling sesuai dengan prioritas sampling yang ditelah ditetapkan dan disepakati. Pengambilan sampel pangan PIRT dilakukan dari peredaran atau sarana distribusi pangan yang ada pada wilayah kerja Balai Besar POM di Semarang. Jadwal sampling PIRT oleh UPT BPOM dilakukan pada TW I tahun berjalan agar tidak terjadi sampling berulang pada produk yang sama dengan Dinas Kesehatan.

Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dihitung berdasarkan rumus = 20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F dimana

A adalah kesesuaian target PIRT yang diperoleh dari : (A1 + A2) /2
- A1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%
- A2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

B adalah kesesuaian parameter uji yang dihitung dari : (Jumlah sampel sesuai/ Total Sampel PIRT) X 100%

C adalah ketepatan pengambilan sampel yang dihitung dari : (Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

D adalah ketepatan waktu pengambilan sampel dihitung dari : (Jumlah sampel diambil di TW 1/ Total Sampel PIRT) X 100%

E adalah ketepatan waktu pelaporan dihitung dari (Jumlah sampel tepat waktu/ Total Sampel PIRT) X 100%

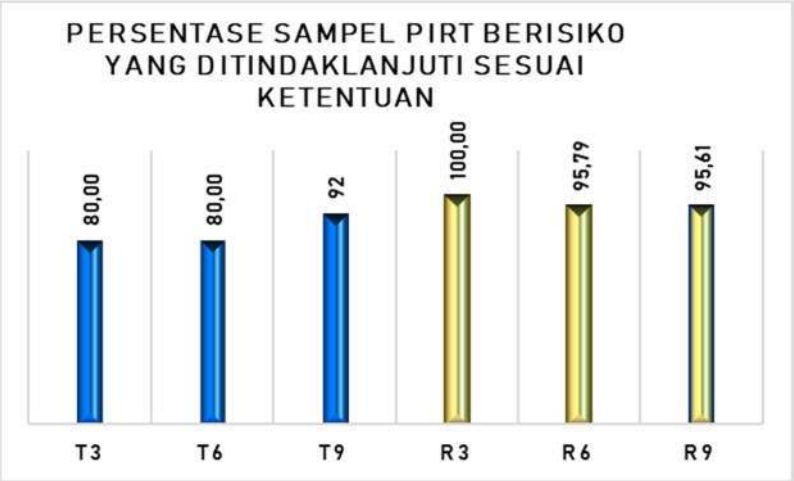
F adalah tindak lanjut sampel PIRT dihitung dari : (Jumlah Sampel PIRT yang ditindaklanjuti/Total jumlah sampel yang TMS) x100%

- **Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW III Tahun 2025**

NO	IKU	Target TW III	Realisasi	Capaian (%)
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92	95.61	103,92 Sangat Baik

Pada Triwulan III Tahun 2025, target kinerja ditetapkan sebesar **92%**, sedangkan realisasi capaian mencapai **95,61%**, atau **103,92%** dari target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tindak lanjut terhadap sampel PIRT berisiko telah melebihi target yang direncanakan.

- **Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW Sebelumnya Tahun 2025**



Jika dibandingkan dengan capaian pada Triwulan II, kinerja Triwulan III meski menunjukkan **penurunan tetapi d**ari sisi jumlah tindak lanjut maupun ketepatan waktu pelaksanaan. Peningkatan ini menggambarkan adanya perbaikan koordinasi lintas bidang dalam memastikan setiap hasil pengawasan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan Target Tahun 2025**

NO	IKU	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92	95,61	103.92	Tercapai/ Melampaui

Realisasi kinerja sampai Triwulan III (95,79%) telah melampaui target tahunan sebesar 92%, sehingga capaian terhadap target tahunan mencapai **104,12%**. Dengan demikian, indikator ini berpotensi mencapai target akhir tahun dengan tingkat konsistensi yang baik.

- **Analisis Penyebab Keberhasilan/Peningkatan Kinerja**

Keberhasilan capaian ini dipengaruhi oleh **pemenuhan target sampel PIRT sebesar 100,89%**, **Kesesuaian Parameter Uji 100%**, **Ketepatan Pengambilan Kesimpulan 100%**, **Ketepatan Waktu Pelaporan 100%**, dan **Tindak lanjut sampel PIRT 100%**. Meskipun **ketepatan waktu pengambilan sampel baru mencapai 56,14%**, namun hal tersebut tidak berdampak signifikan terhadap hasil keseluruhan karena adanya optimalisasi proses pelaporan dan tindak lanjut oleh petugas.

- **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Untuk mempertahankan capaian kinerja yang baik, dilakukan **peningkatan efisiensi waktu pengambilan sampel**. Selain itu, akan diperkuat **koordinasi antar bidang** dan **monitoring pelaksanaan tindak lanjut** agar proses dapat dilakukan lebih cepat tanpa mengurangi ketepatan hasil pengujian.

- **Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja**

Indikator	Pagu Anggaran(Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian IKU (%)	Tingkat Efisiensi
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	208,958,769	169,255,706	81.00	103.92	Efisien

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya tercatat sebesar **95% (efisien)** dengan **realisasi anggaran 81%**. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja yang tinggi dapat diperoleh dengan penggunaan anggaran yang relatif hemat dan terukur.

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**
  Capaian indikator ini didukung oleh kegiatan **pengawasan post-market pangan olahan dan PIRT**, termasuk **pengambilan sampel, pengujian laboratorium, dan tindak lanjut hasil pengawasan**. Kegiatan pendampingan dan refreshment terhadap petugas sampling turut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelaporan dan tindak lanjut.

- **Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**
  Laporan kinerja ini dimanfaatkan sebagai **bahan evaluasi periodik** bagi pimpinan untuk menilai efektivitas pelaksanaan pengawasan produk PIRT di wilayah kerja BBPOM di Semarang. Selain itu, hasilnya menjadi dasar dalam **penyesuaian target dan perencanaan kegiatan pengawasan triwulan berikutnya**.

IKU 6. Persentase keputusan rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

---

Keputusan/ rekomendasi pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/ distribusi obat dan makanan. Baik terhadap sarana yang Memenuhi Ketentuan Maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Keputusan/ rekomendasi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/ Pencabutan Ijin/ Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus dan pengaduan konsumen. Stakeholder yang dimaksud meliputi pelaku usaha dan lintas ektor.

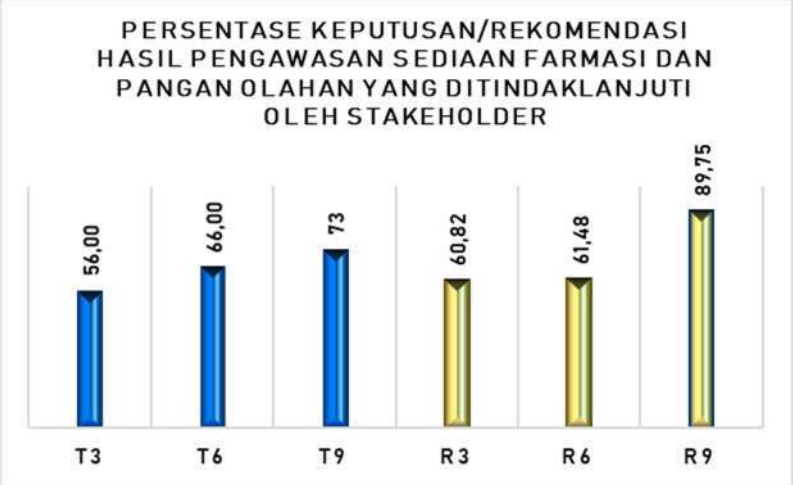
Tindak lanjut yang cepat dan tepat dari stakeholder terkait keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan sangat penting untuk mencegah risiko kesehatan dan risiko lainnya yang dapat ditimbulkan oleh proses produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang tidak sesuai ketentuan.

- **Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW III Tahun 2025**

NO	IKU	Target TW III	Realisasi	Capaian (%)
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	76	89.75	118.09 Sangat Baik

Pada Triwulan III Tahun 2025, target kinerja ditetapkan sebesar **76%**, sedangkan realisasi capaian mencapai **89,75%** atau **118,09%** dari target triwulanan. Hal ini menunjukkan bahwa tindak lanjut hasil pengawasan telah berjalan lebih cepat dari perkiraan dan menunjukkan komitmen kuat dari pelaku usaha serta stakeholder lintas sektor dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BBPOM di Semarang.

- **Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW sebelumnya Tahun 2025**



Dibandingkan dengan kinerja Triwulan II (61,48%), terjadi peningkatan sebesar **28,27 poin persentase** pada Triwulan III. Kenaikan ini mencerminkan meningkatnya efektivitas tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan, terutama setelah dilaksanakannya **desk CAPA** dan **bimbingan teknis IPCPPOB** yang mendorong pelaku usaha untuk lebih cepat menindaklanjuti temuan pengawasan.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan Target Tahun 2025**

NO	IKU	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	86,00	89,75	104.36	▲ Tercapai/ Melampaui

Dari target tahunan sebesar **86%**, realisasi hingga Triwulan III sudah mencapai **104,36%** dari target tahun berjalan. Capaian ini menunjukkan

bahwa indikator telah **melampaui target tahunan**, bahkan sebelum memasuki Triwulan IV, menandakan efektivitas langkah tindak lanjut hasil pengawasan di berbagai sektor.

- **Analisis Penyebab Keberhasilan/Peningkatan Kinerja**
  Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sampai dengan September 2025, dari 566 rekomendasi hasil pengawasan yang disampaikan kepada pelaku usaha, sebanyak 450 telah ditindaklanjuti melalui CAPA, dan seluruh rekomendasi lintas sektor (100%) juga telah ditindaklanjuti. Faktor pendorong keberhasilan ini antara lain konsistensi pelaksanaan monev CAPA, peningkatan pembinaan sarana produksi, serta pendampingan teknis dalam penyusunan CAPA sesuai prinsip Good Manufacturing Practices (GMP).
- **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**
  Ke depan, BBPOM di Semarang akan terus melaksanakan monitoring berkala terhadap pelaku usaha yang belum menyampaikan CAPA serta memperkuat mekanisme pengingat dan pendokumentasian tindak lanjut. Selain itu, akan dilakukan bimbingan teknis lanjutan untuk memastikan CAPA yang disusun benar-benar efektif dan berorientasi pada perbaikan sistem mutu di sarana produksi.

- **Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja**

Indikator	Pagu Anggaran(Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian IKU (%)	Tingkat Efisiensi
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	4,130,000	0	0.00	118.09	

Walaupun realisasi anggaran pada TW III masih 0%, kinerja berhasil melampaui target berkat optimalisasi kegiatan rutin pengawasan, koordinasi lintas bidang, serta dukungan internalisasi program monev CAPA. Hal ini menunjukkan bahwa capaian indikator diperoleh dengan efisiensi yang belum dapat ditentukan karena kegiatan ini berjalan tanpa anggaran atau menggunakan anggaran lain yang tidak di alokasikan ke iku ini.

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja**

  Program yang berkontribusi terhadap keberhasilan indikator ini meliputi Desk CAPA, monev berkala sarana produksi, dan bimbingan teknis IPCPPOB untuk sarana pangan, obat tradisional, dan kosmetik. Kegiatan-kegiatan tersebut terbukti meningkatkan tingkat kepatuhan pelaku usaha dan mempercepat proses tindak lanjut hasil pengawasan.

- **Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

Laporan kinerja ini dimanfaatkan oleh pimpinan BBPOM di Semarang sebagai dasar dalam evaluasi efektivitas pembinaan, penentuan prioritas pengawasan pada TW berikutnya, serta perumusan strategi peningkatan tindak lanjut hasil pengawasan agar capaian target tahunan tetap terjaga dan berkelanjutan.

IKU 7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi:

1) Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca, dan Rumah Sakit).
2) Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi industri obat tradisional, Industri Ekstrak bahan alam, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha mikro obat tradisional, industri suplemen kesehatan
3) Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan

Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Perhitungan Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan menggunakan rumus:
= rata-rata dari % Sarprod Obat, % Sarprod Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, % Sarprod Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

% Sarprod Obat = Rata-rata (A+B+C)

A. Kesesuaian sasaran dan cakupan pengawasan
= (Jumlah sarana yang diperiksa sesuai dengan sasaran dan cakupan target tahunan/Jumlah sasaran dan cakupan target tahunan) X 100%

B. Jumlah pelaksanaan inspeksi
= (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target tahunan) X 100%

C. Kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut
= (Nilai kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut/100) X100%.

% Sarprod OBA dan SK = Rata-rata (A+B+C+D)

1. Pelaksanaan inspeksi
   = (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target tahunan) X 100%
2. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat
   = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%
3. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi
   = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana / jumlah sarana yang selesai diperiksa/inspeksi) × 100%
4. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana
   = (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%

% Sarprod Kosmetik = Rata-rata (A+B+C+D)

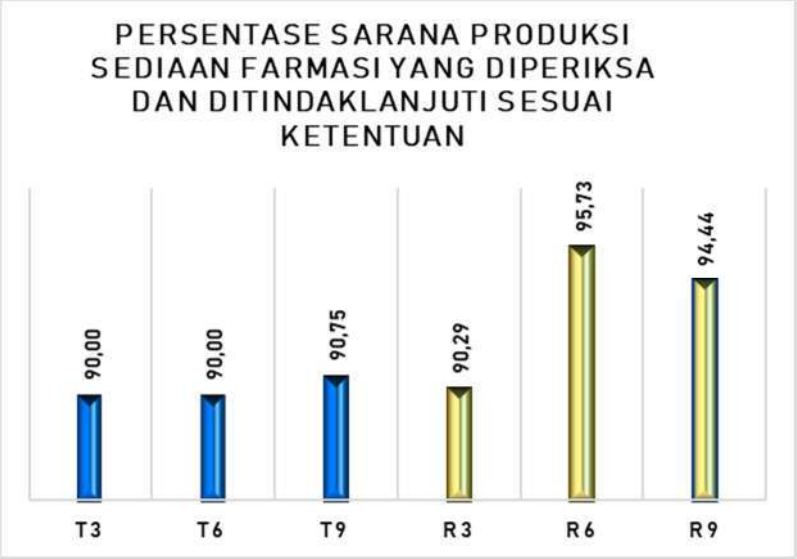
1. Pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target tahunan) X 100%
2. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%
3. akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%
4. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%

- **Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW III Tahun 2025**

NO	IKU	Target TW III	Realisasi	Capaian (%)
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	94.44	104.51 Sangat Baik

Pada Triwulan III Tahun 2025, target kinerja ditetapkan sebesar **90,75%**, sementara realisasi capaian mencapai **94,44%**, atau **104,51% dari target triwulanan**. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi telah melampaui target yang ditetapkan, dengan tingkat tindak lanjut hasil pemeriksaan yang juga sesuai ketentuan.

- **Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW sebelumnya Tahun 2025**



Jika dibandingkan dengan capaian Triwulan II sebesar **95,73%**, kinerja Triwulan III menunjukkan hasil yang relatif stabil dengan sedikit penurunan sebesar **1,29 poin persentase**. Meskipun demikian, capaian ini tetap berada di atas target triwulanan dan memperlihatkan konsistensi kinerja pengawasan terhadap sarana produksi sediaan farmasi di wilayah kerja BBPOM di Semarang.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan Target Tahun 2025**

NO	IKU	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,75	94,44	104.07	Tercapai/ Melampaui

Dari target tahunan sebesar **90,75%**, realisasi hingga Triwulan III mencapai **104,51% dari target tahun berjalan**, menandakan bahwa indikator ini telah melampaui target tahunan bahkan sebelum Triwulan IV dimulai. Hal tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan tindak lanjut hasilnya oleh bidang terkait.

- **Analisis Penyebab Keberhasilan/Peningkatan Kinerja**

Hingga September 2025, **pemeriksaan sarana produksi telah mencapai 94% (49 sarana dari target tahunan 52 sarana)**. Secara rinci, capaian per sektor menunjukkan:

- **Industri Farmasi (IF): 71,43%** atau 5 dari 7 sarana, menunggu jadwal inspeksi pusat;
- **IOT/UKOT/UMOT: 96%** (25 dari 26 sarana);
- **IKOS: 107,14%** (15 dari 14 sarana);
- **ISK: 100%** (5 dari 5 sarana).

Seluruh hasil pemeriksaan telah dilaporkan melalui aplikasi **SIPT**, dan

kesesuaian tindak lanjut menunjukkan kepatuhan yang baik dari pelaku usaha terhadap hasil pemeriksaan BBPOM di Semarang.

- **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

  Upaya perbaikan dilakukan melalui koordinasi aktif dengan pusat untuk pelaksanaan inspeksi yang dijadwalkan pada Oktober 2025. Selain itu, rencana pelatihan stemsel mandiri yang sebelumnya akan diselenggarakan oleh balai dibatalkan karena kebutuhan pelatihan telah terpenuhi melalui keikutsertaan dua inspektur dalam Pelatihan Produk Biologi Steril yang diselenggarakan oleh pusat. BBPOM di Semarang juga terus memperkuat kapasitas SDM melalui partisipasi inspektur dan spesialis dalam Workshop dan Pelatihan CPOB 2025, mencakup topik Laplins, Radiofarmaka, Produk Biologi, GRP, dan CPOB Dasar.

- **Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja**

Indikator	Pagu Anggaran(Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian IKU (%)	Tingkat Efisiensi
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	131,710,500	106,479,618	80.84	104.07	Efisien

Dengan realisasi anggaran sebesar 80,84% dan capaian IKU **104,07%**, indikator ini menunjukkan efisiensi yang sangat baik dengan tingkat efisiensi **0,95 (kategori efisien)**. Hal ini menandakan bahwa sumber daya yang tersedia telah digunakan secara optimal untuk mencapai target yang melampaui ekspektasi.

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja**

  Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh kegiatan pengawasan dan tindak lanjut sarana produksi secara rutin, pelaksanaan pelatihan teknis dan workshop CPOB, serta partisipasi aktif inspektur dalam Pelatihan Produk Biologi Steril yang meningkatkan kompetensi dalam pengawasan industri farmasi berisiko tinggi. Kegiatan tersebut berkontribusi langsung pada peningkatan akurasi pemeriksaan dan kualitas rekomendasi tindak lanjut.

- **Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

  Laporan kinerja ini dimanfaatkan oleh pimpinan dan bidang pengawasan BBPOM di Semarang sebagai dasar dalam evaluasi capaian pengawasan sediaan farmasi, penentuan prioritas inspeksi berikutnya, serta perencanaan peningkatan kompetensi SDM pengawasan. Hasil analisis juga digunakan sebagai bahan masukan bagi pusat dalam penyusunan jadwal inspeksi sertifikasi dan penguatan sistem pembinaan industri farmasi di wilayah Jawa Tengah.

IKU 8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) selaku otoritas keamanan pangan, senantiasa melakukan pengawasan pangan olahan baik sebelum beredar (pre market) maupun setelah pangan beredar di masyarakat (post-market control) terhadap pemenuhan persyaratan keamanan, mutu, dan gizi pangan. Pengawasan sarana produksi pangan olahan memiliki peran strategis karena selain untuk perlindungan kesehatan konsumen akan pangan olahan yang layak, aman, bermutu dan bergizi, juga berperan dalam meningkatkan daya saing mutu produk di pasar lokal maupun global.

Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dihitung dengan membandingkan jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan jumlah seluruh sarana yang diperiksa.

Tujuan dari indikator persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah untuk mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku, termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan.

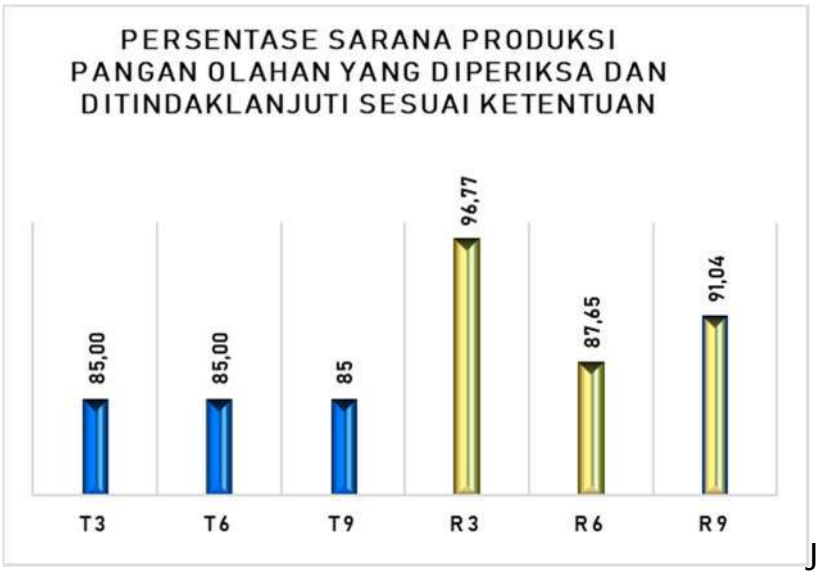
Sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sarana produksi pangan olahan yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD ataupun PIRT di wilayah kerja Balai Besar POM di Semarang yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh UPT, dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi ketepatan waktu tindak lanjut dan kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan.

- **Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW III Tahun 2025**

NO	IKU	Target TW III	Realisasi	Capaian (%)
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	91.04	107.11 Sangat Baik

Pada Triwulan III Tahun 2025, target kinerja ditetapkan sebesar **85%**, dengan realisasi mencapai **91,04%**, atau **107,11% dari target triwulanan**. Capaian ini menunjukkan bahwa pemeriksaan sarana produksi pangan olahan telah melampaui target yang direncanakan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas tindak lanjut hasil pengawasan.

- **Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW sebelumnya Tahun 2025**



Jika dibandingkan dengan capaian pada Triwulan II yang mencapai **87,65%**, maka kinerja pada Triwulan III meningkat sebesar **3,39 poin persentase**. Kenaikan ini mengindikasikan peningkatan konsistensi pelaksanaan pemeriksaan serta perbaikan pada aspek ketepatan waktu dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan Target Tahun 2025**

NO	IKU	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	91,04	107.11	Tercapai/ Melampaui

Target tahunan indikator ini ditetapkan sebesar **85%**, dan hingga Triwulan III telah tercapai **107,11% dari target tahunan**. Artinya, pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan sudah melampaui sasaran yang direncanakan untuk satu tahun penuh, menunjukkan efektivitas pelaksanaan kegiatan pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Semarang.

- **Analisis Penyebab Keberhasilan/Peningkatan Kinerja**

Keberhasilan ini didukung oleh capaian ketepatan waktu pemeriksaan sebesar 89,13%, ketepatan tindak lanjut 90,22%, dan evaluasi ketepatan grading mencapai 96,74%. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pengawasan dilakukan secara tepat waktu, tindak lanjut hasil pemeriksaan dilaksanakan sesuai ketentuan, dan hasil evaluasi grading menunjukkan konsistensi dalam penilaian mutu sarana. Peningkatan capaian juga ditunjang oleh sistem pelaporan dan koordinasi internal yang semakin baik antara seksi terkait.

- **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

BBPOM di Semarang tetap berupaya mempertahankan kinerja ini melalui

penguatan sistem pemantauan dan validasi hasil pemeriksaan, serta memastikan seluruh hasil tindak lanjut dilakukan sesuai standar waktu yang telah ditetapkan. Koordinasi dengan pelaku usaha juga terus diperkuat untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hasil pengawasan.

- **Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja**

Indikator	Pagu Anggaran(Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian IKU (%)	Tingkat Efisiensi
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	131,710,500	106,479,618	80.84	107.11	Efisien

Dengan realisasi anggaran sebesar 80,84% dan capaian kinerja 107,11%, indikator ini tergolong efisien dengan nilai efisiensi 0,95. Artinya, penggunaan sumber daya telah dilakukan secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal tanpa pemborosan anggaran.

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Pencapaian ini ditunjang oleh kegiatan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan secara rutin dan terjadwal, pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan yang cepat dan tepat, serta peningkatan kapasitas SDM pengawas melalui pelatihan dan pembinaan teknis terkait pengawasan pangan olahan. Tidak adanya kendala signifikan juga turut memperkuat stabilitas capaian indikator ini.

- **Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

Laporan kinerja ini dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi efektivitas kegiatan pengawasan pangan olahan, sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan rencana tindak lanjut dan prioritas pemeriksaan periode berikutnya. Selain itu, laporan digunakan sebagai acuan pembinaan terhadap industri pangan olahan untuk memastikan pemenuhan standar keamanan dan mutu produk di wilayah pengawasan BBPOM di Semarang.

IKU 9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Pemeriksaan fasilitas distribusi Sediaan Farmasi bertujuan untuk memastikan bahwa sediaan farmasi dikelola sesuai dengan standar yang ditetapkan sehingga mutu dan keamanan sediaan farmasi tetap terjaga hingga ke tangan konsumen.

Sarana distribusi Sediaan Farmasi adalah sarana/ fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi :

1. Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian.
2. Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

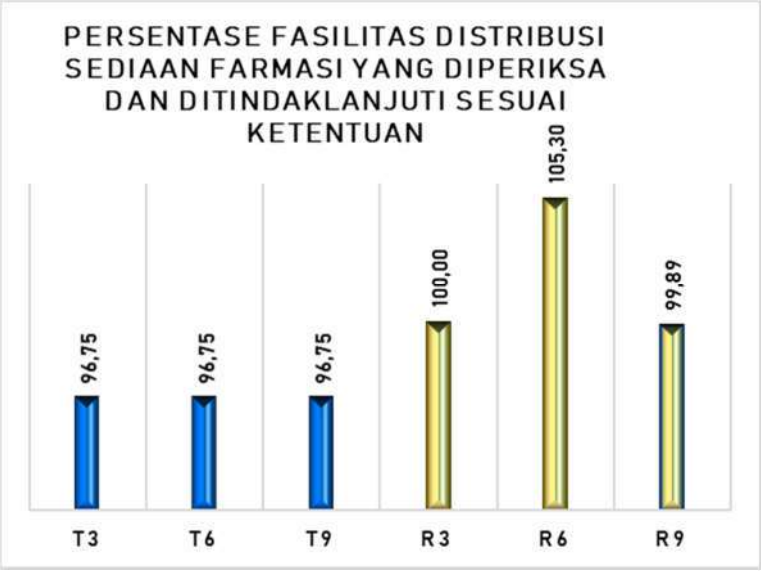
3. Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer.
4. Fasilitas distribusi sediaan farmasi meliputi fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan notifikasi.

- **Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW III Tahun 2025**

NO	IKU	Target TW III	Realisasi	Capaian (%)
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,75	99,89	103,25 Sangat Baik

Pada Triwulan III Tahun 2025, target kinerja ditetapkan sebesar **96,75%**, dengan realisasi **99,89%**, atau dengan capaian **103,25% dari target triwulanan**. Capaian ini menunjukkan bahwa pemeriksaan fasilitas distribusi sediaan farmasi telah melampaui target yang direncanakan, baik dari segi kuantitas sarana yang diperiksa maupun ketepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan.

- **Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW Sebelumnya Tahun 2025**



Jika dibandingkan dengan realisasi pada Triwulan II yang mencapai **105,3%**, kinerja Triwulan III mengalami penurunan sebesar **−2,05 poin persentase**. Namun demikian, capaian tersebut masih berada di atas 100% dari target, yang berarti kinerja pengawasan tetap terjaga dan stabil pada tingkat sangat baik.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan Target Tahun 2025**

NO	IKU	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,75	99,89	103.25	Tercapai/ Melampaui

Target tahunan indikator ini ditetapkan sebesar **96,75%**, dan hingga Triwulan III telah mencapai **103,25% dari target tahunan**. Artinya, pemeriksaan fasilitas distribusi sediaan farmasi telah melampaui sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2025, menunjukkan bahwa pengawasan terhadap distribusi obat dilaksanakan secara efektif dan berkesinambungan.

- **Analisis Penyebab Keberhasilan/Peningkatan Kinerja**

Keberhasilan ini didorong oleh pelaksanaan pemeriksaan yang terjadwal dan terkendali, serta disiplin tim pengawasan dalam memastikan tindak lanjut hasil pemeriksaan dilakukan tepat waktu. Pemeriksaan sarana distribusi dilaksanakan sesuai target sampai dengan September 2025, dengan koordinasi yang baik antara seksi pengawasan dan pelaporan. Selain itu, penggunaan Sistem Informasi Pengawasan Terpadu (SIPT) turut mempercepat proses verifikasi dan pemantauan.

- **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Untuk meningkatkan kinerja pada periode berikutnya, BBPOM di Semarang akan memperkuat pengawasan berbasis risiko dengan memprioritaskan sarana berpotensi pelanggaran tinggi, meningkatkan pembinaan terhadap pelaku usaha, dan memperluas cakupan verifikasi tindak lanjut hasil pemeriksaan melalui koordinasi lintas bidang. Pendekatan ini diharapkan dapat mempertahankan tingkat kepatuhan distributor farmasi yang sudah baik.

- **Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja**

Indikator	Pagu Anggaran(Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian IKU (%)	Tingkat Efisiensi
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	616,270,000	309,026,356	50.14	103,25	Tidak Efisien

Dengan **realisasi anggaran sebesar 50,14%** dan **capaian kinerja 103,25%**, kegiatan ini masuk kategori **tidak efisien** dengan nilai efisiensi

0,86. Meskipun efektivitas pencapaian target sangat baik, rasio antara penggunaan sumber daya dan output perlu ditingkatkan melalui optimalisasi perencanaan anggaran dan penguatan kolaborasi internal agar biaya pelaksanaan lebih proporsional terhadap hasil.

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja**
  Keberhasilan indikator ini didukung oleh program pemeriksaan sarana distribusi yang dilaksanakan rutin, kegiatan monitoring berkala, dan koordinasi intensif antar seksi pengawasan serta bidang informasi dan data. Selain itu, tidak adanya kendala signifikan selama periode pelaksanaan mendukung stabilitas dan konsistensi kinerja pengawasan.

- **Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**
  Laporan kinerja ini dimanfaatkan sebagai alat evaluasi efektivitas pelaksanaan pengawasan distribusi sediaan farmasi serta dasar untuk menetapkan strategi pengawasan berikutnya. Selain itu, laporan ini digunakan sebagai acuan dalam pembinaan dan peningkatan kepatuhan distributor farmasi terhadap ketentuan yang berlaku, guna menjamin mutu dan keamanan produk farmasi yang beredar di wilayah pengawasan BBPOM di Semarang.

IKU 10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

---

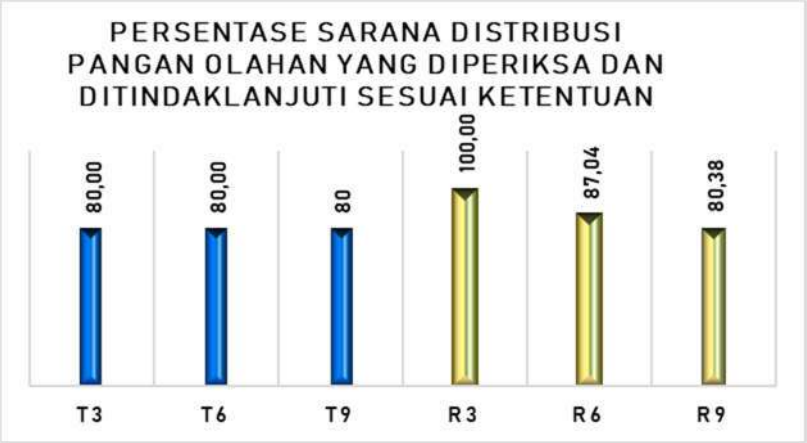
Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dihitung berdasarkan 3 (tiga) komponen yaitu pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa; ketepatan waktu pelaporan; dan kesesuaian tindak lanjut. Tindak lanjut pemeriksaan dihitung terhadap tindak lanjut pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.
Pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan dan tindak lanjutnya merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pangan olahan di wilayah BBPOM di Semarang. Sarana distribusi pangan olahan/ritel merupakan garda terdepan keamanan dan mutu pangan di tingkat peredaran sehingga menjadi bagian tidak terpisahkan dari penjaminan keamanan pangan. Sarana distribusi pangan olahan yang menjadi target pemeriksaan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, penjualan dan/atau penyaluran pangan olahan. Sesuai definisi tersebut maka yang menjadi target pemeriksaan meliputi toko, minimarket, swalayan, grosir, distributor, dan importir. Badan POM telah menerbitkan pedoman sebagai acuan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan yaitu Pedoman Cara Ritel Pangan yang Baik (Toko Modern) tahun 2011 dan Pedoman Cara Ritel Pangan yang Baik di Pasar Tradisional tahun 2015.

- **Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW III Tahun 2025**

NO	IKU	Target TW III	Realisasi	Capaian (%)
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai	80	80.38	100,48 Sangat Baik

Pada Triwulan III Tahun 2025, target kinerja ditetapkan sebesar **80%**, dengan realisasi sebesar **80,38%**, atau mencapai **100,48% dari target triwulanan**. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang telah melebihi target yang ditetapkan untuk periode tersebut. Realisasi bulan September mencakup **16 sarana**, sehingga total hingga akhir Triwulan III mencapai **132 sarana** dari target tahunan **157 sarana (84,1%)**.

- **Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW Sebelumnya Tahun 2025**



Dibandingkan dengan capaian pada Triwulan II (realisasi 87,04%), kinerja Triwulan III mengalami sedikit penurunan menjadi 80,38%. Penurunan ini disebabkan adanya penyesuaian target bulanan dan prioritas kegiatan yang lain. Namun secara kumulatif, capaian masih berada di atas target kumulatif triwulan dan tetap menunjukkan tren pencapaian yang positif.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan Target Tahun 2025**

NO	IKU	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,00	80,38	100.48	Tercapai/ Melampaui

Hingga September 2025, capaian telah mencapai **84,1% dari target tahunan**, menunjukkan kemajuan signifikan menuju target 100% di akhir

tahun. Dengan mempertimbangkan pelaksanaan pemeriksaan rutin di Triwulan IV, target tahunan diperkirakan dapat tercapai bahkan berpotensi melampaui sasaran yang telah ditetapkan.

- **Analisis Penyebab Keberhasilan/Peningkatan Kinerja**

  Keberhasilan capaian kinerja didukung oleh pelaksanaan **monitoring dan evaluasi (monev) berkala**, yang memastikan pemeriksaan dilakukan sesuai jadwal dan standar. Selain itu, tidak adanya kendala lapangan seperti keterbatasan sumber daya, cuaca ekstrem, maupun hambatan administrasi turut memperlancar kegiatan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang.

- **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

  Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian hingga akhir tahun, BBPOM di Semarang akan melakukan **monev lanjutan terhadap sarana yang telah diperiksa**, memperkuat koordinasi lintas bidang, serta memastikan tindak lanjut hasil pemeriksaan tepat waktu. Selain itu, pendekatan pengawasan berbasis risiko akan diterapkan untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya terhadap sarana dengan potensi ketidaksesuaian yang lebih tinggi.

- **Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja**

Indikator	Pagu Anggaran(Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian IKU (%)	Tingkat Efisiensi
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	616,270,000	309,026,356	50.14	100,48	Tidak Efisien

Dengan **realisasi anggaran sebesar 50,14%** dan **capaian IKU sebesar 100,48%**, kegiatan ini dikategorikan **tidak efisien** dengan nilai efisiensi **0,86**. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun target output tercapai dengan baik, masih terdapat ruang perbaikan dalam optimalisasi penggunaan sumber daya, terutama dalam penyesuaian biaya operasional dengan volume kegiatan yang direalisasikan.

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja**

  Kinerja indikator ini didukung oleh kegiatan pemeriksaan rutin terhadap sarana distribusi pangan olahan, pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta kegiatan pembinaan kepada pelaku usaha. Tidak adanya kendala selama pelaksanaan menunjukkan koordinasi antar seksi pengawasan dan perencanaan berjalan efektif. Selain itu, sistem pelaporan yang terintegrasi mempercepat proses validasi data hasil pengawasan.

- **Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

Laporan kinerja ini dimanfaatkan untuk mengevaluasi efektivitas pengawasan sarana distribusi pangan olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang. Informasi capaian digunakan sebagai dasar penyusunan strategi pengawasan berikutnya, termasuk penetapan prioritas pemeriksaan dan pembinaan untuk menjaga mutu serta keamanan pangan olahan yang beredar di masyarakat.

IKU 11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan Olahan.
Iklan diawasi pada pelaksanaan tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta *timeline* yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan dihitung dari rata-rata persentase iklan obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan.
Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan dihitung dari
a. Pemenuhan jumlah target pengawasan
b. Ketepatan waktu pelaporan

Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan dihitung dari :
a. Rerata persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target
b. Rerata persentase iklan yang dilaporkan tepat waktu

Persentase iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan dihitung dari :
a. Pemenuhan target pengawasan
b. Ketepatan waktu pelaporan
c. Akurasi pengambilan Keputusan

Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan dihitung dari :
a. Pemenuhan target pengawasan
b. Ketepatan waktu pelaporan
c. Akurasi pengambilan Keputusan

Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan dihitung dari :
a. Kesesuaian proporsi media iklan yang disampling

b. Pemenuhan target pengawasan
c. Ketepatan waktu pelaporan

Informasi yang disampaikan melalui iklan, merupakan acuan bagi masyarakat untuk menentukan sediaan farmasi dan pangan olahan mana yang akan dibeli. Sehingga iklan sediaan farmasi dan pangan olahan harus benar, jujur dan bertanggungjawab. Hal ini penting agar masyarakat mendapatkan sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan mutu.

- **Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW III Tahun 2025**

NO	IKU	Target TW III	Realisasi	Capaian (%)
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91	96.89	106,47 Sangat Baik

Pada Triwulan III Tahun 2025, target kinerja ditetapkan sebesar **91%**, sedangkan realisasi mencapai **96,89%** atau **106,47% dari target triwulanan**. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pengawasan iklan terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan berjalan melebihi ekspektasi. Hingga September 2025, total **1.099 iklan** telah diawasi dari target **1.353 iklan**, atau setara dengan **81% dari target tahunan**.

- **Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW Sebelumnya Tahun 2025**



Jika dibandingkan dengan capaian Triwulan II sebesar **97,56%**, capaian Triwulan III (96,89%) menunjukkan stabilitas kinerja dengan selisih yang sangat kecil. Hal ini menandakan bahwa pelaksanaan pengawasan iklan tetap konsisten dan terkendali. Jumlah iklan yang diawasi terus meningkat dari 847 iklan di bulan Juli menjadi 1.099 iklan pada bulan September, menunjukkan progres yang berkelanjutan dan sesuai rencana kerja.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan Target Tahun 2025**

NO	IKU	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91,00	96,89	106.47	Tercapai/ Melampaui

Hingga akhir Triwulan III, capaian jumlah pengawasan iklan telah mencapai **81% dari target tahunan**. Dengan mempertimbangkan tren peningkatan yang stabil tiap bulan, target 100% di akhir tahun diyakini dapat tercapai bahkan berpotensi melampaui sasaran yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pengawasan telah berada pada jalur yang sesuai.

- **Analisis Penyebab Keberhasilan/Peningkatan Kinerja**

Keberhasilan dalam pencapaian indikator ini disebabkan oleh penerapan monitoring dan evaluasi rutin terhadap pengawasan iklan di media cetak, media luar ruang, media online, elektronik dan media penyiaran, serta koordinasi aktif antar seksi dan lintas bidang. Tidak adanya kendala lapangan yang berarti seperti keterlambatan pelaporan atau kesulitan verifikasi konten iklan turut memperkuat efektivitas pelaksanaan pengawasan. Penggunaan sistem pemantauan daring juga berperan penting dalam meningkatkan efisiensi proses pengawasan.

- **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Untuk mempertahankan kinerja hingga akhir tahun, BBPOM di Semarang akan memperluas jangkauan pengawasan terhadap iklan media online termasuk media sosial dan platform daring yang berkembang cepat. Selain itu, akan dilakukan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan evaluasi iklan, penguatan kerja sama dengan instansi terkait serta pemantauan tindak lanjut iklan Tidak Memenuhi Ketentuan bagi sarana produksi di wilayah kerja BBPOM di Semarang untuk mempercepat proses klarifikasi dan tindak lanjut temuan.

- **Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja**

Indikator	Pagu Anggaran(Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian IKU (%)	Tingkat Efisiensi
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	54,810,000	17,381,110	31.71	106,47	Tidak Efisien

Dengan realisasi anggaran sebesar 31,71% dan capaian IKU sebesar 106,47%, indikator ini dikategorikan tidak efisien dengan nilai efisiensi 0,75. Walaupun kinerja berhasil melampaui target, rendahnya tingkat efisiensi menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara alokasi

anggaran dan output kegiatan. Diperlukan optimalisasi perencanaan anggaran agar lebih proporsional dengan volume pengawasan..

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja**

  Capaian ini didukung oleh kegiatan pengawasan rutin iklan sediaan farmasi dan pangan olahan baik melalui iklan di media cetak, media luar ruang, media online, elektronik dan media penyiaran. Keberhasilan juga ditunjang oleh kegiatan monitoring terpadu serta evaluasi hasil pengawasan secara berkala yang dilakukan oleh tim pengawasan. Tidak terdapat kendala berarti selama pelaksanaan pengawasan di lapangan.

- **Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

  Laporan kinerja ini digunakan sebagai dasar penyusunan strategi pengawasan dan pembinaan iklan ke depan, terutama dalam mengantisipasi tren iklan daring yang dinamis. Data capaian juga menjadi bahan evaluasi dalam menentukan arah kebijakan pengawasan dan peningkatan efektivitas komunikasi, informasi, serta edukasi kepada pelaku usaha agar iklan yang disampaikan kepada masyarakat tetap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

IKU 12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar

---

Label Produk tembakau dan atau rokok elektronik adalah setiap keterangan mengenai produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada produk tembakau, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada atau merupakan bagian dari kemasan produk tembakau.
Pengawasan Label dilaksanakan dengan menilai kesesuaian terhadap standar pencantuman Peringatan Kesehatan termasuk Informasi pada Kemasan Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik.
Pengawasan Label dilakukan terhadap kemasan sampel Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang diambil di peredaran (tempat penjualan dan/atau distributor).
Sesuai standar berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan mencakup peraturan pemerintah, petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan produk tembakau; pedoman tindak lanjut dan ketentuan lain yang berlaku.
Produk Tembakau adalah setiap produk yang seluruhnya atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dipanaskan, diuapkan, dihisap, dihirup,

dikunyah, atau dengan cara konsumsi apapun. Produk Tembakau tersebut meliputi:
a.rokok;
b.cerutu;
c.rokok daun;
d.tembakau iris;
e. tembakau padat dan cair; dan
f. hasil pengolahan tembakau lainnya.
Rokok Elektronik adalah hasil tembakau dan/atau nikotin dan/atau bahan lain berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakau maupun bahan lainnya yang Dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektronik kemudian dihisap.
Cara Perhitungan Dan Formula : % label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar = A+B/2

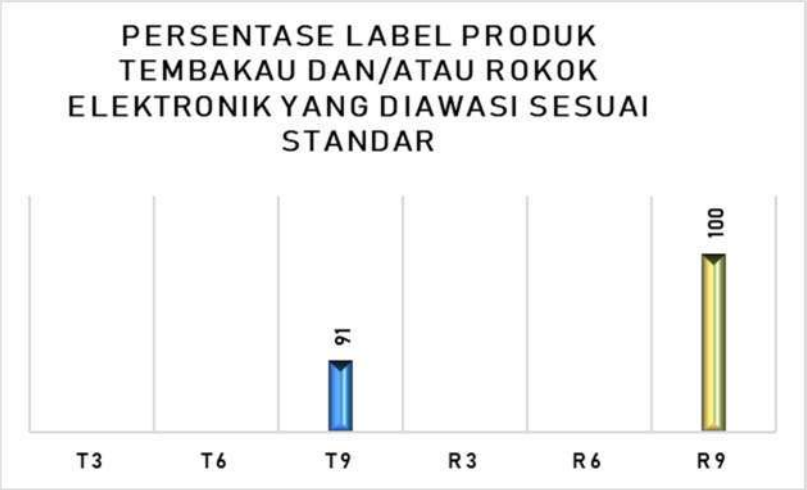
Keterangan:
A: Persentase Pemenuhan jumlah target pengawasan label :
(Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi / Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi) x 100%
B: Persentase ketepatan waktu pelaporan label:
(Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi) x 100%
Keterangan:
- Jumlah label yang selesai diawasi adalah jumlah label yang telah selesai diinput melalui SIPT dan dikirimkan oleh Kepala UPT ke BPOM Pusat.
- Jumlah target label yang diawasi adalah jumlah target yang ditetapkan untuk masing-masing UPT yang telah ditetapkan BPOM pusat setiap tahunnya dan disampaikan melalui surat edaran.
- Jumlah label yang dilaporkan tepat waktu adalah jumlah label yang selesai diawasi, dilaporkan dan dikirimkan oleh Kepala UPT ke BPOM Pusat melalui SIPT secara periodik setiap bulan paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya.
- Sumber data baik jumlah label maupun ketepatan waktu pelaporan berasal dari data tarikan laporan pengawasan penandaan pada aplikasi SIPT

- **Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW III Tahun 2025**

NO	IKU	Target TW III	Realisasi	Capaian (%)
12	Persentase label produk tembakau dan/ atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91	100	109,89 Sangat Baik

Pada Triwulan III Tahun 2025, target kinerja ditetapkan sebesar 91%, dengan realisasi sebesar 100% atau 109,89% dari target triwulanan. Capaian ini menunjukkan bahwa kegiatan pengawasan penandaan produk tembakau dan rokok elektronik telah melampaui target yang direncanakan. Hingga September 2025, telah dilakukan pengawasan terhadap 155 produk rokok, terdiri dari 153 rokok konvensional/batang dan 2 rokok elektrik, dengan capaian 74,87% dari target tahunan 207 rokok.

- **Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW Sebelumnya Tahun 2025**



Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar ini merupakan IKU yang baru ditetapkan pada Bulan Agustus sehingga belum dapat dibandingkan capaian kinerja dengan TW sebelumnya. Jika dilihat dari capaian pada Triwulan III yang mencapai 100%, mencerminkan optimalisasi kegiatan pengawasan di lapangan, termasuk pemeriksaan fisik label dan pelaporan hasil pengawasan melalui Sistem Informasi Pengawasan Tembakau (SIPT) yang tepat waktu.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan Target Tahun 2025**

NO	IKU	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91,00	100,00	109.89	Tercapai/ Melampaui

Target tahunan indikator ini ditetapkan sebesar 91%, sementara capaian

hingga Triwulan III telah mencapai 109,89% dari target tahunan. Artinya, pengawasan terhadap label produk tembakau dan/atau rokok elektronik telah melampaui sasaran tahunan yang direncanakan. Capaian ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan pengawasan yang konsisten dan terukur.

- **Analisis Penyebab Keberhasilan/Peningkatan Kinerja**

  Keberhasilan ini didukung oleh pemenuhan timeline pelaporan SIPT yang disiplin setiap bulan (maksimal tanggal 5 bulan berikutnya), serta Keberhasilan juga ditunjang oleh kegiatan monitoring terpadu serta evaluasi hasil pengawasan secara berkala yang dilakukan oleh tim pengawasan. Tidak adanya kendala teknis maupun administratif yang berarti juga berkontribusi pada ketepatan pelaksanaan dan pelaporan hasil pengawasan.

- **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

  Ke depan, BBPOM di Semarang akan memperkuat pemantauan terhadap rokok elektronik yang peredarannya semakin meluas serta memperbarui metode pengawasan agar lebih adaptif terhadap dinamika produk baru. Selain itu, peningkatan kapasitas petugas pengawasan melalui pelatihan teknis terkait standar pelabelan dan penandaan produk tembakau akan terus dilakukan. Sistem pelaporan SIPT juga akan dioptimalkan untuk mempercepat validasi dan analisis data hasil pengawasan.

- **Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja**

Indikator	Pagu Anggaran(Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian IKU (%)	Tingkat Efisiensi
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	592,721,000	474,067,548	79.98	109,89	Efisien

Berdasarkan data pada tabel, alokasi anggaran untuk kegiatan pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar sebesar Rp592.721.000 dengan realisasi anggaran Rp474.067.548 atau 79,98% dari pagu, serta capaian indikator kinerja utama (IKU) sebesar 109,89% yang menunjukkan kinerja melampaui target. Perbandingan antara capaian kinerja dan tingkat serapan anggaran menghasilkan nilai efisiensi sebesar 0,95 yang tergolong dalam kategori efisien, sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya telah mampu menghasilkan output kinerja yang optimal dengan pengeluaran yang relatif hemat. Meskipun demikian, untuk peningkatan efisiensi ke depan masih diperlukan optimalisasi kegiatan pengawasan agar pemanfaatan sumber daya dapat lebih maksimal.

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja**

  Keberhasilan indikator ini ditunjang oleh kegiatan pengawasan rutin terhadap penandaan rokok konvensional dan rokok elektrik, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) secara berkala oleh tim pengawasan. Pelaporan tepat waktu melalui SIPT juga menjadi faktor pendukung penting dalam menjaga kelancaran proses dokumentasi dan pelaporan hasil kegiatan. Tidak terdapat kendala berarti selama pelaksanaan pengawasan di lapangan.

- **Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

  Laporan kinerja ini digunakan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan strategi pengawasan label produk tembakau dan rokok elektronik pada periode berikutnya. Data hasil pengawasan juga dimanfaatkan dalam pembinaan kepada pelaku usaha agar lebih memahami ketentuan pelabelan dan peringatan kesehatan. Selain itu, laporan ini menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi kebijakan terkait efektivitas pengawasan produk tembakau di wilayah kerja BBPOM di Semarang.

IKU 13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

Indikator "Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT" mengukur kesesuaian Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM dalam melaksanakan kegiatan pengendalian Antimicrobial Resistance (AMR) dan mencapai target yang telah ditetapkan. Target yang dimaksud adalah indikator teknis pengendalian AMR sebagaimana tertuang dalam rencana aksi pengendalian AMR di lingkungan Badan POM.

Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT dihitung berdasarkan rerata capaian UPT dalam melaksanakan rencana aksi pengendalian AMR sesuai target yang ditetapkan,

yaitu:

1) Penggunaan Tools Pengawasan AMR (A)

2) Pelaksanaan Bimtek (B)

3) Pelaksanaan Advokasi (C), dan

4) Pelaksanaan Publikasi (D)

Formula untuk menghitung "Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT" yaitu: Capaian UPT = 25% A + 25% B + 25% C + 25% D

Penilaian pemenuhan target pengendalian AMR dihitung dengan cara:

1) 25% dari persentase jumlah penggunaan dan ketepatan pengisian tools antibiotik pada pemeriksaan Apotek (A).

(A) dihitung berdasarkan jumlah penggunaan tools antibiotik terhadap jumlah target apotek dan ketepatan pengisian setiap pertanyaan dalam tools antibiotik.

2) 25% dari persentase capaian pelaksanaan bimbingan teknis terkait pengendalian resistensi antimikroba (B).

(B) dihitung berdasarkan Jumlah kegiatan bimbingan teknis kepada sarana pelayanan kefarmasian khususnya Apotek dengan topik pengendalian resistensi antimikroba dibandingkan target tahunan bagi setiap UPT

3) 25% dari persentase capaian pelaksanaan advokasi lintas sektor terkait pengendalian resistensi antimikroba (C).

(C) dihitung berdasarkan Jumlah kegiatan advokasi dengan stakeholder dalam topik pengendalian resistensi antimikroba dibandingkan target tahunan bagi setiap UPT.

4) 25% dari persentase capaian publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter (D).

(D) dihitung berdasarkan Jumlah publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter

Formula:

Persentase pemenuhan target pengendalian = 25% A + 25% B + 25% C + 25% D AMR di wilayah UPT

- **Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW III Tahun 2025**

NO	IKU	Target TW III	Realisasi	Capaian (%)
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT			

Pada Triwulan III Tahun 2025, indikator Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di wilayah UPT belum memiliki realisasi capaian karena pelaksanaan kegiatan utama dan pengumpulan hasil pengawasan dijadwalkan pada Triwulan IV. Target tahun 2025 ditetapkan sebesar **100%**, sedangkan hingga akhir September belum terdapat capaian kuantitatif. Namun demikian, kegiatan pendukung seperti pemeriksaan

sarana, bimbingan teknis (Bimtek) dan advokasi lintas sektor serta publikasi hasil pengawasan AMR telah dapat dilaksanakan.

- **Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW Sebelumnya Tahun 2025**



Jika dibandingkan dengan Triwulan II, kegiatan pada Triwulan III lebih banyak difokuskan pada penguatan pelaksanaan lapangan dan koordinasi lintas sektor. Pemeriksaan Sanyanfar telah menggunakan form pengawasan AMR yang diisi lengkap oleh petugas, dengan total 135 sarana sampai Juli, meningkat menjadi 153 sarana sampai Agustus, dan kegiatan lanjutan di bulan September mencakup pengawasan di 80 apotek. Meskipun belum menghasilkan nilai capaian IKU, aktivitas tersebut menjadi dasar capaian akhir tahun.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan Target Tahun 2025**

NO	IKU	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100,00	Tahunan	Tahunan	Tahunan

Secara kumulatif hingga TW III, belum terdapat realisasi kinerja yang dapat diinput dalam sistem karena pengumpulan dan validasi data AMR baru akan dilakukan secara menyeluruh pada TW IV. Namun, progres kegiatan lapangan telah mencapai lebih dari 75% dari total target sarana yang direncanakan, menunjukkan bahwa capaian target tahunan sangat mungkin terpenuhi pada akhir 2025.

- **Analisis Penyebab Keberhasilan/ Peningkatan Kinerja**

Kesiapan pelaksanaan dan keterlibatan lintas sektor menjadi faktor pendukung utama keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengendalian AMR. Hingga TW III, telah dilaksanakan Bimtek AMR dua kali di Semarang

(berkolaborasi dengan PBF AAM) dan di Pati, serta KIE AMR di Rembang yang melibatkan 19 OPD kesehatan. Selain itu, dilakukan pula advokasi kepada Wakil Bupati Jepara, yang menghasilkan terbitnya Surat Edaran AMR oleh Bupati Jepara pada 26 September 2025. Aktivitas tersebut memperkuat fondasi keberhasilan target pada TW IV.

- **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

  Untuk memastikan target tahunan tercapai, BBPOM di Semarang akan fokus pada finalisasi pengawasan di seluruh sarana dan validasi data AMR pada TW IV. Penguatan koordinasi dengan Dinas Kesehatan kabupaten/kota akan ditingkatkan, terutama dalam hal pelaporan form pengawasan dan tindak lanjut hasil evaluasi. Selain itu, akan dilakukan integrasi data hasil pengawasan ke sistem SIPT dan laporan nasional AMR agar proses pelaporan lebih cepat dan akurat.

- **Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja**

Indikator	Pagu Anggaran(Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian IKU (%)	Tingkat Efisiensi
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	4,760,000	3,514,610	73.84		

Realisasi anggaran untuk kegiatan pengendalian AMR hingga TW III sebesar **73,84%** dari total alokasi, sementara kinerja utama belum terealisasi karena waktu pelaksanaan yang memang direncanakan pada TW IV. Tingkat efisiensi sementara belum dapat diukur sepenuhnya, namun pemanfaatan sumber daya dinilai efektif untuk kegiatan koordinasi, advokasi, dan Bimtek lintas wilayah.

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja**

  Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dan mendukung pencapaian target antara lain pengawasan sarana pelayanan kesehatan menggunakan form AMR, Bimtek AMR di tiga wilayah (Semarang, Pati, dan Rembang), KIE lintas sektor, serta advokasi kepada pemerintah daerah. Tidak terdapat kendala signifikan, namun keterbatasan waktu pelaksanaan menyebabkan capaian baru akan terukur pada akhir tahun.

- **Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

  Laporan kinerja TW III ini menjadi dasar evaluasi progres pelaksanaan pengendalian AMR di wilayah kerja BBPOM di Semarang, serta acuan penyusunan strategi percepatan pencapaian target di TW IV. Data hasil kegiatan akan dimanfaatkan untuk penyusunan laporan tahunan,

penguatan kebijakan lintas sektor, serta penyusunan rencana kerja tahun berikutnya dalam mendukung pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pengendalian Resistensi Antimikroba (RAN-AMR).

IKU 14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan BBPOM di Semarang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Standar Kemampuan Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah suatu cakupan kemampuan laboratorium kimia dan biologi yang harus dipenuhi oleh setiap laboratorium dalam rangka peningkatan kapabilitas dan kapasitas laboratorium. Terdapat lima tingkatan laboratorium (Tier) di lingkungan Badan POM, yaitu : Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) sebagai Laboratorium Tingkat 5, Laboratorium Balai Besar POM yang merupakan Laboratorium Regional sebagai Laboratorium Tingkat 4, Laboratorium Balai Besar/Balai POM di tingkat provinsi sebagai Laboratorium Tingkat 3, Laboratorium di Balai POM di Kabupaten/Kota sebagai Laboratorium Tingkat 2 dan Laboratorium Loka POM sebagai Laboratorium Tingkat 1.

Balai Besar POM di Semarang sebagai laboratorium Regional merupakan Laboratorium Tingkat 4, yang memiliki tugas :

1. Melakukan pengujian unggul Obat dan Makanan
2. Melakukan pengujian dasar dan pengujian lain selain parameter unggul Kimia dan Mikrobiologi
3. Mengkoordinir Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam satu regional
4. Melakukan pengujian konfirmasi dari Tier di bawahnya

Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) merupakan standar yang ditetapkan Badan POM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium, dan standar tersebut digunakan intuk menilai kemampuan laboratorium Balai Besar/Balai POM dalam melakukan fungsi pengujian sampel Obat dan Makanan di laboratorium kimia dan biologi

Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) Tingkat 3 dan 4 adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium Regional dan dan Laboratorium Provinsi Balai Besar/Balai POM tahun 2025 – 2029 yang terdiri dari 4 komponen yaitu

1. Standar Ruang Lingkup (SRL)
2. Standar Peralatan laboratorium
3. Standar Kompetensi Laboratorium
4. Standar Metode Analisa Terverifikasi

Penjelasan dari masing-masing komponen adalah sebagai berikut :

1. Standar Ruang Lingkup

   Suatu cakupan pengujian kimia dan biologi yang menggambarkan kapasitas dan kapabilitas laboratorium, meliputi pengujian obat, nappza, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan dan mikrobiologi.
2. Standar Peralatan

   Peralatan yang harus dimiliki oleh laboratorium sehingga pengujian dapat dilaksanakan sesuai lingkupnya
3. Standar Kompetensi Laboratorium

   Kemampuan laboratorium dalam melakukan pengujian sesuai ruang lingkup oleh personel yang kompeten
4. Standar Metode Terverifikasi

   Metode Analisa yang akan diverifikasi oleh laboratorium

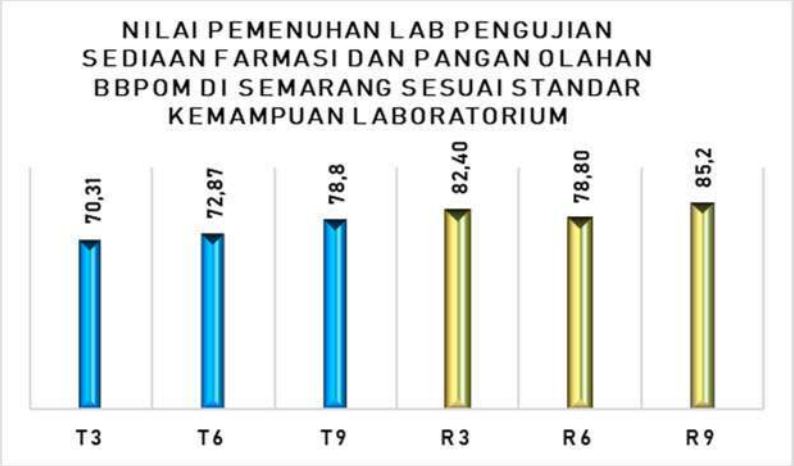
Empat komponen SKL tersebut dinilai berdasarkan petunjuk teknis yang telah ditetapkan dan telah disosialisasikan kepada seluruh UPT ,
Penilaian Pemenuhan SKL Tingkat 3 dan Tingkat 4 tahun 2025-2029 adalah : Standar Ruang Lingkup 50% + Standar Kompetensi Laboratorium 20% + Standar Peralatan 20% + Standar Metode Terverifikasi 10%

- **Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW III Tahun 2025**

NO	IKU	Target TW III	Realisasi	Capaian (%)
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	83	85	102,90 Sangat Baik

Capaian kinerja indikator pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) pada Triwulan III tahun 2025 mencapai **85,2%** dari target **82,8%**, atau **tercapai 102,9%**. Hasil ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah melampaui target triwulanan yang ditetapkan. Kinerja tersebut mencakup peningkatan pada komponen ruang lingkup laboratorium, peralatan, serta kompetensi personil, meskipun beberapa kegiatan verifikasi metoda analisa masih berlangsung.

- **Perbandingan Antara Kinerja TW III Dengan Kinerja TW Sebelumnya Tahun 2025**



Jika dibandingkan dengan Triwulan II, capaian TW III menunjukkan peningkatan signifikan. Hal ini disebabkan adanya penambahan ruang lingkup laboratorium kosmetik yang berhasil diverifikasi, serta kelancaran pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi personil dan pemenuhan peralatan laboratorium. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan kinerja berkelanjutan dari semester I menuju semester II tahun 2025.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja TW III Dengan Target Tahun 2025**

NO	IKU	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	83,20	85,20	102,40	Tercapai/ Melampaui

Realisasi kinerja TW III 2025 sebesar 85,2% menunjukkan bahwa capaian sudah mendekati target tahunan yang ditetapkan sebesar 100%. Sebagian kegiatan masih dijadwalkan untuk dilaksanakan pada TW IV, seperti pemenuhan ruang lingkup RL Obat yang ditargetkan di akhir tahun serta penerimaan tambahan alat laboratorium yang dijadwalkan datang pada bulan **Oktober 2025**. Dengan demikian, capaian TW III memberikan prospek positif terhadap pencapaian target tahunan secara keseluruhan.

- **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja**

Keberhasilan capaian kinerja pada TW III 2025 ditunjang oleh pelaksanaan kegiatan pemenuhan ruang lingkup laboratorium secara tepat waktu, peningkatan kompetensi personil, serta pengadaan alat laboratorium yang sebagian besar telah terealisasi. Namun, masih terdapat kendala pada RL Obat akibat kesulitan memperoleh sampel uji (asam fusidat dan fenilefrin tetes mata) sehingga kegiatan verifikasi metoda analisa harus digeser ke TW IV. Secara umum, koordinasi antar-laboratorium berjalan baik dan berkontribusi pada peningkatan capaian SKL.

- **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Untuk menjaga keberlanjutan capaian hingga akhir tahun, dilakukan langkah-langkah perbaikan berupa:

1. Percepatan pelaksanaan verifikasi metoda analisa RL Obat pada TW IV.
2. Monitoring kedatangan dan pemasangan alat laboratorium baru pada bulan Oktober 2025.
3. Optimalisasi pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis untuk peningkatan kompetensi personil.
4. Penguatan koordinasi antar-laboratorium guna memastikan pemenuhan seluruh komponen SKL sebelum akhir tahun.

- **Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja**

Indikator	Pagu Anggaran(Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian IKU (%)	Tingkat Efisiensi
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	7,213,784,000	4,671,479,766	64.76	102.90	Efisien

Realisasi anggaran sebesar **64,76%** dengan capaian kinerja **102,9%** menunjukkan tingkat efisiensi yang baik, yaitu **92% (efisien)**. Realisasi anggaran yang masih rendah disebabkan karena pengadaan alat dan suku cadang impor yang inden dan akan teralisasi di TW IV, sehingga anggaran akan terealisasi menyesuaikan setelah alat dan suku cadang diterima. Dengan capaian IKU Indikator SKL sebesar 92 % dan dinilai efisien, hal ini menggambarkan bahwa penggunaan sumber daya telah dilakukan secara proporsional dan efektif untuk mencapai hasil optimal. Efisiensi dicapai melalui pengendalian jadwal kegiatan, pemanfaatan sumber daya manusia secara tepat, serta pengawasan terhadap proses pengadaan.

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Beberapa program dan kegiatan yang berperan penting dalam keberhasilan pencapaian indikator ini antara lain: monitoring dan evaluasi pelaksanaan SKL, pelaksanaan pelatihan kompetensi personil laboratorium, verifikasi metoda analisa, serta pengadaan alat laboratorium untuk peningkatan ruang lingkup pengujian. Kegiatan tersebut berjalan sesuai rencana dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan capaian SKL.

- **Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

Laporan capaian kinerja TW III 2025 ini dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kerja TW IV 2025, sekaligus menjadi dasar dalam perencanaan kebutuhan peningkatan kapasitas laboratorium tahun 2026. Informasi dalam laporan ini juga digunakan sebagai acuan pembinaan dan

pengambilan keputusan strategis terkait pemenuhan ruang lingkup dan pengadaan alat laboratorium di masa mendatang.

IKU 15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

1. Kabupaten/Kota yang didampingi adalah Kabupaten/Kota yang berpotensi menyelenggarakan pengawasan dan pemberdayaan keamanan pangan di sepanjang rantai pangan sesuai dengan ketentuan

2. Pendampingan yang dilakukan meliputi:

a. advokasi kepada Kabupaten/Kota terkait penyelenggaraan Keamanan Pangan di daerah

b. mengaktivasi Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) di Kabupaten/Kota

c. mendampingi dan memastikan Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri dalam kerangka kerja TKPPOM

3. Kriteria Kabupaten/Kota yang berhasil didampingi:

a. Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri secara lengkap (seluruh kriteria penilaian meliputi Komitmen,

Perencanaan, Implementasi, Monitoring dan Evaluasi serta Inovasi) dan sesuai ketentuan

b. Kabupaten/Kota mengirimkan tools penilaian mandiri (dengan nilai minimal 60)

Cara Perhitungan dan Formulasi:

a) Dihitung dari Kab/Kota yang berhasil didampingi sesuai pedoman

b) Merupakan Kab/ Kota di lingkup wilayah kerja UPT

c) Jumlah target dihitung secara kumulatif

d) Formula Perhitungan

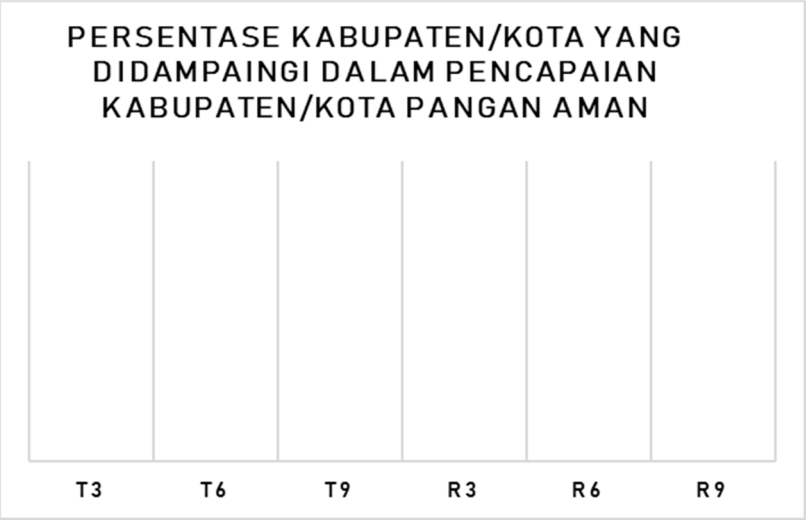
Jumlah Kab/Kota yang Berhasil Didampingi Sesuai Pedoman/Jumlah Kab/Kota di Wilayah Kerja UPT x 100%

- **Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW III Tahun 2025**

NO	IKU	Target TW III	Realisasi	Capaian (%)
15	Persentase Kabupaten/ Kota yang didampaingi dalam pencapaian			

Pada Triwulan III Tahun 2025, kegiatan pendampingan Kabupaten/Kota Pangan Aman telah dimulai dengan dilaksanakannya kegiatan advokasi kepada 26 Kabupaten/Kota yang berada di wilayah kerja Balai Besar POM Di Semarang, dilanjutkan dengan pendampingan secara luring kepada Kabupaten/Kota di **tiga wilayah**, yaitu **Kota Semarang, Kabupaten Semarang, dan Kota Magelang** dan pendampingan secara daring baik melalui telepon atau whatsapp group kepada seluruh Kabupaten/Kota di wilayah kerja Balai Besar POM Di Semarang . Realisasi ini menunjukkan peningkatan dari triwulan sebelumnya yang baru mencakup dua wilayah yang didampingi secara luring. Secara substansi, kegiatan pendampingan telah berjalan sesuai rencana dan memenuhi indikator target kinerja yang ditetapkan untuk tahun berjalan**. (ditargetkan tahunan)**

- **Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW Sebelumnya Tahun 2025**



Jika dibandingkan dengan TW II, terjadi peningkatan jumlah Kabupaten/Kota yang telah mendapatkan pendampingan secara luring. Pada TW II baru terealisasi pendampingan di Kota Semarang dan Kabupaten Semarang, sedangkan pada TW III sudah bertambah satu wilayah, yaitu Kota Magelang. Namun demikian pendampingan secara daring juga terus dilakukan kepada seluruh Kabupaten/Kota yang berada di wilayah kerja BBPOM di Semarang baik melalui telepon ataupun Whatsapp Grup. Peningkatan ini menunjukkan progres yang positif dalam memaksimalkan pendampingan yang dilakukan guna menuju target akhir tahun 2025.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan Target Tahun 2025**

NO	IKU	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi
15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	3,85	Tahunan	Tahunan	Tahunan

Realisasi pendampingan di tiga Kabupaten/Kota menunjukkan bahwa capaian TW III telah mendekati target tahunan sebesar **3,85 Kabupaten/Kota**. Dengan rencana kegiatan verifikasi lapangan (verlap) dan finalisasi pendampingan di akhir tahun, capaian indikator ini diproyeksikan akan memenuhi target 100% pada akhir tahun 2025.

- **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja**

Peningkatan capaian pada TW III disebabkan oleh koordinasi yang baik antara BBPOM di Semarang dengan pemerintah daerah serta kesiapan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan. Adanya dukungan serta komitmen lintas sektor terkait turut memperlancar pelaksanaan kegiatan.

- **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Upaya yang akan dilakukan untuk menjaga pencapaian target hingga akhir tahun antara lain:

1. Memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penyusunan laporan capaian Kabupaten/Kota Pangan Aman.
2. Melakukan monitoring pasca-pendampingan untuk memastikan implementasi berkelanjutan di daerah.
3. Menyiapkan dokumentasi hasil pendampingan sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran untuk tahun berikutnya.

- **Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja**

Indikator	Pagu Anggaran(Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian IKU (%)	Tingkat Efisiensi
Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	208,958,769	169,255,706	81.00		

Realisasi anggaran untuk kegiatan ini tercatat sebesar **81%**, dengan capaian indikator menunjukkan kemajuan yang baik. Hal ini disebabkan oleh adanya kegiatan pendampingan secara luring yang memerlukan mobilisasi tim dan biaya koordinasi lintas daerah. Namun demikian, penggunaan sumber daya tetap terkendali dan diarahkan untuk mendukung tercapainya target indikator secara menyeluruh.

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Kegiatan pendampingan Kabupaten/Kota Pangan Aman dilaksanakan melalui serangkaian program seperti sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan prinsip pangan aman, pendampingan lapangan, serta verifikasi kesiapan daerah. Program ini didukung oleh sinergi dengan pemerintah daerah, OPD terkait, dan pelaku usaha pangan, sehingga mendukung peningkatan status keamanan pangan di wilayah binaan.

- **Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

Laporan kinerja TW III 2025 ini menjadi bahan evaluasi capaian sementara dan dasar penyusunan rencana tindak lanjut pada TW IV 2025. Hasil capaian juga digunakan untuk penyusunan rekomendasi pembinaan Kabupaten/Kota Pangan Aman di tahun berikutnya serta sebagai bahan pelaporan ke Badan POM pusat dalam rangka monitoring implementasi program Gerakan Keamanan Pangan Nasional (GKPN).

SK 2. Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

Tabel .... Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan Ke 2

NO	SK	IKU	Target TW III	Realisasi	Capaian (%)
16	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	54,00	57,94	107,30
Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan					107,30

Sasaran Kegiatan 2 diukur dengan 1 Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu **Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan**, dengan target sebesar **54%** dan realisasi sebesar **57,94%**, sehingga capaian kinerja mencapai **107,30%**.
Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan 2 adalah **107,30% (Sangat Baik)**. Hal ini menunjukkan bahwa BBPOM di Semarang telah **efektif dalam melaksanakan pengawasan terhadap sarana produksi pangan fortifikasi** di wilayah kerjanya. Capaian ini mencerminkan kinerja pengawasan yang melampaui target, sekaligus mengindikasikan komitmen dan upaya yang konsisten dalam menjamin mutu dan keamanan pangan fortifikasi.

IKU 16. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Kecukupan pangan merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Hal ini karena, kekurangan asupan pangan

akan berimbas pada kekurangan asupan zat gizi yang diperlukan untuk hidup sehat berkualitas. Kekurangan zat gizi mikro di Indonesia seringkali berkaitan dengan pola konsumsi yang kurang beragam, akses terbatas terhadap makanan bergizi, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gizi seimbang. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai intervensi untuk menangani masalah ini, termasuk program fortifikasi pangan yang bertujuan untuk meningkatkan kandungan gizi pangan dengan menambahkan zat-zat gizi mikro yang penting, seperti vitamin dan mineral, pada bahan pangan pokok seperti garam, tepung terigu, dan minyak goreng. BPOM dalam hal ini Balai Besar POM di Semarang berperan dalam pemantauan dan evaluasi dalam program fortifikasi melalui pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi, sampling produk pangan fortifikasi di sarana produksi dan pengujian produk pangan fortifikasi. Sarana Produksi Pangan Fortifikasi adalah sarana produksi pangan yang memproduksi minyak goreng sawit, garam konsumsi dan tepung terigu baik skala usaha mikro, skala usaha kecil, skala usaha menengah dan skala usaha besar.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana ketercakupan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerja Balai besar POM di Semarang yang ditindak lanjuti berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dihitung dari jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai dengan pedoman dibagi dengan jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang ada dalam cakupan wilayah pemeriksaan Balai Besar POM di Semarang (berdasarkan baseline data sejumlah 107 sarana).

- **Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW III Tahun 2025**

NO	IKU	Target TW III	Realisasi	Capaian (%)
16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	54,00	57,94	107,30 Sangat Baik

Pada Triwulan III Tahun 2025, target pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi ditetapkan sebesar **54 sarana**, sedangkan realisasi yang dicapai mencapai **57,94 sarana**. Dengan capaian tersebut, indikator ini telah melampaui target triwulanan dengan tingkat capaian sebesar **107,30%**, menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam pelaksanaan pengawasan pangan fortifikasi di wilayah kerja BBPOM di Semarang.

- **Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW Sebelumnya Tahun 2025**



Jika dibandingkan dengan capaian pada TW II, terjadi peningkatan realisasi pengawasan. Pada TW I, realisasi sebesar **15,89** dari target **16,82**, sedangkan pada TW II capaian meningkat menjadi **52,34** dari target **50,47**. Kenaikan yang berlanjut pada TW III menunjukkan tren positif pelaksanaan kegiatan yang konsisten meningkat seiring optimalisasi jadwal pemeriksaan lapangan.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan Target Tahun 2025**

NO	IKU	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi
16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	54,00	57,94	107,30	▲ Tercapai/ Melampaui

Realisasi pemeriksaan sebesar **57,94 sarana** telah melampaui target tahunan sebesar **54 sarana** dengan capaian **107,30%**. Dengan hasil tersebut, indikator ini berpotensi menutup tahun 2025 dengan capaian di atas 100% apabila seluruh hasil tindak lanjut dari sarana pemeriksaan dapat diselesaikan sesuai ketentuan hingga akhir tahun.

- **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja**

Keberhasilan dalam pencapaian indikator ini didorong oleh optimalisasi kegiatan pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi di lapangan serta adanya koordinasi yang baik antara seksi pengawasan dengan petugas lapangan. Penjadwalan pemeriksaan yang disusun sejak awal tahun berjalan efektif sehingga target dapat tercapai lebih cepat dari rencana. Tidak terdapat kendala berarti dalam pelaksanaan pemeriksaan maupun dalam proses tindak lanjut hasil pengawasan.

- **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja, langkah yang akan dilakukan meliputi:
Melanjutkan pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana fortifikasi hingga akhir tahun.

Memperkuat koordinasi dengan pelaku usaha terkait pemenuhan kewajiban fortifikasi dan penandaan produk.
Menyusun pemetaan sarana potensial yang belum terpantau guna memperluas cakupan pengawasan.
Meningkatkan pembinaan kepada industri kecil menengah agar memahami standar dan kewajiban fortifikasi pangan.

- **Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja**

Indikator	Pagu Anggaran(Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian IKU (%)	Tingkat Efisiensi
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88,195,000	63,117,575	71.57	107.30	Efisien

Realisasi anggaran untuk kegiatan ini tercatat sebesar **71,57%**, dengan capaian kinerja **107,30%**. Meskipun secara efisiensi dikategorikan **tidak efisien** (tingkat efisiensi 0,92), hal ini disebabkan oleh intensitas kegiatan lapangan yang cukup tinggi serta biaya mobilisasi yang meningkat akibat cakupan wilayah pengawasan yang luas. Namun, penggunaan sumber daya dinilai proporsional terhadap capaian kinerja yang melebihi target.

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh pelaksanaan program pengawasan pangan olahan, khususnya kegiatan pengawasan pangan fortifikasi yang rutin dilakukan oleh tim pengawasan BBPOM di Semarang. Dukungan kegiatan pembinaan industri dan komunikasi dengan lintas sektor turut berperan dalam memastikan sarana produksi memenuhi standar fortifikasi sesuai ketentuan.

- **Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

Laporan kinerja ini digunakan sebagai dasar evaluasi efektivitas pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerja BBPOM di Semarang. Selain itu, hasil capaian menjadi acuan dalam penyusunan strategi pembinaan lanjutan bagi pelaku usaha, serta bahan pelaporan ke Badan POM pusat sebagai bagian dari evaluasi nasional pengendalian program fortifikasi pangan tahun 2025.

SK 3. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Semarang

Tabel .... Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan Ke 34

NO	SK	IKU	Target TW III	Realisasi	Capaian (%)
17	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Semarang	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	86,42	88,01	101,84
18		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	86,00	94,60	110,00
19		Jumlah desa pangan aman	67,50	90,00	133,33
20		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100,00	100,00	100,00
Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan					111,29

Sasaran Kegiatan 3 diukur menggunakan 4 IKU, yaitu: Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang, Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan, Jumlah desa pangan aman, dan Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas. Berdasarkan tabel capaian kinerja, seluruh indikator menunjukkan capaian di atas 100%, dengan Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan 4 sebesar **111,29%**. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan KIE di wilayah kerja BBPOM di Semarang telah berjalan sangat efektif dan melebihi target yang ditetapkan.

IKU 17. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang

Tingkat Efektifitas KIE adalah ukuran efektifitas atau kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi).
Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi KIE melalui media cetak dan elektronik; KIE langsung ke masyarakat; dan KIE melalui media sosial. Responden KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM. Indikator efektifitas KIE diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:
1. Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
2. Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
3. Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
4. Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan.

BBPOM di Semarang telah melaksanakan Survei Efektifitas KIE terhadap 822 responden yang terbagi menjadi 2 bagian yaitu kuesioner KIE Tatap Muka/Langsung dan kuesioner Media. Kuesioner tatap muka diberikan hanya kepada responden yang menjadi peserta kegiatan KIE yang sedang diselenggarakan antara lain KIE bersama tokoh masyarakat serta KIE obat dan makanan yang diselenggarakan oleh UPT baik secara daring maupun tatap muka. Sedangkan kuesioner media diberikan hanya kepada responden yang pernah mengakses kanal-kanal media KIE BPOM atau menerima produk informasi BPOM dalam 1 bulan terakhir. Hingga triwulan III tahun 2025 diperoleh capaian indeks tingkat efektifitas KIE BBPOM di Semarang sebesar

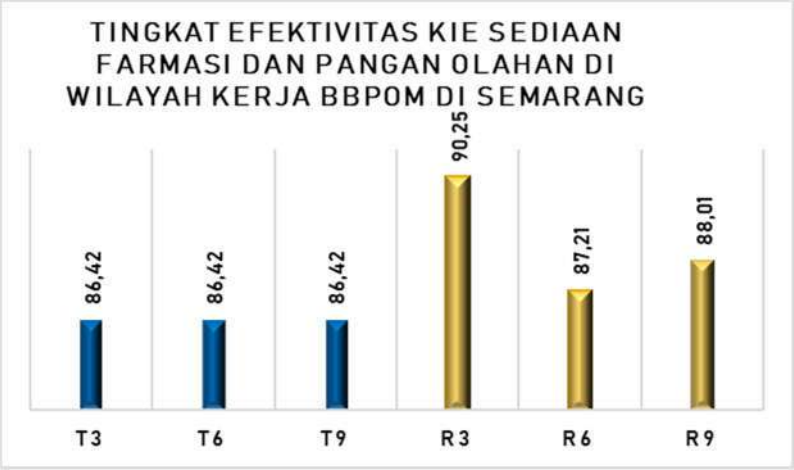
88,01 yang diperoleh dari rata-rata indeks KIE tatap muka (86,798) dan KIE media (89,215). Capaian KIE Triwulan III ini melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 86,42 atau dengan capaian 101,84% dengan kriteria **Sangat Baik.**

- **Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW III Tahun 2025**

NO	IKU	Target TW III	Realisasi	Capaian (%)
17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	86,42	88,01	101,84 Sangat Baik

Pada Triwulan III Tahun 2025, target efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan ditetapkan sebesar **86,42**, sedangkan realisasi yang dicapai mencapai **88,01** dengan capaian **101,84%**. Hasil ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) di wilayah kerja BBPOM di Semarang telah berjalan efektif, melebihi target yang ditetapkan.

- **Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW Sebelumnya Tahun 2025**



Jika dibandingkan dengan capaian pada TW I dan TW II, kinerja TW III menunjukkan konsistensi efektivitas kegiatan. Pada TW I, realisasi efektivitas mencapai **90,25 (104,4%)**, sedangkan TW II sebesar **87,21 (100,9%)**. Nilai efektivitas TW III sebesar **88,01 (101,84%)** menunjukkan kinerja yang stabil dengan tren capaian di atas 100% pada setiap triwulan.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan Target Tahun 2025**

NO	IKU	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi
17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	86,42	88,01	101,84	Tercapai/ Melampaui

Realisasi efektivitas KIE sebesar **88,01** melampaui target tahunan **86,42**, dengan capaian **101,84%**. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan KIE

sepanjang triwulan III telah berjalan dengan baik, dan kegiatan yang dilakukan mampu meningkatkan pemahaman serta partisipasi masyarakat terhadap pengawasan obat dan makanan.

- **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja**

Keberhasilan capaian indikator ini dipengaruhi oleh pelaksanaan KIE yang dilakukan secara rutin dan terukur, baik bersama tokoh masyarakat, sekolah, maupun lintas sektor. Pada bulan Juli, pelaksanaan KIE bersama tokoh masyarakat mencapai 4 titik dengan total peserta 892 orang, memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan efektivitas KIE. Tidak terdapat kendala berarti dalam pelaksanaan, meskipun masih terdapat 3 titik kegiatan KIE dengan tokoh masyarakat yang tertunda karena menunggu konfirmasi dari tenaga ahli anggota dewan.

- **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Upaya yang dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan efektivitas KIE antara lain:
Melakukan koordinasi intensif dengan tenaga ahli anggota DPR untuk memastikan pelaksanaan kegiatan KIE tersisa dapat segera direalisasikan.
Memperkuat pelaksanaan KIE rutin di sekolah, komunitas masyarakat, dan lintas sektor guna menjaga kesinambungan edukasi publik.
Melakukan inovasi media KIE yang lebih interaktif agar pesan edukasi dapat tersampaikan dengan lebih luas dan efektif.
Mengoptimalkan pelaporan dan evaluasi KIE berbasis hasil (outcome) agar capaian efektivitas dapat terus terukur dan meningkat.

- **Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja**

Indikator	Pagu Anggaran(Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian IKU (%)	Tingkat Efisiensi
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	17,055,022,000	2,240,975,526	13.14	101.84	Tidak Efisien

Realisasi anggaran untuk indikator ini mencapai **13,14%** dengan capaian kinerja **101,84%** dan tingkat efisiensi **0,75**, yang dikategorikan **tidak efisien**. Ketidakefisienan disebabkan oleh adanya beberapa kegiatan KIE dengan tokoh masyarakat yang tertunda pelaksanaannya sehingga penggunaan anggaran belum optimal. Namun demikian, hasil kegiatan yang telah dilaksanakan menunjukkan efektivitas yang tinggi terhadap peningkatan pemahaman masyarakat.

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Pencapaian indikator ini didukung oleh pelaksanaan program KIE lintas sektor dan kegiatan edukasi publik terkait keamanan obat dan makanan. Kegiatan KIE yang dilakukan bersama sekolah, lintas sektor, SAKA POM, organisasi wanita, organisasi profesi dan komunitas masyarakat berperan penting dalam meningkatkan indeks efektivitas. Dukungan dari berbagai pihak termasuk tokoh masyarakat dan institusi pendidikan juga menjadi faktor utama dalam mempertahankan capaian di atas target.

- **Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

Laporan kinerja ini dimanfaatkan sebagai dasar evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan KIE dan sebagai bahan penyusunan strategi peningkatan efektivitas komunikasi publik BBPOM di Semarang. Selain itu, laporan ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja KIE tahun berikutnya, terutama untuk menyesuaikan strategi pelaksanaan kegiatan KIE berbasis komunitas dan lintas sektor agar hasilnya semakin optimal.

IKU 18. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Jumlah sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan aman dihitung berdasarkan jumlah sekolah dengan kriteria memiliki Kader Keamanan Pangan Sekolah yang aktif, melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah, dan mempunyai dokumen rencana aksi serta inovasi program keamanan pangan.

Tujuan intervensi keamanan PJAS adalah menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi anak usia sekolah serta memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan. Satuan Pendidikan yang diintervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/SMK/MA.

Tahapan pelaksanaan intervensi Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan berdasarkan petunjuk teknis yang telah ditetapkan adalah meliputi tahapan advokasi lintas sektor program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan (SAPA Sekolah), sosialisasi keamanan pangan sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan, Bimtek kader keamanan pangan untuk kader keamanan pangan sekolah, monitoring dan sertifikasi sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan sekolah, dan pengawalan sekolah yang sudah diintervensi PJAS Aman.

Bimbingan Teknis diberikan kepada guru/kepala sekolah sebagai Kader Keamanan Pangan Sekolah untuk melaksanakan pembudayaan keamanan pangan di sekolah intervensi. Pendampingan dan monitoring kepada sekolah

dalam pelaksanaan rencana aksi dalam pelaksanaan pembudayaan keamanan pangan.

- **Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW III Tahun 2025**

NO	IKU	Target TW III	Realisasi	Capaian (%)
18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	86,00	94,60	110,00 Sangat Baik

Pada Triwulan III Tahun 2025, indikator *Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan* menunjukkan capaian yang sangat baik. Dari target sebesar **86 %**, realisasi mencapai **94,60 %** atau **110%** dari target yang ditetapkan. Hasil ini menggambarkan pelaksanaan kegiatan yang melebihi ekspektasi, dengan pelaksanaan kegiatan monitoring, verifikasi, dan sertifikasi terhadap sekolah-sekolah intervensi berjalan optimal sesuai jadwal.

- **Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW sebelumnya Tahun 2025**



Jika dibandingkan dengan capaian pada Triwulan I dan II, kinerja pada Triwulan III menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada TW I, capaian realisasi sebesar **25 %**, dan meningkat menjadi **62,65 %** pada TW II, hingga mencapai **94,60 %** di TW III. Kenaikan ini menandakan progres pelaksanaan kegiatan yang terakselerasi di paruh kedua tahun, seiring dengan pelaksanaan sertifikasi, verifikasi ulang, serta bimtek batch 2 bagi kader keamanan pangan sekolah.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan Target Tahun 2025**

NO	IKU	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi
18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	20,00	94,60	94,60	Akan Tercapai

Jika dibandingkan dengan target tahunan sebesar **20 sekolah**, capaian kumulatif hingga TW III yaitu **94,60 %** menunjukkan .....

- **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja**

Keberhasilan capaian indikator ini didorong oleh beberapa faktor utama, antara lain konsistensi pelaksanaan tahapan kegiatan sesuai pedoman, koordinasi yang baik dengan Dinas Pendidikan dan pihak sekolah, serta penguatan kapasitas kader keamanan pangan di tingkat sekolah. Selain itu, kegiatan sosialisasi melalui media sosial dan sarasehan edukatif seperti *Paman Kece* turut mendukung peningkatan kesadaran dan partisipasi sekolah. Tidak terdapat kendala berarti selama pelaksanaan, karena seluruh kegiatan berjalan sesuai jadwal dan dukungan lintas sektor berjalan baik.

- **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Untuk mempertahankan kinerja yang telah dicapai, langkah perbaikan yang akan dilakukan antara lain meliputi pelaksanaan sertifikasi ulang terhadap sekolah intervensi tahun 2024, pelaksanaan bimtek lanjutan batch 2, serta verifikasi laporan sekolah batch 2. Selain itu, peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan akan diarahkan pada pendalaman materi bagi kader dan penguatan jejaring antar sekolah agar budaya keamanan pangan dapat diterapkan secara berkelanjutan.

- **Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja**

Indikator	Pagu Anggaran(Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian IKU (%)	Tingkat Efisiensi
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	653,579,000	51,501,800	7.88	110.00	Tidak Efisien

Tingkat efisiensi pada indikator ini sebesar **0,75** yang dikategorikan **Tidak Efisien**. Rendahnya tingkat efisiensi disebabkan oleh peningkatan skala kegiatan yang mencakup perluasan wilayah intervensi dan pelaksanaan bimtek tambahan. Meskipun demikian, hasil yang dicapai jauh melebihi target, sehingga dari perspektif efektivitas program, penggunaan sumber

daya tetap dinilai produktif dan memberikan *value for money* terhadap pencapaian indikator kinerja.

▪ Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Capaian kinerja ini didukung oleh berbagai program pendukung seperti kegiatan monitoring kader keamanan pangan sekolah, verifikasi dan sertifikasi sekolah intervensi, pelaksanaan Bimtek kader keamanan pangan batch 2, serta sosialisasi budaya keamanan pangan melalui media sosial. Selain itu, kolaborasi dengan pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat pendidikan berperan penting dalam memperkuat keberhasilan implementasi pembudayaan keamanan pangan.

▪ Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja ini dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan program keamanan pangan sekolah, sekaligus menjadi dasar penetapan sekolah penerima sertifikat dan penghargaan PBKPKS. Selain itu, hasil evaluasi digunakan untuk penyusunan strategi intervensi tahun berikutnya dan sebagai acuan dalam penguatan program keamanan pangan di lingkungan pendidikan secara berkelanjutan.

IKU 19. Jumlah desa pangan aman

Jumlah desa pangan aman dihitung dari jumlah desa yang memiliki kader keamanan pangan desa yang aktif, melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa, dan mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri.
Gerakan Keamanan Pangan Desa merupakan aksi nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman sampai pada tingkat perseorangan dan memperkuat ekonomi desa. Melalui program desa pangan aman diharapkan keamanan pangan di desa tetap dapat terjamin.keamanan, mutu dan gizinya. Pelaksanaan Desa Pangan Aman disesuaikan dengan kebijakan pemerintah saat ini dengan tujuan untuk mendukung pencapaian target pemerintah, salah satunya program percepatan penurunan stunting, serta untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui pencapaian target-target pembangunan keberlanjutan di desa.
Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) meliputi tahapan advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, monitoring

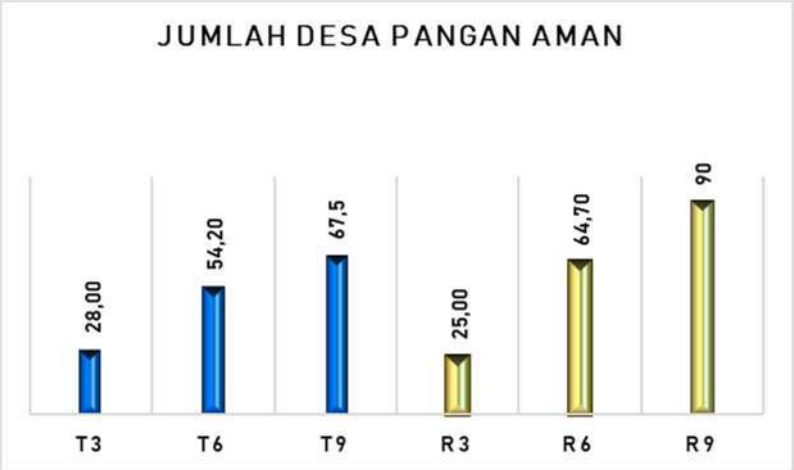
dan evaluasi serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan tahun sebelumnya.

▪ Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW III Tahun 2025

NO	IKU	Target TW III	Realisasi	Capaian (%)
19	Jumlah desa pangan aman	67,50	90,00	133,33
				Tidak dapat disimpulkan

Pada Triwulan III Tahun 2025, indikator *Jumlah Desa Pangan Aman* menunjukkan capaian yang sangat baik. Dari target sebesar **67,5%**, realisasi mencapai **90,00%**, atau **133,33%** dari target TW III. Hasil ini mencerminkan bahwa pelaksanaan kegiatan di lapangan berjalan lebih cepat dan efektif dibandingkan jadwal perencanaan. Tahapan yang telah dilaksanakan mencakup kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) di Desa Asinan, serta kegiatan pengawalan bagi desa yang diintervensi tahun 2020 sampai tahun 2024. Pada TW III juga telah dilaksanakan bimbingan teknis (bimtek) kader keamanan pangan desa kepada desa-desa intervensi tahun 2025 yang baru (***batch* 2)**.

▪ Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW sebelumnya Tahun 2025



Jika dibandingkan dengan capaian pada TW sebelumnya, terlihat peningkatan yang konsisten. Pada TW I, realisasi baru mencapai **25%**, meningkat menjadi **64,7%** pada TW II, dan melonjak hingga **90%** pada TW III. Kenaikan signifikan ini didorong oleh percepatan kegiatan pengawalan dan pembentukan kader keamanan pangan di 3 desa intervensi tahun 2025 yang baru (***batch* 2)** yang mulai dilaksanakan sejak Agustus hingga September 2025.

▪ Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan Target Tahun 2025

NO	IKU	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi
19	Jumlah desa pangan aman	6,00	90,00	90,00	Akan Tercapai

Jika dibandingkan dengan target tahunan sebesar **6 desa**, capaian hingga TW III sudah mencapai **90%** dari target tahun berjalan. Hal ini menunjukkan progres yang hampir menyelesaikan target tahunan lebih awal dari waktu yang direncanakan. Realisasi yang tinggi ini juga didukung oleh pelaksanaan kegiatan pengawalan dengan penambahan kader baru di **Desa Kenteng** dan **Desa Randusari** sekaligus dalam rangka aksi nyata pembentukkan kader Gumregah, serta pelaksanaan intervensi ke **Desa Kebondalem**, **Desa Brongkol**, dan **Desa Gemawang** yang telah melaksanakan Bimtek kader dan komunitas.

▪ Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Keberhasilan capaian indikator ini tidak lepas dari efektivitas pelaksanaan kegiatan di lapangan serta kesiapan desa sasaran dalam mendukung program keamanan pangan. Koordinasi yang baik antara tim BBPOM di Semarang dengan pemerintah desa dan masyarakat menjadi faktor utama keberhasilan. Selain itu, kegiatan *Bimtek Kader Keamanan Pangan* dan *Bimtek Keamanan Pangan Komunitas* mampu memperkuat kapasitas masyarakat lokal dalam menjaga keamanan pangan secara mandiri. Tidak terdapat kendala berarti selama pelaksanaan, karena seluruh tahapan monev dan pengawalan dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan jadwal yang telah ditetapkan.

▪ Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Upaya yang akan dilakukan ke depan meliputi pelaksanaan tahap monitoring dan evaluasi batch 2 bagi desa intervensi baru, yakni Desa Kebondalem, Desa Brongkol, dan Desa Gemawang, yang dijadwalkan pada bulan Oktober 2025. Selain itu, penguatan kapasitas kader keamanan pangan akan terus ditingkatkan melalui pelatihan lanjutan dan pengimbasan antar desa, agar program keamanan pangan dapat berjalan berkelanjutan dan mandiri di tingkat komunitas.

▪ Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Indikator	Pagu Anggaran(Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian IKU (%)	Tingkat Efisiensi
Jumlah desa pangan aman	1,308,912,000	183,809,197	14.04	133.33	Tidak Efisien

Tingkat efisiensi indikator ini sebesar **0,75**, yang dikategorikan **Tidak Efisien**. Rendahnya tingkat efisiensi disebabkan oleh perluasan kegiatan ke lebih banyak desa intervensi dan pelaksanaan beberapa kegiatan (pengawalan dan bimtek) secara bersamaan untuk mempercepat capaian target. Namun, secara

efektivitas hasil yang diperoleh sangat baik, karena capaian kinerja melampaui target dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kapasitas masyarakat desa dalam keamanan pangan.

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Beberapa program pendukung yang berkontribusi terhadap keberhasilan indikator ini antara lain pelaksanaan *Monitoring dan Evaluasi Desa Pangan Aman*, *Bimtek Kader Keamanan Pangan*, dan *Bimtek Keamanan Pangan bagi Komunitas Masyarakat*. Program pengimbasan dan pembentukan kader baru di Desa Kenteng dan Randusari, serta perluasan intervensi ke tiga desa baru juga memperkuat keterlibatan masyarakat dan memperluas jangkauan program keamanan pangan.

- **Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

Laporan kinerja ini dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan program keamanan pangan desa dan sebagai dasar penentuan strategi pengimbasan untuk tahun berikutnya. Selain itu, laporan ini digunakan sebagai referensi dalam penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas kader dan desa binaan di wilayah kerja BBPOM di Semarang, agar keberlanjutan program keamanan pangan dapat terjaga secara optimal.

IKU 20. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) dihitung berdasarkan jumlah pasar yang memiliki kriteria bahwa pasar tersebut berlokasi permanen, memiliki pengelola pasar dan mendapat dukungan/ antusiasme dari Pemerintah Daerah setempat, pasar yang mempunyai potensi peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan, pasar yang secara umum memenuhi kriteria pasar sehat.
Tujuan intervensi PPABK adalah untuk menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat, dan menggugah komunitas pasar agar dapat berdaya dan mandiri dalam pembinaan dan pengawasan kepada komunitas pasar.

Lingkup kegiatan pada program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) adalah sebagai berikut :

1) Forum Advokasi Komitmen Pemerintah Daerah dan Lintas Sektor Pasar. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan koordinasi dengan lintas sektor dalam rangka menggalang komitmen pemerintah daerah tentang pentingnya berbagi tanggung jawab untuk memastikan keamanan pangan pada setiap titik rantai pangan sesuai dengan perannya. Pemangku kepentingan yang diharapkan terlibat secara aktif, antara lain

Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan pasar, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Bappeda

2) Bimbingan Teknis dan Penyuluhan Komunitas Pasar kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, pemberdayaan, dan kemandirian komunitas pasar tentang keamanan pangan dan ikut serta dalam mengawasi pangan yang beredar di pasar serta meningkatkan partisipasi komunitas pasar dalam menerapkan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik di pasar rakyat
3) Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang pentingnya keamanan pangan bagi kesehatan masyarakat melalui konten terkait pasar pangan aman berbasis komunitas dan keamanan pangan. Konten ini disosialisasikan melalui media sosial atau metode lainnya kepada pengelola/ paguyuban pasar kemudian disosialisasikan oleh pengelola/ paguyuban pasar kepada komunitas pasar.
4) Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring Evaluasi dilakukan melalui kegiatan cek produk pangan olahan terdaftar melalui CEK KLIK yang dilakukan oleh komunitas pasar serta monitoring evaluasi pengelola/ paguyuban pasar yang sudah di bimtek serta penyusunan rencana aksi 2026. Disamping itu, pengawasan keamanan pangan bertujuan untuk memberdayakan petugas pengelola pasar untuk dapat melakukan pengawasan terhadap bahan berbahaya, bahan pangan, maupun produk pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya di pasar yang dikelolanya melalui penyebaran informasi dan sosialisasi produk keamanan pangan kepada pedagang/penjual pasar
5) Pengawalan Pasar Aman dilakukan dalam rangka kegiatan monev keberlanjutan program melalui sosialisasi keamanan pangan terhadap pasar pengawalan tahun 2024

▪ Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW III Tahun 2025

NO	IKU	Target TW III	Realisasi	Capaian (%)
20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100	100	100,00 Baik

Pada Triwulan III Tahun 2025, indikator *Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK)* menunjukkan capaian optimal, yaitu **100%** dari target TW III sebesar **100%**. Hal ini berarti seluruh tahapan kegiatan yang direncanakan telah selesai dilaksanakan dengan baik sesuai dengan pedoman dan arahan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan (PMPUPO). Kegiatan yang dilakukan pada TW III meliputi koordinasi replikasi PPABK ke 8 (delapan) kabupaten/kota di wilayah kerja BBPOM di Semarang yaitu Kabupaten Magelang, Kabupaten Semarang, Kota Pekalongan, Kabupaten Rembang, Kota Magelang, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Pati

dan Kabupaten Pekalongan, dengan tindak lanjut berupa pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis (bimtek) di beberapa daerah.

▪ Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW sebelumnya Tahun 2025



Dibandingkan dengan capaian kinerja pada TW sebelumnya, terjadi peningkatan yang signifikan. Pada TW I, capaian baru mencapai **25%**, meningkat menjadi **100%** pada TW II, dan tetap terjaga di **100%** pada TW III. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh target tahapan telah berhasil diselesaikan sebelum akhir tahun, dan kegiatan pada TW III lebih berfokus pada penguatan dan monitoring hasil replikasi yang telah dilaksanakan oleh daerah.

▪ Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan Target Tahun 2025

NO	IKU	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi
20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1,00	100,00	100,00	Tercapai/ Melampaui

Jika dibandingkan dengan target tahunan sebesar **1 pasar pangan aman berbasis komunitas**, realisasi hingga TW III telah mencapai **100%**, sesuai target tahun berjalan. Artinya, kegiatan pembentukan PPABK telah selesai sepenuhnya. Pada TW III, kegiatan utama mencakup **sosialisasi PPABK ke Pasar Pagi Kabupaten Grobogan** dan **Bimtek serta penyuluhan replikasi PPABK di Pasar Tempuran, Kabupaten Magelang**, yang merupakan dua daerah pelaksana replikasi program tahun 2025.

▪ Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Keberhasilan pencapaian indikator ini disebabkan oleh koordinasi yang efektif antara BBPOM di Semarang dengan Dinas Perdagangan kabupaten/kota yang menjadi target pembentukan PPABK. Dukungan surat arahan dari Direktorat PMPUPO juga menjadi dasar kuat dalam pelaksanaan kegiatan di daerah.

Namun demikian, terdapat kendala di beberapa kabupaten/kota lain seperti Kabupaten Semarang, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Rembang, Kota Magelang dan Kabupaten Pati yang belum dapat melaksanakan replikasi PPABK karena keterbatasan anggaran daerah. Meski demikian, dua kabupaten yaitu **Kabupaten Magelang** dan **Kabupaten Grobogan** berhasil melaksanakan replikasi sesuai rencana.

▪ Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Ke depan, BBPOM di Semarang akan melakukan **monitoring terhadap keberlanjutan pelaksanaan pasar pangan aman di dua lokasi replikasi**, yaitu **Pasar Pagi di Kabupaten Grobogan** dan **Pasar Tempuran di Kabupaten Magelang**. Selain itu, akan dilakukan pendekatan lebih intensif kepada kabupaten/kota lain untuk mendorong alokasi anggaran bagi pelaksanaan replikasi PPABK di tahun mendatang, serta memperluas cakupan pendampingan melalui kegiatan sosialisasi lintas sektor.

▪ Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Indikator	Pagu Anggaran(Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian IKU (%)	Tingkat Efisiensi
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	130,777,000	38,981,590	29.81	100.00	Tidak Efisien

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator ini sebesar **0,75**, yang dikategorikan **Tidak Efisien**. Dengan adanya efisiensi anggaran, menyebabkan pagu anggaran mengalami perubahan. Perhitungan ini berdasarkan pagu awal sebelum terkena efisiensi anggaran dengan realisasi anggaran setelah terkena efisiensi anggaran. Meskipun demikian, efisiensi relatif rendah ini diimbangi oleh efektivitas hasil, di mana seluruh target indikator telah tercapai sepenuhnya.

▪ Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program utama yang menunjang pencapaian indikator ini adalah kegiatan **Koordinasi dan Sosialisasi Replikasi PPABK**, **Bimbingan Teknis dan Penyuluhan di Pasar Replikasi**, serta dukungan dari kegiatan **BIS PAMAN (Bincang-bincang Seputar Pangan Aman)** yang memperkuat peran komunitas dalam mewujudkan pasar yang memenuhi standar keamanan pangan. Faktor yang menjadi penghambat di beberapa daerah adalah keterbatasan anggaran daerah, namun secara umum kegiatan yang didampingi BBPOM Semarang berjalan sesuai rencana.

▪ Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja indikator ini dimanfaatkan sebagai dasar evaluasi keberhasilan program PPABK dalam mendukung peningkatan keamanan pangan di tingkat pasar. Selain itu, laporan ini menjadi acuan bagi Direktorat

PMPUPO dan pemerintah daerah dalam perencanaan replikasi PPABK di tahun berikutnya serta untuk memperkuat sinergi antar instansi dalam pembentukan pasar yang aman, sehat, dan berbasis partisipasi komunitas.

SK 4. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

Tabel .... Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan Ke 4

NO	SK	IKU	Target TW III	Realisasi	Capaian (%)
21	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	88,33	92,68	104,92
Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan					104,92

Sasaran Kegiatan 5 diukur melalui indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB), Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB), dan/atau IP-CPPOB pangan olahan. Pada Triwulan II Tahun 2025, indikator ini menargetkan capaian sebesar 88,33%, dan berhasil direalisasikan sebesar 92,68%, sehingga menghasilkan capaian sebesar 104,92% terhadap target triwulan.

Nilai pencapaian Sasaran Kegiatan 5 secara keseluruhan adalah 104,92, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program pendampingan UMKM telah melebihi target yang ditetapkan. Capaian ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis, pendampingan, dan monitoring yang dilakukan secara hybrid (daring dan luring), serta respons positif dari pelaku usaha terhadap program fasilitasi sertifikasi keamanan dan mutu produk.

IKU 21. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan atau IP CPPOB pangan olahan

Sejalan dengan konsep pengawasan BPOM saat ini yaitu pengawasan proaktif maka Balai Besar POM di Semarang giat dalam melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha skala UMKM terutama produk pangan olahan, kosmetik dan obat tradisional sebagai dukungan meningkatkan daya saing dan memperluas distribusi produk. Bentuk pendampingan yang dilakukan antara lain pembinaan saat pemeriksaan sarana, mengadakan kegiatan bimbingan teknis kepada pelaku usaha/penanggung jawab baik secara luring maupun daring, memberikan pendampingan dan pelayanan proses sertifikasi/registrasi. Selain sebagai pencapaian kinerja Balai Besar POM di Semarang, kegiatan ini diharapkan menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya para pelaku usaha skala UMKM dan dapat memberikan bukti nyata dukungan bagi UMKM sehingga secara tidak langsung juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di era pemulihan ekonomi sekarang ini.

Ruang Lingkup UMKM yang didampingi adalah UMKM Pangan olahan yang mencakup usaha mikro dan kecil, sementara untuk UMKM kosmetik dan OBA (Obat Bahan Alam) yaitu :

a. UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B
b. UMKM pada OBA mencakup UKOT dan UMOT meliputi :
   - Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I
   - Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya

Definisi UMKM yang memenuhi standar adalah :

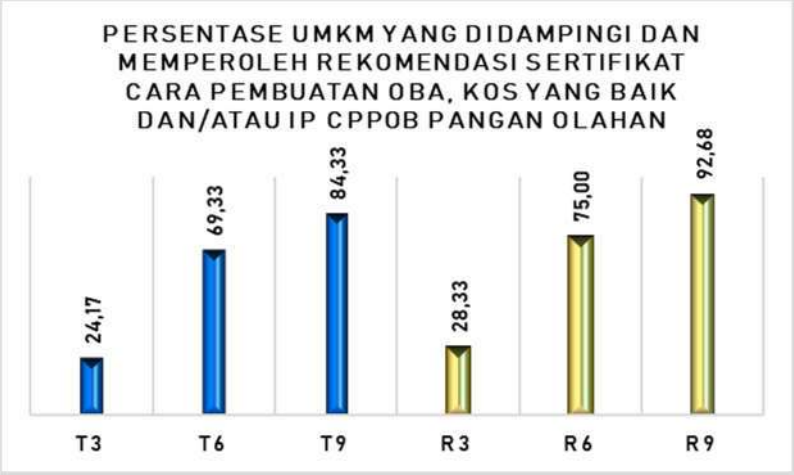
a. UMK yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK
b. UMKM OBA yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan Obat Bahan Alam yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat CPOTB secara Bertahap (tahap 1 atau tahap 1 ke tahap 2 atau tahap 2 ke tahap 3)
c. UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB

- **Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW III Tahun 2025**

NO	IKU	Target TW III	Realisasi	Capaian (%)
21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	88,33	92,68	104,92 Sangat Baik

Target kinerja TW III tahun 2025 ditetapkan sebesar 88,33%, sedangkan realisasi kinerja mencapai 92,68%, atau 104,92% dari target yang ditetapkan. Hasil ini menunjukkan bahwa capaian indikator telah melampaui target triwulanan, yang berarti pelaksanaan kegiatan pendampingan UMKM berjalan efektif sesuai rencana kerja.

- **Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW Sebelumnya Tahun 2025**



Jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terjadi peningkatan yang signifikan. Pada TW I realisasi sebesar 28,33% dan pada TW II sebesar 75%, sementara TW III meningkat menjadi 92,68%. Kenaikan tersebut menggambarkan progres yang positif dan konsisten dalam kegiatan pendampingan serta penerbitan sertifikat kepada UMKM di bidang OBA, kosmetik, dan pangan olahan.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan Target Tahun 2025**

NO	IKU	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi
21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB	18,44	92,68	92,68	Akan Tercapai

Realisasi TW III sebesar 92,68% dari target tahunan 18,44 (setara 100%), menunjukkan bahwa capaian hingga TW III hampir memenuhi target akhir tahun. Dengan capaian ini, target tahunan diperkirakan akan terpenuhi 100% bahkan berpotensi terlampaui pada akhir tahun 2025.

- **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja**

Keberhasilan pencapaian indikator ini dipengaruhi oleh komitmen pelaku UMKM dalam memenuhi standar produksi yang baik (GMP) serta pendampingan intensif dari BBPOM di Semarang. Capaian GMP untuk OBA sebesar 4 UMKM, kosmetik 5 UMKM, dan pangan olahan dengan sertifikat IP CPPOB sebanyak 28 sertifikat, sehingga total 37 UMKM telah memenuhi GMP dari target DIPA 26 UMKM. Tidak terdapat kendala berarti dalam pelaksanaan kegiatan, karena seluruh proses bimbingan teknis dan evaluasi berjalan sesuai jadwal.

- **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Untuk menjaga kesinambungan dan peningkatan capaian, BBPOM di Semarang akan memperluas cakupan UMKM binaan baru, terutama yang belum tersertifikasi. Monitoring berkala terhadap UMKM penerima sertifikat juga akan dilakukan untuk memastikan kepatuhan berkelanjutan.

- **Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja**

Indikator	Pagu Anggaran(Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian IKU (%)	Tingkat Efisiensi
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	97,721,000	13,908,000	14.23	104.92	Tidak Efisien

Realisasi anggaran untuk kegiatan ini tercatat sebesar 14,23%, dengan capaian IKU sebesar 104,92%. Meskipun capaian kinerja tinggi, namun tingkat efisiensi sebesar 0,75 menunjukkan kategori tidak efisien karena rasio output terhadap penggunaan sumber daya belum optimal. Hal ini terutama disebabkan oleh distribusi beban kerja dan dukungan anggaran lintas kegiatan yang belum proporsional terhadap capaian kinerja.

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Program pendampingan dan sertifikasi UMKM yang dilaksanakan melalui **bimbingan teknis GMP, evaluasi lapangan** menjadi faktor utama yang menunjang keberhasilan indikator ini. Koordinasi efektif dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Perdagangan juga turut memperlancar proses rekomendasi dan sertifikasi bagi UMKM yang telah memenuhi persyaratan produksi yang baik.

- **Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

Laporan kinerja ini digunakan sebagai bahan evaluasi dan perencanaan kegiatan pembinaan UMKM di periode selanjutnya, khususnya dalam menentukan sasaran prioritas pendampingan serta kebutuhan pelatihan CPPOB. Data capaian juga dimanfaatkan untuk penyusunan laporan akuntabilitas kinerja (LAKIP) dan sebagai evidence-based decision making dalam peningkatan mutu pengawasan pre-market oleh BBPOM di Semarang.

SK 5. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Semarang

Tabel .... Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan Ke 5

NO	SK	IKU	Target TW III	Realisasi	Capaian (%)
22	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Semarang	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Semarang	75,00	76,07	101,43
Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan					101,43

Sasaran Kegiatan 6: *Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Semarang* diukur melalui **Indikator Kinerja Utama (IKU): Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**.

Pada Triwulan II Tahun 2025, target yang ditetapkan sebesar **75,00%**, dan realisasinya mencapai **76,07%**, sehingga capaian kinerja mencapai **101,43%**. Hal ini menunjukkan bahwa penindakan yang dilakukan telah melampaui target dan berjalan secara efektif. Nilai pencapaian Sasaran Kegiatan 6 sebesar **101,43%** mencerminkan pelaksanaan penyidikan yang berhasil dalam mengungkap dan menindak kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang.

IKU 22. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Semarang

---

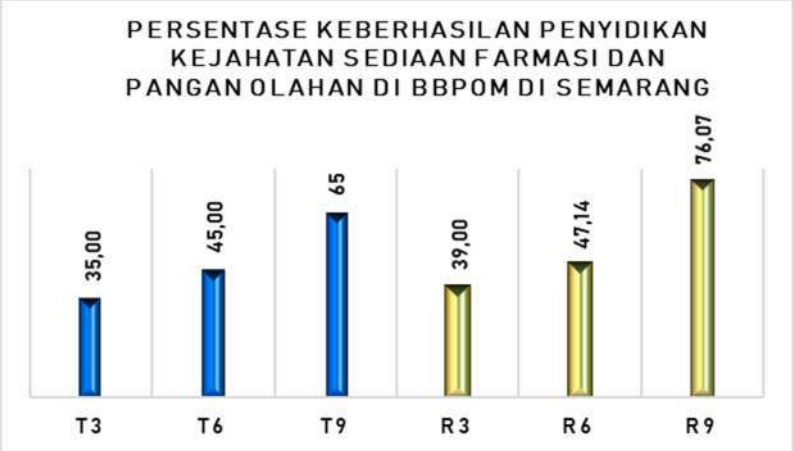
Target perkara Balai Besar POM di Semarang sebanyak 7 (tujuh) perkara. Untuk penyelesaian perkara ini diperlukan kerja sama lintas sektor yang baik. Peran intelijen Balai Besar POM di Semarang dengan didukung informasi dari Direktorat Intelijen Obat dan Makanan dan Direktorat Siber Obat dan Makanan diperlukan dalam hal melengkapi informasi target yang akan dilakukan penyidikan. Sedangkan untuk penyelesaian berkas perkara diperlukan kerja sama dengan lintas sektor yaitu Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah. Selain itu pemberlakuan wajib lapor terhadap tersangka ke kantor Balai Besar POM di Semarang dalam periode tertentu selama proses pemberkasan turut mendukung keberhasilan proses penyidikan agar tersangka yang tidak dilakukan penahanan bisa kooperatif selama proses penyidikan.

- **Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW III Tahun 2025**

NO	IKU	Target TW III	Realisasi	Capaian (%)
22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Semarang	75,00	76,07	101,43 Sangat Baik

Pada Triwulan III Tahun 2025, target kinerja ditetapkan sebesar **75%**, dengan realisasi mencapai **76,07%**, atau **101,43% dari target**. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan penyidikan terhadap kasus-kasus pelanggaran di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan berjalan dengan baik dan telah melampaui target yang ditetapkan.

- **Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW Sebelumnya Tahun 2025**



Dibandingkan dengan capaian pada triwulan sebelumnya, terjadi peningkatan yang stabil. Realisasi pada TW I sebesar **39%**, TW II sebesar **47,14%**, dan meningkat menjadi **76,07%** pada TW III. Kenaikan ini menunjukkan adanya konsistensi kinerja PPNS BBPOM di Semarang dalam menyelesaikan proses penyidikan hingga tahap P21 dan Tahap II di Kejaksaan.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan Target Tahun 2025**

NO	IKU	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi
22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Semarang	85,00	76,07	89,49	Akan Tercapai

Target tahunan ditetapkan sebesar 85%, sementara capaian kumulatif hingga TW III telah mencapai 89,49%, melampaui target tahunan yang telah ditetapkan. Hasil ini menunjukkan bahwa target tahunan diproyeksikan akan tercapai sepenuhnya bahkan berpotensi terlampaui hingga akhir tahun 2025.

- **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja**

Keberhasilan pencapaian indikator ini dipengaruhi oleh peningkatan efektivitas koordinasi antara PPNS BBPOM di Semarang dengan Korwas PPNS Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah serta ketepatan penyelesaian berkas perkara dalam hal pemenuhan terhadap syarat formil dan materiil. Pada bulan Juli 2025, telah dilakukan penyidikan terhadap 2 perkara, di mana satu perkara telah mencapai tahap P21. Selanjutnya, pada bulan Agustus dan September 2025, terdapat 1 berkas yang telah mencapai tahap P21 dan 1 berkas yang telah diserahkan Tahap II, sementara berkas lainnya masih dalam proses pemeriksaan di Kejaksaan. Tidak terdapat kendala berarti yang memengaruhi proses penyidikan selama periode pelaporan.

- **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Untuk menjaga dan meningkatkan capaian kinerja, BBPOM di Semarang akan terus memperkuat kapasitas dan kompetensi PPNS melalui kegiatan pelatihan teknis serta meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum (APH), khususnya Kejaksaan dan Kepolisian. Selain itu, optimalisasi penggunaan sistem digital dalam manajemen berkas perkara akan dilakukan untuk mempercepat penyelesaian penyidikan dan pelaporan hasil kinerja PPNS.

- **Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja**

Indikator	Pagu Anggaran(Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian IKU (%)	Tingkat Efisiensi
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Semarang	813,876,000	675,965,644	83.06	101.43	Efisien

Realisasi anggaran pada indikator ini sebesar 83,06%, dengan capaian kinerja 101,43%, menghasilkan tingkat efisiensi 0,95 yang termasuk dalam kategori efisien. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya telah berjalan optimal dan proporsional terhadap output yang dihasilkan, dengan hasil kinerja yang melebihi target tanpa pemborosan anggaran.

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Keberhasilan kinerja ini tidak lepas dari pelaksanaan program peningkatan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi ketentuan. Kegiatan koordinasi lintas sektor, pendampingan teknis PPNS, serta sinergi dengan

Kejaksaan dan Kepolisian menjadi faktor utama dalam mempercepat proses penyidikan hingga ke tahap P21 dan Tahap II.

- **Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

Laporan kinerja ini digunakan sebagai bahan evaluasi internal PPNS BBPOM di Semarang dalam upaya meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu penyelesaian perkara. Selain itu, laporan ini dimanfaatkan untuk perencanaan strategi penegakan hukum tahun berikutnya, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), serta penguatan akuntabilitas publik dalam pelaksanaan fungsi pengawasan post-market.

SK 6. Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif

Tabel .... Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan Ke 6

NO	SK	IKU	Target TW III	Realisasi	Capaian (%)
23	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50,00	50,00	100,00
Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan					100,00

Sasaran Kegiatan 6: Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Semarang diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU): *Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.*

Pada Triwulan II Tahun 2025, target yang ditetapkan sebesar 50,00%, dan realisasinya juga mencapai 50,00%, sehingga capaian kinerja mencapai 100,00%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pemantauan siber dan penyusunan laporan analisis telah berjalan tepat sasaran dan sesuai dengan standar waktu dan kualitas yang ditentukan. Nilai pencapaian Sasaran Kegiatan 7 sebesar 100,00 mencerminkan bahwa BBPOM di Semarang mampu menjaga efektivitas pemantauan digital dan penyelesaian laporan analisis secara konsisten.

IKU 23. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

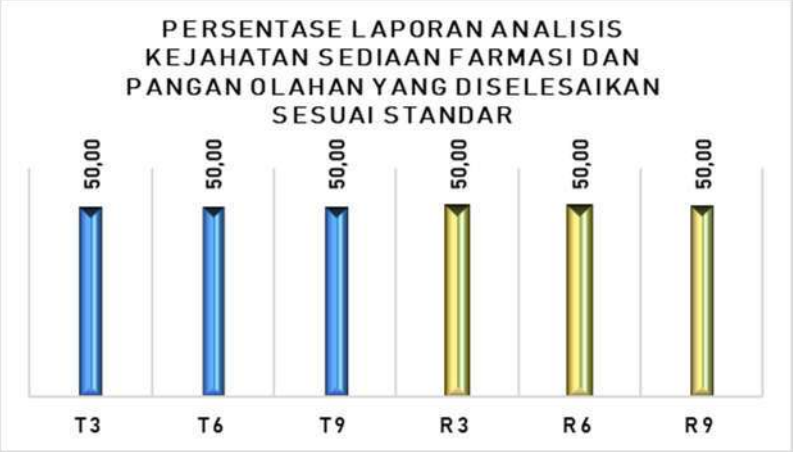
Target Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025 adalah 14 (empat belas) laporan yang terdiri dari 12 (dua belas) laporan analisis penjejakan digital (laporan *takedown*), 1 (satu) laporan hasil tindak lanjut rekomendasi kejahatan obat dan makanan, dan 1 (satu) laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan.

- **Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW III Tahun 2025**

NO	IKU	Target TW III	Realisasi	Capaian (%)
23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100,00 Baik

Pada Triwulan III Tahun 2025, target kinerja ditetapkan sebesar **50%**, dengan realisasi sebesar **50%**, sehingga capaian kinerja mencapai **100% dari target**. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh laporan analisis kejahatan yang ditetapkan pada periode ini telah diselesaikan sesuai dengan standar waktu dan format yang berlaku.

- **Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW Sebelumnya Tahun 2025**



Kinerja pada TW III menunjukkan konsistensi yang stabil dibandingkan TW I dan TW II, di mana keduanya juga mencapai **50%** sesuai target. Sepanjang tahun 2025, BBPOM di Semarang telah berhasil mempertahankan ketepatan waktu penyusunan laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan setiap bulannya tanpa adanya keterlambatan atau kekurangan dokumen.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan Target Tahun 2025**

NO	IKU	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi
23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90,00	50,00	55,56	Perlu Upaya Keras

Target tahunan indikator ini ditetapkan sebesar **90%**, sementara capaian kumulatif hingga TW III telah mencapai **55,56%**. Meskipun belum mencapai target tahunan, capaian hingga TW III menunjukkan progres positif dan sesuai dengan rencana kerja, mengingat 1 (satu) laporan hasil tindak lanjut

rekomendasi kejahatan obat dan makanan, dan 1 (satu) laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan dinilaikan di akhir tahun (TW IV).

- **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja**

Keberhasilan capaian indikator ini dipengaruhi oleh disiplin pelaporan yang tinggi dan konsistensi dalam input data laporan analisis ke sistem pusat sebelum tenggat waktu setiap tanggal 25 setiap bulannya. Selama bulan Juli hingga September, BBPOM di Semarang telah melakukan input terhadap akun-akun penjualan daring yang diajukan untuk takedown serta laporan profiling akun prioritas komoditi kosmetik.

- Juli 2025: 62 akun diajukan takedown dan 4 akun diprofiling.
- Agustus 2025: 58 link produk diajukan takedown dan 4 akun diprofiling.
- September 2025: 59 link produk diajukan takedown dan 3 akun diprofiling.
  Tidak terdapat kendala berarti selama proses penyusunan dan pengiriman laporan.

- **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Untuk meningkatkan capaian hingga mencapai target tahunan, BBPOM di Semarang akan memperkuat koordinasi dengan Direktorat Siber dan Cegah Tangkal Badan POM RI guna memastikan kesesuaian format laporan serta memperluas monitoring terhadap akun daring berisiko tinggi di berbagai platform e-commerce. Selain itu, peningkatan kapasitas petugas dalam penggunaan aplikasi monitoring digital akan dilakukan untuk mempercepat proses pelaporan.

- **Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja**

Indikator	Pagu Anggaran(Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian IKU (%)	Tingkat Efisiensi
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	122,167,000	0	0.00	100.00	-

Realisasi anggaran pada indikator ini sebesar **0%**, namun capaian kinerja telah mencapai **100%**. Hal ini menunjukkan tingkat efisiensi yang sangat tinggi karena pelaksanaan kegiatan tidak memerlukan tambahan biaya operasional yang signifikan. Penggunaan sumber daya manusia internal secara optimal

memungkinkan capaian kinerja tetap maksimal dengan pembiayaan yang minimal.

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Capaian indikator ini ditunjang oleh kegiatan pengawasan dan pemantauan siber (cyber patrol) terhadap peredaran produk sediaan farmasi dan pangan olahan secara daring, serta penyusunan laporan analisis dan profil akun e-commerce yang terindikasi menjual produk ilegal. Kegiatan rutin ini berperan penting dalam mendukung efektivitas penegakan hukum dan pengendalian risiko peredaran produk berbahaya di dunia maya.

- **Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

Laporan kinerja ini dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan dalam upaya pengawasan siber (cyber surveillance) terhadap kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan. Selain itu, hasil laporan analisis digunakan oleh BPOM pusat untuk menentukan prioritas tindakan takedown, profiling, dan investigasi lanjutan, serta menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan evaluasi efektivitas sistem pengawasan daring secara nasional.

SK 7. Layanan Publik BBPOM di Semarang yang Prima

Tabel .... Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan Ke 7

NO	SK	IKU	Target TW III	Realisasi	Capaian (%)
24	Layanan Publik BBPOM di Semarang yang Prima	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Semarang			
Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan					

Sasaran Kegiatan 7: Layanan Publik BBPOM di Semarang yang Prima diukur dengan 1 IKU yang dapat dilihat pada tabel di atas. Untuk Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan 7 belum terealisasi.

IKU 24. Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Semarang

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Evaluasi terhadap Pelayanan Publik di BBPOM di Semarang dilaksanakan untuk mengetahui implementasi penerapan kebijakan pelayanan publik serta untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik BBPOM di Semarang.

Penilaian kinerja Unit Pelayanan Publik (UPP) dikenal dengan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai BPOM (Biro Hukum dan Organisasi) dan penetapan Indeks Pelayanan Publik (IPP) oleh Kementerian PANRB.

Instrumen yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik BBPOM di Semarang berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

1. Kebijakan Pelayanan (bobot 24%)

Penilaian aspek Kebijakan Pelayanan meliputi Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan dan Survei Kepuasan Masyarakat

2. Profesionalisme SDM (25%)

Penilaian aspek profesionalisme SDM meliputi kompetensi, responsivitas, kode etik, pemberian reward dan punishment dan budaya pelayanan

3. Sarana Prasarana (18%)

Penilaian aspek Sarana dan Prasarana meliputi kenyamanan ruang tunggu dan fasilitas lainnya, sarana dan prasarana bagi yang berkebutuhan khusus, sarana prasarana front office dan sarana penunjang lainnya.

4. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%)

Penilaian aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik meliputi Sistem Informasi Elektronik dan Sistem Informasi Non Elektronik

5. Konsultasi dan Pengaduan (10%)

Penilaian aspek konsultasi dan pengaduan meliputi ketersediaan sarana dan media konsultasi dan pengaduan yang bisa dimanfaatkan oleh semua lapisan masyarakat, akuntabilitas dan tindak lanjut atas konsultasi dan pengaduan.

6. Inovasi (12%)

Penilaian aspek Inovasi meliputi penciptaan inovasi pelayanan public yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta dukungan sumber daya untuk keberlanjutan inovasi tersebut.

Tabel….Kategori Indeks Pelayanan Publik

Range	Nilai Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk

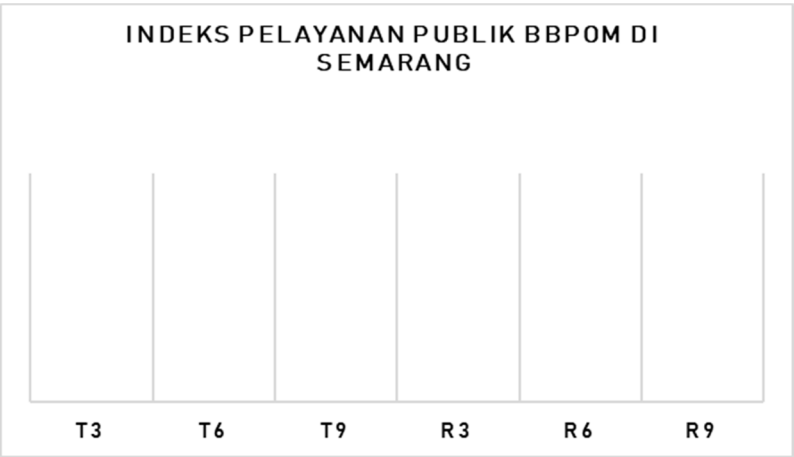
Range	Nilai Kategori	Makna
2,01 – 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50)	B-	Baik (Dengan Catatan
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

- **Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW III Tahun 2025**

NO	IKU	Target TW III	Realisasi	Capaian (%)
24	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Semarang			

Pada Triwulan III Tahun 2025, Indeks Pelayanan Publik (IPP) BBPOM di Semarang belum memiliki nilai realisasi karena penilaian IPP merupakan indikator tahunan yang hasilnya baru ditetapkan setelah proses evaluasi dan verifikasi akhir tahun oleh Kementerian PANRB. Dengan demikian, pada TW III belum terdapat nilai capaian numerik untuk dibandingkan dengan target sebesar 4,7.

- **Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW Sebelumnya Tahun 2025**



Karena indikator ini bersifat tahunan, maka belum ada perbandingan antartriwulan. Kegiatan pada TW I sampai TW III lebih berfokus pada pengumpulan data pendukung, pelaksanaan pelayanan publik yang prima, survei kepuasan masyarakat dan tindak lanjut hasil survei, monev dan dan tindak lanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat, serta pelaksanaan forum konsultasi publik (FKP) yang menjadi dasar perhitungan IPP. Dengan demikian,

kinerja pada TW III merupakan kelanjutan dari tahapan persiapan menuju penilaian akhir IPP.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan Target Tahun 2025**

NO	IKU	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi
24	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Semarang	4,70	Tahunan	Tahunan	Tahunan

Meskipun nilai IPP belum dirilis secara resmi, capaian kegiatan hingga TW III menunjukkan kemajuan signifikan menuju target tahunan 4,7 (kategori "A" – pelayanan prima). Hal ini terlihat dari hasil Exit Meeting PEKPPP pada 17 September 2025, di mana BBPOM di Semarang memperoleh nilai 4,96 dengan predikat "Pelayanan Prima". Hasil ini menunjukkan bahwa capaian sementara telah melampaui target tahunan yang ditetapkan.

- **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja**

Capaian kinerja yang positif hingga TW III didorong oleh pelaksanaan berbagai kegiatan peningkatan kualitas pelayanan publik, antara lain:

1. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara rutin setiap bulan, dengan publikasi dan tindak lanjut hasil SKM periode Juni–Agustus 2025.
2. Penetapan Petugas Pelayanan Publik Terbaik setiap bulan (Juni–Agustus 2025) sebagai bentuk apresiasi dan motivasi peningkatan layanan.
3. Pelaksanaan Wawancara dan Verifikasi Data PEKPPP pada Agustus 2025 yang menunjukkan hasil sangat baik, dengan sebagian besar aspek memperoleh nilai 5 (maksimal).
4. Exit Meeting PEKPPP pada September 2025 dengan hasil IPP 4,96 (A), serta pelaksanaan monev pelayanan publik kelompok rentan dan survei kepada penerima layanan khusus.
   Tidak terdapat kendala berarti selama pelaksanaan kegiatan, dan seluruh tahapan berjalan sesuai dengan pedoman serta arahan Kementerian PANRB.

- **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, BBPOM di Semarang akan melakukan beberapa langkah strategis, antara lain:

- Pemeliharaan inovasi pelayanan publik "Gumregah" agar tetap berkelanjutan, serta pengembangan inovasi baru PIJAR MENTARI (Pendampingan Ijin Edar Menuju UMKM Pintar dan Mandiri), SHARA SEHAN (SHAring InfoRmAsiTentang Obat & Pangan SEHat dan AmAN), SENTUH BPOM (Sarana Nyaman dan Terpadu untuk Tuna Netra dan Tuna Rungu di BBPOM), JAMU SERBAT (Janji Temu Solusi Evaluasi Responsif Perbaikan dan Pencegahan Terintegrasi), dan SI MONCER (Sistem Monitoring Evaluasi CAPA Terintegrasi) yang merupakan inovasi baru tim AOC BBPOM di Semarang 2025 agar mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik BBPOM di Semarang dan berkontribusi pada peningkatan nilai inovasi IPP.
- Peningkatan pelibatan masyarakat dan kelompok rentan dalam FKP dan kegiatan layanan publik agar aspek inklusivitas semakin kuat.
- Pembinaan lintas bidang dalam implementasi standar pelayanan untuk memastikan konsistensi mutu pelayanan di seluruh lini.

Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Indikator	Pagu Anggaran(Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian IKU (%)	Tingkat Efisiensi
Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Semarang	688,354,000	88,032,100	12.79		-

Realisasi anggaran hingga TW III mencapai 12,79%, sementara sebagian besar kegiatan telah terlaksana sesuai rencana tanpa kendala berarti. Namun capaian IKU belum tercantum secara kuantitatif hingga periode pelaporan ini, sehingga tingkat efisiensi belum dapat ditentukan secara akurat. Evaluasi efisiensi akan lebih komprehensif apabila capaian IKU sudah tersedia dan dapat dibandingkan dengan tingkat penggunaan anggaran secara proporsional.

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program yang berperan penting dalam menunjang keberhasilan indikator ini antara lain:

- Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan publikasi hasilnya setiap bulan.
- Forum Konsultasi Publik (FKP) serta penyusunan laporan tindak lanjut.
- Penilaian dan penghargaan petugas pelayanan publik terbaik untuk mendorong budaya pelayanan unggul.
- Pelaksanaan monev dan tindak lanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat.

- Pelaksanaan PEKPPP yang menjadi dasar penilaian IPP nasional. Seluruh kegiatan ini secara sinergis berkontribusi dalam menciptakan pelayanan publik yang responsif, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

- **Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

Laporan kinerja ini dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan BBPOM di Semarang, sekaligus menjadi data dukung utama dalam penilaian Reformasi Birokrasi. Selain itu, laporan hasil survei, tindak lanjut pengaduan, dan monev pelayanan kelompok rentan digunakan untuk penyusunan rekomendasi peningkatan standar pelayanan serta inovasi baru dalam pelayanan publik.

SK 8. Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal

Tabel .... Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan Ke 8

NO	SK	IKU	Target TW III	Realisasi	Capaian (%)
25	Terwujudnya Tatakelola	Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Semarang			
26	Pemerintah Unit Organisasi yang	Nilai AKIP BBPOM di Semarang			
27	Optimal	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang			
28		Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Semarang			
Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan					

Pada Triwulan III Tahun 2025, keempat IKU pada Sasaran Kegiatan 8, yaitu Nilai Pembangunan ZI, AKIP, Kinerja Anggaran, dan Indeks Manajemen Risiko belum memiliki data realisasi maupun capaian. Hal ini disebabkan penilaian oleh instansi eksternal belum dilaksanakan dan sebagian indikator bersifat tahunan.
Meski demikian, BBPOM di Semarang telah melakukan berbagai persiapan seperti penyusunan dokumen LKE, LAKIP, reviu anggaran, dan pemutakhiran peta risiko. Upaya perbaikan difokuskan pada penguatan koordinasi, pendampingan teknis, serta pemanfaatan sumber daya internal secara efisien. Laporan ini menjadi dasar evaluasi dan strategi capaian akhir tahun.

IKU 25. Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Semarang

Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil

melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan sangat baik, dengan telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Pembangungan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan bentuk komitmen BPOM dalam mengimplementasikan Reformasi Birokrasi (RB) pada seluruh level organisasi secara berkelanjutan.

Pembangunan ZI adalah upaya percepatan pencapaian sasaran reformasi birokrasi, terutama terkait birokrasi yang bersih dan akuntabel, dan pelayanan publik yang prima.

Pembangunan ZI mencakup dua komponen, yaitu komponen pengungkit (60%) dan komponen hasil (40%). Komponen pengungkit merupakan aspek tata kelola (governance) internal unit kerja dan komponen hasil merupakan bagaimana stakeholder merasakan dampak/hasil dari perubahan yang telah dilakukan pada area pengungkit. Komponen pengungkit terdiri dari enam area, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Komponen hasil terdiri dari Nilai Persepsi Anti Korupsi, Capaian Kinerja, serta Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan Publik. Dalam Komponen pengungkit terdapat aspek pemenuhan dan aspek reform.

Rincian bobot komponen penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK / Menuju WBBM adalah sebagai berikut:

1. Komponen Pengungkit sebesar 60%, terdiri dari:
    a. Manajemen Perubahan 8%
    b. Penataan Tatalaksana 7%
    c. Penataan Sistem Manajemen SDM 10%
    d. Penguatan Akuntabilitas Kinerja 10%
    e. Penguatan Pengawasan 15%
    f. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik: bobot 10%

2. Komponen Hasil sebesar 40%, terdiri dari:
    a. Birokrasi yang bersih dan akuntabel 22,5%, terdiri dari
        i. Nilai Survey Persepsi Korupsi 17,5%
        ii. Capaian kinerja 5%
    b. Pelayanan publik yang prima 17,5%.

Penilaian terhadap setiap program dalam komponen pengungkit dan komponen hasil diukur melalui indikator-indikator yang dipandang mewakili program tersebut. Sehingga dengan menilai indikator tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran pencapaian upaya yang berdampak pada pencapaian sasaran. Target nilai pembangunan ZI Balai Besar POM di Semarang tahun 2025 adalah 92,43.

- **Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Kinerja TW III Tahun 2025**

NO	IKU	Target TW III	Realisasi	Capaian (%)
25	Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Semarang			

Pada Tahun 2025, **Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI)** BBPOM di Semarang ditargetkan sebesar **92,43**. Capaian aktual pada Triwulan III belum ditetapkan secara final karena evaluasi resmi oleh Tim Penilai Internal (TPI) baru dilaksanakan, dengan hasil sementara **93,63**, namun nilai tersebut belum dapat direalisasikan secara tahunan. Meskipun demikian, seluruh kegiatan prioritas dan rencana aksi ZI di Triwulan III telah terlaksana secara optimal hingga September 2025.

- **Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW Sebelumnya Tahun 2025**



Jika dibandingkan dengan capaian Triwulan II, implementasi ZI di Triwulan III menunjukkan peningkatan dari sisi internalisasi nilai BerAKHLAK, jumlah kegiatan sosialisasi kepada stakeholder, serta koordinasi antar-Pokja RB. Pada TW II fokus utama adalah penguatan budaya kerja dan penataan tata laksana, sementara di TW III BBPOM di Semarang berhasil memperluas kegiatan sosialisasi eksternal, menyelesaikan Audit Internal Khusus dan Kaji Ulang Manajemen ISO 17025, serta menerima kunjungan verifikasi lapangan dari KemenPAN RB untuk penilaian WBBM. Hal ini menandakan peningkatan signifikan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi secara menyeluruh.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan Target Tahun 2025**

NO	IKU	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi
25	Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Semarang	92,43	Tahunan	Tahunan	Tahunan

Meskipun penilaian ZI bersifat tahunan, progres pelaksanaan kegiatan pada TW III telah mencapai lebih dari 90% dari target tahunan. Seluruh 13 AoC aktif melakukan input progres aksi bulanan melalui e-monev RB hingga bulan September. Kegiatan internalisasi nilai BerAKHLAK dan publikasi RB secara rutin dilakukan setiap bulan melalui berbagai media, baik internal maupun eksternal. Dengan demikian, BBPOM di Semarang berada pada jalur yang tepat untuk mencapai target akhir tahun sebesar 92,43.

- **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja**

Peningkatan kinerja ZI pada TW III dipengaruhi oleh sinergi lintas Pokja RB dan dukungan aktif pimpinan serta seluruh pegawai. Strategi internalisasi nilai BerAKHLAK secara kreatif melalui kegiatan seperti Padi Manis, Fosil Antik, dan English Fun Day mampu meningkatkan partisipasi pegawai dalam reformasi birokrasi. Keberhasilan juga ditopang oleh pelaksanaan audit internal ISO 17025 dan Kaji Ulang Manajemen yang menjadi bukti komitmen terhadap sistem manajemen mutu dan integritas layanan publik. Kendala yang muncul bersifat teknis, seperti keterlambatan publikasi Info Ki Semar akibat penyesuaian sistem e-performance dan sinkronisasi data, yang telah direncanakan tindak lanjutnya pada Oktober 2025.

- **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Untuk memastikan capaian tahunan sesuai target, BBPOM di Semarang akan melakukan:

a. Penguatan dokumentasi kegiatan, termasuk pengarsipan dan publikasi hasil internalisasi ZI.
b. Sinkronisasi data e-performance dan RHPK agar seluruh capaian dapat terverifikasi tepat waktu.
c. Peningkatan kualitas komunikasi eksternal dengan pencantuman logo Pasti WBBM dan BerAKHLAK pada setiap kegiatan publik.
d. Optimalisasi tindak lanjut hasil survei kepuasan masyarakat dan opini pegawai sebagai bahan perbaikan layanan.
e. Pemantauan berkala terhadap progres AoC melalui reminder bulanan oleh Pokja 4 RB.

- **Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja**

Indikator	Pagu Anggaran(Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian IKU (%)	Tingkat Efisiensi
Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Semarang	2,340,000,000	35,647,004	1.52		-

Kegiatan pembangunan ZI pada TW III dilaksanakan dengan realisasi anggaran sebesar **1,52%** meski belum dapat ditentukan efisiensinya tetapi **sebagian** besar kegiatan bersifat kolaboratif lintas Pokja dan memanfaatkan sumber daya internal tanpa tambahan biaya besar. Optimalisasi platform digital (e-monev RB, media sosial, dan kanal komunikasi daring) turut menekan biaya operasional, sekaligus memperluas jangkauan sosialisasi RB ke masyarakat.

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Beberapa kegiatan strategis yang menunjang keberhasilan pelaksanaan ZI antara lain:

a. Pelaksanaan verifikasi lapangan KemenPAN RB untuk penilaian WBBM.
b. Audit internal ISO 17025 dan Kaji Ulang Manajemen sebagai bentuk pemenuhan komitmen terhadap tata kelola mutu.
c. Padi Manis tematik, Fosil Antik, serta Gema Merdeka yang memperkuat nilai integritas dan pelayanan publik.
d. Sosialisasi RB kepada stakeholder eksternal seperti kader keamanan pangan, sekolah, dan pelaku usaha pangan.
e. Kegiatan ini menunjukkan bahwa keberhasilan ZI di BBPOM Semarang bukan hanya hasil kerja administratif, tetapi juga hasil nyata dari perubahan budaya kerja dan pelayanan publik.

- **Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

Laporan kinerja pembangunan ZI dimanfaatkan oleh pimpinan dan seluruh Pokja RB sebagai dasar dalam pengambilan keputusan strategis, perencanaan aksi perbaikan berkelanjutan, serta bahan persiapan menghadapi evaluasi lanjutan oleh TPI dan KemenPAN RB. Selain itu, laporan ini juga digunakan sebagai bahan komunikasi publik dalam Info Ki Semar dan media sosial BBPOM di Semarang untuk menunjukkan transparansi serta akuntabilitas kinerja kepada masyarakat.

IKU 26. Nilai AKIP BBPOM di Semarang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektivitas dan efisiensi kinerja dan;
5. Penilaian pencapaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

Evaluasi AKIP difokuskan pada kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dengan memperhatikan hasil evaluasi tahun sebelumnya. Data dan informasi yang digunakan dalam evaluasi merupakan data dan informasi terakhir yang dapat digunakan dalam implementasi SAKIP saat evaluasi berjalan. Isu penting yang perlu diungkap melalui evaluasi AKIP antara lain:

a. Kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
b. Pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
c. Pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
d. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektivitas dan efisiensi kinerja.

Evaluasi AKIP harus dapat memberikan simpulan hasil penilaian beberapa variabel, antara lain kriteria-kriteria yang ada dalam penerapan komponen-komponen manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai fakta obyektif instansi pemerintah/unit kerja mengimplementasikan SAKIP. Komponen komponen tersebut kemudian dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE), sesuai dengan kriteria masing-masing komponen. Variabel-variabel tersebut, yaitu:

a. Komponen: terdiri dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dan Capaian Kinerja.
b. Sub-komponen: dibagi dengan gradasi Keberadaan, Kualitas dan Pemanfaatan pada setiap komponen.

c. Kriteria: Merupakan gambaran kondisi yang perlu dicapai di setiap sub-komponen untuk dapat dinilai apakah kondisi tersebut sudah atau belum dicapai dan dapat digambarkan atau tidak.

LKE menyajikan komponen, sub-komponen, serta dilengkapi dengan kriteria penilaian yang akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Inspektur Utama. LKE kemudian dianalisis dan digunakan sebagai bahan dasar dalam menyusun Laporan Hasil Evaluasi (LHE). Variabel dalam LKE AKIP BPOM diatur lebih rinci melalui Surat Edaran Inspektur Utama. Setiap kriteria yang dinilai pada LKE ini membutuhkan “Professional Judgements" dari evaluator karena terkait dengan penilaian kualitatif. LKE disusun dengan maksud sebagai kertas kerja evaluator dalam melakukan pengumpulan, penilaian, analisis, serta penyimpulan data dan informasi. Setiap sub komponen kriteria yang telah diberikan nilai dalam pemenuhan kriteria harus dilengkapi dengan catatan berupa keterangan beserta bukti daftar dokumen yang mendukung dan relevan. Penilaian dilakukan melalui aplikasi SAPA APIP (Sistem Aplikasi Terpada Aparat Pengawas Intern Pemerintah).

Penilaian hasil SAKIP tidak semata-mata hanya berdasarkan atas pencapaian kinerja yang dilaporkan dalam dokumen Laporan Kinerja Satuan Kerja/Unit Kerja organisasi, tetapi hasil evaluasi SAKIP harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta obyektif Satuan Kerja/Unit Kerja dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam LKE. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai >90 - 100)	Sangat memuaskan. Telah terwujud *good governance*. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh level. Telah terbentuk pemerintahan yang dinamis, adaptif dan efisiensi (*Reform*).
A (Nilai >80 – 90)	Memuaskan. Terdapat gambaran bahwa Satuan Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.
BB (Nilai >70 – 80)	Sangat Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.
B (Nilai >60 – 70)	Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada Satuan Kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.
CC (Nilai >50 – 60)	Cukup (memadai). Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada Satuan Kerja.

Predikat	Interpretasi
C (Nilai >30 – 50)	Kurang. Sistem dan catatan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar.
D (Nilai >0 – 30)	Sangat kurang. Sistem dan catatan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar khususnya dalam implementasi SAKIP.

BOBOT PENILAIAN

Komponen Penilaian	BPOM
Perencanaan Kinerja	24
Pengukuran Kinerja	24
Pelaporan Kinerja	12
Evaluasi Internal	20
Capaian Kinerja	20
Total	100

Sesuai Kepka BPOM Nomor 331 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan
Pengawas Obat dan Makanan

- **Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Kinerja TW III Tahun 2025**

NO	IKU	Target TW III	Realisasi	Capaian (%)
26	Nilai AKIP BBPOM di Semarang			

Pada tahun 2025, Nilai AKIP BBPOM di Semarang ditargetkan sebesar **82**. Hingga Triwulan III, capaian nilai akhir belum dapat ditetapkan karena proses evaluasi dan verifikasi SAKIP secara nasional baru akan dilaksanakan pada akhir tahun. Meskipun demikian, progres kegiatan akuntabilitas kinerja di Triwulan III menunjukkan perkembangan signifikan melalui pelaksanaan rapat evaluasi dan monitoring kinerja bulanan, pelaksanaan desk SAKIP pada 4 September 2025, serta kegiatan Reward and Punishment TW II. Seluruh kegiatan tersebut menjadi bagian penting dari siklus penguatan akuntabilitas kinerja menuju capaian target tahunan.

- **Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW Sebelumnya Tahun 2025**



Dibandingkan dengan Triwulan II, pelaksanaan kegiatan pada Triwulan III menunjukkan peningkatan koordinasi antarunit dalam pemantauan kinerja. Pada TW II difokuskan pada penyusunan laporan evaluasi internal dan penyampaian dokumen Renstra 2025–2029 ke Roren, sedangkan pada TW III dilakukan peningkatan intensitas monitoring melalui reminder pelaporan kinerja di awal bulan untuk seluruh Ketua Tim serta publikasi Info Ki Semar yang menampilkan infografis kinerja BBPOM di Semarang. Selain itu, kegiatan Reward and Punishment TW II telah terlaksana, menandakan meningkatnya budaya apresiasi dan pembelajaran dalam pengelolaan kinerja.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan Target Tahun 2025**

NO	IKU	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi
26	Nilai AKIP BBPOM di Semarang	82,00	Tahunan	Tahunan	Tahunan

Karena Nilai AKIP bersifat **tahunan**, capaian kinerja TW III belum dapat dibandingkan langsung dengan target akhir tahun. Namun, progres pelaksanaan kegiatan penguatan SAKIP hingga September telah mencapai lebih dari 75% dari keseluruhan rencana tahunan. Kegiatan utama seperti evaluasi kinerja bulanan, monitoring pelaporan tim, serta desk SAKIP telah terlaksana sesuai jadwal. Dengan demikian, BBPOM di Semarang berada pada jalur yang tepat untuk mencapai target akhir tahun sebesar 82.

- **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja**

Peningkatan kinerja pada TW III dipengaruhi oleh komitmen pimpinan dan seluruh tim dalam melaksanakan evaluasi kinerja secara berkala, serta kedisiplinan pelaporan dari masing-masing Ketua Tim. Keberhasilan ini juga didukung dengan terlaksananya Desk SAKIP yang memastikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa keterlambatan uji SMART IKU karena menunggu manual resmi dari Roren, serta ketidaksinkronan beberapa menu pada aplikasi

Tugu Muda dan Kibas Rambut yang menghambat proses integrasi data secara optimal.

- **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Untuk memastikan capaian tahunan sesuai target, BBPOM di Semarang akan melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

- Melakukan uji SMART IKU setelah manual resmi diterbitkan oleh Roren.
- Menyelesaikan sinkronisasi menu dan tautan pada aplikasi Tugu Muda serta Kibas Rambut.
- Memperbarui tindak lanjut rekomendasi LAKIP pada setiap rapat bulanan.
- Menyempurnakan dan mengupdate TL Lakip yang belum tuntas.
- Menyampaikan revisi kedua PK RAPK Renstra ke Kepala Badan sebagai bagian dari penyelarasan dokumen perencanaan dan akuntabilitas.

- **Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja**

Indikator	Pagu Anggaran(Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian IKU (%)	Tingkat Efisiensi
Nilai AKIP BBPOM di Semarang	240,000,000	35,647,004	14.85		-

Realisasi anggaran kegiatan penguatan AKIP hingga Triwulan III sebesar **14,85%**, menunjukkan tingkat efisiensi yang tinggi karena sebagian besar kegiatan dilakukan melalui koordinasi internal dan pemanfaatan rapat rutin bulanan tanpa tambahan biaya besar. Penggunaan media digital seperti Tugu Muda, Kibas Rambut, dan Info Ki Semar juga turut meningkatkan efisiensi komunikasi dan pelaporan kinerja.

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Kegiatan utama yang mendukung keberhasilan capaian AKIP antara lain: rapat evaluasi dan monitoring kinerja bulanan, pelaksanaan Desk SAKIP, reminder pelaporan kinerja kepada Ketua Tim, serta publikasi kinerja melalui media sosial Info Ki Semar. Sementara kendala pada TW III berasal dari faktor teknis terkait sistem aplikasi dan keterlambatan panduan Roren yang berdampak pada pelaksanaan uji SMART IKU.

- **Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

Laporan kinerja dan hasil evaluasi internal digunakan oleh pimpinan dan seluruh tim sebagai dasar pengambilan keputusan dalam perbaikan tata kelola, peningkatan akuntabilitas, serta penyusunan rencana tindak lanjut LAKIP berikutnya. Selain itu, hasil capaian sementara juga dimanfaatkan

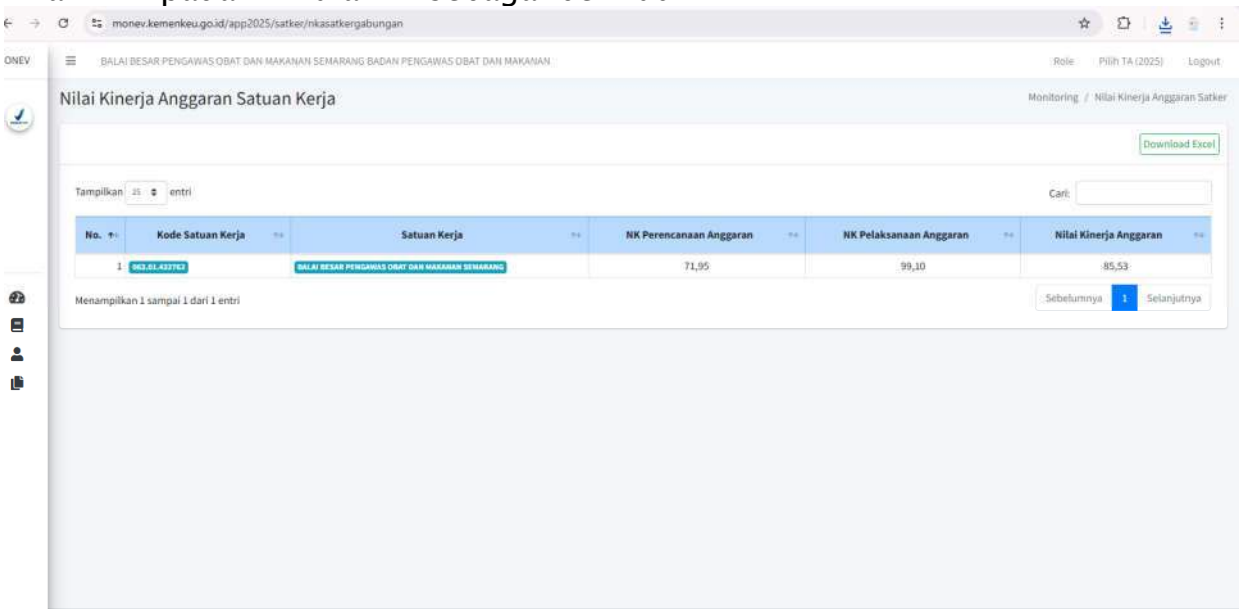
sebagai bahan publikasi Info Ki Semar untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kepada publik.

IKU 27. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang

Realisasi Anggaran di Triwulan III Balai Besar POM di Semarang adalah sebesar Rp 22.684.504.875 atau 72,18% dari Total Anggaran DIPA sebesar Rp 31.429.448.000 (sudah dikurangi blokir dari total DIPA Rp 53.693.128.000). Nilai Kinerja Anggaran adalah hasil penjumlahan dari 50% Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan 50% Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (PMK. No 62 Tahun 2023).
Kategori Konversi Nilai Kinerja Anggaran

Nilai	Kategori	Konversi NIlai
0 s.d. 50	Sangat Kurang	1
50,01 s.d. 60	Kurang	2
60,01 s.d. 80	Cukup	3
80,01 s.d. 90	Baik	4
90,01 s.d. 100	Sangat Baik	5

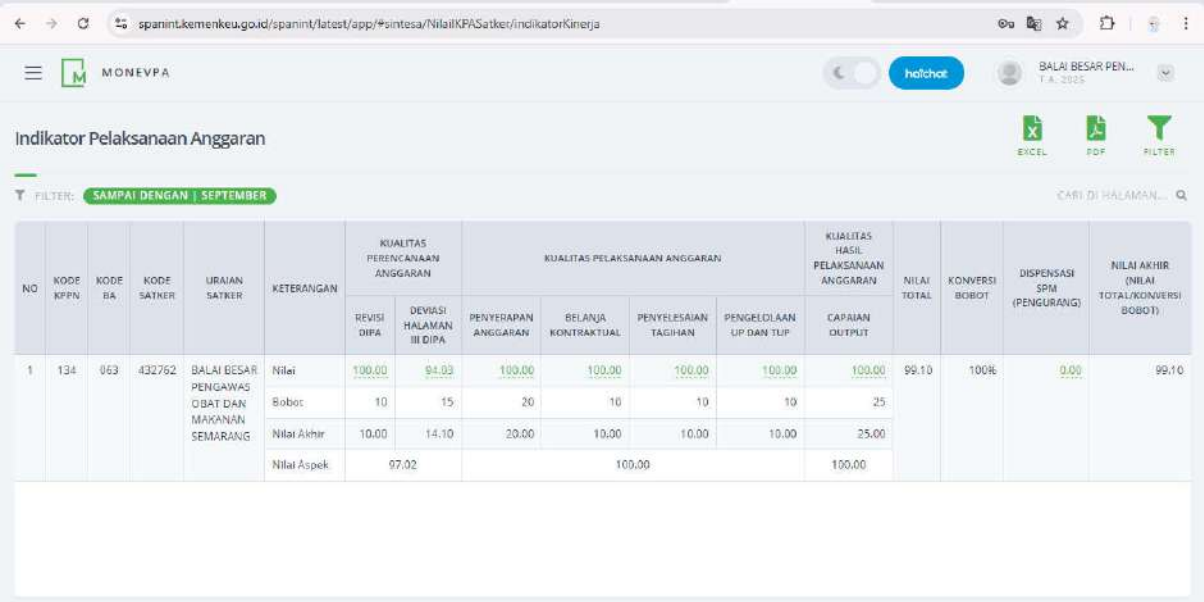
Nilai NKA pada Triwulan III sebagai berikut:



Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang berdasarkan data pada laman web MONEV KEMENKEU (monev.kemenkeu.go.id) pada September 2025 tercatat sebesar 85,53. Nilai tersebut terdiri dari Nilai Perencanaan Anggaran sebesar 71,95 dan Nilai Pelaksanaan Anggaran sebesar 99,10. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran telah berjalan dengan sangat

baik, namun masih diperlukan peningkatan dan perbaikan dalam aspek perencanaan agar kualitas pengelolaan anggaran secara keseluruhan dapat lebih optimal.

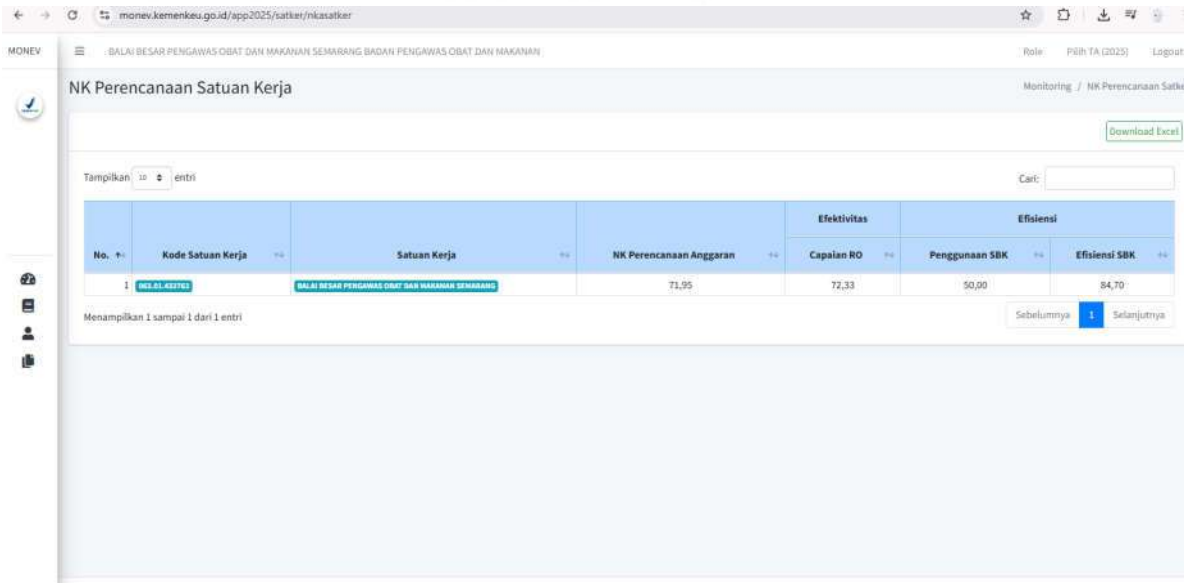
Indikator Pelaksanaan Anggaran BBPOM di Semarang sampai dengan TW III 2025



NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT				
1	134	063	432762	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SEMARANG	Nilai	100.00	94.03	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.10	100%	0.00	99.10
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.10	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	97.02		100.00				100.00				

Sebagaimana diakses dari laman OMSPAN https://spanint.kemenkeu.go.id/ hingga periode September 2025, Balai Besar POM di Semarang memperoleh nilai **Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)** sebesar **99,10**, dimana secara keseluruhan 7 indikator penilaian mendapat nilai 100 namun terdapat satu indikator yang masih bernilai di bawah 100, yaitu Indikator Realisasi Halaman III DIPA. Kondisi ini disebabkan oleh adanya beberapa komponen belanja yang tidak terealisasi sepenuhnya di Triwulan III, baik karena perubahan kebutuhan kegiatan, efisiensi pelaksanaan program, maupun penyesuaian waktu pelaksanaan. Hal ini mencerminkan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel sesuai prinsip tata kelola yang baik.

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBPOM di Semarang TW III 2025



Penilaian dilakukan dengan menggabungkan dua aspek utama yaitu: Efektivitas dan Efisiensi. Nilai Perencanaan sebesar 71,95 terdiri dari Aspek Efisiensi pada Capaian RO sebesar 72,33 dan Efisiensi Penggunaan SBK 50 dan Efisiensi SBK sebesar 84,70. Hal ini menunjukkan diperlukan peningkatan akurasi perhitungan kebutuhan biaya dan volume output agar efisiensi dan efektivitas perencanaan meningkat di periode berikutnya.

- **Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW III Tahun 2025**

NO	IKU	Target TW III	Realisasi	Capaian (%)
27	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang			

Pada Triwulan III Tahun 2025, indikator Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BBPOM di Semarang menunjukkan hasil sementara yang positif. Berdasarkan data hingga akhir September 2025, diperoleh nilai perencanaan anggaran sebesar 71,95, nilai IKPA sebesar 99,10, dengan NKA sementara 85,53. Meskipun penilaian akhir baru akan dilakukan pada akhir tahun, capaian ini menunjukkan kinerja anggaran berada pada tren meningkat

Untuk menjaga dan meningkatkan capaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) hingga akhir tahun 2025, BBPOM di Semarang perlu melaksanakan beberapa langkah langkah berikut:

1. Peningkatan Kualitas Perencanaan Anggaran
   Melakukan *review* terhadap kesesuaian antara alokasi anggaran dengan target output dan outcome. Memperbaiki ketepatan jadwal penarikan dana agar sesuai dengan rencana kegiatan dan RPD, menghindari penumpukan di akhir tahun.
2. Optimalisasi Efisiensi Penggunaan Anggaran
   Menekan potensi pemborosan melalui efisiensi perjalanan dinas, pengadaan,

dan operasional rutin tanpa mengurangi kualitas output.

3. Penguatan Monitoring dan Evaluasi Internal

Melakukan pemantauan realisasi anggaran dan capaian kinerja secara bulanan

melalui koordinasi antara bagian perencana, keuangan, dan pelaksana kegiatan.

Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW Sebelumnya Tahun 2025



Jika dibandingkan dengan Triwulan II, terjadi peningkatan kinerja yang signifikan dalam pelaksanaan anggaran. Pada Triwulan III, realisasi anggaran telah mencapai 72,18%, menunjukkan akselerasi penyerapan yang baik. Namun demikian, pada periode yang sama, nilai pelaksanaan anggaran (IKPA) mengalami sedikit penurunan menjadi 99,10%.

Penurunan ini terutama disebabkan oleh aspek Realisasi Halaman III DIPA yang belum mencapai nilai sempurna (100). Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya beberapa komponen belanja yang tidak terealisasi sepenuhnya, baik karena perubahan kebutuhan kegiatan, penyesuaian jadwal pelaksanaan, maupun efisiensi anggaran pada beberapa program. Akibatnya, sebagian kegiatan yang direncanakan pada Triwulan III tidak dapat terealisasi sesuai target waktu.

Meskipun demikian, capaian IKPA sebesar 99,10% tetap menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan anggaran telah berjalan efektif, tertib, dan akuntabel, dengan ruang perbaikan yang relatif kecil pada aspek sinkronisasi antara perencanaan dan realisasi belanja.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan Target Tahun 2025**

NO	IKU	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi
27	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di	5,00	Tahunan	Tahunan	Tahunan

Secara keseluruhan, meskipun NKA Triwulan III belum mencapai target akhir tahun, capaian sementara menunjukkan kemajuan yang selaras dengan arah pencapaian target 90,01–100 (Sangat Baik). Dengan nilai pelaksanaan 99,10 dan tren serapan anggaran yang tinggi di Triwulan III, BBPOM di Semarang berpotensi kuat untuk mencapai bahkan melampaui target tahunan pada saat penilaian akhir dilakukan.

- **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja**

Pada Triwulan III, peningkatan kinerja anggaran berhasil dicapai melalui sinergi yang efektif antara unit substansi dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam memastikan pelaksanaan kegiatan serta pelaporan keuangan berjalan tepat waktu. Pemantauan rutin oleh tim perencana dan keuangan dilaksanakan secara konsisten untuk menjaga tingkat penyerapan anggaran tetap optimal. Selain itu, pemanfaatan aplikasi SAKTI dan sistem pelaporan internal yang terintegrasi turut berkontribusi dalam meningkatkan akurasi data, efisiensi proses, serta ketepatan waktu pelaporan kinerja anggaran

Upaya perbaikan ke depan difokuskan pada penyempurnaan koordinasi dan optimalisasi perencanaan anggaran agar capaian kinerja semakin maksimal

- **Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja**

Indikator	Pagu Anggaran(Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian IKU (%)	Tingkat Efisiensi
Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang	19,243,639,000	12,229,701,030	63.55		-

Efisiensi penggunaan sumber daya belum dapat dipastikan, namun capaian realisasi anggaran 63,55% menunjukkan kinerja yang baik. Kegiatan dilaksanakan sesuai rencana dengan prinsip efisiensi dan efektivitas, sedangkan realokasi anggaran dilakukan terbatas untuk kegiatan prioritas yang mendesak dan berdampak langsung pada sasaran kinerja.

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Kegiatan yang berkontribusi terhadap keberhasilan capaian indikator ini antara lain adalah pengendalian pelaksanaan kegiatan melalui Rapat Evaluasi Internal, optimalisasi penggunaan sistem OM-SPAN dan SAKTI, serta pelaksanaan review internal atas kinerja anggaran per triwulan. Disiplin pelaporan keuangan dan sinergi antar unit kerja dalam menyelesaikan dokumen pendukung belanja juga turut memperkuat capaian kinerja anggaran.

- **Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

Laporan kinerja anggaran digunakan sebagai dasar evaluasi efektivitas pelaksanaan program, penetapan prioritas kegiatan, serta perbaikan strategi perencanaan anggaran di tahun berikutnya. Hasil analisis NKA juga menjadi bahan utama dalam penilaian akuntabilitas kinerja instansi (SAKIP) dan digunakan untuk mendukung proses feedback dalam peningkatan tata kelola keuangan BBPOM di Semarang agar semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil.

IKU 28. Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Semarang

Manajemen risiko adalah pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan/sasaran organisasi. Manajemen risiko digunakan dalam konteks mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM dalam pencapaian tujuan. Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan POM mengacu pada Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.7.07.20.267 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan POM.

Penerapan manajemen risiko bertujuan untuk:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik
2. Menetapkan dan mengelola risiko yang dihadapi dan meminimalisir dampak yang ditimbulkan
3. Melindungi organisasi dari risiko yang signifikan yang berdampak pada pencapaian tujuan organisasi
4. Meningkatkan kinerja organisasi di dalam pencapaian tujuan
5. Menciptakan kesadaran dan kepedulian pegawai terhadap pentingnya Manajemen Risiko

Tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:

1. Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan

2. Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko
3. Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko

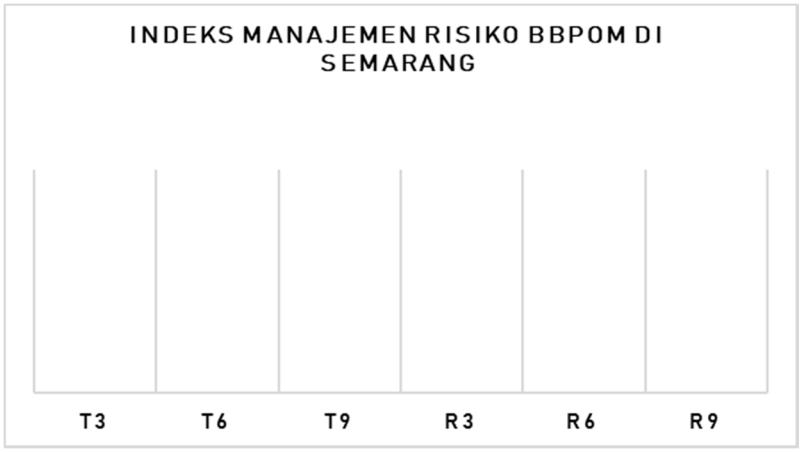
Indeks maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manejemen risiko.

- **Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW III Tahun 2025**

NO	IKU	Target TW III	Realisasi	Capaian (%)
28	Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Semarang			

Pada Triwulan III Tahun 2025, indikator **Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Semarang** belum memiliki realisasi capaian karena penilaian terhadap indikator ini dilaksanakan secara tahunan. Target tahun 2025 ditetapkan sebesar **3,6**, dan pelaksanaan pengukuran akan dilakukan pada akhir tahun berdasarkan hasil evaluasi maturitas manajemen risiko. Meski demikian, berbagai kegiatan pendukung telah dilaksanakan pada periode pelaporan untuk memastikan pencapaian target tahunan berjalan sesuai rencana.

- **Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW Sebelumnya Tahun 2025**



Tidak terdapat perbandingan kinerja antara Triwulan III dengan Triwulan sebelumnya karena indikator ini tidak memiliki target dan realisasi triwulanan. Namun, pada periode sebelumnya telah dilaksanakan penyusunan laporan manajemen risiko semester I dan pemutakhiran *risk register*, yang menjadi dasar untuk penyusunan laporan semester II pada Triwulan III ini. Dengan demikian, capaian kinerja bersifat berkelanjutan secara proses, meskipun hasil akhirnya baru dapat dinilai pada akhir tahun.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan Target Tahun 2025**

NO	IKU	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi
28	Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Semarang	3,60	Tahunan	Tahunan	Tahunan

Karena indikator ini merupakan indikator tahunan, realisasi Triwulan III belum dapat dibandingkan secara kuantitatif dengan target tahun 2025 sebesar 3,6. Namun secara kualitatif, pelaksanaan kegiatan pendukung seperti penyampaian Laporan Manajemen Risiko Semester II Tahun 2025 pada tanggal 18 Juli 2025 melalui *sapaapip.pom.go.id* menunjukkan progres yang positif menuju pencapaian target tahunan tersebut.

- **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja**

Capaian sementara menunjukkan kesiapan BBPOM di Semarang dalam mengelola risiko secara sistematis dan terdokumentasi. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan *Refreshment Implementasi Manajemen Risiko* pada tanggal 17 Juli 2025 yang meningkatkan pemahaman dan kesadaran risiko pada unit kerja BBPOM di Semarang. Tidak terdapat kendala berarti dalam pelaksanaan kegiatan, menunjukkan efektivitas koordinasi antar bidang dalam menjaga kualitas pengelolaan risiko.

- **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Untuk memperkuat capaian indikator ini, langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan antara lain meningkatkan pemantauan risiko melalui rapat evaluasi berkala, memperbaiki dokumentasi RTP (*Rencana Tindak Pengendalian*) agar lebih terukur, serta melakukan penilaian mandiri maturitas manajemen risiko dengan melengkapi *Kertas Kerja Evaluasi* dan data dukung yang relevan. Selain itu, pembinaan internal terus dilakukan agar setiap kelompok substansi memahami perannya dalam mitigasi risiko kelembagaan.

- **Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja**

Indikator	Pagu Anggaran(Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian IKU (%)	Tingkat Efisiensi
Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Semarang	240,000,000	35,647,004	14.85		-

Pelaksanaan kegiatan pendukung dilakukan secara efisien dengan memanfaatkan fasilitas daring seperti *sapaapip.pom.go.id* dan sistem komunikasi internal BPOM. Kegiatan pelatihan serta refreshment dilaksanakan secara terencana dengan memanfaatkan narasumber internal, sehingga biaya operasional dapat ditekan tanpa mengurangi kualitas hasil.

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Beberapa kegiatan yang menunjang pencapaian indikator ini meliputi penyusunan dan pembaruan *risk register*, penyampaian laporan manajemen risiko semesteran, serta pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas SDM dalam implementasi manajemen risiko. Selain itu, kegiatan monitoring dan evaluasi rutin atas risiko kelembagaan turut mendukung peningkatan efektivitas pengendalian risiko.

- **Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

Laporan manajemen risiko digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan keputusan dalam penyusunan kebijakan serta perencanaan program kerja di BBPOM di Semarang. Hasil analisis risiko membantu unit kerja dalam menentukan prioritas mitigasi, mengantisipasi potensi kendala pelaksanaan kegiatan, serta memperkuat penerapan prinsip *good governance* di lingkungan BBPOM di Semarang.

3.2 TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI LAKIP 2024

3.3 REALISASI ANGGARAN

Hingga akhir Triwulan III Tahun 2025, pelaksanaan anggaran pada Balai Besar POM di Semarang menunjukkan tren realisasi yang cukup progresif. Capaian realisasi kumulatif tercatat sebesar Rp 22.684.504.875,-, atau sekitar 42,25% atau 72,18% dari total Pagu Anggaran – Blokir. Rincian realisasi tersebut terbagi menurut jenis belanja sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

Sumber: OMSPAN

Realisasi Anggaran Triwulan III 2025

Balai Besar POM di Semarang

Per Jenis Belanja	Target Penyerapan Anggaran	Realisasi	Presentase
Belanja Pegawai	7.753.723.900	9.118.531.354	118%
Belanja Barang	10.169.747.900	10.867.514.521	106.86%
Belanja Modal	2.312.925.000	2.698.459.000	116.67%

Secara keseluruhan penyerapan anggaran Balai Besar POM di Semarang hingga akhir Triwulan III tetap berada dalam batas *threshold* atau ambang batas toleransi penyerapan yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran pada Triwulan II telah dilaksanakan dengan baik dan efisien, dengan tetap menjaga keseimbangan antara capaian kinerja dan optimalisasi penggunaan anggaran. Berikut untuk target penyerapan anggaran beserta *theshold* tahun 2025.

a. Indikator Penyerapan Anggaran

Pemberian ambang batas toleransi (*threshold*) realisasi pada belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal sebagai berikut:

Jenis Belanja	Keterangan	TW I	TW II	TW III	TW IV
Belanja Pegawai (51)	Target Penyerapan Belanja Pegawai (51) sesuai PER-5/PB/2024	20%	50%	75%	95%
	Threshold (Batas Toleransi)	5%	10%	10%	0%
Belanja Barang (52)	Target Penyerapan Belanja Barang (52) sesuai PER-5/PB/2024	15%	50%	70%	90%
	Threshold (Batas Toleransi)	5%	10%	5%	0%
Belanja Modal (53)	Target Penyerapan Belanja Modal (53) sesuai PER-5/PB/2024	10%	40%	70%	90%
	Threshold (Batas Toleransi)	5%	20%	10%	0%

3.4 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN

Efisiensi pelaksanaan anggaran diukur dengan membandingkan capaian output terhadap penggunaan sumber daya (input), khususnya realisasi anggaran. Indeks efisiensi dihitung dengan rumus:

$$IE = \frac{\%\ \text{Capaian Output}}{\%\ \text{Capaian Input}}$$

No	Indikator	Output	Input	IE	TE	Capaian TE	Kriteria
		%	%				
a	b	c	d	e	f	g	H
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	109,29	79,98	1,37	0,37	95%	**Efisien**
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO		12,78	0,00	-1,00		
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	103,78	81	1,28	0,28	95%	**Efisien**
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	73,84	1,35	0,35	95%	**Efisien**
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	103,92	81	1,28	0,28	95%	**Efisien**
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	118,09	0				
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	104,07	80,84	1,29	0,29	95%	**Efisien**
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	107,11	80,84	1,32	0,32	95%	**Efisien**

No	Indikator	Output	Input	IE	TE	Capaian TE	Kriteria
		%	%				
9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	102,37	50,14	2,04	1,04	86%	**Tidak Efisien**
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,48	50,14	2,00	1,00	86%	**Tidak Efisien**
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	106,47	31,71	3,36	2,36	75%	**Tidak Efisien**
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	109,89	79,98	1,37	0,37	95%	**Tidak Efisien**
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT		73,84	0,00	-1,00		**Tidak Efisien**
14	Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	102,9	64,76	1,59	0,59	92% (efisien)	**Tidak Efisien**
15	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		81	0,00	-1,00		**Tidak Efisien**
16	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	107,3	71,57	1,50	0,50	92%	**Tidak Efisien**
17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	101,84	13,14	7,75	6,75	75%	**Tidak Efisien**
18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	110	7,88	13,96	12,96	75%	**Tidak Efisien**

No	Indikator	Output	Input	IE	TE	Capaian TE	Kriteria
		%	%				
19	Jumlah desa pangan aman	133,33	14,04	9,50	8,50	75%	**Tidak Efisien**
20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100	29,81	3,35	2,35	75%	**Tidak Efisien**
21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik da0tau IP CPPOB pangan olahan	104,92	14,23	7,37	6,37	75%	**Tidak Efisien**
22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	101,43	83,06	1,22	0,22	95%	**Efisien**
23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	100	0			-	
24	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Semarang	-	12,79			-	
25	Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Semarang	-	1,52			-	
26	Nilai AKIP BBPOM di Semarang	-	14,85			-	
27	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang	-	15,85			-	
28	Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Semarang					-	
Rata-Rata/Jumlah/Tingkat Efisiensi		105,56	42,25	2,50	1,50	**80%**	**Tidak Efisien**

Berdasarkan data pada tabel di atas, Tingkat Efisiensi penggunaan Anggaran sampai dengan TW II adalah sebagai berikut :

- 7 indikator memiliki nilai IE > 1 dan TE < 1 → Dikategorikan Efisien
- 13 indikator memiliki nilai IE tinggi tetapi TE ≥ 1 atau capaian TE < target → Dikategorikan Tidak Efisien

Tingkat Efisiensi diukur berdasarkan KRO pada triwulan III adalah sebagai berikut :

Kode	Kegiatan/KRO/RO	Output	Input	IE	TE	Capaian TE	Kriteria
		%	%				
a	b	c	d	e	f	g	h
063.01.DR	Program Pengawasan Obat dan Makanan	21,99 %	42,09%	0,52	-0,48	75%	Tidak Efisien
3165	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	21,99 %	30,25%	0,73	-0,27	75%	Tidak Efisien
3165.BAH	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan[Base Line]	126,27%	12,79%	9,87	8,87	75%	Tidak Efisien
3165.BDC	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE[Base Line]	19,88 %	13,16%	1,51	0,51	92%	Efisien
3165.BKB	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan[Base Line]	100,00%	5,99%	16,69	15,69	75%	Tidak Efisien
3165.BMB	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan[Base Line]	11,11 %	9,11%	1,22	0,22	95%	Efisien
3165.CAN	Perangkat pengolah data dan komunikasi[Base Line]	100,00%	99,40%	1,01	0,01	100%	Efisien
3165.PDD	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium[Base Line]	75,00 %	61,70%	1,22	0,22	95%	Efisien
3165.QCD	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan[Base Line]	100,00%	83,06%	1,20	0,20	100%	Efisien
3165.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga[Base Line]						
3165.QDB.001	Sekolah dengan pangan jajanan anak	94,60 %	7,88%	12,01	11,01	75%	Tidak Efisien

Kode	Kegiatan/KRO/RO	Output	Input	IE	TE	Capaian TE	Kriteria
		%	%				
	usia sekolah (PJAS) aman						
3165.QDB.002	Desa Pangan Aman	90,00%	14,04%	6,41	5,41	75%	Tidak Efisien
3165.QDB.003	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	100,00%	29,81%	3,35	2,35	75%	Tidak Efisien
3165.QDC	Sarana Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans[Base Line]	100,00%	12,78%	7,82	6,82	75%	Tidak Efisien
3165.QDG	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar	146,15%	14,23%	10,27	9,27	75%	Tidak Efisien
3165.QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk[Base Line]						
3165.QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa	86,98%	81,00%	1,07	0,07	100%	Efisien
3165.QIA.002	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar	81,84%	79,98%	1,02	0,02	100%	Efisien
3165.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga[Base Line]						
3165.QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa	83,42%	80,84%	1,03	0,03	100%	Efisien
3165.QIC.003	Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa	106,90%	71,57%	1,49	0,49	92%	Efisien
3165.QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa	92,84%	49,38%	1,88	0,88	88%	Efisien
3165.RAB	Alat laboratorium untuk pengujian obat	76,92%	67,42%	1,14	0,14	100%	Efisien

Kode	Kegiatan/KRO/RO	Output	Input	IE	TE	Capaian TE	Kriteria
		%	%				
	dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium[Base Line]						
6384	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	75,00 %	63,47%	1,18	0,18	100%	Efisien
6384.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]						
6384.EBA.994	Layanan Perkantoran	75,00 %	63,49%	1,18	0,18	100%	Efisien
Total							

Berdasarkan hasil pengukuran Tingkat Efisiensi (TE) pada masing-masing Kerangka Rincian Output (KRO), diketahui bahwa tingkat efisiensi pelaksanaan kegiatan masih bervariasi. Sebagian KRO sudah menunjukkan kinerja yang efisien dalam pemanfaatan anggaran. Namun beberapa KRO masih dalam kategori tidak efisien, Salah satu penyebabnya adalah perhitungan TE belum memperhitungkan pengurangan anggaran yang diblokir, sehingga hasil efisiensi menjadi tampak lebih tinggi dari kondisi sebenarnya. Ke depan, perlu dilakukan perbaikan melalui penyesuaian data dasar serta peningkatan pelaksanaan kegiatan agar efisiensi penggunaan anggaran dapat tercapai secara lebih merata di seluruh KRO.

4.1 KESIMPULAN

Capaian Kinerja diukur dari 8 Sasaran Kegiatan dengan 29 Indikator Kinerja Kegiatan yang dicapai BBPOM di Semarang pada TW III Tahun 2025 yang kesemuanya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan Evaluasi Kinerja sasaran kegiatan yang diukur pada TW III Tahun 2025, Nilai Knerja Organisasi (NKO) sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan	No	Nama Indikator	Target 2025	TW III			
					Target	Realisasi	Capaian	Capaian di Normalisasi
a	b		c	d	e	f	g	h
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,5	91,5	100	109,29	109,29
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26				
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	91	94,44	103,78	103,78
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92	92	95,61	103,92	103,92
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	86	76	89,75	118,09	110
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,75	90,75	94,44	104,07	104,07
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	91,04	107,11	107,11
		9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,75	96,75	99,89	103,25	103,25
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80,38	100,48	100,48
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91	91	96,89	106,47	106,47
		12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91	91	100	109,89	109,89
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100				
		14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	83,2	82,8	85,2	102,9	102,9
		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	3,85				

No	Sasaran Kegiatan	No	Nama Indikator	Target 2025	TW III			
					Target	Realisasi	Capaian	Capaian di Normalisasi
a	b		c	d	e	f	g	h
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	54	54	57,94	107,3	107,3
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Semarang	17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,42	86,42	88,01	101,84	101,84
		18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	20	86	94,6	110	110
		19	Jumlah desa pangan aman	6	67,5	90	133,33	110
		20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	100	100	100	100
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik da0tau IP	18,44	88,33	92,68	104,92	104,92
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di	22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	85	75	76,07	101,43	101,43
6	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan	23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	50	50	100	100
7	Layanan Publik BBPOM di Semarang yang Prima	24	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Semarang	4,7				
8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	25	Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Semarang	92,43				
		26	Nilai AKIP BBPOM di Semarang	82				
		27	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang	91,02				
		28	Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Semarang	3,6				
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)								104,83 Istimewa

Secara umum, capaian kinerja menunjukkan hasil yang **sangat baik**, dengan **Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 104,83** dan kategori **Istimewa**. Hasil ini menunjukkan bahwa BBPOM di Semarang mampu melampaui target yang telah ditetapkan melalui peningkatan efektivitas pengawasan, penguatan sistem tata kelola, serta sinergi lintas bidang dan lintas sektor dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pelayanan publik. Capaian tersebut selanjutnya dijabarkan secara lebih rinci pada masing-masing Sasaran Kegiatan berikut ini.

Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja BBPOM di Semarang

Capaian NPSK: 105,10 | Kategori: Sangat Baik (Biru)
Capaian kinerja pada sasaran ini menunjukkan hasil yang sangat baik dengan rata-rata capaian indikator sebesar 105,10 persen. Sebagian besar indikator melampaui target yang telah ditetapkan, antara lain tindak lanjut hasil pengawasan oleh stakeholder sebesar 118,09 persen, pengawasan iklan produk 106,47 persen, serta pemeriksaan sarana produksi pangan olahan

sebesar 107,11 persen. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas pengawasan lintas sektor serta meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan keamanan, mutu, dan manfaat produk. Beberapa indikator bersifat tahunan seperti pelaporan KTD/ESO, pengendalian AMR, dan pendampingan kabupaten/kota pangan aman sehingga belum dapat disimpulkan capaian kinerjanya. Secara umum, sasaran ini berkontribusi signifikan terhadap peningkatan perlindungan masyarakat dari risiko peredaran produk yang tidak memenuhi standar mutu dan keamanan.

Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

Capaian NPSK: 107,30 | Kategori: Sangat Baik (Biru)
Pelaksanaan pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi menunjukkan capaian yang sangat baik dengan persentase 107,30 persen. Hal ini menunjukkan pelaksanaan pemeriksaan dan pembinaan sarana produksi berjalan efektif serta konsisten sesuai ketentuan. Kinerja ini turut mendukung upaya peningkatan ketersediaan pangan bergizi yang aman bagi masyarakat.

Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya Efektivitas KIE di Masing-Masing Wilayah Kerja BBPOM di Semarang

Capaian NPSK: 105,46 | Kategori: Sangat Baik (Biru)
Capaian sasaran ini mencapai 105,46 persen dengan seluruh indikator utama melebihi target. Efektivitas kegiatan KIE mencapai 101,84 persen, sedangkan jumlah sekolah, desa, dan pasar pangan aman menunjukkan capaian di atas 100 persen. Hasil ini menggambarkan keberhasilan strategi komunikasi dan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran terhadap keamanan pangan dan obat, serta penguatan kolaborasi lintas sektor di daerah.

Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya Pendampingan UMKM dalam Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu

Capaian NPSK: 104,92 | Kategori: Sangat Baik (Biru)
Sasaran ini menunjukkan capaian 104,92 persen dengan indikator utama yaitu persentase UMKM yang memperoleh rekomendasi sertifikat Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) melampaui target. Hasil ini mencerminkan efektivitas kegiatan pendampingan dan bimbingan teknis dalam meningkatkan kepatuhan pelaku UMKM terhadap standar keamanan dan mutu produk.

Sasaran Kegiatan 5: Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja BBPOM di Semarang

Capaian NPSK: 101,43 | Kategori: Sangat Baik (Biru)
Capaian kinerja penyidikan terhadap pelanggaran di bidang obat dan makanan mencapai 101,43 persen. Hasil ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan penyidikan sesuai ketentuan serta peningkatan koordinasi dengan aparat penegak hukum. Upaya penindakan yang cepat dan tepat turut memperkuat fungsi pengawasan dalam menekan peredaran produk ilegal.

Sasaran Kegiatan 6: Terlaksananya Kegiatan Pemantauan Siber dan Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif

Capaian NPSK: 100,00 | Kategori: Sangat Baik (Biru)
Pemantauan siber terlaksana secara optimal dengan capaian 100 persen. Seluruh laporan analisis kejahatan terselesaikan sesuai standar dan tepat waktu. Hal ini menunjukkan kesiapan serta keandalan sistem deteksi dini dalam mengidentifikasi potensi pelanggaran di ranah digital.

Sasaran Kegiatan 7: Layanan Publik BBPOM di Semarang yang Prima

Capaian NPSK: - | Kategori: Tidak Dapat Disimpulkan (Abu-abu)
Indeks Pelayanan Publik bersifat tahunan sehingga belum dapat diukur pada Triwulan III. Meskipun demikian, kegiatan pelayanan publik tetap berjalan baik dengan penerapan digitalisasi layanan, sistem antrean online, serta peningkatan mekanisme pengaduan masyarakat sebagai bagian dari komitmen BBPOM di Semarang terhadap pelayanan prima.

Sasaran Kegiatan 8: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Unit Organisasi yang Optimal

Capaian NPSK: - | Kategori: Tidak Dapat Disimpulkan (Abu-abu)
Beberapa indikator seperti Nilai Pembangunan Zona Integritas, Nilai AKIP, Nilai Kinerja Anggaran, dan Indeks Manajemen Risiko belum terealisasi karena merupakan target tahunan. Namun demikian, kegiatan penguatan tata kelola, monitoring kinerja, dan penyusunan laporan telah dilaksanakan sesuai jadwal, termasuk pelaksanaan Desk SAKIP dan evaluasi pelaporan internal.

4.2 SARAN

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Konsistensi dalam penyusunan POA setiap triwulan dan saat revisi anggaran serta melakukan monitoring penggunaan anggaran dan capaian output dengan menyusun Perencanaan Operasional Anggaran (POA) secara konsisten setiap triwulan dan pada saat revisi anggaran, dengan memastikan kesesuaian antara perencanaan dan kebutuhan riil di lapangan.
2. Monitoring Capaian Kinerja secara berkala dengan menindaklanjuti seluruh Hasil evaluasi SAKIP untuk capaian serta indikator kinerja yang tidak memenuhi target dengan menindaklanjuti secara serius seluruh temuan atau rekomendasi dari hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
3. Melakukan optimalisasi kinerja supaya semua target IKU tercapai dengan menyusun strategi pencapaian target IKU yang spesifik dan dapat diukur untuk masing-masing unit kerja dan mendorong kerja kolaboratif antar-substansi/unit, terutama untuk IKU yang memerlukan sinergi lintas bidang (misalnya capaian pengawasan, pelayanan publik, atau ZI).

LAMPIRAN



LAYANAN BALAI BESAR POM DI SEMARANG

Informasi 081225694252 | Sertifikasi 081227701941

Pengujian 081326759688 | Kantor 024 - 7612324

RINGKASAN EKSEKUTIF

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Balai Besar POM di Semarang dapat melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan dengan baik hingga Triwulan III Tahun 2025. Laporan Kinerja Interim ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan program, kegiatan, serta capaian indikator kinerja utama (IKU) yang mendukung sasaran strategis organisasi sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Secara umum, capaian kinerja menunjukkan hasil yang **sangat baik**, dengan **Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 104,83** dan kategori **Istimewa**. Hasil ini menunjukkan bahwa BBPOM di Semarang mampu melampaui target yang telah ditetapkan melalui peningkatan efektivitas pengawasan, penguatan sistem tata kelola, serta sinergi lintas bidang dan lintas sektor dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pelayanan publik. Capaian tersebut selanjutnya dijabarkan secara lebih rinci pada masing-masing Sasaran Kegiatan berikut ini.

Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja BBPOM di Semarang

Capaian NPSK: 105,10 | Kategori: Sangat Baik (Biru)
Capaian kinerja pada sasaran ini menunjukkan hasil yang sangat baik dengan rata-rata capaian indikator sebesar 105,10 persen. Sebagian besar indikator melampaui target yang telah ditetapkan, antara lain tindak lanjut hasil pengawasan oleh stakeholder sebesar 118,09 persen, pengawasan iklan produk 106,47 persen, serta pemeriksaan sarana produksi pangan olahan sebesar 107,11 persen. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas pengawasan lintas sektor serta meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan keamanan, mutu, dan manfaat produk. Beberapa indikator bersifat tahunan seperti pelaporan KTD/ESO, pengendalian AMR, dan pendampingan kabupaten/kota pangan aman sehingga belum dapat disimpulkan capaian kinerjanya. Secara umum, sasaran ini berkontribusi signifikan terhadap peningkatan perlindungan masyarakat dari risiko peredaran produk yang tidak memenuhi standar mutu dan keamanan.

Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

Capaian NPSK: 107,30 | Kategori: Sangat Baik (Biru)
Pelaksanaan pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi menunjukkan capaian yang sangat baik dengan persentase 107,30 persen. Hal ini menunjukkan pelaksanaan pemeriksaan dan pembinaan sarana produksi berjalan efektif serta konsisten sesuai ketentuan. Kinerja ini turut mendukung upaya peningkatan ketersediaan pangan bergizi yang aman bagi masyarakat.

Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya Efektivitas KIE di Masing-Masing Wilayah Kerja BBPOM di Semarang

Capaian NPSK: 105,46 | Kategori: Sangat Baik (Biru)
Capaian sasaran ini mencapai 105,46 persen dengan seluruh indikator utama melebihi target. Efektivitas kegiatan KIE mencapai 101,84 persen, sedangkan jumlah sekolah, desa, dan pasar pangan aman menunjukkan capaian di atas 100 persen. Hasil ini menggambarkan keberhasilan strategi komunikasi dan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran terhadap keamanan pangan dan obat, serta penguatan kolaborasi lintas sektor di daerah.

Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya Pendampingan UMKM dalam Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu

Capaian NPSK: 104,92 | Kategori: Sangat Baik (Biru)
Sasaran ini menunjukkan capaian 104,92 persen dengan indikator utama yaitu persentase UMKM yang memperoleh rekomendasi sertifikat Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) melampaui target. Hasil ini mencerminkan efektivitas kegiatan pendampingan dan bimbingan teknis dalam meningkatkan kepatuhan pelaku UMKM terhadap standar keamanan dan mutu produk.

Sasaran Kegiatan 5: Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja BBPOM di Semarang

Capaian NPSK: 101,43 | Kategori: Sangat Baik (Biru)
Capaian kinerja penyidikan terhadap pelanggaran di bidang obat dan makanan mencapai 101,43 persen. Hasil ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan penyidikan sesuai ketentuan serta peningkatan koordinasi dengan aparat penegak hukum. Upaya penindakan yang cepat dan tepat turut memperkuat fungsi pengawasan dalam menekan peredaran produk ilegal.

Sasaran Kegiatan 6: Terlaksananya Kegiatan Pemantauan Siber dan Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif

Capaian NPSK: 100,00 | Kategori: Sangat Baik (Biru)
Pemantauan siber terlaksana secara optimal dengan capaian 100 persen. Seluruh laporan analisis kejahatan terselesaikan sesuai standar dan tepat waktu. Hal ini menunjukkan kesiapan serta keandalan sistem deteksi dini dalam mengidentifikasi potensi pelanggaran di ranah digital.

Sasaran Kegiatan 7: Layanan Publik BBPOM di Semarang yang Prima

Capaian NPSK: - | Kategori: Tidak Dapat Disimpulkan (Abu-abu)
Indeks Pelayanan Publik bersifat tahunan sehingga belum dapat diukur pada Triwulan III. Meskipun demikian, kegiatan pelayanan publik tetap berjalan baik dengan penerapan digitalisasi layanan, sistem antrean online, serta peningkatan mekanisme pengaduan masyarakat sebagai bagian dari komitmen BBPOM di Semarang terhadap pelayanan prima.

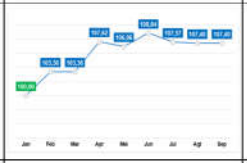
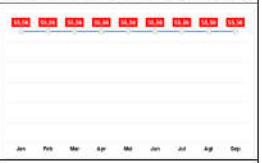
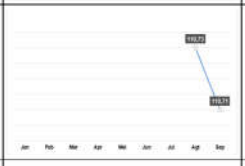
Sasaran Kegiatan 8: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Unit Organisasi yang Optimal

Capaian NPSK: - | Kategori: Tidak Dapat Disimpulkan (Abu-abu)
Beberapa indikator seperti Nilai Pembangunan Zona Integritas, Nilai AKIP, Nilai Kinerja Anggaran, dan Indeks Manajemen Risiko belum terealisasi karena merupakan target tahunan. Namun demikian, kegiatan penguatan tata kelola, monitoring kinerja, dan penyusunan laporan telah dilaksanakan sesuai jadwal, termasuk pelaksanaan Desk SAKIP dan evaluasi pelaporan internal.

Secara keseluruhan, pelaksanaan kinerja BBPOM di Semarang sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 menunjukkan hasil yang **sangat baik** dengan **Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 104,83** dan kategori **Istimewa**. Seluruh sasaran kegiatan operasional utama berhasil melampaui target, menunjukkan efektivitas pengawasan, pembinaan, dan pelayanan publik. Meskipun beberapa indikator tahunan belum dapat disimpulkan, capaian hingga TW III menegaskan konsistensi dan komitmen BBPOM di Semarang dalam mewujudkan sistem pengawasan obat dan makanan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi hasil.

Tabel 1 Ketercapaian Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

NO	IKU	Ketercapaian Target 2025	NO	IKU	Ketercapaian Target 2025
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Target Tahunan
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Target Tahunan	16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	

NO	IKU	Ketercapaian Target 2025	NO	IKU	Ketercapaian Target 2025
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar		18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		19	Jumlah desa pangan aman	
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder		20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Semarang	
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		24	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Semarang	Target Tahunan
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan		25	Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Semarang	Target Tahunan
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar		26	Nilai AKIP BBPOM di Semarang	Target Tahunan
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Target Tahunan	27	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang	Target Tahunan
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		28	Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Semarang	Target Tahunan

Berdasarkan hasil pemantauan hingga Triwulan III Tahun 2025, sebagian besar indikator kinerja menunjukkan capaian yang on the track, dengan nilai realisasi mendekati atau bahkan melampaui target tahunan. Kinerja bidang pengawasan tercatat sangat baik, di mana sebagian besar indikator melampaui 100% dari target, mencerminkan efektivitas pelaksanaan pengawasan dan meningkatnya kepatuhan pelaku usaha. Indikator seperti tindak lanjut sampel berisiko, keputusan hasil pengawasan, serta pemeriksaan sarana produksi dan distribusi menunjukkan capaian konsisten di atas target. Selain itu, indikator bidang KIE dan pendampingan UMKM juga menunjukkan tren positif, menandakan meningkatnya sinergi lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat.

Pada bidang penindakan dan deteksi kejahatan, Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Persentase Laporan Analisis Kejahatan diproyeksikan tercapai sesuai target, dengan capaian stabil satu laporan per bulan dan estimasi 14 laporan hingga akhir tahun. Sementara itu, terdapat delapan indikator kinerja utama (IKU) yang belum dapat diketahui proyeksinya karena bersifat tahunan, sehingga realisasi kinerjanya baru dapat dievaluasi secara komprehensif pada akhir tahun 2025.

Selama periode Triwulan III, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), yang disebabkan oleh adanya Efisiensi Anggaran dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Revisi tersebut sebagai berikut

1. Revisi 01 DIPA pada Sekretaris Utama Badan POM, tanggal 10 Februari 2025, berupa Pemblokiran Mandiri Dalam Rangka Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA 2025.
2. Revisi 02 DIPA pada Sekretaris Utama Badan POM, tanggal 10 Februari 2025, tanggal 19 Februari 2025, berupa Penyesuaian Besaran Anggaran Hasil Rekonstruksi Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA.2025.
3. Revisi 03 DIPA pada Sekretaris Utama Badan POM, tanggal 21 Maret 2025, berupa Revisi Optimalisasi Anggaran Belanja Modal untuk Pemenuhan Honorarium PPNPN TA.2025.
4. Revisi 04 DIPA pada Sekretaris Utama Badan POM, tanggal 09 April 2025, berupa Revisi Relaksasi Pemanfaatan Blokir Anggaran TA.2025.
5. Revisi 05 DIPA tgl 14 April 2025 berupa Pemutakhiran data hasil revisi POK
6. Revisi 06 DIPA tgl 21 April 2025 berupa Pemutakhiran data hasil revisi POK dan Revisi Halaman III DIPA.
7. Revisi 07 DIPA tgl 15 Mei 2025 berupa Pemutakhiran data hasil revisi POK

8. Revisi 08 DIPA tgl 30 Juni 2025

Setelah mengalami revisi tersebut di atas, pada akhir triwulan III tahun 2025, DIPA BBPOM di Semarang masih sebesar Rp. 31.429.448.000,- (Pagu awal 53.693.128.000 – Blokir 22.263.680.000,-)

Realisasi s.d 30 September 2025 yaitu sebesar Rp. 22.684.504.875,- (Dua puluh dua miliar enam ratus delapan puluh empat juta lima ratus empat ribu delapan ratus tujuh puluh lima.) sebesar 72,18% dari Pagu – Blokir atau 42.25% dari Pagu awal. Penyerapan anggaran masih berada dalam batas toleransi yang ditetapkan, menandakan pengelolaan anggaran yang efisien dan seimbang antara output dan penggunaan dana.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang Triwulan III Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan tepat waktu.

Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja serta pencapaian visi dan misi Balai Besar POM di Semarang selama Triwulan III Tahun 2025. Penyusunan laporan ini mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang *Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)* serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang *Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja*.

Laporan ini bertujuan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja, sehingga dapat menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Balai Besar POM di Semarang. Di dalamnya disajikan capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan, serta perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan selama Triwulan III Tahun 2025. Hasil laporan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi yang konstruktif dalam upaya peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Pada periode pelaporan ini, Balai Besar POM di Semarang juga menampilkan inovasi unggulan, yaitu *PIJAR MENTARI* dan *GUMREGAH PLUS*. PIJAR MENTARI (Pendampingan Izin Edar Menuju UMKM Pintar dan Mandiri) merupakan program pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memperoleh izin edar produk secara lebih mudah, cepat, dan terstruktur. GUMREGAH PLUS merupakan pengembangan dari program sebelumnya yang berfokus pada pembinaan UMKM agar senantiasa menggunakan bahan pangan yang aman serta bebas dari bahan berbahaya seperti formalin, rhodamin B, dan *methanyl yellow.*

Melalui Laporan Kinerja Interim Triwulan III Tahun 2025 ini, diharapkan dapat tersaji informasi yang bermanfaat mengenai hasil kerja yang telah dicapai,

serta menjadi dasar dalam penyusunan strategi perbaikan dan peningkatan kinerja pada triwulan selanjutnya. Semoga laporan ini dapat menjadi langkah nyata dalam mewujudkan peran Balai Besar POM di Semarang sebagai institusi pengawas obat dan makanan yang profesional, berintegritas, dan terpercaya di wilayah kerja Jawa Tengah.

Semarang, 20 Oktober 2025

Kepala BBPOM di Semarang



Dra. Rustyawati, Apt, M.Kes.(Epid)

DAFTAR ISI

Contents

RINGKASAN EKSEKUTIF i
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Gambaran Umum Organisasi 1
1.3 Struktur Organisasi 3
1.4 Isu Strategis BBPOM di Semarang Tahun 2025 5
1.1.1. Analisis Lingkungan Strategis 7
1.1.1.1. Internal 7
1.1.1.2. Eksternal 9
1.1.1.2.1. Isu Strategis 10
Bab II PERENCANAAN KINERJA 19
2.1 Rancangan Rencana Strategis 2025-2029 19
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2025 19
2.3 Perjanjian Kinerja 2025 20
2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) 23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 38
3.1 CAPAIAN KINERJA TRIWULAN (TW) III 38
SK 1. Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang 42
SK 2. Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi 100
SK 3. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Semarang 104
SK 4. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu 118

SK 5. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Semarang 123

SK 6. Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif 126

SK 7. Layanan Publik BBPOM di Semarang yang Prima 130

SK 8. Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal 135

3.2 TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI LAKIP 2024 156

3.3 REALISASI ANGGARAN 187

3.4 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN 189

BAB IV Penutup 192

4.1 KESIMPULAN 192

4.2 SARAN 195

LAMPIRAN 197

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Ketercapaian Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 iii
Tabel 2 Analisis Beban Kerja BBPOM di Semarang 8
Tabel 3 Rencana Kinerja Tahun 2025 19
Tabel 4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 20
Tabel 5 Perjanjian Kinerja 2025 Revisi I 22
Tabel 6 RAPK BBPOM di Semarang 2025 24
Tabel 7 Hasil Reviu Rorenkeu Revisi ke-1 RAPK 2025 25
Tabel 8 RAPK BBPOM di Semarang 2025 (Revisi I) 27
Tabel 9 RAPK BBPOM di Semarang 2025 (Revisi II) 30
Tabel 10 Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja 34
Tabel 11 Nilai Kinerja Organisasi (NKO) baik periodik maupun tahunan 35
Tabel 12 Kategori Ketercapaian Target Akhir Tahun 35
Tabel 13 Range Tingkat Efisiensi 37
Tabel 14 Perbandingan Realisasi TW III dengan Target Tahun 2025 38
Tabel 15 Data Capaian Nilai Kinerja TW III BBPOM di Semarang 40
Tabel 16 Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan Ke 1 42
Tabel 17 Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW III IKU 1 . 45
Tabel 18 Ketercapaian Realisasi TW III terhadap Target 2025 IKU 1 46
Tabel 19 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya IKU 1 47
Tabel 20 Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW III IKU 2 . 49
Tabel 21 Ketercapaian Realisasi TW III terhadap Target 2025 IKU 2 50
Tabel 22 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya IKU 2 51
Tabel 23 Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW III IKU 3 . 53
Tabel 24 Ketercapaian Realisasi TW III terhadap Target 2025 IKU 3 53
Tabel 25 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya IKU 3 54
Tabel 26 Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW III IKU 4 . 56
Tabel 27 Ketercapaian Realisasi TW III terhadap Target 2025 IKU 4 57
Tabel 28 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya IKU 4 58
Tabel 29 Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW III IKU 5 . 60
Tabel 30 Ketercapaian Realisasi TW III terhadap Target 2025 IKU 5 60
Tabel 31 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya IKU 5 61
Tabel 32 Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW III IKU 6 . 62
Tabel 33 Ketercapaian Realisasi TW III terhadap Target 2025 IKU 6 63
Tabel 34 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya IKU 6 64
Tabel 35 Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW III IKU 7 . 67
Tabel 36 Ketercapaian Realisasi TW III terhadap Target 2025 IKU 7 68
Tabel 37 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya IKU 7 69
Tabel 38 Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW III IKU 8 . 70
Tabel 39 Ketercapaian Realisasi TW III terhadap Target 2025 IKU 8 71
Tabel 40 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya IKU 8 72
Tabel 41 Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW III IKU 9 . 73
Tabel 42 Ketercapaian Realisasi TW III terhadap Target 2025 IKU 9 74
Tabel 43 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya IKU 9 75
Tabel 44 Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW III IKU 10 76
Tabel 45 Ketercapaian Realisasi TW III terhadap Target 2025 IKU 10 77
Tabel 46 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya IKU 10 78
Tabel 47 Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW III IKU 11 80

Tabel 48 Ketercapaian Realisasi TW III terhadap Target 2025 IKU 11 81
Tabel 49 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya IKU 11 82
Tabel 50 Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW III IKU 12 85
Tabel 51 Ketercapaian Realisasi TW III terhadap Target 2025 IKU 12 86
Tabel 52 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya IKU 12 87
Tabel 53 Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW III IKU 13 89
Tabel 54 Ketercapaian Realisasi TW III terhadap Target 2025 IKU 13 90
Tabel 55 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya IKU 13 91
Tabel 56 Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW III IKU 14 93
Tabel 57 Ketercapaian Realisasi TW III terhadap Target 2025 IKU 14 94
Tabel 58 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya IKU 14 95
Tabel 59 Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW III IKU 15 97
Tabel 60 Ketercapaian Realisasi TW III terhadap Target 2025 IKU 15 98
Tabel 61 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya IKU 15 99
Tabel 62 Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan Ke 2 100
Tabel 63 Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW III IKU 16 101
Tabel 64 Ketercapaian Realisasi TW III terhadap Target 2025 IKU 16 102
Tabel 65 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya IKU 16 103
Tabel 66 Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan Ke 3 104
Tabel 67 Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW III IKU 17 105
Tabel 68 Ketercapaian Realisasi TW III terhadap Target 2025 IKU 17 106
Tabel 69 Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW III IKU 18 109
Tabel 70 Ketercapaian Realisasi TW III terhadap Target 2025 IKU 18 110
Tabel 71 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya IKU 18 110
Tabel 72 Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW III IKU 19 112
Tabel 73 Ketercapaian Realisasi TW III terhadap Target 2025 IKU 19 113
Tabel 74 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya IKU 19 114
Tabel 75 Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW III IKU 20 116
Tabel 76 Ketercapaian Realisasi TW III terhadap Target 2025 IKU 20 117
Tabel 77 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya IKU 20 118
Tabel 78 Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan Ke 4 118
Tabel 79 Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW III IKU 21 120
Tabel 80 Ketercapaian Realisasi TW III terhadap Target 2025 IKU 21 121
Tabel 81 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya IKU 21 122
Tabel 82 Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan Ke 5 123
Tabel 83 Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW III IKU 22 124
Tabel 84 Ketercapaian Realisasi TW III terhadap Target 2025 IKU 22 125
Tabel 85 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya IKU 22 126
Tabel 86 Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan Ke 6 126
Tabel 87 Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW III IKU 23 127
Tabel 88 Ketercapaian Realisasi TW III terhadap Target 2025 IKU 23 128
Tabel 89 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya IKU 23 129

Tabel 90 Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan Ke 7 130
Tabel 91 Kategori Indeks Pelayanan Publik 132
Tabel 92 Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW III IKU 24 132
Tabel 93 Ketercapaian Realisasi TW III terhadap Target 2025 IKU 24 133
Tabel 94 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya IKU 24 135
Tabel 95 Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan Ke 8 136
Tabel 96 Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW III IKU 25 138
Tabel 97 Ketercapaian Realisasi TW III terhadap Target 2025 IKU 25 139
Tabel 98 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya IKU 25 140
Tabel 99 Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW III IKU 26 144
Tabel 100 Ketercapaian Realisasi TW III terhadap Target 2025 IKU 26 145
Tabel 101 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya IKU 26 146
Tabel 102 Kategori Konversi Nilai Kinerja Anggaran 147
Tabel 103 Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW III IKU 27 149
Tabel 104 Ketercapaian Realisasi TW III terhadap Target 2025 IKU 27 151
Tabel 105 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya IKU 27 152
Tabel 106 Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW III IKU 28 153
Tabel 107 Ketercapaian Realisasi TW III terhadap Target 2025 IKU 28 154
Tabel 108 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya IKU 28 155

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Fungdi BBPOM di Semarang 2
Gambar 2 Struktur Organisasi BBPOM di Semarang 4
Gambar 3 Profil SDM BBPOM di Semarang 7
Gambar 4 Peta Wilayah Kerja BBPOM di Semarang 9
Gambar 5 Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW Sebelumnya IKU 2 49
Gambar 6 Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW Sebelumnya IKU 3 53
Gambar 7 Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW Sebelumnya IKU 4 57
Gambar 8 Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW Sebelumnya IKU 5 60
Gambar 9 Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW Sebelumnya IKU 6 63
Gambar 10 Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW Sebelumnya IKU 7 67
Gambar 11 Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW Sebelumnya IKU 8 71
Gambar 12 Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW Sebelumnya IKU 9 74
Gambar 13 Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW Sebelumnya IKU 10 77
Gambar 14 Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW Sebelumnya IKU 11 81
Gambar 15 Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW Sebelumnya IKU 12 85
Gambar 16 Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW Sebelumnya IKU 13 89
Gambar 17 Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW Sebelumnya IKU 14 94
Gambar 18 Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW Sebelumnya IKU 15 98
Gambar 19 Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW Sebelumnya IKU 16 102
Gambar 20 Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW Sebelumnya IKU 17 106
Gambar 21 Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW Sebelumnya IKU 18 109
Gambar 22 Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW Sebelumnya IKU 19 112
Gambar 23 Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW Sebelumnya IKU 20 116
Gambar 24 Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW Sebelumnya IKU 21 121
Gambar 25 Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW Sebelumnya IKU 22 124
Gambar 26 Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW Sebelumnya IKU 23 128

Gambar 27 Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW Sebelumnya IKU 24 133
Gambar 28 Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW Sebelumnya IKU 25 138
Gambar 29 Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW Sebelumnya IKU 26 145
Gambar 30 Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang TW III 148
Gambar 31 Indikator Pelaksanaan Anggaran BBPOM di Semarang TW III 148
Gambar 32 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBPOM di Semarang TW III 149
Gambar 33 Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW Sebelumnya IKU 27 150
Gambar 34 Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW Sebelumnya IKU 28 154

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Rencana Kinerja Tahun 2025 ..... - 1 -
Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ..... - 2 -
Lampiran 3 Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ..... - 3 -
Lampiran 4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ..... - 4 -
Lampiran 5 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Revisi ke 1) ..... - 5 -
Lampiran 6 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Revisi ke 2) ..... - 6 -
Lampiran 7 Capaian Kinerja TW III ..... - 7 -
Lampiran 8 Kendala dan Tindak Lanjut ..... - 8 -

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tahun 2025 menjadi awal pelaksanaan *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional* (RPJMN) 2025–2029 yang merupakan tahap penting menuju terwujudnya visi *Indonesia Emas 2045*. RPJMN ini menekankan pentingnya transformasi di berbagai sektor pembangunan, antara lain penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pembangunan kesehatan masyarakat sebagai fondasi utama pembangunan nasional. Salah satu prioritas nasional yang diamanatkan adalah peningkatan kualitas kesehatan dan perlindungan masyarakat melalui penguatan sistem pengawasan obat dan makanan.

Dalam konteks tersebut, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memegang peran strategis sebagai lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab menyelenggarakan pengawasan terhadap obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. BPOM memiliki mandat untuk memastikan seluruh produk yang beredar di Indonesia memenuhi standar keamanan, mutu, dan manfaat, serta melindungi masyarakat dari potensi risiko kesehatan akibat produk yang tidak sesuai ketentuan.

Sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam RPJMN 2025–2029, pada tahun 2025 BPOM memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsinya melalui berbagai langkah strategis, antara lain penyusunan dan implementasi kebijakan pengawasan obat dan makanan, penetapan norma serta standar pengawasan, pelaksanaan pengawasan pra dan pasca peredaran produk, hingga penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang pengawasan obat dan makanan. Selain itu, BPOM juga berupaya meningkatkan efektivitas pengelolaan dana operasional pengawasan melalui penerapan regulasi baru yang menekankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program prioritas.

Dengan demikian, pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Semarang pada Triwulan I Tahun 2025 tidak hanya menjadi bagian dari upaya perlindungan kesehatan masyarakat, tetapi juga merupakan kontribusi nyata dalam mendukung pencapaian sasaran strategis RPJMN 2025–2029, khususnya dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan



Gambar 1 Fungdi BBPOM di Semarang

Makanan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kriteria Klarifikasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. BBPOM di Semarang merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri dalam melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan, berkedudukan di Jalan Sukun Raya No. 41 A Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah, Telp : (024) 7613761, 7613768, 7612328, 7612324 (ULPK), Fax (024) 7613633, Email likpomsm@yahoo.com, website www.pom.go.id

BBPOM di Semarang dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan POM, yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

Dalam menjalankan fungsinya, BBPOM di Semarang mengacu pada Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dimana fungsi yang dijalankan meliputi:

Sesuai dengan Peraturan Badan POM Nomor 19 tahun 2023 tentang Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan, terdapat 3 Unit Pelaksana Teknis (UPT) di wilayah Provinsi Jawa Tengah, yaitu

1. Balai Besar POM di Semarang dengan cakupan Kota Semarang, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Demak, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Klaten, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kendal, Kabupaten Magelang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Batang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Kudus, Kabupaten Blora, Kota Magelang, Kota Pekalongan, Kota Salatiga, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang
2. Balai POM di Surakarta dengan cakupan Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri
3. Balai POM di Banyumas dengan cakupan Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga

Dalam melaksanakan tugasnya, BBPOM di Semarang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik internal maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

1.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi dan Tata Kerja BBPOM di Semarang disusun berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (BBPOM di Semarang) di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Struktur organisasi BBPOM di Semarang per Januari 2024

Struktur organisasi BBPOM di Semarang terdiri atas:

a. Kepala;

b. Bagian Tata Usaha; dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 2 Struktur Organisasi BBPOM di Semarang

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai Struktur Organisasi BBPOM di Semarang adalah sebagai berikut:

1. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas antara lain:

melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
c. Pengelolaan persuratan dan kearsipan;
d. Pengelolaan tata laksana dan administrasi penjaminan mutu;
e. Pelaksanan urusan pengelolaan kepegawaian;
f. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
g. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan

h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

Susunan organisasi Bagian Tata Usaha terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri

2. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas, kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi. Tim kerja terdiri atas:

a. ketua tim; dan

b. anggota tim.

Ketua tim berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas. Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.4 Isu Strategis BBPOM di Semarang Tahun 2025

BBPOM di Semarang memberikan dukungan terhadap kinerja Badan POM dan pembangunan di Jawa Tengah, serta mendukung tugas dan fungsi instansi terkait dalam upaya perlindungan masyarakat. Dalam menjaga masyarakat dari risiko obat dan makanan yang membahayakan kesehatan, BBPOM di Semarang melaksanakan sistem pengawasan yang komprehensif mulai dari sebelum produk masuk pasar hingga kontrol pasca-pasar, yang dilengkapi dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Jawa Tengah.

Kapasitas BBPOM di Semarang sebagai unit kerja pengawas Obat dan Makanan masih perlu terus dilakukan penataan dan penguatan, baik secara kelembagaan maupun dukungan regulasi yang dibutuhkan, terutama

peraturan perundang-undangan yang menyangkut peran dan tugas agar pencapaian kinerja di masa datang semakin optimal dan dapat memastikan berjalannya proses pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif dan efisien dalam mengontrol keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

Terdapat 3 (tiga) strategi BBPOM di Semarang dalam melaksanakan peran dan kewenangannya, yaitu:

a. Penguatan sistem dalam pengawasan Obat dan Makanan
b. Peningkatan pembinaan dan bimbingan dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha Obat dan Makanan, serta peningkatan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat
c. Penguatan kapasitas kelembagaan BBPOM di Semarang

Strategi BBPOM di Semarang, antara lain:

1. Penguatan pengawasan Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko
2. Penguatan pengelolaan SDM BBPOM di Semarangberbasis sistem merit.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalampengawasan Obat dan Makanan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.
6. Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.
7. Penguatan pengujian, dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BBPOM di Semarang termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publikberbasis elektronik.
9. Penguatan pengelolaan sarana prasarana/infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

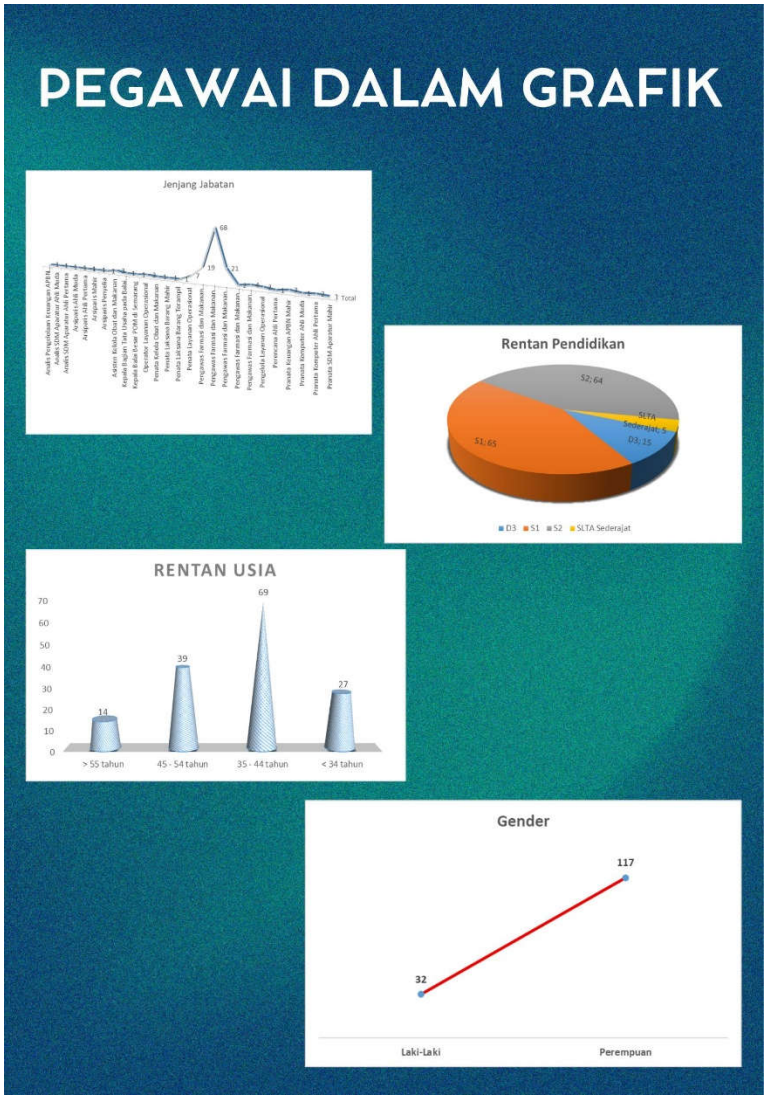
Pelaksanaan tugas dan fungsi BBPOM di Semarang dalam upaya penguatan pelaksanaan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan perlu didukung lintas sektor terkait meliputi peningkatan kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi.

Analisis Lingkungan Strategis

A Internal

BBPOM di Semarang dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan di wilayah Provinsi Jawa Tengah didukung oleh:

a. Sumber Daya Manusia (SDM)



Gambar 3 Profil SDM BBPOM di Semarang

Pada Rancangan Renstra BBPOM di Semarang 2025-2029, BBPOM di Semarang telah memetakan kebutuhan SDM berdasarkan ABK dimana untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan secara memadai dibutuhkan pegawai sebanyak 201 orang. Seiring dengan perubahan Organisasi dan Tata Kerja mengacu Peraturan BPOM nomor 22 tahun 2020 serta berbagai perubahan lingkungan strategis yang terjadi BBPOM di Semarang memandang perlu menambah jumlah SDM dengan jenis kepegawaian PPPK sehingga dapat memberikan ruang bagi SDM professional untuk menjadi bagian dalam pengawasan obat dan makanan yang lebih baik. Pada tahun 2023 BBPOM di Semarang telah mengajukan usulan kebutuhan PPPK Tahun 2024 sejumlah 10 formasi dengan sebaran jabatan antara lain Pengawas Farmasi dan Makanan, Arsiparis, Pranata Komputer, Penata Layanan Operasional dan Pengelola Layanan Operasional. Untuk saat ini jumlah SDM BBPOM di Semarang per 28 September 2025 adalah 149 orang dengan persentase 22% laki-laki serta 78% perempuan. Terkait kendala yang dihadapi dalam pengelolaan SDM BBPOM di Semarang, salah satu yang menjadi isu utama adalah upaya meningkatkan Indeks Profesonalitas ASN yang pada

tahun 2024 memperoleh angka 87,79. Penurunan nilai IP ASN BBPOM di Semarang dibandingkan tahun 2023 disebabkan terdapat perubahan cara perhitungan, utamanya pada dimensi kualifikasi yang memperhitungkan persyaratan jabatan dan dimensi kompetensi yang berdasarkan predikat kinerja dan riwayat pengembangan kompetensi. Terkait hal tersebut, BBPOM di Semarang berupaya melakukan pemetaan pegawai yang masih memiliki potensi untuk dilakukan peningkatan nilai dimensi kualifikasi melalui peningkatan Pendidikan. Saat ini BBPOM di Semarang masih memiliki 20 orang pegawai dengan Pendidikan di bawah S1, atau secara persentase 13.42 % dari keseluruhan pegawai. Disamping itu juga peningkatan nilai dimensi kompetensi dengan memberikan penugasan kepada jabatan struktural/fungsional/ pelaksana untuk mengikuti diklat kepemimpinan/diklat fungsional, diklat teknis 20 JP dan mengikuti seminar/workshop/sejenisnya.

Tabel 2 Analisis Beban Kerja BBPOM di Semarang

No	Jabatan	Jumlah SDM berdasar				Gap	
		ABK		**ABK Bezzeting**			
1	Kepala BBPOM di Semarang	1	Orang	1	Orang	0	Orang
2	Kepala Bagian Tata Usaha pada BBPOM di Semarang	1	Orang	1	Orang	0	Orang
3	Pengawas Farmasi dan Makanan	161	Orang	116	Orang	45	Orang
4	Arsiparis	7	Orang	3	Orang	4	Orang
5	Pranata Komputer	6	Orang	2	Orang	4	Orang
6	Analis Pengelolaan Keuangan APBN	3	Orang	1	Orang	2	Orang
7	Analis Anggaran	1	Orang	0	Orang	1	Orang
8	Penata Laksana Barang	4	Orang	1	Orang	3	Orang
9	Perencana	6	Orang	1	Orang	5	Orang
10	Analis SDM Aparatur	2	Orang	1	Orang	1	Orang
11	Pranata SDM Aparatur	2	Orang	1	Orang	1	Orang
12	Pranata Keuangan APBN	7	Orang	3	Orang	4	Orang
Total		**201**	**Orang**	**129**	**Orang**	**72**	**Orang**

b. Anggaran

Sumber anggaran pelaksanaan program/kegiatan BBPOM di Semarang keseluruhan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 53.902.531.000

Total pagu Anggaran Tahun 2025 : Rp. 53.902.531.000,-

Realisasi anggaran s.d 30 September 2025: Rp. 22.686.053.214,-

Persentase realisasi anggaran sebesar 42.09% dari alokasi anggaran Tahun 2025 dan sebesar 77,80% dari total pagu – blokir.

Peranan BBPOM di Semarang sebagai institusi yang memberikan jasa layanan kepada masyarakat, maka sesuai Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2010, BBPOM di Semarang mendapatkan PAGU Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2025 sebesar : Rp. 959.000.000,-.

Penerimaan PNBP berasal dari pelayanan BBPOM di Semarang kepada pihak ketiga atas permintaan untuk pengujian laboratorium, penerbitan Surat Keterangan Impor (SKI), dan Surat Keterangan Ekspor (SKE).

B Eksternal

Wilayah kerja BBPOM di Semarang, meliputi:



Gambar 4 Peta Wilayah Kerja BBPOM di Semarang

ISU STRATEGIS

Seiring perkembangan yang terjadi di Indonesia khususnya di wilayah Jawa Tengah pada tahun 2025, beberapa isu strategis yang dapat berpengaruh pada kinerja Balai Besar POM di Semarang, antara lain:

1. Sumber Daya Manusia yang dimiliki

Pengisian kekosongan atau *gap* sumber daya manusia (SDM) di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Semarang dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, antara lain melalui rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), mutasi, promosi jabatan, serta perpanjangan batas usia pensiun (BUP). Upaya tersebut bertujuan untuk memastikan ketersediaan SDM yang memadai, baik dari segi jumlah maupun kompetensi, sehingga pelaksanaan tugas pengawasan obat dan makanan dapat berjalan secara optimal.

Dengan tantangan pengawasan yang semakin kompleks dan dinamika lingkungan strategis yang terus berkembang, BBPOM di Semarang dituntut untuk senantiasa meningkatkan kompetensi SDM serta melakukan perencanaan kebutuhan SDM secara berkelanjutan. Peningkatan kapasitas ini menjadi langkah penting dalam memperkuat sistem pengawasan, khususnya dalam menghadapi berbagai modus pelanggaran di bidang obat dan makanan yang semakin beragam dan canggih.

Oleh karena itu, BBPOM di Semarang perlu melakukan penambahan jumlah SDM sesuai kebutuhan, disertai dengan penerapan strategi pengembangan pegawai yang tepat agar tidak terjadi kekosongan pada posisi-posisi strategis. Selain penguatan kompetensi teknis, peningkatan *soft competency* juga menjadi hal yang krusial untuk membentuk pegawai dan pemimpin yang adaptif, profesional, serta matang dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan di bidang pengawasan obat dan makanan.

BPOM telah mengembangkan aplikasi IDEAS (Integrated Development and Training Information System) yang merupakan platform pengembangan kompetensi digital yang terintegrasi dengan https://siasn.pom.go.id yang memfasilitasi pegawai untuk mengikuti pembelajaran secara online kapanpun dan dimanapun, serta aplikasi SIMPHONI yang merupakan platform knowledge management di lingkungan BPOM. Kedua aplikasi ini dikembangkan untuk meningkatkan kompetensi pegawai secara mandiri.

Kekuatan SDM BBPOM di Semarang per 30 September 2025 adalah 149 orang, diantaranya masih terdapat 13.42% pegawai dengan jenjang pendidikan non sarjana. Berdasarkan pemetaan kebutuhan SDM berdasarkan ABK BBPOM di Semarang Tahun 2025-2029 dibutuhkan pegawai sebanyak 201 orang.

2. **Regionalisasi Laboratorium**

Konsep regionalisasi laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) telah diterapkan sejak tahun 2022 dan terus mengalami penyempurnaan secara berkelanjutan. Upaya penyempurnaan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas laboratorium sesuai dengan tugas serta ruang lingkup pengawasan yang diemban. Peningkatan tersebut diukur melalui pemenuhan *Standar Kemampuan Laboratorium* Badan POM sebagai indikator mutu dan kinerja laboratorium. Sistem regionalisasi tidak hanya berfokus pada pemenuhan standar yang berlaku saat ini, tetapi juga dirancang untuk menghadapi tantangan pengawasan di masa depan melalui pemanfaatan teknologi modern guna mendukung proses pengujian yang lebih cepat, akurat, dan efisien.

Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 100 Tahun 2025, Balai Besar POM di Semarang ditetapkan sebagai Laboratorium Regional untuk wilayah Regional Semarang. Wilayah ini mencakup sembilan Balai Besar dan Balai POM, yaitu Balai Besar POM di Jakarta, Balai Besar POM di Serang, Balai Besar POM di Bandung, dan Balai Besar POM di Yogyakarta, serta Balai POM di Tangerang, Balai POM di Bogor, Balai POM di Tasikmalaya, Balai POM di Surakarta, dan Balai POM di Banyumas. Sebagai Laboratorium Regional, BBPOM di Semarang memiliki sumber daya manusia penguji yang kompeten serta kapasitas pengujian yang unggul, didukung oleh peralatan laboratorium berteknologi tinggi seperti LCMS/MS, Ion Chromatography, Spectrofluorometer, DUSA, serta fasilitas pengujian unggulan untuk obat antineoplastik, uji sterilitas, dan analisis DNA.

Penguatan sistem regionalisasi laboratorium terus dilakukan melalui digitalisasi sistem informasi, perluasan ruang lingkup pengujian berbasis risiko, serta pembinaan dan pendampingan terhadap laboratorium lain dalam satu wilayah regional. Langkah ini diharapkan mampu menjadikan laboratorium Badan POM sebagai pusat pengujian yang andal, memenuhi standar internasional, serta menjadi fondasi utama bagi penyelenggaraan pengawasan obat dan makanan yang lebih efektif, responsif, dan merata di seluruh Indonesia.

3. **Percepatan Penurunan Stunting di Jawa Tengah**

Pada tahun 2025, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan penurunan angka stunting menjadi 18,8%, setelah sebelumnya angka stunting berada pada kisaran 20,8% pada tahun 2022, 20,7% pada tahun 2023, dan 20% pada tahun 2024. Target tersebut ditetapkan agar penurunan prevalensi stunting di Jawa Tengah dapat tercapai lebih cepat dari target nasional tahun 2025. Untuk mewujudkan hal ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama BKKBN dan berbagai pemangku kepentingan telah melaksanakan berbagai intervensi, antara lain perbaikan gizi, peningkatan sanitasi, serta penguatan koordinasi lintas sektor.

Program percepatan penurunan stunting di Jawa Tengah tahun 2025 difokuskan pada 20 kabupaten/kota prioritas, dengan strategi utama berupa penguatan koordinasi lintas sektor, intervensi terarah, dan pelibatan aktif masyarakat. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Dinas Kesehatan melakukan evaluasi dan penguatan program gizi ibu dan anak, serta mendorong sinkronisasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kader Posyandu. Intervensi juga dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai mitra, seperti Tanoto Foundation dan UNICEF, melalui program *Rumah Anak SIGAP* serta kampanye perubahan perilaku.

Saat ini, tercatat sekitar 485 ribu anak di Jawa Tengah mengalami stunting. Untuk mempercepat penurunan angka tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan BKKBN membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang tersebar di 35 kabupaten/kota, 576 kecamatan, dan 8.562 desa/kelurahan.

Dalam mendukung upaya tersebut, Balai Besar POM di Semarang berperan aktif melalui berbagai program strategis yang berfokus pada peningkatan keamanan dan mutu pangan, sebagai salah satu faktor penting dalam pencegahan stunting. Salah satu bentuk kontribusinya adalah melalui kerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Semarang dan Tim Penggerak PKK, dengan melakukan edukasi kepada pedagang tentang pentingnya keamanan pangan serta uji cepat terhadap produk yang diduga mengandung bahan berbahaya seperti formalin. Program ini juga melibatkan kader keamanan pangan di tingkat RT/RW untuk memastikan pangan yang beredar di masyarakat aman dan bergizi.

Selain itu, BBPOM di Semarang melaksanakan pengawasan produk pangan melalui uji cepat (*rapid test kit*) terhadap bahan berbahaya pada produk pangan, seperti formalin pada mie basah, serta melakukan edukasi dan pendampingan kepada pedagang terkait penerapan prinsip higienis dan sanitasi yang baik. Upaya ini diperkuat melalui kegiatan edukasi publik, baik dalam bentuk Komunikasi, Informasi, dan Edukasi

(KIE) maupun pelatihan bagi kader keamanan pangan, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pangan aman, sehat, dan bergizi dalam mencegah stunting.

Meskipun BPOM tidak menyelenggarakan Program Makanan Bergizi Seimbang (MBG) secara langsung, lembaga ini berperan penting dalam mendukung keberhasilan program tersebut melalui pengawasan keamanan dan mutu pangan, edukasi masyarakat, serta pembinaan pelaku usaha pangan lokal. Dengan demikian, pelaksanaan Program MBG dapat berjalan tidak hanya murah dan merata, tetapi juga aman dan bergizi.

Selain itu, program fortifikasi pangan juga menjadi salah satu strategi pemerintah dalam meningkatkan akses terhadap pangan bergizi. Hingga saat ini, pemerintah telah menetapkan tiga jenis pangan wajib fortifikasi, yaitu garam konsumsi, tepung terigu, dan minyak goreng sawit. Pengawasan terhadap pangan wajib fortifikasi dilakukan melalui dua mekanisme, yakni pre-market control dan post-market control. *Pre-market control* menekankan pemenuhan *Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)* di tingkat produksi, serta pemantauan terhadap jenis dan kadar fortifikan yang ditambahkan saat proses registrasi izin edar. Sementara *post-market control* dilakukan melalui kegiatan sampling dan pengujian produk yang beredar di pasaran.

Penurunan prevalensi stunting pada balita masih menjadi agenda prioritas nasional yang merupakan *major project* pemerintah. Mengingat sifatnya yang multi-dimensional, penanganan stunting memerlukan langkah-langkah yang strategis, efektif, dan efisien, dengan dukungan lintas sektor yang konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas. Sejalan dengan hal tersebut, Presiden telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, yang mengamanatkan pelaksanaan dua jenis intervensi, yaitu intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Intervensi spesifik diarahkan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya stunting, sedangkan intervensi sensitif ditujukan untuk menangani penyebab tidak langsung, antara lain melalui peningkatan akses terhadap pangan yang aman, sehat, dan bergizi.

4. Dukungan UMKM

Pendampingan yang dilakukan Balai Besar POM di Semarang untuk UMKM Pangan Olahan sangat menbantu dan mendukung untuk UMKM menaikkan grading yang lebih tinggi, dengan tujuan memperluas distribusi produk. Pendampingan Penerapan Cara Produksi Pangan

Olahan yang Baik dilakukan secara konsisten oleh Pelaku usaha UMKM. Menigkatkan pemahaman terkait proses Izin Penerapan CPPOB, Label Pangan Olahan sesuai ketentuan dan pendampingan proses daftar produk, yang sering dikeluh kesahkan terutama Pelaku Usaha UMKM. Selain sebagai pencapaian kinerja Balai Besar POM di Semarang, kegiatan ini diharapkan menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya para pelaku UMKM pangan dan dapat memberikan bukti nyata dukungan bagi UMKM sehingga secara tidak langsung juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di era pemulihan ekonomi sekarang ini. Diharapkan pada tahun 2025, Balai Besar POM di Semarang dapat melakukan lebih banyak pendampingan terhadap produk-produk UMKM di provinsi Jawa Tengah

5. **Penegakan hukum tindak pidana Obat dan Makanan Ilegal di Jawa Tengah**

Dengan adanya perdagangan bebas, masalah kejahatan obat dan makanan semakin kompleks. Untuk merespons dan mengantisipasi modus kejahatan yang semakin berkembang, terutama dengan meningkatnya pelanggaran di bidang obat dan makanan secara online, BBPOM Semarang harus bekerja sama dengan lintas sektor terkait. Tidak mungkin untuk menerapkan hukum kejahatan obat dan makanan yang ideal secara mandiri. Oleh karena itu, upaya kolaboratif dengan pendekatan penyesuaian bersama antara BPOM dan sistem hukum kejahatan (CJS) harus diperkuat untuk mengantisipasi dan merespons modus kejahatan obat dan makanan yang berkembang.Dalam beberapa kasus, Balai Besar POM di Semarang dan Kepolisian Daerah Jawa Tengah bekerja sama dengan Direskrimsus dan Diresnarkoba untuk memberikan keterangan ahli, membantu pemeriksaan laboratorium, melakukan pengawasan, dan menjaga keamanan obat dan makanan.

Dalam penegakan hukum tindak pidana terkait Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Pangan, Perlindungan Konsumen, Psikotropika, dan Narkotika, ada beberapa bentuk sinergi antara Balai Besar POM di Semarang dan Kepolisian Daerah Jawa Tengah, di mana Direskrimsus dan Diresnarkoba membantu POLRI dalam memberikan keterangan ahli, bantuan pemeriksaan laboratorium, pengawasan, dan penertiban obat dan makanan.

6. **Meningkatnya Peredaran Terkait Penjualan Obat dan Makanan yang Berisiko terhadap Kesehatan Secara Online**

Meskipun "UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan" dan "Peraturan BPOM No. 4 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi di Fasilitas

Pelayanan Kefarmasian" telah menetapkan dasar hukum untuk peredaran obat dan makanan, peredaran obat dan makanan secara online masih tumbuh dengan cepat, menurut survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Selain itu, ini membuka peluang untuk penjualan barang ilegal seperti obat, suplemen makanan, obat tradisional, kosmetik, dan makanan. Dengan demikian, salah satu fokus pengawasan BPOM adalah pengendalian penjualan produk ilegal yang dijual secara online. BBPOM Semarang telah melakukan lebih dari 120 subsite, atau website, dan marketplace yang dihapus dalam satu tahun.

Selain itu, ini membuka peluang untuk penjualan barang ilegal seperti obat, suplemen makanan, obat tradisional, kosmetik, dan makanan. Dengan demikian, salah satu fokus pengawasan BPOM adalah mengontrol penjualan barang ilegal yang dijual secara online. Dengan lebih dari 120 subsite, atau website, dan marketplace yang dihapus dalam satu tahun, BBPOM Semarang terus berkomitmen untuk memerangi peredaran obat dan makanan ilegal, terutama di wilayah jawa tengah.

BPOM sangat mendukung bisnis obat dan makanan di Indonesia dan berkomitmen untuk melakukan pengawasan berimbang dengan mendorong bisnis untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan melalui pendampingan, pembinaan, dan kemudahan berusaha. Di sisi lain, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tidak segan bertindak tegas untuk menegakkan hukum dan aturan terhadap bisnis yang sengaja melanggar peraturan dan melakukan kejahatan obat dan makanan.

7. GERMAS SAPA di Provinsi Jawa Tengah

Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman (GERMAS SAPA) merupakan aksi nasional berbasis komunitas melalui strategi intervensi dari sisi supply maupun demand yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman.

Program GERMAS SAPA di Jawa Tengah ini merupakan Program yang komprehensif dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat dan merupakan gabungan dari Gerakan Keamanan Pangan Desa/kelurahan, Pengawasan Pangan Jajanan Anak Sekolah dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas. Masing-masing program memiliki segmen target komunitas yang spesifik, tetapi secara keseluruhan ketiganya bermuara pada terwujudnya peningkatan pola hidup sehat masyarakat Jawa Tengah dalam memproduksi, menyediakan dan mengonsumsi pangan yang aman.

Badan POM telah menginisiasi program ini sebagai dukungan terhadap Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) sejak tahun 2017. Diharapkan dengan intervensi keamanan pangan kepada masyarakat luas dapat menapis permasalahan klasik di bidang Keamanan Pangan seperti :

a. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran pelaku usaha terutama Industri
   Rumah Tangga Pangan tentang Aspek Higiene dan Sanitasi dalam proses
   produksi.
b. Penggunaan Bahan Tambahan Pangan melebihi batas
c. Penyalahgunaan Bahan Berbahaya dalam pangan
d. Masalah pencemaran lingkungan termasuk cemaran air

8. Penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG) menuju keadilan dan kesetaraan

Definisi gender berbeda dengan jenis kelamin, karena gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang dibentuk atau dikonstruksikan (rekayasa) sosial dan budaya, dan dapat berubah dari waktu ke waktu. Beragam stereotype terhadap perempuan dan laki-laki yang berkembang di masyarakat seperti laki-laki dikenal lebih rasional, kuat, agresif dan tegas sedangkan wanita bersifat emosional, ragu-ragu, pasif, lemah.

Isu gender merupakan permasalahan yang diakibatkan karena adanya kesenjangan atau ketimpangan gender yang berimplikasi adanya diskriminasi terhadap salah satu pihak (perempuan dan laki-laki). Dengan adanya diskriminasi terhadap perempuan atau laki-laki dalam hal akses dan kontrol atas sumber daya, kesempatan, status, hak, peran dan penghargaan, akan tercipta kondisi yang tidak adil gender.

Isu gender juga merupakan salah satu isu utama dalam pembangunan, khususnya pembangunan sumber daya manusia. Walaupun sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan penguatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG), namun data menunjukkan masih adanya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat, serta penguasaan terhadap sumber daya, seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, dan bidang strategis lainnya. Adanya ketertinggalan salah satu kelompok masyarakat dalam pembangunan, khususnya perempuan disebabkan oleh berbagai permasalahan di masyarakat yang saling

berkaitan satu sama lainnya. Permasalahan paling mendasar dalam upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak adalah pendekatan pembangunan yang belum mengakomodir tentang pentingnya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki dalam mendapatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan.

Dalam rangka mendorong, mengefektifkan serta mengoptimalkan upaya PUG secara terpadu dan terkoordinasi, di dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang mengamanatkan bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional. PUG menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan fungsional utama semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah.

Upaya mencapai kehidupan yang lebih baik dilakukan secara terus menerus oleh Pemerintah dengan pembangunan kualitas hidup masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin tertentu. Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat tergantung pada peran serta seluruh penduduk, baik laki-laki maupun perempuan sebagai pelaku, dan sekaligus sebagai penerima manfaat hasil pembangunan.

9. Peningkatan Efektivitas Pengawasan Melalui Sinergisme Pengawasan di Tingkat Pusat dan Daerah

Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2017 terbit atas dasar maraknya peredaran obat ilegal dan penyalahgunaan obat serta belum optimalnya pengawasan obat dan makanan di Indonesia yang dikarenakan kurangnya koordinasi antar instasi pemerintah. Pada Inpres tersebut, Presiden RI memberikan instruksi kepada 12 K/L/D untuk bersinergi satu sama lain dan berkontribusi dalam peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan sesuai dengan tupoksi masing-masing dimana Badan POM sebagai koordinator teknis pelaksanaan pengawasan.

Dilatarbelakangi Inpres 3 Tahun 2017, Presiden juga menginstruksikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota terkait peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan, sehingga Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Permendagri No. 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah

dengan mengangkat substansi di dalam Inpres 3 Tahun 2017 ke dalam bentuk produk hukum berupa Peraturan Menteri.

Terkait dengan pengawalan Inpres No. 3 tahun 2017, Badan POM perlu melakukan pengawalan implementasi dimana salah satunya adalah adanya penguatan peran pemerintah daerah. Sebagaimana amanah UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dimana beberapa peran yang mendukung efektivitas pengawasan fungsi terletak di pemerintah daerah. Dalam upaya pengawasalan fungsi tersebut, Badan POM telah mengusulkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik untuk pengawasan di Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bab II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rancangan Rencana Strategis 2025-2029

Perencanaan kinerja satuan kerja terdapat dalam Dokumen Rancangan Rencana Strategis. Renstra tersebut memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, strategi, arah kebijakan serta program dan kegiatan satuan kerja. Untuk periode tahun 2025-2029, dokumen Rancangan Renstra Badan POM sudah dapat dijadikan acuan dalam penyusunan Renstra BBPOM di Semarang tahun 2025-2029.

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2025

Tabel 3 Rencana Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2025
a	b	c	d
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	100
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100
4	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
5	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah Kerja BBPOM di Semarang	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	79,7
6	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Semarang	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	95,6
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	20
		Jumlah desa pangan aman	6
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2025
a	b	c	d
7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanandan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	82
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Semarang	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	80
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	14
10	Layanan Publik BBPOM di Semarang yang Prima	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Semarang	4,7
11	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Semarang	92,5
		Nilai AKIP BBPOM di Semarang	82,49
		Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang	90
		Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Semarang	3,7

2.3 Perjanjian Kinerja 2025

Setelah DIPA BBPOM di Semarang Tahun 2025 disahkan, BBPOM di Semarang menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Dasar untuk penyusunan Perjanjian Kinerja 2025 adalah dengan mengacu pada Renja Badan POM Tahun 2025 sesuai aplikasi KRISNA dengan target dan anggaran yang telah disesuaikan berdasarkan DIPA 2025 yang telah disahkan.

Adanya rekomendasi akip BPOM dari Kemenpan RB yaitu Penetapan Target Kinerja pada beberapa Unit Kerja perlu mempertimbangkan realisasi kinerja tahun sebelumnya, meskipun telah ada ketentian penetapan target harus mempertimbangkan capaian triwulan III tahun berjalan. Dan berdasarkan Surat dari Sekretaris utama nomer B-PR.07.01.2.21.12.23.920 tanggal 5 Desember 2023 tentang Permintaan Penyusunan Dokumen PK dan RAPK Unit Kerja di Lingkungan BPOM Tahun 2024. Bahwa terdapat permintaan untuk menambahkan Indikator direktif penugasan menjadi Indikator kinerja utama.

Secara rinci, perubahan target Perjanjian Kinerja Balai Besar POM Tahun 2025 tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	IKU		Target 2025
a	b	c	d	e
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	IK 1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87,00
2		IK 2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26
3		IK 3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
4		IK 4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
5		IK 5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80
6	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	IK 6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	86

No	Sasaran Kegiatan	IKU		Target 2025
a	b	c	d	e
7	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	IK 7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89,5
8		IK 8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
9		IK 9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	72,25
10		IK 10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80
11		IK 11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85,87
12	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	IK 12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	54
13	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah Kerja BBPOM di Semarang	IK 13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	79,7
14	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Semarang	IK 14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,42
15		IK 15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	20
16		IK 16	Jumlah desa pangan aman	6
17		IK 17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
18	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanandan mutu	IK 18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	83,7
19	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Semarang	IK 19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	85
20	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	IK 20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90
21	Layanan Publik BBPOM di Semarang yang Prima	IK 21	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Semarang	4,7
22	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	IK 22	Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Semarang	92,43
23		IK 23	Nilai AKIP BBPOM di Semarang	82
24		IK 24	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang	91,02
25		IK 25	Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Semarang	3,6

Dasar perubahan Perjanjian Kinerja (PK) BBPOM di Semarang Tahun 2025 berawal dari pelaksanaan Desk Kesepakatan Target IKU UPT ke-1 yang diselenggarakan pada tanggal 22–24 Januari 2025, melibatkan Unit Pelaksana Teknis (UPT), Unit Kerja Pengampu, dan Biro Perencanaan dan Keuangan. Hasil kesepakatan tersebut mengacu pada Rancangan Renstra BPOM 2025–2029 dan menjadi acuan dalam penyusunan serta penetapan Perjanjian Kinerja (PK)/Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2025 pada tanggal 12 Februari 2025.

Seiring implementasinya dan berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kinerja Triwulan I Tahun 2025, terdapat beberapa UPT yang mengusulkan perubahan target baik pada level bulanan maupun tahunan, sehingga dilakukan reviu terhadap target IKU UPT untuk menyesuaikan dengan kondisi riil dan kebijakan terkini. Selain itu, terdapat penambahan tiga IKU baru yang mengikuti logframe dari pusat, yaitu: (1) Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar, (2)

Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT, dan (3) Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman. Lebih detail dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 5 Perjanjian Kinerja 2025 Revisi I

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Target 2025
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	IK1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,5
		IK2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26
		IK3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91
		IK4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100
		IK5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92
		IK6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	86
		IK7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,75
		IK8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		IK9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,75
		IK10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80
		IK11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91
		IK12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91
		IK13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Target 2025
		IK14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	83,2
		IK15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	3,85
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	IK16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	54
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	IK17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,42
		IK18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	20
		IK19	Jumlah desa pangan aman	6
		IK20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	IK21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	18,44
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	IK22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	85
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	IK23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90
7	Layanan Publik UPT yang prima	IK24	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	IK25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	92,43
		IK26	Nilai AKIP UPT BPOM	82
		IK27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5
		IK28	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3,6

2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

BBPOM di Semarang juga menyusun Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2025 memuat 11 sasaran

kegiatan dengan 25 indikator kinerja kegiatan dengan target kinerja tahunan dan triwulanan beserta anggaran setiap indikator kinerja kegiatan. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BBPOM di Semarang tahun 2025 yang sudah disahkan dapat dilihat pada Lampiran 3 pada Laporan Kinerja Interim ini.

Tabel 6 RAPK BBPOM di Semarang 2025

Sasaran Strategis		Indikator		Target Bulanan 2025												Anggaran
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87,00	1.185.442.000
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												26	80.300.000
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	208.979.667
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	208.979.667
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	208.979.666
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	50	53	56	59	63	66	69	73	76	79	83	86	65.855.250
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	65.855.250
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	65.855.250
		9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,75	96,75	96,75	96,75	96,75	96,75	96,75	96,75	96,75	96,75	96,75	96,75	650.500.000
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	650.500.000
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85,87	85,87	85,87	85,87	85,87	85,87	85,87	85,87	85,87	85,87	85,87	85,87	65.855.250
4	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		5,61	16,82	28,04	39,25	50,47	54	54	54	54	54	54	88.195.000
5	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			70,31	70,31	70,31	72,87	72,87	72,87	76,12	76,12	76,12	79,7	9.630.584.000
6	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Semarang	14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			86,42	86,42	86,42	86,42	86,42	86,42	86,42	86,42	86,42	86,42	17.055.022.000
		15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	5%	20%	20%	60%	60%	60%	65%	70%	75%	85%	95%	20	653.579.000
		16	Jumlah desa pangan aman	5%	25%	28%	46%	54%	62%	71%	73%	77%	88%	100%	6	1.308.912.000
		17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	5%	20%	20%	40%	65%	65%	95%	100%	100%	100%	100%	1	130.777.000
7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik da0tau IP CPPOB pangan olahan	6,67	16	24,17	48,5	56,67	69,33	82,5	84,33	88,33	91	96,67	91	97.721.000
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Semarang	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	10	25	35	37,5	40	45	55	60	65	75	80	85	813.876.000
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	122.167.000

Sasaran Strategis		Indikator		Target Bulanan 2025												Anggaran
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q
10	Layanan Publik BBPOM di Semarang yang Prima	21	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Semarang												4,70	688.354.000
11	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	22	Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Semarang												92,43	240.000.000
		23	Nilai AKIP BBPOM di Semarang												82	240.000.000
		24	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang												91,02	19.136.242.000
		25	Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Semarang												3,6	240.000.000
Total Anggaran																53.902.531.000

Melalui Surat Nomor: B-PR.07.9A.05.25.1130 Tanggal 27 Mei 2025 tentang Permohonan Revisi ke 1 Target RAPK April – Desember 2025 dan PK 2025-2029 berupa perubahan target IKU:

1 Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

2 Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

3 Jumlah desa pangan aman

4 Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Dan telah ditanggapi oleh Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan melalui Surat No. PR.07.21.06.25.188 tanggal 11 Juni 2025 tentang Tanggapan atas Usulan Perubahan Target Bulanan RAPK Balai Besar POM di Semarang Tahun 2025. Adapun hasil reviu Rorenkeu adalah sebagai berikut:

Tabel 7 Hasil Reviu Rorenkeu Revisi ke-1 RAPK 2025

Nb	Indikator	Justifikasi Unit Kerja	Hasil Reviu
1	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Pelaksanaan kegiatan sampling dan pengujian sampel PIRT perlu disesuaikan dengan kebijakan pemerintah terkait efisiensi belanja perjalanan dinas TA 2025, sesuai Surat Sekretaris Utama Nomor : B PR.05.02.2.12.24.925 Tanggal 9 Desember 2024 perihal Penyampaian Data Pemblokiran Dalam Rangka Efisiensi Perjalanan Dinas dan Non Quick Win Tahun 2025, 50% anggaran perjalanan dinas tahun 2025 telah dilakukan pemblokiran anggaran secara sistem pada aplikasi SAKTI oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu. Terkait dengan hal tersebut Badan POM melakukan perubahan tahapan pelaksanaan program sehingga terjadi kendala capaian terhadap target awal yang telah ditetapkan sebelum kebijakan pemerintah tersebut diterbitkan.	Mengacu surat Sekretaris Utama no B-PR.07.2.05.25.251 tanggal 14 Mei 2025 perihal Mekanisme dan Jadwal Revisi Rencana Aksi PK 2025 poin 4b dimana "Revisi target hanya dapat dilakukan pada indikator yang bersifat kumulatif (nonflat)" maka permohonan perubahan target untuk **tidak dapat disetujui.** Perubahan target tahunan dapat dilakukan pada penyusunan Renstra 2025-2029 untuk selanjutnya dilakukan revisi PK dan RAPK mengacu Renstra yang telah ditetapkan. Perubahan target tersebut harus mempertimbangkan realisasi hingga bulan terakhir serta berkoordinasi dengan unit teknis pengampu indikator
2	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	*) Pelaksanaan Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Kemanan Pangan tahun 2025 perlu disesuaikan dengan kebijakan pemerintah terbaru terkait Program Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting. *) Pelaksanaan kegiatan Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan perlu disesuaikan dengan kebijakan pemerintah terkait efisiensi belanja perjalanan dinas TA 2025, sesuai Surat Sekretaris Utama Nomor : B PR.05.02.2.12.24.925 Tanggal 9 Desember 2024 perihal Penyampaian Data Pemblokiran Dalam Rangka Efisiensi Perjalanan Dinas dan Non Quick Win Tahun 2025, 50% anggaran perjalanan dinas tahun 2025 telah dilakukan pemblokiran anggaran secara sistem pada aplikasi SAKTI oleh Direktorat Jenderal	Usulan **dapat disepakati** karena telah memenuhi ketentuan perubahan target RAPK berdasarkan surat Sekretaris Utama no B-PR.07.2.05.25.251 tanggal 14 Mei 2025 perihal Mekanisme dan Jadwal Revisi Rencana Aksi PK 2025

		Anggaran Kemenkeu. Terkait dengan hal tersebut Badan POM melakukan perubahan tahapan pelaksanaan program sehingga terjadi kendala capaian terhadap target awal yang telah ditetapkan sebelum kebijakan pemerintah tersebut diterbitkan.	
3	Jumlah desa pangan aman	*) Pelaksanaan Desa Pangan Aman tahun 2025 perlu disesuaikan dengan kebijakan pemerintah terbaru terkait Program Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting. *) Pelaksanaan kegiatan Desa Pangan Aman perlu disesuaikan dengan kebijakan pemerintah terkait efisiensi belanja perjalanan dinas TA 2025, sesuai Surat Sekretaris Utama Nomor : B PR.05.02.2.12.24.925 Tanggal 9 Desember 2024 perihal Penyampaian Data Pemblokiran Dalam Rangka Efisiensi Perjalanan Dinas dan Non Quick Win Tahun 2025, 50% anggaran perjalanan dinas tahun 2025 telah dilakukan pemblokiran anggaran secara sistem pada aplikasi SAKTI oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu. Terkait dengan hal tersebut Badan POM melakukan perubahan tahapan pelaksanaan program sehingga terjadi kendala capaian terhadap target awal yang telah ditetapkan sebelum kebijakan pemerintah tersebut diterbitkan.	Mengacu realisasi pada B4 yakni sebesar 38, maka usulan **target di B4 minimal sama dengan realisasi**, terkait usulan target pada B5-B11 **dapat dispekati.**
4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	*) Pelaksanaan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas tahun 2025 perlu disesuaikan dengan kebijakan pemerintah terbaru terkait Program Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting. *) Pelaksanaan kegiatan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas perlu disesuaikan dengan kebijakan pemerintah terkait efisiensi belanja perjalanan dinas TA 2025, sesuai Surat Sekretaris Utama Nomor : B PR.05.02.2.12.24.925 Tanggal 9 Desember 2024 perihal Penyampaian Data Pemblokiran Dalam Rangka Efisiensi Perjalanan Dinas dan Non Quick Win Tahun 2025, 50% anggaran perjalanan dinas tahun 2025 telah dilakukan pemblokiran anggaran secara sistem pada aplikasi SAKTI oleh Direktorat	Usulan **dapat disepakati** karena telah memenuhi ketentuan perubahan target RAPK berdasarkan surat Sekretaris Utama no B-PR.07.2.05.25.251 tanggal 14 Mei 2025 perihal Mekanisme dan Jadwal Revisi Rencana Aksi PK 2025
		Jenderal Anggaran Kemenkeu. Terkait dengan hal tersebut Badan POM melakukan perubahan tahapan pelaksanaan program sehingga terjadi kendala capaian terhadap target awal yang telah ditetapkan sebelum kebijakan pemerintah tersebut diterbitkan.	

berdasarkan hasil reviu tersebut, maka RAPK menjadi :

Tabel 8 RAPK BBPOM di Semarang 2025 (Revisi I)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulanan 2025												Anggaran
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	1.185.442.000
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												26	80.300.000
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	208.979.667
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	208.979.666
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	208.979.666
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	50	53	56	59	63	66	69	73	76	79	83	86	65.855.250
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	65.855.250
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	65.855.250
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.75	96.75	96.75	96.75	96.75	96.75	96.75	96.75	96.75	96.75	96.75	96.75	650.500.000

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulanan 2025												Anggaran
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	650.500.000
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85.87	85.87	85.87	85.87	85.87	85.87	85.87	85.87	85.87	85.87	85.87	85.87	65.855.250
2.	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		5.61	16.82	28.04	39.25	50.47	54	54	54	54	54	54	88.195.000
3.	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			70.31	70.31	70.31	72.87	72.87	72.87	76.12	76.12	76.12	79.7	9.630.584.000
4.	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			86.42	86.42	86.42	86.42	86.42	86.42	86.42	86.42	86.42	86.42	17.055.022.000
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	5	20	20	52.5	55.7	62.65	69.6	72.8	86	86.7	100	20	653.579.000
		03 - Jumlah desa pangan aman	5	25	28	38	47.5	54.2	57.5	67.5	67.5	67.5	100	6	1.308.912.000
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	5	20	20	55	80	100	100	100	100	100	100	1	130.777.000
5.	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	6.67	16	24.17	48.5	56.67	69.33	82.5	84.33	88.33	91	96.67	91	97.721.000
6.	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	10	25	35	37.5	40	45	55	60	65	75	80	85	813.876.000

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulanan 2025												Anggaran
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	efektif di wilayah kerja UPT														
7.	Terlaksanaan ya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	122.167.000
8.	Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4.7	688.354.000
9.	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												92.43	240.000.000
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM												82	240.000.000
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												91.02	19.136.242.000
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												3.6	240.000.000
Total															53.902.531.000

Perubahan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) ke-2 Tahun 2025 dilakukan sebagai tindak lanjut dari penyesuaian terhadap Perjanjian Kinerja (PK) terbaru, serta hasil reviu kinerja yang dilakukan dalam proses Monitoring dan Evaluasi Triwulan I Tahun 2025. Reviu ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara target dan capaian kinerja dengan kondisi pelaksanaan di lapangan, serta menjaga akurasi pengukuran kinerja terhadap indikator yang relevan.

Secara umum, indikator yang dilakukan reviu pada RAPK ke-2 memiliki beberapa kriteria, yaitu:

(1) indikator yang banyak mendapat usulan revisi target yang berdampak terhadap target B12 atau perubahan target tahunan (khususnya indikator yang berkaitan dengan penentuan standar);

(2) indikator dengan target bulanan yang bukan bersifat progresif;

(3) indikator dengan target tahunan yang tidak menggunakan satuan jumlah;

(4) indikator yang targetnya bukan merupakan nilai maksimal (100%); serta

(5) indikator yang telah dilaksanakan sejak Bulan I (B1) dan telah melalui proses Monev Triwulan I.

Melalui revisi RAPK ke-2 ini, diharapkan penyusunan dan pemantauan kinerja BBPOM di Semarang dapat lebih selaras dengan arah kebijakan terbaru, penambahan indikator baru dalam PK, serta kondisi operasional aktual di lapangan. Adapun rincian indikator dan penyesuaian target yang mengalami reviu sebagaimana dimaksud, tercantum dalam detail RAPK revisi berikut.

Tabel 9 RAPK BBPOM di Semarang 2025 (Revisi II)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target												Anggaran
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		87	87	87	87	87	87	91,5	91,5	91,5	91,5	91,50	592.721.000
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												26	80.300.000
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	91	91	91	91	91	209.021.463
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	4.760.000
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		80	80	80	80	80	80	92	92	92	92	92	208.958.769
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	50	53	56	59	63	66	69	73	76	79	83	86	4.130.000

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target												Anggaran
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	90	90	90	90	90	90	90,75	90,75	90,75	90,75	90,75	131.710.500
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	131.710.500
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.75	96.75	96.75	96.75	96.75	96.75	96.75	96.75	96.75	96.75	96.75	96,75	616.270.000
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	616.270.000
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85.87	85.87	85.87	85.87	85.87	85.87	85.87	91	91	91	91	91	54.810.000
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar								91	91	91	91	91	592.721.000
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT												100	4.760.000
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar			70.31	70.31	70.31	72.87	72.87	78,8	82,8	82,8	82,8	83,20	7.213.784.000

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target											Anggaran
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		Kemampuan Laboratorium													
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman												3,85	208.958.769
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		5.61	16.82	28.04	39.25	50.47	54	54	54	54	54	54	88.195.000
4.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			86.42	86.42	86.42	86.42	86.42	86.42	86.42	86.42	86.42	86,42	17.055.022.000
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	5	20	20	52.5	55.7	62.65	69.6	72.8	86	86.7	100	20	653.579.000
		03 - Jumlah desa pangan aman	5	25	28	38	47.5	54.2	57.5	67.5	67.5	67.5	100	6	1.308.912.000
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	5	20	20	55	80	100	100	100	100	100	100	1	130.777.000
5.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	6.67	16	24.17	48.5	56.67	69.33	82.5	84.33	88.33	91,00	96.67	18,44	97.721.000

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target											Anggaran
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	10	25	35	37.5	40	45	55	65	75	80	82,5	85	813.876.000
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	122.167.000
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4,7	688.354.000
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												92,43	2.340.000.000
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM												82	240.000.000
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	19.243.639.000
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												3,6	240.000.000
														Total	53.693.128.000

Keberhasilan suatu sasaran strategis diukur melalui capaian indikator kinerja yang telah dituangkan pada Perjanjian Kinerja. Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Surat Edaran Nomor: Pr.09.01.2.03.25.10 Tahun 2025 Tentang

Pengukuran Dan Pelaporan Kinerja Unit/Satuan Kerja Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan, Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:

Tabel 10 Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>110%	
Sangat Baik	100% < x ≤ 110%	
Baik	90% < x ≤ 100%	
Cukup	60% ≤ x ≤ 90%	
Kurang	<60%	

Penetapan ini bertujuan untuk:

1. Sebagai reviu dan evaluasi untuk penetapan target kinerja tahunan.
2. Pemanfaatan *monitoring* kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Nilai Sasaran Strategis (NSS) adalah nilai rata-rata seluruh capaian indikator kinerja dalam suatu Sasaran Strategis (SS). Nilai Perspektif (NP) merupakan nilai yang menunjukkan konsolidasi dari seluruh NSS dalam 1 (satu) perspektif. Perhitungan NP dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata NSS dalam perspektif yang sama dengan rumus:

$$NP = \Sigma NSS / \Sigma SS$$

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) merupakan nilai kinerja organisasi yang menunjukkan hasil konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi indikator kinerja dalam satu Peta Strategi. NKO digunakan untuk menilai kinerja unit/satuan kerja yang memiliki peta strategi. Formula menghitung NKO :

$$NKO = \Sigma NP / \Sigma P$$

Tabel 11 Nilai Kinerja Organisasi (NKO) baik periodik maupun tahunan

Predikat NKO	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Notifikasi Warna
Istimewa	>110%	
Baik	80% < x ≤ 100%	
Butuh Perbaikan	60% < x ≤ 80%	
Kurang	20% < x ≤ 60%	
Sangat Kurang	0% ≤ x ≤ 20%	

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) baik periodik maupun tahunan mengacu pada kriteria berikut:

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2025. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai. Capaian kinerja hasil perbandingan ini dinyatakan dalam kategori berikut:

Tabel 12 Kategori Ketercapaian Target Akhir Tahun

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar ≥ 100%.	▲
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar 70% - <100% (70 ≤ x < 100).	▲
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar <70% (x < 70).	▼

Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan di BBPOM di Semarang adalah sebagai berikut:

1. Adanya penunjukan 1 (satu) orang petugas penanggungjawab data di BBPOM di Semarang yang disahkan dalam SK Kepala BPOM
2. Kepala BBPOM di Semarang menunjuk perwakilan penanggungjawab data di setiap bidang dengan menerbitkan SK Kepala BBPOM di Semarang

3. Penanggung jawab data di setiap bidang meng-*input* data kinerja pada data base *online* secara rutin setiap bulan dan diverifikasi oleh penanggungjawab data Balai
4. Data kinerja yang telah terverifikasi digunakan sebagai bahan untuk meng-*input* data setiap bulan pada aplikasi SAKTI, monev Bappenas dan pada aplikasi *e-performace*.
5. Pengelolaan data kinerja sebagai bahan informasi yang terintegrasi secara elektronik melalui sistem informasi melalui pemanfaatan aplikasi *e-performance* yang telah dikembangkan dengan menggunakan *Balance Score Card* (BSC). Pengukuran ini pun diintegrasikan dengan aplikasi Simakin pada aplikasi SIASN yang merupakan pengukuran kinerja hingga level pimpinan eselon 2 hingga level individu secara periodik triwulanan dimana penilaian pengukuran kinerja ini menjadi tolak ukur dalam pemberian *reward* dan *punishment* atas prestasi kerja pegawai dalam penetapan persentase pemberian tunjangan kinerja pada triwulan berikutnya.

Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara rutin untuk memonitor pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka upaya pencapaian target akhir tahun.

Selain dilakukan pengukuran indikator kinerja, juga dilakukan pengukuran efisiensi kinerja. Pengukuran efisiensi dari kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input.

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input (realisasi anggaran), sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\%\ CapaianOutput}{\%\ RencanaCapaianInput} \qquad IE = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila IE ≥ SE maka kegiatan dianggap efisien, apabila: IE ≤ SE maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut :

Tabel 13 Range Tingkat Efisiensi

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Triwulan (TW) III

Capaian Kinerja merupakan proses pengukuran kinerja yang dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran keberhasilan pencapaian sasaran strategis, efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Capaian Kinerja BBPOM di Semarang TW III Tahun 2025 diukur dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja sesuai dengan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan Tahun 2025.

Tabel 14 Perbandingan Realisasi TW III dengan Target Tahun 2025

NO	SK	IKU	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,50	100,00	109.29	Tercapai/ Melampaui
2		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26,00	Tahunan	Tahunan	Tahunan
3		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	94,44	103.78	Tercapai/ Melampaui
4		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00	100,00	100.00	Tercapai/ Melampaui
5		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92	95,61	103.92	Tercapai/ Melampaui
6		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	86,00	89,75	104.36	Tercapai/ Melampaui
7		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,75	94,44	104.07	Tercapai/ Melampaui
8		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	91,04	107.11	Tercapai/ Melampaui
9		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,75	99,89	103.25	Tercapai/ Melampaui
10		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,00	80,38	100.48	Tercapai/ Melampaui

NO	SK	IKU	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi
11		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91,00	96,89	106.47	Tercapai/ Melampaui
12		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91,00	100,00	109.89	Tercapai/ Melampaui
13		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100,00	Tahunan	Tahunan	Tahunan
14		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	83,20	85,20	102.40	Tercapai/ Melampaui
15		Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	3,85	Tahunan	Tahunan	Tahunan
16	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	54,00	57,94	107.30	Tercapai/ Melampaui
17	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Semarang	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	86,42	88,01	101.84	Tercapai/ Melampaui
18		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	20,00	94,60	94.60	Akan Tercapai
19		Jumlah desa pangan aman	6,00	90,00	90.00	Akan Tercapai
20		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1,00	100,00	100.00	Tercapai/ Melampaui
21	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB	18,44	92,68	92.68	Akan Tercapai
22	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Semarang	85,00	76,07	89.49	Akan Tercapai
23	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90,00	50,00	55.56	Perlu Upaya Keras
24	Layanan Publik BBPOM di Semarang yang Prima	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Semarang	4,70	Tahunan	Tahunan	Tahunan
25	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Semarang	92,43	Tahunan	Tahunan	Tahunan
26		Nilai AKIP BBPOM di Semarang	82,00	Tahunan	Tahunan	Tahunan
27		Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di	5,00	Tahunan	Tahunan	Tahunan
28		Indeks Manajemen Risiko BBPOM di	3,60	Tahunan	Tahunan	Tahunan

Melihat perbandingan Realiasasi TW III dengan target tahun 2025 terdapat 15 (Lima belas) indikator yang sudah tercapai/ melampaui, 4 (empat) Indikator akan tercapai targetnya dan 1 (Satu) masih perlu kerja keras, serta 8 indikator belum dapat ditentukan karena target di B12.

Tabel 15 Data Capaian Nilai Kinerja TW III BBPOM di Semarang

No	Sasaran Kegiatan	No	Nama Indikator	Target 2025	TW III			
					Target	Realisasi	Capaian	Capaian di Normalisasi
a	b		c	d	e	f	g	h
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,5	91,5	100	109,29	109,29
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26				
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	91	94,44	103,78	103,78
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92	92	95,61	103,92	103,92
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	86	76	89,75	118,09	110
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,75	90,75	94,44	104,07	104,07
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	91,04	107,11	107,11
		9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,75	96,75	99,89	103,25	103,25
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80,38	100,48	100,48
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91	91	96,89	106,47	106,47
		12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91	91	100	109,89	109,89
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100				
		14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	83,2	82,8	85,2	102,9	102,9
		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	3,85				
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	54	54	57,94	107,3	107,3
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Semarang	17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,42	86,42	88,01	101,84	101,84
		18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	20	86	94,6	110	110
		19	Jumlah desa pangan aman	6	67,5	90	133,33	110
		20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	100	100	100	100
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik da0tau IP	18,44	88,33	92,68	104,92	104,92

No	Sasaran Kegiatan	No	Nama Indikator	Target 2025	TW III			
					Target	Realisasi	Capaian	Capaian di Normalisasi
a	b		c	d	e	f	g	h
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di	22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	85	75	76,07	101,43	101,43
6	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan	23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	50	50	100	100
7	Layanan Publik BBPOM di Semarang yang Prima	24	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Semarang	4,7				
8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	25	Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Semarang	92,43				
		26	Nilai AKIP BBPOM di Semarang	82				
		27	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang	91,02				
		28	Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Semarang	3,6				
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)								104,83 Istimewa

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian Nilai Kinerja BBPOM di Semarang TW III tahun 2025 sebesar **104,83 (Istimewa).**

Selama TW III ini BBPOM di Semarang telah berupaya keras untuk mencapai kinerja meski dalam kondisi efisiensi anggaran. Untuk lebih mendetail akan dijelaskan pada subbab berikut.

SK 1. Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang

Tabel 16 Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan Ke 1

NO	SK	IKU	Target TW III	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,50	100,00	109,29
2		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO			
3		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	94,44	103,78
4		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00	100,00	100,00
5		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92,00	95,61	103,92
6		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	76,00	89,75	118,09
7		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,75	94,44	104,07
8		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	91,04	107,11
9		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,75	99,89	103,25
10		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,00	80,38	100,48
11		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91,00	96,89	106,47
12		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91,00	100,00	109,89
13		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT			
14		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	82,80	85,20	102,90
15		Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman			
Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan					105,77

SK 1: Meningkatnya efektivitas pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM Semarang diukur melalui 15 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tercantum pada tabel terkait. Nilai pencapaian Sasaran Kegiatan 1 mencapai 105,77, namun nilai ini belum dapat disimpulkan secara langsung. Dari 15 IKU yang diukur, terdapat 12 indikator yang berhasil dicapai dengan sangat baik, sementara 1 indikator lainnya belum dapat disimpulkan hasilnya. Selain itu, 2 IKU baru akan diukur pada

akhir tahun. Hal ini menunjukkan komitmen BBPOM Semarang untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh indikator yang relevan, sehingga hasil pengawasan menjadi lebih komprehensif dan akurat. Berdasarkan pencapaian tersebut, dapat disimpulkan bahwa BBPOM Semarang telah menunjukkan efektivitas yang baik dalam pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerjanya. Hal ini mencerminkan pengawasan yang optimal serta pengelolaan yang sesuai standar untuk menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat.

IKU 1. Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang dipilih menggunakan metode targeted atau *purposive* sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian.

Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil. Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga diwajibkan melaporkan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku.

Sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait.

Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan rata-rata dari persentase obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dihitung dari:

a. Kesesuaian Perencanaan Sampling yang mencakup kesesuaian dengan target sampel, renlak kategori sampel dan renlak kelas terapi
b. Kesesuaian Pelaksanaan Sampling yang mencakup kesesuaian dengan renlak periode/waktu sampling, ketentuan Evaluasi Penandaan, diuji dengan parameter sesuai ketentuan, termasuk uji secara *rapid*.
c. Kesesuaian Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian yang mencakup kesesuaian pengambilan kesimpulan akhir (kesesuaian antara kesimpulan penandaan dan kesimpulan pengujian) dan waktu pelaporan sesuai pedoman sampling

d. Kesesuaian Pelaporan Montoring Penarikan Obat

Persentase Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dihitung dari:

a. Pemenuhan target pengawasan OBA
b. Kesesuaian pengambilan sampel dengan kategori yang telah ditetapkan dalam pedoman sampling
c. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan)
d. Kesesuaian parameter uji
e. Akurasi dalam penentuan kesimpulan
f. Tanggapan atas surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

Persentase Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dihitung dari :

a. Pemenuhan target pengawasan SK
b. Kesesuaian pengambilan sampel dengan kategori yang telah ditetapkan dalam pedoman sampling
c. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan)
d. Kesesuaian parameter uji
e. Akurasi dalam penentuan kesimpulan
f. Tanggapan atas surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dihitung dari :

a. Pemenuhan target pengawasan
b. Kesesuaian pengambilan sampel dengan kategori yang telah ditetapkan dalam pedoman sampling
c. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan, mencakup kelengkapan laporan dan ketepatan waktu SLA Sampling, SLA Pengujian dan SLA Pelaporan
d. Ketepatan dalam penentuan Kesimpulan, mencakup penentuan Kesimpulan Penandaan, Pengujian, Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

e. Tanggapan atas surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik atau Direktur Pengawasan Kosmetik, mencakup surat Edaran pembersihan pasar dan Edaran pemeriksaan sarana kosmetik

Kegiatan sampling, pemeriksaan penandaan, pengujian dan monitoring produk recall dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dalam rangka menjamin produk/sediaan farmasi yang beredar aman, berkhasiat dan bermutu.

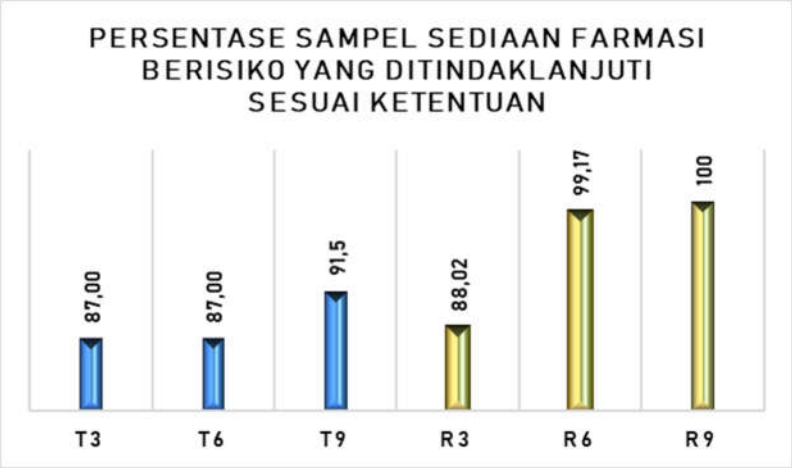
- **Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW III Tahun 2025**

Tabel 17 Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW III IKU 1

NO	IKU	Target TW III	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,5	100	109,29 Sangat Baik

Pada Triwulan III Tahun 2025, target kinerja ditetapkan sebesar **91,50%**, sedangkan realisasi capaian mencapai **109,29% dari target triwulan**. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut terhadap sediaan farmasi berisiko telah melampaui target yang ditetapkan. Secara keseluruhan, sampai dengan bulan September 2025 telah dilakukan **sampling sebanyak 1.238 sampel**, meliputi **obat (374 sampel), obat tradisional (267 sampel), suplemen kesehatan (71 sampel), dan kosmetik (526 sampel)**.

- **Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW Sebelumnya Tahun 2025**



Gambar 1 Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW Sebelumnya IKU 1

Dibandingkan dengan Realisasi pada **Triwulan II sebesar 99,17%**, realisasi kinerja pada **Triwulan III meningkat menjadi 100%**. Kenaikan ini menunjukkan adanya peningkatan efektivitas pelaksanaan sampling dan pengujian di lapangan, meskipun terdapat tambahan beban kerja akibat peningkatan jumlah surat recall dari Deputi II. Konsistensi pelaksanaan kegiatan sampling dan pengujian menunjukkan bahwa pengawasan produk sediaan farmasi telah berjalan stabil dan berkelanjutan sepanjang tahun 2025.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan Target Tahun 2025**

Tabel 18 Ketercapaian Realisasi TW III terhadap Target 2025 IKU 1

NO	IKU	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,50	100,00	109.29	▲ Tercapai/ Melampaui

Jika dibandingkan dengan **Target Kinerja Tahun 2025 sebesar 91,50%**, capaian sampai dengan TW III telah melampaui target tahunan dengan **persentase capaian sebesar 109,29%**. Realisasi jumlah sampling juga telah mencapai **82,97% dari total target 1.492 sampel**, menunjukkan kemajuan signifikan dalam pelaksanaan pengawasan hingga akhir Triwulan III. Dengan tren capaian yang terus meningkat sejak awal tahun, target tahunan diperkirakan dapat tercapai bahkan terlampaui pada akhir tahun 2025.

- **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja**

Peningkatan capaian kinerja pada Triwulan III dipengaruhi oleh beberapa faktor keberhasilan, antara lain:

- Pelaksanaan sampling rutin dan targeted sampling terhadap produk berisiko tinggi berjalan sesuai jadwal dan sasaran.
- Koordinasi lintas bidang (Pengawasan, Laboratorium, dan Penindakan) yang semakin kuat, sehingga tindak lanjut hasil pengujian dapat dilakukan secara cepat dan tepat.
- Peningkatan kapasitas laboratorium dan efisiensi waktu pengujian, yang berpengaruh terhadap percepatan tindak lanjut hasil pengawasan.

Namun demikian, terdapat beberapa kendala, terutama peningkatan jumlah Surat Recall dari Deputi II (9 surat recall kosmetik dan 23 surat recall OT/SK) yang menyebabkan perlunya pembersihan pasar tambahan di luar kegiatan rutin. Kondisi ini menambah beban kerja namun berhasil dikelola dengan baik sehingga tidak menurunkan capaian indikator.

- **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Untuk mempertahankan capaian yang sudah melampaui target sekaligus menghadapi dinamika di lapangan, beberapa langkah perbaikan yang direkomendasikan antara lain:

1. Penyesuaian perencanaan sampling berbasis risiko, agar tetap dapat mengakomodasi surat recall dari pusat tanpa mengganggu kegiatan rutin.
2. Penguatan koordinasi antar bidang teknis, khususnya antara pengawasan dan laboratorium, untuk mempercepat proses uji dan tindak lanjut hasil sampling.
3. Pemanfaatan sistem informasi pengawasan secara digital untuk mempercepat pelaporan, analisis, dan pemantauan capaian kinerja.
4. Peningkatan kapasitas SDM pengawasan agar mampu menyesuaikan dengan beban tambahan akibat adanya recall produk dari pusat.

- **Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja**

Tabel 19 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya IKU 1

Indikator	Pagu Anggaran(Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian IKU (%)	Tingkat Efisiensi
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	592,721,000	474,067,548	79.98	109.29	Efisien

Capaian kinerja sebesar **109,29%** berhasil dicapai dengan **realisasi anggaran 79,98%** dan **tingkat efisiensi yaitu efisien**. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya telah berjalan secara optimal dan terkendali. Efisiensi ini tercermin dari kemampuan mencapai hasil di atas target dengan proporsi anggaran yang masih di bawah 80%, menandakan pengelolaan sumber daya manusia, sarana pengujian, dan logistik lapangan telah dilakukan secara efektif.

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Beberapa kegiatan yang berkontribusi terhadap keberhasilan kinerja antara lain:

- Kegiatan sampling rutin dan targeted sampling terhadap produk farmasi berisiko tinggi.

- Pengujian laboratorium terhadap seluruh kategori produk (obat, OTSK, kosmetik, dan rokok) secara tepat waktu.
- Kegiatan tindak lanjut hasil pengawasan, seperti klarifikasi pelaku usaha dan pelaksanaan recall produk bermasalah.

  Faktor yang berpotensi menghambat adalah meningkatnya surat recall dari Deputi II, yang memerlukan tambahan kegiatan lapangan dan waktu untuk penyesuaian jadwal.

- **Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

Laporan kinerja Triwulan III Tahun 2025 ini dimanfaatkan sebagai dasar evaluasi efektivitas pelaksanaan pengawasan sediaan farmasi berisiko serta bahan penyusunan strategi pengawasan TW IV dan rencana kegiatan Tahun 2026. Selain itu, laporan ini menjadi dokumen pendukung dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan evaluasi internal kinerja bidang pengawasan di BBPOM di Semarang.

IKU 2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO dihitung berdasarkan jumlah sarana fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh BBPOM di Semarang pada tahun 2025.

Tujuan intervensi berupa KIE Farmakovigilans kepada tenaga kesehatan/ tenaga medis di fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan pemahaman pentingnya pemantauan dan pelaporan KTD/ ESO.

Tahapan pelaksanaan KIE Farmakovigilans berdasarkan petunjuk pelaksanaan KIE Farmakovigilans Kepada Tenaga Kesehatan/ Tenaga Medis di Fasyankes oleh UPT Pelaksana Teknis BPOM.

Intervensi utama dilakukan melalui KIE Farmakovigilans kepada tenaga kesehatan/tenaga medis di fasyankes oleh BBPOM di Semarang. Fasyankes mencakup rumah sakit, puskesmas dan klinik sesuai wilayah kerja UPT BPOM yang belum melaporkan KTD/ESO ke BPOM dan Tenaga kesehatan/tenaga medis mencakup dokter, dokter gigi, apoteker, perawat, bidan dan tenaga kesehatan/tenaga medis lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan KIE dilakukan kepada sarana pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kompetensi, pemahaman, pengetahuan dan awareness tenaga kesehatan/tenaga medis terkait farmakovigilans dan menyamakan persepsi mengenai pentingnya pelaporan efek samping obat yang berkualitas dalam rangka pengawalan keamanan obat untuk menjamin keselamatan pasien;

meningkatkan jumlah dan kualitas laporan KTD/ESO di Indonesia untuk mendukung tercapainya profil keamanan obat beredar yang mencakup populasi di Indonesia dan meningkatkan keamanan penggunaan obat untuk mendukung keselamatan pasien dan kesehatan masyarakat secara luas.

- **Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW III Tahun 2025**

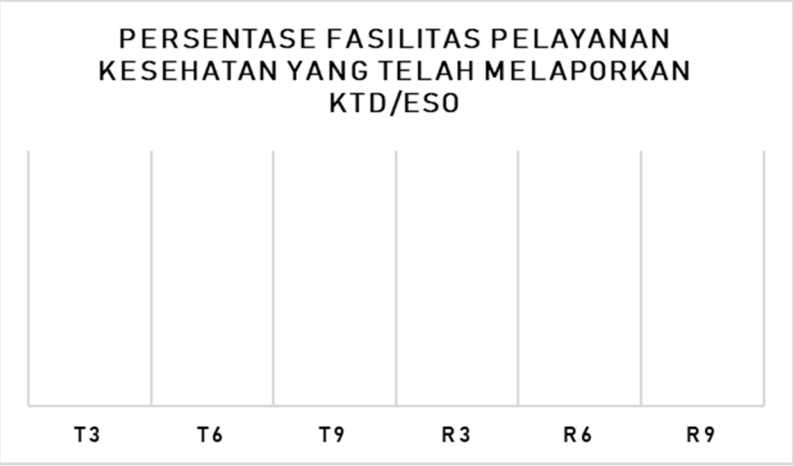
Tabel 20 Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW III IKU 2

NO	IKU	Target TW III	Realisasi	Capaian (%)
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO			

Pada Triwulan III Tahun 2025, target pelaporan KTD/ESO merupakan target tahunan, yaitu sebesar 26% fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO dari 90 fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang telah diberikan KIE Farmakovigilans. N Hingga akhir September 2025, belum terdapat tambahan fasyankes baru yang melaporkan KTD/ESO melalui sistem e-meso. Jumlah pelapor tetap sebanyak 26 fasyankes (28,89%), terdiri atas 23 rumah sakit, 2 puskesmas, dan 1 klinik.

Dengan demikian, capaian indikator pada Triwulan III tidak mengalami peningkatan dibandingkan capaian pada Triwulan II, dan progres realisasi masih berada pada posisi yang sama.

- **Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW Sebelumnya Tahun 2025**



Gambar 5 Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW Sebelumnya IKU 2

Jika dibandingkan dengan Triwulan II, capaian kinerja pada Triwulan III tidak menunjukkan perubahan (tetap 26 fasyankes). Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak ada tambahan pelaporan baru, baik dari fasilitas yang telah dibina sebelumnya maupun dari peserta baru hasil kegiatan Bimtek PV. Walaupun demikian, seluruh 26 fasyankes masih aktif mempertahankan pelaporan rutin melalui sistem e-meso, sehingga tidak terjadi penurunan partisipasi.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan Target Tahun 2025**

Tabel 21 Ketercapaian Realisasi TW III terhadap Target 2025 IKU 2

NO	IKU	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26,00	Tahunan	Tahunan	Tahunan

Hingga akhir Triwulan III, realisasi kinerja mencapai 28,89% dari target tahunan atau setara 26 dari 90 fasyankes yang ditetapkan sebagai target pelaporan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pembinaan dan monitoring pada periode ini belum menghasilkan penambahan fasyankes pelapor baru, namun demikian capaian TW. III sudah melebihi target tahunan sebesar 26%.

- **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja**

Stagnannya capaian kinerja pada Triwulan III disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- Masih dilaksanakan kegiatan pembinaan atau monitoring lanjutan setelah kegiatan Sharasehan PV pada April 2025 dengan cara pemberian informasi melalui group whats app.
- Pembinaan farmakovigilans tetap menjadi prioritas walaupun capaian TW. III sudah tercapai melebihi target tahunan.
-

Meskipun demikian, keberhasilan tetap terlihat pada aspek konsistensi pelaporan dari 26 fasyankes aktif, yang tetap menjaga keberlanjutan pemantauan KTD/ESO tanpa terjadi penurunan jumlah pelapor.

- **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Untuk mendorong peningkatan capaian indikator pada Triwulan IV dan mencapai target tahunan, diperlukan langkah-langkah perbaikan berikut:

1. Menjadwalkan kegiatan pembinaan dan monitoring tambahan pada fasyankes yang belum aktif melapor.
2. Memperluas komunikasi dan pendampingan teknis melalui koordinasi daring dengan rumah sakit, puskesmas, dan klinik yang telah mengikuti Bimtek PV.
3. Mengintegrasikan kegiatan farmakovigilans dengan kegiatan pengawasan obat dan vaksin, agar efisiensi kunjungan lapangan meningkat.
4. Meningkatkan dukungan koordinasi lintas sektor, seperti Dinas Kesehatan dan organisasi profesi kefarmasian, untuk mendorong kepatuhan pelaporan KTD/ESO.

- **Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja**

Tabel 22 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya IKU 2

Indikator	Pagu Anggaran(Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian IKU (%)	Tingkat Efisiensi
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	80,300,000	10,264,700	12.78		

Walaupun belum ada peningkatan capaian, penggunaan sumber daya selama Triwulan III tetap efisien karena tidak terdapat kegiatan lapangan besar yang memerlukan tambahan anggaran. Sumber daya difokuskan pada pemeliharaan pelaporan daring dan komunikasi koordinatif antar fasyankes, sehingga beban biaya relatif rendah. Namun, efisiensi ini belum sebanding dengan hasil kinerja, karena output pelaporan belum bertambah.

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Program yang menunjang capaian kinerja hingga TW III tetap berasal dari **Bimtek PV (4 Februari 2025)** dan **Sharasehan PV (25 April 2025)**. Kedua kegiatan tersebut menghasilkan 26 fasyankes pelapor aktif, **tidak ada kegiatan lanjutan pada TW III** yang dapat memperluas jumlah pelapor, namun demikian masih tetap dilakukan komunikasi untuk pemberian informasi melalui whatsapp.

- **Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

Laporan kinerja Triwulan III Tahun 2025 ini dimanfaatkan untuk mengevaluasi stagnasi capaian indikator serta menjadi dasar penyusunan rencana akselerasi pembinaan fasyankes pelapor pada Triwulan IV. Informasi ini juga digunakan dalam penyusunan laporan kinerja tahunan dan perencanaan kegiatan PV tahun 2026, khususnya untuk penguatan sistem pelaporan KTD/ESO dan peningkatan peran aktif fasyankes.

IKU 3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Pangan Olahan yang dimaksud adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga.

Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling.

Diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling adalah pengambilan sampel dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling yang meliputi kesesuaian target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan pengambilan Kesimpulan, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan sampling dan pengujian. Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya, antara lain : Tindak Lanjut terhadap produk TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa, Pembinaan terhadap Sarana Distribusi dan/atau Sarana Produksi, Pemeriksaan Sarana Produksi dan/atau Sarana Distribusi terhadap implementasi CPPOB/ CPerPOB terkait dengan hasil sampling dan pengujian produk TMS, Koordinasi pusat dan lintas UPT terkait penyampaian hasil uji produk TMS.

Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dihitung dari Kesesuaian Target Sampel, Kesesuaian Parameter Uji, Ketepatan Pengambilan Kesimpulan, Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel, Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian, serta Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya

Kegiatan sampling pangan olahan, pemeriksaan penandaan, pengujian dan tindak lanjut produk TMS dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pangan olahan dalam rangka menjamin produk pangan olahan yang beredar aman dan bermutu.

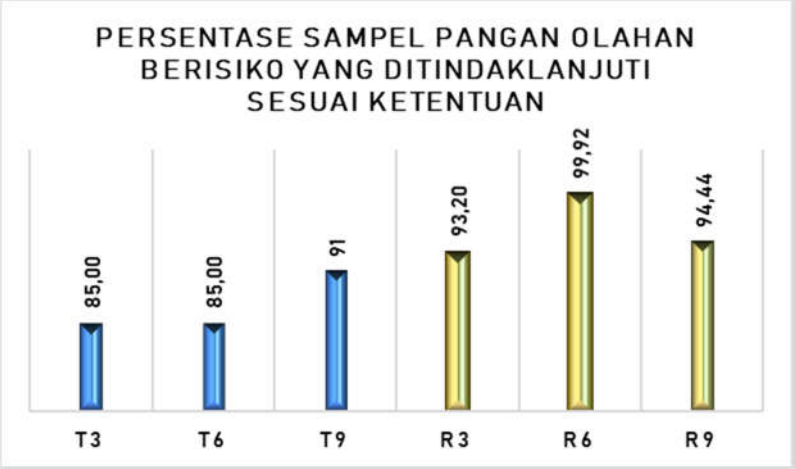
- **Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Kinerja TW III Tahun 2025**

Tabel 23 Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW III IKU 3

NO	IKU	Target TW III	Realisasi	Capaian (%)
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	94.44	103.78 Sangat Baik

Realisasi kinerja TW III tahun 2025 sebesar **94,44%**, melampaui target TW III sebesar **91%**. Dengan capaian sangat baik di angka 103,78%.

- **Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW Sebelumnya Tahun 2025**



Gambar 6 Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW Sebelumnya IKU 3

Jika dibandingkan dengan realisasi kinerja TW II sebesar **99,92%**, maka kinerja TW III mengalami sedikit peningkatan menjadi **94,44%**. Hal ini menunjukkan konsistensi pelaksanaan sampling dan pengujian serta tindak lanjut hasil sampling dan pengujian yang relatif stabil dari triwulan sebelumnya.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan Target Tahun 2025**

Tabel 24 Ketercapaian Realisasi TW III terhadap Target 2025 IKU 3

NO	IKU	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	94,44	103.78	Tercapai/ Melampaui

Secara kumulatif hingga TW III, realisasi kinerja mencapai **94,44%** dari target tahunan **91%**. Hal ini menandakan bahwa pelaksanaan pengawasan sampel pangan olahan berisiko telah berjalan sangat baik dan melebihi target tahunan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

- **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja**

  Keberhasilan capaian kinerja disebabkan oleh peningkatan intensitas kegiatan sampling pangan olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang. Pada TW III, jumlah sampel yang telah dilakukan pengujian mencapai **550 sampel dari target 643 sampel** atau sebesar **85,54%**. Selain itu, koordinasi yang baik antara PIC Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan (Diswasdar), Pusat Data Dan Informasi (Pusdatin) serta tim sampling dan pengujian BBPOM di Semarang mendukung pelaksanaan sampling dan pengujian yang efektif. Namun, masih terdapat kendala berupa beberapa sampel yang tidak sesuai pedoman sampling dan keterlambatan input data ke dalam sistem SIPT karena belum tersedia parameter uji yang sesuai.

- **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

  Untuk menjaga konsistensi capaian kinerja dan memperbaiki kendala yang ada, dilakukan koordinasi lanjutan dengan PIC Diswasdar Pangan Olahan dan Pusdatin guna memastikan kelengkapan dan kesesuaian data hasil sampling di SIPT serta evaluasi terhadap pedoman sampling agar lebih adaptif dengan kondisi di lapangan.

- **Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja**

Tabel 25 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya IKU 3

Indikator	Pagu Anggaran(Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian IKU (%)	Tingkat Efisiensi
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	209,021,463	169,306,488	81.00	103.78	Efisien

Realisasi anggaran hingga TW III mencapai **81%** dengan kriteria **efisien.** Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya telah dilakukan

secara efektif dan sesuai kebutuhan operasional, dengan hasil kinerja yang optimal dibandingkan alokasi anggaran yang digunakan.

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Peningkatan capaian kinerja pada Triwulan III dipengaruhi oleh beberapa faktor keberhasilan, antara lain:

- **Pelaksanaan sampling (targeted sampling)** terhadap produk pangan berisiko tinggi berjalan sesuai dengan renlak dan time lain yang ditentukan.
- **Peningkatan kapasitas laboratorium dan efisiensi waktu pengujian**, yang berpengaruh terhadap kesesuaian parameter pengujian dan percepatan timeline/waktu pengujian serta pelaporan pengujian.
- **Koordinasi bidang Pengawasan dan Laboratorium** yang semakin kuat, sehingga pelaksanaan sampling dan pengujian serta tindak lanjut produk pangan olahan yang tidak memenuhi syarat mutu dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman Sampling dan Pengujian.

- **Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

Laporan kinerja ini dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi efektivitas pelaksanaan pengawasan sampel pangan olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang, serta sebagai dasar perbaikan strategi sampling dan tindak lanjut hasil pengawasan untuk periode berikutnya.

IKU 4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar

Sampel KLB keracunan pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan yang berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengkonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM

dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/ atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L).

Sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB keracunan pangan berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk Pangan Olahan Dalam Kemasan (PODK) juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM.

KLB keracunan pangan bersifat insidental dan tidak terprediksi sehingga diperlukan koordinasi yang baik dan intensif antar lintas sektor termasuk dalam penentuan parameter pengujian dan proses pengujian sehingga sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

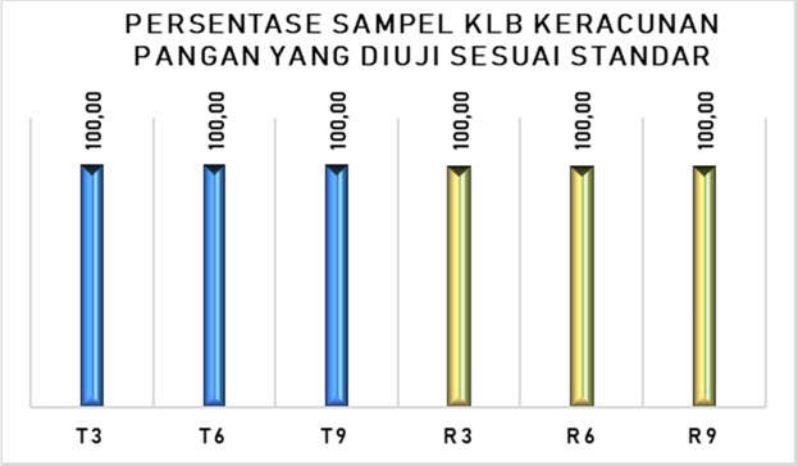
- **Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Kinerja TW III Tahun 2025**

Tabel 26 Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW III IKU 4

NO	IKU	Target TW III	Realisasi	Capaian (%)
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00	100,00	100,00
				Baik

Realisasi kinerja TW III tahun 2025 mencapai 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh sampel KLB keracunan pangan yang diterima telah diuji sesuai dengan standar yang berlaku, tanpa adanya penurunan kualitas maupun ketertinggalan jadwal pemeriksaan.

- **Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW Sebelumnya Tahun 2025**



Gambar 7 Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW Sebelumnya IKU 4

Dibandingkan dengan realisasi TW II yang juga sebesar 100%, capaian kinerja TW III menunjukkan konsistensi dalam pelaksanaan kegiatan uji sampel KLB. Meskipun jumlah kasus bervariasi antar bulan, kualitas dan standar pengujian tetap terjaga dengan baik.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan Target Tahun 2025**

Tabel 27 Ketercapaian Realisasi TW III terhadap Target 2025 IKU 4

NO	IKU	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00	100,00	100,00	Tercapai/ Melampaui

Secara kumulatif hingga TW III, capaian kinerja mencapai 100% dari target tahunan 100%, menandakan bahwa seluruh kegiatan pemeriksaan sampel KLB telah dilakukan sesuai dengan protokol uji yang berlaku. Tidak terdapat deviasi dari target tahunan, yang berarti kegiatan berjalan sesuai perencanaan.

- **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja**

Keberhasilan capaian kinerja dipengaruhi oleh kesiapsiagaan petugas dalam merespons laporan KLB pangan yang diteruskan oleh Dinas Kesehatan dan instansi terkait. Pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh sampel yang masuk dan memenuhi kriteria, seperti pada kasus Ikky Jeli, Seblak dan mie kuning, Susu KUN/minuman mengandung susu, dan Boromon cookies.

Kendala utama yang dihadapi adalah tidak selalu adanya kasus KLB setiap bulan, sehingga volume pemeriksaan tidak konstan. Namun, hal ini tidak

memengaruhi tingkat pencapaian indikator karena setiap kasus yang muncul tetap tertangani sesuai standar.

- **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**
  Upaya perbaikan diarahkan pada peningkatan koordinasi dengan DKK, Labkesda, dan Pusdatin agar setiap potensi kasus KLB dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti dengan pengujian sampel. Selain itu, perlu penguatan komunikasi antarinstansi untuk memastikan kejelasan klasifikasi kasus (apakah termasuk KLB atau MBG) serta mekanisme rujukan laboratorium agar tidak terjadi keterlambatan pemeriksaan.
- **Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja**

Tabel 28 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya IKU 4

Indikator	Pagu Anggaran(Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian IKU (%)	Tingkat Efisiensi
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	4,760,000	3,514,610	73.84	100.00	Efisien

Realisasi anggaran hingga TW III tercatat 73,84% dengan tingkat efisiensi 95% (efisien). Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya telah optimal untuk mendukung kegiatan pemeriksaan sampel KLB yang jumlahnya fluktuatif, tanpa pemborosan anggaran.

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**
  Kegiatan yang paling berperan dalam keberhasilan indikator ini adalah pengawasan dan pengujian cepat terhadap sampel KLB pangan yang diterima dari Dinas Kesehatan serta laboratorium daerah. Prosedur pengujian dilakukan sesuai standar metode dan parameter yang ditetapkan, termasuk uji kimia, mikrobiologi, dan logam berat.
- **Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**
  Laporan kinerja ini dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi kesiapsiagaan pengawasan pangan terhadap kasus KLB serta dasar penyusunan langkah peningkatan koordinasi antarinstansi dalam pengendalian risiko keamanan pangan di wilayah kerja BBPOM di Semarang.

IKU 5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Kategori pangan PIRT yang disampling mengacu pada peraturan BPOM Nomor 4 tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga yang terdiri dari 11 kategori

pangan. Penetapan proporsi per kategori target pangan PIRT yang disampling ditentukan dengan *risk based* berdasarkan beberapa aspek seperti PIRT yang beredar, potensi risiko untuk produk asal hewan dan ikan, Riwayat temuan produk tidak memenuhi syarat, produk yang berpotensi dengan BTP maksimal level, potensi penggunaan bahan berbahaya/ bahan tidak diizinkan pada pangan, dan potensi terhadap target konsumen tertentu. Selanjutnya jumlah dan kategori sampel pangan PIRT yang disampling sesuai dengan prioritas sampling yang ditelah ditetapkan dan disepakati. Pengambilan sampel pangan PIRT dilakukan dari peredaran atau sarana distribusi pangan yang ada pada wilayah kerja Balai Besar POM di Semarang. Jadwal sampling PIRT oleh UPT BPOM dilakukan pada TW I tahun berjalan agar tidak terjadi sampling berulang pada produk yang sama dengan Dinas Kesehatan.

Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dihitung berdasarkan rumus = 20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F

dimana

A adalah kesesuaian target PIRT yang diperoleh dari : (A1 + A2) /2

A1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

A2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

B adalah kesesuaian parameter uji yang dihitung dari : (Jumlah sampel sesuai/ Total Sampel PIRT) X 100%

C adalah ketepatan pengambilan sampel yang dihitung dari : (Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

D adalah ketepatan waktu pengambilan sampel dihitung dari : (Jumlah sampel diambil di TW 1/ Total Sampel PIRT) X 100%

E adalah ketepatan waktu pelaporan dihitung dari (Jumlah sampel tepat waktu/ Total Sampel PIRT) X 100%

F adalah tindak lanjut sampel PIRT dihitung dari : (Jumlah Sampel PIRT yang ditindaklanjuti/Total jumlah sampel yang TMS) x100%

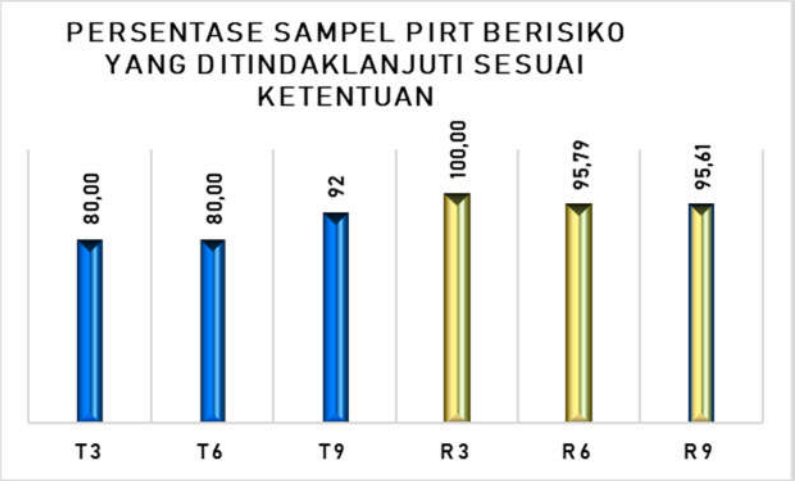
- **Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW III Tahun 2025**

Tabel 29 Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW III IKU 5

NO	IKU	Target TW III	Realisasi	Capaian (%)
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92	95.61	103,92 Sangat Baik

Pada Triwulan III Tahun 2025, target kinerja ditetapkan sebesar **92%**, sedangkan realisasi capaian mencapai **95,61%**, atau **103,92%** dari target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tindak lanjut terhadap sampel PIRT berisiko telah melebihi target yang direncanakan.

- **Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW Sebelumnya Tahun 2025**



Gambar 8 Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW Sebelumnya IKU 5

Jika dibandingkan dengan capaian pada Triwulan II, kinerja Triwulan III meski menunjukkan **penurunan tetapi d**ari sisi jumlah tindak lanjut maupun ketepatan waktu pelaksanaan. Peningkatan ini menggambarkan adanya perbaikan koordinasi lintas bidang dalam memastikan setiap hasil pengawasan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan Target Tahun 2025**

Tabel 30 Ketercapaian Realisasi TW III terhadap Target 2025 IKU 5

NO	IKU	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92	95,61	103.92	Tercapai/ Melampaui

Realisasi kinerja sampai Triwulan III (95,79%) telah melampaui target tahunan sebesar 92%, sehingga capaian terhadap target tahunan mencapai

104,12%. Dengan demikian, indikator ini berpotensi mencapai target akhir tahun dengan tingkat konsistensi yang baik.

- **Analisis Penyebab Keberhasilan/Peningkatan Kinerja**

  Keberhasilan capaian ini dipengaruhi oleh **pemenuhan target sampel PIRT sebesar 100,89%**, **Kesesuaian Parameter Uji 100%**, **Ketepatan Pengambilan Kesimpulan 100%**, **Ketepatan Waktu Pelaporan 100%**, dan **Tindak lanjut sampel PIRT 100%**. Meskipun **ketepatan waktu pengambilan sampel baru mencapai 56,14%**, namun hal tersebut tidak berdampak signifikan terhadap hasil keseluruhan karena adanya optimalisasi proses pelaporan dan tindak lanjut oleh petugas.

- **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

  Untuk mempertahankan capaian kinerja yang baik, dilakukan **peningkatan efisiensi waktu pengambilan sampel**. Selain itu, akan diperkuat **koordinasi antar bidang** dan **monitoring pelaksanaan tindak lanjut** agar proses dapat dilakukan lebih cepat tanpa mengurangi ketepatan hasil pengujian.

- **Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja**

Tabel 31 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya IKU 5

Indikator	Pagu Anggaran(Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian IKU (%)	Tingkat Efisiensi
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	208,958,769	169,255,706	81.00	103.92	Efisien

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya tercatat sebesar **95% (efisien)** dengan **realisasi anggaran 81%**. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja yang tinggi dapat diperoleh dengan penggunaan anggaran yang relatif hemat dan terukur.

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

  Capaian indikator ini didukung oleh kegiatan **pengawasan post-market pangan olahan dan PIRT**, termasuk **pengambilan sampel, pengujian laboratorium, dan tindak lanjut hasil pengawasan**. Kegiatan pendampingan dan refreshment terhadap petugas sampling turut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelaporan dan tindak lanjut.

- **Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

  Laporan kinerja ini dimanfaatkan sebagai **bahan evaluasi periodik** bagi

pimpinan untuk menilai efektivitas pelaksanaan pengawasan produk PIRT di wilayah kerja BBPOM di Semarang. Selain itu, hasilnya menjadi dasar dalam **penyesuaian target dan perencanaan kegiatan pengawasan triwulan berikutnya**.

IKU 6. Persentase keputusan rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

Keputusan/ rekomendasi pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/ distribusi obat dan makanan. Baik terhadap sarana yang Memenuhi Ketentuan Maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Keputusan/ rekomendasi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/ Pencabutan Ijin/ Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus dan pengaduan konsumen. Stakeholder yang dimaksud meliputi pelaku usaha dan lintas ektor.

Tindak lanjut yang cepat dan tepat dari stakeholder terkait keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan sangat penting untuk mencegah risiko kesehatan dan risiko lainnya yang dapat ditimbulkan oleh proses produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang tidak sesuai ketentuan.

- **Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW III Tahun 2025**

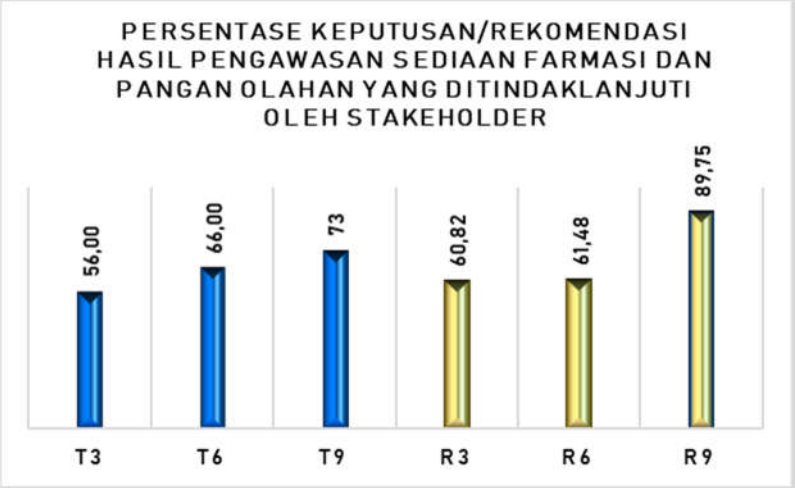
Tabel 32 Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW III IKU 6

NO	IKU	Target TW III	Realisasi	Capaian (%)
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	76	89.75	118.09 Sangat Baik

Pada Triwulan III Tahun 2025, target kinerja ditetapkan sebesar **76%**, sedangkan realisasi capaian mencapai **89,75%** atau **118,09%** dari target triwulanan. Hal ini menunjukkan bahwa tindak lanjut hasil pengawasan telah

berjalan lebih cepat dari perkiraan dan menunjukkan komitmen kuat dari pelaku usaha serta stakeholder lintas sektor dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BBPOM di Semarang.

- **Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW sebelumnya Tahun 2025**



Gambar 9 Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW Sebelumnya IKU 6

Dibandingkan dengan kinerja Triwulan II (61,48%), terjadi peningkatan sebesar **28,27 poin persentase** pada Triwulan III. Kenaikan ini mencerminkan meningkatnya efektivitas tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan, terutama setelah dilaksanakannya **desk CAPA** dan **bimbingan teknis IPCPPOB** yang mendorong pelaku usaha untuk lebih cepat menindaklanjuti temuan pengawasan.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan Target Tahun 2025**

Tabel 33 Ketercapaian Realisasi TW III terhadap Target 2025 IKU 6

NO	IKU	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	86,00	89,75	104.36	Tercapai/ Melampaui

Dari target tahunan sebesar **86%**, realisasi hingga Triwulan III sudah mencapai **104,36%** dari target tahun berjalan. Capaian ini menunjukkan bahwa indikator telah **melampaui target tahunan**, bahkan sebelum memasuki Triwulan IV, menandakan efektivitas langkah tindak lanjut hasil pengawasan di berbagai sektor.

- **Analisis Penyebab Keberhasilan/Peningkatan Kinerja**

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sampai dengan September

2025, dari 566 rekomendasi hasil pengawasan yang disampaikan kepada pelaku usaha, sebanyak 450 telah ditindaklanjuti melalui CAPA, dan seluruh rekomendasi lintas sektor (100%) juga telah ditindaklanjuti. Faktor pendorong keberhasilan ini antara lain konsistensi pelaksanaan monev CAPA, peningkatan pembinaan sarana produksi, serta pendampingan teknis dalam penyusunan CAPA sesuai prinsip Good Manufacturing Practices (GMP).

- **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

  Ke depan, BBPOM di Semarang akan terus melaksanakan monitoring berkala terhadap pelaku usaha yang belum menyampaikan CAPA serta memperkuat mekanisme pengingat dan pendokumentasian tindak lanjut. Selain itu, akan dilakukan bimbingan teknis lanjutan untuk memastikan CAPA yang disusun benar-benar efektif dan berorientasi pada perbaikan sistem mutu di sarana produksi.

- **Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja**

Tabel 34 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya IKU 6

Indikator	Pagu Anggaran(Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian IKU (%)	Tingkat Efisiensi
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	4,130,000	0	0.00	118.09	

Walaupun realisasi anggaran pada TW III masih 0%, kinerja berhasil melampaui target berkat optimalisasi kegiatan rutin pengawasan, koordinasi lintas bidang, serta dukungan internalisasi program monev CAPA. Hal ini menunjukkan bahwa capaian indikator diperoleh dengan efisiensi yang belum dapat ditentukan karena kegiatan ini berjalan tanpa anggaran atau menggunakan anggaran lain yang tidak di alokasikan ke iku ini.

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja**

  Program yang berkontribusi terhadap keberhasilan indikator ini meliputi Desk CAPA, monev berkala sarana produksi, dan bimbingan teknis IPCPPOB untuk sarana pangan, obat tradisional, dan kosmetik. Kegiatan-kegiatan tersebut terbukti meningkatkan tingkat kepatuhan pelaku usaha dan mempercepat proses tindak lanjut hasil pengawasan.

- **Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

  Laporan kinerja ini dimanfaatkan oleh pimpinan BBPOM di Semarang sebagai dasar dalam evaluasi efektivitas pembinaan, penentuan prioritas pengawasan pada TW berikutnya, serta perumusan strategi peningkatan tindak lanjut hasil pengawasan agar capaian target tahunan tetap terjaga dan berkelanjutan.

IKU 7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi:

1) Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca, dan Rumah Sakit).
2) Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi industri obat tradisional, Industri Ekstrak bahan alam, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha mikro obat tradisional, industri suplemen kesehatan
3) Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan

Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Perhitungan Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan menggunakan rumus:

= rata-rata dari % Sarprod Obat, % Sarprod Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, % Sarprod Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

% Sarprod Obat = Rata-rata (A+B+C)

A. Kesesuaian sasaran dan cakupan pengawasan

= (Jumlah sarana yang diperiksa sesuai dengan sasaran dan cakupan target tahunan/Jumlah sasaran dan cakupan target tahunan) X 100%

B. Jumlah pelaksanaan inspeksi

= (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target tahunan) X 100%

C. Kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut

= (Nilai kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut/100) X100%.

% Sarprod OBA dan SK = Rata-rata (A+B+C+D)

1. Pelaksanaan inspeksi

   = (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target tahunan) X 100%

2. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat

   = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%

3. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi

   = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana / jumlah sarana yang selesai diperiksa/inspeksi) × 100%

4. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana

   = (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%

% Sarprod Kosmetik = Rata-rata (A+B+C+D)

1. Pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target tahunan) X 100%
2. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%
3. akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%

4. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%

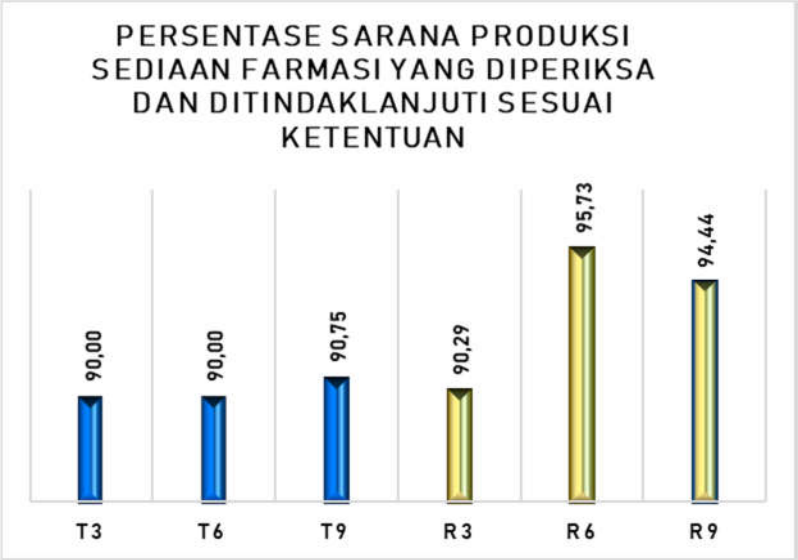
- **Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW III Tahun 2025**

Tabel 35 Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW III IKU 7

NO	IKU	Target TW III	Realisasi	Capaian (%)
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	94.44	104.51 Sangat Baik

Pada Triwulan III Tahun 2025, target kinerja ditetapkan sebesar **90,75%**, sementara realisasi capaian mencapai **94,44%**, atau **104,51% dari target triwulanan**. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi telah melampaui target yang ditetapkan, dengan tingkat tindak lanjut hasil pemeriksaan yang juga sesuai ketentuan.

- **Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW sebelumnya Tahun 2025**



Gambar 10 Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW Sebelumnya IKU 7

Jika dibandingkan dengan capaian Triwulan II sebesar **95,73%**, kinerja Triwulan III menunjukkan hasil yang relatif stabil dengan sedikit penurunan sebesar **1,29 poin persentase**. Meskipun demikian, capaian ini tetap berada di atas target triwulanan dan memperlihatkan konsistensi kinerja pengawasan terhadap sarana produksi sediaan farmasi di wilayah kerja BBPOM di Semarang.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan Target Tahun 2025**

Tabel 36 Ketercapaian Realisasi TW III terhadap Target 2025 IKU 7

NO	IKU	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,75	94,44	104.07	▲ Tercapai/ Melampaui

- Dari target tahunan sebesar **90,75%**, realisasi hingga Triwulan III mencapai **104,51% dari target tahun berjalan**, menandakan bahwa indikator ini telah melampaui target tahunan bahkan sebelum Triwulan IV dimulai. Hal tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan tindak lanjut hasilnya oleh bidang terkait.

- **Analisis Penyebab Keberhasilan/Peningkatan Kinerja**

  Hingga September 2025, **pemeriksaan sarana produksi telah mencapai 94% (49 sarana dari target tahunan 52 sarana)**. Secara rinci, capaian per sektor menunjukkan:

  - **Industri Farmasi (IF): 71,43%** atau 5 dari 7 sarana, menunggu jadwal inspeksi pusat;
  - **IOT/UKOT/UMOT: 96%** (25 dari 26 sarana);
  - **IKOS: 107,14%** (15 dari 14 sarana);
  - **ISK: 100%** (5 dari 5 sarana).
  - Seluruh hasil pemeriksaan telah dilaporkan melalui aplikasi **SIPT**, dan kesesuaian tindak lanjut menunjukkan kepatuhan yang baik dari pelaku usaha terhadap hasil pemeriksaan BBPOM di Semarang.

- **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

  Upaya perbaikan dilakukan melalui koordinasi aktif dengan pusat untuk pelaksanaan inspeksi yang dijadwalkan pada Oktober 2025. Selain itu, rencana pelatihan stemsel mandiri yang sebelumnya akan diselenggarakan oleh balai dibatalkan karena kebutuhan pelatihan telah terpenuhi melalui keikutsertaan dua inspektur dalam Pelatihan Produk Biologi Steril yang diselenggarakan oleh pusat. BBPOM di Semarang juga terus memperkuat kapasitas SDM melalui partisipasi inspektur dan spesialis dalam Workshop dan Pelatihan CPOB 2025, mencakup topik Laplins, Radiofarmaka, Produk Biologi, GRP, dan CPOB Dasar.

- **Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja**

Tabel 37 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya IKU 7

Indikator	Pagu Anggaran(Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian IKU (%)	Tingkat Efisiensi
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	131,710,500	106,479,618	80.84	104.07	Efisien

Dengan realisasi anggaran sebesar 80,84% dan capaian IKU **104,07%**, indikator ini menunjukkan efisiensi yang sangat baik dengan tingkat efisiensi **0,95 (kategori efisien)**. Hal ini menandakan bahwa sumber daya yang tersedia telah digunakan secara optimal untuk mencapai target yang melampaui ekspektasi.

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja**

  Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh kegiatan pengawasan dan tindak lanjut sarana produksi secara rutin, pelaksanaan pelatihan teknis dan workshop CPOB, serta partisipasi aktif inspektur dalam Pelatihan Produk Biologi Steril yang meningkatkan kompetensi dalam pengawasan industri farmasi berisiko tinggi. Kegiatan tersebut berkontribusi langsung pada peningkatan akurasi pemeriksaan dan kualitas rekomendasi tindak lanjut.

- **Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

  Laporan kinerja ini dimanfaatkan oleh pimpinan dan bidang pengawasan BBPOM di Semarang sebagai dasar dalam evaluasi capaian pengawasan sediaan farmasi, penentuan prioritas inspeksi berikutnya, serta perencanaan peningkatan kompetensi SDM pengawasan. Hasil analisis juga digunakan sebagai bahan masukan bagi pusat dalam penyusunan jadwal inspeksi sertifikasi dan penguatan sistem pembinaan industri farmasi di wilayah Jawa Tengah.

IKU 8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) selaku otoritas keamanan pangan, senantiasa melakukan pengawasan pangan olahan baik sebelum beredar (pre market) maupun setelah pangan beredar di masyarakat (post-market control) terhadap pemenuhan persyaratan keamanan, mutu, dan gizi pangan. Pengawasan sarana produksi pangan olahan memiliki peran strategis karena selain untuk perlindungan kesehatan konsumen akan pangan olahan yang

layak, aman, bermutu dan bergizi, juga berperan dalam meningkatkan daya saing mutu produk di pasar lokal maupun global.

Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dihitung dengan membandingkan jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan jumlah seluruh sarana yang diperiksa.

Tujuan dari indikator persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah untuk mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku, termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan.

Sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sarana produksi pangan olahan yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD ataupun PIRT di wilayah kerja Balai Besar POM di Semarang yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh UPT, dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi ketepatan waktu tindak lanjut dan kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan.

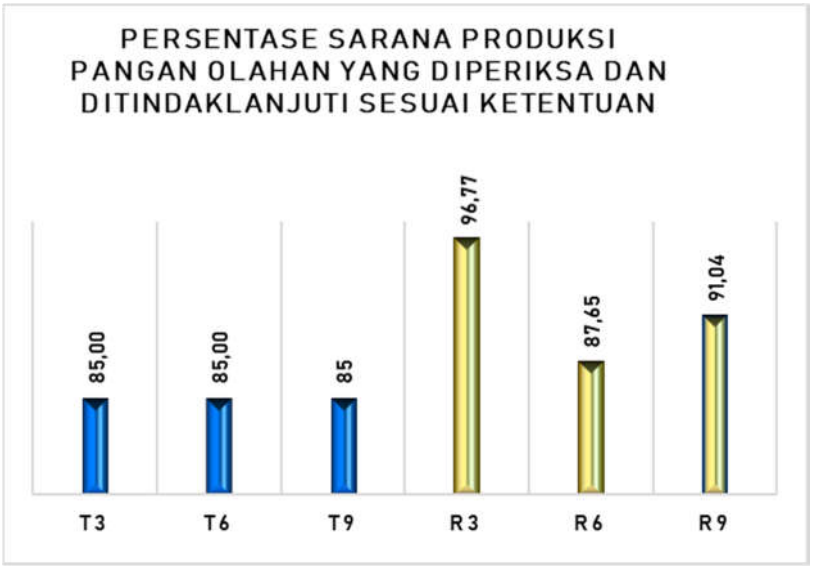
- **Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW III Tahun 2025**

Tabel 38 Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW III IKU 8

NO	IKU	Target TW III	Realisasi	Capaian (%)
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	91.04	107.11 Sangat Baik

Pada Triwulan III Tahun 2025, target kinerja ditetapkan sebesar **85%**, dengan realisasi mencapai **91,04%**, atau **107,11% dari target triwulanan**. Capaian ini menunjukkan bahwa pemeriksaan sarana produksi pangan olahan telah melampaui target yang direncanakan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas tindak lanjut hasil pengawasan.

- **Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW sebelumnya Tahun 2025**



Gambar 11 Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW Sebelumnya IKU 8

Jika dibandingkan dengan capaian pada Triwulan II yang mencapai **87,65%**, maka kinerja pada Triwulan III meningkat sebesar **3,39 poin persentase**. Kenaikan ini mengindikasikan peningkatan konsistensi pelaksanaan pemeriksaan serta perbaikan pada aspek ketepatan waktu dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan Target Tahun 2025**

Tabel 39 Ketercapaian Realisasi TW III terhadap Target 2025 IKU 8

NO	IKU	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	91,04	107.11	Tercapai/ Melampaui

Target tahunan indikator ini ditetapkan sebesar **85%**, dan hingga Triwulan III telah tercapai **107,11% dari target tahunan**. Artinya, pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan sudah melampaui sasaran yang direncanakan untuk satu tahun penuh, menunjukkan efektivitas pelaksanaan kegiatan pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Semarang.

- **Analisis Penyebab Keberhasilan/Peningkatan Kinerja**

Keberhasilan ini didukung oleh capaian ketepatan waktu pemeriksaan sebesar 89,13%, ketepatan tindak lanjut 90,22%, dan evaluasi ketepatan grading mencapai 96,74%. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pengawasan dilakukan secara tepat waktu, tindak lanjut hasil pemeriksaan dilaksanakan sesuai ketentuan, dan hasil evaluasi grading menunjukkan

konsistensi dalam penilaian mutu sarana. Peningkatan capaian juga ditunjang oleh sistem pelaporan dan koordinasi internal yang semakin baik antara seksi terkait.

- **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

  BBPOM di Semarang tetap berupaya mempertahankan kinerja ini melalui penguatan sistem pemantauan dan validasi hasil pemeriksaan, serta memastikan seluruh hasil tindak lanjut dilakukan sesuai standar waktu yang telah ditetapkan. Koordinasi dengan pelaku usaha juga terus diperkuat untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hasil pengawasan.
- **Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja**

Tabel 40 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya IKU 8

Indikator	Pagu Anggaran(Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian IKU (%)	Tingkat Efisiensi
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	131,710,500	106,479,618	80.84	107.11	Efisien

Dengan realisasi anggaran sebesar 80,84% dan capaian kinerja 107,11%, indikator ini tergolong efisien dengan nilai efisiensi 0,95. Artinya, penggunaan sumber daya telah dilakukan secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal tanpa pemborosan anggaran.

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja**

  Pencapaian ini ditunjang oleh kegiatan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan secara rutin dan terjadwal, pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan yang cepat dan tepat, serta peningkatan kapasitas SDM pengawas melalui pelatihan dan pembinaan teknis terkait pengawasan pangan olahan. Tidak adanya kendala signifikan juga turut memperkuat stabilitas capaian indikator ini.
- **Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

  Laporan kinerja ini dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi efektivitas kegiatan pengawasan pangan olahan, sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan rencana tindak lanjut dan prioritas pemeriksaan periode berikutnya. Selain itu, laporan digunakan sebagai acuan pembinaan terhadap industri pangan olahan untuk memastikan pemenuhan standar keamanan dan mutu produk di wilayah pengawasan BBPOM di Semarang.

IKU 9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Pemeriksaan fasilitas distribusi Sediaan Farmasi bertujuan untuk memastikan bahwa sediaan farmasi dikelola sesuai dengan standar yang ditetapkan sehingga mutu dan keamanan sediaan farmasi tetap terjaga hingga ke tangan konsumen.

Sarana distribusi Sediaan Farmasi adalah sarana/ fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi :

1. Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian.
2. Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer.
4. Fasilitas distribusi sediaan farmasi meliputi fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan notifikasi.

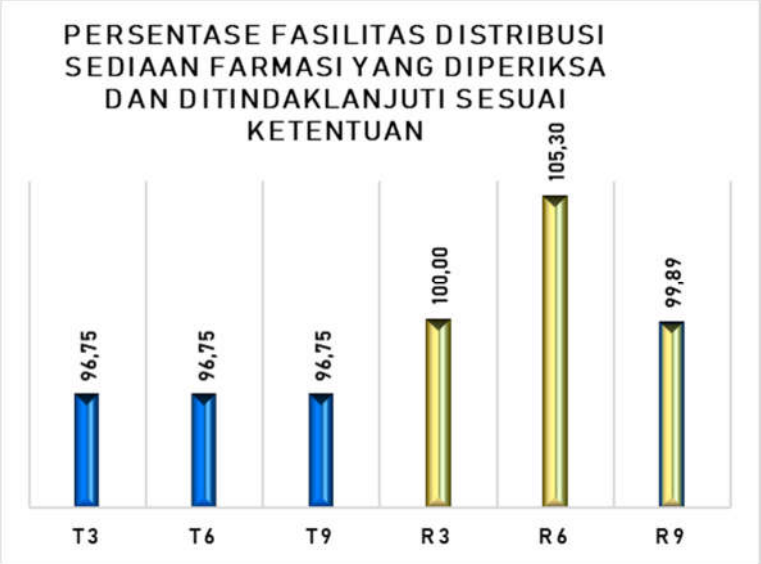
- **Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW III Tahun 2025**

Tabel 41 Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW III IKU 9

NO	IKU	Target TW III	Realisasi	Capaian (%)
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,75	99,89	103,25 Sangat Baik

Pada Triwulan III Tahun 2025, target kinerja ditetapkan sebesar **96,75%**, dengan realisasi **99,89%**, atau dengan capaian **103,25% dari target triwulanan**. Capaian ini menunjukkan bahwa pemeriksaan fasilitas distribusi sediaan farmasi telah melampaui target yang direncanakan, baik dari segi kuantitas sarana yang diperiksa maupun ketepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan.

- **Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW Sebelumnya Tahun 2025**



Gambar 12 Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW Sebelumnya IKU 9

Jika dibandingkan dengan realisasi pada Triwulan II yang mencapai **105,3%**, kinerja Triwulan III mengalami penurunan sebesar **−2,05 poin persentase**. Namun demikian, capaian tersebut masih berada di atas 100% dari target, yang berarti kinerja pengawasan tetap terjaga dan stabil pada tingkat sangat baik.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan Target Tahun 2025**

Tabel 42 Ketercapaian Realisasi TW III terhadap Target 2025 IKU 9

NO	IKU	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,75	99,89	103.25	▲ Tercapai/ Melampaui

Target tahunan indikator ini ditetapkan sebesar **96,75%**, dan hingga Triwulan III telah mencapai **103,25% dari target tahunan**. Artinya, pemeriksaan fasilitas distribusi sediaan farmasi telah melampaui sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2025, menunjukkan bahwa pengawasan terhadap distribusi obat dilaksanakan secara efektif dan berkesinambungan.

- **Analisis Penyebab Keberhasilan/Peningkatan Kinerja**

Keberhasilan ini didorong oleh pelaksanaan pemeriksaan yang terjadwal dan terkendali, serta disiplin tim pengawasan dalam memastikan tindak

lanjut hasil pemeriksaan dilakukan tepat waktu. Pemeriksaan sarana distribusi dilaksanakan sesuai target sampai dengan September 2025, dengan koordinasi yang baik antara seksi pengawasan dan pelaporan. Selain itu, penggunaan Sistem Informasi Pengawasan Terpadu (SIPT) turut mempercepat proses verifikasi dan pemantauan.

- **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

  Untuk meningkatkan kinerja pada periode berikutnya, BBPOM di Semarang akan memperkuat pengawasan berbasis risiko dengan memprioritaskan sarana berpotensi pelanggaran tinggi, meningkatkan pembinaan terhadap pelaku usaha, dan memperluas cakupan verifikasi tindak lanjut hasil pemeriksaan melalui koordinasi lintas bidang. Pendekatan ini diharapkan dapat mempertahankan tingkat kepatuhan distributor farmasi yang sudah baik.

- **Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja**

Tabel 43 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya IKU 9

Indikator	Pagu Anggaran(Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian IKU (%)	Tingkat Efisiensi
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	616,270,000	309,026,356	50.14	103,25	Tidak Efisien

Dengan **realisasi anggaran sebesar 50,14%** dan **capaian kinerja 103,25%**, kegiatan ini masuk kategori **tidak efisien** dengan nilai efisiensi **0,86**. Meskipun efektivitas pencapaian target sangat baik, rasio antara penggunaan sumber daya dan output perlu ditingkatkan melalui optimalisasi perencanaan anggaran dan penguatan kolaborasi internal agar biaya pelaksanaan lebih proporsional terhadap hasil.

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja**

  Keberhasilan indikator ini didukung oleh program pemeriksaan sarana distribusi yang dilaksanakan rutin, kegiatan monitoring berkala, dan koordinasi intensif antar seksi pengawasan serta bidang informasi dan data. Selain itu, tidak adanya kendala signifikan selama periode pelaksanaan mendukung stabilitas dan konsistensi kinerja pengawasan.

- **Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

  Laporan kinerja ini dimanfaatkan sebagai alat evaluasi efektivitas pelaksanaan pengawasan distribusi sediaan farmasi serta dasar untuk menetapkan strategi pengawasan berikutnya. Selain itu, laporan ini digunakan sebagai acuan dalam pembinaan dan peningkatan kepatuhan distributor farmasi terhadap ketentuan yang berlaku, guna menjamin mutu dan keamanan produk farmasi yang beredar di wilayah pengawasan BBPOM di Semarang.

IKU 10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dihitung berdasarkan 3 (tiga) komponen yaitu pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa; ketepatan waktu pelaporan; dan kesesuaian tindak lanjut. Tindak lanjut pemeriksaan dihitung terhadap tindak lanjut pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.

Pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan dan tindak lanjutnya merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pangan olahan di wilayah BBPOM di Semarang. Sarana distribusi pangan olahan/ritel merupakan garda terdepan keamanan dan mutu pangan di tingkat peredaran sehingga menjadi bagian tidak terpisahkan dari penjaminan keamanan pangan. Sarana distribusi pangan olahan yang menjadi target pemeriksaan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, penjualan dan/atau penyaluran pangan olahan. Sesuai definisi tersebut maka yang menjadi target pemeriksaan meliputi toko, minimarket, swalayan, grosir, distributor, dan importir. Badan POM telah menerbitkan pedoman sebagai acuan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan yaitu Pedoman Cara Ritel Pangan yang Baik (Toko Modern) tahun 2011 dan Pedoman Cara Ritel Pangan yang Baik di Pasar Tradisional tahun 2015.

- **Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW III Tahun 2025**

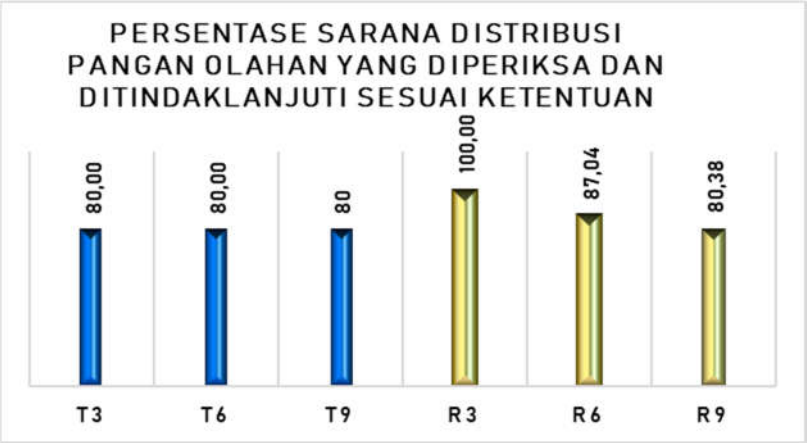
Tabel 44 Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW III IKU 10

NO	IKU	Target TW III	Realisasi	Capaian (%)
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai	80	80.38	100,48 Sangat Baik

Pada Triwulan III Tahun 2025, target kinerja ditetapkan sebesar **80%**, dengan realisasi sebesar **80,38%**, atau mencapai **100,48% dari target triwulanan**. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan

sarana distribusi pangan olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang telah melebihi target yang ditetapkan untuk periode tersebut. Realisasi bulan September mencakup **16 sarana**, sehingga total hingga akhir Triwulan III mencapai **132 sarana** dari target tahunan **157 sarana (84,1%)**.

- **Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW Sebelumnya Tahun 2025**



Gambar 13 Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW Sebelumnya IKU 10

Dibandingkan dengan capaian pada Triwulan II (realisasi 87,04%), kinerja Triwulan III mengalami sedikit penurunan menjadi 80,38%. Penurunan ini disebabkan adanya penyesuaian target bulanan dan prioritas kegiatan yang lain. Namun secara kumulatif, capaian masih berada di atas target kumulatif triwulan dan tetap menunjukkan tren pencapaian yang positif.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan Target Tahun 2025**

Tabel 45 Ketercapaian Realisasi TW III terhadap Target 2025 IKU 10

NO	IKU	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,00	80,38	100.48	▲ Tercapai/ Melampaui

Hingga September 2025, capaian telah mencapai **84,1% dari target tahunan**, menunjukkan kemajuan signifikan menuju target 100% di akhir tahun. Dengan mempertimbangkan pelaksanaan pemeriksaan rutin di Triwulan IV, target tahunan diperkirakan dapat tercapai bahkan berpotensi melampaui sasaran yang telah ditetapkan.

- **Analisis Penyebab Keberhasilan/Peningkatan Kinerja**

Keberhasilan capaian kinerja didukung oleh pelaksanaan **monitoring dan evaluasi (monev) berkala**, yang memastikan pemeriksaan dilakukan sesuai jadwal dan standar. Selain itu, tidak adanya kendala lapangan seperti keterbatasan sumber daya, cuaca ekstrem, maupun hambatan administrasi turut memperlancar kegiatan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang.

- **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

  Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian hingga akhir tahun, BBPOM di Semarang akan melakukan **monev lanjutan terhadap sarana yang telah diperiksa**, memperkuat koordinasi lintas bidang, serta memastikan tindak lanjut hasil pemeriksaan tepat waktu. Selain itu, pendekatan pengawasan berbasis risiko akan diterapkan untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya terhadap sarana dengan potensi ketidaksesuaian yang lebih tinggi.

- **Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja**

Tabel 46 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya IKU 10

Indikator	Pagu Anggaran(Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian IKU (%)	Tingkat Efisiensi
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	616,270,000	309,026,356	50.14	100,48	Tidak Efisien

Dengan **realisasi anggaran sebesar 50,14%** dan **capaian IKU sebesar 100,48%**, kegiatan ini dikategorikan **tidak efisien** dengan nilai efisiensi **0,86**. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun target output tercapai dengan baik, masih terdapat ruang perbaikan dalam optimalisasi penggunaan sumber daya, terutama dalam penyesuaian biaya operasional dengan volume kegiatan yang direalisasikan.

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja**

  Kinerja indikator ini didukung oleh kegiatan pemeriksaan rutin terhadap sarana distribusi pangan olahan, pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta kegiatan pembinaan kepada pelaku usaha. Tidak adanya kendala selama pelaksanaan menunjukkan koordinasi antar seksi pengawasan dan perencanaan berjalan efektif. Selain itu, sistem pelaporan yang terintegrasi mempercepat proses validasi data hasil pengawasan.

- **Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

Laporan kinerja ini dimanfaatkan untuk mengevaluasi efektivitas pengawasan sarana distribusi pangan olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang. Informasi capaian digunakan sebagai dasar penyusunan strategi pengawasan berikutnya, termasuk penetapan prioritas pemeriksaan dan pembinaan untuk menjaga mutu serta keamanan pangan olahan yang beredar di masyarakat.

IKU 11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan Olahan.

Iklan diawasi pada pelaksanaan tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta *timeline* yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan dihitung dari rata-rata persentase iklan obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan.

Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan dihitung dari

a. Pemenuhan jumlah target pengawasan
b. Ketepatan waktu pelaporan

Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan dihitung dari :

a. Rerata persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target
b. Rerata persentase iklan yang dilaporkan tepat waktu

Persentase iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan dihitung dari :

a. Pemenuhan target pengawasan
b. Ketepatan waktu pelaporan
c. Akurasi pengambilan Keputusan

Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan dihitung dari :

a. Pemenuhan target pengawasan
b. Ketepatan waktu pelaporan
c. Akurasi pengambilan Keputusan

Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan dihitung dari :

a. Kesesuaian proporsi media iklan yang disampling
b. Pemenuhan target pengawasan
c. Ketepatan waktu pelaporan

Informasi yang disampaikan melalui iklan, merupakan acuan bagi masyarakat untuk menentukan sediaan farmasi dan pangan olahan mana yang akan dibeli. Sehingga iklan sediaan farmasi dan pangan olahan harus benar, jujur dan bertanggungjawab. Hal ini penting agar masyarakat mendapatkan sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan mutu.

- **Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW III Tahun 2025**

Tabel 47 Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW III IKU 11

NO	IKU	Target TW III	Realisasi	Capaian (%)
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91	96.89	106,47 Sangat Baik

Pada Triwulan III Tahun 2025, target kinerja ditetapkan sebesar **91%**, sedangkan realisasi mencapai **96,89%** atau **106,47% dari target triwulanan**. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pengawasan iklan terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan berjalan melebihi ekspektasi. Hingga September 2025, total **1.099 iklan** telah diawasi dari target **1.353 iklan**, atau setara dengan **81% dari target tahunan**.

- **Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW Sebelumnya Tahun 2025**



Gambar 14 Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW Sebelumnya IKU 11

Jika dibandingkan dengan capaian Triwulan II sebesar **97,56%**, capaian Triwulan III (96,89%) menunjukkan stabilitas kinerja dengan selisih yang sangat kecil. Hal ini menandakan bahwa pelaksanaan pengawasan iklan tetap konsisten dan terkendali. Jumlah iklan yang diawasi terus meningkat dari 847 iklan di bulan Juli menjadi 1.099 iklan pada bulan September, menunjukkan progres yang berkelanjutan dan sesuai rencana kerja.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan Target Tahun 2025**

Tabel 48 Ketercapaian Realisasi TW III terhadap Target 2025 IKU 11

NO	IKU	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91,00	96,89	106.47	Tercapai/ Melampaui

Hingga akhir Triwulan III, capaian jumlah pengawasan iklan telah mencapai **81% dari target tahunan**. Dengan mempertimbangkan tren peningkatan yang stabil tiap bulan, target 100% di akhir tahun diyakini dapat tercapai bahkan berpotensi melampaui sasaran yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pengawasan telah berada pada jalur yang sesuai.

- **Analisis Penyebab Keberhasilan/Peningkatan Kinerja**

Keberhasilan dalam pencapaian indikator ini disebabkan oleh penerapan monitoring dan evaluasi rutin terhadap pengawasan iklan di media cetak, media luar ruang, media online, elektronik dan media penyiaran, serta koordinasi aktif antar seksi dan lintas bidang. Tidak adanya kendala lapangan yang berarti seperti keterlambatan pelaporan atau kesulitan

verifikasi konten iklan turut memperkuat efektivitas pelaksanaan pengawasan. Penggunaan sistem pemantauan daring juga berperan penting dalam meningkatkan efisiensi proses pengawasan.

- **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

  Untuk mempertahankan kinerja hingga akhir tahun, BBPOM di Semarang akan memperluas jangkauan pengawasan terhadap iklan media online termasuk media sosial dan platform daring yang berkembang cepat. Selain itu, akan dilakukan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan evaluasi iklan, penguatan kerja sama dengan instansi terkait serta pemantauan tindak lanjut iklan Tidak Memenuhi Ketentuan bagi sarana produksi di wilayah kerja BBPOM di Semarang untuk mempercepat proses klarifikasi dan tindak lanjut temuan.

- **Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja**

Tabel 49 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya IKU 11

Indikator	Pagu Anggaran(Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian IKU (%)	Tingkat Efisiensi
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	54,810,000	17,381,110	31.71	106,47	Tidak Efisien

Dengan realisasi anggaran sebesar 31,71% dan capaian IKU sebesar 106,47%, indikator ini dikategorikan tidak efisien dengan nilai efisiensi 0,75. Walaupun kinerja berhasil melampaui target, rendahnya tingkat efisiensi menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara alokasi anggaran dan output kegiatan. Diperlukan optimalisasi perencanaan anggaran agar lebih proporsional dengan volume pengawasan.

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja**

  Capaian ini didukung oleh kegiatan pengawasan rutin iklan sediaan farmasi dan pangan olahan baik melalui iklan di media cetak, media luar ruang, media online, elektronik dan media penyiaran. Keberhasilan juga ditunjang oleh kegiatan monitoring terpadu serta evaluasi hasil pengawasan secara berkala yang dilakukan oleh tim pengawasan. Tidak terdapat kendala berarti selama pelaksanaan pengawasan di lapangan.

- **Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

  Laporan kinerja ini digunakan sebagai dasar penyusunan strategi pengawasan dan pembinaan iklan ke depan, terutama dalam mengantisipasi tren iklan daring yang dinamis. Data capaian juga menjadi bahan evaluasi dalam menentukan arah kebijakan pengawasan dan peningkatan efektivitas komunikasi, informasi, serta edukasi kepada pelaku usaha agar iklan yang disampaikan kepada masyarakat tetap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

IKU 12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar

Label Produk tembakau dan atau rokok elektronik adalah setiap keterangan mengenai produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada produk tembakau, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada atau merupakan bagian dari kemasan produk tembakau.

Pengawasan Label dilaksanakan dengan menilai kesesuaian terhadap standar pencantuman Peringatan Kesehatan termasuk Informasi pada Kemasan Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik.

Pengawasan Label dilakukan terhadap kemasan sampel Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang diambil di peredaran (tempat penjualan dan/atau distributor).

Sesuai standar berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan mencakup peraturan pemerintah, petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan produk tembakau; pedoman tindak lanjut dan ketentuan lain yang berlaku.

Produk Tembakau adalah setiap produk yang seluruhnya atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dipanaskan, diuapkan, dihisap, dihirup, dikunyah, atau dengan cara konsumsi apapun. Produk Tembakau tersebut meliputi:

a.rokok;

b.cerutu;

c.rokok daun;

d.tembakau iris;

e. tembakau padat dan cair; dan

f. hasil pengolahan tembakau lainnya.

Rokok Elektronik adalah hasil tembakau dan/atau nikotin dan/atau bahan lain berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakau maupun bahan lainnya yang Dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektronik kemudian dihisap.

Cara Perhitungan Dan Formula: % label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar = A+B/2

Keterangan:

A: Persentase Pemenuhan jumlah target pengawasan label :

(Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi / Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi) x 100%

B: Persentase ketepatan waktu pelaporan label:

(Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi) x 100%

Keterangan:

- Jumlah label yang selesai diawasi adalah jumlah label yang telah selesai diinput melalui SIPT dan dikirimkan oleh Kepala UPT ke BPOM Pusat.
- Jumlah target label yang diawasi adalah jumlah target yang ditetapkan untuk masing-masing UPT yang telah ditetapkan BPOM pusat setiap tahunnya dan disampaikan melalui surat edaran.
- Jumlah label yang dilaporkan tepat waktu adalah jumlah label yang selesai diawasi, dilaporkan dan dikirimkan oleh Kepala UPT ke BPOM Pusat melalui SIPT secara periodik setiap bulan paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya.
- Sumber data baik jumlah label maupun ketepatan waktu pelaporan berasal dari data tarikan laporan pengawasan penandaan pada aplikasi SIPT

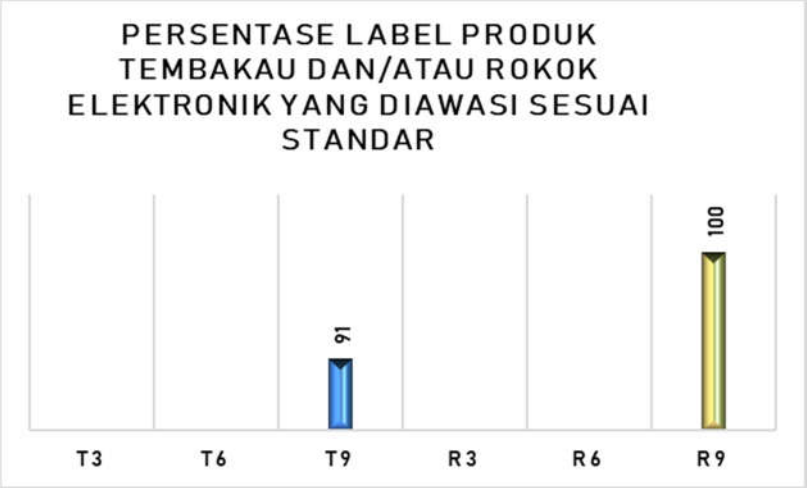
- **Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW III Tahun 2025**

Tabel 50 Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW III IKU 12

NO	IKU	Target TW III	Realisasi	Capaian (%)
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91	100	109,89 Sangat Baik

Pada Triwulan III Tahun 2025, target kinerja ditetapkan sebesar 91%, dengan realisasi sebesar 100% atau 109,89% dari target triwulanan. Capaian ini menunjukkan bahwa kegiatan pengawasan penandaan produk tembakau dan rokok elektronik telah melampaui target yang direncanakan. Hingga September 2025, telah dilakukan pengawasan terhadap 155 produk rokok, terdiri dari 153 rokok konvensional/batang dan 2 rokok elektrik, dengan capaian 74,87% dari target tahunan 207 rokok.

- **Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW Sebelumnya Tahun 2025**



Gambar 15 Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW Sebelumnya IKU 12

Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar ini merupakan IKU yang baru ditetapkan pada Bulan Agustus sehingga belum dapat dibandingkan capaian kinerja dengan TW sebelumnya. Jika dilihat dari capaian pada Triwulan III yang mencapai 100%, mencerminkan optimalisasi kegiatan pengawasan di lapangan, termasuk pemeriksaan fisik label dan pelaporan hasil

pengawasan melalui Sistem Informasi Pengawasan Tembakau (SIPT) yang tepat waktu.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan Target Tahun 2025**

Tabel 51 Ketercapaian Realisasi TW III terhadap Target 2025 IKU 12

NO	IKU	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91,00	100,00	109.89	Tercapai/ Melampaui

Target tahunan indikator ini ditetapkan sebesar 91%, sementara capaian hingga Triwulan III telah mencapai 109,89% dari target tahunan. Artinya, pengawasan terhadap label produk tembakau dan/atau rokok elektronik telah melampaui sasaran tahunan yang direncanakan. Capaian ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan pengawasan yang konsisten dan terukur.

- **Analisis Penyebab Keberhasilan/Peningkatan Kinerja**

Keberhasilan ini didukung oleh pemenuhan timeline pelaporan SIPT yang disiplin setiap bulan (maksimal tanggal 5 bulan berikutnya), serta Keberhasilan juga ditunjang oleh kegiatan monitoring terpadu serta evaluasi hasil pengawasan secara berkala yang dilakukan oleh tim pengawasan. Tidak adanya kendala teknis maupun administratif yang berarti juga berkontribusi pada ketepatan pelaksanaan dan pelaporan hasil pengawasan.

- **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Ke depan, BBPOM di Semarang akan memperkuat pemantauan terhadap rokok elektronik yang peredarannya semakin meluas serta memperbarui metode pengawasan agar lebih adaptif terhadap dinamika produk baru. Selain itu, peningkatan kapasitas petugas pengawasan melalui pelatihan teknis terkait standar pelabelan dan penandaan produk tembakau akan terus dilakukan. Sistem pelaporan SIPT juga akan dioptimalkan untuk mempercepat validasi dan analisis data hasil pengawasan.

- **Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja**

Tabel 52 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya IKU 12

Indikator	Pagu Anggaran(Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian IKU (%)	Tingkat Efisiensi
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	592,721,000	474,067,548	79.98	109,89	Efisien

Berdasarkan data pada tabel, alokasi anggaran untuk kegiatan pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar sebesar Rp592.721.000 dengan realisasi anggaran Rp474.067.548 atau 79,98% dari pagu, serta capaian indikator kinerja utama (IKU) sebesar 109,89% yang menunjukkan kinerja melampaui target. Perbandingan antara capaian kinerja dan tingkat serapan anggaran menghasilkan nilai efisiensi sebesar 0,95 yang tergolong dalam kategori efisien, sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya telah mampu menghasilkan output kinerja yang optimal dengan pengeluaran yang relatif hemat. Meskipun demikian, untuk peningkatan efisiensi ke depan masih diperlukan optimalisasi kegiatan pengawasan agar pemanfaatan sumber daya dapat lebih maksimal.

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja**

  Keberhasilan indikator ini ditunjang oleh kegiatan pengawasan rutin terhadap penandaan rokok konvensional dan rokok elektrik, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) secara berkala oleh tim pengawasan. Pelaporan tepat waktu melalui SIPT juga menjadi faktor pendukung penting dalam menjaga kelancaran proses dokumentasi dan pelaporan hasil kegiatan. Tidak terdapat kendala berarti selama pelaksanaan pengawasan di lapangan.

- **Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

  Laporan kinerja ini digunakan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan strategi pengawasan label produk tembakau dan rokok elektronik pada periode berikutnya. Data hasil pengawasan juga dimanfaatkan dalam pembinaan kepada pelaku usaha agar lebih memahami ketentuan pelabelan dan peringatan kesehatan. Selain itu, laporan ini menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi kebijakan terkait efektivitas pengawasan produk tembakau di wilayah kerja BBPOM di Semarang.

IKU 13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

Indikator “Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT” mengukur kesesuaian Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM dalam melaksanakan

kegiatan pengendalian Antimicrobial Resistance (AMR) dan mencapai target yang telah ditetapkan. Target yang dimaksud adalah indikator teknis pengendalian AMR sebagaimana tertuang dalam rencana aksi pengendalian AMR di lingkungan Badan POM.

Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT dihitung berdasarkan rerata capaian UPT dalam melaksanakan rencana aksi pengendalian AMR sesuai target yang ditetapkan,

yaitu:

1) Penggunaan Tools Pengawasan AMR (A)

2) Pelaksanaan Bimtek (B)

3) Pelaksanaan Advokasi (C), dan

4) Pelaksanaan Publikasi (D)

Formula untuk menghitung "Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT" yaitu: Capaian UPT = 25% A + 25% B + 25% C + 25% D

Penilaian pemenuhan target pengendalian AMR dihitung dengan cara:

1) 25% dari persentase jumlah penggunaan dan ketepatan pengisian tools antibiotik pada pemeriksaan Apotek (A).

(A) dihitung berdasarkan jumlah penggunaan tools antibiotik terhadap jumlah target apotek dan ketepatan pengisian setiap pertanyaan dalam tools antibiotik.

2) 25% dari persentase capaian pelaksanaan bimbingan teknis terkait pengendalian resistensi antimikroba (B).

(B) dihitung berdasarkan Jumlah kegiatan bimbingan teknis kepada sarana pelayanan kefarmasian khususnya Apotek dengan topik pengendalian resistensi antimikroba dibandingkan target tahunan bagi setiap UPT

3) 25% dari persentase capaian pelaksanaan advokasi lintas sektor terkait pengendalian resistensi antimikroba (C).

(C) dihitung berdasarkan Jumlah kegiatan advokasi dengan stakeholder dalam topik pengendalian resistensi antimikroba dibandingkan target tahunan bagi setiap UPT.

4) 25% dari persentase capaian publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter (D).

(D) dihitung berdasarkan Jumlah publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter

Formula:

Persentase pemenuhan target pengendalian = 25% A + 25% B + 25% C + 25% D AMR di wilayah UPT

- **Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW III Tahun 2025**

Tabel 53 Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW III IKU 13

NO	IKU	Target TW III	Realisasi	Capaian (%)
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT			

Pada Triwulan III Tahun 2025, indikator Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di wilayah UPT belum memiliki realisasi capaian karena pelaksanaan kegiatan utama dan pengumpulan hasil pengawasan dijadwalkan pada Triwulan IV. Target tahun 2025 ditetapkan sebesar **100%**, sedangkan hingga akhir September belum terdapat capaian kuantitatif. Namun demikian, kegiatan pendukung seperti pemeriksaan sarana, bimbingan teknis (Bimtek) dan advokasi lintas sektor serta publikasi hasil pengawasan AMR telah dapat dilaksanakan.

- **Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW Sebelumnya Tahun 2025**



Gambar 16 Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW Sebelumnya IKU 13

Jika dibandingkan dengan Triwulan II, kegiatan pada Triwulan III lebih banyak difokuskan pada penguatan pelaksanaan lapangan dan koordinasi lintas sektor. Pemeriksaan Sanyanfar telah menggunakan form pengawasan AMR yang diisi lengkap oleh petugas, dengan total 135 sarana sampai Juli, meningkat menjadi 153 sarana sampai Agustus, dan kegiatan lanjutan di bulan September mencakup pengawasan di 80 apotek. Meskipun belum menghasilkan nilai capaian IKU, aktivitas tersebut menjadi dasar capaian akhir tahun.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan Target Tahun 2025**

Tabel 54 Ketercapaian Realisasi TW III terhadap Target 2025 IKU 13

NO	IKU	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100,00	Tahunan	Tahunan	Tahunan

Secara kumulatif hingga TW III, belum terdapat realisasi kinerja yang dapat diinput dalam sistem karena pengumpulan dan validasi data AMR baru akan dilakukan secara menyeluruh pada TW IV. Namun, progres kegiatan lapangan telah mencapai lebih dari 75% dari total target sarana yang direncanakan, menunjukkan bahwa capaian target tahunan sangat mungkin terpenuhi pada akhir 2025.

- **Analisis Penyebab Keberhasilan/ Peningkatan Kinerja**

Kesiapan pelaksanaan dan keterlibatan lintas sektor menjadi faktor pendukung utama keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengendalian AMR. Hingga TW III, telah dilaksanakan Bimtek AMR dua kali di Semarang (berkolaborasi dengan PBF AAM) dan di Pati, serta KIE AMR di Rembang yang melibatkan 19 OPD kesehatan. Selain itu, dilakukan pula advokasi kepada Wakil Bupati Jepara, yang menghasilkan terbitnya Surat Edaran AMR oleh Bupati Jepara pada 26 September 2025. Aktivitas tersebut memperkuat fondasi keberhasilan target pada TW IV.

- **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Untuk memastikan target tahunan tercapai, BBPOM di Semarang akan fokus pada finalisasi pengawasan di seluruh sarana dan validasi data AMR pada TW IV. Penguatan koordinasi dengan Dinas Kesehatan kabupaten/kota akan ditingkatkan, terutama dalam hal pelaporan form pengawasan dan tindak lanjut hasil evaluasi. Selain itu, akan dilakukan integrasi data hasil pengawasan ke sistem SIPT dan laporan nasional AMR agar proses pelaporan lebih cepat dan akurat.

- **Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja**

Tabel 55 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya IKU 13

Indikator	Pagu Anggaran(Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian IKU (%)	Tingkat Efisiensi
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	4,760,000	3,514,610	73.84		

- Realisasi anggaran untuk kegiatan pengendalian AMR hingga TW III sebesar **73,84%** dari total alokasi, sementara kinerja utama belum terealisasi karena waktu pelaksanaan yang memang direncanakan pada TW IV. Tingkat efisiensi sementara belum dapat diukur sepenuhnya, namun pemanfaatan sumber daya dinilai efektif untuk kegiatan koordinasi, advokasi, dan Bimtek lintas wilayah.

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja**

  Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dan mendukung pencapaian target antara lain pengawasan sarana pelayanan kesehatan menggunakan form AMR, Bimtek AMR di tiga wilayah (Semarang, Pati, dan Rembang), KIE lintas sektor, serta advokasi kepada pemerintah daerah. Tidak terdapat kendala signifikan, namun keterbatasan waktu pelaksanaan menyebabkan capaian baru akan terukur pada akhir tahun.

- **Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

  Laporan kinerja TW III ini menjadi dasar evaluasi progres pelaksanaan pengendalian AMR di wilayah kerja BBPOM di Semarang, serta acuan penyusunan strategi percepatan pencapaian target di TW IV. Data hasil kegiatan akan dimanfaatkan untuk penyusunan laporan tahunan, penguatan kebijakan lintas sektor, serta penyusunan rencana kerja tahun berikutnya dalam mendukung pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pengendalian Resistensi Antimikroba (RAN-AMR).

IKU 14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan BBPOM di Semarang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Standar Kemampuan Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah suatu cakupan kemampuan laboratorium kimia dan biologi yang harus dipenuhi oleh setiap laboratorium dalam rangka peningkatan kapabilitas dan kapasitas laboratorium. Terdapat lima tingkatan laboratorium (Tier) di lingkungan Badan POM, yaitu : Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan

Makanan Nasional (PPPOMN) sebagai Laboratorium Tingkat 5, Laboratorium Balai Besar POM yang merupakan Laboratorium Regional sebagai Laboratorium Tingkat 4, Laboratorium Balai Besar/Balai POM di tingkat provinsi sebagai Laboratorium Tingkat 3, Laboratorium di Balai POM di Kabupaten/Kota sebagai Laboratorium Tingkat 2 dan Laboratorium Loka POM sebagai Laboratorium Tingkat 1.

Balai Besar POM di Semarang sebagai laboratorium Regional merupakan Laboratorium Tingkat 4, yang memiliki tugas :

1. Melakukan pengujian unggul Obat dan Makanan
2. Melakukan pengujian dasar dan pengujian lain selain parameter unggul Kimia dan Mikrobiologi
3. Mengkoordinir Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam satu regional
4. Melakukan pengujian konfirmasi dari Tier di bawahnya

Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) merupakan standar yang ditetapkan Badan POM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium, dan standar tersebut digunakan intuk menilai kemampuan laboratorium Balai Besar/Balai POM dalam melakukan fungsi pengujian sampel Obat dan Makanan di laboratorium kimia dan biologi

Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) Tingkat 3 dan 4 adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium Regional dan dan Laboratorium Provinsi Balai Besar/Balai POM tahun 2025 – 2029 yang terdiri dari 4 komponen yaitu

1. Standar Ruang Lingkup (SRL)
2. Standar Peralatan laboratorium
3. Standar Kompetensi Laboratorium
4. Standar Metode Analisa Terverifikasi

Penjelasan dari masing-masing komponen adalah sebagai berikut :

1. Standar Ruang Lingkup

   Suatu cakupan pengujian kimia dan biologi yang menggambarkan kapasitas dan kapabilitas laboratorium, meliputi pengujian obat, nappza, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan dan mikrobiologi.

2. Standar Peralatan

   Peralatan yang harus dimiliki oleh laboratorium sehingga pengujian dapat dilaksanakan sesuai lingkupnya

3. Standar Kompetensi Laboratorium

   Kemampuan laboratorium dalam melakukan pengujian sesuai ruang lingkup oleh personel yang kompeten

4. Standar Metode Terverifikasi

   Metode Analisa yang akan diverifikasi oleh laboratorium

Empat komponen SKL tersebut dinilai berdasarkan petunjuk teknis yang telah ditetapkan dan telah disosialisasikan kepada seluruh UPT ,

Penilaian Pemenuhan SKL Tingkat 3 dan Tingkat 4 tahun 2025-2029 adalah :

Standar Ruang Lingkup 50% + Standar Kompetensi Laboratorium 20% + Standar Peralatan 20% + Standar Metode Terverifikasi 10%

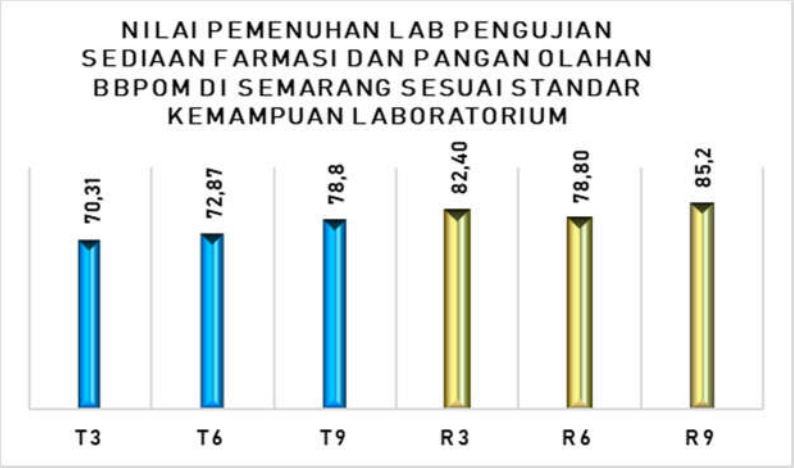
- **Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW III Tahun 2025**

Tabel 56 Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW III IKU 14

NO	IKU	Target TW III	Realisasi	Capaian (%)
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	83	85	102,90 Sangat Baik

Capaian kinerja indikator pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) pada Triwulan III tahun 2025 mencapai **85,2%** dari target **82,8%**, atau **tercapai 102,9%**. Hasil ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah melampaui target triwulanan yang ditetapkan. Kinerja tersebut mencakup peningkatan pada komponen ruang lingkup laboratorium, peralatan, serta kompetensi personil, meskipun beberapa kegiatan verifikasi metoda analisa masih berlangsung.

- **Perbandingan Antara Kinerja TW III Dengan Kinerja TW Sebelumnya Tahun 2025**



Gambar 17 Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW Sebelumnya IKU 14

Jika dibandingkan dengan Triwulan II, capaian TW III menunjukkan peningkatan signifikan. Hal ini disebabkan adanya penambahan ruang lingkup laboratorium kosmetik yang berhasil diverifikasi, serta kelancaran pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi personil dan pemenuhan peralatan laboratorium. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan kinerja berkelanjutan dari semester I menuju semester II tahun 2025.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja TW III Dengan Target Tahun 2025**

Tabel 57 Ketercapaian Realisasi TW III terhadap Target 2025 IKU 14

NO	IKU	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	83,20	85,20	102,40	▲ Tercapai/ Melampaui

Realisasi kinerja TW III 2025 sebesar 85,2% menunjukkan bahwa capaian sudah mendekati target tahunan yang ditetapkan sebesar 100%. Sebagian kegiatan masih dijadwalkan untuk dilaksanakan pada TW IV, seperti pemenuhan ruang lingkup RL Obat yang ditargetkan di akhir tahun serta penerimaan tambahan alat laboratorium yang dijadwalkan datang pada bulan **Oktober 2025**. Dengan demikian, capaian TW III memberikan prospek positif terhadap pencapaian target tahunan secara keseluruhan.

- **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja**

Keberhasilan capaian kinerja pada TW III 2025 ditunjang oleh pelaksanaan kegiatan pemenuhan ruang lingkup laboratorium secara tepat waktu, peningkatan kompetensi personil, serta pengadaan alat laboratorium yang sebagian besar telah terealisasi. Namun, masih terdapat kendala pada RL Obat

akibat kesulitan memperoleh sampel uji (asam fusidat dan fenilefrin tetes mata) sehingga kegiatan verifikasi metoda analisa harus digeser ke TW IV. Secara umum, koordinasi antar-laboratorium berjalan baik dan berkontribusi pada peningkatan capaian SKL.

- **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Untuk menjaga keberlanjutan capaian hingga akhir tahun, dilakukan langkah-langkah perbaikan berupa:

1. Percepatan pelaksanaan verifikasi metoda analisa RL Obat pada TW IV.
2. Monitoring kedatangan dan pemasangan alat laboratorium baru pada bulan Oktober 2025.
3. Optimalisasi pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis untuk peningkatan kompetensi personil.
4. Penguatan koordinasi antar-laboratorium guna memastikan pemenuhan seluruh komponen SKL sebelum akhir tahun.

- **Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja**

Tabel 58 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya IKU 14

Indikator	Pagu Anggaran(Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian IKU (%)	Tingkat Efisiensi
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	7,213,784,000	4,671,479,766	64.76	102.90	Efisien

Realisasi anggaran sebesar **64,76%** dengan capaian kinerja **102,9%** menunjukkan tingkat efisiensi yang baik, yaitu **92% (efisien)**. Realisasi anggaran yang masih rendah disebabkan karena pengadaan alat dan suku cadang impor yang inden dan akan teralisasi di TW IV, sehingga anggaran akan terealisasi menyesuaikan setelah alat dan suku cadang diterima. Dengan capaian IKU Indikator SKL sebesar 92 % dan dinilai efisien, hal ini menggambarkan bahwa penggunaan sumber daya telah dilakukan secara proporsional dan efektif untuk mencapai hasil optimal. Efisiensi dicapai melalui pengendalian jadwal kegiatan, pemanfaatan sumber daya manusia secara tepat, serta pengawasan terhadap proses pengadaan.

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Beberapa program dan kegiatan yang berperan penting dalam keberhasilan pencapaian indikator ini antara lain: monitoring dan evaluasi pelaksanaan SKL, pelaksanaan pelatihan kompetensi personil laboratorium, verifikasi metoda analisa, serta pengadaan alat laboratorium untuk peningkatan ruang lingkup pengujian. Kegiatan tersebut berjalan sesuai rencana dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan capaian SKL.

- **Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

Laporan capaian kinerja TW III 2025 ini dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kerja TW IV 2025, sekaligus menjadi dasar dalam perencanaan kebutuhan peningkatan kapasitas laboratorium tahun 2026. Informasi dalam laporan ini juga digunakan sebagai acuan pembinaan dan pengambilan keputusan strategis terkait pemenuhan ruang lingkup dan pengadaan alat laboratorium di masa mendatang.

IKU 15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

---

1. Kabupaten/Kota yang didampingi adalah Kabupaten/Kota yang berpotensi menyelenggarakan pengawasan dan pemberdayaan keamanan pangan di sepanjang rantai pangan sesuai dengan ketentuan

2. Pendampingan yang dilakukan meliputi:

a. advokasi kepada Kabupaten/Kota terkait penyelenggaraan Keamanan Pangan di daerah

b. mengaktivasi Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) di Kabupaten/Kota

c. mendampingi dan memastikan Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri dalam kerangka kerja TKPPOM

3. Kriteria Kabupaten/Kota yang berhasil didampingi:

a. Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri secara lengkap (seluruh kriteria penilaian meliputi Komitmen,

Perencanaan, Implementasi, Monitoring dan Evaluasi serta Inovasi) dan sesuai ketentuan

b. Kabupaten/Kota mengirimkan tools penilaian mandiri (dengan nilai minimal 60)

Cara Perhitungan dan Formulasi:

a) Dihitung dari Kab/Kota yang berhasil didampingi sesuai pedoman

b) Merupakan Kab/ Kota di lingkup wilayah kerja UPT

c) Jumlah target dihitung secara kumulatif

d) Formula Perhitungan

Jumlah Kab/Kota yang Berhasil Didampingi Sesuai Pedoman/Jumlah Kab/Kota di Wilayah Kerja UPT x 100%

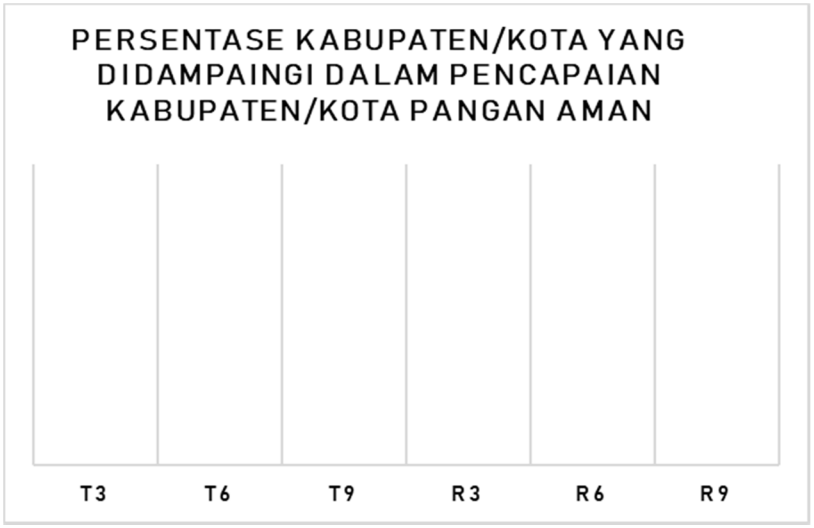
- **Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW III Tahun 2025**

Tabel 59 Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW III IKU 15

NO	IKU	Target TW III	Realisasi	Capaian (%)
15	Persentase Kabupaten/ Kota yang didampaingi dalam pencapaian			

Pada Triwulan III Tahun 2025, kegiatan pendampingan Kabupaten/Kota Pangan Aman telah dimulai dengan dilaksanakannya kegiatan advokasi kepada 26 Kabupaten/Kota yang berada di wilayah kerja Balai Besar POM Di Semarang, dilanjutkan dengan pendampingan secara luring kepada Kabupaten/Kota di **tiga wilayah**, yaitu **Kota Semarang, Kabupaten Semarang, dan Kota Magelang** dan pendampingan secara daring baik melalui telepon atau whatsapp group kepada seluruh Kabupaten/Kota di wilayah kerja Balai Besar POM Di Semarang . Realisasi ini menunjukkan peningkatan dari triwulan sebelumnya yang baru mencakup dua wilayah yang didampingi secara luring. Secara substansi, kegiatan pendampingan telah berjalan sesuai rencana dan memenuhi indikator target kinerja yang ditetapkan untuk tahun berjalan**. (ditargetkan tahunan)**

- **Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW Sebelumnya Tahun 2025**



Gambar 18 Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW Sebelumnya IKU 15

Jika dibandingkan dengan TW II, terjadi peningkatan jumlah Kabupaten/Kota yang telah mendapatkan pendampingan secara luring. Pada TW II baru terealisasi pendampingan di Kota Semarang dan Kabupaten Semarang, sedangkan pada TW III sudah bertambah satu wilayah, yaitu Kota Magelang. Namun demikian pendampingan secara daring juga terus dilakukan kepada seluruh Kabupaten/Kota yang berada di wilayah kerja BBPOM di Semarang baik melalui telepon ataupun Whatsapp Grup. Peningkatan ini menunjukkan progres yang positif dalam memaksimalkan pendampingan yang dilakukan guna menuju target akhir tahun 2025.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan Target Tahun 2025**

Tabel 60 Ketercapaian Realisasi TW III terhadap Target 2025 IKU 15

NO	IKU	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi
15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	3,85	Tahunan	Tahunan	Tahunan

Realisasi pendampingan di tiga Kabupaten/Kota menunjukkan bahwa capaian TW III telah mendekati target tahunan sebesar **3,85 Kabupaten/Kota**. Dengan rencana kegiatan verifikasi lapangan (verlap) dan finalisasi pendampingan di akhir tahun, capaian indikator ini diproyeksikan akan memenuhi target 100% pada akhir tahun 2025.

- **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja**

Peningkatan capaian pada TW III disebabkan oleh koordinasi yang baik antara BBPOM di Semarang dengan pemerintah daerah serta kesiapan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan. Adanya

dukungan serta komitmen lintas sektor terkait turut memperlancar pelaksanaan kegiatan.

- **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Upaya yang akan dilakukan untuk menjaga pencapaian target hingga akhir tahun antara lain:

1. Memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penyusunan laporan capaian Kabupaten/Kota Pangan Aman.
2. Melakukan monitoring pasca-pendampingan untuk memastikan implementasi berkelanjutan di daerah.
3. Menyiapkan dokumentasi hasil pendampingan sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran untuk tahun berikutnya.

- **Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja**

Tabel 61 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya IKU 15

Indikator	Pagu Anggaran(Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian IKU (%)	Tingkat Efisiensi
Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	208,958,769	169,255,706	81.00		

Realisasi anggaran untuk kegiatan ini tercatat sebesar **81%**, dengan capaian indikator menunjukkan kemajuan yang baik. Hal ini disebabkan oleh adanya kegiatan pendampingan secara luring yang memerlukan mobilisasi tim dan biaya koordinasi lintas daerah. Namun demikian, penggunaan sumber daya tetap terkendali dan diarahkan untuk mendukung tercapainya target indikator secara menyeluruh.

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Kegiatan pendampingan Kabupaten/Kota Pangan Aman dilaksanakan melalui serangkaian program seperti sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan prinsip pangan aman, pendampingan lapangan, serta verifikasi kesiapan daerah. Program ini didukung oleh sinergi dengan pemerintah daerah, OPD terkait, dan pelaku usaha pangan, sehingga mendukung peningkatan status keamanan pangan di wilayah binaan.

- **Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

Laporan kinerja TW III 2025 ini menjadi bahan evaluasi capaian sementara dan dasar penyusunan rencana tindak lanjut pada TW IV 2025. Hasil capaian juga digunakan untuk penyusunan rekomendasi pembinaan Kabupaten/Kota Pangan Aman di tahun berikutnya serta sebagai bahan pelaporan ke Badan POM pusat dalam rangka monitoring implementasi program Gerakan Keamanan Pangan Nasional (GKPN).

SK 2. Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

Tabel 62 Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan Ke 2

NO	SK	IKU	Target TW III	Realisasi	Capaian (%)
16	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	54,00	57,94	107,30
Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan					107,30

Sasaran Kegiatan 2 diukur dengan 1 Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu **Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan**, dengan target sebesar **54%** dan realisasi sebesar **57,94%**, sehingga capaian kinerja mencapai **107,30%**.

Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan 2 adalah **107,30% (Sangat Baik)**. Hal ini menunjukkan bahwa BBPOM di Semarang telah **efektif dalam melaksanakan pengawasan terhadap sarana produksi pangan fortifikasi** di wilayah kerjanya. Capaian ini mencerminkan kinerja pengawasan yang melampaui target, sekaligus mengindikasikan komitmen dan upaya yang konsisten dalam menjamin mutu dan keamanan pangan fortifikasi.

IKU 16. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Kecukupan pangan merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Hal ini karena, kekurangan asupan pangan akan berimbas pada kekurangan asupan zat gizi yang diperlukan untuk hidup sehat berkualitas. Kekurangan zat gizi mikro di Indonesia seringkali berkaitan dengan pola konsumsi yang kurang beragam, akses terbatas terhadap makanan bergizi, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gizi seimbang. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai intervensi untuk menangani masalah ini, termasuk program fortifikasi pangan yang bertujuan untuk meningkatkan kandungan gizi pangan dengan menambahkan zat-zat gizi mikro yang penting, seperti vitamin dan mineral, pada bahan pangan pokok seperti garam, tepung terigu, dan minyak goreng.

BPOM dalam hal ini Balai Besar POM di Semarang berperan dalam pemantauan dan evaluasi dalam program fortifikasi melalui pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi, sampling produk pangan fortifikasi di sarana produksi dan pengujian produk pangan fortifikasi. Sarana Produksi Pangan Fortifikasi adalah sarana produksi pangan yang memproduksi minyak goreng sawit, garam konsumsi dan tepung terigu baik skala usaha mikro, skala usaha kecil, skala usaha menengah dan skala usaha besar.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana ketercakupan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerja Balai besar POM di Semarang yang ditindak lanjuti berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dihitung dari jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai dengan pedoman dibagi dengan jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang ada dalam cakupan wilayah pemeriksaan Balai Besar POM di Semarang (berdasarkan baseline data sejumlah 107 sarana).

- **Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW III Tahun 2025**

Tabel 63 Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW III IKU 16

NO	IKU	Target TW III	Realisasi	Capaian (%)
16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	54,00	57,94	107,30 Sangat Baik

Pada Triwulan III Tahun 2025, target pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi ditetapkan sebesar **54 sarana**, sedangkan realisasi yang dicapai mencapai **57,94 sarana**. Dengan capaian tersebut, indikator ini telah melampaui target triwulanan dengan tingkat capaian sebesar **107,30%**, menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam pelaksanaan pengawasan pangan fortifikasi di wilayah kerja BBPOM di Semarang.

- **Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW Sebelumnya Tahun 2025**



Gambar 19 Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW Sebelumnya IKU 16

Jika dibandingkan dengan capaian pada TW II, terjadi peningkatan realisasi pengawasan. Pada TW I, realisasi sebesar **15,89** dari target **16,82**, sedangkan pada TW II capaian meningkat menjadi **52,34** dari target **50,47**. Kenaikan yang berlanjut pada TW III menunjukkan tren positif pelaksanaan kegiatan yang konsisten meningkat seiring optimalisasi jadwal pemeriksaan lapangan.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan Target Tahun 2025**

Tabel 64 Ketercapaian Realisasi TW III terhadap Target 2025 IKU 16

NO	IKU	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi
16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	54,00	57,94	107,30	Tercapai/ Melampaui

Realisasi pemeriksaan sebesar **57,94 sarana** telah melampaui target tahunan sebesar **54 sarana** dengan capaian **107,30%**. Dengan hasil tersebut, indikator ini berpotensi menutup tahun 2025 dengan capaian di atas 100% apabila seluruh hasil tindak lanjut dari sarana pemeriksaan dapat diselesaikan sesuai ketentuan hingga akhir tahun.

- **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja**

Keberhasilan dalam pencapaian indikator ini didorong oleh optimalisasi kegiatan pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi di lapangan serta adanya koordinasi yang baik antara seksi pengawasan dengan petugas lapangan. Penjadwalan pemeriksaan yang disusun sejak awal tahun berjalan efektif sehingga target dapat tercapai lebih cepat dari rencana. Tidak terdapat kendala berarti dalam pelaksanaan pemeriksaan maupun dalam proses tindak lanjut hasil pengawasan.

- **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja, langkah yang akan dilakukan meliputi:

Melanjutkan pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana fortifikasi hingga akhir tahun.

Memperkuat koordinasi dengan pelaku usaha terkait pemenuhan kewajiban fortifikasi dan penandaan produk.

Menyusun pemetaan sarana potensial yang belum terpantau guna memperluas cakupan pengawasan.

Meningkatkan pembinaan kepada industri kecil menengah agar memahami standar dan kewajiban fortifikasi pangan.

- **Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja**

Tabel 65 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya IKU 16

Indikator	Pagu Anggaran(Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian IKU (%)	Tingkat Efisiensi
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88,195,000	63,117,575	71.57	107.30	Efisien

Realisasi anggaran untuk kegiatan ini tercatat sebesar **71,57%**, dengan capaian kinerja **107,30%**. Meskipun secara efisiensi dikategorikan **tidak efisien** (tingkat efisiensi 0,92), hal ini disebabkan oleh intensitas kegiatan lapangan yang cukup tinggi serta biaya mobilisasi yang meningkat akibat cakupan wilayah pengawasan yang luas. Namun, penggunaan sumber daya dinilai proporsional terhadap capaian kinerja yang melebihi target.

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh pelaksanaan program pengawasan pangan olahan, khususnya kegiatan pengawasan pangan fortifikasi yang rutin dilakukan oleh tim pengawasan BBPOM di Semarang. Dukungan kegiatan pembinaan industri dan komunikasi dengan lintas sektor turut berperan dalam memastikan sarana produksi memenuhi standar fortifikasi sesuai ketentuan.

- **Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

Laporan kinerja ini digunakan sebagai dasar evaluasi efektivitas pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerja BBPOM di Semarang. Selain itu, hasil capaian menjadi acuan dalam penyusunan strategi pembinaan lanjutan bagi pelaku usaha, serta bahan pelaporan ke Badan POM pusat sebagai bagian dari evaluasi nasional pengendalian program fortifikasi pangan tahun 2025.

SK 3. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Semarang

Tabel 66 Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan Ke 3

NO	SK	IKU	Target TW III	Realisasi	Capaian (%)
17	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Semarang	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	86,42	88,01	101,84
18		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	86,00	94,60	110,00
19		Jumlah desa pangan aman	67,50	90,00	133,33
20		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100,00	100,00	100,00
Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan					111,29

Sasaran Kegiatan 3 diukur menggunakan 4 IKU, yaitu: Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang, Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan, Jumlah desa pangan aman, dan Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas. Berdasarkan tabel capaian kinerja, seluruh indikator menunjukkan capaian di atas 100%, dengan Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan 4 sebesar **111,29%**. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan KIE di wilayah kerja BBPOM di Semarang telah berjalan sangat efektif dan melebihi target yang ditetapkan.

IKU 17. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang

Tingkat Efektifitas KIE adalah ukuran efektifitas atau kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi).

Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi KIE melalui media cetak dan elektronik; KIE langsung ke masyarakat; dan KIE melalui media sosial. Responden KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam

kegiatan KIE Badan POM. Indikator efektifitas KIE diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

1. Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
2. Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
3. Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
4. Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan.

BBPOM di Semarang telah melaksanakan Survei Efektifitas KIE terhadap 822 responden yang terbagi menjadi 2 bagian yaitu kuesioner KIE Tatap Muka/Langsung dan kuesioner Media. Kuesioner tatap muka diberikan hanya kepada responden yang menjadi peserta kegiatan KIE yang sedang diselenggarakan antara lain KIE bersama tokoh masyarakat serta KIE obat dan makanan yang diselenggarakan oleh UPT baik secara daring maupun tatap muka. Sedangkan kuesioner media diberikan hanya kepada responden yang pernah mengakses kanal-kanal media KIE BPOM atau menerima produk informasi BPOM dalam 1 bulan terakhir. Hingga triwulan III tahun 2025 diperoleh capaian indeks tingkat efektifitas KIE BBPOM di Semarang sebesar 88,01 yang diperoleh dari rata-rata indeks KIE tatap muka (86,798) dan KIE media (89,215). Capaian KIE Triwulan III ini melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 86,42 atau dengan capaian 101,84% dengan kriteria **Sangat Baik.**

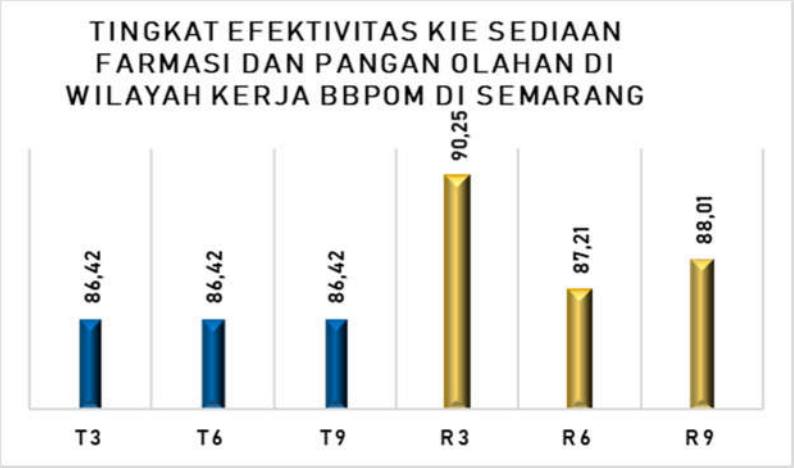
- **Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW III Tahun 2025**

Tabel 67 Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW III IKU 17

NO	IKU	Target TW III	Realisasi	Capaian (%)
17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	86,42	88,01	101,84 Sangat Baik

Pada Triwulan III Tahun 2025, target efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan ditetapkan sebesar **86,42**, sedangkan realisasi yang dicapai mencapai **88,01** dengan capaian **101,84%**. Hasil ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) di wilayah kerja BBPOM di Semarang telah berjalan efektif, melebihi target yang ditetapkan.

- **Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW Sebelumnya Tahun 2025**



Gambar 20 Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW Sebelumnya IKU 17

Jika dibandingkan dengan capaian pada TW I dan TW II, kinerja TW III menunjukkan konsistensi efektivitas kegiatan. Pada TW I, realisasi efektivitas mencapai **90,25 (104,4%)**, sedangkan TW II sebesar **87,21 (100,9%)**. Nilai efektivitas TW III sebesar **88,01 (101,84%)** menunjukkan kinerja yang stabil dengan tren capaian di atas 100% pada setiap triwulan.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan Target Tahun 2025**

Tabel 68 Ketercapaian Realisasi TW III terhadap Target 2025 IKU 17

NO	IKU	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi
17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	86,42	88,01	101,84	▲ Tercapai/ Melampaui

Realisasi efektivitas KIE sebesar **88,01** melampaui target tahunan **86,42**, dengan capaian **101,84%**. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan KIE sepanjang triwulan III telah berjalan dengan baik, dan kegiatan yang dilakukan mampu meningkatkan pemahaman serta partisipasi masyarakat terhadap pengawasan obat dan makanan.

- **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja**

Keberhasilan capaian indikator ini dipengaruhi oleh pelaksanaan KIE yang dilakukan secara rutin dan terukur, baik bersama tokoh masyarakat, sekolah, maupun lintas sektor. Pada bulan Juli, pelaksanaan KIE bersama tokoh masyarakat mencapai 4 titik dengan total peserta 892 orang, memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan efektivitas KIE. Tidak terdapat kendala berarti dalam pelaksanaan, meskipun masih terdapat 3 titik kegiatan KIE dengan tokoh masyarakat yang tertunda karena menunggu konfirmasi dari tenaga ahli anggota dewan.

- **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Upaya yang dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan efektivitas KIE antara lain:

Melakukan koordinasi intensif dengan tenaga ahli anggota DPR untuk memastikan pelaksanaan kegiatan KIE tersisa dapat segera direalisasikan.

Memperkuat pelaksanaan KIE rutin di sekolah, komunitas masyarakat, dan lintas sektor guna menjaga kesinambungan edukasi publik.

Melakukan inovasi media KIE yang lebih interaktif agar pesan edukasi dapat tersampaikan dengan lebih luas dan efektif.

Mengoptimalkan pelaporan dan evaluasi KIE berbasis hasil (outcome) agar capaian efektivitas dapat terus terukur dan meningkat.

- **Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja**

Indikator	Pagu Anggaran(Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian IKU (%)	Tingkat Efisiensi
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	17,055,022,000	2,240,975,526	13.14	101.84	Tidak Efisien

Realisasi anggaran untuk indikator ini mencapai **13,14%** dengan capaian kinerja **101,84%** dan tingkat efisiensi **0,75**, yang dikategorikan **tidak efisien**. Ketidakefisienan disebabkan oleh adanya beberapa kegiatan KIE dengan tokoh masyarakat yang tertunda pelaksanaannya sehingga penggunaan anggaran belum optimal. Namun demikian, hasil kegiatan yang telah dilaksanakan menunjukkan efektivitas yang tinggi terhadap peningkatan pemahaman masyarakat.

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Pencapaian indikator ini didukung oleh pelaksanaan program KIE lintas sektor dan kegiatan edukasi publik terkait keamanan obat dan makanan. Kegiatan KIE yang dilakukan bersama sekolah, lintas sektor, SAKA POM, organisasi wanita, organisasi profesi dan komunitas masyarakat berperan penting dalam meningkatkan indeks efektivitas. Dukungan dari berbagai pihak termasuk

tokoh masyarakat dan institusi pendidikan juga menjadi faktor utama dalam mempertahankan capaian di atas target.

- **Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

Laporan kinerja ini dimanfaatkan sebagai dasar evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan KIE dan sebagai bahan penyusunan strategi peningkatan efektivitas komunikasi publik BBPOM di Semarang. Selain itu, laporan ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja KIE tahun berikutnya, terutama untuk menyesuaikan strategi pelaksanaan kegiatan KIE berbasis komunitas dan lintas sektor agar hasilnya semakin optimal.

IKU 18. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Jumlah sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan aman dihitung berdasarkan jumlah sekolah dengan kriteria memiliki Kader Keamanan Pangan Sekolah yang aktif, melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah, dan mempunyai dokumen rencana aksi serta inovasi program keamanan pangan.

Tujuan intervensi keamanan PJAS adalah menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi anak usia sekolah serta memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan. Satuan Pendidikan yang diintervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/SMK/MA.

Tahapan pelaksanaan intervensi Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan berdasarkan petunjuk teknis yang telah ditetapkan adalah meliputi tahapan advokasi lintas sektor program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan (SAPA Sekolah), sosialisasi keamanan pangan sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan, Bimtek kader keamanan pangan untuk kader keamanan pangan sekolah, monitoring dan sertifikasi sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan sekolah, dan pengawalan sekolah yang sudah diintervensi PJAS Aman.

Bimbingan Teknis diberikan kepada guru/kepala sekolah sebagai Kader Keamanan Pangan Sekolah untuk melaksanakan pembudayaan keamanan pangan di sekolah intervensi. Pendampingan dan monitoring kepada sekolah dalam pelaksanaan rencana aksi dalam pelaksanaan pembudayaan keamanan pangan.

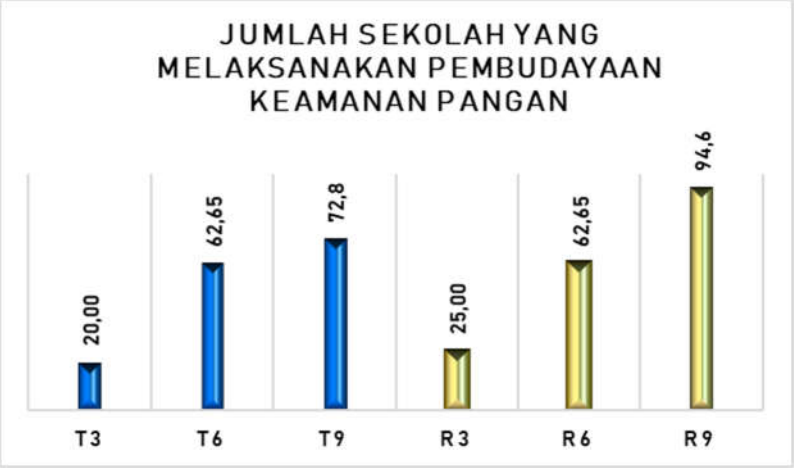
- **Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW III Tahun 2025**

Tabel 69 Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW III IKU 18

NO	IKU	Target TW III	Realisasi	Capaian (%)
18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	86,00	94,60	110,00
				Sangat Baik

Pada Triwulan III Tahun 2025, indikator *Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan* menunjukkan capaian yang sangat baik. Dari target sebesar **86 %**, realisasi mencapai **94,60 %** atau **110%** dari target yang ditetapkan. Hasil ini menggambarkan pelaksanaan kegiatan yang melebihi ekspektasi, dengan pelaksanaan kegiatan monitoring, verifikasi, dan sertifikasi terhadap sekolah-sekolah intervensi berjalan optimal sesuai jadwal.

- **Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW sebelumnya Tahun 2025**



Gambar 21 Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW Sebelumnya IKU 18

Jika dibandingkan dengan capaian pada Triwulan I dan II, kinerja pada Triwulan III menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada TW I, capaian realisasi sebesar **25 %**, dan meningkat menjadi **62,65 %** pada TW II, hingga mencapai **94,60 %** di TW III. Kenaikan ini menandakan progres pelaksanaan kegiatan yang terakselerasi di paruh kedua tahun, seiring dengan pelaksanaan sertifikasi, verifikasi ulang, serta bimtek batch 2 bagi kader keamanan pangan sekolah.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan Target Tahun 2025**

Tabel 70 Ketercapaian Realisasi TW III terhadap Target 2025 IKU 18

NO	IKU	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi
18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	20,00	94,60	94,60	Akan Tercapai

Jika dibandingkan dengan target tahunan sebesar **20 sekolah**, capaian kumulatif hingga TW III yaitu **94,60 %** menunjukkan .....

▪ Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Keberhasilan capaian indikator ini didorong oleh beberapa faktor utama, antara lain konsistensi pelaksanaan tahapan kegiatan sesuai pedoman, koordinasi yang baik dengan Dinas Pendidikan dan pihak sekolah, serta penguatan kapasitas kader keamanan pangan di tingkat sekolah. Selain itu, kegiatan sosialisasi melalui media sosial dan sarasehan edukatif seperti *Paman Kece* turut mendukung peningkatan kesadaran dan partisipasi sekolah. Tidak terdapat kendala berarti selama pelaksanaan, karena seluruh kegiatan berjalan sesuai jadwal dan dukungan lintas sektor berjalan baik.

▪ Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Untuk mempertahankan kinerja yang telah dicapai, langkah perbaikan yang akan dilakukan antara lain meliputi pelaksanaan sertifikasi ulang terhadap sekolah intervensi tahun 2024, pelaksanaan bimtek lanjutan batch 2, serta verifikasi laporan sekolah batch 2. Selain itu, peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan akan diarahkan pada pendalaman materi bagi kader dan penguatan jejaring antar sekolah agar budaya keamanan pangan dapat diterapkan secara berkelanjutan.

▪ Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Tabel 71 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya IKU 18

Indikator	Pagu Anggaran(Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian IKU (%)	Tingkat Efisiensi
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	653,579,000	51,501,800	7.88	110.00	Tidak Efisien

Tingkat efisiensi pada indikator ini sebesar **0,75** yang dikategorikan **Tidak Efisien**. Rendahnya tingkat efisiensi disebabkan oleh peningkatan skala

kegiatan yang mencakup perluasan wilayah intervensi dan pelaksanaan bimtek tambahan. Meskipun demikian, hasil yang dicapai jauh melebihi target, sehingga dari perspektif efektivitas program, penggunaan sumber daya tetap dinilai produktif dan memberikan *value for money* terhadap pencapaian indikator kinerja.

▪ Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Capaian kinerja ini didukung oleh berbagai program pendukung seperti kegiatan monitoring kader keamanan pangan sekolah, verifikasi dan sertifikasi sekolah intervensi, pelaksanaan Bimtek kader keamanan pangan batch 2, serta sosialisasi budaya keamanan pangan melalui media sosial. Selain itu, kolaborasi dengan pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat pendidikan berperan penting dalam memperkuat keberhasilan implementasi pembudayaan keamanan pangan.

▪ Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja ini dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan program keamanan pangan sekolah, sekaligus menjadi dasar penetapan sekolah penerima sertifikat dan penghargaan PBKPKS. Selain itu, hasil evaluasi digunakan untuk penyusunan strategi intervensi tahun berikutnya dan sebagai acuan dalam penguatan program keamanan pangan di lingkungan pendidikan secara berkelanjutan.

IKU 19. Jumlah desa pangan aman

Jumlah desa pangan aman dihitung dari jumlah desa yang memiliki kader keamanan pangan desa yang aktif, melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa, dan mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri.

Gerakan Keamanan Pangan Desa merupakan aksi nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman sampai pada tingkat perseorangan dan memperkuat ekonomi desa. Melalui program desa pangan aman diharapkan keamanan pangan di desa tetap dapat terjamin.keamanan, mutu dan gizinya. Pelaksanaan Desa Pangan Aman disesuaikan dengan kebijakan pemerintah saat ini dengan tujuan untuk mendukung pencapaian target pemerintah, salah satunya program percepatan penurunan stunting, serta untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui pencapaian target-target pembangunan keberlanjutan di desa.

Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) meliputi tahapan advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, monitoring dan evaluasi serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan tahun sebelumnya.

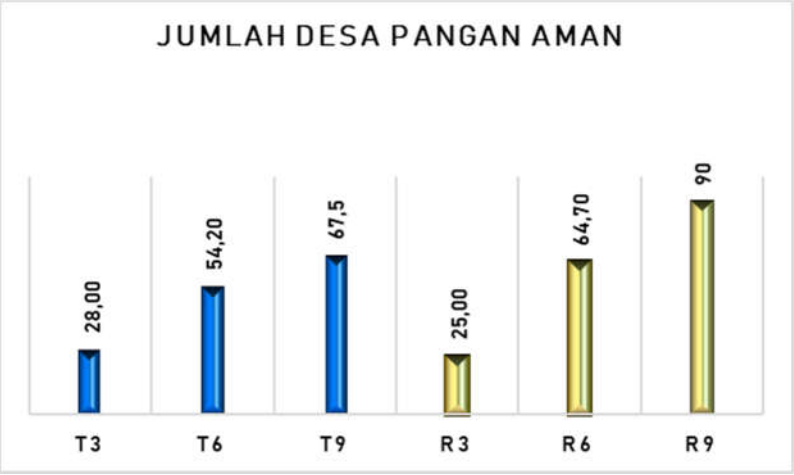
▪ Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW III Tahun 2025

Tabel 72 Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW III IKU 19

NO	IKU	Target TW III	Realisasi	Capaian (%)
19	Jumlah desa pangan aman	67,50	90,00	133,33
				Tidak dapat disimpulkan

Pada Triwulan III Tahun 2025, indikator *Jumlah Desa Pangan Aman* menunjukkan capaian yang sangat baik. Dari target sebesar **67,5%**, realisasi mencapai **90,00%**, atau **133,33%** dari target TW III. Hasil ini mencerminkan bahwa pelaksanaan kegiatan di lapangan berjalan lebih cepat dan efektif dibandingkan jadwal perencanaan. Tahapan yang telah dilaksanakan mencakup kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) di Desa Asinan, serta kegiatan pengawalan bagi desa yang diintervensi tahun 2020 sampai tahun 2024. Pada TW III juga telah dilaksanakan bimbingan teknis (bimtek) kader keamanan pangan desa kepada desa-desa intervensi tahun 2025 yang baru (***batch* 2)**.

▪ Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW sebelumnya Tahun 2025



Gambar 22 Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW Sebelumnya IKU 19

Jika dibandingkan dengan capaian pada TW sebelumnya, terlihat peningkatan yang konsisten. Pada TW I, realisasi baru mencapai **25%**, meningkat menjadi **64,7%** pada TW II, dan melonjak hingga **90%** pada TW III. Kenaikan signifikan ini didorong oleh percepatan kegiatan pengawalan dan pembentukan kader keamanan pangan di 3 desa intervensi tahun 2025 yang baru (***batch* 2)** yang mulai dilaksanakan sejak Agustus hingga September 2025.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan Target Tahun 2025**

Tabel 73 Ketercapaian Realisasi TW III terhadap Target 2025 IKU 19

NO	IKU	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi
19	Jumlah desa pangan aman	6,00	90,00	90,00	Akan Tercapai

Jika dibandingkan dengan target tahunan sebesar **6 desa**, capaian hingga TW III sudah mencapai **90%** dari target tahun berjalan. Hal ini menunjukkan progres yang hampir menyelesaikan target tahunan lebih awal dari waktu yang direncanakan. Realisasi yang tinggi ini juga didukung oleh pelaksanaan kegiatan pengawalan dengan penambahan kader baru di **Desa Kenteng** dan **Desa Randusari** sekaligus dalam rangka aksi nyata pembentukkan kader Gumregah, serta pelaksanaan intervensi ke **Desa Kebondalem**, **Desa Brongkol**, dan **Desa Gemawang** yang telah melaksanakan Bimtek kader dan komunitas.

- **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja**

Keberhasilan capaian indikator ini tidak lepas dari efektivitas pelaksanaan kegiatan di lapangan serta kesiapan desa sasaran dalam mendukung program keamanan pangan. Koordinasi yang baik antara tim BBPOM di Semarang dengan pemerintah desa dan masyarakat menjadi faktor utama keberhasilan. Selain itu, kegiatan *Bimtek Kader Keamanan Pangan* dan *Bimtek Keamanan Pangan Komunitas* mampu memperkuat kapasitas masyarakat lokal dalam menjaga keamanan pangan secara mandiri. Tidak terdapat kendala berarti selama pelaksanaan, karena seluruh tahapan monev dan pengawalan dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan jadwal yang telah ditetapkan.

- **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Upaya yang akan dilakukan ke depan meliputi pelaksanaan tahap monitoring dan evaluasi batch 2 bagi desa intervensi baru, yakni Desa Kebondalem, Desa Brongkol, dan Desa Gemawang, yang dijadwalkan pada bulan Oktober 2025. Selain itu, penguatan kapasitas kader keamanan pangan akan terus ditingkatkan melalui pelatihan lanjutan dan pengimbasan antar desa, agar

program keamanan pangan dapat berjalan berkelanjutan dan mandiri di tingkat komunitas.

- **Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja**

Tabel 74 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya IKU 19

Indikator	Pagu Anggaran(Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian IKU (%)	Tingkat Efisiensi
Jumlah desa pangan aman	1,308,912,000	183,809,197	14.04	133.33	Tidak Efisien

Tingkat efisiensi indikator ini sebesar **0,75**, yang dikategorikan **Tidak Efisien**. Rendahnya tingkat efisiensi disebabkan oleh perluasan kegiatan ke lebih banyak desa intervensi dan pelaksanaan beberapa kegiatan (pengawalan dan bimtek) secara bersamaan untuk mempercepat capaian target. Namun, secara efektivitas hasil yang diperoleh sangat baik, karena capaian kinerja melampaui target dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kapasitas masyarakat desa dalam keamanan pangan.

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Beberapa program pendukung yang berkontribusi terhadap keberhasilan indikator ini antara lain pelaksanaan *Monitoring dan Evaluasi Desa Pangan Aman*, *Bimtek Kader Keamanan Pangan*, dan *Bimtek Keamanan Pangan bagi Komunitas Masyarakat*. Program pengimbasan dan pembentukan kader baru di Desa Kenteng dan Randusari, serta perluasan intervensi ke tiga desa baru juga memperkuat keterlibatan masyarakat dan memperluas jangkauan program keamanan pangan.

- **Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

Laporan kinerja ini dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan program keamanan pangan desa dan sebagai dasar penentuan strategi pengimbasan untuk tahun berikutnya. Selain itu, laporan ini digunakan sebagai referensi dalam penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas kader dan desa binaan di wilayah kerja BBPOM di Semarang, agar keberlanjutan program keamanan pangan dapat terjaga secara optimal.

IKU 20. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) dihitung berdasarkan jumlah pasar yang memiliki kriteria bahwa pasar tersebut berlokasi permanen, memiliki pengelola pasar dan mendapat dukungan/ antusiasme dari Pemerintah Daerah setempat, pasar yang mempunyai

potensi peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan, pasar yang secara umum memenuhi kriteria pasar sehat.

Tujuan intervensi PPABK adalah untuk menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat, dan menggugah komunitas pasar agar dapat berdaya dan mandiri dalam pembinaan dan pengawasan kepada komunitas pasar.

Lingkup kegiatan pada program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) adalah sebagai berikut :

1) Forum Advokasi Komitmen Pemerintah Daerah dan Lintas Sektor Pasar. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan koordinasi dengan lintas sektor dalam rangka menggalang komitmen pemerintah daerah tentang pentingnya berbagi tanggung jawab untuk memastikan keamanan pangan pada setiap titik rantai pangan sesuai dengan perannya. Pemangku kepentingan yang diharapkan terlibat secara aktif, antara lain Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan pasar, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Bappeda

2) Bimbingan Teknis dan Penyuluhan Komunitas Pasar kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, pemberdayaan, dan kemandirian komunitas pasar tentang keamanan pangan dan ikut serta dalam mengawasi pangan yang beredar di pasar serta meningkatkan partisipasi komunitas pasar dalam menerapkan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik di pasar rakyat

3) Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang pentingnya keamanan pangan bagi kesehatan masyarakat melalui konten terkait pasar pangan aman berbasis komunitas dan keamanan pangan. Konten ini disosialisasikan melalui media sosial atau metode lainnya kepada pengelola/ paguyuban pasar kemudian disosialisasikan oleh pengelola/ paguyuban pasar kepada komunitas pasar.

4) Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring Evaluasi dilakukan melalui kegiatan cek produk pangan olahan terdaftar melalui CEK KLIK yang dilakukan oleh komunitas pasar serta monitoring evaluasi pengelola/ paguyuban pasar yang sudah di bimtek serta penyusunan rencana aksi 2026. Disamping itu, pengawasan keamanan pangan bertujuan untuk memberdayakan petugas pengelola pasar untuk dapat melakukan pengawasan terhadap bahan berbahaya, bahan pangan, maupun produk pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya di pasar yang dikelolanya melalui penyebaran informasi dan sosialisasi

produk keamanan pangan kepada pedagang/penjual pasar

5) Pengawalan Pasar Aman dilakukan dalam rangka kegiatan monev keberlanjutan program melalui sosialisasi keamanan pangan terhadap pasar pengawalan tahun 2024

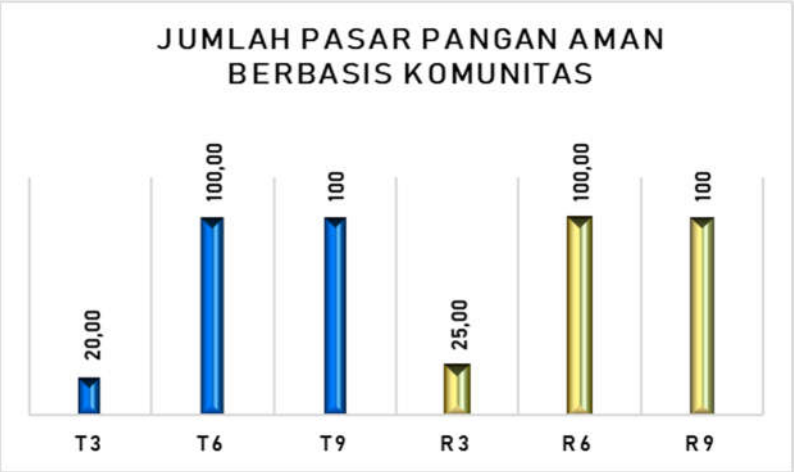
- **Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW III Tahun 2025**

Tabel 75 Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW III IKU 20

NO	IKU	Target TW III	Realisasi	Capaian (%)
20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100	100	100,00 Baik

Pada Triwulan III Tahun 2025, indikator *Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK)* menunjukkan capaian optimal, yaitu **100%** dari target TW III sebesar **100%**. Hal ini berarti seluruh tahapan kegiatan yang direncanakan telah selesai dilaksanakan dengan baik sesuai dengan pedoman dan arahan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan (PMPUPO). Kegiatan yang dilakukan pada TW III meliputi koordinasi replikasi PPABK ke 8 (delapan) kabupaten/kota di wilayah kerja BBPOM di Semarang yaitu Kabupaten Magelang, Kabupaten Semarang, Kota Pekalongan, Kabupaten Rembang, Kota Magelang, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Pati dan Kabupaten Pekalongan, dengan tindak lanjut berupa pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis (bimtek) di beberapa daerah.

- **Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW sebelumnya Tahun 2025**



Gambar 23 Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW Sebelumnya IKU 20

Dibandingkan dengan capaian kinerja pada TW sebelumnya, terjadi peningkatan yang signifikan. Pada TW I, capaian baru mencapai **25%**, meningkat menjadi **100%** pada TW II, dan tetap terjaga di **100%** pada TW III. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh target tahapan telah berhasil diselesaikan

sebelum akhir tahun, dan kegiatan pada TW III lebih berfokus pada penguatan dan monitoring hasil replikasi yang telah dilaksanakan oleh daerah.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan Target Tahun 2025**

Tabel 76 Ketercapaian Realisasi TW III terhadap Target 2025 IKU 20

NO	IKU	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi
20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1,00	100,00	100,00	▲ Tercapai/ Melampaui

Jika dibandingkan dengan target tahunan sebesar **1 pasar pangan aman berbasis komunitas**, realisasi hingga TW III telah mencapai **100%**, sesuai target tahun berjalan. Artinya, kegiatan pembentukan PPABK telah selesai sepenuhnya. Pada TW III, kegiatan utama mencakup **sosialisasi PPABK ke Pasar Pagi Kabupaten Grobogan** dan **Bimtek serta penyuluhan replikasi PPABK di Pasar Tempuran, Kabupaten Magelang**, yang merupakan dua daerah pelaksana replikasi program tahun 2025.

- **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja**

Keberhasilan pencapaian indikator ini disebabkan oleh koordinasi yang efektif antara BBPOM di Semarang dengan Dinas Perdagangan kabupaten/kota yang menjadi target pembentukan PPABK. Dukungan surat arahan dari Direktorat PMPUPO juga menjadi dasar kuat dalam pelaksanaan kegiatan di daerah. Namun demikian, terdapat kendala di beberapa kabupaten/kota lain seperti Kabupaten Semarang, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Rembang, Kota Magelang dan Kabupaten Pati yang belum dapat melaksanakan replikasi PPABK karena keterbatasan anggaran daerah. Meski demikian, dua kabupaten yaitu **Kabupaten Magelang** dan **Kabupaten Grobogan** berhasil melaksanakan replikasi sesuai rencana.

- **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Ke depan, BBPOM di Semarang akan melakukan **monitoring terhadap keberlanjutan pelaksanaan pasar pangan aman di dua lokasi replikasi**, yaitu **Pasar Pagi di Kabupaten Grobogan** dan **Pasar Tempuran di Kabupaten Magelang**. Selain itu, akan dilakukan pendekatan lebih intensif kepada kabupaten/kota lain untuk mendorong alokasi anggaran bagi pelaksanaan replikasi PPABK di tahun mendatang, serta memperluas cakupan pendampingan melalui kegiatan sosialisasi lintas sektor.

- **Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja**

Tabel 77 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya IKU 20

Indikator	Pagu Anggaran(Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian IKU (%)	Tingkat Efisiensi
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	130,777,000	38,981,590	29.81	100.00	Tidak Efisien

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator ini sebesar **0,75**, yang dikategorikan **Tidak Efisien**. Dengan adanya efisiensi anggaran, menyebabkan pagu anggaran mengalami perubahan. Perhitungan ini berdasarkan pagu awal sebelum terkena efisiensi anggaran dengan realisasi anggaran setelah terkena efisiensi anggaran. Meskipun demikian, efisiensi relatif rendah ini diimbangi oleh efektivitas hasil, di mana seluruh target indikator telah tercapai sepenuhnya.

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Program utama yang menunjang pencapaian indikator ini adalah kegiatan **Koordinasi dan Sosialisasi Replikasi PPABK**, **Bimbingan Teknis dan Penyuluhan di Pasar Replikasi**, serta dukungan dari kegiatan **BIS PAMAN (Bincang-bincang Seputar Pangan Aman)** yang memperkuat peran komunitas dalam mewujudkan pasar yang memenuhi standar keamanan pangan. Faktor yang menjadi penghambat di beberapa daerah adalah keterbatasan anggaran daerah, namun secara umum kegiatan yang didampingi BBPOM Semarang berjalan sesuai rencana.

- **Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

Laporan kinerja indikator ini dimanfaatkan sebagai dasar evaluasi keberhasilan program PPABK dalam mendukung peningkatan keamanan pangan di tingkat pasar. Selain itu, laporan ini menjadi acuan bagi Direktorat PMPUPO dan pemerintah daerah dalam perencanaan replikasi PPABK di tahun berikutnya serta untuk memperkuat sinergi antar instansi dalam pembentukan pasar yang aman, sehat, dan berbasis partisipasi komunitas.

SK 4. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

Tabel 78 Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan Ke 4

NO	SK	IKU	Target TW III	Realisasi	Capaian (%)
21	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	88,33	92,68	104,92
Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan					104,92

Sasaran Kegiatan 5 diukur melalui indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat Cara Pembuatan Obat

Tradisional yang Baik (CPOTB), Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB), dan/atau IP-CPPOB pangan olahan. Pada Triwulan II Tahun 2025, indikator ini menargetkan capaian sebesar 88,33%, dan berhasil direalisasikan sebesar 92,68%, sehingga menghasilkan capaian sebesar 104,92% terhadap target triwulan.

Nilai pencapaian Sasaran Kegiatan 5 secara keseluruhan adalah 104,92, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program pendampingan UMKM telah melebihi target yang ditetapkan. Capaian ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis, pendampingan, dan monitoring yang dilakukan secara hybrid (daring dan luring), serta respons positif dari pelaku usaha terhadap program fasilitasi sertifikasi keamanan dan mutu produk.

IKU 21. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan atau IP CPPOB pangan olahan

Sejalan dengan konsep pengawasan BPOM saat ini yaitu pengawasan proaktif maka Balai Besar POM di Semarang giat dalam melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha skala UMKM terutama produk pangan olahan, kosmetik dan obat tradisional sebagai dukungan meningkatkan daya saing dan memperluas distribusi produk. Bentuk pendampingan yang dilakukan antara lain pembinaan saat pemeriksaan sarana, mengadakan kegiatan bimbingan teknis kepada pelaku usaha/penanggung jawab baik secara luring maupun daring, memberikan pendampingan dan pelayanan proses sertifikasi/registrasi. Selain sebagai pencapaian kinerja Balai Besar POM di Semarang, kegiatan ini diharapkan menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya para pelaku usaha skala UMKM dan dapat memberikan bukti nyata dukungan bagi UMKM sehingga secara tidak langsung juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di era pemulihan ekonomi sekarang ini.

Ruang Lingkup UMKM yang didampingi adalah UMKM Pangan olahan yang mencakup usaha mikro dan kecil, sementara untuk UMKM kosmetik dan OBA (Obat Bahan Alam) yaitu :

a. UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B
b. UMKM pada OBA mencakup UKOT dan UMOT meliputi :
    - Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I
    - Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya

Definisi UMKM yang memenuhi standar adalah :

a. UMK yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK
b. UMKM OBA yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan Obat Bahan Alam yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat CPOTB secara Bertahap (tahap 1 atau tahap 1 ke tahap 2 atau tahap 2 ke tahap 3)
c. UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB

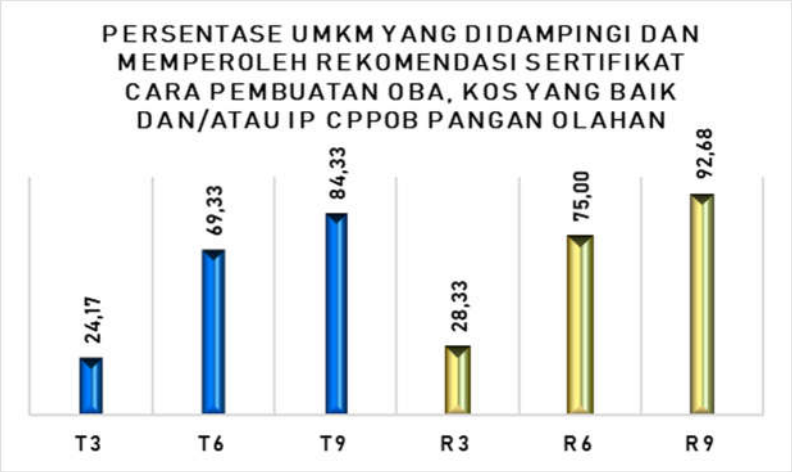
- **Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW III Tahun 2025**

Tabel 79 Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW III IKU 21

NO	IKU	Target TW III	Realisasi	Capaian (%)
21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	88,33	92,68	104,92 Sangat Baik

Target kinerja TW III tahun 2025 ditetapkan sebesar 88,33%, sedangkan realisasi kinerja mencapai 92,68%, atau 104,92% dari target yang ditetapkan. Hasil ini menunjukkan bahwa capaian indikator telah melampaui target triwulanan, yang berarti pelaksanaan kegiatan pendampingan UMKM berjalan efektif sesuai rencana kerja.

- **Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW Sebelumnya Tahun 2025**



Gambar 24 Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW Sebelumnya IKU 21

Jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terjadi peningkatan yang signifikan. Pada TW I realisasi sebesar 28,33% dan pada TW II sebesar 75%, sementara TW III meningkat menjadi 92,68%. Kenaikan tersebut menggambarkan progres yang positif dan konsisten dalam kegiatan pendampingan serta penerbitan sertifikat kepada UMKM di bidang OBA, kosmetik, dan pangan olahan.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan Target Tahun 2025**

Tabel 80 Ketercapaian Realisasi TW III terhadap Target 2025 IKU 21

NO	IKU	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi
21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB	18,44	92,68	92,68	Akan Tercapai

Realisasi TW III sebesar 92,68% dari target tahunan 18,44 (setara 100%), menunjukkan bahwa capaian hingga TW III hampir memenuhi target akhir tahun. Dengan capaian ini, target tahunan diperkirakan akan terpenuhi 100% bahkan berpotensi terlampaui pada akhir tahun 2025.

- **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja**

Keberhasilan pencapaian indikator ini dipengaruhi oleh komitmen pelaku UMKM dalam memenuhi standar produksi yang baik (GMP) serta pendampingan intensif dari BBPOM di Semarang. Capaian GMP untuk OBA sebesar 4 UMKM, kosmetik 5 UMKM, dan pangan olahan dengan sertifikat IP CPPOB sebanyak 28 sertifikat, sehingga total 37 UMKM telah memenuhi GMP dari target DIPA 26 UMKM. Tidak terdapat kendala berarti dalam pelaksanaan

kegiatan, karena seluruh proses bimbingan teknis dan evaluasi berjalan sesuai jadwal.

- **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Untuk menjaga kesinambungan dan peningkatan capaian, BBPOM di Semarang akan memperluas cakupan UMKM binaan baru, terutama yang belum tersertifikasi. Monitoring berkala terhadap UMKM penerima sertifikat juga akan dilakukan untuk memastikan kepatuhan berkelanjutan.

- **Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja**

Tabel 81 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya IKU 21

Indikator	Pagu Anggaran(Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian IKU (%)	Tingkat Efisiensi
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	97,721,000	13,908,000	14.23	104.92	Tidak Efisien

Realisasi anggaran untuk kegiatan ini tercatat sebesar 14,23%, dengan capaian IKU sebesar 104,92%. Meskipun capaian kinerja tinggi, namun tingkat efisiensi sebesar 0,75 menunjukkan kategori tidak efisien karena rasio output terhadap penggunaan sumber daya belum optimal. Hal ini terutama disebabkan oleh distribusi beban kerja dan dukungan anggaran lintas kegiatan yang belum proporsional terhadap capaian kinerja.

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Program pendampingan dan sertifikasi UMKM yang dilaksanakan melalui **bimbingan teknis GMP, evaluasi lapangan** menjadi faktor utama yang menunjang keberhasilan indikator ini. Koordinasi efektif dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Perdagangan juga turut memperlancar proses rekomendasi dan sertifikasi bagi UMKM yang telah memenuhi persyaratan produksi yang baik.

- **Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

Laporan kinerja ini digunakan sebagai bahan evaluasi dan perencanaan kegiatan pembinaan UMKM di periode selanjutnya, khususnya dalam

menentukan sasaran prioritas pendampingan serta kebutuhan pelatihan CPPOB. Data capaian juga dimanfaatkan untuk penyusunan laporan akuntabilitas kinerja (LAKIP) dan sebagai evidence-based decision making dalam peningkatan mutu pengawasan pre-market oleh BBPOM di Semarang.

SK 5. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Semarang

Tabel 82 Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan Ke 5

NO	SK	IKU	Target TW III	Realisasi	Capaian (%)
22	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Semarang	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Semarang	75,00	76,07	101,43
Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan					101,43

Sasaran Kegiatan 6: *Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Semarang* diukur melalui **Indikator Kinerja Utama (IKU): Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**.

Pada Triwulan II Tahun 2025, target yang ditetapkan sebesar **75,00%**, dan realisasinya mencapai **76,07%**, sehingga capaian kinerja mencapai **101,43%**. Hal ini menunjukkan bahwa penindakan yang dilakukan telah melampaui target dan berjalan secara efektif. Nilai pencapaian Sasaran Kegiatan 6 sebesar **101,43%** mencerminkan pelaksanaan penyidikan yang berhasil dalam mengungkap dan menindak kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang.

IKU 22. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Semarang

Target perkara Balai Besar POM di Semarang sebanyak 7 (tujuh) perkara. Untuk penyelesaian perkara ini diperlukan kerja sama lintas sektor yang baik. Peran intelijen Balai Besar POM di Semarang dengan didukung informasi dari Direktorat Intelijen Obat dan Makanan dan Direktorat Siber Obat dan Makanan diperlukan dalam hal melengkapi informasi target yang akan dilakukan penyidikan. Sedangkan untuk penyelesaian berkas perkara diperlukan kerja sama dengan lintas sektor yaitu Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah. Selain itu pemberlakuan wajib lapor terhadap tersangka ke kantor Balai Besar POM di Semarang dalam periode tertentu selama proses pemberkasan turut mendukung keberhasilan proses

penyidikan agar tersangka yang tidak dilakukan penahanan bisa kooperatif selama proses penyidikan.

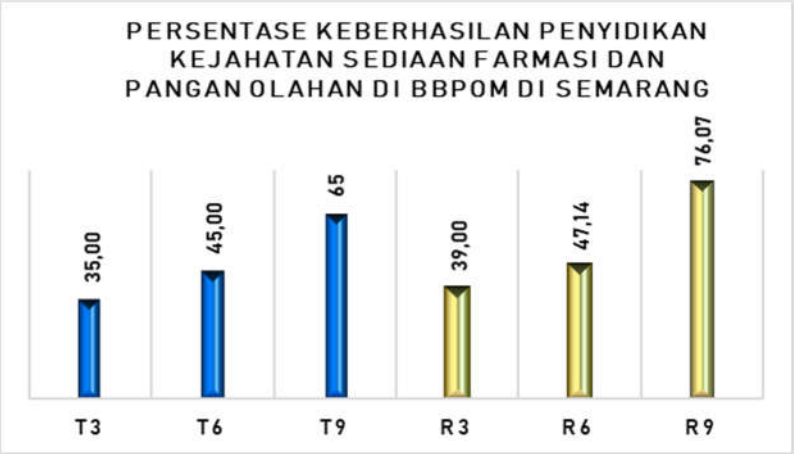
- **Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW III Tahun 2025**

Tabel 83 Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW III IKU 22

NO	IKU	Target TW III	Realisasi	Capaian (%)
22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Semarang	75,00	76,07	101,43 Sangat Baik

Pada Triwulan III Tahun 2025, target kinerja ditetapkan sebesar **75%**, dengan realisasi mencapai **76,07%**, atau **101,43% dari target**. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan penyidikan terhadap kasus-kasus pelanggaran di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan berjalan dengan baik dan telah melampaui target yang ditetapkan.

- **Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW Sebelumnya Tahun 2025**



Gambar 25 Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW Sebelumnya IKU 22

Dibandingkan dengan capaian pada triwulan sebelumnya, terjadi peningkatan yang stabil. Realisasi pada TW I sebesar **39%**, TW II sebesar **47,14%**, dan meningkat menjadi **76,07%** pada TW III. Kenaikan ini menunjukkan adanya konsistensi kinerja PPNS BBPOM di Semarang dalam menyelesaikan proses penyidikan hingga tahap P21 dan Tahap II di Kejaksaan.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan Target Tahun 2025**

Tabel 84 Ketercapaian Realisasi TW III terhadap Target 2025 IKU 22

NO	IKU	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi
22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Semarang	85,00	76,07	89,49	Akan Tercapai

Target tahunan ditetapkan sebesar 85%, sementara capaian kumulatif hingga TW III telah mencapai 89,49%, melampaui target tahunan yang telah ditetapkan. Hasil ini menunjukkan bahwa target tahunan diproyeksikan akan tercapai sepenuhnya bahkan berpotensi terlampaui hingga akhir tahun 2025.

- **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja**

Keberhasilan pencapaian indikator ini dipengaruhi oleh peningkatan efektivitas koordinasi antara PPNS BBPOM di Semarang dengan Korwas PPNS Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah serta ketepatan penyelesaian berkas perkara dalam hal pemenuhan terhadap syarat formil dan materiil. Pada bulan Juli 2025, telah dilakukan penyidikan terhadap 2 perkara, di mana satu perkara telah mencapai tahap P21. Selanjutnya, pada bulan Agustus dan September 2025, terdapat 1 berkas yang telah mencapai tahap P21 dan 1 berkas yang telah diserahkan Tahap II, sementara berkas lainnya masih dalam proses pemeriksaan di Kejaksaan. Tidak terdapat kendala berarti yang memengaruhi proses penyidikan selama periode pelaporan.

- **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Untuk menjaga dan meningkatkan capaian kinerja, BBPOM di Semarang akan terus memperkuat kapasitas dan kompetensi PPNS melalui kegiatan pelatihan teknis serta meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum (APH), khususnya Kejaksaan dan Kepolisian. Selain itu, optimalisasi penggunaan sistem digital dalam manajemen berkas perkara akan dilakukan untuk mempercepat penyelesaian penyidikan dan pelaporan hasil kinerja PPNS.

- **Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja**

Tabel 85 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya IKU 22

Indikator	Pagu Anggaran(Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian IKU (%)	Tingkat Efisiensi
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Semarang	813,876,000	675,965,644	83.06	101.43	Efisien

Realisasi anggaran pada indikator ini sebesar 83,06%, dengan capaian kinerja 101,43%, menghasilkan tingkat efisiensi 0,95 yang termasuk dalam kategori efisien. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya telah berjalan optimal dan proporsional terhadap output yang dihasilkan, dengan hasil kinerja yang melebihi target tanpa pemborosan anggaran.

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Keberhasilan kinerja ini tidak lepas dari pelaksanaan program peningkatan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi ketentuan. Kegiatan koordinasi lintas sektor, pendampingan teknis PPNS, serta sinergi dengan Kejaksaan dan Kepolisian menjadi faktor utama dalam mempercepat proses penyidikan hingga ke tahap P21 dan Tahap II.

- **Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

Laporan kinerja ini digunakan sebagai bahan evaluasi internal PPNS BBPOM di Semarang dalam upaya meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu penyelesaian perkara. Selain itu, laporan ini dimanfaatkan untuk perencanaan strategi penegakan hukum tahun berikutnya, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), serta penguatan akuntabilitas publik dalam pelaksanaan fungsi pengawasan post-market.

SK 6. Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif

Tabel 86 Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan Ke 6

NO	SK	IKU	Target TW III	Realisasi	Capaian (%)
23	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50,00	50,00	100,00
Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan					100,00

Sasaran Kegiatan 6: Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di

wilayah kerja BBPOM di Semarang diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU): *Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.*

Pada Triwulan II Tahun 2025, target yang ditetapkan sebesar 50,00%, dan realisasinya juga mencapai 50,00%, sehingga capaian kinerja mencapai 100,00%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pemantauan siber dan penyusunan laporan analisis telah berjalan tepat sasaran dan sesuai dengan standar waktu dan kualitas yang ditentukan. Nilai pencapaian Sasaran Kegiatan 7 sebesar 100,00 mencerminkan bahwa BBPOM di Semarang mampu menjaga efektivitas pemantauan digital dan penyelesaian laporan analisis secara konsisten.

IKU 23. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

Target Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025 adalah 14 (empat belas) laporan yang terdiri dari 12 (dua belas) laporan analisis penjejakan digital (laporan *takedown*), 1 (satu) laporan hasil tindak lanjut rekomendasi kejahatan obat dan makanan, dan 1 (satu) laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan.

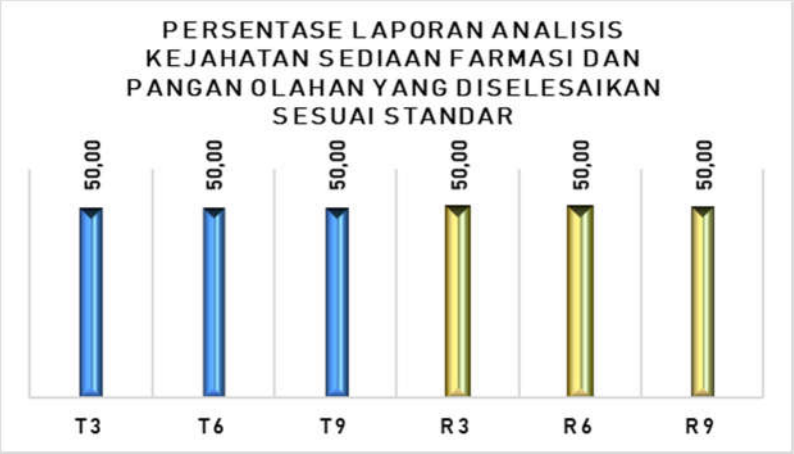
- **Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW III Tahun 2025**

Tabel 87 Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW III IKU 23

NO	IKU	Target TW III	Realisasi	Capaian (%)
23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100,00 Baik

Pada Triwulan III Tahun 2025, target kinerja ditetapkan sebesar **50%**, dengan realisasi sebesar **50%**, sehingga capaian kinerja mencapai **100% dari target**. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh laporan analisis kejahatan yang ditetapkan pada periode ini telah diselesaikan sesuai dengan standar waktu dan format yang berlaku.

- **Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW Sebelumnya Tahun 2025**



Gambar 26 Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW Sebelumnya IKU 23

Kinerja pada TW III menunjukkan konsistensi yang stabil dibandingkan TW I dan TW II, di mana keduanya juga mencapai **50%** sesuai target. Sepanjang tahun 2025, BBPOM di Semarang telah berhasil mempertahankan ketepatan waktu penyusunan laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan setiap bulannya tanpa adanya keterlambatan atau kekurangan dokumen.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan Target Tahun 2025**

Tabel 88 Ketercapaian Realisasi TW III terhadap Target 2025 IKU 23

NO	IKU	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi
23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90,00	50,00	55,56	Perlu Upaya Keras

Target tahunan indikator ini ditetapkan sebesar **90%**, sementara capaian kumulatif hingga TW III telah mencapai **55,56%**. Meskipun belum mencapai target tahunan, capaian hingga TW III menunjukkan progres positif dan sesuai dengan rencana kerja, mengingat 1 (satu) laporan hasil tindak lanjut rekomendasi kejahatan obat dan makanan, dan 1 (satu) laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan dinilaikan di akhir tahun (TW IV).

- **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja**

Keberhasilan capaian indikator ini dipengaruhi oleh disiplin pelaporan yang tinggi dan konsistensi dalam input data laporan analisis ke sistem pusat sebelum tenggat waktu setiap tanggal 25 setiap bulannya. Selama bulan Juli hingga September, BBPOM di Semarang telah melakukan input terhadap akun-

akun penjualan daring yang diajukan untuk takedown serta laporan profiling akun prioritas komoditi kosmetik.

- Juli 2025: 62 akun diajukan takedown dan 4 akun diprofiling.
- Agustus 2025: 58 link produk diajukan takedown dan 4 akun diprofiling.
- September 2025: 59 link produk diajukan takedown dan 3 akun diprofiling.
  Tidak terdapat kendala berarti selama proses penyusunan dan pengiriman laporan.

- **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Untuk meningkatkan capaian hingga mencapai target tahunan, BBPOM di Semarang akan memperkuat koordinasi dengan Direktorat Siber dan Cegah Tangkal Badan POM RI guna memastikan kesesuaian format laporan serta memperluas monitoring terhadap akun daring berisiko tinggi di berbagai platform e-commerce. Selain itu, peningkatan kapasitas petugas dalam penggunaan aplikasi monitoring digital akan dilakukan untuk mempercepat proses pelaporan.

- **Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja**

Tabel 89 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya IKU 23

Indikator	Pagu Anggaran(Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian IKU (%)	Tingkat Efisiensi
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	122,167,000	0	0.00	100.00	-

Realisasi anggaran pada indikator ini sebesar **0%**, namun capaian kinerja telah mencapai **100%**. Hal ini menunjukkan tingkat efisiensi yang sangat tinggi karena pelaksanaan kegiatan tidak memerlukan tambahan biaya operasional yang signifikan. Penggunaan sumber daya manusia internal secara optimal memungkinkan capaian kinerja tetap maksimal dengan pembiayaan yang minimal.

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Capaian indikator ini ditunjang oleh kegiatan pengawasan dan pemantauan siber (cyber patrol) terhadap peredaran produk sediaan farmasi dan pangan

olahan secara daring, serta penyusunan laporan analisis dan profil akun e-commerce yang terindikasi menjual produk ilegal. Kegiatan rutin ini berperan penting dalam mendukung efektivitas penegakan hukum dan pengendalian risiko peredaran produk berbahaya di dunia maya.

- **Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

Laporan kinerja ini dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan dalam upaya pengawasan siber (cyber surveillance) terhadap kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan. Selain itu, hasil laporan analisis digunakan oleh BPOM pusat untuk menentukan prioritas tindakan takedown, profiling, dan investigasi lanjutan, serta menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan evaluasi efektivitas sistem pengawasan daring secara nasional.

SK 7. Layanan Publik BBPOM di Semarang yang Prima

Tabel 90 Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan Ke 7

NO	SK	IKU	Target TW III	Realisasi	Capaian (%)
24	Layanan Publik BBPOM di Semarang yang Prima	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Semarang			
Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan					

Sasaran Kegiatan 7: Layanan Publik BBPOM di Semarang yang Prima diukur dengan 1 IKU yang dapat dilihat pada tabel di atas. Untuk Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan 7 belum terealisasi.

IKU 24. Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Semarang

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Evaluasi terhadap Pelayanan Publik di BBPOM di Semarang dilaksanakan untuk mengetahui implementasi penerapan kebijakan pelayanan publik serta untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik BBPOM di Semarang.

Penilaian kinerja Unit Pelayanan Publik (UPP) dikenal dengan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai BPOM (Biro Hukum dan Organisasi) dan penetapan Indeks Pelayanan Publik (IPP) oleh Kementerian PANRB.

Instrumen yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik BBPOM di Semarang berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

1. Kebijakan Pelayanan (bobot 24%)

Penilaian aspek Kebijakan Pelayanan meliputi Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan dan Survei Kepuasan Masyarakat

2. Profesionalisme SDM (25%)

Penilaian aspek profesionalisme SDM meliputi kompetensi, responsivitas, kode etik, pemberian reward dan punishment dan budaya pelayanan

3. Sarana Prasarana (18%)

Penilaian aspek Sarana dan Prasarana meliputi kenyamanan ruang tunggu dan fasilitas lainnya, sarana dan prasarana bagi yang berkebutuhan khusus, sarana prasarana front office dan sarana penunjang lainnya.

4. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%)

Penilaian aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik meliputi Sistem Informasi Elektronik dan Sistem Informasi Non Elektronik

5. Konsultasi dan Pengaduan (10%)

Penilaian aspek konsultasi dan pengaduan meliputi ketersediaan sarana dan media konsultasi dan pengaduan yang bisa dimanfaatkan oleh semua lapisan masyarakat, akuntabilitas dan tindak lanjut atas konsultasi dan pengaduan.

6. Inovasi (12%)

Penilaian aspek Inovasi meliputi penciptaan inovasi pelayanan public yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta dukungan sumber daya untuk keberlanjutan inovasi tersebut.

Tabel 91 Kategori Indeks Pelayanan Publik

Range	Nilai Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50)	B-	Baik (Dengan Catatan
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

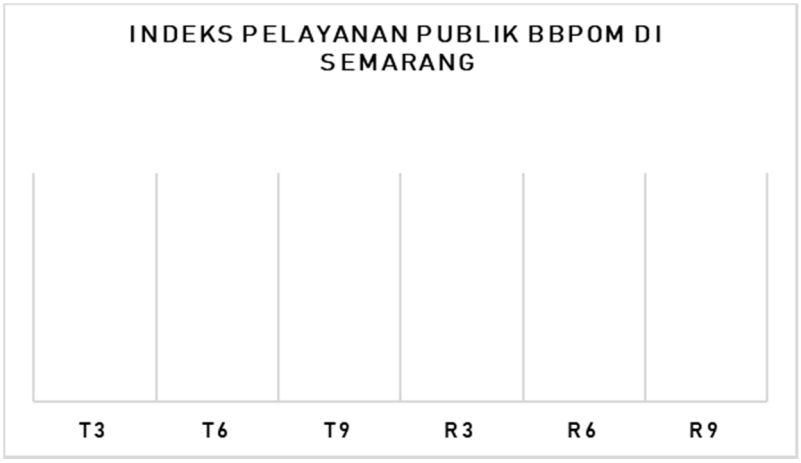
- **Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW III Tahun 2025**

Tabel 92 Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW III IKU 24

NO	IKU	Target TW III	Realisasi	Capaian (%)
24	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Semarang			

Pada Triwulan III Tahun 2025, Indeks Pelayanan Publik (IPP) BBPOM di Semarang belum memiliki nilai realisasi karena penilaian IPP merupakan indikator tahunan yang hasilnya baru ditetapkan setelah proses evaluasi dan verifikasi akhir tahun oleh Kementerian PANRB. Dengan demikian, pada TW III belum terdapat nilai capaian numerik untuk dibandingkan dengan target sebesar 4,7.

- **Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW Sebelumnya Tahun 2025**



Gambar 27 Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW Sebelumnya IKU 24

Karena indikator ini bersifat tahunan, maka belum ada perbandingan antartriwulan. Kegiatan pada TW I sampai TW III lebih berfokus pada pengumpulan data pendukung, pelaksanaan pelayanan publik yang prima, survei kepuasan masyarakat dan tindak lanjut hasil survei, monev dan dan tindak lanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat, serta pelaksanaan forum konsultasi publik (FKP) yang menjadi dasar perhitungan IPP. Dengan demikian, kinerja pada TW III merupakan kelanjutan dari tahapan persiapan menuju penilaian akhir IPP.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan Target Tahun 2025**

Tabel 93 Ketercapaian Realisasi TW III terhadap Target 2025 IKU 24

NO	IKU	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi
24	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Semarang	4,70	Tahunan	Tahunan	Tahunan

Meskipun nilai IPP belum dirilis secara resmi, capaian kegiatan hingga TW III menunjukkan kemajuan signifikan menuju target tahunan 4,7 (kategori “A” – pelayanan prima). Hal ini terlihat dari hasil Exit Meeting PEKPPP pada 17 September 2025, di mana BBPOM di Semarang memperoleh nilai 4,96 dengan predikat “Pelayanan Prima”. Hasil ini menunjukkan bahwa capaian sementara telah melampaui target tahunan yang ditetapkan.

- **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja**

Capaian kinerja yang positif hingga TW III didorong oleh pelaksanaan berbagai kegiatan peningkatan kualitas pelayanan publik, antara lain:

1. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara rutin setiap bulan, dengan publikasi dan tindak lanjut hasil SKM periode Juni–Agustus 2025.
2. Penetapan Petugas Pelayanan Publik Terbaik setiap bulan (Juni–Agustus 2025) sebagai bentuk apresiasi dan motivasi peningkatan layanan.
3. Pelaksanaan Wawancara dan Verifikasi Data PEKPPP pada Agustus 2025 yang menunjukkan hasil sangat baik, dengan sebagian besar aspek memperoleh nilai 5 (maksimal).
4. Exit Meeting PEKPPP pada September 2025 dengan hasil IPP 4,96 (A), serta pelaksanaan monev pelayanan publik kelompok rentan dan survei kepada penerima layanan khusus.
   Tidak terdapat kendala berarti selama pelaksanaan kegiatan, dan seluruh tahapan berjalan sesuai dengan pedoman serta arahan Kementerian PANRB.

- **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, BBPOM di Semarang akan melakukan beberapa langkah strategis, antara lain:

- Pemeliharaan inovasi pelayanan publik "Gumregah" agar tetap berkelanjutan, serta pengembangan inovasi baru PIJAR MENTARI (Pendampingan Ijin Edar Menuju UMKM Pintar dan Mandiri), SHARA SEHAN (SHAring InfoRmAsiTentang Obat & Pangan SEHat dan AmAN), SENTUH BPOM (Sarana Nyaman dan Terpadu untuk Tuna Netra dan Tuna Rungu di BBPOM), JAMU SERBAT (Janji Temu Solusi Evaluasi Responsif Perbaikan dan Pencegahan Terintegrasi), dan SI MONCER (Sistem Monitoring Evaluasi CAPA Terintegrasi) yang merupakan inovasi baru tim AOC BBPOM di Semarang 2025 agar mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik BBPOM di Semarang dan berkontribusi pada peningkatan nilai inovasi IPP.
- Peningkatan pelibatan masyarakat dan kelompok rentan dalam FKP dan kegiatan layanan publik agar aspek inklusivitas semakin kuat.
- Pembinaan lintas bidang dalam implementasi standar pelayanan untuk memastikan konsistensi mutu pelayanan di seluruh lini.

- **Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja**

Tabel 94 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya IKU 24

Indikator	Pagu Anggaran(Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian IKU (%)	Tingkat Efisiensi
Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Semarang	688,354,000	88,032,100	12.79		-

Realisasi anggaran hingga TW III mencapai 12,79%, sementara sebagian besar kegiatan telah terlaksana sesuai rencana tanpa kendala berarti. Namun capaian IKU belum tercantum secara kuantitatif hingga periode pelaporan ini, sehingga tingkat efisiensi belum dapat ditentukan secara akurat. Evaluasi efisiensi akan lebih komprehensif apabila capaian IKU sudah tersedia dan dapat dibandingkan dengan tingkat penggunaan anggaran secara proporsional.

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Program yang berperan penting dalam menunjang keberhasilan indikator ini antara lain:

- Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan publikasi hasilnya setiap bulan.
- Forum Konsultasi Publik (FKP) serta penyusunan laporan tindak lanjut.
- Penilaian dan penghargaan petugas pelayanan publik terbaik untuk mendorong budaya pelayanan unggul.
- Pelaksanaan monev dan tindak lanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat.
- Pelaksanaan PEKPPP yang menjadi dasar penilaian IPP nasional. Seluruh kegiatan ini secara sinergis berkontribusi dalam menciptakan pelayanan publik yang responsif, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

- **Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

Laporan kinerja ini dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan BBPOM di Semarang, sekaligus menjadi data dukung utama dalam penilaian Reformasi Birokrasi. Selain itu, laporan hasil survei, tindak lanjut pengaduan, dan monev pelayanan kelompok rentan digunakan untuk penyusunan rekomendasi peningkatan standar pelayanan serta inovasi baru dalam pelayanan publik.

SK 8. Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal

Tabel 95 Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan Ke 8

NO	SK	IKU	Target TW III	Realisasi	Capaian (%)
25	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Semarang			
26		Nilai AKIP BBPOM di Semarang			
27		Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang			
28		Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Semarang			
Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan					

Pada Triwulan III Tahun 2025, keempat IKU pada Sasaran Kegiatan 8, yaitu Nilai Pembangunan ZI, AKIP, Kinerja Anggaran, dan Indeks Manajemen Risiko belum memiliki data realisasi maupun capaian. Hal ini disebabkan penilaian oleh instansi eksternal belum dilaksanakan dan sebagian indikator bersifat tahunan.

Meski demikian, BBPOM di Semarang telah melakukan berbagai persiapan seperti penyusunan dokumen LKE, LAKIP, reviu anggaran, dan pemutakhiran peta risiko. Upaya perbaikan difokuskan pada penguatan koordinasi, pendampingan teknis, serta pemanfaatan sumber daya internal secara efisien.

Laporan ini menjadi dasar evaluasi dan strategi capaian akhir tahun.

IKU 25. Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Semarang

Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan sangat baik, dengan telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Pembangungan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan bentuk

komitmen BPOM dalam mengimplementasikan Reformasi Birokrasi (RB) pada seluruh level organisasi secara berkelanjutan.

Pembangunan ZI adalah upaya percepatan pencapaian sasaran reformasi birokrasi, terutama terkait birokrasi yang bersih dan akuntabel, dan pelayanan publik yang prima.

Pembangunan ZI mencakup dua komponen, yaitu komponen pengungkit (60%) dan komponen hasil (40%). Komponen pengungkit merupakan aspek tata kelola (governance) internal unit kerja dan komponen hasil merupakan bagaimana stakeholder merasakan dampak/hasil dari perubahan yang telah dilakukan pada area pengungkit. Komponen pengungkit terdiri dari enam area, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Komponen hasil terdiri dari Nilai Persepsi Anti Korupsi, Capaian Kinerja, serta Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan Publik. Dalam Komponen pengungkit terdapat aspek pemenuhan dan aspek reform.

Rincian bobot komponen penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK / Menuju WBBM adalah sebagai berikut:

1. Komponen Pengungkit sebesar 60%, terdiri dari:
    a. Manajemen Perubahan 8%
    b. Penataan Tatalaksana 7%
    c. Penataan Sistem Manajemen SDM 10%
    d. Penguatan Akuntabilitas Kinerja 10%
    e. Penguatan Pengawasan 15%
    f. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik: bobot 10%

2. Komponen Hasil sebesar 40%, terdiri dari:
    a. Birokrasi yang bersih dan akuntabel 22,5%, terdiri dari
        i. Nilai Survey Persepsi Korupsi 17,5%
        ii. Capaian kinerja 5%
    b. Pelayanan publik yang prima 17,5%.

Penilaian terhadap setiap program dalam komponen pengungkit dan komponen hasil diukur melalui indikator-indikator yang dipandang mewakili program tersebut. Sehingga dengan menilai indikator tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran pencapaian upaya yang berdampak pada

pencapaian sasaran. Target nilai pembangunan ZI Balai Besar POM di Semarang tahun 2025 adalah 92,43.

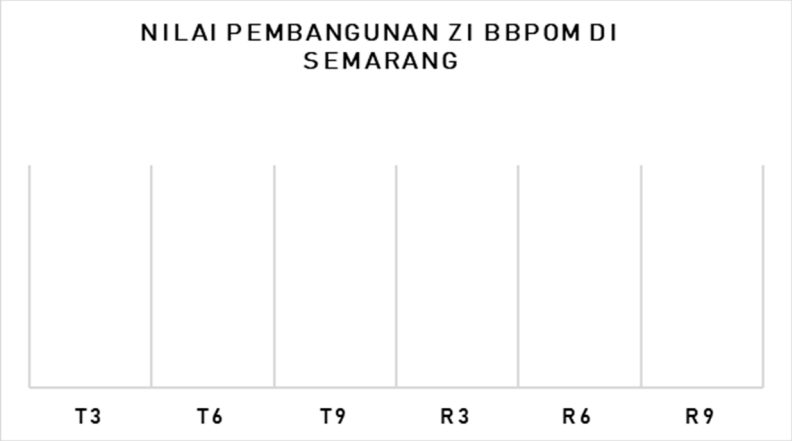
- **Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Kinerja TW III Tahun 2025**

Tabel 96 Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW III IKU 25

NO	IKU	Target TW III	Realisasi	Capaian (%)
25	Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Semarang			

Pada Tahun 2025, **Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI)** BBPOM di Semarang ditargetkan sebesar **92,43**. Capaian aktual pada Triwulan III belum ditetapkan secara final karena evaluasi resmi oleh Tim Penilai Internal (TPI) baru dilaksanakan, dengan hasil sementara **93,63**, namun nilai tersebut belum dapat direalisasikan secara tahunan. Meskipun demikian, seluruh kegiatan prioritas dan rencana aksi ZI di Triwulan III telah terlaksana secara optimal hingga September 2025.

- **Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW Sebelumnya Tahun 2025**



Gambar 28 Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW Sebelumnya IKU 25

Jika dibandingkan dengan capaian Triwulan II, implementasi ZI di Triwulan III menunjukkan peningkatan dari sisi internalisasi nilai BerAKHLAK, jumlah kegiatan sosialisasi kepada stakeholder, serta koordinasi antar-Pokja RB. Pada TW II fokus utama adalah penguatan budaya kerja dan penataan tata laksana, sementara di TW III BBPOM di Semarang berhasil memperluas kegiatan sosialisasi eksternal, menyelesaikan Audit Internal Khusus dan Kaji Ulang Manajemen ISO 17025, serta menerima kunjungan verifikasi lapangan dari KemenPAN RB untuk penilaian WBBM. Hal ini menandakan peningkatan signifikan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi secara menyeluruh.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan Target Tahun 2025**

Tabel 97 Ketercapaian Realisasi TW III terhadap Target 2025 IKU 25

NO	IKU	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi
25	Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Semarang	92,43	Tahunan	Tahunan	Tahunan

Meskipun penilaian ZI bersifat tahunan, progres pelaksanaan kegiatan pada TW III telah mencapai lebih dari 90% dari target tahunan. Seluruh 13 AoC aktif melakukan input progres aksi bulanan melalui e-monev RB hingga bulan September. Kegiatan internalisasi nilai BerAKHLAK dan publikasi RB secara rutin dilakukan setiap bulan melalui berbagai media, baik internal maupun eksternal. Dengan demikian, BBPOM di Semarang berada pada jalur yang tepat untuk mencapai target akhir tahun sebesar 92,43.

- **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja**

Peningkatan kinerja ZI pada TW III dipengaruhi oleh sinergi lintas Pokja RB dan dukungan aktif pimpinan serta seluruh pegawai. Strategi internalisasi nilai BerAKHLAK secara kreatif melalui kegiatan seperti Padi Manis, Fosil Antik, dan English Fun Day mampu meningkatkan partisipasi pegawai dalam reformasi birokrasi. Keberhasilan juga ditopang oleh pelaksanaan audit internal ISO 17025 dan Kaji Ulang Manajemen yang menjadi bukti komitmen terhadap sistem manajemen mutu dan integritas layanan publik. Kendala yang muncul bersifat teknis, seperti keterlambatan publikasi Info Ki Semar akibat penyesuaian sistem e-performance dan sinkronisasi data, yang telah direncanakan tindak lanjutnya pada Oktober 2025.

- **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Untuk memastikan capaian tahunan sesuai target, BBPOM di Semarang akan melakukan:

a. Penguatan dokumentasi kegiatan, termasuk pengarsipan dan publikasi hasil internalisasi ZI.

b. Sinkronisasi data e-performance dan RHPK agar seluruh capaian dapat terverifikasi tepat waktu.

c. Peningkatan kualitas komunikasi eksternal dengan pencantuman logo Pasti WBBM dan BerAKHLAK pada setiap kegiatan publik.

d. Optimalisasi tindak lanjut hasil survei kepuasan masyarakat dan opini pegawai sebagai bahan perbaikan layanan.

e. Pemantauan berkala terhadap progres AoC melalui reminder bulanan oleh Pokja 4 RB.

- **Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja**

Tabel 98 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya IKU 25

Indikator	Pagu Anggaran(Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian IKU (%)	Tingkat Efisiensi
Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Semarang	2,340,000,000	35,647,004	1.52		-

Kegiatan pembangunan ZI pada TW III dilaksanakan dengan realisasi anggaran sebesar **1,52%** meski belum dapat ditentukan efisiensinya tetapi **sebagian** besar kegiatan bersifat kolaboratif lintas Pokja dan memanfaatkan sumber daya internal tanpa tambahan biaya besar. Optimalisasi platform digital (e-monev RB, media sosial, dan kanal komunikasi daring) turut menekan biaya operasional, sekaligus memperluas jangkauan sosialisasi RB ke masyarakat.

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Beberapa kegiatan strategis yang menunjang keberhasilan pelaksanaan ZI antara lain:

a. Pelaksanaan verifikasi lapangan KemenPAN RB untuk penilaian WBBM.

b. Audit internal ISO 17025 dan Kaji Ulang Manajemen sebagai bentuk pemenuhan komitmen terhadap tata kelola mutu.

c. Padi Manis tematik, Fosil Antik, serta Gema Merdeka yang memperkuat nilai integritas dan pelayanan publik.

d. Sosialisasi RB kepada stakeholder eksternal seperti kader keamanan pangan, sekolah, dan pelaku usaha pangan.

e. Kegiatan ini menunjukkan bahwa keberhasilan ZI di BBPOM Semarang bukan hanya hasil kerja administratif, tetapi juga hasil nyata dari perubahan budaya kerja dan pelayanan publik.

- **Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

Laporan kinerja pembangunan ZI dimanfaatkan oleh pimpinan dan seluruh Pokja RB sebagai dasar dalam pengambilan keputusan strategis, perencanaan

aksi perbaikan berkelanjutan, serta bahan persiapan menghadapi evaluasi lanjutan oleh TPI dan KemenPAN RB. Selain itu, laporan ini juga digunakan sebagai bahan komunikasi publik dalam Info Ki Semar dan media sosial BBPOM di Semarang untuk menunjukkan transparansi serta akuntabilitas kinerja kepada masyarakat.

IKU 26. Nilai AKIP BBPOM di Semarang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;

2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;

3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;

4. Penilaian evaluasi internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektivitas dan efisiensi kinerja dan;

5. Penilaian pencapaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

Evaluasi AKIP difokuskan pada kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dengan memperhatikan hasil evaluasi tahun sebelumnya. Data dan informasi yang digunakan dalam evaluasi merupakan data dan informasi terakhir yang dapat digunakan dalam implementasi SAKIP saat evaluasi berjalan. Isu penting yang perlu diungkap melalui evaluasi AKIP antara lain:

a. Kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;

b. Pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;

c. Pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya

perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;

d. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektivitas dan efisiensi kinerja.

Evaluasi AKIP harus dapat memberikan simpulan hasil penilaian beberapa variabel, antara lain kriteria-kriteria yang ada dalam penerapan komponen-komponen manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai fakta obyektif instansi pemerintah/unit kerja mengimplementasikan SAKIP. Komponen komponen tersebut kemudian dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE), sesuai dengan kriteria masing-masing komponen. Variabel-variabel tersebut, yaitu:

a. Komponen: terdiri dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dan Capaian Kinerja.

b. Sub-komponen: dibagi dengan gradasi Keberadaan, Kualitas dan Pemanfaatan pada setiap komponen.

c. Kriteria: Merupakan gambaran kondisi yang perlu dicapai di setiap sub-komponen untuk dapat dinilai apakah kondisi tersebut sudah atau belum dicapai dan dapat digambarkan atau tidak.

LKE menyajikan komponen, sub-komponen, serta dilengkapi dengan kriteria penilaian yang akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Inspektur Utama. LKE kemudian dianalisis dan digunakan sebagai bahan dasar dalam menyusun Laporan Hasil Evaluasi (LHE). Variabel dalam LKE AKIP BPOM diatur lebih rinci melalui Surat Edaran Inspektur Utama. Setiap kriteria yang dinilai pada LKE ini membutuhkan “Professional Judgements" dari evaluator karena terkait dengan penilaian kualitatif. LKE disusun dengan maksud sebagai kertas kerja evaluator dalam melakukan pengumpulan, penilaian, analisis, serta penyimpulan data dan informasi. Setiap sub komponen kriteria yang telah diberikan nilai dalam pemenuhan kriteria harus dilengkapi dengan catatan berupa keterangan beserta bukti daftar dokumen yang mendukung dan relevan. Penilaian dilakukan melalui aplikasi SAPA APIP (Sistem Aplikasi Terpada Aparat Pengawas Intern Pemerintah).

Penilaian hasil SAKIP tidak semata-mata hanya berdasarkan atas pencapaian kinerja yang dilaporkan dalam dokumen Laporan Kinerja Satuan Kerja/Unit Kerja organisasi, tetapi hasil evaluasi SAKIP harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta obyektif Satuan Kerja/Unit Kerja dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan

kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam LKE. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai >90 - 100)	Sangat memuaskan. Telah terwujud *good governance*. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh level. Telah terbentuk pemerintahan yang dinamis, adaptif dan efisiensi (*Reform*).
A (Nilai >80 – 90)	Memuaskan. Terdapat gambaran bahwa Satuan Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.
BB (Nilai >70 – 80)	Sangat Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.
B (Nilai >60 – 70)	Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada Satuan Kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.
CC (Nilai >50 – 60)	Cukup (memadai). Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada Satuan Kerja.

Predikat	Interpretasi
C (Nilai >30 – 50)	Kurang. Sistem dan catatan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar.
D (Nilai >0 – 30)	Sangat kurang. Sistem dan catatan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar khususnya dalam implementasi SAKIP.

BOBOT PENILAIAN

Komponen Penilaian	BPOM
Perencanaan Kinerja	24
Pengukuran Kinerja	24
Pelaporan Kinerja	12
Evaluasi Internal	20
Capaian Kinerja	20
Total	100

Sesuai Kepka BPOM Nomor 331 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan
Pengawas Obat dan Makanan

- **Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Kinerja TW III Tahun 2025**

Tabel 99 Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW III IKU 26

NO	IKU	Target TW III	Realisasi	Capaian (%)
26	Nilai AKIP BBPOM di Semarang			

Pada tahun 2025, Nilai AKIP BBPOM di Semarang ditargetkan sebesar **82**. Hingga Triwulan III, capaian nilai akhir belum dapat ditetapkan karena proses evaluasi dan verifikasi SAKIP secara nasional baru akan dilaksanakan pada akhir tahun. Meskipun demikian, progres kegiatan akuntabilitas kinerja di Triwulan III menunjukkan perkembangan signifikan melalui pelaksanaan rapat evaluasi dan monitoring kinerja bulanan, pelaksanaan desk SAKIP pada 4 September 2025, serta kegiatan Reward and Punishment TW II. Seluruh kegiatan tersebut menjadi bagian penting dari siklus penguatan akuntabilitas kinerja menuju capaian target tahunan.

- **Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW Sebelumnya Tahun 2025**



Gambar 29 Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW Sebelumnya IKU 26

Dibandingkan dengan Triwulan II, pelaksanaan kegiatan pada Triwulan III menunjukkan peningkatan koordinasi antarunit dalam pemantauan kinerja. Pada TW II difokuskan pada penyusunan laporan evaluasi internal dan penyampaian dokumen Renstra 2025–2029 ke Roren, sedangkan pada TW III dilakukan peningkatan intensitas monitoring melalui reminder pelaporan kinerja di awal bulan untuk seluruh Ketua Tim serta publikasi Info Ki Semar yang menampilkan infografis kinerja BBPOM di Semarang. Selain itu, kegiatan Reward and Punishment TW II telah terlaksana, menandakan meningkatnya budaya apresiasi dan pembelajaran dalam pengelolaan kinerja.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan Target Tahun 2025**

Tabel 100 Ketercapaian Realisasi TW III terhadap Target 2025 IKU 26

NO	IKU	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi
26	Nilai AKIP BBPOM di Semarang	82,00	Tahunan	Tahunan	Tahunan

Karena Nilai AKIP bersifat **tahunan**, capaian kinerja TW III belum dapat dibandingkan langsung dengan target akhir tahun. Namun, progres pelaksanaan kegiatan penguatan SAKIP hingga September telah mencapai lebih dari 75% dari keseluruhan rencana tahunan. Kegiatan utama seperti evaluasi kinerja bulanan, monitoring pelaporan tim, serta desk SAKIP telah terlaksana sesuai jadwal. Dengan demikian, BBPOM di Semarang berada pada jalur yang tepat untuk mencapai target akhir tahun sebesar 82.

- **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja**

Peningkatan kinerja pada TW III dipengaruhi oleh komitmen pimpinan dan seluruh tim dalam melaksanakan evaluasi kinerja secara berkala, serta kedisiplinan pelaporan dari masing-masing Ketua Tim. Keberhasilan ini juga

didukung dengan terlaksananya Desk SAKIP yang memastikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa keterlambatan uji SMART IKU karena menunggu manual resmi dari Roren, serta ketidaksinkronan beberapa menu pada aplikasi Tugu Muda dan Kibas Rambut yang menghambat proses integrasi data secara optimal.

- **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Untuk memastikan capaian tahunan sesuai target, BBPOM di Semarang akan melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

- Melakukan uji SMART IKU setelah manual resmi diterbitkan oleh Roren.
- Menyelesaikan sinkronisasi menu dan tautan pada aplikasi Tugu Muda serta Kibas Rambut.
- Memperbarui tindak lanjut rekomendasi LAKIP pada setiap rapat bulanan.
- Menyempurnakan dan mengupdate TL Lakip yang belum tuntas.
- Menyampaikan revisi kedua PK RAPK Renstra ke Kepala Badan sebagai bagian dari penyelarasan dokumen perencanaan dan akuntabilitas.

- **Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja**

Tabel 101 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya IKU 26

Indikator	Pagu Anggaran(Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian IKU (%)	Tingkat Efisiensi
Nilai AKIP BBPOM di Semarang	240,000,000	35,647,004	14.85		-

Realisasi anggaran kegiatan penguatan AKIP hingga Triwulan III sebesar **14,85%**, sebagian besar kegiatan dilakukan melalui koordinasi internal dan pemanfaatan rapat rutin bulanan tanpa tambahan biaya besar. Penggunaan media digital seperti Tugu Muda, Kibas Rambut, dan Info Ki Semar juga turut meningkatkan efisiensi komunikasi dan pelaporan kinerja.

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Kegiatan utama yang mendukung keberhasilan capaian AKIP antara lain: rapat evaluasi dan monitoring kinerja bulanan, pelaksanaan Desk SAKIP, reminder pelaporan kinerja kepada Ketua Tim, serta publikasi kinerja melalui media sosial Info Ki Semar. Sementara kendala pada TW III berasal dari faktor teknis terkait sistem aplikasi dan keterlambatan panduan Roren yang berdampak pada pelaksanaan uji SMART IKU.

- **Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

Laporan kinerja dan hasil evaluasi internal digunakan oleh pimpinan dan seluruh tim sebagai dasar pengambilan keputusan dalam perbaikan tata kelola, peningkatan akuntabilitas, serta penyusunan rencana tindak lanjut LAKIP berikutnya. Selain itu, hasil capaian sementara juga dimanfaatkan sebagai bahan publikasi Info Ki Semar untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kepada publik.

IKU 27. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang

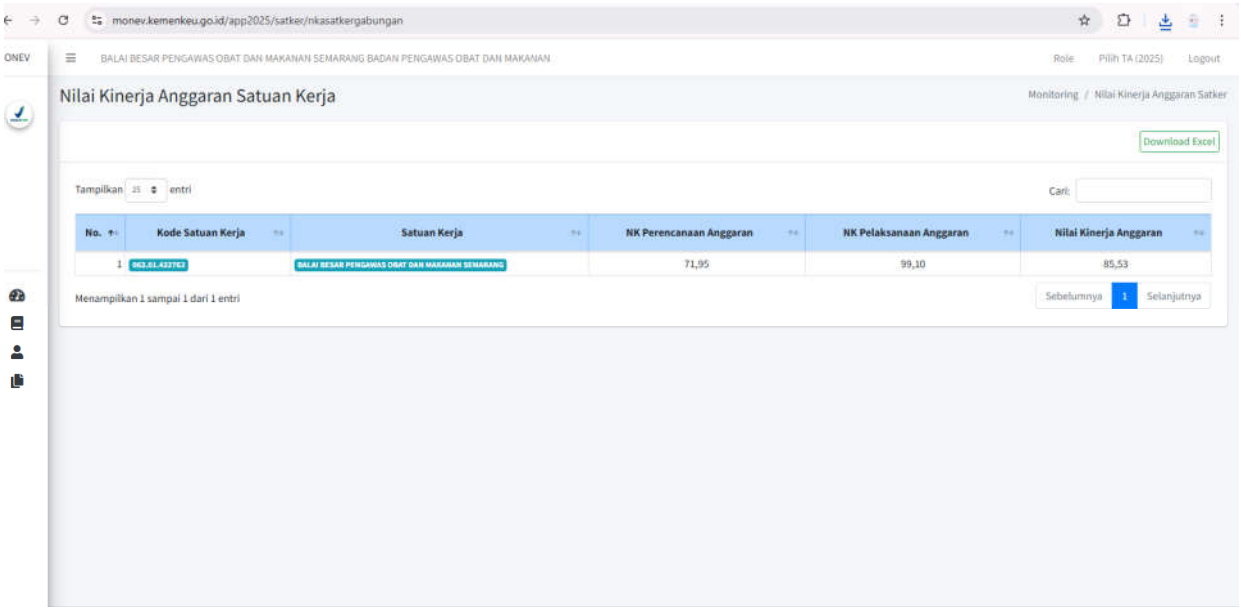
Realisasi Anggaran di Triwulan III Balai Besar POM di Semarang adalah sebesar Rp 22.684.504.875 atau 72,18% dari Total Anggaran DIPA sebesar Rp 31.429.448.000 (sudah dikurangi blokir dari total DIPA Rp 53.693.128.000).

Nilai Kinerja Anggaran adalah hasil penjumlahan dari 50% Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan 50% Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (PMK. No 62 Tahun 2023).

Tabel 102 Kategori Konversi Nilai Kinerja Anggaran

Nilai	Kategori	Konversi NIlai
0 s.d. 50	Sangat Kurang	1
50,01 s.d. 60	Kurang	2
60,01 s.d. 80	Cukup	3
80,01 s.d. 90	Baik	4
90,01 s.d. 100	Sangat Baik	5

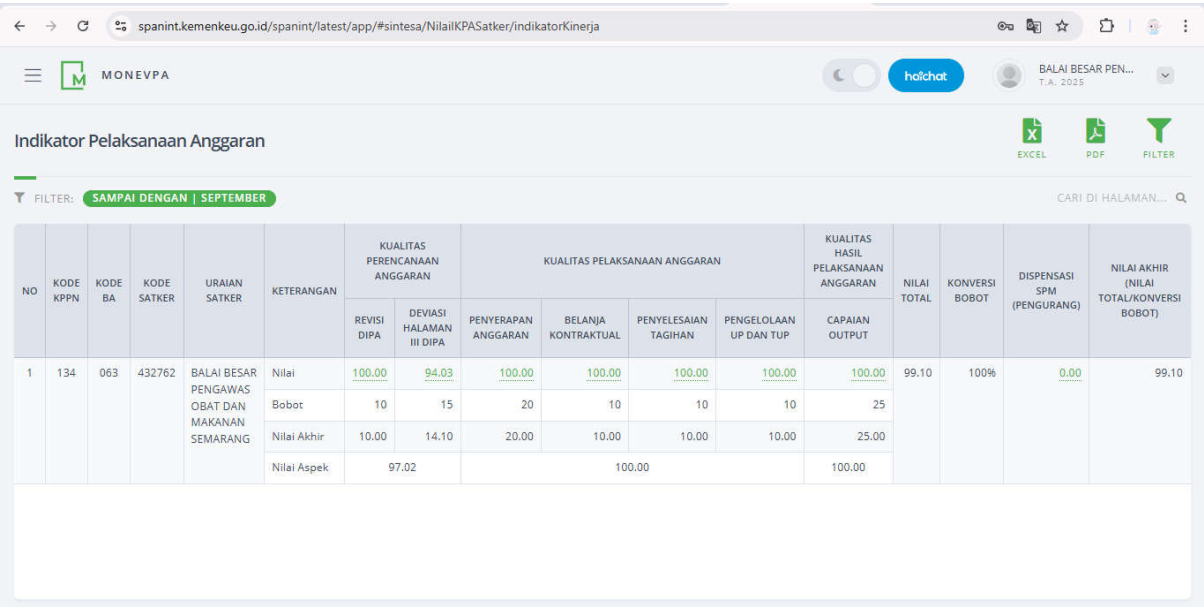
Nilai NKA pada Triwulan III sebagai berikut:



Gambar 30 Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang TW III

Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang berdasarkan data pada laman web MONEV KEMENKEU (monev.kemenkeu.go.id) pada September 2025 tercatat sebesar 85,53. Nilai tersebut terdiri dari Nilai Perencanaan Anggaran sebesar 71,95 dan Nilai Pelaksanaan Anggaran sebesar 99,10. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran telah berjalan dengan sangat baik, namun masih diperlukan peningkatan dan perbaikan dalam aspek perencanaan agar kualitas pengelolaan anggaran secara keseluruhan dapat lebih optimal.

Indikator Pelaksanaan Anggaran BBPOM di Semarang sampai dengan TW III 2025



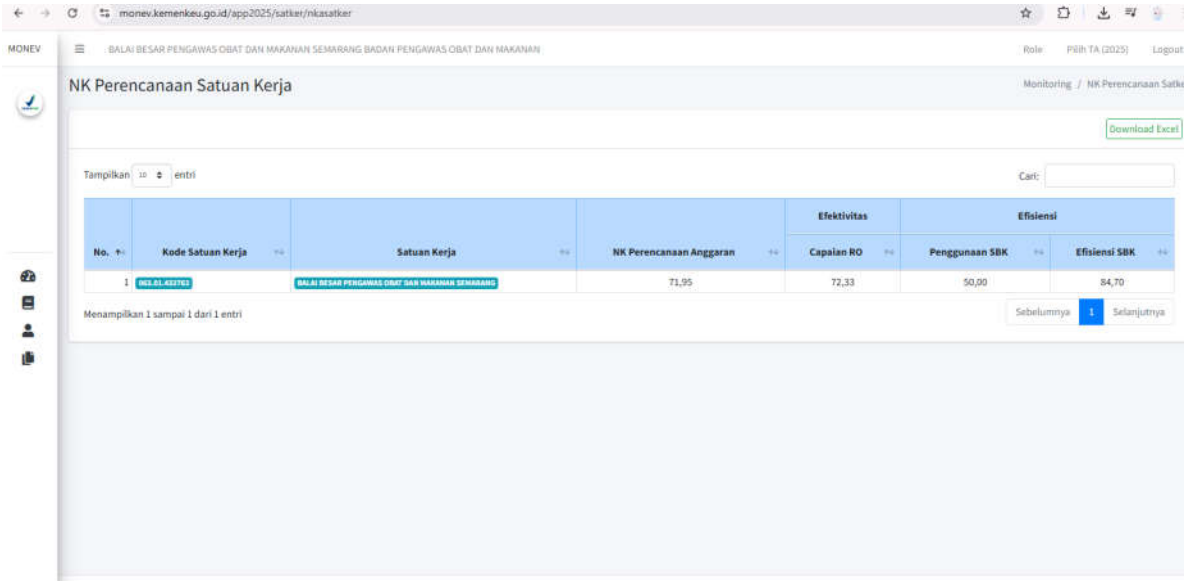
NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT				
1	134	063	432762	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SEMARANG	Nilai	100.00	94.03	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.10	100%	0.00	99.10
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.10	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	97.02		100.00				100.00				

Gambar 31 Indikator Pelaksanaan Anggaran BBPOM di Semarang TW III

Sebagaimana diakses dari laman OMSPAN https://spanint.kemenkeu.go.id/ hingga periode September 2025, Balai Besar POM di Semarang memperoleh nilai **Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)** sebesar **99,10**, dimana secara keseluruhan 7 indikator penilaian mendapat nilai 100 namun terdapat satu indikator yang masih bernilai di bawah 100, yaitu Indikator Realisasi Halaman III DIPA. Kondisi ini disebabkan oleh adanya beberapa komponen belanja yang tidak terealisasi sepenuhnya di Triwulan III, baik karena perubahan kebutuhan kegiatan, efisiensi pelaksanaan program, maupun penyesuaian waktu pelaksanaan. Hal ini mencerminkan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel sesuai prinsip tata kelola yang baik.

2025

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBPOM di Semarang TW III



Gambar 32 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBPOM di Semarang TW III

Penilaian dilakukan dengan menggabungkan dua aspek utama yaitu: Efektivitas dan Efisiensi. Nilai Perencanaan sebesar 71,95 terdiri dari Aspek Efisiensi pada Capaian RO sebesar 72,33 dan Efisiensi Penggunaan SBK 50 dan Efisiensi SBK sebesar 84,70. Hal ini menunjukkan diperlukan peningkatan akurasi perhitungan kebutuhan biaya dan volume output agar efisiensi dan efektivitas perencanaan meningkat di periode berikutnya.

- **Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW III Tahun 2025**

Tabel 103 Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW III IKU 27

NO	IKU	Target TW III	Realisasi	Capaian (%)
27	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang			

Pada Triwulan III Tahun 2025, indikator Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BBPOM

di Semarang menunjukkan hasil sementara yang positif. Berdasarkan data hingga akhir September 2025, diperoleh nilai perencanaan anggaran sebesar 71,95, nilai IKPA sebesar 99,10, dengan NKA sementara 85,53. Meskipun penilaian akhir baru akan dilakukan pada akhir tahun, capaian ini menunjukkan kinerja anggaran berada pada tren meningkat

Untuk menjaga dan meningkatkan capaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) hingga akhir tahun 2025, BBPOM di Semarang perlu melaksanakan beberapa langkah langkah berikut:

1. Peningkatan Kualitas Perencanaan Anggaran

   Melakukan *review* terhadap kesesuaian antara alokasi anggaran dengan target output dan outcome. Memperbaiki ketepatan jadwal penarikan dana agar sesuai dengan rencana kegiatan dan RPD, menghindari penumpukan di akhir tahun.

2. Optimalisasi Efisiensi Penggunaan Anggaran

   Menekan potensi pemborosan melalui efisiensi perjalanan dinas, pengadaan, dan operasional rutin tanpa mengurangi kualitas output.

3. Penguatan Monitoring dan Evaluasi Internal

   Melakukan pemantauan realisasi anggaran dan capaian kinerja secara bulanan melalui koordinasi antara bagian perencana, keuangan, dan pelaksana kegiatan.

- **Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW Sebelumnya Tahun 2025**



Gambar 33 Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW Sebelumnya IKU 27

Jika dibandingkan dengan Triwulan II, terjadi peningkatan kinerja yang signifikan dalam pelaksanaan anggaran. Pada Triwulan III, realisasi anggaran telah mencapai 72,18%, menunjukkan akselerasi penyerapan yang baik. Namun demikian, pada periode yang sama, nilai pelaksanaan anggaran (IKPA) mengalami sedikit penurunan menjadi 99,10%.

Penurunan ini terutama disebabkan oleh aspek Realisasi Halaman III DIPA yang belum mencapai nilai sempurna (100). Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya beberapa komponen belanja yang tidak terealisasi sepenuhnya, baik karena perubahan kebutuhan kegiatan, penyesuaian jadwal pelaksanaan, maupun efisiensi anggaran pada beberapa program. Akibatnya, sebagian kegiatan yang direncanakan pada Triwulan III tidak dapat terealisasi sesuai target waktu.

Meskipun demikian, capaian IKPA sebesar 99,10% tetap menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan anggaran telah berjalan efektif, tertib, dan akuntabel, dengan ruang perbaikan yang relatif kecil pada aspek sinkronisasi antara perencanaan dan realisasi belanja.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan Target Tahun 2025**

Tabel 104 Ketercapaian Realisasi TW III terhadap Target 2025 IKU 27

NO	IKU	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi
27	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di	5,00	Tahunan	Tahunan	Tahunan

Secara keseluruhan, meskipun NKA Triwulan III belum mencapai target akhir tahun, capaian sementara menunjukkan kemajuan yang selaras dengan arah pencapaian target 90,01–100 (Sangat Baik). Dengan nilai pelaksanaan 99,10 dan tren serapan anggaran yang tinggi di Triwulan III, BBPOM di Semarang berpotensi kuat untuk mencapai bahkan melampaui target tahunan pada saat penilaian akhir dilakukan.

- **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja**

Pada Triwulan III, peningkatan kinerja anggaran berhasil dicapai melalui sinergi yang efektif antara unit substansi dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam memastikan pelaksanaan kegiatan serta pelaporan keuangan berjalan tepat waktu. Pemantauan rutin oleh tim perencana dan keuangan dilaksanakan secara konsisten untuk menjaga tingkat penyerapan anggaran tetap optimal. Selain itu, pemanfaatan aplikasi SAKTI dan sistem pelaporan internal yang terintegrasi turut berkontribusi dalam

meningkatkan akurasi data, efisiensi proses, serta ketepatan waktu pelaporan kinerja anggaran

Upaya perbaikan ke depan difokuskan pada penyempurnaan koordinasi dan optimalisasi perencanaan anggaran agar capaian kinerja semakin maksimal

- **Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja**

Tabel 105 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya IKU 27

Indikator	Pagu Anggaran(Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian IKU (%)	Tingkat Efisiensi
Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang	19,243,639,000	12,229,701,030	63.55		-

Efisiensi penggunaan sumber daya belum dapat dipastikan, namun capaian realisasi anggaran 63,55% menunjukkan kinerja yang baik. Kegiatan dilaksanakan sesuai rencana dengan prinsip efisiensi dan efektivitas, sedangkan realokasi anggaran dilakukan terbatas untuk kegiatan prioritas yang mendesak dan berdampak langsung pada sasaran kinerja.

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Kegiatan yang berkontribusi terhadap keberhasilan capaian indikator ini antara lain adalah pengendalian pelaksanaan kegiatan melalui Rapat Evaluasi Internal, optimalisasi penggunaan sistem OM-SPAN dan SAKTI, serta pelaksanaan review internal atas kinerja anggaran per triwulan. Disiplin pelaporan keuangan dan sinergi antar unit kerja dalam menyelesaikan dokumen pendukung belanja juga turut memperkuat capaian kinerja anggaran.

- **Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

Laporan kinerja anggaran digunakan sebagai dasar evaluasi efektivitas pelaksanaan program, penetapan prioritas kegiatan, serta perbaikan strategi perencanaan anggaran di tahun berikutnya. Hasil analisis NKA juga menjadi bahan utama dalam penilaian akuntabilitas kinerja instansi (SAKIP) dan digunakan untuk mendukung proses feedback dalam peningkatan tata kelola keuangan BBPOM di Semarang agar semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil.

IKU 28. Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Semarang

Manajemen risiko adalah pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan/sasaran organisasi. Manajemen risiko

digunakan dalam konteks mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM dalam pencapaian tujuan. Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan POM mengacu pada Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.7.07.20.267 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan POM.

Penerapan manajemen risiko bertujuan untuk:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik
2. Menetapkan dan mengelola risiko yang dihadapi dan meminimalisir dampak yang ditimbulkan
3. Melindungi organisasi dari risiko yang signifikan yang berdampak pada pencapaian tujuan organisasi
4. Meningkatkan kinerja organisasi di dalam pencapaian tujuan
5. Menciptakan kesadaran dan kepedulian pegawai terhadap pentingnya Manajemen Risiko

Tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:

1. Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan
2. Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko
3. Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko

Indeks maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manejemen risiko.

- **Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW III Tahun 2025**

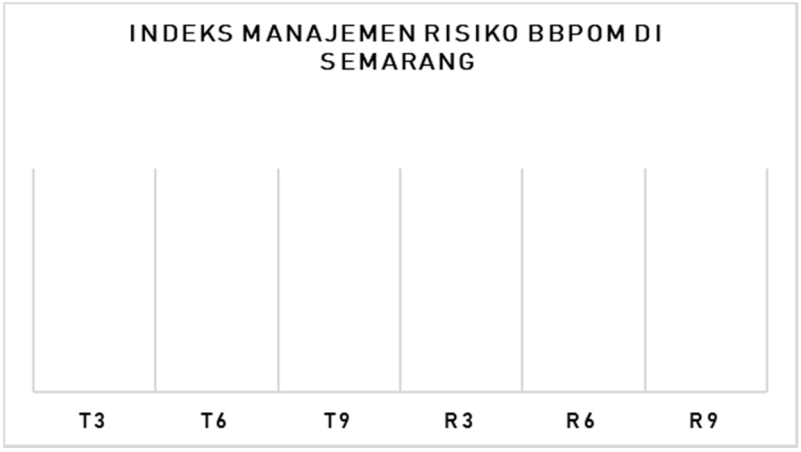
Tabel 106 Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW III IKU 28

NO	IKU	Target TW III	Realisasi	Capaian (%)
28	Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Semarang			

Pada Triwulan III Tahun 2025, indikator **Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Semarang** belum memiliki realisasi capaian karena penilaian terhadap

indikator ini dilaksanakan secara tahunan. Target tahun 2025 ditetapkan sebesar **3,6**, dan pelaksanaan pengukuran akan dilakukan pada akhir tahun berdasarkan hasil evaluasi maturitas manajemen risiko. Meski demikian, berbagai kegiatan pendukung telah dilaksanakan pada periode pelaporan untuk memastikan pencapaian target tahunan berjalan sesuai rencana.

- **Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW Sebelumnya Tahun 2025**



Gambar 34 Perbandingan Antara Kinerja TW III dengan Kinerja TW Sebelumnya IKU 28

Tidak terdapat perbandingan kinerja antara Triwulan III dengan Triwulan sebelumnya karena indikator ini tidak memiliki target dan realisasi triwulanan. Namun, pada periode sebelumnya telah dilaksanakan penyusunan laporan manajemen risiko semester I dan pemutakhiran *risk register*, yang menjadi dasar untuk penyusunan laporan semester II pada Triwulan III ini. Dengan demikian, capaian kinerja bersifat berkelanjutan secara proses, meskipun hasil akhirnya baru dapat dinilai pada akhir tahun.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan Target Tahun 2025**

Tabel 107 Ketercapaian Realisasi TW III terhadap Target 2025 IKU 28

NO	IKU	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi
28	Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Semarang	3,60	Tahunan	Tahunan	Tahunan

Karena indikator ini merupakan indikator tahunan, realisasi Triwulan III belum dapat dibandingkan secara kuantitatif dengan target tahun 2025 sebesar 3,6. Namun secara kualitatif, pelaksanaan kegiatan pendukung seperti penyampaian Laporan Manajemen Risiko Semester II Tahun 2025 pada tanggal 18 Juli 2025 melalui *sapaapip.pom.go.id* menunjukkan progres yang positif menuju pencapaian target tahunan tersebut.

- **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja**

Capaian sementara menunjukkan kesiapan BBPOM di Semarang dalam mengelola risiko secara sistematis dan terdokumentasi. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan *Refreshment Implementasi Manajemen Risiko* pada tanggal 17 Juli 2025 yang meningkatkan pemahaman dan kesadaran risiko pada unit kerja BBPOM di Semarang. Tidak terdapat kendala berarti dalam pelaksanaan kegiatan, menunjukkan efektivitas koordinasi antar bidang dalam menjaga kualitas pengelolaan risiko.

- **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Untuk memperkuat capaian indikator ini, langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan antara lain meningkatkan pemantauan risiko melalui rapat evaluasi berkala, memperbaiki dokumentasi RTP (*Rencana Tindak Pengendalian*) agar lebih terukur, serta melakukan penilaian mandiri maturitas manajemen risiko dengan melengkapi *Kertas Kerja Evaluasi* dan data dukung yang relevan. Selain itu, pembinaan internal terus dilakukan agar setiap kelompok substansi memahami perannya dalam mitigasi risiko kelembagaan.

- **Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja**

Tabel 108 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya IKU 28

Indikator	Pagu Anggaran(Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian IKU (%)	Tingkat Efisiensi
Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Semarang	240,000,000	35,647,004	14.85		-

Pelaksanaan kegiatan pendukung dilakukan secara efisien dengan memanfaatkan fasilitas daring seperti *sapaapip.pom.go.id* dan sistem komunikasi internal BPOM. Kegiatan pelatihan serta refreshment dilaksanakan secara terencana dengan memanfaatkan narasumber internal, sehingga biaya operasional dapat ditekan tanpa mengurangi kualitas hasil.

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Beberapa kegiatan yang menunjang pencapaian indikator ini meliputi penyusunan dan pembaruan *risk register*, penyampaian laporan manajemen risiko semesteran, serta pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas SDM dalam implementasi manajemen risiko. Selain itu, kegiatan monitoring dan evaluasi rutin atas risiko kelembagaan turut mendukung peningkatan efektivitas pengendalian risiko.

- **Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

Laporan manajemen risiko digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan keputusan dalam penyusunan kebijakan serta perencanaan program kerja di BBPOM di Semarang. Hasil analisis risiko membantu unit kerja dalam menentukan prioritas mitigasi, mengantisipasi potensi kendala pelaksanaan kegiatan, serta memperkuat penerapan prinsip *good governance* di lingkungan BBPOM di Semarang.

3.2 Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Lakip 2024

Tabel 109 Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Lakip 2024

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai **	Belum ***		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Indikator ini hanya di Renstra 2020-2024	Indikator kinerja persentase obat yang memenuhi syarat tidak menjadi IKU di Renstra 2025-2029. Namun demikian pengawasan ini tetap dilaksanakan dan dilaporkan ke Badan POM.	Februari	- Bimtek ke Pelaku Usaha/Pembinaan Setempat : Bimtek Pharrmakovigilans, AMR dan ABSO (Selasa, 22 Juli 2025) Kegiatan Sharasehan Pelaporan KTD dan ESO secara Daring (Jumat, 25 April 2025) -Indikator kinerja persentase obat yang memenuhi syarat sudah selesai di Desember 2024 dan tidak menjadi IKU di Renstra 2025-2029 (**Februari 2025)**	*Closed*	*Closed*	Indikator kinerja persentase obat yang memenuhi syarat tidak menjadi IKU di Renstra 2025-2029

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai **	Belum ***		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Indikator ini hanya d Renstra 2020-2024	Kegiatan yang menunjang IKU persentase makanan yang memenuhi syarat adalah Pengujian laboratorium sampel makanan acak dan Pengadaan sampel makanan acak. IKU ini tidak berlanjut di tahun depan namun demikian masih diperlukan intervensi ke sarana produksi pangan pada saat pemeriksaan rutin agar konsisten dalam menerapkan CPPOB. Target pengadaan sampel makanan acak adalah 707 sampel, dengan realisasi sampling adalah 720 sampel atau 98,19%.	Februari	- Bimtek ke Pelaku Usaha/Pembinaan Setempat : desk CAPA tapi ada materinya terkait ipcppob utk industri pangan (11 Agustus 2025) -Indikator kinerja persentase obat yang memenuhi syarat sudah selesai di Desember 2024 dan tidak menjadi IKU di Renstra 2025-2029 (**Februari 2025)**	*Closed*	*Closed*	Indikator kinerjaPersentase Makanan yang memenuhi syarat tidak menjadi IKU di Renstra 2025-2029

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai **	Belum ***		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Indikator ini hanya d Renstra 2020-2024	Indikator kinerja persentase obat yang memenuhi syarat tidak menjadi IKU di Renstra 2025-2029. Namun demikian pengawasan ini tetap dilaksanakan dan dilaporkan ke Badan POM.	Februari	- Bimtek ke Pelaku Usaha/Pembinaan Setempat : Bimtek Pharrmakovigilans, AMR dan ABSO (Selasa, 22 Juli 2025) Kegiatan Sharasehan Pelaporan KTD dan ESO secara Daring (Jumat, 25 April 2025) -Indikator kinerja persentase obat yang memenuhi syarat sudah selesai di Desember 2024 dan tidak menjadi IKU di Renstra 2025-2029 (**Februari 2025)**	*Closed*	*Closed*	Indikator kinerjaPersentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tidak menjadi IKU di Renstra 2025-2029
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Indikator ini hanya d Renstra 2020-2024	IKU Persentase persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sudah tidak berkelanjutan, namun demikian masih diperlukan upaya perbaikan, yaitu dengan melakukan pembinaan pada saat pemeriksaan setempat terhadap pelaku usaha sarana produksi (termasuk UMKM) agar melakukan produksi sesuai ketentuan CPPOB	Februari	- Bimtek ke Pelaku Usaha/Pembinaan Setempat : desk CAPA tapi ada materinya terkait ipcppob utk industri pangan (11 Agustus 2025) -Indikator kinerja persentase obat yang memenuhi syarat sudah selesai di Desember 2024 dan tidak menjadi IKU di Renstra 2025-2029 (**Februari 2025)**	*Closed*	*Closed*	Indikator kinerjaPersentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tidak menjadi IKU di Renstra 2025-2029

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai **	Belum ***		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
			termasuk pemenuhan aspek sanitasi dan higiene					
5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	Indikator ini hanya d Renstra 2020-2024	IKU Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat sudah tidak berkelanjutan, namun demikian masih diperlukan upaya perbaikan dengan peningkatan pengawasan dan pembinaan kepada sarana produksi dan distribusi melalui pemeriksaan rutin implementasi aspek Cara Produksi	Februari	- Bimtek ke Pelaku Usaha/Pembinaan Setempat : desk CAPA tapi ada materinya terkait ipcppob utk industri pangan (11 Agustus 2025) -Indikator kinerja persentase obat yang memenuhi syarat sudah selesai di Desember 2024 dan tidak menjadi IKU di Renstra 2025-2029 (**Februari 2025)**	*Closed*	*Closed*	Indikator kinerjaPersentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat tidak menjadi IKU di Renstra 2025-2029

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai **	Belum ***		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
			Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan pendampingan pelaku usaha dalam melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan (CAPA).					
6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu		Untuk menyempurnakan kinerja agar makin meningkatkan capaian dari target yang ditetapkan, BBPOM di Semarang melakukan program/kegiatan yang mendukung keberhasilan tersebut, antara lain :					

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai **	Belum ***		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
		Sosialisasi dan KIE melalui media sosial	1. Melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi, Sosialisasi serta Penyebaran Informasi yang lebih intensif terkait Obat dan Makanan yang aman dan bermutu kepada masyarakat Jawa Tengah, melalui pemanfaatan media sosial (instagram, facebook, tik tok, dll), media cetak, serta media elektronik (radio, wa blast dan media online lainnya) dengan sasaran generasi millenial secara berkala.	Januari 2025	Melakukan sosialisasi melalui Media sosial (IG,X, Tik Tok, Facebook), melakukan sosialisasi di media cetak dan media elektronik serta media digital	Closed	Januari 2025	Sampai dengan akhir Desember 2025, Sosialisasi dan KIE masih berlanjut melalui media sosial
		membuat infografis dan video pendek Desember	2. Menyediakan materi edukasi yang mudah diakses oleh masyarakat umum, termasuk infografis dan video pendek.	Maret 2025	Telah dibuat materi edukasi melalui infografis dan video di reels IG	Closed	Maret 2025	Telah dibuat infografis dan video pendek dan akan terus berlanjut sampai Desember

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai **	Belum ***		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
		Dilakukan KIE dengan organisasi kemasyarakatan dan institusi pendidikan, akan berlanjut sampai Desember	3. Menjalin kemitraan dan sinergitas dengan lintas sektor dalam rangka mengedukasi masyarakat untuk menyebarluaskan informasi tentang keamanan obat dan makanan.	Maret 2025	Menjalin kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan Bhayangkari, IWAPI dan Dharma Wanita Persatuan tingkat Provinsi dan institusi pendidikan	Closed	Maret 2025	Dilakukan KIE dengan organisasi kemasyarakatan dan institusi pendidikan, akan berlanjut sampai Desember
			4. Memperbaiki strategi pelaksanaan program komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat. Dalam menyusun strategi pelaksanaan KIE dapat mengacu dan mempertimbangkan hasil survei kesadaran dan masyarakat Jawa Tengah baik dari sisi komoditi, aspek pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat maupun demografi. Beberapa hal yang perlu dilakukan adalah:	April 2025	-			

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai **	Belum ***		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
			– Memfokuskan tujuan dan tema/materi/ pesan KIE dengan mempertimbangkan segmentasi target peserta KIE seperti gender, usia, pendidikan dan cakupan wilayah.			Memfokuskan tujuan dan tema/materi/pesan KIE dengan memperti mbangkan segmentasi target peserta KIE seperti gender, usia, pendidikan dan cakupan wilayah.	April 2025	
			– Memperhatikan prioritas kebutuhan informasi masyarakat dalam menyampaikan KIE			Memperhatikan prioritas kebutuhan informasi masyarakat dalam menyampaikan KIE		
			Menggunakan pilihan media yang tepat dan media yang banyak diakses oleh masyarakat dengan tetap menyesuaikan target/kelompok sasaran penerima KIE serta anggaran yang ada.			Menggunakan pilihan media yang tepat dan media yang banyak diakses oleh masyarakat dengan tetap menyesuaikan target/kelompok sasaran penerima KIE serta anggaran yang ada.		

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai **	Belum ***		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
8	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Maraknya penjualan secara online terutama di daerah perbatasan dan kurangnya informasi masyarakat terkait aktifitas penjualan produk Obat dan Makanan ilegal	a. Meningkatkan kinerja pengawasan Obat dan Makanan secara umum, terutama pemberian informasi kepada masyarakat, peningkatan frekuensi pengawasan dan penindakan di area rural dan perbatasan melalui pengawasan berbasis komunitas dan meningkatkan penindakan produk ilegal di pasar offline dan online.	TW I 2025	melakukan kegiatan patroli siber secara rutin terhadap penjualan produk illegal yang dilakukan secara online, bekerja sama dengan direktorat intelijen dan direktorat siber Obat dan Makanaan, serta meningkatkan jejaring intelijen di daerah perbatasan untuk mendapatkan informasi penualan produk illegal secara offline maupun online.	Closed	Sep-2025	Kejahatan Obat dan Makanan dapat ditindak dan dilanjutkan ke penyidikan baik online maupun offline
		Menyusun dan melaksanakan Rencana aksi	b. Meningkatkan kegiatan public relation dan publikasi berbagai aktivitas pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM melalui berbagai media.	Februari 2025	Melakukan kegiatan penyebaran informasi melalui media cetak, media elektronik dan media sosiall	Closed	Maret 2025	Rencana aksi masih berjalan hingga akhir TW IV
			c. Meningkatkan kerja sama dengan media dalam publikasi aktivitas pengawasan termasuk adanya contact person khusus.	Januari 2025	Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan berbagai media cetak/media elektronik/media digital melalui WA Group Teman Media	Closed	Maret 2025	Rencana aksi masih berjalan hingga akhir TW IV

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai **	Belum ***		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
			d. Meningkatkan enggagement dengan melakukan interaksi aktif dengan pengikut pada media sosial yang dimiliki oleh masing-masing unit kerja.	Januari 2025	Membuat konten edukasi Obat dan Makanan yang digemari oleh masyarakat berupa video dan secara aktif menanggapi komentar follower	Closed	Maret 2025	Rencana aksi masih berjalan hingga akhir TW IV
			e. Menjalin kerja sama dengan pelaku usaha dalam mempromosikan BPOM dan menyampaikan informasi Obat dan Makanan kepada konsumen.	Juni 2025	Telah dilakukan komunikasi dengan pelaku usaha / gabungan pelaku usaha dalam mempromosikan BPOM dan menyampaikan informasi Obat dan Makanan kepada konsumen melalui kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP)	Closed	Mei 2025	Hasil akan terlihat pada nilai indeks di akhir tahun
9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Semarang	Menyusun dan melaksanakan Rencana aksi	Berbagai upaya telah dilakukan oleh BBPOM di Semarang untuk meningkatkan pelayanan publik. Upaya pemenuhan Standar Pelayanan Publik yang ditetapkan di lingkungan BBPOM di Semarang bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pemberi maupun penerima layanan.					

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai **	Belum ***		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
			Rekomendasi Perbaikan kinerja :					
			a. Peningkatan kompetensi petugas pelayanan melalui pelatihan,sosialisasi, workshop, seminar. Termasuk dalam kegiatan ini adalah penyamaan persepsi petugas layanan informasi dan petugas layanan sertifikasi terkait prosedur perizinan obat dan makanan serta penerbitan rekomendasi SKI/SKE	April 2025	Dilakukan diseminasi tentang Prosedur Perizinan dan mengikuti sosialisasi perizinan dan penerbitan SOS, Melon Manis, Shara Sehan, dll. Mengikuti Pelatihan Peningkatan Profesionalisme dengan Kualitas Pelayanan Publik Level Dasar dan Pelatihan Peningkatan Profesionalisme dengan Kualitas Pelayanan Publik Level lanjutan melalui IDEAS	Closed	April 2025	Rencana aksi masih berjalan hingga akhir TW IV dan Sampai dengan akhir Desember 2025, Publikasi produk layanan dan hasil layanan masih berlanjut melalui media sosial
			b. Pemberian informasi kepada responden bahwa pengisian survei hanya terkait dengan layanan yang telah diberikan termasuk sarana pendukungnya dan bukan dalam rangka pemenuhan persyaratan perizinan	Januari 2025	Dilakukan Pemberian informasi kepada responden sebelum pengisian kuesioner bahwa penilaian survei hanya terkait dengan layanan yang telah diberikan termasuk sarana pendukungnya dan bukan dalam rangka pemenuhan persyaratan perizinan obat dan makanan.	Closed	Maret 2025	

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai **	Belum ***		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
			obat dan makanan.					
			c. Peningkatan layanan konsultasi dan pendampingan kepada pelaku usaha balk melalui *desk* pda saat kegiatan sosialisasi maupun jemput bola.	Maret 2025	Dilakukan kegiatan peningkatan layanan konsultasi dan pendampingan kepada pelaku usaha balk melalui *desk* pda saat kegiatan sosialisasi maupun jemput bola ataupun melalui peningkatan layanan Melon Manis (Melalui Online Memberikan Informasi).	Closed	Maret 2025	
			d. Publikasi produk layanan malalui media elektronik maupun non elektronik sehingga masyarakat mudah mengakses layanan yang ada di BBPOM di Semarang.	Januari 2025	Melakukan publikasi produk layanan melalui Media elektronik, dan media sosial (IG,X, Tik Tok, YT, Facebook)	Closed	Januari 2025	

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai **	Belum ***		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Belum terpantau	Upaya selanjutnya untuk mempertahankan capaian indikator adalah tetap melakukan monitoring surat rekomendasi yang masuk dan tindak lanjut pengawasan sarana produksi dan distribusi secara rutin.	Maret 2025	Melakukan monev setiap bulan dengan bit.ly Kartu Kendali Inspeksi dan menunjuk petugas untuk memantau CAPA Produksi dan Distribusi	Closed	Maret 2025	Lebih terpantau
11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	CAPA Produksi sedikit yang belum masuk ke Balai dan Surat lama diterima oleh Dinkes	1. Pendampingan / konsultasi khususnya bagi UMKM dalam penyusunan tindakan perbaikan dan Tindakan pencegahan atas temuan / hasil inspeksi	Juli 2025 dan Desember 2025	Melakukan desk CAPA sarana produksi dan Sanyanfar	TW II dan TW VI	TW II sudah dilaksanakan tanggal 11 Agustus 2025	CAPA sarana Produksi lebih banyak yang masuk ke Balai
			2. Koordinasi dan komunikasi dengan lintas sektor ditingkatkan dengan memanfaatkan jaringan komunikasi melalui Whatsapp grup maupun pribadi dengan pemangku kepentingan	Maret 2025	Sudah dibuat WAG dengan Dinkes dan penyampaian surat melalui Srikandi	Closed	Maret 2025	Dinkes lebih cepat mendapatkan surat
15	Indeks Pelayanan Publik BBPOM DI SEMARANG	menyusun rencan perbaikan	Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian					

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai **	Belum ***		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
			kinerja di atas adalah:					
			▪ Penyusunan dokumen pelaksanaan dan pemenuhan variabel penilaian pelayanan publik pada aspek Kebijakan Pelayanan, profesionalisme SDM, Sarana dan Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan, dan Aspek Inovasi sesuai ketentuan.	2025	Telah disusun kebijakan pelayanan publik tahun 2025, peningkatan kompetensi SDM pelaksana layanan , pemeliharaan sarana prasarana baik untuk konsumen umum maupun penyandang disabilitas, Update informasi di subsite dan medsos maupun berita aktual , kemudahan konsultasi dan pengaduan melalui wa layanan dan lapor Ka Balai serta keberlanjutan inovasi Melon Manis (Melalui Online Memberikan Informasi) dan penambahan inovasi Sharasehan (Sharing Informasi Tentang Obat dan Pangan Yang Sehat dan Aman) di tahun 2025 ini.	Closed	Closed	Sudah selesai
			▪ Menindaklanjuti rekomendasi penilaian PEKPPP tahun 2024 antara lain:					
			o Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Standar Pelayanan agar lebih luas lagi cakupannya antara lain tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan masukan dari	TW II 2025	Penyusunan draft revisi standar pelayanan publik	1. Rapat pembahasan review standar pelayanan publik 2. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik 3. Penetapan Standar Pelayanan	TW II	Telah dilakukan: 1. Rapat pembahasan review standar pelayanan publik (07 Maret 2025) 2. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (15 Mei 2025) 3. Penetapan

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai **	Belum ***		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
			pelanggan maupun perkembangan peraturan dan alur pelayanan.			BBPOM di Semarang Tahun 2025		Standar Pelayanan BBPOM di Semarang Tahun 2025 pada tanggal 16 Mei 2025
			o Membuat rencana tindak lanjut untuk SKM Mandiri (bulanan) yang lebih sistematis dengan tetap berkoordinasi dengan substansi terkait ehingga proses penyelesaian TL dapat selesai 100% pada bulan berikutnya	2025	Laporan SKM bulan Januari 2025 telah sistematis sehingga tindak lanjut dapat diselesaikan 100% pada bulan berikutnya	Penysunan Laporan SKM bulan Februari-Desember 2025 secara sistematis agar tindak lanjut dapat diselesaikan 100% pada bulan berikutnya	2025	Telah dilakukan penyusunan laporan SKM s/d bulan September 2025 serta telah ditindak lanjuti pada bulan berikutnya.
			o Melakukan pemutakhiran data infornasi harian antara lain data infomrasi layanan SKI/SKE, jumlah layanan serta pemutakhiran informasi dari sosial media ke subsite.	2024	Jumlah layanan sudah diupdate di subsite	closed	closed	Jumlah layanan sudah diupdate di subsite secara harian
			o Aktif berpartisipasi dalam kompetisi inovasi baik di lingkungan internal BPOM maupun di tingkat nasional Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP).	TW II	-	Berpartisipasi dalam kompetisi inovasi di linkungan internal BPOM maupun tingkat nasional	TW II	Telah diikuti kompetisi inovasi KOIN di tahun 2025 melalui inovasi Pijar Mentari dengan hasil lolos secara administrasi.

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai **	Belum ***		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	ahkir tahun 2024 dilakukan penjaringan UMKM yang akan menjadi target, UMKM yang mendaftar beragam tingkat kesiapan sarana prasarana dan pemenuhan persyaratan dokumen	Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:					
			1. Melakukan kegiatan pendampingan secara intensif untuk percepatan pemenuhan dokumentasi dan perbaikan sarana di UMKM Pangan, Obat Tradisional, maupun Kosmetik menggunakan berbagai media baik offline maupun online	TW II	Dilakukan pendampingan penyusunan dokumen dan pengajuan proses di aplikasi	Closed	Closed	TW III tercapai target 2025
			2. Menggantikan UMKM Target Pendampingan yang mengundurkan diri dengan UMKM yang lebih berkomitmen untuk melakukan perbaikan sarana sesuai standar produksi pangan	TW III	Dilakukan penggantian UMKM yang mengundurkan diri dengan UMKM pengganti yang lebih siap	Closed	Closed	TW III tercapai target 2025

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai **	Belum ***		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
			olahan yang baik					
17	Persentase keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi dan makanan minuman serta program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaporan Capaian Output dan Anggaran DAK melalui SmartPOM belum Maksimal dilakukan oleh Dinas Kesehatan selaku penerima DAK	Upaya-upaya perbaikan/ rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan capaian kinerja di atas adalah:					
			▪ Meningkatkan koordinasi dengan pic DAK kabupaten/ kota melalui *whatsapp group*		Berkoordinasi aktif melalui WAG dengan DInkes penerima DAK	Closed	Closed	WAG DAK tetap aktif dilaksanakan
			▪ Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan hambatan/ kendala yang dihadapi dalam kegiatan DAK Kabupaten/ Kota		Dilakukan pertemuan secara Daring untuk membahas hambatan/kendala yang ada dengan narasumber dari pusat	Closed	Closed	Pertemuan Daring pusat telah memberikan pencerahan untuk Dinas Kesehatan terkait kendala-kendala teknis yang dialami
			▪ Mendorong percepatan penggunaan aplikasi SMARTPOM untuk		Dilakukan monev setiap triwulan	Closed	Closed	Monev dilakukan setiap triwulan dengan pengisian bit.ly monev

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai **	Belum ***		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
			pelaporan anggaran dan kegiatan DAK.					
			▪ Koordinasi/ advokasi dengan pemerintah daerah terkait pembentukan tim pembinaan dan pengawasan obat dan makanan.		Advokasi dengan Pemda	Closed	Closed	
			▪ Koordinasi dengan pemerintah daerah dalam kegiatan percepatan penurunan stunting.		Dilakukan KIE Stunting	Closed	Closed	Telah dilakukan KIE Stunting oleh Infokom
			▪ penambahan tim dari fungsi lain agar dokumen yang diminta dari fungsi lain seperti infokom dapat dicapai.		Penambahan tim dari fungsi Infokom	Closed	Closed	Tim Infokom sudah terlibat dalam pelaporan mengenai kegiatan-kegiatan di infokom
18	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan		Upaya yang dapat dilakukan untuk perbaikan dan penyempurnaan kinerja agar dapat melebihi realisasi standar nasional, antara lain :					

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai **	Belum ***		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
			1. Melakukan monitoring capaian survey efektivitas KIE melalui evaluasi.pom.go.id secara periodik sehingga dapat memantau capaian indeks sehingga dapat memenuhi target responden minimal 30 per Triwulan	TWI		1. Melakukan monitoring capaian survey efektivitas KIE melalui evaluasi.pom.go.id secara periodik sehingga dapat memantau capaian indeks sehingga dapat memenuhi target responden minimal 30 Triwulan	TW1	
			2. Melakukan input data survei efektifitas KIE pada aplikasi https://evaluasikie.pom.go.id secara tepat waktu, maksimal pada hari terakhir tiap triwulan	TW I		2. Melakukan input data survei efektifitas KIE pada aplikasi https://evaluasikie.pom.go.id secara tepat waktu, maksimal pada hari terakhir tiap triwulan	TW I	
			3. Meningkatkan *branding* kataBPOM serta memperbesar atau memperluas KIE melalui ragam media yang memiliki	TW II		3. Meningkatkan *branding* kata BPOM serta memperbesar atau memperluas KIE melalui ragam	TW II	

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai **	Belum ***		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
			jangkauan luas agar lebih banyak dikenal masyarakat.			media yang memiliki jangkauan luas agar lebih banyak dikenal masyarakat.		
			4. Melakukan pengelolaan media sosial lebih baik lagi untuk meningkatkan *engagement follower* , antara lain dengan memperbanyak konten berupa video / *reels* di media sosial terutama di instagram.	TW II		4. Melakukan pengelolaan media sosial lebih baik lagi untuk meningkatkan *engagement follower* , antara lain dengan memperbanyak konten berupa video / *reels* di media sosial terutama di instagram.	TW II	
			5. Meningkatkan kapasitas dan wawasan petugas terkait perkembangan media komunikasi dan informasi di masyarakat, agar dapat menciptakan inovasi KIE yang makin menarik dan bermanfaat	TW IV		5. Meningkatkan kapasitas dan wawasan petugas terkait perkembangan media komunikasi dan informasi di masyarakat, agar dapat menciptakan	TW IV	

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai **	Belum ***		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
			untuk masyarakat.			inovasi KIE yang makin menarik dan bermanfaat untuk masyarakat.		
			6. Penambahan variasi kegiatan (senam bersama, *games*, kuis berhadiah dll) khususnya pada saat KIE secara langsung.	TW II		6. Penambahan variasi kegiatan (senam bersama, *games*, kuis berhadiah dll) khususnya pada saat KIE secara langsung.	TW II	
			7. Meningkatkan sinergitas dan kolaborasi dengan lintas sektor terkait, termasuk media dan *influencer* atau duta / kader untuk memperluas penyebaran informasi tentang Obat dan Makanan.	akhir TW IV		7. Meningkatkan sinergitas dan kolaborasi dengan lintas sektor terkait, termasuk media dan *influencer* atau duta / kader untuk memperluas penyebaran informasi tentang Obat dan Makanan.	akhir TW IV	

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai **	Belum ***		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
19	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	Jumlah sekolah perluasan Program Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan di Jawa Tengah masih jauh dari jumlah sekolah yang ada di Jawa Tengah	Dalam rangka melakukan perluasan cakupan sekolah yang mendapatkan sosialiasai maka sekolah yang diintervensi diwajibkan untuk melakukan pengimbasan kepada 1 sekolah yang berada di sekitarnya sebagai bentuk komitmen sekolah dalam melaksanakan tindak lanjut kegiatan	akhir TW IV		melakukan perluasan cakupan sekolah yang mendapatkan sosialisasi dengan pengimbasan sekolah yang berada di sekitar	akhir TW IV	Rencana aksi masih berjalan hingga akhir TW IV
20	Jumlah desa pangan aman	Program Desa Pangan Aman Balai Besar POM di Semarang baru direplikasi oleh Kab. wonosobo di	Dalam rangka menjaga keberlanjutan dan mendorong replikasi Program Desa Pangan Aman maka Balai Besar POM di Semarang perlu					

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai **	Belum ***		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
		Prov Jawa Tengah, Kab/Kota yang lain didorong untuk dapat mereplikasi Program Desa Pangan Aman	1. Melakukan koordinasi yang intensif dan komunikasi yang efektif dengan pihak desa dan lintas sektor di setiap tahapan program	Akhir TW III		Koordinasi yang intensif dan komunikasi yang efektif dengan pihak desa dan lintas sektor terkait pelaksanaan tahapan program desa pangan aman dilakukan secara terus menerus setiap akan melakukan tahapan kegiatan	Akhir TW III	Rencana aksi masih berjalan hingga akhir TW III
			2. Melibatkan lintas sektor terkait dalam pelaksanaan tahapan kegiatan gerakan desa pangan aman terutama pada pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha pangan desa.	Akhir TW IV		Keterlibatan lintas sektor terkait dalam pelaksanaan tahapan kegiatan desa pangan aman	Akhir TW IV	Rencana aksi masih berjalan hingga akhir TW IV

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai **	Belum ***		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
21	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Kurangnya pengetahuan dan kesadaran komunitas pasar terhadap keamanan pangan produk yang dijual	1. Perlu ragam kegiatan yang menarik dalam pelaksanaan kampanye dan penyuluhan pasar untuk memotivasi pedagang dan pembeli agar cerdas memilih untuk menjual, membeli dan mengonsumsi menggunakan bahan pangan yang aman	TW II		Melakukan ragam kegiatan yang menarik seperti : - Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar - Sosialisasi Keamanan Pangan melalui konten tentang keamanan pangan, Cek KLIK, BPOM Mobile, ING dll	TW II	Rencana aksi masih berjalan hingga akhir TW II
			2. Memberikan pembinaan lebih intensif kepada pedagang yang masih menjual pangan yang mengandung bahan berbahaya agar selanjutnya tidak menjual lagi pangan yang tidak aman dikonsumsi dengan melibatkan petugas pasar.	TW II		Memberikan Pembinaan yang lebih intensif, Pengawasan dan Pengawalan Keamanan Pangan di Pasar Intervensi		Rencana aksi masih berjalan hingga akhir TW II
22	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	sudah dilakukan sampling dan pengujian sesuai dengan pedoman	6. Melaksanakan pelatihan personel terkait pemenuhan parameter uji	TW IV	Pemetaan pelatihan yang dibutuhkan menyesuaikan dengan efisiensi anggaran	Menyesuaikan penjadwalan pelatihan dari	TW IV	Menunggu penjadwalan pelatihan dari penyelenggara

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai **	Belum ***		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
			unggul yang belum bisa dilaksanakan Tahun 2024			penyelenggara		
23	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Efisiensi anggaran	3. Mengusulkan kenaikan anggaran pemeliharaan alat, anggaran pengadaan suku cadang serta pengadaan alat laboratorium yang diperlukan. Mengusulkan kenaikan anggaran penunjang utama yaitu listrik, air dan gas, dengan bertambahnya jumlah alat serta beban pemakaiannya	Desember 2025	pembelian reagen dan media yang sudah dilakukan menggunakan anggaran sebelumnya yang sangat terbatas	menunggu tambahan anggaran untuk pembelian reagen dan media	Desember 2025	pembelian reagen dan media yang sudah dilakukan menggunakan anggaran sebelumnya yang sangat terbatas
		Efisiensi anggaran	4. Melanjutkan dan mengintensifkan pelatihan teknis untuk peningkatan kompetensi personil guna pemenuhan parameter uji unggul dan parameter baru yang belum dapat dilaksanakan	Desember 2025		mengikuti pelatihan secara online	Desember 2025	Efisiensi anggaran

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai **	Belum ***		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
24	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Proses penyidikan terkendala pada saat penyerahan tersangka dan barang bukti (serah Tahap II)	Kelompok Substansi Penindakan akan terus berupaya agar kerja sama dengan lintas sektor yang tergabung dalam *Criminal justice System* semakin optimal, sehingga proses penyidikan tindak pidana obat dan makanan yang dilakukan oleh PPNS Balai Besar POM di Semarang dapat berjalan dengan lancar. Untuk menghadapi perkembangan teknologi yang semakin pesat dan berimbas pada pergeseran pola distribusi obat dan makanan ilegal secara online melalui media sosial, *e-commerce* dll, petugas Kelompok Substansi Penindakan BBPOM di Semarang selalu	TW 2	Koordinasi dengan lintas sektor yang tergabung dalam CJS (Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan Korwas PPNS Polda Jawa Tengah)	Masih ada 2 perkara (dari sebelumnya 8 perkara carry over) yang belum mencapai serah Tahap II	TW 2	Sudah ada 5 perkara yang telah mencapai serah tahap II, 1 perkara SP3, 1 perkara telah mencapai P21 (renana serah II bulan April 2025), 1 perkara dengan tersangka sakit sehingga penyerahan tahap II ditunda

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai **	Belum ***		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
			meningkatkan kapabilitas dan kemampuan di bidang Teknologi Informasi serta melengkapi sarana dan prasarana untuk mengungkap pelanggaran distribusi obat dan makanan yang dilakukan secara *online*. Upaya tersebut juga didukung dengan semakin intesifnya patroli siber di *marketplace*, kolaborasi dengan Direktorat Intelijen dan Direktorat Siber Badan POM, dan jejaring investigasi dari berbagai sektor. Evaluasi pencapaian kinerja yang dilakukan tiap bulan dan 3 bulan dapat digunakan sebagai bahan monitoring dan evaluasi agar capaian				

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai **	Belum ***		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
			kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan.					
25	Indeks RB BBPOM DI SEMARANG		Saran yang dapat kami sampaikan atas beberapa hal yang masih perlu perbaikan					
			terkait pelaksanaan Pembangunan ZI sebagai berikut:					

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai **	Belum ***		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
			1 Mereviu kembali pedoman prosedur pemilihan tim Zona Integritas yang ada dengan mengakomodir kriteria khusus untuk ketua tim dan anggota kelompok kerja, serta mendokumentasikan kertas kerja pemilihan dengan tertib.	TW 1 2025	Prosedur Pemilihan Anggota RB, Prosedur Pemilihan Agen Perubahan, Kertas Kerja pemilihan ketua Tim RB, Kertas Kerja Pemilihan Anggota RB	closed	closed	
			2 Mendorong penciptaan inovasi pada seluruh area perubahan dengan memperhatikan:					
			a Melakukan monitoring dan evaluasi serta menyusun analisis dampak beforeafter atas inovasi yang dimiliki terhadap perbaikan unit kerja	TW 1 2025	Analisis dampak implementasi inovasi terhadap perbaikan unit kerja	closed	closed	
			b Penciptaan inovasi berdasarkan hasil manajemen risiko Unit Kerja sesuai dengan karakteristik unit kerja.	TW 1 2025	Plan Of Action AoC 2025 berbasis resiko, Form Usulan penambahan aktivitas pengendalian/resiko baru terkait aksi AoC 2025 dalam Sistem Manajemen Resiko	closed	closed	

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai **	Belum ***		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
			c Inovasi dapat menularkan praktik baik, meningkatkan efisiensi suatu proses, memenuhi kebutuhan stakeholder, dan dapat direplikasi oleh Unit Kerja/instansi lain.	TW 1 2025	Laporan implementasi dan dampak inovasi	closed	closed	
			4 Membuat peta jalan (*roadmap*) pengembangan aplikasi maupun monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi sehingga keberlanjutan dari pengembangan aplikasi yang ada dapat dipantau secara optimal.	Akhir Maret 2025	Monitoring pemanfaatan teknologi Evaluasi aplikasi Lawangsewu, *Roadmap* aplikasi Lawangsewu 2025-2026	closed	closed	
		Nilai Capaian Kinerja lebih baik 2,5	5 Melakukan evaluasi atas kinerja tahun berjalan serta membuat rencana aksi tindak lanjut atas capaian kinerja yang tidak lebih baik dari tahun sebelumnya.	Akhir Maret 2025	Realisasi Kinerja 2024 lebih baik dar tahun 2023	closed	closed	Nilai Capaian Kinerja lebih baik sudah 5

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai **	Belum ***		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
		IPP :3,81, IPAK 3,91 belum ada inovasi pijar mentari	6 Melaksanakan *continuous improvement* dan meningkatkan kualitas dalam membangun ZI sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.	Akhir Maret 2025	1. Peningkatan Realisasi Kinerja 2. Inovasi Pijar mentasi 3. Penngkatan IPAK dan IPKP	closed	closed	Per TW III: IPP :3,83, IPAK 3,92 belum ada inovasi pijar mentari
31	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM DI SEMARANG		Sebagai upaya perbaikan atas tidak tercapainya Nilai Kinerja Anggaran pada Tahun 2024 yaitu: Dilakukan pengawalan yang lebih intensif pada indikator-indikator penilaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang nilainya belum 100 dilakukan koordinasi secara intensif dengan KPPN Semarang II dan dengan Biro Perencanaan dan Keuangan	Tiap Triwulan	**IKPA** : TW I : penilaian 100 seluruh indikator **EKA** : Efisiensi SBK (Penindakan)	**IKPA** : TW II - IV : Revisi Halam 3 DIPA (Rencana Penarikan Dana) **EKA :** Target Efisiensi Anggaran Perkara 2 Perkara, anggaran SBK 1 Perkara : Rp.116.268.000	Minggu ke II April, Juli, Oktober	

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai **	Belum ***		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
			selaku unit pemangku Nilai Kinerja Anggaran.					

3.3 Realisasi Anggaran

Hingga akhir Triwulan III Tahun 2025, pelaksanaan anggaran pada Balai Besar POM di Semarang menunjukkan tren realisasi yang cukup progresif. Capaian realisasi kumulatif tercatat sebesar Rp 22.684.504.875,-, atau sekitar 42,25% atau 72,18% dari total Pagu Anggaran – Blokir. Rincian realisasi tersebut terbagi menurut jenis belanja sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 110 Realisasi Anggaran Triwulan III 2025

Sumber: OMSPAN

Realisasi Anggaran Triwulan III 2025

Balai Besar POM di Semarang

Per Jenis Belanja	Target Penyerapan Anggaran	Realisasi	Presentase
Belanja Pegawai	7.753.723.900	9.118.531.354	118%
Belanja Barang	10.169.747.900	10.867.514.521	106.86%
Belanja Modal	2.312.925.000	2.698.459.000	116.67%

Secara keseluruhan penyerapan anggaran Balai Besar POM di Semarang hingga akhir Triwulan III tetap berada dalam batas *threshold* atau ambang batas toleransi penyerapan yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran pada Triwulan II telah dilaksanakan dengan baik dan efisien, dengan tetap menjaga keseimbangan antara capaian kinerja dan optimalisasi penggunaan anggaran. Berikut untuk target penyerapan anggaran beserta *theshold* tahun 2025.

Tabel 111 Indikator Penyerapan Anggaran

Jenis Belanja	Keterangan	TW I	TW II	TW III	TW IV
Belanja Pegawai (51)	Target Penyerapan Belanja Pegawai (51) sesuai PER-5/PB/2024	20%	50%	75%	95%
	Threshold (Batas Toleransi)	5%	10%	10%	0%
Belanja Barang (52)	Target Penyerapan Belanja Barang (52) sesuai PER-5/PB/2024	15%	50%	70%	90%
	Threshold (Batas Toleransi)	5%	10%	5%	0%
Belanja Modal (53)	Target Penyerapan Belanja Modal (53) sesuai PER-5/PB/2024	10%	40%	70%	90%
	Threshold (Batas Toleransi)	5%	20%	10%	0%

3.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Efisiensi pelaksanaan anggaran diukur dengan membandingkan capaian output terhadap penggunaan sumber daya (input), khususnya realisasi anggaran. Indeks efisiensi dihitung dengan rumus:

$$IE = \frac{\%\ Capaian\ Output}{\%\ Capaian\ Input}$$

Tabel 112 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Indikator Kinerja Utama

No	Indikator	Output %	Input %	IE	TE	Capaian TE	Kriteria
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	109,29	79,98	1,37	0,37	95%	**Efisien**
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO		12,78	0,00	-1,00		
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	103,78	81	1,28	0,28	95%	**Efisien**
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	73,84	1,35	0,35	95%	**Efisien**
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	103,92	81	1,28	0,28	95%	**Efisien**
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	118,09	0				
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	104,07	80,84	1,29	0,29	95%	**Efisien**
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	107,11	80,84	1,32	0,32	95%	**Efisien**
9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	102,37	50,14	2,04	1,04	86%	**Tidak Efisien**
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,48	50,14	2,00	1,00	86%	**Tidak Efisien**
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	106,47	31,71	3,36	2,36	75%	**Tidak Efisien**
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	109,89	79,98	1,37	0,37	95%	**Tidak Efisien**
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT		73,84	0,00	-1,00		**Tidak Efisien**
14	Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	102,9	64,76	1,59	0,59	92% (efisien)	**Tidak Efisien**
15	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		81	0,00	-1,00		**Tidak Efisien**
16	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	107,3	71,57	1,50	0,50	92%	**Tidak Efisien**
17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	101,84	13,14	7,75	6,75	75%	**Tidak Efisien**
18	Jumlah sekolah yang melaksanakan	110	7,88	13,96	12,96	75%	**Tidak Efisien**
19	Jumlah desa pangan aman	133,33	14,04	9,50	8,50	75%	**Tidak Efisien**
20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100	29,81	3,35	2,35	75%	**Tidak Efisien**
21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara	104,92	14,23	7,37	6,37	75%	**Tidak Efisien**
22	Persentase Keberhasilan Penyidikan	101,43	83,06	1,22	0,22	95%	**Efisien**
23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan	100	0			-	
24	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di	-	12,79			-	
25	Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Semarang	-	1,52			-	
26	Nilai AKIP BBPOM di Semarang	-	14,85			-	
27	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang	-	15,85			-	
28	Indeks Manajemen Risiko BBPOM di					-	
Rata-Rata/Jumlah/Tingkat Efisiensi		105,56	42,25	2,50	1,50	**80%**	**Tidak Efisien**

Berdasarkan data pada tabel di atas, Tingkat Efisiensi penggunaan Anggaran sampai dengan TW II adalah sebagai berikut :

- 7 indikator memiliki nilai IE > 1 dan TE < 1 → Dikategorikan Efisien
- 13 indikator memiliki nilai IE tinggi tetapi TE ≥ 1 atau capaian TE < target → Dikategorikan Tidak Efisien

Tingkat Efisiensi diukur berdasarkan KRO pada triwulan III adalah sebagai berikut :

Tabel 113 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran KRO

Kode	Kegiatan/KRO/RO	Output %	Input %	IE	TE	Capaian TE	Kriteria
a	b	c	d	e	f	g	h
063.01.DR	Program Pengawasan Obat dan Makanan	21,99%	42,09%	0,52	- 0,48	75%	Tidak Efisien
3165	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	21,99%	30,25%	0,73	- 0,27	75%	Tidak Efisien
3165.BAH	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan[Base Line]	126,27%	12,79%	9,87	8,87	75%	Tidak Efisien
3165.BDC	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE[Base Line]	19,88%	13,16%	1,51	0,51	92%	Efisien
3165.BKB	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan[Base Line]	100,00%	5,99%	16,69	15,69	75%	Tidak Efisien
3165.BMB	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan[Base Line]	11,11%	9,11%	1,22	0,22	95%	Efisien
3165.CAN	Perangkat pengolah data dan komunikasi[Base Line]	100,00%	99,40%	1,01	0,01	100%	Efisien
3165.PDD	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium[Base Line]	75,00%	61,70%	1,22	0,22	95%	Efisien
3165.QCD	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan[Base Line]	100,00%	83,06%	1,20	0,20	100%	Efisien
3165.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga[Base Line]						
3165.QDB.001	Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	94,60%	7,88%	12,01	11,01	75%	Tidak Efisien
3165.QDB.002	Desa Pangan Aman	90,00%	14,04%	6,41	5,41	75%	Tidak Efisien
3165.QDB.003	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	100,00%	29,81%	3,35	2,35	75%	Tidak Efisien
3165.QDC	Sarana Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans[Base Line]	100,00%	12,78%	7,82	6,82	75%	Tidak Efisien
3165.QDG	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar	146,15%	14,23%	10,27	9,27	75%	Tidak Efisien
3165.QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk[Base Line]						
3165.QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa	86,98%	81,00%	1,07	0,07	100%	Efisien
3165.QIA.002	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar	81,84%	79,98%	1,02	0,02	100%	Efisien
3165.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga[Base Line]						
3165.QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa	83,42%	80,84%	1,03	0,03	100%	Efisien
3165.QIC.003	Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa	106,90%	71,57%	1,49	0,49	92%	Efisien
3165.QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa	92,84%	49,38%	1,88	0,88	88%	Efisien
3165.RAB	Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium[Base Line]	76,92%	67,42%	1,14	0,14	100%	Efisien
6384	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	75,00%	63,47%	1,18	0,18	100%	Efisien
6384.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]						
6384.EBA.994	Layanan Perkantoran	75,00%	63,49%	1,18	0,18	100%	Efisien

Berdasarkan hasil pengukuran Tingkat Efisiensi (TE) pada masing-masing Kerangka Rincian Output (KRO), diketahui bahwa tingkat efisiensi pelaksanaan kegiatan masih bervariasi. Sebagian KRO sudah menunjukkan kinerja yang efisien dalam pemanfaatan anggaran. Namun beberapa KRO masih dalam kategori tidak efisien, Salah satu penyebabnya adalah perhitungan TE belum

memperhitungkan pengurangan anggaran yang diblokir, sehingga hasil efisiensi menjadi tampak lebih tinggi dari kondisi sebenarnya. Ke depan, perlu dilakukan perbaikan melalui penyesuaian data dasar serta peningkatan pelaksanaan kegiatan agar efisiensi penggunaan anggaran dapat tercapai secara lebih merata di seluruh KRO.

4.1 Kesimpulan

Capaian Kinerja diukur dari 8 Sasaran Kegiatan dengan 29 Indikator Kinerja Kegiatan yang dicapai BBPOM di Semarang pada TW III Tahun 2025 yang kesemuanya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan Evaluasi Kinerja sasaran kegiatan yang diukur pada TW III Tahun 2025, Nilai Knerja Organisasi (NKO) sebagai berikut:

Tabel 114 Nilai Knerja Organisasi (NKO) BBPOM di Semarang

No	Sasaran Kegiatan	No	Nama Indikator	Target 2025	TW III			
					Target	Realisasi	Capaian	Capaian di Normalisasi
a	b		c	d	e	f	g	h
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,5	91,5	100	109,29	109,29
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26				
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	91	94,44	103,78	103,78
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92	92	95,61	103,92	103,92
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	86	76	89,75	118,09	110
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,75	90,75	94,44	104,07	104,07
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	91,04	107,11	107,11
		9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,75	96,75	99,89	103,25	103,25
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80,38	100,48	100,48
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91	91	96,89	106,47	106,47
		12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91	91	100	109,89	109,89
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100				
		14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	83,2	82,8	85,2	102,9	102,9
		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	3,85				

No	Sasaran Kegiatan	No	Nama Indikator	Target 2025	TW III			
					Target	Realisasi	Capaian	Capaian di Normalisasi
a	b		c	d	e	f	g	h
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	54	54	57,94	107,3	107,3
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Semarang	17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,42	86,42	88,01	101,84	101,84
		18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	20	86	94,6	110	110
		19	Jumlah desa pangan aman	6	67,5	90	133,33	110
		20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	100	100	100	100
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik da0tau IP	18,44	88,33	92,68	104,92	104,92
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di	22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	85	75	76,07	101,43	101,43
6	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan	23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	50	50	100	100
7	Layanan Publik BBPOM di Semarang yang Prima	24	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Semarang	4,7				
8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	25	Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Semarang	92,43				
		26	Nilai AKIP BBPOM di Semarang	82				
		27	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang	91,02				
		28	Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Semarang	3,6				
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)								104,83 Istimewa

Secara umum, capaian kinerja menunjukkan hasil yang **sangat baik**, dengan **Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 104,83** dan kategori **Istimewa**. Hasil ini menunjukkan bahwa BBPOM di Semarang mampu melampaui target yang telah ditetapkan melalui peningkatan efektivitas pengawasan, penguatan sistem tata kelola, serta sinergi lintas bidang dan lintas sektor dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pelayanan publik. Capaian tersebut selanjutnya dijabarkan secara lebih rinci pada masing-masing Sasaran Kegiatan berikut ini.

Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja BBPOM di Semarang

Capaian NPSK: 105,10 | Kategori: Sangat Baik (Biru)
Capaian kinerja pada sasaran ini menunjukkan hasil yang sangat baik dengan rata-rata capaian indikator sebesar 105,10 persen. Sebagian besar indikator melampaui target yang telah ditetapkan, antara lain tindak lanjut hasil

pengawasan oleh stakeholder sebesar 118,09 persen, pengawasan iklan produk 106,47 persen, serta pemeriksaan sarana produksi pangan olahan sebesar 107,11 persen. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas pengawasan lintas sektor serta meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan keamanan, mutu, dan manfaat produk. Beberapa indikator bersifat tahunan seperti pelaporan KTD/ESO, pengendalian AMR, dan pendampingan kabupaten/kota pangan aman sehingga belum dapat disimpulkan capaian kinerjanya. Secara umum, sasaran ini berkontribusi signifikan terhadap peningkatan perlindungan masyarakat dari risiko peredaran produk yang tidak memenuhi standar mutu dan keamanan.

Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

Capaian NPSK: 107,30 | Kategori: Sangat Baik (Biru)
Pelaksanaan pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi menunjukkan capaian yang sangat baik dengan persentase 107,30 persen. Hal ini menunjukkan pelaksanaan pemeriksaan dan pembinaan sarana produksi berjalan efektif serta konsisten sesuai ketentuan. Kinerja ini turut mendukung upaya peningkatan ketersediaan pangan bergizi yang aman bagi masyarakat.

Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya Efektivitas KIE di Masing-Masing Wilayah Kerja BBPOM di Semarang

Capaian NPSK: 105,46 | Kategori: Sangat Baik (Biru)
Capaian sasaran ini mencapai 105,46 persen dengan seluruh indikator utama melebihi target. Efektivitas kegiatan KIE mencapai 101,84 persen, sedangkan jumlah sekolah, desa, dan pasar pangan aman menunjukkan capaian di atas 100 persen. Hasil ini menggambarkan keberhasilan strategi komunikasi dan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran terhadap keamanan pangan dan obat, serta penguatan kolaborasi lintas sektor di daerah.

Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya Pendampingan UMKM dalam Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu

Capaian NPSK: 104,92 | Kategori: Sangat Baik (Biru)
Sasaran ini menunjukkan capaian 104,92 persen dengan indikator utama yaitu persentase UMKM yang memperoleh rekomendasi sertifikat Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) melampaui target. Hasil ini mencerminkan efektivitas kegiatan pendampingan dan bimbingan teknis dalam meningkatkan kepatuhan pelaku UMKM terhadap standar keamanan dan mutu produk.

Sasaran Kegiatan 5: Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja BBPOM di Semarang

Capaian NPSK: 101,43 | Kategori: Sangat Baik (Biru)
Capaian kinerja penyidikan terhadap pelanggaran di bidang obat dan makanan mencapai 101,43 persen. Hasil ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan penyidikan sesuai ketentuan serta peningkatan koordinasi dengan aparat penegak hukum. Upaya penindakan yang cepat dan tepat turut memperkuat fungsi pengawasan dalam menekan peredaran produk ilegal.

Sasaran Kegiatan 6: Terlaksananya Kegiatan Pemantauan Siber dan Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif

Capaian NPSK: 100,00 | Kategori: Sangat Baik (Biru)
Pemantauan siber terlaksana secara optimal dengan capaian 100 persen. Seluruh laporan analisis kejahatan terselesaikan sesuai standar dan tepat waktu. Hal ini menunjukkan kesiapan serta keandalan sistem deteksi dini dalam mengidentifikasi potensi pelanggaran di ranah digital.

Sasaran Kegiatan 7: Layanan Publik BBPOM di Semarang yang Prima

Capaian NPSK: - | Kategori: Tidak Dapat Disimpulkan (Abu-abu)
Indeks Pelayanan Publik bersifat tahunan sehingga belum dapat diukur pada Triwulan III. Meskipun demikian, kegiatan pelayanan publik tetap berjalan baik dengan penerapan digitalisasi layanan, sistem antrean online, serta peningkatan mekanisme pengaduan masyarakat sebagai bagian dari komitmen BBPOM di Semarang terhadap pelayanan prima.

Sasaran Kegiatan 8: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Unit Organisasi yang Optimal

Capaian NPSK: - | Kategori: Tidak Dapat Disimpulkan (Abu-abu)
Beberapa indikator seperti Nilai Pembangunan Zona Integritas, Nilai AKIP, Nilai Kinerja Anggaran, dan Indeks Manajemen Risiko belum terealisasi karena merupakan target tahunan. Namun demikian, kegiatan penguatan tata kelola, monitoring kinerja, dan penyusunan laporan telah dilaksanakan sesuai jadwal, termasuk pelaksanaan Desk SAKIP dan evaluasi pelaporan internal.

4.2 Saran

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Konsistensi dalam penyusunan POA setiap triwulan dan saat revisi anggaran serta melakukan monitoring penggunaan anggaran dan capaian output dengan menyusun Perencanaan Operasional Anggaran (POA) secara konsisten setiap triwulan dan pada saat revisi anggaran, dengan memastikan kesesuaian antara perencanaan dan kebutuhan riil di lapangan.

2. Monitoring Capaian Kinerja secara berkala dengan menindaklanjuti seluruh Hasil evaluasi SAKIP untuk capaian serta indikator kinerja yang tidak memenuhi target dengan menindaklanjuti secara serius seluruh temuan atau rekomendasi dari hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
3. Melakukan optimalisasi kinerja supaya semua target IKU tercapai dengan menyusun strategi pencapaian target IKU yang spesifik dan dapat diukur untuk masing-masing unit kerja dan mendorong kerja kolaboratif antar-substansi/unit, terutama untuk IKU yang memerlukan sinergi lintas bidang (misalnya capaian pengawasan, pelayanan publik, atau ZI).

LAMPIRAN

Lampiran 1 Rencana Kinerja Tahun 2025

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG
Jl. Sukun Raya No. 41 A Banyumanik Semarang 50264
Telp. 024 -7612324 (ULPK) Fax. 024-7613633
Email : likpomsm@yahoo.com Website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

NOMOR PR.06.01.9A.09.24.149 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KINERJA

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

Menimbang :

a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang pada Tahun 2025, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang Tahun 2025;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Reoublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG TENTANG RENCANA KINERJA

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG TAHUN 2025.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang Tahun 2025 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2025.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 20 September 2024

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG
BADAN POM

LINTANG PURBA JAYA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

NOMOR PR.06.01.9A.09.24.149 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG TAHUN 2024

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DI SEMARANG

TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
	distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100
4	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
5	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan BBPOM di Semarang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	79,7
6	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Semarang	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	95,6
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	20
		Jumlah desa pangan aman	6
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	82
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan	80

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
	Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Semarang	Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Semarang	
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh BBPOM di Semarang	14
10	Layanan Publik BBPOM di Semarang yang Prima	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Semarang	4,7
11	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Semarang	92,5
		Nilai AKIP BBPOM di Semarang	82,49
		Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang	90
		Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Semarang	3,7

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

LINTANG PURBA JAYA

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

BADAN POM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI SEMARANG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: LINTANG PURBA JAYA
Jabatan	: Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	: TARUNA IKRAR
Jabatan	: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 12 Februari 2025

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI
LINTANG PURBA JAYA	TARUNA IKRAR

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI SEMARANG

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87 Persentase
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26 Persentase
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persentase
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100 Persentase
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Persentase
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	86 Persentase
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90 Persentase
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persentase
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.75 Persentase
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Persentase

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85.87 Persentase
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	54 Persentase
3.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	79.7 Nilai
4.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.42 Persentase
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	20 Sekolah
		03 - Jumlah desa pangan aman	6 Desa
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Pasar
5.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	91 Persentase
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	85 Persentase

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 Persentase
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7 Nilai
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	92.43 Nilai
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	82 Nilai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	91.02 Nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3.6 Nilai

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 53.902.531.000 (Lima Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	35.006.289.000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	18.896.242.000

Semarang, 12 Februari 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang

LINTANG PURBA JAYA

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

TARUNA IKRAR

Lampiran 3 Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

BADAN POM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI SEMARANG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: LINTANG PURBA JAYA
Jabatan	: Kepala Balai Besar POM di Semarang

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	: TARUNA IKRAR
Jabatan	: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 29 Agustus 2025

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Kepala Balai Besar POM di Semarang	Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
LINTANG PURBA JAYA	TARUNA IKRAR

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI SEMARANG

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.5 Persentase
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26 Persentase
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91 Persentase
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100 Persentase
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92 Persentase
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	86 Persentase
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90.75 Persentase
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persentase
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.75 Persentase
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Persentase
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91 Persentase

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	83.2 Nilai
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	3.85
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	54 Persentase
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.42 Persentase
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	20 Sekolah
		03 - Jumlah desa pangan aman	6 Desa
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Pasar
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	18.44 Persentase
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	85 Persentase
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 Persentase

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7 Nilai
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	92.43 Nilai
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	82 Nilai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3.6 Nilai

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 53.693.128.000 (Lima Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	34.689.489.000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	19.003.639.000

Semarang, 29 Agustus 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai Besar POM di Semarang

LINTANG PURBA JAYA

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

TARUNA IKRAR

Lampiran 4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja
Tahun 2025

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI SEMARANG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET											ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	1.185.442.000
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												26	80.300.000
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	208.979.667
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	208.979.666
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	208.979.666
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	50	53	56	59	63	66	69	73	76	79	83	86	65.855.250
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	65.855.250
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	65.855.250
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.75	96.75	96.75	96.75	96.75	96.75	96.75	96.75	96.75	96.75	96.75	96.75	650.500.000
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	650.500.000
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85.87	85.87	85.87	85.87	85.87	85.87	85.87	85.87	85.87	85.87	85.87	85.87	65.855.250

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		5.61	16.82	28.04	39.25	50.47	54	54	54	54	54	54	88.195.000
3.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			70.31	70.31	70.31	72.87	72.87	72.87	76.12	76.12	76.12	79.7	9.630.584.000
4.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			86.42	86.42	86.42	86.42	86.42	86.42	86.42	86.42	86.42	86.42	17.055.022.000
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	5	20	20	60	60	60	65	70	75	85	95	20	653.579.000
		03 - Jumlah desa pangan aman	5	25	28	46	54	62	71	73	77	88	100	6	1.308.912.000
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	5	20	20	40	65	65	95	100	100	100	100	1	130.777.000
5.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	6.67	16	24.17	48.5	56.67	69.33	82.5	84.33	88.33	91	96.67	91	97.721.000
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	10	25	35	37.5	40	45	55	60	65	75	80	85	813.876.000
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	122.167.000
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4.7	688.354.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												92.43	240.000.000
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM												82	240.000.000
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												91.02	19.136.242.000
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												3.6	240.000.000
														Total	53.902.531.000

Semarang, 12 Februari 2025

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang

LINTANG PURBA JAYA

Lampiran 5 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Revisi ke 1)

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI SEMARANG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	1.185.442.000
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												26	80.300.000
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	208.979.667
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	208.979.666
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	208.979.666
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	50	53	56	59	63	66	69	73	76	79	83	86	65.855.250
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	65.855.250
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	65.855.250
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.75	96.75	96.75	96.75	96.75	96.75	96.75	96.75	96.75	96.75	96.75	96.75	650.500.000
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	650.500.000
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85.87	85.87	85.87	85.87	85.87	85.87	85.87	85.87	85.87	85.87	85.87	85.87	65.855.250

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		5.61	16.82	28.04	39.25	50.47	54	54	54	54	54	54	88.195.000
3.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			70.31	70.31	70.31	72.87	72.87	72.87	76.12	76.12	76.12	79.7	9.630.584.000
4.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			86.42	86.42	86.42	86.42	86.42	86.42	86.42	86.42	86.42	86.42	17.055.022.000
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	5	20	20	52.5	55.7	62.65	69.6	72.8	86	86.7	100	20	653.579.000
		03 - Jumlah desa pangan aman	5	25	28	38	47.5	54.2	57.5	67.5	67.5	67.5	100	6	1.308.912.000
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	5	20	20	55	80	100	100	100	100	100	100	1	130.777.000
5.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	6.67	16	24.17	48.5	56.67	69.33	82.5	84.33	88.33	91	96.67	91	97.721.000
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	10	25	35	37.5	40	45	55	60	65	75	80	85	813.876.000
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	122.167.000
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4.7	688.354.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET											ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												92.43	240.000.000
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM												82	240.000.000
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												91.02	19.136.242.000
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												3.6	240.000.000
														Total	53.902.531.000

Semarang, 11 June 2025

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang

LINTANG PURBA JAYA

Lampiran 6 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Revisi ke 2)

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI SEMARANG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		87	87	87	87	87	87	91.5	91.5	91.5	91.5	91.5	592.721.000
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												26	80.300.000
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	91	91	91	91	91	209.021.463
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	4.760.000
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		80	80	80	80	80	80	92	92	92	92	92	208.958.769
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	50	53	56	59	63	66	69	73	76	79	83	86	4.130.000
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	90	90	90	90	90	90	90.75	90.75	90.75	90.75	90.75	131.710.500
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	131.710.500
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.75	96.75	96.75	96.75	96.75	96.75	96.75	96.75	96.75	96.75	96.75	96.75	616.270.000
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	616.270.000
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85.87	85.87	85.87	85.87	85.87	85.87	85.87	91	91	91	91	91	54.810.000
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar								91	91	91	91	91	592.721.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT												100	4.760.000
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			70.31	70.31	70.31	72.87	72.87	78.8	82.8	82.8	82.8	83.2	7.213.784.000
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman												3.85	208.958.769
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		5.61	16.82	28.04	39.25	50.47	54	54	54	54	54	54	88.195.000
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			86.42	86.42	86.42	86.42	86.42	86.42	86.42	86.42	86.42	86.42	17.055.022.000
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	5	20	20	52.5	55.7	62.65	69.6	72.8	86	86.7	100	20	653.579.000
		03 - Jumlah desa pangan aman	5	25	28	38	47.5	54.2	57.5	67.5	67.5	67.5	100	6	1.308.912.000
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	5	20	20	55	80	100	100	100	100	100	100	1	130.777.000
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	6.67	16	24.17	48.5	56.67	69.33	82.5	84.33	88.33	91	96.67	18.44	97.721.000
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	10	25	35	37.5	40	45	55	65	75	80	82.5	85	813.876.000
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	122.167.000
7.	08 - Layanan Publik UPT	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4.7	688.354.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	yang prima														
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												92.43	2.340.000.000
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM												82	240.000.000
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	19.243.639.000
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												3.6	240.000.000
														Total	53.693.128.000

Perencanaan target B1 hingga B7 mengacu pada Manual IKU Rancangan Awal Renstra 2025-2029. Perhitungan terhadap realisasi berdasarkan Manual IKU Rancangan Renstra 2025-2029 dituangkan pada Dokumen Laporan Kinerja (Interm dan Tahunan).

Semarang, 29 Agustus 2025

Kepala Balai Besar POM di Seamarang

LINTANG PURBA JAYA

Lampiran 7 Capaian Kinerja TW III

2. TL RAPK Juli 2025

NO	INDIKATOR	Target 2025	Juli									
			Target	Realisasi	CB	CT	Kegiatan	Kendala Bulan Sebelumnya	TL atas Kendala Bulan Sebelumnya	Kendala	RTL dan Arahan Kepala Balai	Timeline
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,50	87	100,39	115,39	109,72	1. Telah dilakukan sampling sediaan farmasi sampai dengan bulan Juli sejumlah 925 sampel (Obat 277 sampel, OBA 209 sample, SK 52 sampel dan kosmetik 386 sampel). Capaian jumlah sampel sd Juli sebesar 61.99% dari target awal 1492 sampel. 2. Telah dilaksanakan pengujian sampel Farmasi sd Bulan Juli (sampel Rutin Semarang) Obat : 254 sampel, OTSK dan kuasi : 350 sampel, dan kosmetik : 490 sampel .	minggu ini bahas di regionalisasi selasa depan	Sudah terlaksana	Tidak ada kendala.	-	-
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26					Dilaksanakan tanggal 4 Februari 2025 dengan target 90 fasilitas pelayanan kesehatan dan refreshment PV dalam acara Sharasehan tanggal 25 April 2025 terhadap peserta Bimtek PV tanggal 4 Februari 2025. Sampai dengan Juli 2025, sudah ada 26 fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang sudah melaporkan e-meso yang terdiri dari 23 rumah sakit, 2 PKM, 1 klinik. Capaian sd Juli 2025 (28,89%)	Tidak ada kendala.	- Dilakukan pendampingan kepada sarana pelayanan kesehatan (saryankes) yang belum melaporkan KTD/ESO melalui e-meso	Tidak ada kendala.	audit lapangan dari WHO, capaian mendekati 112,5%Capaian sd Juli sudah 112,5%	-
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	85	100,14	117,81	110,04	1. Telah dilakukan sampling pangan olahan sampai dengan bulan Juli sejumlah 427 sampel dari target sampel awal 643 sampel sehingga capaian jumlah sampel sd Juli sebesar 66,4%	Sampel yang diterima cukup banyak di bulan Juni, saat ini masih proses dan masih dalam batas timeline maksimal 20 HK.	Perencanaan jumlah dan jenis sampel yang masuk diupayakan untuk dikoordinasikan dengan baik kepada pihak inspeksi, dan pejabat pengadaan terkait pengadaan reagen	Tidak ada kendala.	-	-
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100,00	100,00	Januari ada 1 sampel KLB yang masuk dan diuji (Ikky Jeli dari Dinkes Batang) = > TMS pengawet dan pemanis. Februari ada 1 sampel KLB yang masuk dan diuji (Bahan Seblak dan mie kuning) = > MS (uji logam berat dan mikro)	Tidak selalu ada kasus dan sampel KLB setiap bulannya	Koordinasi dengan DKK jika ada kasus KLB terkait sampel yang bisa diuji oleh BBPOM di Semarang, di cek dinkes ditekan terkait MBG didalami apakah ada KLB atau tidak?koordinasi dengan labkesda terkait rujukan keracunan dg katim pjas	Tidak selalu ada kasus dan sampel KLB setiap bulannya	Koordinasi dengan DKK jika ada kasus KLB terkait sampel yang bisa diuji oleh BBPOM di Semarang, di cek dinkes ditekankan terkait MBG didalami apakah ada KLB atau tidak?koordinasi dengan labkesda terkait rujukan keracunan dg katim pjas	-
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92	80	95,79	119,74	104,12	Pemenuhan target sampel PIRT 100,89%, Kesesuaian Parameter Uji 100%, Ketetapatan Pengambilan Kesimpulan 100%, Ketepatan waktu pengambilan sampel 56,14%, Ketepatan Waktu Pelaporan 100%, Tindak lanjut sampel PIRT 100%	Target terlalu rendah dan telah mengajukan peningkatan target melalui desk dengan Biro Perencanaan. Target yang diusulkan sebesar 92%.	bersurat dulu, pengawasan mengikuti jadwal... ke dinkes hingga bupati sebelum tanggal 15 Juni 2025	Target terlalu rendah dan telah mengajukan peningkatan target melalui desk dengan Biro Perencanaan. Target yang diusulkan sebesar 92%.	menggunakan target baru di TW berikutnya	Juli 2025
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	86	69	62,56	90,67	72,74	Monitoring dan evaluasi TL dan CAPA sampai dengan Juli : Pelaku Usaha = rekomendasi : 414 sudah TL (CAPA) : 259	Sarana produksi banyak yang belum menyampaikan CAPA	Desk CAPA sarana Produksi Juli 2025	Sarana produksi banyak yang belum menyampaikan CAPA	Desk CAPA sarana Produksi 11 Agustus 2025	Agustus 2025

NO	INDIKATOR	Target 2025	Juli									
			Target	Realisasi	CB	CT	Kegiatan	Kendala Bulan Sebelumnya	TL atas Kendala Bulan Sebelumnya	Kendala	RTL dan Arahan Kepala Balai	Timeline
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89,5	90	95,73	106,37	106,96	Pemeriksaan Sarana Produksi telah mencapai 80,77% (36 sarana dari target 52 sarana) IF 57,14% (4 dari target tahunan 7) IOT/UKOT/UMOT 80,76% (21 dari target tahunan 26) IKOS 78,57% (13 dari target tahunan 14) ISK 60% (4 dari target tahunan 5) Penyampaian hasil pemriksaan melalui SIPT, sampai dengan 5 Agt kesesuaian kesimpulan dan TL Kos 100%.	UMOT/ UKOT yang didatangi tutup/ tidak ada aktivitas/ tidak bisa diperiksa TL dan SIPT pemeriksaan IF bersama pusat masih status draft, menunggu penyelesaian dari pusat	sarana yang tutup telah diganti dengan sarana berbobot risiko tertinggi selanjutnya (juli)	pemeriksaan IF menunggu jadwal pusat, dan menunggu kesiapanan industri dalam rangka sertifikasi	berkoordinasi dengan pusat untuk penjadwalan inspeksi Rencana Pelatihan Stemsel di Oktober 2025	Oktober 2025
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	92,03	108,27	108,27	%ketepatan waktu 89,13%. Ketepatan tindak lanjut 90,22%.Evaluasi ketepatan grading 96,74%	Tidak ada kendala	Sesuai target	Tidak ada kendala	Sesuai target	-
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,75	96,75	104,07	107,57	107,57	Pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi sesuai target sampai dengan Juli	tidak ada kendala	Monev sesuai target, buatkan tim pokja reminder laporan pengawasan, 30 bln sebelumnya agar menyampaikan laporan sebelum tgl 5 bulan setelahnya.	Tidak ada kendala.	Sesuai target	-
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	83,49	104,36	104,36	Realisasi bulan Juli 15 sarana, total Jan-Juli 105 sarana (66,9%) dari target 157 sarana.	tidak ada kendala	Monev sesuai target	Tidak ada kendala.	Monev sesuai target	-
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91	85,87	96,39	112,25	105,92	Pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan sampai dengan Juli sejumlah 847 iklan (62.6%) dari target iklan 1.353 iklan.		Monev sesuai target	Tidak ada kendala.	Monev sesuai target	-
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar		[redacted]				Sampai dengan Juli Penandaan Rokok 115, Rokok Elektrik 2	[redacted]		Tidak ada kendala.	-	-
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT						Pemeriksaan Sanyanfar telah menggunakan form pengawasan AMR dan diisi lengkap oleh petugas, sampai dengan Juli 135 sarana (Apotek, RS, Puskesmas dan Klinik) Telah dilakukan Bimtek AMR 2 kali (di Rembang dengan 19 OPD kesehatan dan di Semarang kolaborasi dengan PBF AAM, serta KIE AMR			-	-	-
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	83,2	72,87	78,8	108,14	94,71	1. Melaksanakan pemenuhan ruang lingkup laboratorium TW 3, Laboratorium kosmetik menambah satu ruang lingkup 2. Monitoring pengadaan peralatan laboratorium untuk meningkatan pemenuhan standar peralatan 3. Membuat jadwal verifikasi metoda analisa TW 3 dari masing-masing laboratorium 4. Melaksanakan dan monitoring Pemenuhan kompetensi personil di TW 3, telah ada penambahan kemampuan personil di Lab Obat dan Lab Kosmetik sesuai ruang lingkup	Tidak ada kendala, Monev SKL terealisasi sesuai jadwal. Penurunan kompetensi personil karena penambahan Ruang Lingkup akan dilaksanakan di TW 3.	1. Revisi target SKL TW 3 dan TW 4 th 2025 sudah disetujui P3OMN, nantinya akan diajukan ke Roren sebelum Timeline Revisi	Tidak ada kendala.	alat yang belum datang: SKL hanya butuh 2 alat, bulan lalu sudah 1, bulan agustus ini akan datag 1 lagi alat tambahan akan dipakai terus atau ditarik ke anggaran 2026	-

NO	INDIKATOR	Target 2025	Juli									
			Target	Realisasi	CB	CT	Kegiatan	Kendala Bulan Sebelumnya	TL atas Kendala Bulan Sebelumnya	Kendala	RTL dan Arahan Kepala Balai	Timeline
15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	3,85					Pendampingan Kab/kota Pangan Aman tahun 2025 adalah Kota Semarang, sudah dilakukan pendampingan			-	-	-
12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	54	54	57,94	107,30	107,30	Pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi sampai dengan Juli sejumlah 62 sarana. Target pemeriksaan sarana fortifikasi sejumlah 58 sarana dan dikerjakan sampai bulan Juli 2025.	tidak ada kendala	koordinasi dengan sertifikasi, untuk garam ada kontrak produksi atau blm?cppob msh aktif atau tidak? dilakukan pengawasan bersama	Tidak ada kendala.	-	-
14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	86,42	86,42	87,21	100,91	100,91	.Di bulan Juli telah dilakukan KIE bersama tokoh masyarakat sejumlah 4 titik dengan jumlah peserta 892, Indeks efektifitas KIE s/d juli 87.54 (target 86,42) capaian : 101,3%	Tidak ada kendala	Telah dilakukan tindak lanjut atas kendala bulan April dan telah dicapai indeks efektifitas KIE lebih dari target (capaian di bulan Juli 101,3 %)	Tidak ada kendala. Dari 35 titik yg belum terlaksana adalah sejumlah 3 titik (2 titik dg Tomas ibu Nafa dan 1 titik dg tomas bapak Edy. Informasi dari Tenaga ahli, kemungkinan di akhir Agustus akan dilaksanakan.	kegiatan yang tidak dianggarkan, gabung dengan kegiatan masyarkat atau merpat ke pemda	-
15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	20	69,60	70,45	101,22	70,45	Pada Bulan Juli telah dilaksanakan - monitoring kader keadaman pangan sekolah dan verifikasi sekolah dalam rangka sertifikasi sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan - sosialisasi budaya keamanan pangan melalui medsos - pengawalan terhadap sekolah intervensi 2024 dengan refresh materi melalui WAG, Sarasehan, Paman Kece - perluasan sekolah sebagai nara sumbe di MPLS SD Antonius 02, di Kab.Wonosobo (MTs Ma'arif Garung dan SDN 3 Kembaran), dan Kab. Sukoharjo (74 SMP Swasta & Negeri)	Tidak ada kendala, tahap sosialisasi media sosial dan pengawalan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	Tahap selanjutnya yaitu sertifikasi sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dan Piagam Bintang Keamanan Pangan Kantin Sekolah	Tidak ada kendala.	Melaksanakan tahap selanjutnya sertifikasi sekolah yang membudayakan keamanan pangan dan audit kantin	-
16	Jumlah desa pangan aman	6	57,50	68,00	118,26	68,00	Pada bulan Juli telah dilaksanakan monev di Desa Asinan	Tidak ada kendala, tahap monev Desa Bejalen dan Desa Kemambang telah dilaksanakan sesuai perencanaan	Pelaksanaan tahap selanjutnya yaitu tahap pengawalan yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2025, namun telah dilaksanakan lebih awal pada TW II	Tidak ada kendala.	Pelaksanaan tahap selanjutnya yaitu tahap pengawalan yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2025, namun telah dilaksanakan lebih awal pada TW II	-
17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	100,00	100,00	100,00	100,00	1. Berdasarkan Surat dari Dir. PMPUPO No B-PM.02.01.55.07.25.510 tanggal 21 Juli 2025 tentang Penyampaian kegiatan BIS PAMAN (Bincang-bincang Seputar Pangan Aman) serta kegiatan Bimtek Replikasi Program PPABK, Pada Bulan Juli telah dilaksanaan koordinasi terhadap kabupaten/kota yang akan melakukan replikasi PPABK. antara lain Disdag Kab. Magelang, Disdag Kota Pekalongan, Disdag Kab. Rembang, Disdag Kab. Semarang, Disdag Kota Magelang, Disdag Kab. Grobogan, Disdag Kab. Pati, Disdag Kab. Pekalongan. 2. Diantara 8 Kab./Kota tersebut hanya 2 yang akan melaksanakan replikasi PPABK yaitu dari Kab. Magelang dan Kab. Semarang yang rencanakan akan dilaksanakan pada Bulan September 2025. 3. Kab./Kota yang lain belum bisa melaksanakan replikasi PPABK karena terkendala anggaran	Tidak ada kendala	- Seluruh rangkaian pembentukan Pasar Pangan Aman Berbasisi Komunitas (PPABK) telah selesai dilaksanakan. - Bulan Agustus akan dilaksanakan layanan cekatan di Pasar Pedurungan dengan kolaborasi dengan SAKA POM	Untuk pembentukan pasar replikasi terkendala tidak tersedia anggaran dari Disdag setempat		-

NO	INDIKATOR	Target 2025	Juli									
			Target	Realisasi	CB	CT	Kegiatan	Kendala Bulan Sebelumnya	TL atas Kendala Bulan Sebelumnya	Kendala	RTL dan Arahan Kepala Balai	Timeline
15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	3,85					Pendampingan Kab/kota Pangan Aman tahun 2025 adalah Kota Semarang, sudah dilakukan pendampingan			-	-	-
12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	54	54	57,94	107,30	107,30	Pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi sampai dengan Juli sejumlah 62 sarana. Target pemeriksaan sarana fortifikasi sejumlah 58 sarana dan dikerjakan sampai bulan Juli 2025.	tidak ada kendala	koordinasi dengan sertifikasi, untuk garam ada kontrak produksi atau blm?cppob msh aktif atau tidak? dilakukan pengawasan bersama	Tidak ada kendala.	-	-
18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	18,44	82,5	90	109,09	90,00	GMP OBA tercapai 4, kosmetik tercapai 4, pangan masih 4 yang berproses evaluasi, ipcpob terbit: 20 sertifikat Total memenuhi GMP : 28	tidak ada kendala	0	Tidak ada kendala.	-	-
19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Semarang	85	55	62,86	114,29	73,95	Telah dilakukan penyidikan terhadap 2 perkara pada bulan Juli 2025,dari target pada TW 3 adalah 3 perkara. Perkembangan perkara 1 mencapai tahap P21	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala.	-	-
20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	50	50	100,00	55,56	sudah dilakukan input akun yang diajukan takedown dan laporan profilling sebelum tenggat waktu tanggal 25 di tiap bulannya; jumlah akun yang diajukan takedown bulan Juli adalah 62 akun dan profiling 4 akun komoditi kosmetik	Tidak ada kendala	melakukan pengajuan takedown dan pengisian data profilling sebelum tenggat waktu tanggal 25 di tiap bulannya	Tidak ada kendala.	-	-
21	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Semarang	4,7					1. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat bulan Juli 2025 2. Penyusunan Laporan SKM bulan Juni 2025 dan Tindak Lanjut SKM bulan Mei 2025 3. Publikasi SKM Juni 2025 4. Penetapan Petugas Yanblik Terbaik Bulan Juni 2025: Hanum PP, Nahriyati, Maya Y Mappapa 5. Penyusunan laporan akuntabilitas hasil konsultasi dan pengaduan bulan Juni 2025 beserta laporan tindaklanjutnya 6. Penyusunan Laporan SPKP dan SPAK Juni 2025 7. Penyusunan Laporan Tindak Lanjut FKP 2025 8. Pengisian data dukung Evortala	Tidak ada kendala		Tidak ada kendala	buat penilaian pelayan publik terbaik biar sama (hanya untuk pelayan publik saja) evortala 7 agustus (desk wawancara)	-

NO	INDIKATOR	Target 2025	Juli									
			Target	Realisasi	CB	CT	Kegiatan	Kendala Bulan Sebelumnya	TL atas Kendala Bulan Sebelumnya	Kendala	RTL dan Arahan Kepala Balai	Timeline
22	Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Semarang	92,43					1. Seluruh rencana kerja dan target prioritas ZI bulan Juli telah dilaksanakan. 3. 13 AoC telah input progress aksi bulan Juli melalui emonevrb 4. Telah dilaksanakan internalisasi BerAKHLAK ke seluruh pegawai BBPOM di Semarang melalui : Sosialisasi Pokja 1 RB sebagai Pembina Apel Virtual Kamis 10 Juli, BerAKHLAK Vibes episode 3 Tebak Suara yang publish di seluruh media sosial bpom Semarang, Sosialisasi RB Tematik-> Peran BBPOM Semarang dalam Penanganan Stunting di Media Sosial, infografis nilai perilaku BerAKHLAK Kompeten, Senam sehat bersama (Harmonis), Info Pameran Arsip di BPOM (Berorientasi Pelayanan), Infografis Monev Kinerja TW 2 oleh Pokja 4 RB (Akuntabel), Infografis Bersepeda Bersama Jumat Krida (Harmonis), Infografis Inovasi Lakone Sekti (Berorientasi Pelayanan), pelaksanaan English Fun Day (Kompeten), Kampanye Fosil Antik tentang benturan kepentingan, infografis GEMAS manfaat minum air putih 6. Telah dilaksanakan sosialisasi RB kepada Stakeholder berupa Sosialisasi kanal pengaduan Lapor KaBALAI pada KIE Ibu Nafa Urbach di Kab Wonosobo (21 Juli), KIE Bapak Edy Wuryanto di Rembang 12 Juli, Bimtek Farmakovigilans AMR ABSO 22 Juli di Semarang. 7. Telah dilaksanakan 3 Padi Manis: Sosialisasi Mengenal Gratifikasi 3 Juli, Sosialisasi SOP Makro tentang Penataan Tata Laksana dan progress Revisi SOP Makro BPOM 10 Juli, dan Sosialisasi Program AoC FOSIL ANTIK dan SENTUH BPOM 31 Juli	Tidak ada kendala	Progress aksi AoC atas nama Nahriyati dituliskan pada progress yang sudah ada (edit) bukan tambah progress (+)	Tidak ada kendala	apel direkam harus selalu diinfokan ke kepala balai agar dokumentasi lebih kuat	-
							1. Telah dilakukan sosialisasi SOP Makro tentang Penataan Tata Laksana dan Progres Revisi SOP Makro BPOM pada Padi Manis 10 Juli 2025, selanjutnya mohon untuk dapat dilakukan kaji ulang SOP mikro untuk tiap-tiap bidang. 2. Pelaksanaan audit internal secara silang (cross audit) dijadwalkan pada September 2025 dengan pelaksanaan Entry Meeting tingkat BPOM tentatif pada akhir Agustus 2025. 3. Pelaksanaan Surveilan ISO 37001:2016 (SMAP) oleh Garuda Sertifikasi Indonesia dijadwalkan pada Bulan Oktober 2025. 4. Pelaksanaan reakreditasi ISO 17025:2017 oleh KAN BSN dijadwalkan pada bulan Januari 2025, dan pengajuan permohonan reakreditasinya akan dilakukan pada minggu ini, karena harus diajukan 1 tahun hingga 9 bulan sebelum masa akreditasi berakhir (sertifikat akreditasi berlaku hingga 2 Juli 2026).	Kendala digitalisasi lab: Input data sampel tidak bisa dilakukan pada perangkat dengan RAM kecil, karena akan terjadi error atau SPP tidak terkirim ke WhatsApp penguji.	Menggunakan PC atau laptop kantor	Tidak ada kendala	-	-
							1. Melakukan review terhadap tugas rutin kepegawaian 2. Melakukan review peserta pemetaan kompetensi mansoskul, psikotes dan pemetaan teknis 3. Melakukan review pemutahiran data keluarga pegawai (status pernikahan) 4. Melakukan review KP/KJ Periode Oktober 2025 5. Melakukan analisis capaian kinerja triwulan 1 tahun 2025 6. Melakukan review GAP kompetensi, perencanaan pengembangan kompetensi	tidak ada kendala	-	Tidak ada kendala	-	-

NO	INDIKATOR	Target 2025	Juli									
			Target	Realisasi	CB	CT	Kegiatan	Kendala Bulan Sebelumnya	TL atas Kendala Bulan Sebelumnya	Kendala	RTL dan Arahan Kepala Balai	Timeline
							1. Pelaksanaan Rapat Evaluasi dan Monitoring Kinerja Juni 2025 2. Reminder Pelaporan Kinerja di awal Bulan untuk Seluruh Ketua tim 3. Penyampaian Info Ki Semar (Infografis Kinerja BBPOM di Semarang) di Medsos bulan Juni 2025	- Belum melakukan Uji SMART IKU untuk data dukung Desk Sakip - Masih ada menu di Tugu Muda dan Kibas Rambut yang belum singkron	-Belum melakukan uji smart karena menunggu manual iku dari Roren -bulan ini akan mencoba menyingkronkan dokumen kinerja di kibas rambut dan subsite	-Belum melakukan uji smart karena menunggu manual iku dari Roren - Masih ada menu di Tugu Muda dan Kibas Rambut yang belum singkron	- melakukan Uji SMART IKU untuk data dukung Desk Sakip - Sinkronisasi link2 di Tugu Muda dan Kibas Rambut - Rapat Reward Punishment TW II - TL Lakip harus di update yang belum - Jadwal revisi ke 2 RAPK 2025 menunggu IKU baru	Agustus 2025
							1. Laporan WBS dan pengaduan masyarakat s.d bulan Juli 2025 NIHIL 2. Nilai IPAK bulan Juli 2025 3.93, sehingga rata-rata nilai IPAK sampai dengan bulan Juli 3.91 3. Laporan Si Bergas bulan Juli 2025 4. Fosil antik Juli dengan tema benturan kepentingan 5. Laporan gratifikasi TW 2 NIHIL 6. Laporan benturan kepentingan TW 2 sebanyak 14 orang pegawai berpotensi benturan kepentingan 7. 9 orang PPPK sudah menyampaikan LHKPN awal menjabat	tidak ada kendala	-	Sibergas bulan Juli 2025 pada layanan Inspeksi: 1. Kurang tepat waktu datangnya surat perintah tindakan dari BPOM Semarang,terlalu cepat dari 10HK setelah kunjungan. 2. Pemeriksaan lebih baik di lakukan di luar jam istirahat instansi yang di periksa	-	
							1. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat bulan Juli 2025 2. Penyusunan Laporan SKM bulan Juni 2025 dan Tindak Lanjut SKM bulan Mei 2025 3. Publikasi SKM Juni 2025 4. Penetapan Petugas Yanblik Terbaik Bulan Juni 2025: Hanum PP, Nahriyati, Maya Y Mappapa 5. Penyusunan laporan akuntabilitas hasil konsultasi dan pengaduan bulan Juni 2025 beserta laporan tindaklanjutnya 6. Penyusunan Laporan SPKP dan SPAK Juni 2025 7. Penyusunan Laporan Tindak Lanjut FKP 2025	Tidak ada kendala	-	Tidak ada kendala		
23	Nilai AKIP BBPOM di Semarang	82					1. Pelaksanaan Rapat Evaluasi dan Monitoring Kinerja Junii 2025 2. Menindaklanjuti Rekomendasi Lakip di setiap Rapat Bulanan 3. Renstra 2025-2029 disampaikan ke roren untuk di reviu 4. Laporan Evaluasi Internal TW II 5. Laporan Kinerja Interim TW II	tidak ada kendala	-	-Belum melakukan uji smart karena menunggu manual iku dari Roren - Masih ada menu di Tugu Muda dan Kibas Rambut yang belum singkron	- melakukan Uji SMART IKU untuk data dukung Desk Sakip - Sinkronisasi link2 di Tugu Muda dan Kibas Rambut - Rapat Reward Punishment TW II - TL Lakip harus di update yang belum - Jadwal revisi ke 2 RAPK 2025 menunggu IKU baru	Agustus 2025
24	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang	91,02					IKPA belum bisa ditarik, capaian output blm selesai dientry (batas tgl 7 Agustus), Realisasi Anggaran Target Juli terealisasi 95,28%	tidak ada kendala	-	Tidak ada kendala	-	-
25	Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Semarang	3,6					1. Laporan manajemen risiko semester II 2025 telah disampaikan melalui sapaapip.pom.go.id pada tanggal 18 Juli 2025 dengan total risiko 128, risiko positif 17, RTP 4 2. Telah dilaksanakan kegiatan Refreshment Implementasi Manajemen Risiko di Lingkungan BPOM tahun 2025 pada tanggal 17 Juli 2025	0	-	Tidak ada kendala	-	-

NO	INDIKATOR	Target 2025	Juli									
			Target	Realisasi	CB	CT	Kegiatan	Kendala Bulan Sebelumnya	TL atas Kendala Bulan Sebelumnya	Kendala	RTL dan Arahan Kepala Balai	Timeline
26	Nilai Pengelolaan Kearsipan	60-80					Penyelesaian pemberkasan arsip elektronik	1. Penciptaan arsip belum optimal 2. Arsip elektronik pada aplikasi Srikandi belum seluruhnya diiberkaskan	1. Sosialisasi Tata Naskah Dinas 2. Penyelesaian pemberkasan arsip elektronik	1. Arsip elektronik pada aplikasi Srikandi belum seluruhnya diiberkaskan 2. Proses pemberkasan arsip elektronik membutuhkan waktu dengan memilah klasifikasinya jika belum ada di menu pilihan maka perlu proses pembuatan folder klasifikasi arsip di Srikandi, dengan jumlah ribuan arsip	1. Penyelesaian pemberkasan arsip elektronik 2. Penetapan target penyelesaian di Tim Pengelola Arsip	31 Agustus 2025
27	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	96,25					Indeks kepuasan Masyarakat berdasar hasil survey pada 233 konsumen : 97,35	Tidak ada kendala	Tamu Rahasia terkait WBK WBBM, linsek mohon dipantau kembali, integritas security ditigkatkan kembali.	Tidak ada kendala	Tamu Rahasia terkait WBK WBBM, linsek mohon dipantau kembali, integritas security ditigkatkan kembali.	-
28	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	95					Penerimaan Alat Lab sudah selesai 100%, pengadaan alat hasil revisi belum dimulai		Penyusunan spesifikasi dan memulai pengadaan alat lab (susulan revisi anggaran)	belom masuknya spesifikasi alat lab dari user	PPK menunggu spesifikasi alat dari user	Oktober 2025
29	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	82,75					1. Updating kondisi BMN untuk Pra Sensus (maksimal Oktober pelaporan pra Sensus BMN) 2. Penyusunan Laporan BMN Semarang dan Wilayah Semaranag Sem I 3. Penerusan penghapusan BMN Jogja 4. Pengajuan PSP Pengadaan BMN Bulan Juli 5. Pemeliharaan pompa aerator IPAL 6. Penghentian status penggunaan Mobil Starrex 7. Pemeliharaan Genset, AC Lab dan AC Gedung Admin 8. Pemeliharaan Plafon Lab Pangan 9. Update persediaan status usang ATK : Tinta (printer sdh tidak ada); produk informasi (banner rusak)	1. Kondisi BMN Kendaraan dinas (Starrex) rusak 2. Kurangnya pemanfaatan Mobil dinas penindakan 3. Kondisi luar mobil Lab keliling rusak (bocor dan cat mengelupas, interior dlam-meja lepas) dr peminjaman Loka Banyumas	1. Menetapkan harga perkiraan kendaraan Starex 2. Usulan Penghapusan Mobil Starex	1. Kurangnya pemanfaatan Mobil dinas penindakan 2. Kondisi luar mobil Lab keliling rusak (bocor dan cat mengelupas, interior dlam-meja lepas) dr peminjaman Loka Banyumas --> Surat Penawaran harga body repair 250 jt		31 Desember 2025
30	Meningkatnya efektifitas koordinasi dalam program sediaan farmasi dan pangan olahan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95					linsek : data dukung belum dimasukan capaiannya lebh dari 25% DAK monev rutin kendala dan TLnya	Kudus tkpom berhenti di sekda, lanjut grobogan	perlu di push lagi,, kebetulan bupatinya baru kebumen selesai 2025 dibuatkan surat permohonan perpanjangan kerjasama di th ini	Kudus tkpom berhenti di sekda, lanjut grobogan	perlu di push lagi,, kebetulan bupatinya baru kebumen selesai 2025 dibuatkan surat permohonan perpanjangan kerjasama di th ini	Oktober 2025
31	Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri	65					Pengadaan belanja modal ekstrakomtabel (PDN), Swakelola (ATK, Pencetakan, Pemeliharaan gedung, e purchasingg reagen smart lab (PDN)	-	-	Reagen PDN keruh, Reagen tidak ada label di Botol Kemasan Reagen saat dibuka sdh tercium bau reagen (diduga bocor)	sudah komplain ke penyedianya	Oktober 2025

3. TL RAPK Agustus 2025

NO	INDIKATOR	Target 2025	Agustus									
			Target	Realisasi	CB	CT	Kegiatan	Kendala Bulan Sebelumnya	TL atas Kendala Bulan Sebelumnya	Kendala	RTL dan Arahan Kepala Balai	Timeline
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,50	91,5	99,86	109,14	109,14	1. Telah dilakukan sampling sediaan farmasi sampai dengan bulan Agustus sejumlah 1.103 sampel (Obat 328 sampel, OBA 249 sample, SK 62 sampel dan kosmetik 464 sampel). Capaian jumlah sampel sd Agustus sebesar 73.93% dari target awal 1492 sampel. 2. Telah dilaksanakan pengujian sampel Farmasi sd Bulan Agustus(sampel Rutin Semarang) Obat : 296 sampel, OTSK dan kuasi : 412 sampel, dan kosmetik : 582 sampel	Tidak ada kendala.	-	1. Sejak Bulan Juli, Surat Recall produk kosmetik (9 surat) OT dan SK (23 surat) dari Deputi 2 cukup banyak, sementara target pemset rutin Distribusi kosmetik, OT & SK terbatas. Diperlukan pemset pembersihan pasar tambahan untuk menindaklanjuti Surat2 tersebut karena msuk dalam penilaian IKU sampel	disesuaikan dengan kondisi	Agustus 2025
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26					Dilaksanakan tanggal 4 Februari 2025 dengan target 90 fasilitas pelayanan kesehatan dan refreshment PV dalam acara Sharasehan tanggal 25 April 2025 terhadap peserta Bimtek PV tanggal 4 Februari 2025. Sampai dengan Agustus 2025, sudah ada 26 fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang sudah melaporkan e-meso yang terdiri dari 23 rumah sakit, 2 PKM, 1 klinik. Capaian sd Agustus 2025 (28,89%)	Tidak ada kendala.	- audit lapangan dari WHO, - capaian mendekati 112,5%. Capaian sd Juli sudah 112,5%	Tidak ada kendala.	- Audit lapangan dari WHO sudah terelaisasi tanggal 8 Agustus 2025. - Capaian sd Agustus 111,11%.	September 2025
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	91	94,33	103,66	103,66	1. Telah dilakukan sampling pangan olahan sampai dengan bulan Agustus sejumlah 490 sampel dari target sampel 643 sampel sehingga capaian jumlah sampel sd Agustus sebesar 76,2%	Tidak ada kendala.	-	sampel tidak sesuai pedoman sampling	koordinasi dg PIC diswadar dan pusdatin: di cek sudah lengkap cm belum di tulis di SIPT karena tidak ada parameternya... dan nanti akan dilaporkan kembali	September 2025
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100,00	100,00	- Januari ada 1 sampel KLB KP (Ikky Jeli dari Dinkes Batang) = > TMS pengawet dan pemanis. - Februari ada 1 sampel KLB KP (Bahan Seblak dan mie kuning) = > MS (uji logam berat dan mikro) - Agustus ada 1 sampel KLB KP yang masuk dan diuji (Susu KUN/ Minuman mengandung Susu dan Jus Buah Rasa Stroberi) = > MS (uji logam berat dan mikro)	Tidak selalu ada kasus dan sampel KLB setiap bulannya	Koordinasi dengan DKK jika ada kasus KLB terkait sampel yang bisa diuji oleh BBPOM di Semarang, di cek dinkes ditekankan terkait MBG didalami apakah ada KLB atau tidak?koordinasi dengan labkesda terkait rujukan keracunan dg katim pjas	Tidak selalu ada kasus dan sampel KLB setiap bulannya	Koordinasi dengan DKK jika ada kasus KLB terkait sampel yang bisa diuji oleh BBPOM di Semarang, di cek dinkes ditekankan terkait MBG didalami apakah ada KLB atau tidak?koordinasi dengan labkesda terkait rujukan keracunan dg katim pjas	September 2025
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92	92	95,61	103,92	103,92	Pemenuhan target sampel PIRT 100,89%, Kesesuaian Parameter Uji 100%, Ketetapatan Pengambilan Kesimpulan 100%, Ketepatan waktu pengambilan sampel 56,14%, Ketepatan Waktu Pelaporan 100%, Tindak lanjut sampel PIRT 100%	Target terlalu rendah dan telah mengajukan peningkatan target melalui desk dengan Biro Perencanaan. Target yang diusulkan sebesar 92%.	menggunakan target baru di TW berikutnya			
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	86	73	79,55	108,97	92,50	Monitoring dan evaluasi TL dan CAPA sampai dengan Agustus : Pelaku Usaha = rekomendasi : 494 sudah TL (CAPA) : 292 Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor 100%	Sarana produksi banyak yang belum menyampaikan CAPA	- Desk CAPA pada tanggal 11 Agustus 2025 diikuti oleh 61 sarana (sarana Produksi Pangan, OBA dan Kosmetika), diberikan juga Bimtek IPCPPOB untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam menerapkan GMP di sarana Produksi - Dilakukan Monev melalui	Sarana Produksi masih banyak yang belum menyampaikan CAPA	Dilakukan Monev secara berkala dan mengingatkan sarana untuk membuat CAPA disokumentasikan semua capa, dan upaya disampaikan.	September 2025

NO	INDIKATOR	Target 2025	Agustus									
			Target	Realisasi	CB	CT	Kegiatan	Kendala Bulan Sebelumnya	TL atas Kendala Bulan Sebelumnya	Kendala	RTL dan Arahan Kepala Balai	Timeline
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,75	90,75	94,77	104,43	104,43	Pemeriksaan Sarana Produksi telah mencapai 88,46% (46 sarana dari target 52 sarana) IF 71,43% (5 dari target tahunan 7) IOT/UKOT/UMOT 80,76% (21 dari target tahunan 26) IKOS 107,14% (15 dari target tahunan 14) ISK 100% (5 dari target tahunan 5) Penyampaian hasil pemeriksaan telah dilaporkan melalui SIPT	pemeriksaan IF menunggu jadwal pusat, dan menunggu kesiapanan industri dalam rangka sertifikasi	Telah berkoordinasi, pusat belum menjadwalkan inspeksi sertifikasi	pemeriksaan 1 IF menunggu jadwal pusat, dan menunggu kesiapanan industri dalam rangka sertifikasi	berkoordinasi dengan pusat untuk penjadwalan inspeksi Rencana Pelatihan Stemsel di Oktober 2025	Oktober 2025
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	92,23	108,51	108,51	%ketepatan waktu 89,32%. Ketepatan tindak lanjut 90,29%.Evaluasi ketepatan grading 97,09%	Tidak ada kendala.	-	Tidak ada kendala.	Sesuai target	Juni 2025
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,75	96,75	99,99	103,35	103,35	Pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi sesuai target sampai dengan Agustus	Tidak ada kendala.	-	Tidak ada kendala.		Agustus 2025
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	78,8	98,50	98,50	Realisasi bulan Agustus 11 sarana, total Jan-Agustus 116 sarana (73,9%) dari target 157 sarana.	Tidak ada kendala.	-	Tidak ada kendala.		September 2025
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91	91	97,31	106,93	106,93	Pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan sampai dengan Agustus sejumlah 1.003 iklan (74,13%) dari target iklan 1.353 iklan.	Tidak ada kendala.	-	Tidak ada kendala.		Agustus 2025
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91	91	100	109,89	109,89	Pengawasan penandaan rokok sampai dengan Agustus sejumlah 134 rokok yang terdiri dari 132 rokok konvensional/batang dan 2 rokok elektrik. Capaian jumlah penandaan rokok sd Agustus sebesar 65.69% dari target 204 rokok	Tidak ada kendala.	-	Tidak ada kendala.	Sesuai target	
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100					Pemeriksaan Sanyanfar telah menggunakan form pengawasan AMR dan diisi lengkap oleh petugas, sampai dengan Agustus 153 sarana (Apotek, RS, Puskesmas dan Klinik) Telah dilakukan Bimtek AMR 2 kali (di Rembang dengan 19 OPD kesehatan dan di Semarang kolaborasi dengan PBF AAM, serta KIE AMR	Tidak ada kendala.	-	Tidak ada kendala.	Monev sesuai target	
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	83,2	78,8	78,8	100,00	94,71	1. Melaksanakan pemenuhan ruang lingkup laboratorium TW 3, Laboratorium kosmetik menambah satu ruang lingkup 2. Monitoring pengadaan peralatan laboratorium untuk meningkatan pemenuhan standar peralatan 3. Monitoring pelaksanaan verifikasi metoda analisa TW 3 dari masing-masing laboratorium 4. Melaksanakan dan monitoring Pemenuhan kompetensi personil di TW 3, telah ada penambahan kemampuan personil di Lab Obat dan Lab Kosmetik sesuai ruang lingkup 5. Capaian SKL sd Agustus 104,2 %	Tidak ada kendala.	alat yang belum datang: SKL hanya butuh 2 alat, bulan lalu sudah 1, bulan agustus ini akan datag 1 lagi alat tambahan akan dipakai terus atau ditarik ke anggaran 2026	Tidak ada kendala.	Monev sesuai target	Oct 2025
15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	3,85					Pendampingan Kab/kota Pangan Aman tahun 2025 adalah Kota Semarang dan Kab. Semarang, sudah dilakukan pendampingan.	Tidak ada kendala.	-	Tidak ada kendala.		

NO	INDIKATOR	Target 2025	Agustus									
			Target	Realisasi	CB	CT	Kegiatan	Kendala Bulan Sebelumnya	TL atas Kendala Bulan Sebelumnya	Kendala	RTL dan Arahan Kepala Balai	Timeline
16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	54	54	57,94	107,30	107,30	Pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi sampai dengan Juli sejumlah 62 sarana. Target pemeriksaan sarana fortifikasi sejumlah 58 sarana	Tidak ada kendala.	-	Tidak ada kendala.		Juni 2025
17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	86,42	86,42	87,21	100,91	100,91	.Di bulan Agustus tidak ada KIE dengan tokoh masyarakat, tetapi KIE rutin dengan sekolah dan lintas sektor. Untuk KIE dg anggota DPR tidak ada kegiatan, meskipun di awal bulan telah di konfirmasi pada tenaga ahli Dewan . Indeks efektifitas KIE di bulan Agustus adalah : 88,0 capaian : 101,8 %	Tidak ada kendala.	Koordinasi intensif dengan tenaga ahli anggota dewan.	RL Obat yg ditargetkan TW 3,akan digeser ke TW 4 karena sampel sulit ditemukan di pasaran (asam fusidat atau fenilefrin tetes mata)	alat yang belum datang: SKL hanya butuh 2 alat, bulan lalu sudah 1, satu alat yang lain akan datang bulan Oktober 2025	
18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	20	72,80	76,70	105,36	76,70	Pada Bulan Agustus telah dilaksanakan monitoring dan sertifikasi kepada 17 sekolah intervensi. Dilakukan penilaian dokumen dan kantin sekolah. Pada Bulan September akan dilakukan : 1. penentuan sekolah yang mendapatkan sertifikat sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan 2. penetuan kantin sekolah yang mendapatkan PBKPKS 3. sertifikasi ulang terhadap 6 sekolah intervensi tahun 2024 (yang belum mendapatkan sertifikat di tahun 2024	Tidak ada kendala.	Pelaksanaan tahap selanjutnya sertifikasi ulang sekolah intervensi 2024 dan PBKPKS	Tidak ada kendala.		September 2025
19	Jumlah desa pangan aman	6	67,50	68,00	100,74	68,00	Pada bulan Agustus telah dilaksanakan pengawalan kepada Desa Kenteng Kecamatan Kab. Semarang dan Desa Randusari Kecamatan Prambanan dengan melaksanakan Bimtek Kader Keamanan Pangan dalam rangka pengimbasan serta pembentukan kader baru oleh Desa Kenteng dan Desa Randusari, selain itu pembentukan kader keamanan pangan ini juga menjadi bagian dari 80 aksi nyata BBPOM Semarang dengan pembentukkan 80 kader keamanan pangan Gumregah	Tidak ada kendala.	Pelaksanaan tahap selanjutnya yaitu tahap pengawalan yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2025, namun telah dilaksanakan lebih awal pada TW II	Tidak ada kendala.		September 2025
20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	100,00	100,00	100,00	100,00	Pada bulan Agustus telah dilaksanakan Sosialisasi Pasar Pangan Aman Berbasisi Komunitas (PPABK) ke Pasar Pagi Kab Grobogan sebagai tindak lanjut dari replikasi PPABK pada tanggal 14 Agustus 2025	Untuk pembentukan pasar replikasi terkendala tidak tersedia anggaran dari Disdag setempat	Pelaksanaan tahap selanjutnya yaitu akan memonitor pembentukan pasar replikasi di Kab. Semarang (Pasar Karangjati) dan Kab. Magelang (pasar Tempuran)	Tidak ada kendala.		Juni 2025 (selesai)
21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	18,44	84,33	92,5	109,69	92,50	GMP OBA tercapai 4, kosmetik tercapai 5, pangan ipcpob terbit: 26 sertifikat Total memenuhi GMP : 35 dari target awal DIPA 26 UMK	Tidak ada kendala.	Tidak ada kendala.	Tidak ada kendala.	Pelaksanaan tahap selanjutnya sertifikasi ulang sekolah intervensi 2024 dan PBKPKS	
22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Semarang	85	65	66,07	101,65	77,73	Pada bulan Agustus 2025 ada 1 berkas yang mencapai tahap P21 lanjut dengan Serah Tahap II, 2 berkas lain masih dalam penyelesaian pada PPNS, dan 2 berkas masih dalam proses pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	Tidak ada kendala.	Tidak ada kendala.	Tidak ada kendala.	Pelaksanaan Bimtek Kader dan Bimtek Komunitas batch kedua (3 Desa) yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan September 2025	

NO	INDIKATOR	Target 2025	Agustus									
			Target	Realisasi	CB	CT	Kegiatan	Kendala Bulan Sebelumnya	TL atas Kendala Bulan Sebelumnya	Kendala	RTL dan Arahan Kepala Balai	Timeline
23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	50	50	100,00	55,56	sudah dilakukan input akun yang diajukan takedown dan laporan profilling sebelum tenggat waktu tanggal 25 di tiap bulannya; jumlah akun yang diajukan takedown bulan Agustus adalah 58 link produk dan profiling 4 akun komoditi kosmetik	Tidak ada kendala.	-	Untuk pembentukan pasar replikasi di Kab./Kota lainnya terkendala tidak tersedia anggaran dari Disdag Kab./kota setempat		Juli 2025
24	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Semarang	4,7	[redacted]				1. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat bulan Agustus 2025 2. Penyusunan Laporan SKM bulan Juli 2025 dan Tindak Lanjut SKM bulan Juni 2025 3. Publikasi SKM Juli 2025 4. Penetapan Petugas Yanblik Terbaik Bulan Juli 2025: Noni Devi A, Setya Wulan W, Fina Triyanti HU 5. Penyusunan laporan akuntabilitas hasil konsultasi dan pengaduan bulan Juli 2025 beserta laporan tindaklanjutnya 6. Penyusunan Laporan SPKP dan SPAK Juli 2025 7. Penyusunan Laporan Tindak Lanjut FKP 2025 8. Pelaksanaan Wawancara dan Verifikasi Data PEKPPP pada tanggal 7 Agustus 2025 dengan hasil 28 poin memperoleh nilai 5 (maksimal) dan 3 poin menperoleh nilai 4. 2 poin dengan nilai 4 kemungkinan dapat dimaksimalkan dengan tambahan data yang telah disampaikan, namun 1 poin terkait keikutsertaan dalam kompetisi inovasi memperoleh nilai maksimal di 4 karena Gumregah merupakan Top 24 KOIN BPOM. Untuk mencapai nilai maksimal minimal Top 8 KOIN BPOM.	Tidak ada kendala.	Telah dibuat format penilaian petugas pelayanan publik terbaik untuk Bidang Infokom, Pemeriksaan, dan Pengujian	Tidak ada kendala.	Pelaksaanan Pinjar mentari di Pesantren	

NO	INDIKATOR	Target 2025	Agustus									
			Target	Realisasi	CB	CT	Kegiatan	Kendala Bulan Sebelumnya	TL atas Kendala Bulan Sebelumnya	Kendala	RTL dan Arahan Kepala Balai	Timeline
25	Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Semarang	92,43					1. Seluruh rencana kerja dan target prioritas ZI bulan Agustus telah dilaksanakan. 3. 13 AoC telah input progress aksi bulan Agustus melalui emonevrb 4. Telah dilaksanakan internalisasi BerAKHLAK ke seluruh pegawai BBPOM di Semarang melalui : Lomba cerdas cermat Gema Merdeka dengan muatan RB, lomba dalam rangka HUT RI 80 dengan komposisi tim dari berbagai kelompok substansi (Harmonis), 80 aksi nyata Gumregah (Berorientasi Pelayanan), infografis BerAKHLAK poin Harmonis, konten Whistleblowing system (Akuntabel), konten Sibergas (akuntabel), Pemetaan Kompetensi (Kompeten), English Fun Day do does did done (Kompeten), Infografis perubahan jam kerja (Adaptif), upacara bendera HUT RI 80 (Loyal), memorandum pengembangan kompetensi (kompeten), infografis pencatatan rencana aksi untuk WFH WFA (akuntabel), reminder verifikasi e tukin (akuntabel), GEMAS karbohidrat kompleks (harmonis), internalisasi keterbukaan informasi publik (berorientasi pelayanan), pameran pendidikan di new zealand (Kompeten), pentasharufan zakat UPZ (Kolaboratif) 6. Telah dilaksanakan sosialisasi RB kepada Stakeholder berupa Sosialisasi kanal pengaduan Lapor KaBAI AI pada Bimtek Kader	Tidak ada kendala.	apel direkam harus selalu diinfokan ke kepala balai agar dokumentasi lebih kuat	Tidak ada kendala.	Tidak ada kendala	June 2025
							1. Telah dilakukan Kaji Ulang dan sosialisasi SOP Mikro untuk bidang pengujian sesuai ketentuan SOP Makro tentang Penataan Tata Laksana. 2. MR, Auditor Internal, tim SPI dan perwakilan Pokja Penataan Tata Laksana telah mengikuti Sosialisasi Kebijakan Sistem Manajemen dan Bimbingan Teknis Penerapan Sistem Manajemen 3. Audit Internal direncanakan akan dilaksanakan pada minggu ketiga atau keempat September	Tidak ada kendala.	0	Tidak ada kendala.	-	
							1. Melakukan review terhadap tugas rutin kepegawaian 2. Melakukan analisis disiplin pegawai triwulan 2 tahun 2025 3. Melakukan layanan penyelenggaraan UKOM Batch 2 2025 4. Menyusun pengembangan kompetensi IDEAS 5. Menyusun tindak lanjut survey opini pegawai	Tidak ada kendala.	-	Tidak ada kendala.		-

NO	INDIKATOR	Target 2025	Agustus									
			Target	Realisasi	CB	CT	Kegiatan	Kendala Bulan Sebelumnya	TL atas Kendala Bulan Sebelumnya	Kendala	RTL dan Arahan Kepala Balai	Timeline
							1. Pelaksanaan Rapat Evaluasi dan Monitoring Kinerja Juli 2025 2. Reminder Pelaporan Kinerja di awal Bulan untuk Seluruh Ketua tim 3. Penyampaian Info Ki Semar (Infografis Kinerja BBPOM di Semarang) di Medsos bulan Juli 2025	-Belum melakukan uji smart karena menunggu manual iku dari Roren - Masih ada menu di Tugu Muda dan Kibas Rambut yang belum singkron	- Sudah melakukan Uji SMART IKU untuk data dukung Desk Sakip - Sinkronisasi link2 di Tugu Muda dan Kibas Rambut - Sudah terlaksana Rapat Reward Punishment TW II - TL Lakip harus di update yang belum - PK RAPK Renstra Revisi ke 2 sudah di Sampaikan ke Kepala Badan	Tidak ada kendala.	apel direkam harus selalu diinfokan ke kepala balai agar dokumentasi lebih kuat	September 2025
							1. Laporan WBS dan pengaduan masyarakat s.d bulan Agustus 2025 NIHIL 2. Nilai IPAK bulan Juli 2025 3.91, sehingga rata-rata nilai IPAK sampai dengan bulan Agustus 3.91 3. Laporan Si Bergas bulan Agustus 2025 4. Fosil antik Juli dengan tema inovasi Sibergas	Sibergas bulan Juli 2025 pada layanan Inspeksi: 1. Kurang tepat waktu datangnya surat perintah tindakan dari BPOM Semarang,terlalu cepat dari 10HK setelah kunjungan. 2. Pemeriksaan lebih baik di lakukan di luar jam istirahat instansi yang di periksa	Tidak ada kendala.	Tidak ada kendala.		
							1. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat bulan Agustus 2025 2. Penyusunan Laporan SKM bulan Juli 2025 dan Tindak Lanjut SKM bulan Juni 2025 3. Publikasi SKM Juli 2025 4. Penetapan Petugas Yanblik Terbaik Bulan Juli 2025: Noni Devi A, Setya Wulan W, Fina Triyanti HU 5. Penyusunan laporan akuntabilitas hasil konsultasi dan pengaduan bulan Juli 2025 beserta laporan tindaklanjutnya 6. Penyusunan Laporan SPKP dan SPAK Juli 2025 7. Penyusunan Laporan Tindak Lanjut FKP 2025	Tidak ada kendala.	Tidak ada kendala.	Tidak ada kendala.	-	
26	Nilai AKIP BBPOM di Semarang	82					1. Pelaksanaan Rapat Evaluasi dan Monitoring Kinerja Juli 2025 2. Reminder Pelaporan Kinerja di awal Bulan untuk Seluruh Ketua tim 3. Penyampaian Info Ki Semar (Infografis Kinerja BBPOM di Semarang) di Medsos bulan Juli 2025	-Belum melakukan uji smart karena menunggu manual iku dari Roren - Masih ada menu di Tugu Muda dan Kibas Rambut yang belum singkron	- Sudah melakukan Uji SMART IKU untuk data dukung Desk Sakip - Sinkronisasi link2 di Tugu Muda dan Kibas Rambut - Sudah terlaksana Rapat Reward Punishment TW II - TL Lakip harus di update yang belum - PK RAPK Renstra Revisi ke 2 sudah di Sampaikan ke Kepala Badan	Tidak ada kendala.	- TL Rapat Reward Punishment TW II - Persiapan Desk SAKIP tanggal 4 September -Persiapan Desk WBBM tanggal 3 September	September 2025

NO	INDIKATOR	Target 2025	Agustus									
			Target	Realisasi	CB	CT	Kegiatan	Kendala Bulan Sebelumnya	TL atas Kendala Bulan Sebelumnya	Kendala	RTL dan Arahan Kepala Balai	Timeline
27	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang	5					IKPA Bulan Agustus 99,71	Tidak ada kendala.	0	1. Responden salah memilih layanan yang diterima, beberapa responden inspeksi memilih layanan informasi 2. Masukan dari responden Sibergas Inspeksi: - Supaya ada pemeriksaan juga dari BPOM di sarana apotik yang lain nya yang ada di daerah pinggiran supaya aturan yg sdh ada juga bisa diperlakukan di apotik daerah pinggiran juga contoh daerah Bringin, Kopeng - mohon kami diberikan no hp u nomor yang bisa dihubungi setelah pemeriksaan rutin dilakukan. karena kami sempat binggung mau melakukan konsultasi CAPA terkait temuan tp TDK bisa menghubungi auditor. dan ketika kami bertanya ke bagian CS BPOM disuruh menunggu u dihubungi dr pihak BPOM 🙏 kami mendapat surat peringatan ter tanggal 4 Juli 2025 surat baru kami terima tanggal 25 Agustus 2025 ,mohon pertimbangannya karena surat peringatan tertulis 21 hari kerja setelah surat diterima. terimakasih banyak sebelumnya 🙏 - Mohon untuk dipertimbangkan terkait surat tugas audit ke sarana diberikan data pertinggal sebagai arsip dokumen	-	
28	Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Semarang	3,6						Tidak ada kendala.	-	Tidak ada kendala.		
29	Nilai Pengelolaan Kearsipan	60-80					Ruang penyimpanan arsip aktif sudah penuh	1. Arsip elektronik pada aplikasi Srikandi belum seluruhnya diiberkaskan 2. Proses pemberkasan arsip elektronik membutuhkan waktu dengan memilah klasifikasinya jika belum ada di menu pilihan maka perlu proses pembuatan folder klasifikasi arsip di Srikandi, dengan jumlah ribuan arsip	1. Penyelesaian pemberkasan arsip elektronik 2. Penetapan target penyelesaian di Tim Pengelola Arsip		- TL Rapat Reward Punishment TW II - Persiapan Desk SAKIP tanggal 4 September -Persiapan Desk WBBM tanggal 3 September	31 Agustus 2025
30	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	96,25					Indeks kepuasan Masyarakat berdasar hasil survey pada 233 konsumen : 97,35	Tidak ada kendala.	Tamu Rahasia terkait WBK WBBM, linsek mohon dipantau kembali, integritas security ditigkatkan kembali.	Tidak ada kendala.		

NO	INDIKATOR	Target 2025	Agustus									
			Target	Realisasi	CB	CT	Kegiatan	Kendala Bulan Sebelumnya	TL atas Kendala Bulan Sebelumnya	Kendala	RTL dan Arahan Kepala Balai	Timeline
31	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	95					1. Pengadaan alat lab Water System masih proses negosiasi 2. Rekomendasi PC Alat Lab menunggu rekomendasi P3OMN (usulan pengadaan 2026 ditarik ke 2025)	Tidak ada kendala.	-	Tidak ada kendala.	-	
32	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	82,75					1. Pengajuan penghapusan mobil starex dengan linit nilai 45 juta 2. Pengajuan pengahapusan BMN dibawah nilai 100 juta	1. Kurangnya pemanfaatan Mobil dinas penindakan 2. Kondisi luar mobil Lab keliling rusak (bocor dan cat mengelupas, interior dlam-meja lepas) dr peminjaman Loka Banyumas --> Surat Penawaran harga body repair 250 jt	-sedang mencoba mencari alternatif lain terkait perbaikan kendaraan tersebut.	Ruang penyimpanan arsip aktif sudah penuh	anak magang diminta untuk membantu scan dokumen keuangan	31 Desember 2025
33	Meningkatnya efektifitas koordinasi dalam program sediaan farmasi dan pangan olahan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95					linsek : Telah dilakukan Advokasi pada 26 Kab/kota (hadir 20 kab/kota) terkait dengan Kab/Kota Pangan Aman pada tanggal 27 Agustus 2025, secara Daring DAK monev rutin kendala dan TLnya, review anggaran DAK tahun 2026 oleh 13 orang petugas BBPOM di Semarang	Kudus tkpom berhenti di sekda, lanjut grobogan	-	Tidak ada kendala.	Tamu Rahasia terkait WBK WBBM, linsek mohon dipantau kembali, integritas security ditigkatkan kembali.	
34	Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri	65					Pemeliharaan jalan akses masuk kantor Pemeliharaan Sarpras Yanblik (Gazebo, cat parkir, kanstin, pojok cinta jamu)	Reagen PDN keruh, Reagen tidak ada label di Botol Kemasan Reagen saat dibuka sdh tercium bau reagen (diduga bocor)	-	Tidak ada kendala.	Tidak ada kendala.	

4. TL RAPK September 2025

NO	INDIKATOR	Target 2025	September									
			Target	Realisasi	CB	CT	Kegiatan	Kendala Bulan Sebelumnya	TL atas Kendala Bulan Sebelumnya	Kendala	RTL dan Arahan Kepala Balai	Timeline
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,50	91,5	100	109,29	109,29	1. Telah dilakukan sampling sediaan farmasi sampai dengan bulan September sejumlah 1.238 sampel (Obat 374 sampel, OBA 267 sample, SK 71 sampel dan kosmetik 526 sampel). Capaian jumlah sampel sd September sebesar 82.97% dari target awal 1492 sampel. 2. Telah dilaksanakan pengujian sampel Farmasi sd Bulan September(sampel Rutin) Obat : 337 sampel, OTSK dan kuasi : 427 sampel, kosmetik : 631 sampel, dan rokok 25 sampel	Tidak ada kendala.	-	1. Sejak Bulan Juli, Surat Recall produk kosmetik (9 surat) OT dan SK (23 surat) dari Deputi 2 cukup banyak, sementara target pemset rutin Distribusi kosmetik, OT & SK terbatas. Diperlukan pemset pembersihan pasar tambahan untuk menindaklanjuti Surat2 tersebut karena msuk dalam penilaian IKU sampel	disesuaikan dengan kondisi	Agustus 2025
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26					Dilaksanakan tanggal 4 Februari 2025 dengan target 90 fasilitas pelayanan kesehatan dan refreshment PV dalam acara Sharasehan tanggal 25 April 2025 terhadap peserta Bimtek PV tanggal 4 Februari 2025. Sampai dengan September 2025, sudah ada 26 fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang sudah melaporkan e-meso yang terdiri dari 23 rumah sakit, 2 PKM, 1 klinik. Capaian sd Agustus 2025 (28,89%)	Tidak ada kendala.	- Audit lapangan dari WHO sudah terelaisasi tanggal 8 Agustus 2025. - Capaian sd Agustus 111,11%.	Tidak ada kendala.	-	September 2025
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	91	94,44	103,78	103,78	1. Telah dilakukan sampling pangan olahan sampai dengan bulan September sejumlah 550 sampel dari target sampel 643 sampel sehingga capaian jumlah sampel sd September sebesar 85.54%	sampel tidak sesuai pedoman sampling	koordinasi dg PIC diswadar dan pusdatin: di cek sudah lengkap cm belum di tulis di SIPT karena tidak ada parameternya... dan nanti akan dilaporkan kembali	sampel tidak sesuai pedoman sampling	koordinasi dg PIC diswadar dan pusdatin: di cek sudah lengkap cm belum di tulis di SIPT karena tidak ada parameternya... dan nanti akan dilaporkan kembali	September 2025
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100,00	100,00	- Januari ada 1 sampel KLB KP (Ikky Jeli dari Dinkes Batang) = > TMS pengawet dan pemanis. - Februari ada 1 sampel KLB KP (Bahan Seblak dan mie kuning) = > MS (uji logam berat dan mikro) - Agustus ada 1 sampel KLB KP yang masuk dan diuji (Susu KUN/ Minuman mengandung Susu dan Jus Buah Rasa Stroberi) Kota Semarang = > MS (uji logam berat dan mikro) - September ada 1 sampel KLB KP Boromon cookies (Temanggung) uji kimia karena sampel terbatas hanya 20 gram yang tersisa.	Tidak selalu ada kasus dan sampel KLB setiap bulannya	Koordinasi dengan DKK jika ada kasus KLB terkait sampel yang bisa diuji oleh BBPOM di Semarang, di cek dinkes ditekankan terkait MBG didalami apakah ada KLB atau tidak?koordinasi dengan labkesda terkait rujukan keracunan dg katim pjas	Tidak selalu ada kasus dan sampel KLB setiap bulannya	Koordinasi dengan DKK jika ada kasus KLB terkait sampel yang bisa diuji oleh BBPOM di Semarang, di cek dinkes ditekankan terkait MBG didalami apakah ada KLB atau tidak?koordinasi dengan labkesda terkait rujukan keracunan dg katim pjas	Oktober 2025
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92	92	95,61	103,92	103,92	Pemenuhan target sampel PIRT 100,89%, Kesesuaian Parameter Uji 100%, Ketetapatan Pengambilan Kesimpulan 100%, Ketepatan waktu pengambilan sampel 56,14%, Ketepatan Waktu Pelaporan 100%, Tindak lanjut sampel PIRT 100%	Tidak ada kendala.	-	Tidak ada kendala.	-	
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	86	76	89,75	118,09	104,36	Monitoring dan evaluasi TL dan CAPA sampai dengan September = : Pelaku Usaha = rekomendasi : 566 sudah TL (CAPA) : 450 Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor 100%	Sarana Produksi masih banyak yang belum menyampaikan CAPA	Dilakukan Monev secara berkala dan mengingatkan sarana untuk membuat CAPA disokumentasikan semua capa, dan upaya disampaikan.	Sarana Produksi masih banyak yang belum menyampaikan CAPA	Dilakukan Monev secara berkala dan mengingatkan sarana untuk membuat CAPA	Oktober 2025

NO	INDIKATOR	Target 2025	September									
			Target	Realisasi	CB	CT	Kegiatan	Kendala Bulan Sebelumnya	TL atas Kendala Bulan Sebelumnya	Kendala	RTL dan Arahan Kepala Balai	Timeline
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,75	90,75	94,44	104,07	104,07	Pemeriksaan Sarana Produksi telah mencapai 94% (49 sarana dari target 52 sarana) IF 71,43% (5 dari target tahunan 7) IOT/UKOT/UMOT 96% (25 dari target tahunan 26) IKOS 107,14% (15 dari target tahunan 14) ISK 100% (5 dari target tahunan 5) Penyampaian hasil pemeriksaan telah dilaporkan melalui SIPT	pemeriksaan 1 IF menunggu jadwal pusat, dan menunggu kesiapanan industri dalam rangka sertifikasi	telah berkoordinasi dengan pusat untuk penjadwalan inspeksi pada Oktober Pelatihan Produk Biologi Steril telah diselenggarakan oleh pusat pada September 2025, diikuti oleh 2 inspektur	pemeriksaan 1 IF dengan jadwal pusat, dan telah diagendakan Oktober 2025	berkoordinasi dengan pusat untuk pelaksanaan inspeksi Rencana Pelatihan Stemsel mandiri balai yang direncanakan Oktober 2025 dibatalkan, karena telah terpenuhi dengan mengikutkan 2 inspektur pada pelatihan produk biologi steril yang diselenggarakan oleh pusat Pelatihan dan Workshop terkait CPOB Tahun 2025 yang sudah diikuti oleh inspektur dan spesialis jumlah materi yang diikuti 5 (Laplins, Radiofarmaka, Produk Biologi, GRP, dan Workshop CPOB Dasar)	Oktober 2025
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	91,04	107,11	107,11	%ketepatan waktu 84,87%. Ketepatan tindak lanjut 94,12%.Evaluasi ketepatan grading 94,12%	Tidak ada kendala.	-	Tidak ada kendala.	-	Juni 2025
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,75	96,75	99,89	103,25	103,25	Pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi sesuai target sampai dengan September	Tidak ada kendala.	-	Tidak ada kendala.	-	Oktober 2025
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80,38	100,48	100,48	Realisasi bulan September 16 sarana, total Jan-September 132 sarana (84,1%) dari target 157 sarana.	Tidak ada kendala.	-	Tidak ada kendala.	-	Oktober 2025
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91	91	96,89	106,47	106,47	Pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan sampai dengan September sejumlah 1.099 iklan (81,00%) dari target iklan 1.353 iklan.	Tidak ada kendala.	-	Tidak ada kendala.	-	Agustus 2025
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91	91	100	109,89	109,89	Pengawasan penandaan rokok sampai dengan September sejumlah 155 rokok yang terdiri dari 153 rokok konvensional/batang dan 2 rokok elektrik. Capaian jumlah penandaan/label rokok sd September sebesar 74.87% dari target 207 rokok	Tidak ada kendala.	-	Tidak ada kendala.	-	
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100					Pemeriksaan Sanyanfar telah menggunakan form pengawasan AMR dan diisi lengkap oleh petugas, sampai dengan September 80 Apotek Telah dilakukan Bimtek AMR 2 kali (di Semarang kolaborasi dengan PBF AAM dan di Pati, serta KIE AMR (di di Rembang dengan 19 OPD kesehatan) Telah dilakukan advokasi dengan Wakil Bupati Jepara terkait SE AMR tgl 26 Sept 25 dan sudah diterbitkan SE AMR oleh Bupati Jepara	Tidak ada kendala.	-	Tidak ada kendala.	-	
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	83,2	82,8	85,2	102,90	102,40	Capaian pemenuhan SKL sd TW 3 adalah : 85,2 % dari target 82,8 %, atau tercapai 102,9 %, dengan rincian : 1. Pemenuhan ruang lingkup laboratorium : 85,9 % dari target 84 % 2. Pemenuhan standar peralatan : 86 % dari target 85 % 3. Pemenuhan kompetensi personil : 100% dari target 100 % 4. Pemenuhan metoda analisa yang terverifikasi : 50,6 % dari target 48 %	Tidak ada kendala.	Rencana penambahan 1 alat laboratorium yang akan datang di bulan Oktober	RL Obat yg ditargetkan TW 3,akan digeser ke TW 4 karena sampel sulit ditemukan di pasaran (asam fusidat atau fenilefrin tetes mata)	Monev pemenuhan sesuai target	Oct 2025

NO	INDIKATOR	Target 2025	September									
			Target	Realisasi	CB	CT	Kegiatan	Kendala Bulan Sebelumnya	TL atas Kendala Bulan Sebelumnya	Kendala	RTL dan Arahan Kepala Balai	Timeline
15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	3,85					Pendampingan Kab/kota Pangan Aman tahun 2025 adalah Kota Semarang, Kab. Semarang dan Kota Magelang.	Tidak ada kendala.	-	Tidak ada kendala.	-	
16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	54	54	57,94	107,30	107,30	Pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi sampai dengan Juli sejumlah 62 sarana. Target pemeriksaan sarana fortifikasi sejumlah 58 sarana	Tidak ada kendala.	-	Tidak ada kendala.	-	Juni 2025
17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	86,42	86,42	88,01	101,84	101,84	.Di bulan September tidak ada KIE dengan tokoh masyarakat, tetapi KIE rutin yang dilaksanakan bersama Persatuan Istri Tentara (Persit). Untuk KIE dg anggota DPR tidak ada kegiatan, meskipun di awal bulan telah di konfirmasi pada tenaga ahli Dewan . Indeks efektifitas KIE di bulan Sepember adalah : 88.01 capaian : 101,84 %	Tidak ada kendala.	-	Kegiatan KIE dg tokoh masyarakat masih ada 2 titik dg ibu Nafa dan 1 titik dg Bapak Edy , sementara masih menunggu informasi dari biro perencanaan untuk penggunaan anggaran atas nama ibu Nafa yg sudah tidak menjadi Anggota Dewan, karena hasil konfirmasi terakhir blm diizinkan untuk digunakan membiayai KIE rutin Balai .	-	
18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	20	86,00	94,60	110,00	94,60	Pada bulan september telah dilaksanakan : 1. monitoring kader dan penilaian sekolah (dalam rangka sekolah yang membudayakan keamanan pangan terhadap 17 sekolah pada batch 1) 2. bimtek kader keamanan pangan batch 2 3. verifikasi ulang sekolah tahun 2024	Tidak ada kendala.	Pelaksanaan verifikasi ulang sekolah intervensi tahun 2024 dan pelaksanakaan Bimtek batch 2	Tidak ada kendala.	Monitoring kader, verifikasi laporan sekolah batch 2, dan pelaporan sekolah yang membudayakan keamanan pangan	Oktober 2025
19	Jumlah desa pangan aman	6	67,50	90,00	133,33	90,00	Pada bulan September karena target tidak dapat diturunkan, maka sesuai petunjuk Kepala Balai intervensi kepada 3 Desa baru mulai dilaksanakan dengan menyelenggarakan Bimtek Kader Keamanan Pangan dan Bimtek Keamanan Pangan bagi komunitas masyarakat Desa Kebondalem, Desa Brongkol, dan Desa Gemawang Kec. Jambu Kab. Semarang	Tidak ada kendala.	Pelaksanaan Bimtek Kader dan Bimtek Komunitas batch kedua (3 Desa) yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan September 2025	Tidak ada kendala.	Pelaksanaan tahapan monev batch 2 untuk Desa Kebondalem, Desa Brongkol, dan Desa Gemawang yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2025	Oktober 2025
20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	100,00	100,00	100,00	100,00	Pada bulan September telah dilaksanakan Bimtek dan Penyuluhan dalam rangka replikasi Pasar Pangan Aman Berbasisi Komunitas (PPABK) ke Pasar Tempuran Kab. Magelang pada tanggal 17 September 2025	Tidak ada kendala.	-	Untuk pembentukan pasar replikasi di Kab./Kota lainnya terkendala tidak tersedia anggaran dari Disdag Kab./kota setempat		Juni 2025 (selesai)
21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	18,44%	88,33	92,68	104,92	92,68	GMP OBA tercapai 4 (3 Prioritas, 1 non prioritas), kosmetik tercapai 5 (2 Prioritas, 3 non prioritas) , pangan ipcpob terbit: 28 (23 prioritas, 5 non prioritas) Memenuhi GMP : 37 dari target awal DIPA 26 UMK	Tidak ada kendala.	Pelaksaanan Pinjar mentari di Pesantren	Tidak ada kendala.	-	
22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Semarang	85	75	76,07	101,43	89,49	Pada bulan September 2025 ada 1 berkas yang mencapai tahap P21 dan 1 berkas perkara telah mencapai Tahap II, 1 berkas lain masih dalam penyelesaian pada PPNS, 1 berkas mendapatkan P18, dan 2 berkas masih dalam proses pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	Tidak ada kendala.	-	Tidak ada kendala.	-	
23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	50	50	100,00	55,56	sudah dilakukan input akun yang diajukan takedown dan laporan profilling sebelum tenggat waktu tanggal 25 di tiap bulannya; jumlah akun yang diajukan takedown bulan September adalah 59 link produk dan profiling 3 akun komoditi kosmetik	Tidak ada kendala.	-	Tidak ada kendala.	-	

NO	INDIKATOR	Target 2025	September									
			Target	Realisasi	CB	CT	Kegiatan	Kendala Bulan Sebelumnya	TL atas Kendala Bulan Sebelumnya	Kendala	RTL dan Arahan Kepala Balai	Timeline
24	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Semarang	4,7	[redacted]				1. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat bulan Agustus 2025 2. Penyusunan Laporan SKM bulan Juli 2025 dan Tindak Lanjut SKM bulan Juni 2025 3. Publikasi SKM Juli 2025 4. Penetapan Petugas Yanblik Terbaik Bulan Agustus 2025: Ratna Sri Hidayati, Rini Hidayati 5. Penyusunan laporan akuntabilitas hasil konsultasi dan pengaduan bulan Agustus 2025 beserta laporan tindaklanjutnya 6. Penyusunan Laporan SPKP dan SPAK Agustus 2025 7. Exit Meeting PEKPPP pada tanggal 17 September 2025 dengan hasil IPP 4,96 /A (Kategori Pelayanan Prima). 5 Aspek mendapatkan nilai maksimal (5), sedangkan Aspek inovasi mendapat nilai 4,5 karena untuk mencapai nilai maksimal minimal inovasi masuk dalam Top 8 KOIN BPOM. 8. Telah dilaksanakan monev pelayanan publik kelompok rentan dan masih dalam proses pelaksanaan survey kepada kelompok rentan penerima pelayanan publik dengan batas waktu 17 Oktober 2025	Tidak ada kendala.	-	Tidak ada kendala.	-	
25	Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Semarang	92,43					1. Telah menerima kunjungan dari KemenPAN RB dalam rangka verifikasi lapangan penilaian WBBM 2. Seluruh rencana kerja dan target prioritas ZI bulan September telah dilaksanakan. 3. 13 AoC telah input progress aksi bulan September melalui emonevrb 4. Telah dilaksanakan internalisasi BerAKHLAK ke seluruh pegawai BBPOM di Semarang melalui : sosialisasi inovasi/program kerja Pokja RB, Infografis BerAKHLAK poin Loyal , sosialisasi video profil pembangunan Zona Integritas di media sosial dan youtube, sosialisasi standar pelayanan dan 10 jenis pelayanan publik BBPOM Semarang (Berorientasi Pelayanan), English Fun Day (Adaptif), Pengembangan Kompetensi Sistem Manajemen POM Terintegrasi (Kompeten), Sosialisasi Tujuan Strategis 2025-2029 (Akuntabel), Infografis Sharasehan cerdas memilih OBA (Berorientasi Pelayanan),Infografis GEMAS mengelola sampah dengan baik (Harmonis), Fosil Antik Mandiri (Akuntabel) dan sosialisasi dari Pokja RB lainnya yang mencerminkan nilai BerAKHLAK 5. Telah dilaksanakan sosialisasi RB kepada Stakeholder berupa Bimtek CPPOB IRT di Kab Kendal 25 September 2025, Replikasi Pasar Tempuran 17 September 2025 dan Bimtek Kader Keamanan Pangan di Kab Semarang 17 September 2025 6. Telah dilaksanakan 3 Padi Manis: Sosialisasi rencana aksi AoC Gemas dan English Fun Day 11 September 2025, Mengenal Gratifikasi lebih dalam 18 September 2025, Sosialisasi rencana aksi AoC Pijar Mentari dan Padi Manis 24 September 2025 7. Diperlukan support seluruh tim RB untuk sosialisasi RB ke pihak eksternal dengan mencantumkan logo Pasti WBBM dan BerAKHLAK di banner dan bahan presenasi	Tidak ada kendala.	apel direkam harus selalu diinfokan ke kepala balai agar dokumentasi lebih kuat	Tidak ada kendala.	apel direkam harus selalu diinfokan ke kepala balai agar dokumentasi lebih kuat	June 2025
							1. Telah dilaksanakan Audit Internal Khusus ISO 17025 pada tanggal 18-19 September 2025 dengan ruang lingkup audit semester 2 2024 sampai 2025 sebagai pemenuhan syarat pengajuan reakreditasi KAN 2026 2. Telah dilaksanakan Kaji Ulang Manajemen 17025 pada tanggal 29 September 2025 dengan ruang lingkup audit semester 2 2024 sampai 2025 sebagai pemenuhan syarat pengajuan reakreditasi KAN 3. Audit Internal terintegrasi (*cross audit*) akan dilaksanakan 4-5 November 2025 dengan auditor dari BBPOM di Yogyakarta.	Tidak ada kendala.	-	Tidak ada kendala.	-	

NO	INDIKATOR	Target 2025	September									
			Target	Realisasi	CB	CT	Kegiatan	Kendala Bulan Sebelumnya	TL atas Kendala Bulan Sebelumnya	Kendala	RTL dan Arahan Kepala Balai	Timeline
							1. Menyusun kajian terkait fleksitime 2. Penyampaian infografis persiapan UKOM Batch 4 3. Monev CMC dan KTI 4. Menyusun analisis disiplin pegawai 5. Merancang inovasi pokja 3	Tidak ada kendala.	-	Tidak ada kendala.	-	-
							1. Pelaksanaan Rapat Evaluasi dan Monitoring Kinerja Agustus 2025 2. Reminder Pelaporan Kinerja di awal Bulan untuk Seluruh Ketua tim 3. Pelaksanaan Reward Punishment TW II suadh terlaksana 4. Pelaksanaan Desk SAKIP tanggal 4 September, Verlap WBBM tanggal 3 September sudah terlaksana	- TL Rapat Reward Punishment TW II - Persiapan Desk SAKIP tanggal 4 September -Persiapan Desk WBBM tanggal 3 September	-	Penyampaian Info Ki Semar (Infografis Kinerja BBPOM di Semarang) di Medsos bulan Agustus 2025 belum karena terkendala penambahan RHPK 3 iku baru dan NKO e-performance belum bisa di verifikasi Roren	akan dilakukan di bulan Oktober 2025	October 2025
							1. Laporan WBS dan pengaduan masyarakat s.d bulan September 2025 NIHIL 2. Nilai IPAK bulan September 2025 3.89, sehingga rata-rata nilai IPAK sampai dengan bulan September 3.91 3. Sosialisasi anti gratifikasi melalui apel pagi kepada seluruh pegawai tanggal 18 September 2025 4. Fosil antik bulan September dengan tema nilai integritas mandiri tanggal 29 September 2025 5. Laporan Si Bergas bulan September 2025	1. Responden salah memilih layanan yang diterima, beberapa responden inspeksi memilih layanan informasi 2. Masukan dari responden Sibergas Inspeksi: - Supaya ada pemeriksaan juga dari BPOM di sarana apotik yang lain nya yang ada di daerah pinggiran supaya aturan yg sdh ada juga bisa diperlakukan di apotik daerah pinggiran juga contoh daerah Bringin, Kopeng - mohon kami diberikan no hp u nomor yang bisa dihubungi setelah pemeriksaan rutin dilakukan. karena kami sempat binggung mau melakukan konsultasi CAPA terkait temuan tp TDK bisa menghubungi auditor. dan ketika kami bertanya ke bagian CS BPOM disuruh menunggu u dihubungi dr pihak BPOM 🙏 kami mendapat surat peringatan ter tanggal 4 Juli 2025 surat baru kami terima tanggal 25 Agustus 2025 ,mohon pertimbangannya karena surat peringatan tertulis 21 hari kerja setelah surat diterima, terimakasih	-	Laporan Sibergas bulan September: 1. Terdapat 1 responden layanan inspeksi yang memberikan penilaian petugas bersikap arogan dalam melaksanakan tugas, 2. Masukan dari responden Sibergas Inspeksi: - sebelum memberikan tindakan seharusnya ada sosialisasi terlebih dahulu dan menjelaskan detail masalahnya mengenai aturan yang berlaku, lebih sabar dan tidak emosional saat datang berkunjung - Sedikit masukan terkait evaluasi CAPA perbaikan. Kami sudah mengirimkan draft CAPA dari bulan Desember 2024 melalui whattsapp dan email. Namun tidak ada feedback sampai dengan bulan april. Setelah kami konfirmasi ternyata belum dievaluasi. Masukan dari kami agar ada timeline lama waktu yang dipatenkan untuk evaluasi CAPA dari petugas, sehingga apabila masih ada temuan yg belum terselesaikan dapat segera kami perbaiki kembali. Terimakasih	-	

NO	INDIKATOR	Target 2025	September									
			Target	Realisasi	CB	CT	Kegiatan	Kendala Bulan Sebelumnya	TL atas Kendala Bulan Sebelumnya	Kendala	RTL dan Arahan Kepala Balai	Timeline
							1. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat bulan Agustus 2025 2. Penyusunan Laporan SKM bulan Juli 2025 dan Tindak Lanjut SKM bulan Juni 2025 3. Publikasi SKM Juli 2025 4. Penetapan Petugas Yanblik Terbaik Bulan Agustus 2025: Ratna Sri Hidayati, Rini Hidayati 5. Penyusunan laporan akuntabilitas hasil konsultasi dan pengaduan bulan Agustus 2025 beserta laporan tindaklanjutnya 6. Penyusunan Laporan SPKP dan SPAK Agustus 2025 7. Exit Meeting PEKPPP pada tanggal 17 September 2025 dengan hasil IPP 4,96 /A (Kategori Pelayanan Prima). 5 Aspek mendapatkan nilai maksimal (5), sedangkan Aspek inovasi mendapat nilai 4,5 karena untuk mencapai nilai maksimal minimal inovasi masuk dalam Top 8 KOIN BPOM. 8. Telah dilaksanakan monev pelayanan publik kelompok rentan dan masih dalam proses pelaksanaan survey kepada kelompok rentan penerima pelayanan publik dengan batas waktu 17 Oktober 2025	Tidak ada kendala.	-	Tidak ada kendala.	-	
26	Nilai AKIP BBPOM di Semarang	82					1. Pelaksanaan Rapat Evaluasi dan Monitoring Kinerja Agustus 2025 2. Reminder Pelaporan Kinerja di awal Bulan untuk Seluruh Ketua tim 3. Pelaksanaan Reward Punishment TW II suadh terlaksana 4. Pelaksanaan Desk SAKIP tanggal 4 September sudah terlaksana	Tidak ada kendala.	-	Tidak ada kendala.	-	October 2025
27	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang	5					Nilai Perencanaan Anggaran : 56,86Nilai Pelaksanaan Anggatan 99,10NIKA : 77,98	Tidak ada kendala.	-	Tidak ada kendala.	-	
28	Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Semarang	3,6					Penilaian mandiri maturitas manajemen risiko dengan mengisi Kertas Kerja Evaluasi dan melengkapi data dukungnya	Tidak ada kendala.	-	Tidak ada kendala.	-	
29	Nilai Pengelolaan Kearsipan	60-80					Pengelolaan arsip aktif	Ruang penyimpanan arsip aktif sudah penuh	anak magang diminta untuk membantu scan dokumen keuangan	Ruang penyimpanan arsip aktif sudah penuh	1. pemanfaatan gudang mikro utk penyimpanan arsip aktif. 2. arsip keuangan 2019-2022 dipindah dr ruang keuangan ke ruang arsip inaktif, anak magang diminta untuk membantu scan dokumen keuangan	31 Desember 2025
30	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	96,25					Indeks kepuasan Masyarakat berdasar hasil survey pada 233 konsumen : 97,35	Tidak ada kendala.	Tamu Rahasia terkait WBK WBBM, linsek mohon dipantau kembali, integritas security ditigkatkan kembali.	Tidak ada kendala.	Tamu Rahasia terkait WBK WBBM, linsek mohon dipantau kembali, integritas security ditigkatkan kembali.	

NO	INDIKATOR	Target 2025	September									
			Target	Realisasi	CB	CT	Kegiatan	Kendala Bulan Sebelumnya	TL atas Kendala Bulan Sebelumnya	Kendala	RTL dan Arahan Kepala Balai	Timeline
31	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	95	[redacted]				1. Pengadaan alat lab Water System purifier sdh datang tinggal proses instalasi thl 14 oktober 2. PC Alat Lab sdh proses negosiasi, software sdh tahap kontrak	Tidak ada kendala.	-	Tidak ada kendala.	-	31 Desember 2025
32	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	82,75					1. pengajuan lelang mobil starex dengan linit nilai 45 juta 2. lelang BMN dibawah nilai 100 juta telah selesai. 3. menyusun Laporan Keuangan TW III. 4. Desk RKBMN th 2027. 5. pengembangan digitalisasi sistem persediaam melalui SIPERAN (SPB dan SPBL)	1. pengajuan lelang mobil starex dengan linit nilai 45 juta 2. lelang BMN dibawah nilai 100 juta telah selesai. 3. menyusun Laporan Keuangan TW III. 4. Desk RKBMN th 2027. 5. pengembangan digitalisasi sistem persediaam melalui SIPERAN (SPB dan SPBL)	sesuaikan dengan kondisi yang tersedia	1. penawaran perbaikan kendaraan/mobil lab senilai 100 jt	mencari rekanan bengkel lain dengan perbaikan sebagian sesuai budget yg ada	31 Desember 2025
33	Meningkatnya efektifitas koordinasi dalam program sediaan farmasi dan pangan olahan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95					linsek : Telah dilakukan Advokasi pada 26 Kab/kota (hadir 20 kab/kota) terkait dengan Kab/Kota Pangan Aman pada tanggal 27 Agustus 2025, secara Daring DAK monev rutin kendala dan TLnya, review anggaran DAK tahun 2026 oleh 13 orang petugas BBPOM di Semarang	Tidak ada kendala.	-	Tidak ada kendala.	-	
34	Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri	65					Pemeliharaan jalan akses masuk kantor Pemeliharaan halaman kantor 3. Pemeliharaan Sarpras Yanblik (Gazebo, cat parkir, kanstin, pojok cinta jamu) 4.penggantian plafon PVC di Lab pangan. 4. penggantian lantai vinyl pangghng Aula 5. penyelesian pekerjaan penggantian sistem filter IPAL (fiber dan filter sand)	Tidak ada kendala.	-	Tidak ada kendala.	-	

5. Konde

No	Timestamp	Kritik dan Saran	Gagasan Untuk Perbaikan	Tindak Lanjut
1	9/12/2025 7:39:21	Apakah wfh berlaku untuk seluruh pegawai balai besar pom di semarang? Mengingat sudah diterbitkan Perka Badan POM terbaru mengenai wfh yang dikeluarkan oleh pusat, jangan hanya bidang tertentu yang mendapatkan akses wfh.	kalo memang diperbolehkan mohon untuk diberitahu kepada seluruh pegawai.	sudah disampaikan 18 Agustus 2025, prinsipnya tidak melarang wfh, katim harus betul2 memastikan terdapat output pekerjaan, layanan publik jangan terganggu, penugasan jelas. **Karena pada dasarnya WFH adalah Kerja dari Rumah, saat WFH sangat2 betul dijaga perilaku untuk tetap beraktifitas di dalam rumah, tidak di luar rumah** (**akan ditinjau dengan UPT lain terkait wfh**)
2	9/24/2025 11:51:03	Pencairan uang makan beberapa bulan terakhir sangat lambat bahkan selisih kurang lebih 10 hari dari batas verifikasi. Mungkin bagi sebagian pegawai menganggap bahwa uang makan ini tidak berarti namun bagi sebagian pegawai yang lain kedatangan uang makan ini sangat dinantikan. Karena kebutuhan sehari-hari terus berjalan dan ada keluarga yang menanti. Kedatangan UM yang tidak seberapa ini sangat berpengaruh dan bisa menjadi stimulus pegawai agar tetap semangat menunaikan kewajiban. Selain itu, UM ini juga hak setiap pegawai yang sudah berjuang, setiap hari berangkat pulang kerja dengan penuh tanggung jawab. UM ini bukan hanya sekedar uang jajan namun ini tentang kesejahteraan. Sepertinya organisasi kurang melihat itu dengan baik. Organisasi hanya menuntut pegawainya untuk memenuhi target kinerja saja. Hal ini sangat timpang dan tidak seimbang.	1. Pencairan UM segera mungkin setelah verifikasi maks. Tg 20 tiap bulannya. 2. Tidak menunda pencairan UM dengan dalih target kinerja belum terpenuhi. **3. Setiap pegawai dengan kesadaran penuh untuk segera melakukan verifikasi tanpa harus di oyak-oyak. Sebisa mungkin daduk sudah disiapkan sblm jatuh tempo tanggal verifikasi.** 4. Apapun yang terkait dengan kesejahteraan pegawai harap lebih di perhatikan dan tidak ditunda-tunda.	bisa dicicil data dukung secara harian apabila (cuti, dinas, dsb) supaya dapat segera "cair". **Apabila terlambat verifikasi, uang makan ybs akan telat pencairan (tarik data maksimal tanggal 18 sampai dengan bulan Januari)**
3	9/24/2025 12:05:47	Kenyamanan kamar mandi pengujian lt 2 kurang diperhatikan. Seperti, lampunya mati tidak diganti. Kran tidak berfungsi namun tidak kunjung diperbaiki. Kebersihan sangat kurang karena sering bau tidak sedap meski di pagi hari. Jarang tersedia tisu, sabun seringkali habis namun tidak segera diisi ulang. Sering KELUAR CACING HITAM di sela-sela keramik dan menjalar ke seluruh area kamar mandi. Dan ini sungguh mengerikan. Pintu kamar mandi laboratorium (belakang) ada yang rusak (kayu bagian bawah patah). Area wastafel dan cermin tidak pernah dibersihkan sehingga terlihat kotor dan kusam.	1. Mohon pegecekan secara berkala terkait fasilitas kamar mandi 2. Perlu ceklis kebersihan secara berkala agar mudah dipantau (masa kalah sama waroeng SS yg ceklis sehari 4x) 3. Perlu semprot pembasmi cacing seperti produk Prontox Pest dan Bascing yang ditujukan untuk cacing di kamar mandi atau tanaman.	masukan diterima, akan dilakukan pengaturan CS kembali, dilakukan pemeriksaan rutin berkala 2kali sehari, menutup nat lantai kamar mandi

No	Timestamp	Kritik dan Saran	Gagasan Untuk Perbaikan	Tindak Lanjut
4	10/1/2025 9:44:42	Mohon jangan mempersulit cuti kami, kami juga punya kehidupan pribadi diluar pekerjaan. Kami para pegawai pasti sudah menyelesaikan tugas yang urgent sebelum cuti jadi tidak perlu takut jika cuti kami akan mengganggu pekerjaan. Apakah kami harus sakit atau harus pura pura sakit dulu biar diijinkan cuti?	Dipermudah cutinya	cuti tidak masalah, yang penting ybs tidak meninggalkan tupoksi yang dimiliki
5	10/1/2025 13:38:40	Mohon izin menyampaikan masukan. Proses pengajuan cuti di salah satu substansi saat ini cukup sulit justru berpotensi menurunkan motivasi kerja tim. Padahal cuti adalah HAK pegawai, dan jika dikelola dengan baik, bisa mendukung produktivitas ketika kembali bekerja. Mungkin perlu dipertimbangkan agar ketua tim tidak mempersulit penguajuan cuti kami	Mohon dipertimbangkan HAK pegawai ini	cuti tidak masalah, yang penting ybs tidak meninggalkan tupoksi yang dimiliki
6	10/9/2025 1:14:24	ISO K3 dan ISO SMAP kurang greget	Reshufle Tim K3 dan SMAP	dipertimbangkan
7	10/9/2025 10:27:07	mohon diadakan LO sebagai sarana untuk meningkatkan keharmonisan antar pegawai	dilksanakan LO yang menyenangkan	apabila terdapat anggaran, akan diadakan polling dan survey seperti apa yang dikehendaki supaya menyenangkan
8	10/9/2025 10:31:02	Mengingat nilai harmonis yang perlu ditingkatkan Apakah perlu diadakan LO? Pantun dulu: Kerja tekun tiap hari, Demi mutu tetap terjaga. Sekali-sekali jalan bersama, Biar semangat makin menyala	Acara fun, akrab, adem	apabila terdapat anggaran, akan diadakan polling dan survey seperti apa yang dikehendaki supaya menyenangkan
9	10/9/2025 10:31:26	evaluasi kinerja tidak hanya dilakukan untuk ASN saja, tetapi juga untuk non ASN	adanya evaluasi kinerja untuk non ASN, disertai reward & punisment yg jelas	

Semarang, 10 September 2025
Mengetahui,



Dewi Marya Achmad, S.Farm, Apt

Lampiran 8 Kendala dan Tindak Lanjut

Januari - September 2025

No	Nama Balai/UPT	Sasaran Strategis	Indikator	Bulan	Target	Realisasi	Capaian	Rekomendasi I						
								Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian Rekomendasi	Status	Tindak Lanjut		Kondisi Akhir
												Rencana Aksi	Timeline Penyelesaian Rencana Aksi	
1	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	192 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Januari	100.00	0	0	Januari ada 1 sampel KLB yang masuk dan diuji (Jelly dari Dinkes Batang) = > TMS pengawet dan pemanis.	Koordinasi dengan DKK jika ada kasus KLB terkait sampel yang bisa diuji oleh BBPOM di Semarang dan dihitung secara kumulatif	Februari 2025	1	Koordinasi dengan DKK jika ada kasus KLB terkait sampel yang bisa diuji oleh BBPOM di Semarang dan dihitung secara kumulatif	Februari 2025	Januari ada 1 sampel KLB yang masuk dan diuji (Ikky Jeli dari Dinkes Batang) = > TMS pengawet dan pemanis. Februari ada 1 sampel KLB yang masuk dan diuji (Bahan Seblak dan mie kuning) = > MS (uji logam berat dan mikro)
2	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	194 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Januari	50.00	60.87	121.74%	Rekap TL 24 dan CAPA 14 = 58.33 %	Monev CAPA	Februari 2025	1	9 sarana Distribusi dan Sanyanfar CAPA belum masuk karena time line CAPA 21 HK => 6 sarana sudah menyampaikan CAPA	Februari 2025	Januari Rekap TL 24 dan CAPA 14 = 58.33 % Jan-Feb Rekap TL 33 dan CAPA 20 = 60.60 %
3	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	195 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Januari	90.00	100	111.11%	Januari diperiksa 1 sarana UKOT dengan hasil MK, telah dibuat konsep TL dan draft SIPT (timeline tgl 10), realisasi target IKU Jan 100%	Penyesuaian target inspeksi luring sesuai dengan efisiensi aggaran, atau pemeriksaan sarana secara daring	Februari 2025	1	- Penyesuaian target inspeksi luring sesuai dengan efisiensi aggaran, jika ada kekurangan anggaran pemeriksaan sarana akan dilakukan secara daring - penetapan SKP tiap TWnya merupakan kumulatif sesuai dengan perhitungan pada tools	Februari 2025	Sampai dengan Februari jumlah sarana (CPOTB dan CPKB) yang diperiksa 36,84%. Penyampaian SIPT tidak lewat timeline tgl 10 (100%), sampai dengan 5 Maret keseuaian kesimpulan dan TL 100%. CPOB belum diperiksa, mengikuti jadwal pusat (rencana Maret 2025)
4	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	196 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Januari	85.00	0	0	Pemeriksaan sarana produksi pangan olahan dan telah ditindaklanjuti sejumlah 9 sarana (6,12% dari target awal 147 sarana)	Pemeriksaan sarana secara daring	Februari 2025	1	Exercise target sesuai dengan anggaran efisiensi yang tersedia	Februari 2025	Pemeriksaan sarana produksi pangan olahan sampai bulan februari sejumlah 20 sarana
5	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	197 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Januari	96.75	0	0	Pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi 27 sarana (semua sudah di SIPT dan di TL)	Menunggu juknis pengawasan dari pusat terkait dengan efisiensi anggaran	Februari 2025	1	Telah dilakukan Forkom dengan pusat dan dibuat usulan target pemeriksaan sarana sebesar 40 % dari target awal dan akan dilaksanakan pemeriksaan secara Daring	Februari 2025	Pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi 27 (Jan) dan 42 (Feb) sarana (semua sudah di SIPT dan di TL)
6	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	198 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Januari	80.00	100	125.00%	Diperiksa 12 sarana (7,6% dari target awal 157 sarana)	Prioritas pemeriksaan sarana secara daring atau dalam kota	Februari 2025	1	Penyesuaian target sesuai anggaran yang tersedia; monitoring terhadap petugas untuk menyelesaikan tugas sesuai timeline	Februari 2025	Diperiksa 10 sarana (dari target 12 sarana), dengan hasil 9 sarana MK dan 1 sarana TMK
7	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	199 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Januari	85.87	87.14	101.48%	Pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan sejumlah 81 iklan (5%) dari target 1.501 iklan.	pengawasan online selain media luar ruang	Februari 2025	1	Pengawasan iklan melalui media online dan melakukan pengambilan iklan pada saat pemeriksaan sarana distribusi.	Februari 2025	Pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan sejumlah 179 iklan (13,23%) dari target iklan 1.353 iklan.
8	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	210 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Januari	5.00	5	100.00%	Telah dilaksanakan koordinasi dengan lintas sektor di Kabupaten wonosobo	Penyesuaian pelaksanaan tahapan program (berdasarkan juknis terbaru dari pusat) dengan ketersediaan anggaran	Februari 2025	1	Penyesuaian pelaksanaan tahapan program (berdasarkan juknis terbaru dari pusat) dengan ketersediaan anggaran dengan mengalihkan Kabupaten Intervensi ke Kabupaten Semarang	Februari 2025	Telah dilaksanakan koordinasi dan advokasi keterpaduan keamanan dengan lintas sektor Kabupaten Semarang
9	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	211 - Jumlah desa pangan aman	Januari	5.00	5	100.00%	Telah dilaksanakan koordinasi dengan lintas sektor di Kabupaten wonosobo	Penyesuaian pelaksanaan tahapan program (berdasarkan juknis terbaru dari pusat) dengan ketersediaan anggaran	Februari 2025	1	Penyesuaian pelaksanaan tahapan program (berdasarkan juknis terbaru dari pusat) dengan ketersediaan anggaran dilakukan dengan mengalihkan Kabupaten Intervensi ke Kabupaten Semarang	Februari 2025	Telah dilaksanakan koordinasi dan advokasi keterpaduan keamanan dengan lintas sektor Kabupaten Semarang
10	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	212 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Januari	5.00	5	100.00%	Telah dilaksanakan koordinasi dengan lintas sektor di Kabupaten wonosobo	Penyesuaian pelaksanaan tahapan program (berdasarkan juknis terbaru dari pusat) dengan ketersediaan anggaran	Februari 2025	1	Penyesuaian pelaksanaan tahapan program (berdasarkan juknis terbaru dari pusat) dengan ketersediaan anggaran dilakukan dengan mengalihkan Kabupaten Intervensi ke Kabupaten Semarang	Februari 2025	Telah dilaksanakan koordinasi dan advokasi keterpaduan keamanan dengan lintas sektor Kabupaten Semarang
11	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	213 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Januari	6.67	7.5	112.44%	Telah dilakukan GAP terhadap 2 sarana OT dan 3 sarana Pangan	1. Desk Inspection 2. Mencari alternatif UMKM target diutamakan dalam kota untuk pangan 3. mendorong umkm non prioritas tahun sebelumnya untuk melanjutkan proses	Februari 2025	1	1. Pendampingan secara daring 2. Revis Anggaran sesuai alokasi untuk MAK QDG	Februari 2025	1. Telah dilaksanakan proses seleksi terhadap pelaku usaha OT, Kos dan Pangan sebagai calon prioritas pendampingan 2. Telah dilaksanakan pendampingan terhadap 2 sarana OT, 2 Sarana Kosmetik dan 10 sarana pangan
12	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	214 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Januari	10.00	13.33	133.30%	Telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (serah II) terhadap 3 tersangka (perkara) dan 1 berkas perkara telah dinyatakan lengkap (P21)	Menyelesaikan berkas perkara Carry Over 2023 yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti (serah Tahap II) sebanyak 2 tersangka (perkara) dan menyelesaikan berkas yang belum lengkap (P18) sebanyak 1 perkara	Februari 2025	1	Menyelesaikan berkas perkara Carry Over 2024 yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti (serah Tahap II) sebanyak 3 tersangka (perkara) dan memantau perkembangan permohonan DPO	Februari 2025	Telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (serah II) terhadap 2 tersangka (perkara tahun 2024), dilakukan SP3 terhadap 1 perkara, dilakukan permohonan DPO kepada Pihak Kepolisian terhadap 1 tersangka (Sbk)
13	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	215 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Januari	50.00	50	100.00%	sudah dilakukan input akun yang diajukan takedown dan laporan profiling sebelum tenggat waktu tanggal 25 di tiap bulannya; jumlah akun yang diajukan takedown 41 akun dan profiling 3 akun	melakukan patroli siber dan melakukan pelaporan rekomendasi takedown dan profiling tepat waktu	Februari 2025	1	melakukan patroli siber dan melakukan pelaporan rekomendasi takedown dan profiling tepat waktu	Februari 2025	sudah dilakukan input akun yang diajukan takedown dan laporan profiling sebelum tenggat waktu tanggal 25 di tiap bulannya; jumlah akun yang diajukan takedown bulan februari adalah 44 akun dan profiling 3 akun
14	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	189 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Februari	87.00	92.13	105.90%	1. Jumlah sampel sediaan farmasi 191 sampel (45, 80%) dari target sampel setelah efisiensi 417 sampel . Obat :40 sampel , OTSK 41 sampel dan Kosmetik 100 sampel 2. Telah dilaksanakan pengujian sampel sediaan Farmasi sd bulan Februari : Obat :29 sampel , OTSK 60 sampel dan Kosmetik 108 sampel	1. Sampling kosmetik menunggu SE dari kedeputiaa dua 2. Sebagian sampel obat disampling pada saat pemeriksaan sarana distribusi obat	maret 2025	1	1. Sampling kosmetik menunggu SE dari kedeputian dua. 2. Diupayakan semaksimal mungkin untuk memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh kedeputian dua. 3. Sebagian sampel obat disampling pada saat pemeriksaan sarana distribusi obat 4. Penghematan penggunaan reagen, media mikrobiologi, baku pembanding dan gas, karena belum ada anggaran untuk pembelian		1. Telah dilakukan sampling sediaan farmasi sampai dengan bulan Maret sejumlah 205 sampel (Obat 49 sampel, OTSK 56 sampel dan kosmetik 100 sampel). Capaian jumlah sampel sd Maret sebesar 13,74% dari target awal 1492 sampel. 2. Telah dilaksanakan pengujian sampel Farmasi sd Bulan Maret : Obat : 35 sampel, OTSK : 77 sampel, dan kosmetik : 100 sampel
15	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	191 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Februari	85.00	94.56	111.25%	Jumlah sampel pangan olahan 36 sampel (21,95%) dari target setelah efisiensi 164 sampel	dilakukan sampling terhadap sampel pangan olahan yang bisa diuji lengkap sesuai PS setiap bulannya.	maret 2025	1	dilakukan sampling terhadap sampel pangan olahan yang bisa diuji lengkap sesuai PS setiap bulannya.		1. Telah dilakukan sampling pangan olahan sampai dengan bulan Maret sejumlah 40 sampel dari target sampel awal 643 sampel sehingga capaian kjumlah sampel sd Maret baru sebesar 6,22%
16	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	192 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Februari	100.00	0	0	"Januari ada 1 sampel KLB yang masuk dan diuji (Ikky Jeli dari Dinkes Batang) = > TMS pengawet dan pemanis. Februari ada 1 sampel KLB yang masuk dan diuji (Bahan Seblak dan mie kuning) = > MS (uji logam berat dan mikro)"	Koordinasi dengan DKK jika ada kasus KLB terkait sampel yang bisa diuji oleh BBPOM di Semarang dan dihitung secara kumulatif	februari 2025	1	Koordinasi dengan DKK jika ada kasus KLB terkait sampel yang bisa diuji oleh BBPOM di Semarang dan dihitung secara kumulatif		"Januari ada 1 sampel KLB yang masuk dan diuji (Ikky Jeli dari Dinkes Batang) = > TMS pengawet dan pemanis. Februari ada 1 sampel KLB yang masuk dan diuji (Bahan Seblak dan mie kuning) = > MS (uji logam berat dan mikro)"
17	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	193 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Februari	80.00	65.71	82.14%	Jumlah sampel PIRT sampai dengan bulan februari sebesar 32 sampel	dilakukan sampling terhadap sampel pangan PIRT yang bisa diuji lengkap sesuai PS setiap bulannya.	maret 2025	1	dilakukan sampling terhadap sampel pangan PIRT yang bisa diuji lengkap sesuai PS setiap bulannya.		Jumlah sampel PIRT sampai dengan bulan Maret sebesar 32 sampel
18	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	194 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Februari	53.00	62.5	117.92%	"Januari Rekap TL 24 dan CAPA 14 = 58.33 % Jan-Feb Rekap TL 33 dan CAPA 20 = 60.60 % "	Keterbatasan Anggaran dan Reagen	Maret 2025	1	Sarana di WA kembali untuk meminta CAPA oleh petugas (sudah dijapri ke pelaku usaha) arahan : menentukan cutoff dalam perhitungannya dan sudah ada penggunaan kartukendali		Monitoring dan evaluasi TL dan CAPA sampai dengan Maret : Pelaku Usaha = rekomendasi : 97 sudah TL : 59
19	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	195 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Februari	90.00	100	111.11%	Sampai dengan Februari jumlah sarana (CPOTB dan CPKB) yang diperiksa 36,84%. Penyampaian SIPT tidak lewat timeline tgl 10 (100%), sampai dengan 5 Maret keseuaian kesimpulan dan TL 100%. CPOB belum diperiksa, mengikuti jadwal pusat (rencana Maret 2025)	arahan: penyesuaian jadwal/ target sesuai efisiensi anggaran, monitoring SIPT dan TLnya	maret 2025	1	arahan: penyesuaian jadwal/ target sesuai efisiensi anggaran, monitoring SIPT dan TLnya		"Penyampaian SIPT tidak lewat timeline tgl 10 (100%), sampai dengan 5 April keseuaian kesimpulan dan TL 100%. produksi obat 1 dari target tahunan 7 produksi OT 5 dari target tahunan 31 produksi Kosmetika 5 dari target tahunan 14"
20	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	196 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Februari	85.00	0	0	Pemeriksaan sarana produksi pangan olahan sampai bulan februari sejumlah 20 sarana	Pemeriksaan sarana sesuai exercise anggaran yang ada	maret 2025	1	Pemeriksaan sarana sesuai exercise anggaran yang ada		Pemeriksaan sarana produksi pangan olahan sampai bulan februari sejumlah 31 sarana

No	Nama Balai/UPT	Sasaran Strategis	Indikator	Bulan	Target	Realisasi	Capaian	Rekomendasi I						
								Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian Rekomendasi	Status	Tindak Lanjut		Kondisi Akhir
												Rencana Aksi	Timeline Penyelesaian Rencana Aksi	
21	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	197 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Februari	96.75	0	0	Pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi 27 (Jan) dan 42 (Feb) sarana (semua sudah di SIPT dan di TL)	sarana diminta untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan sebelum dilaksanakan pemeriksaan secara Daring	maret 2025	1	sarana diminta untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan sebelum dilaksanakan pemeriksaan secara Daring		Pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi sesuai target sampai dengan Maret semua sudah di SIPT dan di TL sesuai ketentuan dan tepat waktu
22	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	198 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Februari	80.00	96.67	120.84%	Diperiksa 10 sarana (dari target 12 sarana), dengan hasil 9 sarana MK dan 1 sarana TMK	toko perlengkapan bayi bisa diabaikan, kalau gudang seperti gudang lottemart dapat diberikan sanksi	maret 2025	1	toko perlengkapan bayi bisa diabaikan, kalau gudang seperti gudang lottemart dapat diberikan sanksi		Pada bulan Maret diperiksa 25 sarana dalam rangka intensifikasi pengawasan pangan jelang Ramadhan dan Idul Fitri. Realisasi s.d Maret 47 sarana, atau sekitar 30% dari target setahun (157)
23	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	199 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Februari	85.87	93.99	109.46%	Pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan sejumlah 81 iklan (5%) dari target 1.501 iklan.	Sosialisasi dan monev	maret	1	Sosialisasi dan monev		Pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan sampai dengan Maret sejumlah 348 iklan (25,72%) dari target iklan 1.353 iklan.
24	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	200 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Februari	5.61	2.8	49.91%	Tidak ada kegiatan pemeriksaan sarana produksi fortifikasi karena masih menyesuaikan efisiensi anggaran perjalanan dinas, sampel dan ketersediaan reagensia di laboratorium	akan masuk 6 sampel di akhir maret	maret 2025	1	Relaksasi anggaran		masuk 17 sampel s.d Maret 2025
25	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	210 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Februari	20.00	25	125.00%	Telah dilaksanakan koordinasi dan advokasi keterpaduan keamanan dengan lintas sektor Kabupaten Semarang	Melaksanakan tahapan selanjutnya sesuai dengan juknis dan timeline dari pusat	maret 2025	1	Tidak ada kendala, tahap advokasi telah dilaksanakan sesuai perencanaan		Sampai bulan Maret telah dilaksanakan sampai tahap advokasi, tahap selanjutnya yaitu sosialisasi dan bimtek direncanakan dilaksanakan pada bulan april
26	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	211 - Jumlah desa pangan aman	Februari	25.00	25	100.00%	Telah dilaksanakan koordinasi dan advokasi keterpaduan keamanan dengan lintas sektor Kabupaten Semarang	Melaksanakan tahapan selanjutnya sesuai dengan juknis dan timeline dari pusat	maret 2025	1	Tidak ada kendala, tahap advokasi telah dilaksanakan sesuai perencanaan		Sampai bulan Maret telah dilaksanakan sampai tahap advokasi, tahap selanjutnya yaitu bimtek kader keamanan pangan desa direncanakan dilaksanakan pada bulan april
27	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	212 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Februari	20.00	25	125.00%	Telah dilaksanakan koordinasi dan advokasi keterpaduan keamanan dengan lintas sektor Kabupaten Semarang	Melaksanakan tahapan selanjutnya sesuai dengan juknis dan timeline dari pusat	maret 2025	1	Tidak ada kendala, tahap advokasi telah dilaksanakan sesuai perencanaan		Sampai bulan Maret telah dilaksanakan sampai tahap advokasi, tahap selanjutnya yaitu Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar serta Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar direncanakan dilaksanakan pada bulan april
28	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	213 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Februari	16.00	18.33	114.56%	"1. Telah dilaksanakan proses seleksi terhadap pelaku usaha OT, Kos dan Pangan sebagai calon prioritas pendampingan 2. Telah dilaksanakan pendampingan terhadap 2 sarana OT, 2 Sarana Kosmetik dan 10 sarana pangan"	"akan diadakan pertemuan di april, dibuakan surat untuk program pendampingan UMKM agar tahu 7an dan timeline arahan: kegiatan dibarengkan dengan kegiatan pem sekalian sosialisasi pendampingan UMKM"	maret 2025	1	"1. Telah dilaksanakan proses seleksi terhadap pelaku usaha OT, Kos dan Pangan sebagai calon prioritas pendampingan 2. Telah dilaksanakan pendampingan terhadap 2 sarana OT, 2 Sarana Kosmetik dan 10 sarana pangan" pendampingan 2. Telah dilaksanakan pendampingan terhadap 2 sarana OT, 2 Sarana Kosmetik dan 10 sarana pangan"		"akan diadakan pertemuan di april, dibuakan surat untuk program pendampingan UMKM agar tahu 7an dan timeline arahan: kegiatan dibarengkan dengan kegiatan pem sekalian sosialisasi pendampingan UMKM"
29	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	214 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Februari	25.00	33.33	133.32%	Telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (serah II) terhadap 2 tersangka (perkara tahun 2024), dilakukan SP3 terhadap 1 perkara, dilakukan permohonan DPO kepada Pihak Kepolisian terhadap 1 tersangka (Sbk)	Menyelesaikan berkas perkara Carry Over 2023 yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti (serah Tahap II) sebanyak 2 tersangka (perkara) dan menyelesaikan berkas yang belum lengkap (P18) sebanyak 1 perkara	maret 2025	1	Telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (serah II) terhadap 2 tersangka (perkara tahun 2024), dilakukan SP3 terhadap 1 perkara, dilakukan permohonan DPO kepada Pihak Kepolisian terhadap 1 tersangka (Sbk)		"menggandeng 3 PT untuk pemusnahan arahan: fokus ke capaian perkara berdasarkan anggaran yg ada, jika smt ada anggaran lagi bisa dimanfaatkan untuk pemusnahan bb th lalu.
30	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	215 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Februari	50.00	50	100.00%	sudah dilakukan input akun yang diajukan takedown dan laporan profilling sebelum tenggat waktu tanggal 25 di tiap bulannya; jumlah akun yang diajukan takedown bulan februari adalah 44 akun dan profiling 3 akun	melakukan patroli siber dan melakukan pelaporan rekomendasi takedown dan profiling tepat waktu	maret 2025	1	tidak ada		sudah dilakukan input akun yang diajukan takedown dan laporan profilling sebelum tenggat waktu tanggal 25 di tiap bulannya; jumlah akun yang diajukan takedown bulan Maret adalah 40 akun dan profiling 3 akun komoditi 2 suplemen kesehatan 1 pangan
31	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	189 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Maret	87.00	88.02	101.17%	"1. Telah dilakukan sampling sediaan farmasi sampai dengan bulan Maret sejumlah 205 sampel (Obat 49 sampel, OTSK 56 sampel dan kosmetik 100 sampel), Capaian jumlah sampel sd Maret sebesar 13,74% dari target awal 1492 sampel. 2. Telah dilaksanakan pengujian sampel Farmasi sd Bulan Maret : Obat : 35 sampel, OTSK : 77 sampel, dan kosmetik : 100 sampel	Mengoptimalkan relaksasi anggaran untuk memenuhi jumlah dan jenis sampel sesuai target awal	Apr-25	1	Mengoptimalkan relaksasi anggaran untuk memenuhi jumlah dan jenis sampel sesuai target awal		"1. Telah dilakukan sampling sediaan farmasi sampai dengan bulan April sejumlah 361 sampel (Obat 95 sampel, OTSK 80 sampel dan kosmetik 168 sampel). Capaian jumlah sampel sd April sebesar 24,2% dari target awal 1492 sampel. 2. Telah dilaksanakan pengujian sampel Farmasi sd Bulan April : Obat : 65 sampel, OTSK : 85 sampel, dan kosmetik : 170 sampel "
32	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	191 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Maret	85.00	93.2	109.65%	1. Telah dilakukan sampling pangan olahan sampai dengan bulan Maret sejumlah 40 sampel dari target sampel awal 643 sampel sehingga capaian kjumlah sampel sd Maret baru sebesar 6,22%	Mengoptimalkan relaksasi anggaran untuk memenuhi jumlah dan jenis sampel sesuai target awal	Apr-25	1	Mengoptimalkan relaksasi anggaran untuk memenuhi jumlah dan jenis sampel sesuai target awal		1. Telah dilakukan sampling pangan olahan sampai dengan bulan April sejumlah 113 sampel dari target sampel awal 643 sampel sehingga capaian jumlah sampel sd April sebesar 17,6%
33	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	192 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Maret	100.00	100	100.00%	"Januari ada 1 sampel KLB yang masuk dan diuji (Ikky Jeli dari Dinkes Batang) = > TMS pengawet dan pemanis. Februari ada 1 sampel KLB yang masuk dan diuji (Bahan Seblak dan mie kuning) = > MS (uji logam berat dan mikro)"	Koordinasi dengan DKK jika ada kasus KLB terkait sampel yang bisa diuji oleh BBPOM di Semarang	Apr-25	1	Koordinasi dengan DKK jika ada kasus KLB terkait sampel yang bisa diuji oleh BBPOM di Semarang dan dihitung secara kumulatif		"Januari ada 1 sampel KLB yang masuk dan diuji (Ikky Jeli dari Dinkes Batang) = > TMS pengawet dan pemanis. Februari ada 1 sampel KLB yang masuk dan diuji (Bahan Seblak dan mie kuning) = > MS (uji logam berat dan mikro)
34	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	193 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Maret	80.00	100	125.00%	Jumlah sampel PIRT sampai dengan bulan Maret sebesar 32 sampel	Sampling dan pengujian sampel PIRT sesuai dengan target tahunan 2025 sesuai dengan relaksasi anggaran yang ada	Apr-25	1	Sampling dan pengujian sampel PIRT sesuai dengan target tahunan 2025 sesuai dengan relaksasi anggaran yang ada		Pemenuhan target sampel 100.89%. Kesesuaian parameter uji 101.79%. Ketepatan pengambilan kesimpulan 100%. Ketepatan waktu pengambilan sampel 101.79%. Ketepatan waktu pelaporan 57.14% (cut off tgl 15 bulan berikutnya). Tindak lanjut sampel pirt 100%
35	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	194 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Maret	56.00	60.82	108.61%	"Monitoring dan evaluasi TL dan CAPA sampai dengan Maret : Pelaku Usaha = rekomendasi : 97 sudah TL : 59"	Desk CAPA sarana Produksi Juni 2025	Apr-25	1	"Sarana di WA kembali untuk meminta CAPA oleh petugas (sudah dijapri ke pelaku usaha) arahan : menentukan cut off dalam perhitungannya dan sudah ada penggunaan kartu kendali"		"Monitoring dan evaluasi TL dan CAPA sampai dengan Maret : Pelaku Usaha = rekomendasi : 158 sudah TL : 110"
36	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	195 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Maret	90.00	90.29	100.32%	"Penyampaian SIPT tidak lewat timeline tgl 10 (100%), sampai dengan 5 April keseuaian kesimpulan dan TL 100%. produksi obat 1 dari target tahunan 7 produksi OT 5 dari target tahunan 31 produksi Kosmetika 5 dari target tahunan 14"	penyesuaian jadwal/ target sesuai efisiensi anggaran, monitoring SIPT dan TLnya	Apr-25	1	"Sudah disesuaikan jadwal/ target sesuai efisiensi anggaran, monitoring SIPT dan TLnya penambahan di ukot umot dan kosmetik"		"Penyampaian SIPT tidak lewat timeline tgl 10 (100%), sampai dengan 5 April keseuaian kesimpulan dan TL 100%. produksi obat 1 dari target tahunan 7 produksi OT 5 dari target tahunan 31 produksi Kosmetika 5 dari target tahunan 14"
37	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	196 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Maret	85.00	0	0	Pemeriksaan sarana produksi pangan olahan sampai bulan februari sejumlah 31 sarana	Perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan sesuai dengan target tahunan 2025 sesuai dengan relaksasi anggaran yang ada	Apr-25	1	Perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan sesuai dengan target tahunan 2025 sesuai dengan relaksasi anggaran yang ada		Pemeriksaan sarana produksi pangan olahan yang diperiksa pada bulan april sejumlah 14 sarana sehingga total sarana produksi pangan olahan yang diperiksa sampai dengan bulan april sejumlah 43 sarana. Target tahunan 147 sarana.
38	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	197 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Maret	96.75	0	0	Pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi sesuai target sampai dengan Maret semua sudah di SIPT dan di TL sesuai ketentuan dan tepat waktu	Perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan sarana Distribusi Sediaan Farmasi sesuai dengan target tahunan 2025 sesuai dengan relaksasi anggaran yang ada	Apr-25	1	sarana diminta untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan sebelum dilaksanakan pemeriksaan secara Daring		Pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi sesuai target sampai dengan April

No	Nama Balai/UPT	Sasaran Strategis	Indikator	Bulan	Target	Realisasi	Capaian	Rekomendasi I						
								Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian Rekomendasi	Status	Tindak Lanjut		Kondisi Akhir
												Rencana Aksi	Timeline Penyelesaian Rencana Aksi	
39	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	198 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Maret	80.00	100	125.00%	Pada bulan Maret diperiksa 25 sarana dalam rangka intensifikasi pengawasan pangan jelang Ramadhan dan Idul Fitri. Realisasi s.d Maret 47 sarana, atau sekitar 30% dari target setahun (157)	-	Apr-25	1	tidak ada kendala		Bulan April diperiksa 23 sarana melebihi target 10 sarana, sebagai tindak lanjut surat BPOM terkait produk pangan (marsmallow) mengandung DNA babi
40	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	199 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Maret	85.87	99.52	115.90%	Pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan sampai dengan Maret sejumlah 348 iklan (25,72%) dari target iklan 1.353 iklan.	Reminder kepada petugas, supervisor dan Kepala UPT	Apr-25	1	Reminder kepada petugas, supervisor dan Kepala UPT		Pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan sampai dengan April sejumlah 457 iklan (34%) dari target iklan 1.353 iklan.
41	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	200 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Maret	16.82	15.89	94.47%	masuk 17 sampel s.d Maret 2025	Pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi sesuai target tahunan 2025 sesuai dengan relaksasi anggaran yang ada	Apr-25	1	Pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi sesuai target tahunan 2025 sesuai dengan relaksasi anggaran yang ada		Pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi sampai dengan April sebanyak 35 sarana
42	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	208 - (PK AWAL) Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Maret	70.31	82.4	117.20%	"1. Melaksanakan dan monitoring SRL TW I Target : 82 % capaian : 85,3 % 2. Melaksanakan dan monitoring Standar Kompetensi TW i, Target 90 %, capaian 90 % 3. Melaksanakan dan monitoring standar peralatan. Target 83, Capaian 85,2 % 4. Melaksanakan dan monitoring metoda analisa yg diverifikasi TW 1. Target : 46 % Capaian : 47,3 % 5. Secara keseluruhan Target SKL TW 1 : 76,2 %, capaian TW 1 : 82,4 % (108,2 %)"	"1. Rencana : pemenuhan kebutuhan reagen, media, gas dan kebutuhan suku cadang 2. Pengadaan peralatan alat laboratorium dengan anggaran setelah relaksasi"	Apr-25	1	Verifikasi metoda analisa akan dijadwalkan kembali, kegiatan pengujian difokuskan pada penyelesaian uji sampel karena target sampling dan uji kembali sesuai target awal tahun		"1. Melaksanakan dan monitoring pengadaan peralatan laboratorium untuk pemenuhan standar peralatan. 2. Verifikasi metoda analisa dan penambahan ruang lingkup pada bulan April belum ditargetkan 3. Pemenuhan kompetensi personil masih sesuai dan dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan ruang lingkup "
43	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	209 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Maret	86.42	90.25	104.43%	"Telah dilakukan KIE bersama tokoh masyarakat sbb : 1. Ibu Teti : 3 titik (2 Cilacap, 1 Banyumas) 2. Ibu Nafa : 2 titik (1 Purworejo, 1 Wonosobo) Indeks efektifitas KIE s/d Maret 90,25 "	"Rencana di bulan April akan ada pelaksanaan KIE di 10 titik, karena tomas bpk DR.H. Edy W. bersedia melaksanakan KIE dua hari 4 titik shg akan mempercepat pelaksanaan kegiatan KIE. arahan : pantau pelaksanaan,"	Apr-25	1	"Telah dilakukan pemantauan dan di bulan April telah dilaksanaan KIE di 10 titik dengan tomas bpk DR.H. Edy W. "		"Telah dilakukan KIE bersama tokoh masyarakat 10 titik Indeks efektifitas KIE s/d April 85.56 "
44	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	210 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Maret	20.00	25	125.00%	Sampai bulan Maret telah dilaksanakan sampai tahap advokasi, tahap selanjutnya yaitu sosialisasi dan bimtek direncanakan dilaksanakan pada bulan april	Melaksanakan tahapan selanjutnya yaitu Bimtek kader keamanan pangan desa sesuai dengan juknis dan timeline dari pusat	Apr-25	1	Tidak ada		Bulan April telah dilaksanakan Sosialisasi Keamanan Pangan dan Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah. Tahap Selanjutnya adalah monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah pada bulan Mei - Juni
45	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	211 - Jumlah desa pangan aman	Maret	28.00	25	89.29%	Sampai bulan Maret telah dilaksanakan sampai tahap advokasi, tahap selanjutnya yaitu bimtek kader keamanan pangan desa direncanakan dilaksanakan pada bulan april	Melaksanakan tahapan selanjutnya yaitu Bimtek kader keamanan pangan desa sesuai dengan juknis dan timeline dari pusat	Apr-25	1	Tidak ada apri		Pada bulan April telah dilaksanakan Bimtek Kader Keamanan Pangan Desa, tahap selanjutnya adalah Bimtek Komunitas direncanakan akan dilaksanakan di Desa Bejalen, Desa Kemambang, dan Desa Asinan pada bulan Mei
46	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	212 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Maret	20.00	25	125.00%	Sampai bulan Maret telah dilaksanakan sampai tahap advokasi, tahap selanjutnya yaitu Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar serta Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar direncanakan dilaksanakan pada bulan april	Melaksanakan tahapan selanjutnya yaitu Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar serta Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar sesuai dengan juknis dan timeline dari pusat	Apr-25	1	Tidak ada		"Sampai bulan April telah dilaksanakan tahap Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar dan Sosialisasi Keamanan Pasar Kepada Komunitas Pasar tahap 1, tahap selanjutnya yaitu Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar tahap 2 dan tahap 3, Pengawasan Keamanan Pangan, serta Pengawalan Pasar Intervensi Tahun 2024 yaitu Pasar Bandungan, Pasar Warung Lanang dan Pasar Batang yang direncanakan pada bulan Mei "
47	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	213 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Maret	24.17	28.33	117.21%	"1. Telah dilaksanakan proses seleksi terhadap pelaku usaha OT, Kos dan Pangan sebagai calon prioritas pendampingan 2. Telah dilaksanakan pendampingan terhadap 2 sarana OT, 2 Sarana Kosmetik dan 10 sarana pangan"	"akan diadakan pertemuan di april, dibuakan surat untuk program pendampingan UMKM agar tahu 7an dan timeline arahan: kegiatan dibarengkan dengan kegiatan pem sekalian sosialisasi pendampingan UMKM"	Apr-25	1	"1. Dilaksanakan pertemuan secara dengan bebeapa Industri yang memiliki binaan UMKM dan disampaikan program pemdampingan pada 14 Maret 2025 dan pertemuan secara daring kepada UMKM target bersamaan dengan program SAPA kampus pada 11 April 2025, dimana pada pertemuan dijelaskan terkait program pendampingan, tahapan pendampingan dan SAPA kampus. 3. Pendampingan secara daring memanfaatkan zoom dan atau WA call menyesuiakan kemampuan dari pelaku usaha 4. Menyusun prioritas sarana yang akan dilakukan pendampingan langsung ke sarana sesuai dengan anggaran yang tersedia (rencana : Mei)"		"1. Telah dilaksanakan Bimtek secara daring untuk pelaku usaha pangan yang menjadi target pendampingan 2. Telah dilaksanakan pendampingan terhadap 20 sarana pangan (daring)"
48	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	214 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Maret	35.00	39	111.43%	Telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (serah II) terhadap 2 tersangka (perkara tahun 2024), dilakukan SP3 terhadap 1 perkara, dilakukan permohonan DPO kepada Pihak Kepolisian terhadap 1 tersangka (Sbk)	Dilakukan pemantauan terhadap kondisi kesehatan tersangka sehingga bisa dilakukan proses serah Tahap II	Apr-25	1	Pemantauan terhadap kondisi tersangka yang sakit sehingga pada saat kondisi baik siap untuk dilakukan serah tahap II		Telah dilakukan penyidikan terhadap 1 perkara yang merupakan penyelesaian target perkara 2025
49	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	215 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Maret	50.00	50	100.00%	sudah dilakukan input akun yang diajukan takedown dan laporan profilling sebelum tenggat waktu tanggal 25 di tiap bulannya; jumlah akun yang diajukan takedown bulan Maret adalah 40 akun dan profiling 3 akun komoditi 2 suplemen kesehatan 1 pangan	melakukan pengajuan takedown dan pengisian data profilling sebelum tenggat waktu tanggal 25 di tiap bulannya	Apr-25	1	-		sudah dilakukan input akun yang diajukan takedown dan laporan profilling sebelum tenggat waktu tanggal 25 di tiap bulannya; jumlah akun yang diajukan takedown bulan Maret adalah 50 akun dan profiling 3 akun komoditi 2 kosmetik 1 suplemen kersehatan
50	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	189 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	April	87.00	96.18	110.55%	"1. Telah dilakukan sampling sediaan farmasi sampai dengan bulan April sejumlah 361 sampel (Obat 95 sampel, OTSK 80 sampel dan kosmetik 168 sampel). Capaian jumlah sampel sd April sebesar 24,2% dari target awal 1492 sampel. 2. Telah dilaksanakan pengujian sampel Farmasi sd Bulan April : Obat : 65 sampel, OTSK : 85 sampel, dan kosmetik : 170 sampel "	Mengoptimalkan relaksasi anggaran untuk memenuhi jumlah dan jenis sampel sesuai target awal arahan : pinjam reagen dengan balai lain atau proses geser bulan berikutnya. target bulan juni : mendekatkan 50%	mei 2025	1	"Mengoptimalkan relaksasi anggaran untuk memenuhi jumlah dan jenis sampel sesuai target awal arahan : pinjam reagen dengan balai lain atau proses geser bulan berikutnya. target bulan juni : mendekatkan 50%"		"1. Telah dilakukan sampling sediaan farmasi sampai dengan bulan Mei sejumlah 575 sampel (Obat 161 sampel, OBA 128 sample, SK 34 sampel dan kosmetik 252 sampel). Capaian jumlah sampel sd Mei sebesar 38,5% dari target awal 1492 sampel. 2. Telah dilaksanakan pengujian sampel Farmasi sd Bulan Mei: Obat : 135 sampel, OTSK : 180 sampel, dan kosmetik : 268 sampel "
51	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	191 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	April	85.00	96.19	113.16%	1. Telah dilakukan sampling pangan olahan sampai dengan bulan April sejumlah 113 sampel dari target sampel awal 643 sampel sehingga capaian jumlah sampel sd April sebesar 17,6%	Mengoptimalkan relaksasi anggaran untuk memenuhi jumlah dan jenis sampel sesuai target awal arahan : pinjam reagen dengan balai lain atau proses geser bulan berikutnya. ada tambahan sampel kasus target bulan juni : mendekatkan 50%	Apr-25	1	"Mengoptimalkan relaksasi anggaran untuk memenuhi jumlah dan jenis sampel sesuai target awal arahan : pinjam reagen dengan balai lain atau proses geser bulan berikutnya. ada tambahan sampel kasus target bulan juni : mendekatkan 50%"		1. Telah dilakukan sampling pangan olahan sampai dengan bulan Mei sejumlah 238 sampel dari target sampel awal 643 sampel sehingga capaian jumlah sampel sd Mei sebesar 37,0%
52	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	192 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	April	100.00	100	100.00%	"Januari ada 1 sampel KLB yang masuk dan diuji (Ikky Jeli dari Dinkes Batang) = > TMS pengawet dan pemanis. Februari ada 1 sampel KLB yang masuk dan diuji (Bahan Seblak dan mie kuning) = > MS (uji logam berat dan mikro)"	Koordinasi dengan DKK jika ada kasus KLB terkait sampel yang bisa diuji oleh BBPOM di Semarang	mei 2025	1	Koordinasi dengan DKK jika ada kasus KLB terkait sampel yang bisa diuji oleh BBPOM di Semarang		"Januari ada 1 sampel KLB yang masuk dan diuji (Ikky Jeli dari Dinkes Batang) = > TMS pengawet dan pemanis. Februari ada 1 sampel KLB yang masuk dan diuji (Bahan Seblak dan mie kuning) = > MS (uji logam berat dan mikro)"

No	Nama Balai/UPT	Sasaran Strategis	Indikator	Bulan	Target	Realisasi	Capaian	Rekomendasi I						
								Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian Rekomendasi	Status	Tindak Lanjut		Kondisi Akhir
												Rencana Aksi	Timeline Penyelesaian Rencana Aksi	
53	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	193 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	April	80.00	82.99	103.74%	Pemenuhan target sampel 100.89%. Kesesuaian parameter uji 101.79%. Ketepatan pengambilan kesimpulan 100%. Ketepatan waktu pengambilan sampel 101.79%. Ketepatan waktu pelaporan 57.14% (cut off tgl 15 bulan berikutnya). Tindak lanjut sampel pirt 100%	-	mei 2025	1	-		Pemenuhan target sampel 100.89%. Kesesuaian parameter uji 100.00%. Ketepatan pengambilan kesimpulan 100%. Ketepatan waktu pengambilan sampel 56.14%. Ketepatan waktu pelaporan 100% (cut off tgl 15 bulan berikutnya). Tindak lanjut sampel pirt 75%
54	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	194 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	April	59.00	69.62	118.00%	10 sarana MD bulan Januari belum menyampaikan CAPA (sebagian besar UMKM Carica	Desk CAPA sarana Produksi Juni 2025	mei 2025	1	Desk CAPA sarana Produksi Juni 2025		"Monitoring dan evaluasi TL dan CAPA sampai dengan Mei : Pelaku Usaha = rekomendasi : 128 sudah TL : 202"
55	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	195 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	April	90.00	91.88	102.09%	"Penyampaian SIPT tidak lewat timeline tgl 10 (100%), sampai dengan 5 April keseuaian kesimpulan dan TL 100%. produksi obat 1 dari target tahunan 7 produksi OT 5 dari target tahunan 31 produksi Kosmetika 5 dari target tahunan 14"	"monitoring penjadwalan, untuk pemeriksaan sarana produksi mandiri ditambah di bulan Mei Pelatihan stemsel di Oktober 2025"	mei 2025	1	sudah dilakukan penambahan/ cakupan sarana yang diperiksa, sampai dengan Mei telah terealisasi sebesar 53,85% dari target tahun 2025		"Penyampaian SIPT tidak lewat timeline tgl 5 (100%), sampai dengan 5 Juni keseuaian kesimpulan dan TL 100%. Pemeriksaan Sarana Produksi telah mencapai 53,85% (28 sarana dari target 52 sarana) IF 3 dari target tahunan 7 IOT/UKOT/UMOT 13 dari target tahunan 26 IKOS 10 dari target tahunan 14"
56	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	196 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	April	85.00	90.91	106.95%	Pemeriksaan sarana produksi pangan olahan yang diperiksa pada bulan april sejumlah 14 sarana sehingga total sarana produksi pangan olahan yang diperiksa sampai dengan bulan april sejumlah 43 sarana. Target tahunan 147 sarana.	Disampaikan ke Petugas untuk tidak terlambat SIPTnya apel kamis disampaikan terkait pengisian SIPT terkait hasil pengawasan/report agar tidak terlambat	mei 2025	1	-		Pemeriksaan sarana produksi pangan olahan yang diperiksa sampai dengan bulan Mei sejumlah 60 sarana. Target tahunan 147 sarana.
57	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	197 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	April	96.75	104.12	107.62%	Pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi sesuai target sampai dengan April	Disampaikan ke Petugas untuk tidak terlambat SIPTnya apel kamis disampaikan terkait pengisian SIPT terkait hasil pengawasan/report agar tidak terlambat	mei 2025	1	"Disampaikan ke Petugas untuk tidak terlambat SIPTnya apel kamis disampaikan terkait pengisian SIPT terkait hasil pengawasan/report agar tidak terlambat"		Pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi sesuai target sampai dengan Mei
58	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	198 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	April	80.00	104.56	130.70%	Bulan April diperiksa 23 sarana melebihi target 10 sarana, sebagai tindak lanjut surat BPOM terkait produk pangan (marsmallow) mengandung DNA babi	Perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan sesuai dengan target tahunan 2025 sesuai dengan relaksasi anggaran yang ada	mei 2025	1	Agar realisasi tetap disesuaikan rencana. Pemeriksaan sarana sebagai tindak lanjut surat BPOM dapat dihitung sebagai capaian atau tidak, menyesuaikan rencana.		Realisasi bulan Mei 10 sarana, total Jan-Mei 80 sarana (51%) dari target 157 sarana.
59	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	199 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	April	85.87	99.04	115.34%	Pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan sampai dengan April sejumlah 457 iklan (34%) dari target iklan 1.353 iklan.	"cut off tanggal 6 untuk penarikan data -bersurat ke Bupati terkait:untuk pengambilan sampling obat publik jika tdk boleh sampling dilaporkan ke kemkes"	mei 2025	1	"cut off tanggal 6 untuk penarikan data -bersurat ke Bupati terkait:untuk pengambilan sampling obat publik jika tdk boleh sampling dilaporkan ke kemkes"		Pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan sampai dengan Mei sejumlah 615 iklan (45,45%) dari target iklan 1.353 iklan.
60	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	200 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	April	28.04	32.71	116.65%	Pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi sampai dengan April sebanyak 35 sarana	kesempatan desk dan jemput bola untuk garam... jika minyak dan tepung untuk desk capa dan pendampingan	mei 2025	1	kesempatan desk dan jemput bola untuk garam... jika minyak dan tepung untuk desk capa dan pendampingan		Pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi sampai dengan bulan Mei 2025 sejumlah 46 sarana. Target pemeriksaan sarana tahun 2025 sejumlah 58 sarana dengan bats waktu pelaksanaan sampai dengan Juli 2025.
61	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	208 - (PK AWAL) Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	April	70.31	82.4	117.20%	"1. Melaksanakan dan monitoring pengadaan peralatan laboratorium untuk pemenuhan standar peralatan. 2. Verifikasi metoda analisa dan penambahan ruang lingkup pada bulan April belum ditargetkan 3. Pemenuhan kompetensi personil masih sesuai dan dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan ruang lingkup "	"1. Rencana : pemenuhan kebutuhan reagen, media, gas dan kebutuhan suku cadang 2. Pengadaan peralatan alat laboratorium dengan anggaran setelah relaksasi "	mei 2025	1	"1. Rencana : pemenuhan kebutuhan reagen, media, gas dan kebutuhan suku cadang 2. Pengadaan peralatan alat laboratorium dengan anggaran setelah relaksasi "		"1. Melaksanakan dan monitoring pengadaan peralatan laboratorium untuk pemenuhan standar peralatan. 2. Verifikasi metoda analisa dan penambahan ruang lingkup pada bulan Mei masih dalam proses 3. Pemenuhan kompetensi personil masih sesuai dan dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan ruang lingkup 4. Mengajukan revisi target SKL TW 3 2025, serta target SKL 2025 sd 2029"
62	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	209 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	April	86.42	85.56	99.00%	"Telah dilakukan KIE bersama tokoh masyarakat 10 titik Indeks efektifitas KIE s/d April 85.56 "	"Melaksanakan KIE berikutnya sehingga target jumlah orang yang menerima KIE bulan Mei dapat dicapai. Memberikan penjelasan lebih detail kepada peserta ttg maksud dan isi survey efektifitas KIE bu nafa nambah realisasinya di akhir mei/juni sudah selesai semua"	mei 2025	1	"Melaksanakan KIE berikutnya sehingga target jumlah orang yang menerima KIE bulan Mei dapat dicapai. Memberikan penjelasan lebih detail kepada peserta ttg maksud dan isi survey efektifitas KIE bu nafa nambah realisasinya di akhir mei/juni sudah selesai semua"		"Telah dilakukan KIE bersama tokoh masyarakat sejumlah 4 titik Indeks efektifitas KIE s/d Mei 86,81 "
63	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	210 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	April	52.50	58	110.48%	Bulan April telah dilaksanakan Sosialisasi Keamanan Pangan dan Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah. Tahap Selanjutnya adalah monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah pada bulan Mei - Juni	Melaksanakan tahapan selanjutnya yaitu monitoring Pemberdayaan Kader keamanan Pangan sesuai dengan juknis dan timeline dari pusat	mei 2025	1	Melaksanakan tahapan selanjutnya yaitu monitoring Pemberdayaan Kader keamanan Pangan sesuai dengan juknis dan timeline dari pusat		Pada Bulan Mei dilaksanakan sosialisasi melalui media sosial Balai Besar POM di Semarang dan Media sosial sekolah intervensi, diharapkan sekolah dapat memperbanyak infografis tersebut untuk ditempel di kantin sekolah/lingkungan sekolah untuk meningkatkan kesadaran komunitas sekolah dalam m,embudayakan keamanan pangan. Pengawalan terhadap sekolah intervensi tahun 2024 untuk refresh materi tentang keamanan pangan. Tahap selanjutnya yaitu monироring terhadap penyusunan laporan dan renca aksi sekolah intervensi 2025.
64	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	211 - Jumlah desa pangan aman	April	38.00	38	100.00%	Pada bulan April telah dilaksanakan Bimtek Kader Keamanan Pangan Desa, tahap selanjutnya adalah Bimtek Komunitas direncanakan akan dilaksanakan di Desa Bejalen, Desa Kemambang, dan Desa Asinan pada bulan Mei	Melaksanakan tahapan selanjutnya yaitu Bimtek Komunitas di Desa Bejalen, Desa Kemambang, dan Desa Asinan sesuai dengan juknis dan timeline dari pusat	mei 2025	1	Melaksanakan tahapan selanjutnya yaitu Bimtek Komunitas di Desa Bejalen, Desa Kemambang, dan Desa Asinan sesuai dengan juknis dan timeline dari pusat		Pada bulan Mei telah dilaksanakan Bimtek Keamanan Pangan Bagi Komunitas Desa Bejalen, Desa Kemambang, dan Desa Asinan, serta pengawalan untuk seluruh desa yang diintervensi tahun 2020-2024, Pengawalan dilakukan melalui komunikasi di wa grup desa dengan mengundang kader desa dalam kegiatan sosialisasi atau webinar secara on line yang diselenggarakan oleh Badan POM dan kegiatan inovasi SHARASEHAN (Sharing InformasiTentang Obat & Makanan Yang Sehat Dan Aman), tahap selanjutnya adalah Monev direncanakan akan dilaksanakan di Desa Bejalen, dan Desa Kemambang pada bulan Juni
65	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	212 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	April	55.00	55	100.00%	"Sampai bulan April telah dilaksanakan tahap Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar dan Sosialiasi Keamanan Pasar Kepada Komunitas Pasar tahap 1, tahap selanjutnya yaitu Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar tahap 2 dan tahap 3, Pengawasan Keamanan Pangan, serta Pengawalan Pasar Intervensi Tahun 2024 yaitu Pasar Bandungan, Pasar Warung Lanang dan Pasar Batang yang direncanakan pada bulan Mei "	"Melaksanakan tahapan selanjutnya yaitu Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar tahap 2 dan tahap 3, Pengawasan Keamanan Pangan, serta Pengawalan Pasar Intervensi Tahun 2024 yaitu Pasar Bandungan, Pasar Warung Lanang dan Pasar Batang yang direncanakan pada bulan Mei "	mei 2025	1	Melaksanakan tahapan selanjutnya yaitu Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar tahap 2 dan tahap 3, Pengawasan Keamanan Pangan, serta Pengawalan Pasar Intervensi Tahun 2024 yaitu Pasar Bandungan, Pasar Warung Lanang dan Pasar Batang		"Pada Bulan Mei telah dilaksanakan tahap Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar tahap 2 dan tahap 3, Pengawasan Keamanan Pangan, serta Pengawalan Pasar Intervensi Tahun 2024 yaitu Pasar Bandungan, Pasar Warung Lanang dan Pasar Batang . Tahap selanjutnya yaitu Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar Tahap 4, Monitoring Evaluasi melalui penyusunan rencana aksi tahun 2026 dan Pengawalan Pasar Intervensi Tahun 2024 yaitu Pasar Panican, Pasar Badog Bancar dan Pasar Lengkong pada Bulan Juni 2025 "

No	Nama Balai/UPT	Sasaran Strategis	Indikator	Bulan	Target	Realisasi	Capaian	Rekomendasi I						
								Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian Rekomendasi	Status	Tindak Lanjut		Kondisi Akhir
												Rencana Aksi	Timeline Penyelesaian Rencana Aksi	
66	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	213 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	April	48.50	50	103.09%	"1. Telah dilaksanakan Bimtek secara daring untuk pelaku usaha pangan yang menjadi target pendampingan 2. Telah dilaksanakan pendampingan terhadap 20 sarana pangan (daring)"	rencana dicarikan UMKM baru untuk menggantikan target	mei 2025	1	rencana dicarikan UMKM baru untuk menggantikan target		"1. Sarana pengganti yang mengundurkan diri untuk komoditi pangan : Tani bangun agromakmur 2. Telah dilaksanakan pendampingan secara langsung ke 5 sarana (4 Pangan, ikos 1) 3. Telah dilaksanakan pendampingan terhadap 5 sarana pangan (daring)"
67	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	214 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	April	37.50	42.86	114.29%	Telah dilakukan penyidikan terhadap 1 perkara yang merupakan penyelesaian target perkara 2025	Dilakukan investigasi yang lebih intensif sehingga target perkara yang seharusnya berada di Bulan April dapat segera terlaksana di Bulan Mei	mei 2025	1	Target perkara bulan April sebanyak 2 perkara telah dipenuhi pada bulan Mei yaitu 2 perkara, namun demikian ada tindak pidana yang harus segera dilakukan operasi penertiban (penyidikan) sehingga capaian bulan Mei menjadi 3 perkara		Telah dilakukan penyidikan terhadap 3 perkara pada bulan Mei 2025 dan telah dilakukan tahap penyerahan tersangka dan barang bukti sebanyak 1 perkara ke Kejaksaan Negeri Semarang untuk perkara tahun 2025
68	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	215 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	April	50.00	50	100.00%	sudah dilakukan input akun yang diajukan takedown dan laporan profilling sebelum tenggat waktu tanggal 25 di tiap bulannya; jumlah akun yang diajukan takedown bulan Maret adalah 50 akun dan profiling 3 akun komoditi 2 kosmetik 1 suplemen kersehatan	melakukan pengajuan takedown dan pengisian data profilling sebelum tenggat waktu tanggal 25 di tiap bulannya	mei 2025	1	melakukan pengajuan takedown dan pengisian data profilling sebelum tenggat waktu tanggal 25 di tiap bulannya		sudah dilakukan input akun yang diajukan takedown dan laporan profilling sebelum tenggat waktu tanggal 25 di tiap bulannya; jumlah akun yang diajukan takedown bulan Mei adalah 51 akun dan profiling 4 akun komoditi kosmetik
69	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	189 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Mei	87.00	97.84	112.46%	"1. Telah dilakukan sampling sediaan farmasi sampai dengan bulan Mei sejumlah 575 sampel (Obat 161 sampel, OBA 128 sample, SK 34 sampel dan kosmetik 252 sampel). Capaian jumlah sampel sd Mei sebesar 38,5% dari target awal 1492 sampel. 2. Telah dilaksanakan pengujian sampel Farmasi sd Bulan Mei: Obat : 135 sampel, OTSK : 180 sampel, dan kosmetik : 268 sampel "	cukup	Juni 2025	1	minggu ini bahas di regionalisasi selasa depan	Juni 2025	"1. Telah dilakukan sampling sediaan farmasi sampai dengan bulan Junii sejumlah 753 sampel (Obat 220 sampel, OBA 169 sample, SK 44 sampel dan kosmetik 252 sampel). Capaian jumlah sampel sd Juni sebesar 50,47% dari target awal 1492 sampel. 2. Telah dilaksanakan pengujian sampel Farmasi sd Bulan Juni (sampel Rutin Semarang) Obat : 193 sampel, OTSK dan kuasi : 253 sampel, dan kosmetik : 320 sampel . Capaian jumlah sampel sd Juni sebesar 52,0% dari target awal 1492 sampel. "
70	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	191 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Mei	85.00	99.88	117.51%	1. Telah dilakukan sampling pangan olahan sampai dengan bulan Mei sejumlah 238 sampel dari target sampel awal 643 sampel sehingga capaian jumlah sampel sd Mei sebesar 37,0%	"pengadaan reagen media sudah dilakukan rencana pemenuhan suku cadang dari sisa optimalisasi belanja modal untuk gaji pppk "	Juni 2025	1	Perencanaan jumlah dan jenis sampel yang masuk diupayakan untuk dikoordinasikan dengan baik kepada pihak inspeksi, dan pejabat pengadaan	Juni 2025	1. Telah dilakukan sampling pangan olahan sampai dengan bulan Juni sejumlah 362 sampel dari target sampel awal 643 sampel sehingga capaian jumlah sampel sd Mei sebesar 56,29,0%
71	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	192 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Mei	100.00	100	100.00%	"Januari ada 1 sampel KLB yang masuk dan diuji (Ikky Jeli dari Dinkes Batang) = > TMS pengawet dan pemanis. Februari ada 1 sampel KLB yang masuk dan diuji (Bahan Seblak dan mie kuning) = > MS (uji logam berat dan mikro)"	Koordinasi dengan DKK jika ada kasus KLB terkait sampel yang bisa diuji oleh BBPOM di Semarang, di cek dinkes ditekan terkait MBG didalami apakah ada KLB atau tidak?koordinasi dengan labkesda terkait rujukan keracunan dg katim pjas	Juni 2025	1	Koordinasi dengan DKK jika ada kasus KLB terkait sampel yang bisa diuji oleh BBPOM di Semarang, di cek dinkes ditekan terkait MBG didalami apakah ada KLB atau tidak?koordinasi dengan labkesda terkait rujukan keracunan dg katim pjas	Juni 2025	"Januari ada 1 sampel KLB yang masuk dan diuji (Ikky Jeli dari Dinkes Batang) = > TMS pengawet dan pemanis. Februari ada 1 sampel KLB yang masuk dan diuji (Bahan Seblak dan mie kuning) = > MS (uji logam berat dan mikro)"
72	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	193 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Mei	80.00	90.79	113.49%	Pemenuhan target sampel 100.89%. Kesesuaian parameter uji 100.00%. Ketepatan pengambilan kesimpulan 100%. Ketepatan waktu pengambilan sampel 56.14%. Ketepatan waktu pelaporan 100% (cut off tgl 15 bulan berikutnya). Tindak lanjut sampel pirt 75%	bersurat dulu, pengawasan mengikuti jadwal... ke dinkes hingga bupati sebelum tanggal 15 Juni 2025	Juni 2025	1	menggunakan target baru di TW berikutnya	Juni 2025	Pemenuhan target sampel 100.89%. Kesesuaian parameter uji 100.00%. Ketepatan pengambilan kesimpulan 100%. Ketepatan waktu pengambilan sampel 56.14%. Ketepatan waktu pelaporan 100% (cut off tgl 15 bulan berikutnya). Tindak lanjut sampel pirt 100%
73	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	194 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Mei	63.00	63.37	100.59%	"Monitoring dan evaluasi TL dan CAPA sampai dengan Mei : Pelaku Usaha = rekomendasi : 128 sudah TL : 202"	Desk CAPA sarana Produksi Juli 2025	Juli 2025	0	Desk CAPA sarana Produksi Juli 2025	Juli 2025	"Monitoring dan evaluasi TL dan CAPA sampai dengan Juni : Pelaku Usaha = rekomendasi : 233 sudah TL : 379"
74	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	195 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Mei	90.00	94.68	105.20%	"Penyampaian SIPT tidak lewat timeline tgl 5 (100%), sampai dengan 5 Juni keseuaian kesimpulan dan TL OT-Kos 100%. Pemeriksaan Sarana Produksi telah mencapai 53,85% (28 sarana dari target 52 sarana) IF 3 dari target tahunan 7 IOT/UKOT/UMOT 13 dari target tahunan 26 IKOS 10 dari target tahunan 14"	"Menambah frekuensi monitoring penyelesaian TL dan SiPT Pelatihan stemsel di Oktober 2025"	Juni 2025	1	"mengganti sarana dengan bobot risiko tertinggi selanjutnya (juli) Rencana Pelatihan Stemsel di Oktober 2025"	Juni 2025	"Penyampaian SIPT tidak lewat timeline tgl 5 (100%), sampai dengan 5 Juni keseuaian kesimpulan dan TL OT-Kos 100%. Pemeriksaan Sarana Produksi telah mencapai 69,23% (36 sarana dari target 52 sarana) IF 57,14% (4 dari target tahunan 7) IOT/UKOT/UMOT 69,23% (18 dari target tahunan 26) IKOS 78,57% (11 dari target tahunan 14) ISK 60% (3 dari target tahunan 5)"
75	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	196 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Mei	85.00	93.33	109.80%	Pemeriksaan sarana produksi pangan olahan yang diperiksa sampai dengan bulan Mei sejumlah 60 sarana. Target tahunan 147 sarana.	Sesuai target	-	1	Sesuai target	-	%ketepatan waktu 87,65%. Ketepatan tindak lanjut 75,31%.Evaluasi ketepatan grading 100%
76	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	197 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Mei	96.75	103.5	106.98%	Pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi sesuai target sampai dengan Mei	Monev sesuai target, buatkan tim pokja reminder laporan pengawasan, 30 bln sebelumnya agar menyampaikan laporan sebelum tgl 5 bulan setelahnya.	Juni 2025	1	-	-	Pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi sesuai target sampai dengan Juni
77	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	198 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Mei	80.00	87.26	109.08%	Realisasi bulan Mei 10 sarana, total Jan-Mei 80 sarana (51%) dari target 157 sarana.	Monev sesuai target	Juni 2025	1	-	-	Realisasi bulan Juni 10 sarana, total Jan-Juni 90 sarana (57,3%) dari target 157 sarana.
78	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	199 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Mei	85.87	96.62	112.52%	Pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan sampai dengan Mei sejumlah 615 iklan (45,45%) dari target iklan 1.353 iklan.	Monev sesuai target	Juni 2025	1	-	-	Pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan sampai dengan Juni sejumlah 733 iklan (54%) dari target iklan 1.353 iklan.
79	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	200 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Mei	39.25	42.99	109.53%	Pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi sampai dengan bulan Mei 2025 sejumlah 46 sarana. Target pemeriksaan sarana tahun 2025 sejumlah 58 sarana dengan bats waktu pelaksanaan sampai dengan Juli 2025.	"koordinasi dengan sertifikasi, untuk garam ada kontrak produksi atau blm?cppob msh aktif atau tidak? dilakukan pengawasan bersama "	Juni 2025	1	Sesuai target	Sesuai target	Pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi sampai dengan Juni sejumlah 56 sarana. Target pemeriksaan sarana fortifikasi sejumlah 58 sarana dan dikerjakan sampai bulan Juli 2025.
80	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	208 - (PK AWAL) Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Mei	70.31	82.4	117.20%	"1. Melaksanakan dan monitoring pengadaan peralatan laboratorium untuk pemenuhan standar peralatan. 2. Verifikasi metoda analisa dan penambahan ruang lingkup pada bulan Mei masih dalam proses 3. Pemenuhan kompetensi personil masih sesuai dan dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan ruang lingkup 4. Mengajukan revisi target SKL TW 3 2025, serta target SKL 2025 sd 2029"	"1. Rencana : pemenuhan kebutuhan reagen, media, gas dan kebutuhan suku cadang 2. Pengadaan peralatan alat laboratorium dengan anggaran setelah relaksasi 20 Juni batas akhir pengisian daduk SKL"	Juni 2025	1	Monev sesuai target	Juni 2025	"1. Melaksanakan dan monitoring pemenuhan ruang lingkup laboratorium TW 2, capaian 85,4 dari target 83 % 2. Melaksanakan dan monitoring pengadaan peralatan laboratorium untuk pemenuhan standar peralatan TW 2, capaian 85,8% dari target 84 % 3. Melaksanakan verifikasi metoda analisa TW 2, capaian 49,1% dari target 47 % 4. Monitoring Pemenuhan kompetensi personil TW 2, capaian 70% dari target 90 % 5. Secara keseluruhan Pemenuhan SKL TW 2 tercapai 108,1 % (capaian 78,8 % dari target TW 2 sebesar 72,87 % "
81	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	209 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Mei	86.42	86.81	100.45%	"Telah dilakukan KIE bersama tokoh masyarakat sejumlah 4 titik Indeks efektifitas KIE s/d Mei 86,81 "	tampilkan layar terkait materi survei dipandu pengisian survei, penekanan di pemahaman peserta, tomas jg menyampaikan lg	Juni 2025	1	Monev sesuai target	Juni 2025	"Telah dilakukan KIE bersama tokoh masyarakat sejumlah 8 titik jumlah peserta 1542, Indeks efektifitas KIE s/d juni 87,21 "

No	Nama Balai/UPT	Sasaran Strategis	Indikator	Bulan	Target	Realisasi	Capaian	Rekomendasi I						
								Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian Rekomendasi	Status	Tindak Lanjut		Kondisi Akhir
												Rencana Aksi	Timeline Penyelesaian Rencana Aksi	
82	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	210 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Mei	55.70	60	107.72%	Pada Bulan Mei dilaksanakan sosialisasi melalui media sosial Balai Besar POM di Semarang dan Media sosial sekolah intervensi, diharapkan sekolah dapat memperbanyak infografis tersebut untuk ditempel di kantin sekolah/lingkungan sekolah untuk meningkatkan kesadaran komunitas sekolah dalam m,embudayakan keamanan pangan. Pengawalan terhadap sekolah intervensi tahun 2024 untuk refresh materi tentang keamanan pangan. Tahap selanjutnya yaitu monироring terhadap penyusunan laporan dan renca aksi sekolah intervensi 2025.	Melaksanakan tahapan selanjutnya yaitu monitoring Pemberdayaan Kader keamanan Pangan sesuai dengan juknis dan timeline dari pusat	Juni 2025	1	-	-	Pada bulan Juni telah dilaksanakan monitoring penyusunan laporan kegiatan Sekilah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan, dan pengawalan terhadap sekolah intervensi tahun 2024 terhadap kontinuitas pelaksanakan PJAS aman di sekolahnya.
83	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	211 - Jumlah desa pangan aman	Mei	47.50	58	122.11%	Pada bulan Mei telah dilaksanakan Bimtek Keamanan Pangan Bagi Komunitas Desa Bejalen, Desa Kemambang, dan Desa Asinan, serta pengawalan untuk seluruh desa yang diintervensi tahun 2020-2024, Pengawalan dilakukan melalui komunikasi di wa grup desa dengan mengundang kader desa dalam kegiatan sosialisasi atau webinar secara on line yang diselenggarakan oleh Badan POM dan kegiatan inovasi SHARASEHAN (Sharing InformasiTentang Obat & Makanan Yang Sehat Dan Aman), tahap selanjutnya adalah Monev direncanakan akan dilaksanakan di Desa Bejalen, dan Desa Kemambang pada bulan Juni	Melaksanakan tahapan selanjutnya yaitu Monev di Desa Bejalen, Desa Kemambang, sesuai dengan juknis dan timeline dari pusat	Juni 2025	1	Melaksanakan tahapan selanjutnya yaitu Monev di Desa Bejalen, Desa Kemambang, sesuai dengan juknis dan timeline dari pusat	Juni 2025	Pada bulan Mei telah dilaksanakan Bimtek Keamanan Pangan Bagi Komunitas Desa Bejalen, Desa Kemambang, dan Desa Asinan, serta pengawalan untuk seluruh desa yang diintervensi tahun 2020-2024, Pengawalan dilakukan melalui komunikasi di wa grup desa dengan mengundang kader desa dalam kegiatan sosialisasi atau webinar secara on line yang diselenggarakan oleh Badan POM dan kegiatan inovasi SHARASEHAN (Sharing InformasiTentang Obat & Makanan Yang Sehat Dan Aman), tahap selanjutnya adalah Monev direncanakan akan dilaksanakan di Desa Bejalen, dan Desa Kemambang pada bulan Juni
84	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	212 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Mei	80.00	80	100.00%	"Pada Bulan Mei telah dilaksanakan tahap Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar tahap 2 dan tahap 3, Pengawasan Keamanan Pangan, serta Pengawalan Pasar Intervensi Tahun 2024 yaitu Pasar Bandungan, Pasar Warung Lanang dan Pasar Batang . Tahap selanjutnya yaitu Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar Tahap 4, Monitoring Evaluasi melalui penyusunan rencana aksi tahun 2026 dan Pengawalan Pasar Intervensi Tahun 2024 yaitu Pasar Panican, Pasar Badog Bancar dan Pasar Lengkong pada Bulan Juni 2025 "	Melaksanakan tahapan selanjutnya yaitu Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar Tahap 4, Monitoring Evaluasi melalui penyusunan rencana aksi tahun 2026 dan Pengawalan Pasar Intervensi Tahun 2024 yaitu Pasar Panican, Pasar Badog Bancar dan Pasar Lengkong pada Bulan Juni 2025 sesuai dengan juknis dan timeline dari pusat	Juni 2025	1	Monev sesuai target	-	"Pada Bulan Juni telah dilaksanakan Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar Tahap 4, Monitoring Evaluasi melalui penyusunan rencana aksi tahun 2026 dan Pengawalan Pasar Intervensi Tahun 2024 yaitu Pasar Panican, Pasar Badog Bancar dan Pasar Lengkong "
85	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	213 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Mei	56.67	61.67	108.82%	"1. Sarana pengganti yang mengundurkan diri untuk komoditi pangan : Tani bangun agromakmur 2. Telah dilaksanakan pendampingan secara langsung ke 5 sarana (4 Pangan, ikos 1) 3. Telah dilaksanakan pendampingan terhadap 5 sarana pangan (daring)"	-	-	1	Melaksanakan tahapan selanjutnya yaitu monitoring Pemberdayaan Kader keamanan Pangan sesuai dengan juknis dan timeline dari pusat	-	GMP tercapai 3 akan menjadi 4, kosmetik 3 akan menjadi 4 di TW 3, pangan masih kurang 6, sudah berproses evaluasi, ipcpob : 15 sertifikat
86	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	214 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Mei	40.00	47.14	117.85%	Telah dilakukan penyidikan terhadap 3 perkara pada bulan Mei 2025 dan telah dilakukan tahap penyerahan tersangka dan barang bukti sebanyak 1 perkara ke Kejaksaan Negeri Semarang untuk perkara tahun 2024	RTL: Target bulan Juni adalah 1 perkara (Target TW 2 adalah 4 perkara), dengan capaian bulan April 1 perkara dan Mei 3 perkara maka target TW 2 telah tercapai sehingga bulan Juni tidak dilakukan lagi operasi penertiban, agar capaian kinerja di TW 2 tidak terlampaui.	Juni 2025	1	Melaksanakan tahapan selanjutnya yaitu Monev di Desa Asinan, sesuai dengan juknis dan timeline dari pusat	Juni 2025	Telah dilakukan penyidikan terhadap 3 perkara pada bulan Mei 2025 sehingga tidak dilakukan operasi penertiban di Bulan Juni karena target TW 2 telah terpenuhi sebanyak 4 perkara
87	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	215 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Mei	50.00	50	100.00%	sudah dilakukan input akun yang diajukan takedown dan laporan profilling sebelum tenggat waktu tanggal 25 di tiap bulannya; jumlah akun yang diajukan takedown bulan Mei adalah 51 akun dan profiling 4 akun komoditi kosmetik	melakukan pengajuan takedown dan pengisian data profilling sebelum tenggat waktu tanggal 25 di tiap bulannya	Juni 2025	1	"- Seluruh rangkaian pembentukan Pasar Pangan Aman Berbasisi Komunitas (PPABK) telah selesai dilaksanakan - pengawalan pasar di viralkan di medsos - rencana agustus kegiatan pramuka untuk kunjungan pasar dan layanan cekatan"	Juni 2025	sudah dilakukan input akun yang diajukan takedown dan laporan profilling sebelum tenggat waktu tanggal 25 di tiap bulannya; jumlah akun yang diajukan takedown bulan Juni adalah 51 akun dan profiling 3 akun komoditi kosmetik 1akun komoditi Suplemen Kesehatan
88	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	189 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	87.00	99.17	113.99%	1. Telah dilakukan sampling sediaan farmasi sampai dengan bulan Juni sejumlah 753 sampel (Obat 220 sampel, OBA 169 sample, SK 44 sampel dan kosmetik 252 sampel). Capaian jumlah sampel sd Juni sebesar 50,47% dari target awal 1492 sampel. 2. Telah dilaksanakan pengujian sampel Farmasi sd Bulan Juni (sampel Rutin Semarang) Obat : 193 sampel, OTSK dan kuasi : 253 sampel, dan kosmetik : 320 sampel . Capaian jumlah sampel sd Juni sebesar 52,0% dari target awal 1492 sampel.	minggu ini bahas di regionalisasi selasa depan	Juli 2025	1	Sudah terlaksana	Juli 2025	1. Telah dilakukan sampling sediaan farmasi sampai dengan bulan Juli sejumlah 925 sampel (Obat 277 sampel, OBA 209 sample, SK 52 sampel dan kosmetik 386 sampel). Capaian jumlah sampel sd Juli sebesar 61.99% dari target awal 1492 sampel. 2. Telah dilaksanakan pengujian sampel Farmasi sd Bulan Juli (sampel Rutin Semarang) Obat : 254 sampel, OTSK dan kuasi : 350 sampel, dan kosmetik : 490 sampel .
89	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	191 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	85.00	99.92	117.55%	1. Telah dilakukan sampling pangan olahan sampai dengan bulan Juni sejumlah 362 sampel dari target sampel awal 643 sampel sehingga capaian jumlah sampel sd Mei sebesar 56,29,0%	Perencanaan jumlah dan jenis sampel yang masuk diupayakan untuk dikoordinasikan dengan baik kepada pihak inspeksi, dan pejabat pengadaan	Juli 2025	1	Perencanaan jumlah dan jenis sampel yang masuk diupayakan untuk dikoordinasikan dengan baik kepada pihak inspeksi, dan pejabat pengadaan terkait pengadaan reagen	Juli 2025	1. Telah dilakukan sampling pangan olahan sampai dengan bulan Juli sejumlah 427 sampel dari target sampel awal 643 sampel sehingga capaian jumlah sampel sd Juli sebesar 66,4%
90	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	192 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Juni	100.00	100	100.00%	Januari ada 1 sampel KLB yang masuk dan diuji (Ikky Jeli dari Dinkes Batang) = > TMS pengawet dan pemanis. Februari ada 1 sampel KLB yang masuk dan diuji (Bahan Seblak dan mie kuning) = > MS (uji logam berat dan mikro)	Koordinasi dengan DKK jika ada kasus KLB terkait sampel yang bisa diuji oleh BBPOM di Semarang, di cek dinkes ditekan terkait MBG didalami apakah ada KLB atau tidak?koordinasi dengan labkesda terkait rujukan keracunan dg katim pjas	Juli 2025	1	Koordinasi dengan DKK jika ada kasus KLB terkait sampel yang bisa diuji oleh BBPOM di Semarang, di cek dinkes ditekankan terkait MBG didalami apakah ada KLB atau tidak?koordinasi dengan labkesda terkait rujukan keracunan dg katim pjas	Juli 2025	Januari ada 1 sampel KLB yang masuk dan diuji (Ikky Jeli dari Dinkes Batang) = > TMS pengawet dan pemanis. Februari ada 1 sampel KLB yang masuk dan diuji (Bahan Seblak dan mie kuning) = > MS (uji logam berat dan mikro)
91	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	193 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	80.00	95.79	119.74%	Pemenuhan target sampel 100.89%. Kesesuaian parameter uji 100.00%. Ketepatan pengambilan kesimpulan 100%. Ketepatan waktu pengambilan sampel 56.14%. Ketepatan waktu pelaporan 100% (cut off tgl 15 bulan berikutnya). Tindak lanjut sampel pirt 100%	menggunakan target baru di TW berikutnya	Juli 2025	1	menggunakan target baru di TW berikutnya	Juli 2025	Pemenuhan target sampel PIRT 100,89%, Kesesuaian Parameter Uji 100%, Ketetapatan Pengambilan Kesimpulan 100%, Ketepatan waktu pengambilan sampel 56,14%, Ketepatan Waktu Pelaporan 100%, Tindak lanjut sampel PIRT 100%
92	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	194 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Juni	66.00	61.48	93.15%	Monitoring dan evaluasi TL dan CAPA sampai dengan Juni : Pelaku Usaha = rekomendasi : 233 sudah TL : 379	Desk CAPA sarana Produksi Juli 2025	Juli 2025	1	Desk CAPA sarana Produksi Juli 2025	Juli 2025	Monitoring dan evaluasi TL dan CAPA sampai dengan Juli : Pelaku Usaha = rekomendasi : 414 sudah TL (CAPA) : 259

No	Nama Balai/UPT	Sasaran Strategis	Indikator	Bulan	Target	Realisasi	Capaian	Rekomendasi I						
								Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian Rekomendasi	Status	Tindak Lanjut		Kondisi Akhir
												Rencana Aksi	Timeline Penyelesaian Rencana Aksi	
93	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	195 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	90.00	95.73	106.37%	Penyampaian SIPT tidak lewat timeline tgl 5 (100%), sampai dengan 5 Juni keseuaian kesimpulan dan TL OT-Kos 100%. Pemeriksaan Sarana Produksi telah mencapai 69,23% (36 sarana dari target 52 sarana) IF 57,14% (4 dari target tahunan 7) IOT/UKOT/UMOT 69,23% (18 dari target tahunan 26) IKOS 78,57% (11 dari target tahunan 14) ISK 60% (3 dari target tahunan 5)	mengganti sarana dengan bobot risiko tertinggi selanjutnya (juli) Rencana Pelatihan Stemsel di Oktober 2025	Juli 2025	1	sarana yang tutup telah diganti dengan sarana berbobot risiko tertinggi selanjutnya (juli)	Juli 2025	Pemeriksaan Sarana Produksi telah mencapai 80,77% (36 sarana dari target 52 sarana) IF 57,14% (4 dari target tahunan 7) IOT/UKOT/UMOT 80,76% (21 dari target tahunan 26) IKOS 78,57% (13 dari target tahunan 14) ISK 60% (4 dari target tahunan 5) Penyampaian hasil pemriksaan melalui SIPT, sampai dengan 5 Agt kesesuaian kesimpulan dan TL Kos 100%.
94	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	208 - (PK AWAL) Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Juni	72.87	78.8	108.14%	1. Melaksanakan dan monitoring pemenuhan ruang lingkup laboratorium TW 2, capaian 85,4 dari target 83 % 2. Melaksanakan dan monitoring pengadaan peralatan laboratorium untuk pemenuhan standar peralatan TW 2, capaian 85,8% dari target 84 % 3. Melaksanakan verifikasi metoda analisa TW 2, capaian 49,1% dari target 47 % 4. Monitoring Pemenuhan kompetensi personil TW 2, capaian 70% dari target 90 % 5. Secara keseluruhan Pemenuhan SKL TW 2 tercapai 108,1 % (capaian 78,8 % dari target TW 2 sebesar 72,87 %	1. Revisi target SKL TW 3 dan TW 4 th 2025 sudah disetujui P3OMN, nantinya akan diajukan ke Roren sebelum Timeline Revisi	Juli 2025	1	1. Revisi target SKL TW 3 dan TW 4 th 2025 sudah disetujui P3OMN, nantinya akan diajukan ke Roren sebelum Timeline Revisi	Juli 2025	1. Melaksanakan pemenuhan ruang lingkup laboratorium TW 3, Laboratorium kosmetik menambah satu ruang lingkup 2. Monitoring pengadaan peralatan laboratorium untuk meningkatan pemenuhan standar peralatan 3. Membuat jadwal verifikasi metoda analisa TW 3 dari masing-masing laboratorium 4. Melaksanakan dan monitoring Pemenuhan kompetensi personil di TW 3, telah ada penambahan kemampuan personil di Lab Obat dan Lab Kosmetik sesuai ruang lingkup
95	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	210 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Juni	62.65	62.65	100.00%	Pada bulan Juni telah dilaksanakan monitoring penyusunan laporan kegiatan Sekilah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan, dan pengawalan terhadap sekolah intervensi tahun 2024 terhadap kontinuitas pelaksanakan PJAS aman di sekolahnya.	Melaksanakan tahapan selanjutnya yaitu monitoring Pemberdayaan Kader keamanan Pangan sesuai dengan juknis dan timeline dari pusat	Juli 2025	1	Tahap selanjutnya yaitu sertifikasi sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dan Piagam Bintang Keamanan Pangan Kantin Sekolah	Juli 2025	Pada Bulan Juli telah dilaksanakan - monitoring kader keadaman pangan sekolah dan verifikasi sekolah dalam rangka sertifikasi sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan - sosialisasi budaya keamanan pangan melalui medsos - pengawalan terhadap sekolah intervensi 2024 dengan refresh materi melalui WAG, Sarasehan, Paman Kece - perluasan sekolah sebagai nara sumbe di MPLS SD Antonius 02, di Kab.Wonosobo (MTs Ma'arif Garung dan SDN 3 Kembaran), dan Kab. Sukoharjo (74 SMP Swasta & Negeri)
96	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	211 - Jumlah desa pangan aman	Juni	54.20	64.7	119.37%	Pada bulan Juni telah dilaksanakan monev di Desa Bejalen, dan Desa Kemambang	Melaksanakan tahapan selanjutnya yaitu Monev di Desa Asinan, sesuai dengan juknis dan timeline dari pusat	Juli 2025	1	Pelaksanaan tahap selanjutnya yaitu tahap pengawalan yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2025, namun telah dilaksanakan lebih awal pada TW II	Juli 2025	Pada bulan Juli telah dilaksanakan monev di Desa Asinan
97	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	189 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juli	87.00	100.54	115.56%	"1. Telah dilakukan sampling sediaan farmasi sampai dengan bulan Junii sejumlah 753 sampel (Obat 220 sampel, OBA 169 sample, SK 44 sampel dan kosmetik 252 sampel). Capaian jumlah sampel sd Juni sebesar 50,47% dari target awal 1492 sampel. 2. Telah dilaksanakan pengujian sampel Farmasi sd Bulan Juni (sampel Rutin Semarang) Obat : 193 sampel, OTSK dan kuasi : 253 sampel, dan kosmetik : 320 sampel . Capaian jumlah sampel sd Juni sebesar 52,0% dari target awal 1492 sampel. "	"1. Tidak ada kendala "	-	1	-	-	"1. Telah dilakukan sampling sediaan farmasi sampai dengan bulan Juli sejumlah 925 sampel (Obat 277 sampel, OBA 209 sample, SK 52 sampel dan kosmetik 386 sampel). Capaian jumlah sampel sd Juli sebesar 61.99% dari target awal 1492 sampel. 2. Telah dilaksanakan pengujian sampel Farmasi sd Bulan Juli (sampel Rutin Semarang) Obat : 254 sampel, OTSK dan kuasi : 350 sampel, dan kosmetik : 490 sampel . "
98	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	190 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Juli		0	0	Dilaksanakan tanggal 4 Februari 2025 dengan target 90 fasilitas pelayanan kesehatan dan refreshment PV dalam acara Sharasehan tanggal 25 April 2025 terhadap peserta Bimtek PV tanggal 4 Februari 2025. Sampai dengan Mei 2025, sudah ada 25 fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang sudah melaporkan e-meso yang terdiri dari 23 rumah sakit, 1 PKM, 1 klinik. Capaian sd Juni 2025 (27,78%)	Perencanaan jumlah dan jenis sampel yang masuk diupayakan untuk dikoordinasikan dengan baik kepada pihak inspeksi, dan pejabat pengadaan	Agustus 2025	1	"- Dilakukan pendampingan kepada sarana pelayanan kesehatan (saryankes) yang belum melaporkan KTD/ESO melalui e-meso "	Agustus 2025	Dilaksanakan tanggal 4 Februari 2025 dengan target 90 fasilitas pelayanan kesehatan dan refreshment PV dalam acara Sharasehan tanggal 25 April 2025 terhadap peserta Bimtek PV tanggal 4 Februari 2025. Sampai dengan Juli 2025, sudah ada 26 fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang sudah melaporkan e-meso yang terdiri dari 23 rumah sakit, 2 PKM, 1 klinik. Capaian sd Juli 2025 (28,89%)
99	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	191 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juli	85.00	100.14	117.81%	1. Telah dilakukan sampling pangan olahan sampai dengan bulan Juni sejumlah 362 sampel dari target sampel awal 643 sampel sehingga capaian jumlah sampel sd Mei sebesar 56,29,0%	Perencanaan jumlah dan jenis sampel yang masuk diupayakan untuk dikoordinasikan dengan baik kepada pihak inspeksi, dan pejabat pengadaan	Agustus 2025	1	Perencanaan jumlah dan jenis sampel yang masuk diupayakan untuk dikoordinasikan dengan baik kepada pihak inspeksi, dan pejabat pengadaan terkait pengadaan reagen	Agustus 2025	1. Telah dilakukan sampling pangan olahan sampai dengan bulan Juli sejumlah 427 sampel dari target sampel awal 643 sampel sehingga capaian jumlah sampel sd Juli sebesar 66,4%
100	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	192 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Juli	100.00	100	100.00%	Januari ada 1 sampel KLB yang masuk dan diuji (Ikky Jeli dari Dinkes Batang) = > TMS pengawet dan pemanis. Februari ada 1 sampel KLB yang masuk dan diuji (Bahan Seblak dan mie kuning) = > MS (uji logam berat dan mikro)	Koordinasi dengan DKK jika ada kasus KLB terkait sampel yang bisa diuji oleh BBPOM di Semarang, di cek dinkes ditekankan terkait MBG didalami apakah ada KLB atau tidak?koordinasi dengan labkesda terkait rujukan keracunan dg katim pjas	Agustus 2025	1	Koordinasi dengan DKK jika ada kasus KLB terkait sampel yang bisa diuji oleh BBPOM di Semarang, di cek dinkes ditekan terkait MBG didalami apakah ada KLB atau tidak?koordinasi dengan labkesda terkait rujukan keracunan dg katim pjas	Agustus 2025	Januari ada 1 sampel KLB yang masuk dan diuji (Ikky Jeli dari Dinkes Batang) = > TMS pengawet dan pemanis. Februari ada 1 sampel KLB yang masuk dan diuji (Bahan Seblak dan mie kuning) = > MS (uji logam berat dan mikro)
101	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	193 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juli	80.00	95.79	119.74%	Pemenuhan target sampel 100.89%. Kesesuaian parameter uji 100.00%. Ketepatan pengambilan kesimpulan 100%. Ketepatan waktu pengambilan sampel 56.14%. Ketepatan waktu pelaporan 100% (cut off tgl 15 bulan berikutnya). Tindak lanjut sampel pirt 100%	Target terlalu rendah dan telah mengajukan peningkatan target melalui desk dengan Biro Perencanaan. Target yang diusulkan sebesar 92%.	Agustus 2025	1	menggunakan target baru di TW berikutnya	Agustus 2025	Pemenuhan target sampel PIRT 100,89%, Kesesuaian Parameter Uji 100%, Ketetapatan Pengambilan Kesimpulan 100%, Ketepatan waktu pengambilan sampel 56,14%, Ketepatan Waktu Pelaporan 100%, Tindak lanjut sampel PIRT 100%
102	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	194 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Juli	69.00	62.56	90.67%	Monitoring dan evaluasi TL dan CAPA sampai dengan Juni : Pelaku Usaha = rekomendasi : 233 sudah TL : 379	Desk CAPA sarana Produksi 11 Agustus 2025	Agustus 2025	1	Desk CAPA sarana Produksi Juli 2025	Agustus 2025	Monitoring dan evaluasi TL dan CAPA sampai dengan Juli : Pelaku Usaha = rekomendasi : 414 sudah TL (CAPA) : 259
103	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	195 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juli	90.00	95.73	106.37%	Penyampaian SIPT tidak lewat timeline tgl 5 (100%), sampai dengan 5 Juni keseuaian kesimpulan dan TL OT-Kos 100%. Pemeriksaan Sarana Produksi telah mencapai 69,23% (36 sarana dari target 52 sarana) IF 57,14% (4 dari target tahunan 7) IOT/UKOT/UMOT 69,23% (18 dari target tahunan 26) IKOS 78,57% (11 dari target tahunan 14) ISK 60% (3 dari target tahunan 5)	"berkoordinasi dengan pusat untuk penjadwalan inspeksi Rencana Pelatihan Stemsel di Oktober 2025"	Agustus 2025	1	sarana yang tutup telah diganti dengan sarana berbobot risiko tertinggi selanjutnya (juli)	Agustus 2025	Pemeriksaan Sarana Produksi telah mencapai 80,77% (36 sarana dari target 52 sarana) IF 57,14% (4 dari target tahunan 7) IOT/UKOT/UMOT 80,76% (21 dari target tahunan 26) IKOS 78,57% (13 dari target tahunan 14) ISK 60% (4 dari target tahunan 5) Penyampaian hasil pemriksaan melalui SIPT, sampai dengan 5 Agt kesesuaian kesimpulan dan TL Kos 100%.
104	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	196 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juli	85.00	92.03	108.27%	%ketepatan waktu 87,65%. Ketepatan tindak lanjut 75,31%.Evaluasi ketepatan grading 100%	Sesuai target	-	1	-	-	%ketepatan waktu 89,13%. Ketepatan tindak lanjut 90,22%.Evaluasi ketepatan grading 96,74%
105	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	197 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juli	96.75	104.07	107.57%	Pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi sesuai target sampai dengan Juni	Sesuai target	-	1	-	-	Pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi sesuai target sampai dengan Juli

No	Nama Balai/UPT	Sasaran Strategis	Indikator	Bulan	Target	Realisasi	Capaian	Rekomendasi I						
								Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian Rekomendasi	Status	Tindak Lanjut		Kondisi Akhir
												Rencana Aksi	Timeline Penyelesaian Rencana Aksi	
106	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	198 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juli	80.00	83.49	104.36%	Realisasi bulan Juni 10 sarana, total Jan-Juni 90 sarana (57,3%) dari target 157 sarana.	Monev sesuai target	-	1	-	-	Realisasi bulan Juli 15 sarana, total Jan-Juli 105 sarana (66,9%) dari target 157 sarana.
107	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	199 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Juli	85.87	96.39	112.25%	Pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan sampai dengan Juni sejumlah 733 iklan (54%) dari target iklan 1.353 iklan.	Monev sesuai target	-	1	-	-	Pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan sampai dengan Juli sejumlah 847 iklan (62.6%) dari target iklan 1.353 iklan.
108	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	200 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juli	54.00	57.94	107.30%	Pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi sampai dengan Juni sejumlah 56 sarana. Target pemeriksaan sarana fortifikasi sejumlah 58 sarana dan dikerjakan sampai bulan Juli 2025.	sesuai arahan	-	1	-	-	Pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi sampai dengan Juli sejumlah 62 sarana. Target pemeriksaan sarana fortifikasi sejumlah 58 sarana dan dikerjakan sampai bulan Juli 2025.
109	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	208 - (PK AWAL) Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Juli	72.87	78.8	108.14%	1. Melaksanakan dan monitoring pemenuhan ruang lingkup laboratorium TW 2, capaian 85,4 dari target 83 % 2. Melaksanakan dan monitoring pengadaan peralatan laboratorium untuk pemenuhan standar peralatan TW 2, capaian 85,8% dari target 84 % 3. Melaksanakan verifikasi metoda analisa TW 2, capaian 49,1% dari target 47 % 4. Monitoring Pemenuhan kompetensi personil TW 2, capaian 70% dari target 90 % 5. Secara keseluruhan Pemenuhan SKL TW 2 tercapai 108,1 % (capaian 78,8 % dari target TW 2 sebesar 72,87 %	"alat yang belum datang: SKL hanya butuh 2 alat, bulan lalu sudah 1, bulan agustus ini akan datag 1 lagi alat tambahan akan dipakai terus atau ditarik ke anggaran 2026"	Agustus 2025	1	1. Revisi target SKL TW 3 dan TW 4 th 2025 sudah disetujui P3OMN, nantinya akan diajukan ke Roren sebelum Timeline Revisi	Agustus 2025	1. Melaksanakan pemenuhan ruang lingkup laboratorium TW 3, Laboratorium kosmetik menambah satu ruang lingkup 2. Monitoring pengadaan peralatan laboratorium untuk meningkatan pemenuhan standar peralatan 3. Membuat jadwal verifikasi metoda analisa TW 3 dari masing-masing laboratorium 4. Melaksanakan dan monitoring Pemenuhan kompetensi personil di TW 3. telah ada penambahan kemampuan personil di Lab Obat dan Lab Kosmetik sesuai ruang lingkup
110	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	209 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Juli	86.42	87.21	100.91%	Telah dilakukan KIE bersama tokoh masyarakat sejumlah 8 titik jumlah peserta 1542, Indeks efektifitas KIE s/d juni 87,21	kegiatan yang tidak dianggarkan, gabung dengan kegiatan masyarkat atau merpat ke pemda	Agustus 2025	1	Telah dilakukan tindak lanjut atas kendala bulan April dan telah dicapai indeks efektifitas KIE lebih dari target (capaian di bulan Juli 101,3 %)	Agustus 2025	.Di bulan Juli telah dilakukan KIE bersama tokoh masyarakat sejumlah 4 titik dengan jumlah peserta 892, Indeks efektifitas KIE s/d juli 87.54 (target 86,42) capaian : 101.3%
111	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	210 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Juli	69.60	70.45	101.22%	Pada bulan Juni telah dilaksanakan monitoring penyusunan laporan kegiatan Sekilah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan, dan pengawalan terhadap sekolah intervensi tahun 2024 terhadap kontinuitas pelaksanakan PJAS aman di sekolahnya.	Melaksanakan tahap selanjutnya sertifikasi sekolah yang membudayakan keamanan pangan dan audit kantin	Agustus 2025	1	Tahap selanjutnya yaitu sertifikasi sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dan Piagam Bintang Keamanan Pangan Kantin Sekolah	Agustus 2025	Pada Bulan Juli telah dilaksanakan - monitoring kader keadaman pangan sekolah dan verifikasi sekolah dalam rangka sertifikasi sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan - sosialisasi budaya keamanan pangan melalui medsos - pengawalan terhadap sekolah intervensi 2024 dengan refresh materi melalui WAG, Sarasehan, Paman Kece - perluasan sekolah sebagai nara sumbe di MPLS SD Antonius 02. di Kab.Wonosobo (MTs Ma'arif Garung dan SDN 3 Kembaran), dan Kab. Sukoharjo (74 SMP Swasta & Negeri)
112	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	211 - Jumlah desa pangan aman	Juli	57.50	68	118.26%	Pada bulan Juni telah dilaksanakan monev di Desa Bejalen, dan Desa Kemambang	Pelaksanaan tahap selanjutnya yaitu tahap pengawalan yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2025, namun telah dilaksanakan lebih awal pada TW II	Agustus 2025	1	Pelaksanaan tahap selanjutnya yaitu tahap pengawalan yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2025, namun telah dilaksanakan lebih awal pada TW II	Agustus 2025	Pada bulan Juli telah dilaksanakan monev di Desa Asinan
113	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	212 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Juli	100.00	100	100.00%	"Pada Bulan Juni telah dilaksanakan Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar Tahap 4, Monitoring Evaluasi melalui penyusunan rencana aksi tahun 2026 dan Pengawalan Pasar Intervensi Tahun 2024 yaitu Pasar Panican, Pasar Badog Bancar dan Pasar Lengkong "	Tidak ada kendala	-	1	-	-	"1. Berdasarkan Surat dari Dir. PMPUPO No B-PM.02.01.55.07.25.510 tanggal 21 Juli 2025 tentang Penyampaian kegiatan BIS PAMAN (Bincang-bincang Seputar Pangan Aman) serta kegiatan Bimtek Replikasi Program PPABK, Pada Bulan Juli telah dilaksanaan koordinasi terhadap kabupaten/kota yang akan melakukan replikasi PPABK. antara lain Disdag Kab. Magelang, Disdag Kota Pekalongan, Disdag Kab. Rembang, Disdag Kab. Semarang, Disdag Kota Magelang, Disdag Kab. Grobogan, Disdag Kab. Pati, Disdag Kab. Pekalongan. 2. Diantara 8 Kab./Kota tersebut hanya 2 yang akan melaksanakan replikasi PPABK yaitu dari Kab. Magelang dan Kab. Semarang yang rencanakan akan dilaksanakan pada Bulan September 2025. 3. Kab./Kota yang lain belum bisa melaksanakan replikasi PPABK karena terkendala anggaran"
114	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	213 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Juli	82.50	90	109.09%	GMP tercapai 3 akan menjadi 4, kosmetik 3 akan menjadi 4 di TW 3, pangan masih kurang 6, sudah berproses evaluasi, ipcpob : 15 sertifikat	tidak ada kendala	-	1	-	-	"GMP OBA tercapai 4, kosmetik tercapai 4, pangan masih 4 yang berproses evaluasi, ipcpob terbit: 20 sertifikat Total memenuhi GMP : 28"
115	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	214 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Juli	55.00	62.86	114.29%	Telah dilakukan penyidikan terhadap 3 perkara pada bulan Mei 2025 sehingga tidak dilakukan operasi penertiban di Bulan Juni karena target TW 2 telah terpenuhi sebanyak 4 perkara	Tidak ada kendala	-	1	-	-	"Telah dilakukan penyidikan terhadap 2 perkara pada bulan Juli 2025,dari target pada TW 3 adalah 3 perkara. Perkembangan perkara 1 mencapai tahap P21 "
116	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	215 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Juli	50.00	50	100.00%	sudah dilakukan input akun yang diajukan takedown dan laporan profiliing sebelum tenggat waktu tanggal 25 di tiap bulannya; jumlah akun yang diajukan takedown bulan Juni adalah 51 akun dan profiling 3 akun komoditi kosmetik 1akun komoditi Suplemen Kesehatan	Tidak ada kendala	-	1	-	-	sudah dilakukan input akun yang diajukan takedown dan laporan profiliing sebelum tenggat waktu tanggal 25 di tiap bulannya; jumlah akun yang diajukan takedown bulan Juli adalah 62 akun dan profiling 4 akun komoditi kosmetik
117	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	189 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Agustus	91.50	99.86	109.14%	1. Telah dilakukan sampling sediaan farmasi sampai dengan bulan Juli sejumlah 925 sampel (Obat 277 sampel, OBA 209 sample, SK 52 sampel dan kosmetik 386 sampel). Capaian jumlah sampel sd Juli sebesar 61.99% dari target awal 1492 sampel. 2. Telah dilaksanakan pengujian sampel Farmasi sd Bulan Juli (sampel Rutin Semarang) Obat : 254 sampel, OTSK dan kuasi : 350 sampel, dan kosmetik : 490 sampel .	disesuaikan dengan kondisi lapangan yang ada	Sep-25	1	disesuaikan dengan kondisi lapangan yang ada	Sep-25	1. Telah dilakukan sampling sediaan farmasi sampai dengan bulan Agustus sejumlah 1.103 sampel (Obat 328 sampel, OBA 249 sample, SK 62 sampel dan kosmetik 464 sampel). Capaian jumlah sampel sd Agustus sebesar 73.93% dari target awal 1492 sampel. 2. Telah dilaksanakan pengujian sampel Farmasi sd Bulan Agustus(sampel Rutin Semarang) Obat : 296 sampel, OTSK dan kuasi : 412 sampel, dan kosmetik : 582 sampel
118	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	191 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Agustus	91.00	94.33	103.66%	1. Telah dilakukan sampling pangan olahan sampai dengan bulan Juli sejumlah 427 sampel dari target sampel awal 643 sampel sehingga capaian jumlah sampel sd Juli sebesar 66,4%	Tidak ada kendala yang berarti pada proses sampling	Sep-25	1	-	Sep-25	1. Telah dilakukan sampling pangan olahan sampai dengan bulan Agustus sejumlah 490 sampel dari target sampel 643 sampel sehingga capaian jumlah sampel sd Agustus sebesar 76,2%

No	Nama Balai/UPT	Sasaran Strategis	Indikator	Bulan	Target	Realisasi	Capaian	Rekomendasi I						
								Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian Rekomendasi	Status	Tindak Lanjut		Kondisi Akhir
												Rencana Aksi	Timeline Penyelesaian Rencana Aksi	
119	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	192 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Agustus	100.00	100	100.00%	Januari ada 1 sampel KLB yang masuk dan diuji (Ikky Jeli dari Dinkes Batang) = > TMS pengawet dan pemanis. Februari ada 1 sampel KLB yang masuk dan diuji (Bahan Seblak dan mie kuning) = > MS (uji logam berat dan mikro)	Tidak selalu ada kasus dan sampel KLB setiap bulannya	Sep-25	1	Koordinasi dengan DKK jika ada kasus KLB terkait sampel yang bisa diuji oleh BBPOM di Semarang, di cek dinkes ditekankan terkait MBG didalami apakah ada KLB atau tidak?koordinasi dengan labkesda terkait rujukan keracunan dg katim pjas	Sep-25	'- Januari ada 1 sampel KLB KP (Ikky Jeli dari Dinkes Batang) = > TMS pengawet dan pemanis. - Februari ada 1 sampel KLB KP (Bahan Seblak dan mie kuning) = > MS (uji logam berat dan mikro) - Agustus ada 1 sampel KLB KP yang masuk dan diuji (Susu KUN/ Minuman mengandung Susu dan Jus Buah Rasa Stroberi) = > MS (uji logam berat dan mikro)
120	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	193 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Agustus	92.00	95.61	103.92%	Pemenuhan target sampel PIRT 100,89%, Kesesuaian Parameter Uji 100%, Ketetapatan Pengambilan Kesimpulan 100%, Ketepatan waktu pengambilan sampel 56,14%, Ketepatan Waktu Pelaporan 100%, Tindak lanjut sampel PIRT 100%	Target terlalu rendah dan telah mengajukan peningkatan target melalui desk dengan Biro Perencanaan. Target yang diusulkan sebesar 92%.	Sep-25	1	menggunakan target baru di TW berikutnya	Sep-25	Pemenuhan target sampel PIRT 100,89%, Kesesuaian Parameter Uji 100%, Ketetapatan Pengambilan Kesimpulan 100%, Ketepatan waktu pengambilan sampel 56,14%, Ketepatan Waktu Pelaporan 100%, Tindak lanjut sampel PIRT 100%
121	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	194 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Agustus	73.00	79.55	108.97%	Monitoring dan evaluasi TL dan CAPA sampai dengan Juli : Pelaku Usaha = rekomendasi : 414 sudah TL (CAPA) : 259	"Dilakukan Monev secara berkala dan mengingatkan sarana untuk membuat CAPA disokumentasikan semua capa, dan upaya disampaikan."	Sep-25	1	'- Desk CAPA pada tanggal 11 Agustus 2025 diikuti oleh 61 sarana (sarana Produksi Pangan, OBA dan Kosmetika), diberikan juga Bimtek IPCPPOB untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam menerapkan GMP di sarana Produksi - Dilakukan Monev melalui Kartu Kendali Inspeksi	Sep-25	Monitoring dan evaluasi TL dan CAPA sampai dengan Agustus : Pelaku Usaha = rekomendasi : 494 sudah TL (CAPA) : 292 Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor 100%
122	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	195 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Agustus	90.75	94.77	104.43%	Pemeriksaan Sarana Produksi telah mencapai 80,77% (36 sarana dari target 52 sarana) IF 57,14% (4 dari target tahunan 7) IOT/UKOT/UMOT 80,76% (21 dari target tahunan 26) IKOS 78,57% (13 dari target tahunan 14) ISK 60% (4 dari target tahunan 5) Penyampaian hasil pemriksaan melalui SIPT, sampai dengan 5 Agt kesesuaian kesimpulan dan TL Kos 100%.	pemeriksaan IF menunggu jadwal pusat, dan menunggu kesiapanan industri dalam rangka sertifikasi	Sep-25	1	Telah berkoordinasi, pusat belum menjadwalkan inspeksi sertifikasi	Sep-25	Pemeriksaan Sarana Produksi telah mencapai 88,46% (46 sarana dari target 52 sarana) IF 71,43% (5 dari target tahunan 7) IOT/UKOT/UMOT 80,76% (21 dari target tahunan 26) IKOS 107,14% (15 dari target tahunan 14) ISK 100% (5 dari target tahunan 5) Penyampaian hasil pemeriksaan telah dilaporkan melalui SIPT
123	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	196 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Agustus	85.00	92.23	108.51%				0			
124	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	197 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Agustus	96.75	99.99	103.35%				0			
125	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	198 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Agustus	80.00	78.8	98.50%				0			
126	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	199 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Agustus	91.00	97.31	106.93%				0			
127	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	200 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Agustus	54.00	57.94	107.30%				0			
128	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	209 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Agustus	86.42	87.21	100.91%	.Di bulan Juli telah dilakukan KIE bersama tokoh masyarakat sejumlah 4 titik dengan jumlah peserta 892, Indeks efektifitas KIE s/d juli 87.54 (target 86,42) capaian : 101,3%	Tidak ada kendala. Dari 35 titik yg belum terlaksana adalah sejumlah 3 titik (2 titik dg Tomas ibu Nafa dan 1 titik dg tomas bapak Edy. Informasi dari Tenaga ahli, kemungkinan di akhir Agustus akan dilaksanakan.	Sep-25	1	Koordinasi intensif dengan tenaga ahli anggota dewan.	Sep-25	.Di bulan Agustus tidak ada KIE dengan tokoh masyarakat, tetapi KIE rutin dengan sekolah dan lintas sektor. Untuk KIE dg anggota DPR tidak ada kegiatan, meskipun di awal bulan telah di konfirmasi pada tenaga ahli Dewan . Indeks efektifitas KIE di bulan Agustus adalah : 88,0 capaian : 101,8 %
129	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	210 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Agustus	72.80	76.7	105.36%	Pada Bulan Juli telah dilaksanakan - monitoring kader keadaman pangan sekolah dan verifikasi sekolah dalam rangka sertifikasi sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan - sosialisasi budaya keamanan pangan melalui medsos - pengawalan terhadap sekolah intervensi 2024 dengan refresh materi melalui WAG, Sarasehan, Paman Kece - perluasan sekolah sebagai nara sumbe di MPLS SD Antonius 02, di Kab.Wonosobo (MTs Ma'arif Garung dan SDN 3 Kembaran), dan Kab. Sukoharjo (74 SMP Swasta & Negeri)	Tidak ada kendala, tahapan telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan perencanaan	Sep-25	1	Pelaksanaan tahap selanjutnya sertifikasi ulang sekolah intervensi 2024 dan PBKPKS	Sep-25	Pada Bulan Agustus telah dilaksanakan monitoring dan sertifikasi kepada 17 sekolah intervensi. Dilakukan penilaian dokumen dan kantin sekolah. Pada Bulan September akan dilakukan : 1. penentuan sekolah yang mendapatkan sertifikat sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan 2. penetuan kantin sekolah yang mendapatkan PBKPKS 3. sertifikasi ulang terhadap 6 sekolah intervensi tahun 2024 (yang belum mendapatkan sertifikat di tahun 2024
130	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	211 - Jumlah desa pangan aman	Agustus	67.50	68	100.74%	Pada bulan Juli telah dilaksanakan monev di Desa Asinan	Tidak ada kendala, tahap monev Desa Asinan telah dilaksanakan sesuai perencanaan	Sep-25	1	Pelaksanaan tahap selanjutnya yaitu tahap pengawalan yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2025, namun telah dilaksanakan lebih awal pada TW II	Sep-25	Pada bulan Agustus telah dilaksanakan pengawalan kepada Desa Kenteng Kecamatan Kab. Semarang dan Desa Randusari Kecamatan Prambanan dengan melaksanakan Bimtek Kader Keamanan Pangan dalam rangka pengimbasan serta pembentukan kader baru oleh Desa Kenteng dan Desa Randusari, selain itu pembentukan kader keamanan pangan ini juga menjadi bagian dari 80 aksi nyata BBPOM Semarang dengan pembentukkan 80 kader keamanan pangan Gumregah
131	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	212 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Agustus	100.00	100	100.00%				0			
132	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	213 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Agustus	84.33	92.5	109.69%				0			
133	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	214 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Agustus	65.00	66.07	101.65%				0			
134	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	215 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Agustus	50.00	50	100.00%				0			
135	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	465 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Agustus	91.00	100	109.89%				0			

No	Nama Balai/UPT	Sasaran Strategis	Indikator	Bulan	Target	Realisasi	Capaian	Rekomendasi I						
								Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian Rekomendasi	Status	Tindak Lanjut		Kondisi Akhir
												Rencana Aksi	Timeline Penyelesaian Rencana Aksi	
136	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	467 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Agustus	78.80	78.8	100.00%	1. Melaksanakan pemenuhan ruang lingkup laboratorium TW 3, Laboratorium kosmetik menambah satu ruang lingkup 2. Monitoring pengadaan peralatan laboratorium untuk meningkatan pemenuhan standar peralatan 3. Membuat jadwal verifikasi metoda analisa TW 3 dari masing-masing laboratorium 4. Melaksanakan dan monitoring Pemenuhan kompetensi personil di TW 3, telah ada penambahan kemampuan personil di Lab Obat dan Lab Kosmetik sesuai ruang lingkup	"alat yang belum datang: SKL hanya butuh 2 alat, bulan lalu sudah 1, satu alat yang lain akan datang bulan Oktober 2025 "	Sep-25	1	"alat yang belum datang: SKL hanya butuh 2 alat, bulan lalu sudah 1, bulan agustus ini akan datag 1 lagi alat tambahan akan dipakai terus atau ditarik ke anggaran 2026"	Sep-25	1. Melaksanakan pemenuhan ruang lingkup laboratorium TW 3, Laboratorium kosmetik menambah satu ruang lingkup 2. Monitoring pengadaan peralatan laboratorium untuk meningkatan pemenuhan standar peralatan 3. Monitoring pelaksanaan verifikasi metoda analisa TW 3 dari masing-masing laboratorium 4. Melaksanakan dan monitoring Pemenuhan kompetensi personil di TW 3, telah ada penambahan kemampuan personil di Lab Obat dan Lab Kosmetik sesuai ruang lingkup 5. Capaian SKL sd Agustus 104,2 %
137	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	189 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	September	91.50	100	109.29%				0			
138	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	191 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	September	91.00	94.44	103.78%	1. Telah dilakukan sampling pangan olahan sampai dengan bulan Agustus sejumlah 490 sampel dari target sampel 643 sampel sehingga capaian jumlah sampel sd Agustus sebesar 76,2%	sampel tidak sesuai pedoman sampling	Oktober 2025	1	koordinasi dg PIC diswadar dan pusdatin: di cek sudah lengkap cm belum di tulis di SIPT karena tidak ada parameternya... dan nanti akan dilaporkan kembali	Oktober 2025	1. Telah dilakukan sampling pangan olahan sampai dengan bulan September sejumlah 550 sampel dari target sampel 643 sampel sehingga capaian jumlah sampel sd September sebesar 85.54%
139	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	192 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	September	100.00	100	100.00%				0			
140	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	193 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	September	92.00	95.61	103.92%				0			
141	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	194 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	September	76.00	89.75	118.09%	"Monitoring dan evaluasi TL dan CAPA sampai dengan Agustus : Pelaku Usaha = rekomendasi : 494 sudah TL (CAPA) : 292 Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor 100%"	Sarana Produksi masih banyak yang belum menyampaikan CAPA	Oktober 2025	1	"Dilakukan Monev secara berkala dan mengingatkan sarana untuk membuat CAPA disokumentasikan semua capa, dan upaya disampaikan."	Oktober 2025	"Monitoring dan evaluasi TL dan CAPA sampai dengan September = : Pelaku Usaha = rekomendasi : 566 sudah TL (CAPA) : 450 Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor 100%"
142	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	195 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	September	90.75	94.4	104.02%	"Pemeriksaan Sarana Produksi telah mencapai 88,46% (46 sarana dari target 52 sarana) IF 71,43% (5 dari target tahunan 7) IOT/UKOT/UMOT 80,76% (21 dari target tahunan 26) IKOS 107,14% (15 dari target tahunan 14) ISK 100% (5 dari target tahunan 5) Penyampaian hasil pemeriksaan telah dilaporkan melalui SIPT "	pemeriksaan 1 IF menunggu jadwal pusat, dan menunggu kesiapanan industri dalam rangka sertifikasi	Oktober 2025	1	"telah berkoordinasi dengan pusat untuk penjadwalan inspeksi pada Oktober Pelatihan Produk Biologi Steril telah diselenggarakan oleh pusat pada September 2025, diikuti oleh 2 inspektur "	Oktober 2025	"Pemeriksaan Sarana Produksi telah mencapai 94% (49 sarana dari target 52 sarana) IF 71,43% (5 dari target tahunan 7) IOT/UKOT/UMOT 96% (25 dari target tahunan 26) IKOS 107,14% (15 dari target tahunan 14) ISK 100% (5 dari target tahunan 5) Penyampaian hasil pemeriksaan telah dilaporkan melalui SIPT "
143	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	196 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	September	85.00	91.04	107.11%				0			
144	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	197 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	September	96.75	99.89	103.25%				0			
145	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	198 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	September	80.00	80.38	100.48%				0			
146	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	199 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	September	91.00	96.89	106.47%				0			
147	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	200 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	September	54.00	57.94	107.30%				0			
148	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	209 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	September	86.42	88.01	101.84%				0			
149	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	210 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	September	86.00	94.6	110.00%				0			
150	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	211 - Jumlah desa pangan aman	September	67.50	90	133.33%				0			
151	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	212 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	September	100.00	100	100.00%	Pada bulan Agustus telah dilaksanakan Sosialisasi Pasar Pangan Aman Berbasisi Komunitas (PPABK) ke Pasar Pagi Kab Grobogan sebagai tindak lanjut dari replikasi PPABK pada tanggal 14 Agustus 2025	Untuk pembentukan pasar replikasi di Kab./Kota lainnya terkendala tidak tersedia anggaran dari Disdag Kab./kota setempat	Oktober 2025	0	masih menunggu informasi lebih lanjut	Oktober 2025	Pada bulan September telah dilaksanakan Bimtek dan Penyuluhan dalam rangka replikasi Pasar Pangan Aman Berbasisi Komunitas (PPABK) ke Pasar Tempuran Kab. Magelang pada tanggal 17 September 2025
152	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	213 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	September	88.33	92.68	104.92%				0			
153	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	214 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	September	75.00	76.07	101.43%				0			
154	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	215 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	September	50.00	50	100.00%				0			
155	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	465 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	September	91.00	100	109.89%				0			
156	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	467 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	September	82.80	85.2	102.90%	"1. Melaksanakan pemenuhan ruang lingkup laboratorium TW 3, Laboratorium kosmetik menambah satu ruang lingkup 2. Monitoring pengadaan peralatan laboratorium untuk meningkatan pemenuhan standar peralatan 3. Monitoring pelaksanaan verifikasi metoda analisa TW 3 dari masing-masing laboratorium 4. Melaksanakan dan monitoring Pemenuhan kompetensi personil di TW 3, telah ada penambahan kemampuan personil di Lab Obat dan Lab Kosmetik sesuai ruang lingkup 5. Capaian SKL sd Agustus 104,2 %"	RL Obat yg ditargetkan TW 3,akan digeser ke TW 4 karena sampel sulit ditemukan di pasaran (asam fusidat atau fenilefrin tetes mata)	Oktober 2025	1	Monev pemenuhan sesuai target	Oktober 2025	"Capaian pemenuhan SKL sd TW 3 adalah : 85,2 % dari target 82,8 %, atau tercapai 102,9 %, dengan rincian : 1. Pemenuhan ruang lingkup laboratorium : 85,9 % dari target 84 % 2. Pemenuhan standar peralatan : 86 % dari target 85 % 3. Pemenuhan kompetensi personil : 100% dari target 100 % 4. Pemenuhan metoda analisa yang terverifikasi : 50,6 % dari target 48 %"